

# MENJAGA BENTENG KEBINEKHAAN DI SEKOLAH



Studi Kebijakan OSIS  
di Kota Padang, Kab. Cirebon,  
Kab. Sukabumi, Kota Surakarta,  
Kota Denpasar, dan Kota Tomohon

**MAARIF** *Institute*  
for Culture and Humanity



MENJAGA  
BENTENG  
KEBINEKAAAN  
DI SEKOLAH

*Studi Kebijakan OSIS di Kota Padang,  
Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi,  
Kota Surakarta, Kota Denpasar,  
dan Kota Tomohon.*

**MENJAGA BENTENG KEBINEKAAN DI SEKOLAH: Studi Kebijakan OSIS di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon.**

374 halaman, xiv, 175 x 250 mm

**Cetakan I, Januari 2018**

**Pembaca Ahli:** Donni Koesoema A, M. Alie Humaedi, Muhd. Abdullah Darraz

**Konsultan Ahli:** Zuli Qodir

**Tim Penulis:** Abdul Azis Muslim, Anis F. Fuadah, Benni Setiawan, M. Hafidz Ghazali, Nikmatullah Syarif, Saefudin Zuhri

**Kontributor:** Armi Tubagus, Hadiansyah Yudistira, Jajuli, Koidah

**Editor:** Khelmy K. Pribadi, Pipit Aidul Fitriyana

**Tata Letak:** Harhar Muharam

**Cover:** Zulkarnaen

**Disusun dan diterbitkan oleh:**

MAARIF Institute for Culture and Humanity

Jl. Tebet Barat Dalam II No. 6, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan 12810

Telp. : 021-83794554

Email : [maarif@maarifinstitute.org](mailto:maarif@maarifinstitute.org)

Website : [www.maarifinstitute.org](http://www.maarifinstitute.org)

**Dengan dukungan:**

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta & United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia.

Diterbitkan sebagai bagian Program CONVEY. Sebuah program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi pendidikan agama di sekolah-sekolah di Indonesia untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi serta melawan adanya kecenderungan ekstremisme yang bernuansa kekerasan, mencegah penyebaran sikap ekstrem dan perilaku kekerasan, serta radikalisme di sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya, serta memperkuat keterlibatan siswa dan guru dalam melawan penyebaran sikap ekstrem, perilaku kekerasan dan radikalisme.

**ISBN : 978-602-61010-1-3**

# MENJAGA “BENTENG” KEINDONESIAAN DI SEKOLAH

## *Pengantar Direktur Eksekutif MAARIF Institute*

Radikalisme di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menasar kalangan generasi muda. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkonfirmasi fenomena ini. Riset MAARIF Institute (2011), Setara Institute (2015), dan Wahid Foundation (2016) menunjukkan bahwa kelompok-kelompok radikal telah secara massif melakukan penetrasi pandangan radikal di kalangan generasi muda melalui institusi pendidikan. Riset MAARIF Institute misalnya memetakan adanya 3 pintu masuk utama, bagaimana kelompok-kelompok radikal melakukan penetrasi di lingkungan institusi sekolah setingkat SMA. Kegiatan ekstrakurikuler, peran guru dalam proses belajar-mengajar, dan melalui kebijakan sekolah yang lemah dalam mengontrol masuknya radikalisme di sekolah.

Alih-alih melakukan pembendungan penetrasi radikalisme, seringkali kebijakan sekolah malah terkesan permisif terhadap infiltrasi radikalisme di sekolah. Indikasinya terlihat pada mudahnya pihak sekolah melibatkan aktor-aktor kelompok radikal dalam proses kegiatan di sekolah. Pada umumnya mereka seringkali dilibatkan sebagai mentor dalam kegiatan ekstrakurikuler tertentu yang berbasis pada aktivitas keagamaan.

Dalam tesis yang dikembangkan oleh kami, kebijakan sekolah, terutama kebijakan tentang kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu aspek penting, bahkan ia merupakan sisi terpenting bagaimana komunitas sekolah dapat menghadang arus radikalisme yang masuk ke sekolah. Bukan saja bisa diarahkan untuk melakukan “perlawanan” terhadap gelombang radikalisme, lebih jauh, kebijakan sekolah semestinya bisa menjadi pintu utama untuk mengembangkan kehidupan sekolah yang memiliki perspektif kebinekaan, demokratis, dan toleran.

Sepanjang tahun 2017, MAARIF Institute telah melakukan pemetaan dalam bentuk penelitian kualitatif terkait sejauh mana kebijakan internal sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler mampu menjadi “benteng” bagi berbagai serangan radikalisasi dan propaganda anti-kebinekaan dan intoleransi di sekolah. Penelitian ini dilakukan di 11 kota/kabupaten, yakni di Kota Banda Aceh, Kota Padang, Kab. Lebak, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kab. Cirebon, Kota Surakarta, Kota Denpasar, Kota Mataram, Kota Makassar, dan Kota Tomohon.

Buku ini merekamkan hasil penelitian di enam kota terakhir (Kota Padang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon) yang dilakukan pada medio September-November 2017 dengan melibatkan lebih dari 450 orang *stakeholder* kunci di tingkat lokal, terutama di lingkungan sekolah, baik Sekolah Menengah Atas maupun Madrasah Aliyah.

Ada banyak temuan penting yang bisa dijadikan perhatian utama, baik itu sebagai bagian dari praktik-praktik terbaik (*best practices*) dalam upaya memperkuat kehidupan kebinekaan di sekolah, sekaligus membentengi sekolah dari penetrasi kelompok radikal, maupun berbagai fenomena memprihatinkan yang menggambarkan bagaimana kebijakan internal sekolah sangat lemah dalam menghadang penetrasi radikalisme.

Dalam hal yang terakhir, riset ini menemukan satu fenomena umum di internal sekolah, yakni masih rendahnya inisiasi pemangku kebijakan sekolah dalam merumuskan kebijakan khusus dalam upaya menghadang radikalisme di sekolah. Di beberapa sekolah, tentu sudah ada upaya yang mengarah kepada hal tersebut, namun upaya tersebut jauh tidak berimbang dengan massifnya gerakan radikal yang masuk ke sekolah.

Rendahny sikap kritis dan kurangnya pemahaman para pemangku kebijakan di sekolah, terutama kepala sekolah terkait peta gerakan radikalisme di luar sekolah, juga telah membuat komunitas sekolah semakin rentan terhadap infiltrasi gerakan radikal yang datang dari luar sekolah. Pihak sekolah kerap tidak menyadari dalam beberapa agenda internal yang mereka lakukan, mereka seringkali mengundang narasumber yang memiliki pandangan radikal yang tidak sesuai dengan visi pendidikan di sekolah, diantaranya dilakukan dalam program pengajian bulanan di sekolah.

Dalam riset ini kami juga menemukan beberapa praktik terbaik, meskipun awalnya ini berasal dari kelompok masyarakat sipil di luar sekolah.

Di Kabupaten Cirebon misalnya, kelompok masyarakat sipil keagamaan moderat yang berasal dari pesantren merasa memiliki tanggungjawab moral untuk terlibat dalam upaya memperkuat kehidupan kebinekaan dan demokrasi di sekolah-sekolah umum negeri. Mereka aktif melakukan pendampingan dan mendeklarasikan organisasi pelajar moderat untuk menandingi jaringan kelompok radikal yang ada di sekolah.

Di daerah lain di Kabupaten Cirebon, ditemukan adanya upaya memperkuat ikatan kebinekaan dengan melakukan kegiatan kunjungan ke komunitas yang berbeda. Melalui kegiatan tersebut, sekolah berupaya memperkenalkan siswa tentang realitas kebinekaan secara nyata. Secara terjadwal, sekolah menugaskan siswa untuk berkunjung ke tempat ibadah agama lain dan mengenalnya secara langsung. Menurutnya, kunjungan ke sejumlah tempat ibadah agama lain merupakan satu-satunya cara yang paling realistis dalam memperkenalkan kebinekaan.

Hal terbaik lain yang perlu dicatat disini adalah adanya kegiatan karnaval kebinekaan yang diinisiasi oleh pengurus OSIS di sebuah SMAN di Kab. Cirebon. Upaya ini dilakukan untuk menyemai kehidupan kebinekaan di sekolah. Karnaval ini berupa keharusan untuk menggunakan pakaian pahlawan nasional dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya yang majemuk di Indonesia. Dengan demikian, siswa mengerti bahwa Indonesia dibangun bukan hanya oleh satu agama dan suku tertentu, tapi oleh semua warga dengan latar belakang agama dan suku yang berbeda-beda.

Beberapa temuan terakhir ini bagi kami telah memberikan sinyal optimisme tentang upaya memperkuat imunitas komunitas sekolah dalam melawan berbagai ideologi radikal yang masuk ke lingkungan institusi pendidikan.

Buku ini merekam banyak temuan dari hasil riset yang kami lakukan selama periode September-November 2017 lalu. Kami berharap catatan-catatan penting yang terkandung di dalam buku ini dapat memberikan peta kebijakan internal sekolah, terutama terkait dengan kebijakan kegiatan ekstrakurikuler dalam mengokohkan kehidupan kebinekaan yang lahir dari dunia sekolah. Bagi kami, kegiatan ekstrakurikuler seharusnya bisa menjadi semacam “benteng” yang di satu sisi dapat memfilter berbagai paham radikal agar tidak masuk merangsek dalam kehidupan sekolah, sekaligus juga diharapkan bisa menjadi taman bagi tumbuh-kembangnya keragaman di sekolah.

Untuk itu, atas nama MAARIF Institute saya menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya terutama kepada *Project Management Unit (PMU) CONVEY* Indonesia yang dikelola oleh Pusat pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UNDP, yang telah memungkinkan program penelitian ini bisa terlaksana dengan menghasilkan output sesuai dengan target. Terimakasih juga kami sampaikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Agama RI, yang secara tidak langsung terlibat dalam proses penelitian ini, terutama telah memberikan rekomendasi sehingga memudahkan tim peneliti untuk mengambil data (melakukan wawancara dan FGD) di kalangan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah.

Tentu terimakasih juga saya sampaikan kepada tim peneliti sekaligus kontributor dari buku ini, yang telah berjuang melakukan pengambilan data dan menuliskan hasil penelitiannya sehingga menjadi buku yang dapat dibaca khalayak, di antaranya adalah Abdul Aziz Muslim, Anis Fuadah, Benny Setiawan, Hafizh Ghozali, Nikmatullah, dan Saefuddin Zuhri. Penelitian ini sendiri dikoordinir oleh Pipit Aidul Fitriyana. Kepada Tim Pembaca Ahli yang telah banyak memberi masukan penting dan mematangkan konten buku ini, sehingga buku ini dapat dikonsumsi secara luas oleh publik, diantaranya adalah Dr. M. Alie Humaidi, Donni Koesoema A., M.Ed, dan Dr. Zuly Qodir. Terakhir kepada kawan-kawan MAARIF Institute yang telah bekerja keras memuluskan berbagai proses selama program ini berlangsung. Buku ini merupakan salah satu karya gemilang lain yang menjadi bukti atas kerja keras dan keringat yang telah kawan-kawan torehkan.

Akhirnya, saya sampaikan selamat membaca dan menikmati buku ini kepada khalayak publik. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menginspirasi komunitas sekolah di Indonesia dalam upaya memperkuat kebinekaan di lingkungannya masing-masing.

Jakarta, 29 Januari 2018

**Muhammad Abdullah Darraz**

Direktur Eksekutif

# KATA PENGANTAR

Setidaknya sejak satu dasawarsa terakhir ini, Indonesia menyaksikan tumbuhnya paham-paham keagamaan ekstrem bernuansa kekerasan dan radikalisme. Kecenderungan ini ditandai dengan terjadinya sejumlah serangan teroris di berbagai tempat di negeri ini. Konflik kekerasan yang berhubungan dengan kekerasan berbasis agama dan intoleransi juga terus meningkat. Dengan lebih dari 200 kasus kekerasan berbasis agama setiap tahunnya, isu violent extremism bisa dibilang masih menjadi masalah serius bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia.

Tumbuhnya radikalisme bernuansa agama di dunia pendidikan yang melibatkan generasi muda juga perlu mendapat perhatian khusus. Survei Nasional tentang “Sikap Keberagamaan Gen Z” yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) pada 2017, menunjukkan bahwa pada level opini, siswa cenderung memiliki pandangan keagamaan yang intoleran, opini radikal (58,5%), opini intoleransi internal (51,1%), dan opini intoleransi eksternal (34,3%). Dari sisi aksi, siswa memiliki perilaku keagamaan yang cenderung moderat/toleran, aksi radikal 7%, dan aksi intoleransi eksternal 17,3%. Namun pada aksi intoleransi internal komunitas Islam, cenderung lebih tinggi, yaitu 34,1%.

Sejumlah faktor ditengarai menjadi penyebab yang menyumbangkan tumbuhnya kecenderungan pandangan keagamaan yang intoleran dan radikal di atas ini. Salah satu yang paling langsung adalah tidak adanya dorongan untuk menggunakan perangkat kelembagaan sekolah, khususnya peran OSIS-untuk melibatkan diri dalam upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk membendung radikalisme di sekolah. Di samping itu, melalui kekuatan kelembagaan tadi dan program-program kreatif yang diciptakan, sekolah juga belum terdorong untuk mengimplementasikan sejumlah kebijakan tentang OSIS yang boleh jadi sangat efektif menangkal bahaya radikalisme dan intoleransi di internal sekolah.

Pada 2017, PPIM bekerjasama dengan MAARIF Institute melakukan semacam penelitian assessment dan diteruskan dengan program advokasi kebijakan terkait OSIS. Kerjasama ini sendiri merupakan bagian dari proyek *Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism*

in Indonesia (CONVEY), atas bantuan dana dari United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. Proyek ini berupaya menangani masalah ekstremisme bernuansa kekerasan dan radikalisme melalui pendidikan agama. Tujuan kerjasama ini dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang lebih serius untuk memaksimalkan fungsi OSIS agar bisa menjadi aktor kunci penjaga kebinekaan di sekolah.

Untuk tujuan ini, telah dilakukan beberapa aktivitas. Di antaranya ada riset tentang potensi ekstremisme, radikalisasi dan intoleransi di tubuh OSIS; asesmen kebijakan tingkat pusat dan daerah yang terkait dengan dan memengaruhi program OSIS; mencari praktik-praktik terbaik pengelolaan OSIS di sekolah, serta menyusun policy brief.

Buku sederhana ini bisa dikatakan sebagai upaya merekam hasil penelitian yang dilakukan dan praktik-praktik terbaik pengelolaan OSIS di sekolah. Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa, potensi tumbuhnya pandangan-pandangan keagamaan yang intoleran di lingkungan siswa-siswi di sekolah sungguh-sungguh ada. Meski demikian, di beberapa sekolah menunjukkan adanya peran dari kelompok moderat seperti kelompok-kelompok siswa sekolah yang tergabung dalam organisasi civil society semisal NU dan Muhammadiyah terhadap infiltrasi yang dilakukan oleh kelompok radikal.

Mewakili teman-teman yang tergabung dalam Project Management Unit (PMU), Countering Violence Extremism for Youth (CONVEY), kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada MAARIF Institute atas kerjasama yang dilakukan. Selamat membaca dan menikmati. Semoga buku ini dapat memberi manfaat dan menghadirkan inspirasi dalam upaya bersama menghalau ekstremisme bernuansa kekerasan dan radikalisme di tanah air. Kami percaya bahwa, radikalisme di Indonesia akan benar-benar tidak bisa hidup ketika radikalisme ideologi kekerasan menjadi perhatian semua orang.

Tangerang Selatan, 31 Januari 2018

Ali Munhanif dan Jajang Jahroni  
PMU CONVEY  
PPIM UIN Jakarta-UNDP

# DAFTAR ISI

<b>Pengantar Direktur Eksekutif MAARIF Institute .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>ix</b>
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
Sekolah Menengah sebagai Arena Radikalisme .....	5
<b>1. Surakarta.....</b>	<b>15</b>
A. Gambaran Umum Lokasi.....	15
1. Profil Sekolah.....	15
a. SMAN 1 dan SMAN 3 Surakarta.....	15
b. SMAN 5 dan SMAN 6 Surakarta.....	17
c. MAN 1 dan MAN 2 Surakarta .....	19
1). Latar Belakang Guru SMAN dan MAN Surakarta .....	21
2). Struktur Ruang Sekolah .....	22
2. Anatomi Organisasi di Sekolah.....	24
a. Mekanisme Suksesi .....	25
b. Struktur OSIS.....	26
c. Kegiatan OSIS .....	29
3. Peta Jejaring.....	30
a. Aktor Internal.....	30
b. Aktor Eksternal .....	32
4. Karakter Masyarakat, Konteks Sosial Budaya.....	34
a. Profil Kota Surakarta.....	34
b. Aktivitas Keagamaan .....	34
c. Kelompok-Kelompok Ormas dan Partai Politik.....	37
d. Karakter Budaya dan Kearifan Lokal .....	37
B. Temuan Hasil.....	38
1. Ekskul di Pesimpangan Jalan: Antara Isu dan Realitas (Fenomena Radikalisme di Kalangan Siswa dan Organisasi Kesiswaan) .....	38
2. Syariat Islam, Khilafah Islamiyah, dan Pancasila (Kuasa Negara yang Terlupakan).....	41
3. Mereka yang rentan di Tengah yang Bertahan (Hubungan Sosial Kegamaan).....	47
a. Kepemimpinan Non-Muslim .....	52
b. Pandangan terhadap Liyan.....	54
4. Mencari Model Ketahanan dari Kasus-kasus di Sekolah.....	59
5. Internalisasi Nilai Kebhinekaan, Transmisi dan Penerjemahan Nilai .....	63

<b>2. Sukabumi</b> .....	67
A. Gambaran Wilayah Penelitian Kab. Sukabumi.....	67
1. Potensi Geografis.....	67
2. Peta Demografi dan Agama.....	69
3. Sosial Ekonomi dan Pendidikan.....	71
4. Politik dan Pemerintahan.....	74
5. Subjek dan Dinamika Penelitian.....	76
B. Profil Sekolah.....	77
1. SMAN 1 Sukaraja.....	77
2. SMAN 1 Cisaat.....	80
3. SMAN 1 Cikembar.....	83
4. SMAN 1 Jampang Kulon.....	86
5. MAN 1 Sukabumi (Cibadak).....	89
6. MAN 3 Sukabumi (Surade).....	92
C. Temuan Hasil Penelitian.....	95
1. Ekskul di Pesimpangan Jalan: Antara Isu dan Realitas (Fenomena Radikalisme di Kalangan Siswa dan Organisasi Kesiswaan).....	95
a. Pemahaman dan Referensi Keagamaan Siswa.....	107
2. Kuasa Negara yang Terlupakan (Implementasi Permendikbud dan Aturan-aturan).....	108
a. Implementasi Permendikbud No. 39 Tahun 2008.....	109
b. Implementasi Permendikbud No. 23 Tahun 2015.....	112
c. Implementasi Perda terkait Agama dan Pendidikan.....	114
3. Mereka yang Rentan di Tengah yang Bertahan (Daya Tahan dan Strategi Sekolah dalam Menghadapi Isu dan Infiltrasi Gerakan Radikal).....	116
4. Internalisasi Nilai Kebinekaan dan Kebangsaan.....	117
5. Mencari Model Ketahanan dari Kasus-Kasus di Sekolah.....	118
a. Pesantren Sekolah.....	118
b. Ekstrakurikuler dan Sekolah Ramah Anak.....	119
c. Organisasi Kemasyarakatan.....	120
<b>3. Padang</b> .....	123
A. Gambaran Umum Lokasi.....	123
1. Profil Sekolah: OSIS, Rohis dan Jaringannya.....	123
2. Karakter Sosial Budaya Masyarakat.....	130
B. Temuan Hasil Penelitian.....	133
1. Ekstrakurikuler: Dominasi Budaya Mayoritas di Tengah Minoritas Tertindas.....	133
2. OSIS di Simpang Jalan: Ketimpangan Gender, Pencarian Jati diri dan Radikalisme Setengah Hati.....	140
3. Mereka yang Rentan Di Tengah yang Bertahan.....	145
4. Mencari Model Ketahanan di Sekolah.....	150
<b>4. Denpasar</b> .....	152
A. Gambaran Umum Lokasi.....	152
1. Profil Sekolah.....	152
a. Data Murid.....	152
b. Sosial Ekonomi Murid.....	154
c. Data Guru/ Lulusan Alumni Guru.....	154
d. Struktur Ruang Sekolah.....	155

2.	Anatomi atau Struktur Organisasi di Sekolah.....	156
a.	Profil OSIS dan MPK .....	156
b.	Struktur OSIS.....	161
c.	Mekanisme Sukses OSIS .....	162
3.	Peta Jejaring.....	163
a.	Aktor Internal.....	163
b.	Aktor Eksternal .....	164
B.	Konteks Sosial Budaya Bali .....	164
1.	Aktifitas Keagamaan .....	164
2.	Kelompok-kelompok Organisasi Keagamaan (Ormas) dan Partai Politik (Parpol).....	170
3.	Karakter Budaya atau Kearifan Lokal.....	173
C.	Temuan Hasil Penelitian .....	175
1.	Mayoritas vs Minoritas: Eksklusifitas Pengurus OSIS, Dominasi Ritual Ibadah Hindu dan Intoleransi terhadap Minoritas .....	175
a.	OSIS: Eksklusifitas Kepengurusan .....	176
b.	Dominasi Ritual Agama Hindu melalui Bidang Ketakwaan.....	178
c.	Pandangan tentang Terorisme.....	184
d.	Intoleransi Agama .....	186
2.	Kuasa Negara yang Terlupakan.....	199
a.	Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia .....	205
b.	Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara.....	208
c.	Pembinaan Prestasi Akademik, Seni, dan atau Olahraga sesuai Bakat dan Minat. ....	211
d.	Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial dalam Konteks Masyarakat Plural .....	213
e.	Pembinaan Kreatifitas, Keterampilan dan Kewirausahaan.....	214
f.	Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Gizi .....	216
g.	Pembinaan Sastra dan Budaya.....	216
h.	Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	217
i.	Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Inggris.....	217
3.	Mereka yang Rentan di Tengah yang Bertahan .....	218
a.	Internalisasi Nilai Kebinekaan: Transmisi dan Penerjemahan Nilai.....	220
b.	Mencari Model Ketahanan dari Kasus-kasus di Sekolah.....	221
5.	<b>Cirebon</b> .....	227
A.	Lanskap Penelitian .....	227
1.	Konteks Masyarakat .....	227
2.	Konteks Sekolah .....	229
a.	Latar Sosial Siswa dan Guru.....	232
b.	Tata-ruang Sekolah.....	234
3.	Anatomi OSIS di Sekolah .....	235
4.	Peta Aktor .....	238
B.	Temuan Hasil Penelitian .....	240
1.	Ekskul di Persimpangan Jalan: Antara Isu dan Realitas.....	242
a.	Konteks Radikalisme dan Terorisme di Cirebon.....	242
b.	Radikalisme di Institusi Pendidikan.....	246
c.	Sumber Pengaruh Radikalisme pada Siswa .....	248
d.	Dinamika Baru Radikalisme di Sekolah.....	252

2. Kuasa Negara yang Terlupakan .....	253
a. Watak Kebijakan Ekstra: Berlomba Menjadi Sekolah Islami .....	254
b. Nasib Kelompok Minoritas .....	258
c. Aktor Kebijakan.....	260
3. Mereka yang Rentan di Tengah yang Bertahan .....	263
a. Peran Para Aktor .....	263
1). Menghadirkan Organisasi Kepemudaan di Sekolah .....	264
2). Mengenalkan Siswa tentang Fakta Kebinekaan .....	266
b. Memperkuat Keterlibatan Jaringan .....	266
c. Karnaval Kebinekaan.....	267
d. Dinamika Hubungan antar Lembaga .....	268
4. Mencari Model Ketahanan di Tengah Kerawanan.....	270
<b>6. Tomohon .....</b>	<b>272</b>
A. Gambaran Umum Lokasi.....	272
1. SMAN 1 Tomohon.....	272
2. SMAN 2 Tomohon.....	274
3. MA Mardhatillah .....	275
4. SMA Lokon St. Nikolaus .....	277
5. SMA Kristen 1.....	279
6. SMA Lentera Harapan.....	281
7. SMA Kosgoro .....	283
B. Temuan Hasil Penelitian .....	285
1. Ekskul di Pesimpangan Jalan: Antara Isu dan Realitas.....	285
2. Kuasa Negara yang Terlupakan.....	288
3. Mereka yang Rentan di Tengah yang Bertahan .....	300
4. Internalisasi Nilai Kebinekaan: Transmisi dan Penerjemahan Nilai.....	303
5. Mencari Model Ketahanan dari Kasus-kasus di Sekolah.....	305
<b>Sebuah Catatan Penutup: Mencipta Sekolah Penuh Kebinekaan, Menolak Radikalisme Berbaju Pendidikan .....</b>	<b>313</b>
<b>Praktik-praktik Pengelolaan OSIS di Sekolah .....</b>	<b>329</b>
1. Menuju Pesantren Inklusif: Potret Pengelolaan Pesantren Sekolah dalam Rangka Menangkal Radikalisme ( <i>Hadiansyah Yudistira</i> ).....	329
2. Potret Toleransi dari Rohis, IPNU dan IPPNU ( <i>Koidah</i> ).....	336
3. Toleransi di SMAN 1 Sumber Cirebon ( <i>Jajuli</i> ).....	347
4. Sekolah, Agama dan Toleransi ( <i>Armi Tubagus</i> ) .....	352
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>356</b>
<b>Daftar Sekolah Sampel Penelitian .....</b>	<b>362</b>
<b>Wawancara .....</b>	<b>363</b>
<b>Profil Lembaga</b>	
Maarif Institute For Culture And Humanity .....	371
Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (PPIM-UIN Jakarta) .....	372
Tentang UNDP .....	374

## DAFTAR GAMBAR

### Sukabumi

Gambar 1.	Peta Sukabumi .....	68
Gambar 2.	Struktur Perekonomian Daerah Kabupaten Sukabumi, 2014 (BPS Kabupaten Sukabumi, 2015).....	72
Gambar 3.	Skema Suksesi OSIS Smancik .....	85
Gambar 4.	Peta Aktor .....	99

### Padang

Gambar 5.	Peta Kota Padang.....	131
Gambar 6.	Gerakan Mengaji 30 Juz Malam Tahun Baru 2017 Di depan Masjid Raya Sumatera Barat .....	144

### Denpasar

Gambar 7.	Struktur Organisasi Osis di SMAN 8 Denpasar .....	157
-----------	---	-----

### Cirebon

Gambar 8.	Bagan Produksi Kebudayaan Cirebon yang Melahirkan Hibriditas Kebudayaan .....	228
Gambar 9.	Bagan Anatomi Struktur OSIS .....	237
Gambar 10.	Bagan Geneologi dan Arus Radikalisme di Lembaga Pendidikan .....	248
Gambar 11.	Sumber Pengaruh Radikalisme Pada Siswa di Cirebon.....	251

## DAFTAR TABEL

### Surakarta

Tabel 1.	Grafik passing grade penerimaan siswa baru SMAN di Surakarta tahun 2016 ( <a href="http://www.semarangpos.com/2016/06/14/ppdb-2016-berikut-jurnal-ppdb-online-sma-di-solo-hingga-selasa-siang-728806">http://www.semarangpos.com/2016/06/14/ppdb-2016-berikut-jurnal-ppdb-online-sma-di-solo-hingga-selasa-siang-728806</a> )... ..	18
Tabel 2.	Persentase Umat Islam dan Kristiani .....	35

### Denpasar

Tabel 3.	Jumlah Siswa berdasarkan Jenis Kelamin dan Agama.....	153
Tabel 4.	Jumlah Pemeluk Agama Kota Denpasar tahun 2009-2013 .....	165
Tabel 5.	Bentuk Eksklusifitas dan Intoleransi di Sekolah .....	196
Tabel 6.	Jenis pelanggaran ada beberapa aspek yakni kerajinan, kedisiplinan, ketertiban, etika, dan moral.....	207
Tabel 7.	Praktik Kebinekaan di Sekolah .....	223

### Cirebon

Tabel 8.	Kategori Sekolah .....	232
Tabel 9.	Ragam Kegiatan Ekstrakurikuler .....	238



# PENDAHULUAN

Di akhir tahun 2016, gonjang ganjing politik nasional terjadi di Jakarta yang dilakukan oleh umat Islam terkait dengan Pilkada Jakarta dan Ahok sebagai aktor utamanya. Aksi I pada September 2016 dan Aksi II pada Oktober 2016 di Balai Kota tidak menyedot perhatian publik secara luas. Tetapi Aksi III dan IV yang dikenal dengan istilah Istilah Aksi Bela Islam I dan II dengan tagline AKSI BELA ISLAM, yang kemudian dikenal luas dengan sebutan Aksi Bela Islam 411 dan Aksi Bela Islam 212, menjadi peristiwa yang menyita perhatian publik Indonesia bahkan luar negeri. Banyak orang kemudian menyebutnya sebagai gerakan *people power* umat Islam Indonesia, sebab dihadiri oleh kurang lebih 5-7 juta manusia dengan berpakaian putih-putih. Sebagian lagi menyebut sebagai gerakan Islam Populis, istilah Populisme Islam sebagaimana pernah dikemukakan oleh Vedi R Hadiz, ketika membaca gerakan demonstrasi di Timur Tengah dan Indonesia beberapa waktu sebelumnya, sebab melibatkan massa arus bawah yang sebenarnya sebagian besar adalah awam politik.<sup>1</sup> (Vedi R. Hadiz: 2015)

Aksi Bela Islam menjadi besar tentu bukan karena satu penyebab. Terdapat banyak penyebab di sana, baik politik, ekonomi, hukum, kewargaan dan kultural. Inilah yang kemudian memunculkan banyak aktor dan peristiwa diantara satu dengan lainnya saling berkelit berkelindan. Tidak ada yang tunggal di sana. Secara nasional dan lokal kondisi politik kita terus berubah dan tensinya sangat tinggi, terutama menjelang Pilkada serentak di Indonesia. Kita melihat misalnya, sebagian dari peserta aksi menyatakan bahwa kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih terbilang lemah dalam hal penegakan hukum dan ekonomi rakyat. Oleh karenanya, dalam Aksi di Jakarta, dua isu ini menjadi perhatian para peserta aksi ketika orasi, terutama

---

1 Vedi R Hadiz, *Populisme Islam in Indonesia and the Middle East*, (Singapore: ISEAS, 2015).

pada Aksi Damai pertama pada 4 November 2016, yang luas dikenal dengan Aksi 411.

Besarnya Aksi Bela Islam dikaitkan dengan lemahnya kepemimpinan Presiden Jokowi selain adanya kasus Gubernur Ahok jelang Pilkada DKI Jakarta Februari 2017. Kelemahan kepemimpinan Jokowi tampak dari dua fakta yang terjadi sejak awal kepemimpinannya hingga saat ini, yakni kinerja menteri-menteri kabinet yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan kurang (bahkan) tidak independennya Presiden Jokowi dari tekanan partai-partai politik yang mendukungnya. Kepemimpinan Presiden Jokowi yang lemah ini menyebabkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK merosot. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Jakarta (LSJ), sebanyak 51,3 persen masyarakat tidak puas dengan pemerintahan Jokowi-JK.<sup>2</sup> Sebanyak 78,9 persen publik tidak puas dengan penanganan bencana asap yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-JK.<sup>3</sup>

Aksi Bela Islam yang menandai bangkitnya kelompok-kelompok radikal keagamaan, bukan hanya telah mendorong partisipasi umat Islam secara umum, namun juga yang disesali adalah adanya mobilisasi terhadap kalangan generasi muda, terutama para pelajar di beberapa daerah sekitar ibukota. Mobilisasi yang mengatasnamakan keprihatinan terhadap kasus penistaan agama ini telah menjadikan isu agama sebagai komoditi politik dan menjadi faktor penentu dalam proses politik yang terjadi di Indonesia, yakni proses Pilkada DKI Jakarta yang fenomenal dan krusial tersebut.

Dengan dalih membela agama, siswa-siswi dari beberapa sekolah di Kab. Cianjur dan Kab. Sukabumi misalnya, berbondong-bondong berangkat ke Ibukota pada Aksi 212. Pengerahaan massa tersebut ada yang secara terang-terangan dikoordinir oleh guru sekolah dalam jumlah yang cukup banyak, puluhan hingga ratusan orang. Ada pula siswa-siswi yang berangkat dalam kelompok-kelompok kecil, sekitar belasan orang, namun tetap difasilitasi dan

---

2 Kabar Pergerakan.com. Survei: 78.9% Publik Kecewa Dengan Kinerja Jokowi-JK. Edisi Selasa, 10 November 2016. Ditemukan pada: <http://www.kabarpergerakan.com/pergerakan/survei-789-persen-publik-kecewa-dengan-kinerja-jokowi-jk/>. Diakses pada 14 Januari 2017 jam 10.21 WIB.

3 Pernyataan Rendy Kurnia (Peneliti Utama LSI), di Jakarta pada Kamis 5 Oktober 2016 dalam Kabar Pergerakan.com. Survei: 78.9% Publik Kecewa Dengan Kinerja Jokowi-JK. Edisi Selasa, 10 November 2016. Ditemukan pada: <http://www.kabarpergerakan.com/pergerakan/survei-789-persen-publik-kecewa-dengan-kinerja-jokowi-jk/>. Diakses pada 14 Januari 2017 jam 10.21 WIB.

didampingi oleh guru dari sekolah bersangkutan. Sebagian orang tua siswa-siswi tersebut tak kalah tersulut karena ikut mendampingi langsung putra-putrinya ke Jakarta.

Para pelajar yang berada jauh dari Jakarta pun tak ketinggalan melakukan aksi serupa. Jarak yang terlampau jauh dengan, dan biaya yang terlalu tinggi menuju, Ibukota tak bisa membendung hasrat mereka untuk berunjuk rasa. Bersama dengan kelompok-kelompok lain, para pelajar tersebut mengikuti dan melakukan aksi di titik-titik krusial di daerah tempat tinggalnya. Misalnya, pelajar-pelajar di Kota Padang dan Kota Yogyakarta dengan bangganya menggunggah aksi mereka, baik 411 maupun 212, di media sosial seperti instragram dan twitter.

Sebagai bangsa yang majemuk (*plurality*) kita harus mampu mengembangkan perbedaan dalam keragaman tetapi mendukung prinsip pluralisme sekaligus multikulturalisme. *Agree in the diversity* merupakan prinsip berbangsa dalam negara yang multikultur (pluralistik) seperti Indonesia. Kita tidak perlu jauh-jauh belajar ke Canada, United Kingdom, Swedia, Norwegia maupun Swiss kalau hanya sekedar ingin melihat keragaman. Hal yang bisa diambil sebagai pelajaran dari negara-negara lain adalah bagaimana mereka mengelola keragaman dalam kondisi dan situasi keadilan. Kondisi keadilan hukum, ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keragaman akan memberikan kekuatan yang memadai di Indonesia untuk terus berlangsung. Oleh sebab itu, kita harus saling memiliki sikap percaya pada semua elemen masyarakat untuk mendorong harmoni sosial.

Salah satu model bagaimana mengelola keragaman yang pernah dilakukan di negeri ini sebenarnya telah banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa dan Ambon yang mampu hidup berdampingan dalam keragaman budaya dan agama. Bagaimana masyarakat Jawa mampu menghargai kehadiran orang yang bukan Jawa, bukan satu agama, bahkan tidak satu aliran (mazhab) tetapi bisa berdampingan dalam masyarakat. Demikian pula yang dilakukan masyarakat Ambon, yang mampu hidup berdampingan dengan masyarakat tidak satu agama dan satu etnis. Saat ini yang perlu dilakukan sebenarnya bagaimana agar kehidupan harmonis masyarakat Jawa dan Ambon seperti

sebelum reformasi politik terus terjaga, bukan harmoni dalam kepura-puraan. Namun dalam perkembangan selanjutnya sesuai reformasi tahun 1999, Ambon dan beberapa provinsi lain di Indonesia mengalami perubahan yang sangat drastis, intoleransi menguat.

Intoleransi turut menggejala di kalangan kaum muda Indonesia, seperti diperlihatkan oleh berbagai sumber. Misalnya, survei The Wahid Foundation (2017) mengungkap bahwa terdapat 11 juta kaum muda Indonesia yang berpotensi menjadi radikal adalah bagian yang cukup penting diperhatikan dalam perkembangan keagamaan di Indonesia. Sementara itu, Lembaga Kajian Islam dan Pendidikan tahun 2014 telah merilis bahwa terdapat 34 % kaum muda dikalangan siswa SMA setuju dengan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal seperti Jamaah Islamiyah untuk berjihad dengan kekerasan. Sedangkan riset dari Navara Institut menjadikan sasaran kaum profesional muslim Indonesia sebagai sampling dari survei yang dilakukan. Navara mendapatkan data bahwa tidak kurang dari 55% kaum profesional itu setuju dengan gerakan radikal. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang menyatakan bahwa ada potensi radikalisme yang cukup kuat dikalangan kaum muda muslim Indonesia, melalui survei bertajuk “Api dalam Sekam”.

Oleh sebab itu, masyarakat perlu didisain (*social engineering*) agar tetap memiliki daya tahan (*recilience*) untuk menghargai, menghormati serta melangsungkan kehidupan harmoni sosial agar tidak hidup dalam kepura-puraan. Hal ini penting karena seringkali harmoni dalam kepura-puraan akan menciptakan persoalan yang jauh lebih serius daripada sebelumnya jika tidak dikelola dan dipersiapkan terlebih dahulu. Disinilah tugas para pendidik, ustaz, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan para pemuda menjadi pilar untuk membangun mentalitas keragaman dalam negara demokrasi. Sebagai negara yang memiliki kekuatan masyarakat sipil, Indonesia sebenarnya dapat berharap pada masyarakat sipil semacam Muhammadiyah dan NU untuk mendukung berlangsungnya kehidupan keagamaan, sosial dan politik yang stabil. Muhammadiyah dan NU sebagai kekuatan utama Civil Islam sangat diharapkan mampu menjadi kekuatan utama untuk mengembangkan

masyarakat Islam yang toleran, beradab dan demokratis untuk masa depan Indonesia.

### **Sekolah Menengah sebagai Arena Radikalisme**

Indonesia telah dibangun oleh para pendiri bangsa di atas fondasi kebinekaan. Sejauh ini, demokrasi adalah sistem terbaik dalam mengelola bangsa dan negara, yang memungkinkan kebinekaan dapat dirawat dengan baik. Semua golongan yang menjadi penghuni Nusantara ini dapat berpartisipasi secara setara tanpa diskriminasi dalam sistem yang demokratis. Namun demikian, setidaknya dalam 15 tahun terakhir, kita dihadapkan pada ancaman kelompok-kelompok intoleran, sektarian dan radikal yang telah merongrong kehidupan demokrasi kita dewasa ini. Cara pandang yang radikal, sektarian, dan intoleran tersebut merupakan parasit yang menggerogoti proses demokratisasi.

Bahkan, pada batas dan kasus tertentu, cara pandang yang radikal tersebut berujung pada aksi ekstremisme berupa terorisme yang mengoyak kemanusiaan. Jika menilik pada kasus peledakan bom di Mesjid Adz-Dzikra Mapolresta Cirebon tahun 2011 lalu, dari berbagai laporan diketahui bahwa pelaku (MS) berpandangan radikal. Selain ayahnya sendiri yang ia kafirkan (*takfiri*), rekam jejak menunjukkan bahwa pelaku dikenal sebagai seorang yang radikal dan militan dalam merealisasikan apa yang ada dalam pikirannya. Aksi brutal anti-Ahmadiyah yang pelaku perlihatkan menjadi salah satu contohnya.

Dalam perjalanannya, cara pandang radikal dan monolitik yang dimotori oleh kelompok radikal ini didiseminasi dan diinternalisasikan melalui berbagai model dan cara yang disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi dan politik di Indonesia yang sedang berubah (transisi). Di antaranya mereka menginfiltrasi bahkan mengambil alih beberapa institusi milik organisasi masyarakat islam seperti sekolah dan mesjid.<sup>4</sup>

Pada proses selanjutnya, kelompok radikal ini memengaruhi bahkan berhasil menguasai beberapa institusi pendidikan umum negeri setingkat

---

4. Abdurrahman Wahid, dkk. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Wahid Institute, 2009).

SMA. Akibat pengaruh gerakan radikal ini, muncul gejala sekolah-sekolah menengah atas negeri menjadi pusat penyemaian intoleransi, eksklusifitas, anti-kebinekaan, bahkan kekerasan dalam berbagai bentuknya (Farha Ciciek: 2008; MAARIF Institute: 2011). Survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, dari 500 guru agama dan 200 siswa SMA berkesimpulan, pola keberagamaan intoleran di tengah masyarakat memiliki basis kuat di sekolah-sekolah umum, terutama di Jawa (PPIM: 2008).

Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada tahun 2010 menunjukkan bahwa 48,9% siswa di Jabodetabek menyatakan kesetujuannya terhadap aksi radikal. Hasil survei dari Wahid Foundation (2017) menunjukkan sebanyak 60 persen aktivis Rohis, dari 1.626 responden, bersedia berjihad ke wilayah konflik seperti Poso dan Suriah, 10 persen mendukung Serangan Bom Sarinah, dan 6 persen mendukung ISIS.

Kasus bom panci di Bandung yang terjadi pada 2017 juga melibatkan anak muda. Pemuda berinisial AW yang tengah berjulan ketika bom itu meledak di kontrakannya, masih berumur 22 tahun. Dari keterangan yang beredar, terduga diketahui menyelesaikan pendidikan menengahnya di sebuah madrasah aliyah. Menarik untuk dilihat apakah radikalisasi juga terjadi di madrasah aliyah? Karena sejauh ini penelitian banyak dilakukan di sekolah menengah atas negeri. Meskipun dalam kasus ini AW sudah keluar beberapa tahun lamanya.

Diluar madrasah aliyah, baik negeri maupun swasta, jika ditelusuri lebih jauh, terdapat 3 hal yang menyebabkan proses radikalisasi di sekolah-sekolah menengah atas negeri itu terjadi. *Pertama*, indoktrinasi yang dilakukan oleh guru ketika proses belajar mengajar. Seperti yang dilakukan oleh seorang guru mata pelajaran Sosiologi di sebuah sekolah di Solo (Farha Ciciek: 2008). Penelitian MAARIF Institute seolah mengkonfirmasi temuan Ciciek, ketika menemukan proses serupa yang dilakukan oleh seorang Guru Mata Pelajaran Bahasa Asing (Jerman) di sebuah sekolah di Cianjur (2011) dan seorang Guru Mata Pelajaran Fisika di Surakarta (2017). Hal yang patut untuk dicatat, temuan PPIM UIN Jakarta (2016) yang menunjukkan pola hubungan antar

umat beragama di kalangan Guru PAI bersifat koeksistensi dan normatif, yang pada batas tertentu, kian menguatkan proses radikalisasi di sekolah.

*Kedua*, infiltrasi pandangan keislaman ekstrem yang dilakukan oleh kelompok radikal melalui kegiatan ekstrakurikuler. Di mana Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) menjadi jalur penting dalam proses regenerasi kelompok-kelompok radikal di sekolah-sekolah, utamanya melalui bidang kerohanian islam (rohis) sebagai pintu masuknya. Pelatihan semi-militer "Jundullah" di Cianjur, yang menjurus pada praktik kekerasan atas nama agama (Farha Ciciek: 2008), dan mentoring-mentoring melalui *liqa* di Yogyakarta (MAARIF Institute 2011) dan Sukabumi (MAARIF Institute 2017) melalui modul yang muatannya mengandung nilai-nilai anti-Pancasila dan anti-kebinekaan, merupakan dua contoh penetrasi melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Interaksi dengan alumni ini turut berdampak pada buku bacaan (literatur) keislaman yang dikonsumsi oleh para siswa. Di sebuah sekolah di Sukabumi dan Makassar, ditemukan bahwa siswa yang tergabung dalam rohis cenderung membaca buku-buku yang kerap dikategorikan berhaluan "kanan". Misalnya, buku-buku yang ditulis oleh Sayyid Qutb dan Hasan al-Bana, salah dua tokoh Ikhwanul Muslimin. Bahkan di satu sekolah di Sukabumi, sebelum HTI dilarang melalui Perppu No. 2 Tahun 2017, buletin-buletin Jumatnya berserakan di Sekretariat Rohis (MAARIF Institute: 2017).

Literatur keislaman ini berperan sangat signifikan dalam penyemaian ideologi islamis di kalangan pelajar. Hasil penelitian yang digagas Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017) memperlihatkan ada empat kategori literatur keislaman di kalangan siswa. Jika digambarkan dalam sebuah piramida, dari yang paling banyak dibaca sampai yang paling sedikit, literatur yang digandrungi secara berurutan adalah *Islamisme Popular, Tarbawi, Salafi, Tahriri*, dan *Jihadi*. Gambaran literatur tersebut tidak mengherankan karena alumni-alumni banyak yang terafiliasi kepada gerakan trans-nasional seperti HTI dan Tarbiyah. Dan beberapa di antara mereka juga terafiliasi kepada Wahabi.

*Ketiga*, lemahnya implementasi dan artikulasi terkait kebijakan yang menguatkan kebinekaan. Hal ini bisa disorot pada tiga level. Level Pertama, Kebijakan Internal Sekolah yang di dalamnya bukan hanya tidak memiliki muatan penguatan kebinekaan dan berupaya secara sensitif menghadang radikalisme di sekolah, namun keberadaan kebijakan internal ini malah berjalan sebaliknya, yakni turut menyuburkan proses radikalisme yang ada di sekolah. Sebagai contoh, pihak sekolah seringkali melakukan blunder dengan mengundang kelompok-kelompok radikal untuk menjadi narasumber pengajian bulanan di sekolah. Alih-alih memperkuat kebinekaan, seringkali mereka datang dengan materi pengajian yang secara ideologis bermuatan radikal, eksklusif, sektarian, anti-Pancasila, anti-demokrasi, dan menolak NKRI karena dianggap sebagai negara thogut/kafir (MAARIF Institute: 2017). Di samping itu, karena ketidaktahuannya tentang peta gerakan kelompok radikal, sekolah seringkali membuka pintu lebar-lebar untuk kelompok radikal menjadi pembimbing keagamaan di sekolah. Baik ketika sekolah memintanya secara langsung, maupun ketika kelompok radikal menawarkan diri. Dalih utama yang dikemukakan ialah sekolah untuk penguatan keagamaan, lebih baik siswa menjadi terdidik dan memiliki akhlak mulia sebagai perwujudan dari pendidikan karakter daripada terjebak dengan masalah-masalah yang kerap menjangkiti generasi muda seperti tawuran, pergaulan bebas, dan genk motor.

Level Kedua, Kebijakan Pemerintah Daerah yang cenderung diskriminatif dan anti kebinekaan. Di era otonomi daerah ini, institusi sekolah menengah atas berada di bawah koordinasi pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Propinsi dan Kantor Wilayah Kemenag. Ada banyak daerah telah menerapkan regulasi daerah dalam bentuk perda-perda syariah. Dalam kenyataannya perda-perda syariah ini telah mendorong para pemangku kebijakan sekolah merumuskan regulasi sekolah yang diskriminatif. Sebagai contoh, di Pandeglang dan Banyuwangi telah menerapkan kebijakan diskriminatif dengan mewajibkan seluruh siswa (baik muslim maupun non-muslim) untuk memakai jilbab.

Level Ketiga, Kebijakan Pemerintah Pusat. Penelitian MAARIF Institute (2017) menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah Pusat yang terkait dengan

penguatan kebinekaan dan inklusifitas (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti) tidak dapat diimplementasikan dan diartikulasikan secara maksimal di tingkat sekolah. Padahal kebijakan yang ada jika diimplementasikan dan diartikulasikan dengan baik akan membentengi para siswa dari pandangan yang radikal.

Sekalipun Pemerintah Pusat telah mengeluarkan regulasi, tapi semangat otonomi daerah pada praktiknya sangat memengaruhi cara pandang dunia pendidikan di daerah masing-masing. Selain itu, juga karena peraturan yang dibuat sulit dipahami dan tidak implementatif.

Upaya membendung arus radikalisme di sekolah menengah atas dan madrasah aliyah dapat dilakukan dengan upaya memperkuat kebijakan yang mempromosikan pandangan-pandangan yang inklusif dan pro-kebinekaan di level sekolah, dinas pendidikan propinsi, kantor wilayah kemenag tingkat propinsi, kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kementerian agama. Selain itu, perlu juga dimaksimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi atas jalannya kebijakan tersebut.

Dalam studi ini, kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud adalah OSIS. Baik langsung maupun tidak, regulasi tentang OSIS telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun Pemerintah Daerah mengeluarkan regulasi terkait pendidikan secara umum. Regulasi ini dikeluarkan sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Regulasi-regulasi yang dimaksud di antaranya berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati.

Di tingkat Pusat, ada dua regulasi yang terkait dengan OSIS. Yakni, *Pertama*, Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Permendiknas ini menjadi regulasi awal pembinaan kesiswaan (kegiatan ekstrakurikuler) yang berupaya menjadi pedoman dalam pengelolaan pembinaan kesiswaan (kegiatan ekstrakurikuler) di sekolah.

*Kedua*, Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Permendikbud ini berupaya melengkapi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Karena didalamnya disebutkan mengenai tujuan, pengguna, definisi operasional, komponen kegiatan ekstrakurikuler, mekanisme kegiatan ekstrakurikuler, dan pihak yang terlibat. Dari sini terlihat upaya pemerintah pusat untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya, utamanya pelibatan orang tua dan masyarakat sekitar.

Diluar kedua regulasi tersebut, Pemerintah Pusat membuat turunan regulasi terkait OSIS melalui "Buku Panduan OSIS terbitan Kemdiknas Tahun 2011". Selain kedua regulasi dan turunannya tersebut, terdapat dua regulasi lain yang acapkali dikaitkan dengan OSIS.

*Pertama*, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Jika dilihat secara seksama, pembiasaan-pembiasaan dalam kegiatan penumbuhan budi pekerti di sekolah, baik kegiatan yang diwajibkan maupun contoh-contoh pembiasaan baik, sebagian mengulang materi (jenis kegiatan) kegiatan ekstrakurikuler yang disebutkan dalam regulasi sebelumnya. Yang menjadi kebaruan dari Permendikbud ini adalah menekankan ulang kembali nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan yang dirasa pudar dan pengembangan interaksi peserta didik dengan orang tua dan masyarakat. *Kedua*, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Dengan uraian yang dikemukakan diseluruh tulisan pendahuluan ini, setelah adanya Aksi Bela Islam I dan II, kita dapat memerhatikan bahwa gerakan radikal di Indonesia jika mempergunakan istilah Populisme Islam, sebagaimana dirumuskan oleh Vedi Hadiz, semakin jelas didepan mata. Gerakan mobilisasi massa dengan sentimen keagamaan dan etnis menjadi badian dari politik populisme yang sangat sering dipergunakan di media sosial. Bahkan media sosial sekarang ini bisa dikatakan sebagai corong utama kampanye gerakan Populisme Islam (radikalisme Islam) yang terus berkembang menjelang Pilkada 2018 dan Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Demikian pula dikalangan anak-anak siswa menengah keatas,

akan mengalami pengerasan jika tidak ada resistensi dan daya tahan dari mereka untuk menyebarkan paham-paham keagamaan yang bersifat moderat. Oleh sebab itu, salah satu kajian dalam buku ini hendak menunjukkan adanya daya tahan ditingkat lokal dan sekolah sebagai upaya atau mekanisme menangkal adanya penetrasi radikalisme dan ekstremisme yang banyak menyerang sekolah.

Untuk mengetahui kondisi terkini di kalangan anak-anak sekolah menengah atas dan madrasah aliyah, maka dilakukan kajian terhadap OSIS sebagai organisasi resmi di sekolah untuk menjadi benteng atas hadirnya radikalisme di sekolah. Untuk mendalami hal tersebut, MAARIF Institute selama 20 hari pada 2-21 Oktober 2017 lalu melakukan penelitian terkait kebijakan OSIS di enam kota, lima propinsi di Indonesia. Kota-kota yang menjadi sampel penelitian adalah Kota Padang (Sumatera Barat), Kab. Cirebon dan Kab. Sukabumi (Jawa Barat), Kota Surakarta (Jawa Tengah), Kota Denpasar (Bali), serta Kota Tomohon (Sulawesi Utara).

Keenam kota tersebut dipilih berdasarkan konteksnya masing-masing. Dari mulai daerah yang menjadi basis gerakan islamis, hingga upaya untuk melihat dan memahami kecenderungan ekstremisme terhadap minoritas Muslim dalam konteks masyarakat non-Islam dan implikasinya di sekolah. Rangkaian penelitian ini berlangsung selama tiga bulan, dari Oktober sampai dengan Desember 2017.

Kajian dan penelitian yang dilakukan dalam buku ini merupakan bagian dari proyek *Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent and Extremism in Indonesia (CONVEY)*. Dalam hal ini, MAARIF Institute bermitra dengan *Project Management Unit (PMU)*—Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta & *United Nations Development Programme (UNDP)* Indonesia.

Terdapat beberapa pertanyaan yang hendak dijawab dalam kajian sebagaimana tertuang dalam buku ini, yakni bagaimana peran OSIS yang diharapkan menjadi penjaga kebinekaan dan kehidupan inklusif di sekolah? Terutama dalam kaitannya dengan kebijakan internal sekolah yang kerap membatasi gerakannya? Bagaimana pula kondisi sekolah kini? Apakah ada

pintu-pintu radikalisme lain yang masuk ke sekolah? Juga, upaya apa yang ditempuh sekolah dan OSIS dalam membendung arus radikalisme yang masuk ke sekolah-sekolah?

*Bagian Satu*

RADIKALISME  
DALAM  
GERAKAN



# 1 SURAKARTA

## A. GAMBARAN UMUM LOKASI

### 1. Profil Sekolah

Penelitian ini mengambil sampel SMAN 1, SMAN 3, SMAN 5, SMAN 6, MAN 1 dan MAN 2 di Surakarta. Pengambilan sampel ini didasarkan pada kategori homogen-heterogen, unggulan-non unggulan, dan perkotaan-pedesaan. SMAN 1 dan SMAN 3 adalah dua SMA favorit dan unggulan di Surakarta selain SMAN 4.<sup>1</sup> Sementara pengambilan sampel dua MAN sebagai representasi sekolah negeri yang berciri agama di bawah pengelolaan Kementerian Agama.

#### a. SMAN 1 dan SMAN 3 Surakarta

SMA N 1 dan SMA N 3 mewakili sekolah favorit di Surakarta. Kedua sekolah ini dianggap memiliki input yang lebih baik dari segi nilai dibandingkan sekolah lain. SMAN 1 memiliki keunikan, yaitu sekolah ini masih “angker” bagi siswa dari etnis Tionghoa. Kepala Sekolah (Bu Harminingsih) menyebut bahwa memang benar ada pandangan bahwa SMAN 1 merupakan sekolah negeri yang sangat Islami, bahkan lebih Islami dari sekolah Islam sekalipun.

Asal mula munculnya anggapan tersebut terjadi di era tahun 1990. Namun, pasca tahun 2000an, semenjak Pak Thoyibun menjabat sebagai kepala sekolah di SMAN 1, stigma tersebut mulai pudar. Ibu Harminingsih mencontohkan bahwa pada tahun 2000-an tidak banyak etnis Tionghoa yang mau mendaftar sekolah ke SMAN 1. Ia kemudian mendengar ada sentimen agama bahwa orang Tionghoa takut masuk ke SMAN 1 karena khawatir

---

1    Sebagaimana daftar SMA/SMK terbaik di Indonesia menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://id.theasianparent.com/daftar-sma-terbaik-di-indonesia-versi-kemendikbud-2015/>.

tidak akan mendapatkan haknya. Maka sebagian besar dari mereka akhirnya memilih masuk ke SMAN 3.

Keengganan untuk masuk ke SMAN 1 disebabkan karena faktor khawatir tidak mendapatkan porsi pendidikan dan atau layanan yang layak dari sekolah. Intinya mereka takut diskriminasi di sekolah tersebut. Meskipun pada faktanya, hal demikian tidak pernah terjadi. Karena hal tersebut terkonfirmasi oleh siswa Kristen dan Katolik SMAN 1 yang mengaku telah mendapatkan pelayanan dan hak yang sama dari sekolah. Dengan kata lain, tidak ada diskriminasi terkait proses layanan pendidikan di SMAN 1.

Namun demikian, pandangan SMAN 1 yang dicitrakan sangat Islami ternyata juga sudah terdengar oleh mereka yang sekolah di yayasan Kristen atau Katolik. Bahkan guru-guru di sekolah ini seringkali menyarankan kepada anak didiknya untuk masuk ke SMAN 3 daripada SMAN 1.

Bertolak belakang dengan SMAN 1, sebaliknya SMAN 3 menjadi tempat favorit bagi etnis Tionghoa dan siswa yang beragama Kristen dan Protestan. Apa yang menjadi rumor di SMAN 1 terkonfirmasi di SMAN 3.

SMAN 3 berada di daerah Pecinan, sehingga mendorong etnis Tionghoa untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang lebih dekat. Daerah Pecinan inilah yang kemudian membentuk stigma bahwa SMAN 3 menjadi sekolahnya anak etnis Tionghoa/Kristen yang pandai.

SMAN 3 memang menjadi rumah bagi siswa Kristen dan Katolik. Lebih dari 260 siswa Kristen dan Katolik bersekolah di sini. Jumlah yang terbilang cukup banyak dibandingkan dengan SMAN 1 yang jumlahnya di bawah 100 siswa.

Adapun input dua sekolah favorit di Surakarta ini cukup beragam. Ada yang berasal dari sekolah menengah pertama umum, ada dari sekolah menengah Kristen dan Katolik, dan juga ada dari sekolah menengah berbasis Islam.

Pengurus OSIS yang tergabung dalam SMAN 1 lebih banyak didominasi dari SMP negeri (umum). Demikian pula di SMAN 3. Namun, pengurus organisasi kesiswaan berbasis agama, seperti Rohis, Rokris, dan Rokrat didominasi dari sekolah Islam (Rohis), contohnya dari SMP IT Nur Hidayah,

Sekolah Katolik contohnya Bintang Laut (Katolik), dan Sekolah Kristen, contohnya Widya Wacana (Kristen).

Dua sekolah ini pun didominasi dari keluarga menengah ke atas. Namun, siswa miskin pun tetap mendapatkan kursi di SMAN 1 dan SMAN 3. Kursi siswa miskin (gakin) ini merujuk pada peraturan pemerintah yang mensyaratkan sekolah tidak boleh menolak siswa miskin. Adapun proporsi penerimaan siswa dari gakin lebih banyak di SMAN 3 dibandingkan dengan SMAN 1.

Beberapa responden yang tergabung dalam pengurus OSIS membenarkan hal tersebut. Misalnya, pengurus Roket di SMAN 3 masuk melalui jalur gakin. Demikian pula beberapa pengurus MPKnya.

*Affirmative action* untuk siswa miskin ini tampaknya memang penting dan perlu. Artinya, siswa miskin juga berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan maju dari sekolah favorit. Melalui sekolah favorit mereka dapat belajar dan mendapatkan *sharing partner* yang baik, sehingga mereka dapat lebih berprestasi.

#### **b. SMAN 5 dan SMAN 6 Surakarta**

SMAN 5 mewakili sekolah *middle* di Surakarta. Sekolah ini bersebelahan dengan SMAN 6 dan memiliki karakter keagamaan yang khas. Pasalnya, aktivitas keagamaan di sana berjalan secara aktif. Baik Rohis, Rokris, maupun Roket seakan berlomba dalam kontestasi di sekolah. Kontestasi ini berjalan begitu saja. Namun, dalam proses kesejarahannya, kontestasi ini sudah ada sejak awal tahun 2000an.

Kontestasi kegiatan ini positif dalam mendorong siswa berkeaktivitas. Namun, bisa juga menjadi masalah jika tidak ditata (*manage*) dengan baik. Kontestasi antar siswa ini tergambar dengan beratnya siswa Muslim untuk membeli makanan yang dijual oleh siswa Kristen dan Katolik. Ketidakmauan itu selalu berdasarkan pada pemaknaan nilai keagamaan, di mana jika bersedia membangun mereka, maka berarti mereka yang muslim menyukseskan kegiatan Kristen dan Katolik.

Pengurus Rohis di SMAN 5 didominasi oleh alumnus Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 dan 2 Solo. Jumlahlah cukup banyak dimana dalam

satu angkatan bisa lebih dari 10 siswa yang diterima di SMAN 5. Demikian pula halnya dengan aktivis Rokris dan Rokat. Mereka berasal dari sekolah berbasis Katolik dan Kristen (SMP Kristen) di Solo.

Sementara itu, SMAN 6 mewakili sekolah “kasta ketiga” di Surakarta. SMAN ini selalu bersanding dengan SMAN 8 dalam input siswanya yang kurang berprestasi. Namun demikian, SMAN 6 telah melahirkan tokoh bangsa yang kini menjadi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

**Tabel 1.** Grafik passing grade penerimaan siswa baru SMAN di Surakarta tahun 2016 (<http://www.semarangpos.com/2016/06/14/ppdb-2016-berikut-jurnal-ppdb-online-sma-di-solo-hingga-selasa-siang-728806>)

No	Kode	Nama Sekolah	Total Nilai				
			KK Dalam Kota			KK Luar Kota	
			Passing Grade	BB	BA	BB	BA
1.	0100	SMA NEGERI 1 SURAKARTA	362.00	362.00	414.50	372.00	378.50
2.	0200	SMA NEGERI 2 SURAKARTA	167.50	167.50	322.00	249.00	338.50
3.	0300	SMA NEGERI 3 SURAKARTA	275.00	275.00	414.00	344.50	386.50
4.	0400	SMA NEGERI 4 SURAKARTA	238.50	238.50	383.00	320.50	391.50
5.	0500	SMA NEGERI 5 SURAKARTA	234.00	234.00	355.50	302.50	371.00
6.	0600	SMA NEGERI 6 SURAKARTA	183.00	183.00	317.50	228.00	313.00
7.	0700	SMA NEGERI 7 SURAKARTA	209.00	209.00	342.50	221.50	344.50
8.	0800	SMA NEGERI 8 SURAKARTA	161.00	161.00	245.00	185.50	307.00

Keterangan: BB: Batas Bawah Daya Tampung

BA: Batas Atas Daya Tampung

Passing Grade adalah batas bawah terkecil nilai siswa yang dapat diterima.

Mendapat predikat sebagai sekolah dengan input yang kurang baik dibandingkan dengan sekolah lain telah menjadi motivasi tersendiri bagi SMAN 6 agar menjadi lebih kreatif. Karenanya Kepala Sekolah SMA N 6, Bapak Agung, bertekad untuk mendorong sekolahnya agar lebih berprestasi. Akhirnya dorongan tersebut kini mulai membuahkan hasil. Salah satunya terlihat dari meningkatnya jumlah siswa SMAN 6 yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri. Jika sebelumnya siswa yang masuk PTN hanya berjumlah di bawah 10 orang. Dalam dua tahun terakhir, tercatat sudah lebih dari 60an siswa masuk ke PTN baik melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun jalur mandiri.

Dorongan dari kepala sekolah ini pun telah memunculkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap sekolah dari orang tua siswa. Mereka tidak

lagi berpandangan bahwa SMAN 6 adalah sekolah buangan. Dalam berbagai pertemuan, sekolah senantiasa mendorong kecintaan dan kebanggaan terhadap sekolah. Melalui hal itu orang tua kemudian merasa yakin saat anaknya sekolah di SMAN 6. Mereka semakin bangga saat banyak prestasi juga ditorehkan atas hasil kerja keras seluruh komponen sekolah. Bahkan, menurut penuturan Pak Agung, ada orang tua wali murid yang enggan dibebaskan bea SPPnya. Dia beralasan bahwa membebaskan bea SPP (sekolah gratis) malah tidak mendorong mereka untuk giat bekerja. “Padahal mereka dari keluarga yang kurang mampu”, ujar Pak Agung.

SMAN 6 menjadi “rumah nyaman” bagi keluarga miskin (gakin). Pasalnya, menurut keterangan Pak Agung, keluarga gakin di SMA yang berdempetan dengan SMAN 5 ini lebih dari 50 persen. Kondisi inilah yang mendorong sekolah untuk terus mendorong mereka untuk lebih berprestasi.

#### c. MAN 1 dan MAN 2 Surakarta

Selanjutnya adalah MAN 1 dan MAN 2 Surakarta. MAN 1 dan MAN 2 merupakan sekolah berciri Islam negeri di Surakarta. Mereka menyelenggarakan kelas reguler, *boarding* (asrama), unggulan, dan program keagamaan. Kelas reguler merupakan kelas sebagaimana sekolah pada umumnya; sementara sekolah boarding ditekankan pada pelajaran IPA (sains) dan program keagamaan yang lebih pada pemahaman keislaman.

Ada yang unik dari kedua MAN ini, yaitu mereka memisahkan pembelajaran di kelas antara siswa perempuan dan laki-laki. Jadi dalam sebuah kelas hanya terdiri dari siswa perempuan atau siswa laki-laki saja. Mereka juga mempunyai organisasi kesiswaan sendiri-sendiri. Misalnya, di MAN 1, organisasi yang menaungi siswa reguler adalah OSIS. Sedangkan organisasi yang menaungi siswa boarding adalah Organisasi Pelajar Boarding School (OPBS); dan Organisasi Pelajar Program Keagamaan (OPPK) untuk siswa program keagamaan. Lebih lanjut, setiap organisasi pelajar memiliki ketua dan program kerjanya masing-masing. Namun demikian, kemandirian antar organisasi siswa ini tidak menjadi masalah. Pasalnya, mereka tetap dapat saling bekerjasama satu sama lain.

DI MAN 2 juga ada bentuk organisasi-organisasi sebagaimana di MAN 1, namun posisi OSISnya masih cukup sentral. Hal ini berbeda dengan kondisi di MAN 1, di mana OSIS seakan hanya memiliki wilayah kerja di siswa reguler.

Selain itu, organisasi kesiswaan di MAN 1 juga mempunyai otonomi khusus. Mereka mempunyai sistem kerja sendiri yang berbeda satu sama lain. Walaupun pada hakikatnya tetap bermuara pada peningkatan potensi siswa.

Dalam konteks latar belakang siswa, MAN 1 cenderung didominasi alumnus MTsN 1. Sedangkan MAN 2 didominasi oleh alumnus dari MTsN 2. “Ada semacam pindah kelas”, ujar Nanda, pengurus Rohis MAN 1 Surakarta.

*Bedol* atau pindah kelas itu seakan telah menjadi hal yang lumrah di lingkungan MAN 1 dan MAN 2. Dominasi itu pun telah melekat sejak lama. Bahkan dalam benak mereka saat di MTs pun telah terpatrit bahwa siswa MTsN 1 nantinya akan masuk di MAN 1, dan siswa MTsN 2 akan masuk di MAN 2.

Dominannya alumnus MTs inilah yang menjadikan wajah MAN menjadi agak homogen. Artinya, mereka telah terbiasa dengan wajah madrasah. Sehingga tidak ada lagi rasa canggung saat memasuki gerbang MAN.

Namun, berbeda halnya bagi siswa *full day* dan *boarding*, yang mana latar belakang siswanya cukup beragam. Bahkan ada juga yang berasal dari luar Jawa. Ardita misalnya, siswi *boarding school* MAN 2 Surakarta ini berasal dari Kalimantan.

Terkait kondisi sosial ekonomi siswa yang bersekolah di MAN, terutama yang terdaftar sebagai siswa reguler sebagian besar adalah kelas menengah ke bawah. Sedangkan untuk siswa *boarding* dan *full day* cenderung didominasi oleh kelas menengah ke atas.

Meskipun demikian, perbedaan latar belakang ekonomi ini tidak membentuk sebuah *gap* antar siswa. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, mereka tetap dapat berbaur dengan baik satu sama lain tanpa mempedulikan jumlah uang saku masing-masing yang mungkin berbeda. Mereka terbiasa bergerombol dan bermain bersama di halaman sekolah yang relatif tidak luas. Dari cara berpakaianpun tidak menunjukkan perbedaan

kelas sosial antara siswa satu dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi tidak menjadikan siswa berjarak satu sama lain.

Mereka pun tidak jarang saling berboncengan (*nunut*, Jawa), saat berangkat atau pulang sekolah. Sebagaimana Ega, yang nyantri di Pesantren al-Muayyad Surakarta, seringkali meminta diantar oleh kawannya Endah yang rumahnya beralamat di Baki, Sukoharjo. Inilah potret persahabatan yang erat yang ada di madrasah. Mereka bersahabat tanpa mempedulikan “kantong” keluarga.

### **1). Latar Belakang Guru SMAN dan MAN Surakarta**

Guru SMAN di Surakarta mayoritas berasal dari universitas lokal, seperti Universitas Sebelas Maret Surakarta, IAIN Surakarta, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beberapa guru juga merupakan alumnus Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan STAIN Kudus.

Selain perguruan tinggi lokal tersebut, beberapa guru juga merupakan alumnus dari perguruan tinggi di luar negeri. Seperti pengasuh/guru di Program Khusus MAN 1. Beberapa guru di sana adalah alumnus dari Universitas al-Azhar Kairo Mesir.

Sedangkan guru agama Kristen cenderung lebih homogen. Menurut penuturan Guru Agama Kristen SMAN 3, Budiman Simbolan, warna teologi guru Kristen di SMAN Surakarta relatif sama. Pasalnya, mereka berasal dari perguruan tinggi yang sama yaitu Institut Teologia Solo. “Kebetulan guru Kristen yang satu perguruan dengan SMA 3 ini ada SMA 1, SMA 2, SMA 4, SMA 6 di Institut Teologi Solo. Mungkin warna dari teologi kami ini mewarnai pengajaran kami”, tuturnya. Adapun Guru Agama Kristen di SMAN 5 berasal dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga Jurusan Sosiologi Agama.

Guru SMAN/MAN di Solo cenderung inklusif dalam pandangan tentang keagamaan dan kebangsaan. Mereka mempunyai pandangan yang baik tentang arah pendidikan dan bagaimana mendidik peserta didik.

Namun, ditemukan juga guru yang unik. Salah satunya adalah guru di MAN 2 yang terbiasa mengajar sembari menyisipkan nilai anti-Syiah dan

anti-Pancasila. Hasan, siswa MAN 2 Surakarta, misalnya menceritakan pengalamannya saat mendapat mata pelajaran non-agama di kelas 1. Saat itu dalam satu pokok bahasan, sang guru tidak menjelaskan pokok bahasan utama. Namun, malah mendorong siswa untuk berhati-hati dan menjauhi Syiah dan komunisme.

Guru tersebut memang sering memasukkan nilai anti-Syiah dan anti-Komunisme saat pelajaran. Bagaimanapun, sikap guru tersebut tidak dapat dipisahkan dari latar belakang pendidikan nonformalnya. Diketahui bahwa guru ini lebih banyak mendapatkan pendidikan agama di Masjid Istiqomah Penumping, Surakarta. Pengetahuan yang ia dapatkan dari luar sekolah itu kemudian ditransformasikan ke ruang kelas. Namun saat sang guru menjelaskan pandangannya, siswanya cenderung bertindak pasif, dan mengikuti kemauan sang guru. Pasalnya, mereka takut jika nanti tidak mendapatkan nilai bagus.

Kondisi tersebut dibenarkan oleh rekan guru lainnya di MAN 2. Guru-guru di sekolah tersebut seakan sudah tahu karakter “guru istimewa” tersebut. Sehingga mereka tidak lagi kaget saat mendapat laporan demikian.

## **2). Struktur Ruang Sekolah**

Dalam pengamatan peneliti, hanya SMAN 6 Surakarta yang mempunyai lahan dan wilayah yang luas. Kondisi SMAN 6 yang membentang dari selatan ke utara memungkinkan siswa bergerak lebih leluasa. Mereka mempunyai lapangan olahraga yang cukup representatif. Artinya, luas lapangan sepakbola, basket, dan tenis sudah sesuai dengan standar. SMAN 6 pun tidak kesulitan untuk menyediakan tempat parkir sepeda motor untuk siswa atau mobil bagi guru.

Sementara struktur lahan di sekolah lain relatif kecil. Hal ini tercermin dari tidak adanya fasilitas lapangan olahraga. Jika siswa ingin berolahraga, maka mereka harus mencari lapangan di luar sekolah. Sempitnya ruang sekolah ini juga tercermin dari bertumpuknya sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah. Ruang parkir yang kurang memadai ini disebabkan oleh kebijakan sekolah yang lebih mementingkan lahan untuk bangunan kelas/laboratorium dibandingkan dengan menyediakan ruang bagi tempat parkir.

Bahkan tidak hanya soal olahraga dan lahan parkir, dalam hal upacara bendera pun mereka harus berbagi ruang. Hal itu terjadi di SMAN 1 dan SMAN 2. Sebagaimana disampaikan oleh Agus Suyanto, Pembina Kesiswaan SMAN 1, “Karena sekolah bergandengan, maka kami harus berbagi”, ujarnya.

Pembagian lahan tersebut merupakan kesepakatan antara kedua sekolah. Jika SMAN 1 upacara, maka SMAN 2 mengadakan kegiatan lain di dalam kelas. Sebaliknya, jika SMAN 2 jatah upacara, maka siswa SMAN 1 mengadakan kajian yang dikelola oleh Majelis Kerohanian Islam (MKI)/ Rohis.

Kondisi SMAN 1 dan SMAN 2 memang sangat berdekatan. Apabila kedua sekolah mengadakan upacara bersamaan, maka akan terjadi keriuhan. Kelapangan untuk saling mengerti dan mengatur jadwal sekolah menjadi solusi di tengah sempitnya ruang sekolah yang ada.

Walaupun ruang sekolah kecil dan sempit, namun sekolah di Surakarta mempunyai nilai historis tinggi yang setidaknya tercermin dari dua sekolah, yakni SMAN 1 dan MAN 2 Surakarta. Karena dua sekolah ini telah mendapat pengakuan sebagai cagar budaya. Berdasarkan pada peraturan UU No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya berdasarkan yang ditetapkan Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) Surakarta pada 10 Januari 2014.<sup>2</sup>

MAN 2 Surakarta memiliki dua buah bangunan cagar budaya yang sampai sekarang masih terjaga dan terawat, yaitu; bangunan gedung sekolah dan masjid yang terletak di Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 308 dan bangunan *boarding school* yang dahulu adalah bangunan Madrasah Mamba’ul Ulum yang dibangun oleh Sunan Pakubuwono X yang terletak di Jl. Dr. Rajiman No. 2 (Buku Panduan Siswa-siswi Baru Tahun 2017/2018 MAN 2 Surakarta).

Bangunan cagar budaya di SMAN 1 dan MAN 2 cukup terpelihara dengan baik. Walaupun ada beberapa kerusakan, namun tetap masih layak digunakan sebagai ruang belajar. Bangunan tinggi besar dengan pintu dan jendela yang besar dan tinggi membuat sekolah terkesan gagah dan menawan. Bangunan itu selain dinobatkan sebagai warisan budaya, juga diharapkan dapat menjadi ruang belajar sejarah yang “hidup” dan menarik.

---

2 <http://www.solopos.com/2015/01/17/info-solo-ini-daftar-172-cagar-budaya-di-solo-567591>.

## 2. Anatomi Organisasi di Sekolah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model dan karakteristik OSIS di Surakarta cukup beragam. Masing-masing mempunyai mekanisme tersendiri di dalam proses pemilihan. Namun, dari enam sekolah yang diteliti, mekanisme yang telah tertata rapi hanya di SMAN 1 Surakarta. Di SMAN ini model pemilihan ketua OSIS diselenggarakan oleh Majelis Musyawarah Perwakilan Kelas (MMPK). MMPK bertugas sebagai Komisi Pemilihan Umum atau penyelenggara pemilihan OSIS. MMPK melakukan serangkaian pemilihan dimulai dari Pelatihan Kepemimpinan satu sampai empat. Dari latihan dasar itulah kemudian muncul calon-calon yang siap maju berkompetisi dalam pemilihan OSIS.

Latihan kepemimpinan ini pun seakan menjadi pintu masuk bagi siapa saja yang ingin menjadi pengurus OSIS. Pasalnya jika tidak “lulus” dalam pemilihan ini maka mereka akan kesulitan untuk mendapatkan basis dukungan, baik dari siswa maupun dari guru.

Guru, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan Kepala Sekolah mempunyai andil didalam menentukan apakah calon ini layak maju atau tidak. Melalui mekanisme Latihan Kepemimpinan dan serangkaian wawancara yang melibatkan guru sampai kepala sekolah, OSIS di SMAN 1 menjadi *prototype* yang baik bagi proses penyelenggaraan pemilihan ketua OSIS.

*Best practice* dari SMAN 1 Surakarta ini menunjukkan betapa pentingnya *track record* seorang calon. Artinya, proses Latihan Kepemimpinan dan juga kiprah seorang siswa di organisasi sebelumnya menjadi catatan dan jejak yang baik bagi seorang pemimpin. SMAN 1 Surakarta dapat menjadi contoh yang baik terkait betapa seseorang perlu berkarier dari bawah untuk mendapatkan posisi sentral di atas.

Pada sisi lain, ada juga potret OSIS yang kurang ideal. Ini terlihat pada OSIS di SMAN 6. Menurut pengakuan Furqon Nisa (MPK SMAN 6), ada hubungan kurang harmonis antara pengurus OSIS dengan pembina kesiswaan. Seringkali program kerja OSIS tidak berjalan dengan baik karena ada perbedaan pandangan dengan pembina kesiswaan. Hal tersebut juga diakui oleh Lanang, Ketua OSIS SMAN 6. Ia seringkali harus berdiskusi

panjang dengan Waka Kesiswaan untuk menjalankan sebuah program kerja. Diskusi panjang ini yang seringkali membuat proker tertahan dan mandeg di tengah jalan atau bahkan tidak terlaksana. Komunikasi yang kurang pas inilah yang menjadikan OSIS SMAN 6 periode 2016/2017 kurang maksimal.

Kondisi tersebut juga diakui oleh Pak Rudy, Waka Kesiswaan di SMAN 6. Beliau menyadari dan mengakui bahwasannya seringkali terjadi perbedaan pandangan dengan pengurus OSIS. Dengan pengalaman dan kewenangan membina, ia tidak jarang mengkritik dan tidak mendukung program kerja OSIS.

#### **a. Mekanisme Suksesi**

Mekanisme Pemilihan Ketua OSIS di SMAN Surakarta layak untuk disimak. Pasalnya, sekolah telah menggunakan sistem atau penyelenggaraan pemilihan melalui E-Voting. Praktik E-Voting ini digunakan di SMAN 1 dan juga diselenggarakan di SMA N 3. SMAN 3 bahkan telah memiliki alat untuk menyelenggarakan E-Voting untuk Pemilihan Ketua OSIS. “Kami punya alat, dan semua SMA meminjam ke kami”, ujar Pak Sri Widodo, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 3.

Proses E-Voting bagi penyelenggaraan pemilihan di tingkat sekolah ini mengajarkan betapa teknologi mempunyai peran yang cukup signifikan dalam proses pembelajaran. Melalui mekanisme ini, seorang siswa dapat bertanggung jawab dan berkontribusi dalam sistem demokrasi ala mereka. Sistem E-Voting memungkinkan seorang siswa mampu beradaptasi dengan pemilihan yang sebenarnya, yaitu di pemilihan kepala daerah dan atau pemilihan umum lainnya.

Mekanisme yang baik ini pun didukung oleh komitmen sekolah dalam menyediakan ruang belajar yang baik bagi siswanya. Ruang pembelajaran pemilihan OSIS misalnya, menjadi ruang dialog dan belajar berdemokrasi di tingkat yang lebih kecil.

Melalui pemilihan ketua OSIS yang didesain ala pemilu (ini terjadi di semua sekolah), siswa dapat mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Proses penyiapan diri itu dapat tergambar dalam proses pemilihan yang didahului dengan pencarian pasangan calon, sebagaimana ada

di SMAN 3. Pasangan calon ini disatukan oleh latar belakang yang berbeda. Mereka bertemu dan bersekapat untuk maju menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS.

Kemenangan calon ini tidak hanya terletak pada proses seleksi ditingkat Majelis Perwakilan Kelas dan juga wawancara dengan dewan guru, melainkan juga perlu mempunyai basis dukungan yang jelas. Ketua OSIS perlu mendapat dukungan massa riil sehingga memperoleh suara yang signifikan dalam pemilihan. Dan basis dukungan yang riil itu datang dari SMAGAHOLIK, sebuah perkumpulan siswa SMAN 3 yang menjadi suporter kegiatan keolahragaan. SMAGAHOLIK mempunyai massa riil. Pasalnya, anak SMAN 3 dapat bertemu dan berkumpul atas kepentingan yang sama yaitu mendukung jagoan SMAN 3 untuk memenangkan sebuah kompetisi. “SMAGAHOLIK itu kumpulan “orang edan”. Begitu kata Sri Widodo. Artinya, mereka *all out* mendukung tim SMAN 3 di mana pun mereka bertanding. Maka merangkul SMAGAHOLIK menjadi salah satu pintu masuk menuju kemenangan OSIS.

Basis dukungan riil inilah yang menjadikan calon ketua OSIS terpilih. Keterpilihan mereka—yang didukung—oleh seluruh elemen sekolah menjadikan kepemimpinan OSIS semakin kuat. Sehingga dalam proses menjalankan program kerja dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

#### **b. Struktur OSIS**

Secara keseluruhan model struktur OSIS sama di hampir semua sekolah. Struktur ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan dan Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Setidaknya ada sepuluh sub bidang yang ada di dalam OSIS.

Pertama, Bidang Ketaqwaan. Bidang inilah yang membawahi Kerohanian Islam (Rohis), Kerohanian Kristen (Rokris), dan Kerohanian Katolik (Rokat). Ketiga kerohanian tersebut dominan di SMAN Surakarta. Karena adanya jumlah siswa dari tiga agama tersebut yang memungkinkan untuk berkumpul dalam satu wadah organisasi. Ada juga siswa di luar ketiga agama tersebut.

Namun, jumlahnya sangat sedikit, jadi belum mempunyai organisasi untuk menampung kegiatan keagamaan.

Kerohanian inilah yang mengorganisir anggota berbasis agama, juga aktif menyelenggarakan kegiatan keagamaan. Kegiatan mereka diwadahi dalam ruang keagamaan (bagi Kristen dan Katolik) dan masjid bagi Islam.

Selain kegiatan di dalam sekolah, mereka juga mengadakan kegiatan di luar sekolah. Misalnya, Retret di kawasan Tawangmangu yang diadakan oleh Rokris dan Rokrat. Pemilihan kawasan Tawangmangu, Karanganyar menjadi tempat favorit bagi Rokris dan Rokrat yang ada di Surakarta. Hal ini disebabkan atmosfir Tawangmangu yang sejuk dan terdapat beberapa gereja atau tempat ibadah yang dapat menampung jumlah siswa di sana.

Kegiatan keagamaan inilah yang seringkali menjadikan mereka “eksklusif”. Artinya, mereka lebih banyak disibukkan dengan urusan keagamaan masing-masing sehingga lupa melakukan kegiatan bersama. Bahkan, kondisi ini diperparah oleh ketiadaan peran pembina untuk mendorong mereka bekerjasama. Padahal kerjasama antar komunitas agama dapat menjadi kekuatan dan inti dalam proses kebangsaan. Namun, agenda ini seakan terlupakan atau terlewatkan oleh pengurus organisasi keagamaan.

Kedua, Bidang Humas, yaitu menyampaikan informasi kegiatan kepada siswa, guru, dan atau wakil kepala sekolah. Merekalah yang sering bertemu dan berkomunikasi dengan pihak sekolah. Bidang humaslah penyambung suara pengurus OSIS kepada siswa dan sebaliknya. Di MAN 2 misalnya, bidang Humas ini biasanya yang sering memberikan pengumuman melalui pengeras suara sekolah. “Biasanya lewat microphone sekolah”, ujar Rizky Ketua OSIS MAN 2 Surakarta.

Ketiga, Bidang Bela Negara. Bidang ini mencakup Polisi Keamanan Sekolah (PKS). PKS membantu guru dalam menertibkan siswa yang melanggar aturan. Misalnya, dalam penggunaan seragam sekolah, penggunaan model jilbab tanpa “jipon”, tidak menggunakan kaos kaki, dan razia handphone.

Fungsi PKS adalah untuk menegakkan budi pekerti. Mereka bersama pengurus anggota OSIS seringkali keliling sepulang sekolah untuk mengecek kondisi kelas, apakah kelas masih dipakai atau tidak. Kontrol ini dilakukan

untuk mengantisipasi “perilaku menyimpang siswa” pasca habis mata pelajaran. “Takutnya ada yang pacaran dan kelasnya tidak rapi”, tegas Rizky. Proses menertibkan dan mensterilkan kelas itu juga dibantu dengan CCTV yang ada di sekolah

Keempat, Bidang Budi Pekerti. Bidang ini membawahi Palang Merah Remaja dan kreatifitas olahraga. Mereka bertanggung jawab dalam kegiatan di sekolah, misalnya dalam upacara. PMR menjadi bagian yang mengantisipasi jika ada yang pingsan. Di SMAN 6 di bawah bidang ini ada Sie. Keputrian, untuk mewadahi kegiatan siswa perempuan. Ada juga Sie. Pemilihan Pelajar Teladan. Mereka bertanggung jawab untuk menjaring dan memilih siswa teladan setiap tahunnya.

Kelima, Bidang Keorganisasian. Bidang ini seringkali menjadi tempat mengeluhnya pengurus OSIS dan siswa. Mereka juga seringkali turun tangan jika ada masalah antar siswa. Misalnya “mendamaikan” perbedaan pendapat dalam organisasi.

Keenam, Bidang Kewirausahaan. Merupakan sarana untuk berwirausaha siswa. Mereka biasanya membuka stand KWU saat *car free day*. Misalnya dengan jualan es dan makanan.

Ketujuh, Bidang Keolahragaan Jasmani dan Rohani. Mereka mewadahi bidang olahraga Bola Basket, Sepak Bola/futsal, tenis meja, dan seterusnya. Seorang siswa MAN 2 Surakarta pernah mengajukan adanya Sie. futsal. Pasalnya, banyak siswa MAN 2 yang belum terwadahi dalam olahraga ini. Walaupun mirip dengan sepak bola, mereka lebih nyaman bermain futsal dibandingkan dengan sepak bola. Mereka juga bertanggung jawab mengadakan *classmeeting* setelah ujian dengan berbagai lomba.

Kedelapan, Bidang Persepsi, Apresiasi, dan Kesenian. Mereka membawahi kegiatan kreativitas siswa. Misalnya di SMAN 1 dengan Tari Saman; SMAN 3 dengan group band musik, SMAN 6 ada Sie Tari Modern; SMAN 5 ada Tari Klasik/Tradisional, dan seterusnya.

Kesembilan, Bidang Teknologi Informasi dan Komputer. Mereka yang bertanggung jawab terkait akun media sosial OSIS, melakukan update kegiatan di web sekolah, mendokumentasikan kegiatan, dan lain-lain.

Kesepuluh, Bidang Bahasa. Bidang ini mewadahi kegiatan kebahasaan siswa seperti Inggris Club, di SMAN 5 ada komunitas bahasa Jepang, di MAN 2 ada kegiatan bulan bahasa Inggris dan Arab, dan kelompok siswa studi Bahasa Jerman dan Korea, dan seterusnya.

### c. Kegiatan OSIS

kegiatan OSIS relatif sama antar sekolah. Dimulai dengan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di SMAN; Masa Ta'aruf Siswa Madrasah dan Masa Ta'aruf Santri di MAN. Kegiatan itu merupakan pembuka kegiatan OSIS. Biasanya dilaksanakan pada bulan Juli, berbarengan dengan hari awal siswa baru masuk sekolah.

Ada yang istimewa dari kegiatan OSIS di awal tahun pelajaran, yaitu program Studi Islam Intensif (SII) yang diadakan di SMAN 1. Program ini menjadi pintu masuk bagi “orang luar” dalam membina organisasi intra sekolah. SII menjadi program prestisius bagi SMAN 1. Program ini semacam pesantren kilat yang dilaksanakan di Asrama Haji Donohudan Boyolali.

SII di SMAN 1 dibina langsung oleh Pesantren Imam Bukhori, Karanganyar, Jawa Tengah. Pesantren dengan corak Salafi ini menjadi warna dan corak yang dominan bagi siswa, khususnya pengurus Rohisnya. Bahkan, Hafidz, MMPK SMAN 1, menyebut Rohis SMAN 1 adalah Rohis Salafi.

SII pun menjadi semacam perkaderan bagi siswa baru SMAN 1. Melalui SII, siswa baru dikenalkan dengan iklim SMAN 1. Dengan demikian, SII merupakan sarana transisi dari siswa SMP menjadi SMAN 1 yang sangat Islami.

Model pembinaan dengan menggandeng pesantren juga dilaksanakan di SMAN 5. Walaupun tidak masif seperti SMAN 1, sekolah ini juga menggandeng pesantren dengan corak yang sama dengan Imam Bukhori, yaitu Pesantren Darus Syahadah, Simo, Boyolali. Pesantren ini mempunyai keterkaitan dengan Pesantren al-Mukmin Ngruki Sukoharjo. Pesantren Darus Syahadah seringkali disebut sebagai al-Mukmin yang asli. Artinya, pesantren ini masih memegang teguh prinsip dan ajaran Abdullah Sungkar sebagai pendiri Yayasan Islam al-Mukmin.

Di tengah periode, OSIS seringkali menjadi ruang belajar dan ekspresi bagi siswa. Misalnya di SMAN 3 ada kegiatan *Mural Art Competition*. Kegiatan ini merupakan ajang kompetisi pengembangan bakat, kreativitas, dan minat anak muda dalam bidang seni grafis pada media tertentu yang menjunjung tinggi seni dan estetika. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari/masuk awal semester genap.

Ada juga program *Circle Sport Championship of SMAGA (CS2)*. Yaitu lomba olahraga yang mengisi waktu luang siswa setelah ujian akhir semester ganjil. Pada bulan yang sama (Desember), juga diadakan Ajang Kreasi dan Seni (ASEAN). Kegiatan ini berupa pentas seni siswa dengan berbagai lomba untuk individu maupun kelas dengan acara berupa akhir hiburan.

Dan pada akhir masa periode, biasanya OSIS menyelenggarakan Pentas Seni. Acara ini semacam gong atau acara puncak OSIS. Mereka menggalang dana dari luar untuk menyukseskan acara ini. Selain kebanggaan bagi pengurus OSIS, kegiatan ini cukup dibanggakan oleh guru-guru sekolah. Guru amat mengapresiasi kerja keras segenap pengurus OSIS. Karena dengan dana sedikit, mereka bisa menggelar acara besar. Apresiasi ini dinyatakan oleh Ibu Harminingsih, Kepala SMAN 1.

### **3. Peta Jejaring**

#### **a. Aktor Internal**

Aktor internal yang membentuk karakter dan paradigma siswa di SMAN Surakarta cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh guru. Praba, MPK SMAN 3, menyatakan bahwa gurulah yang paling dicontoh oleh siswa. Siswa banyak belajar dari guru. Bahkan, peran dominan guru dalam membentuk watak siswa ini mengalahkan peran orangtua di rumah. Praba menyatakan jika diminta tolong oleh orangtua, seseorang akan lebih lambat atau banyak alasan untuk menolak. Namun, jika yang meminta tolong adalah guru, maka seorang siswa akan segera mengiyakan perintah tersebut.

Guru dengan demikian menjadi sosok inspiratif bagi siswa, dan siswa akan mengidolakan guru. Seluruh kata, laku, dan tindak tanduk guru akan menjadi

contoh bagi siswanya. Dengan demikian, peran guru dalam membentuk cara pandang/paradigma tentang keagamaan dan kebangsaan sangat penting.

Guru yang inklusif akan membawa siswa kepada pemahaman yang lebih terbuka. Sebaliknya, jika gurunya sudah memiliki pandangan yang eksklusif tentang sebuah pemahaman, maka ia pun akan dapat mendorong siswa menjadi lebih “tertutup”.

Hal tersebut terlihat dari hasil temuan lapangan. Sebagai contoh, seorang guru agama yang pandangan agamanya eksklusif akan menginspirasi siswa untuk melakukan hal yang sama, misal pandangan guru terkait larangan mengucapkan natal. Kasus ini terjadi pada guru agama di SMAN 1 dan SMAN 5. Suharno, Guru Agama Islam SMAN 1 dengan tegas menyatakan bahwa mengucapkan natal adalah perbuatan yang dilarang syariah, karena melanggar aqidah. “Saya himbau itu—tidak mengucapkan selamat Natal (pen)—itu menyalahi aqidah Islam”, tegasnya.

Dalam setiap kesempatan Pak Harno—sapaan akrab Suharno—juga memberikan kisah-kisah nyata terkait dengan hubungan Islam dan non-Islam. Sebagaimana cerita beliau tentang pernikahan beda agama. Beliau bercerita jika dahulu ada seseorang yang hendak menikah. Calon suami beragama Islam dan calon istri non-Islam. Setelah berkonsultasi dengan Pak Harno, calon suami meminta agar ia rajin salat. Calon istri masih agak enggan untuk salat karena alasan kostnya banyak non-Muslim. Pak Harno pun menyarankan agar ia pindah kost. Akhirnya dia dapat salat rajin. Mereka pun menikah. “Saya pun menjadi penceramah saat dia menikah di Klaten. Itu prosesnya selama lima tahun”, ujar guru yang akan pensiun pada tahun 2019 nanti. Pandangan eksklusif ini kemudian dicontoh oleh siswa-siswanya. Siswa pun akhirnya enggan untuk mengucapkan selamat natal kepada pemeluk Kristiani.

Demikian pula dengan Pak Prapto, Guru Agama Islam di SMAN 5. Pak Prapto seringkali memberikan pandangan dan cerita kisah nyata kepada siswanya di dalam kelas. Beliau menyebut bahwa menjadi guru agama itu tidak mudah. Ia harus memastikan siswanya, selain menguasai materi, juga harus saleh.

Sikap dan arahan Pak Prapto ini diamini oleh Yasafi dan Ridho, pengurus Rohis SMAN 5. Yasafi dengan tegas menyatakan bahwa ia sepakat dengan pandangan-pandangan Pak Prapto tentang beragama. Menurutnya Pak Prapto adalah sosok istimewa dan inspiratif.

#### **b. Aktor Eksternal**

Selain aktor internal yang memengaruhi cara pandang siswa tentang keagamaan dan kenegaraan, aktor luar pun sangat dominan dalam membentuk paradigma peserta didik. Berdasarkan temuan lapangan, aktor eksternal lebih banyak merupakan alumni sekolah. Alumni yang kemudian kuliah di PTN di Surakarta masih menjadi rujukan bagi siswa dalam mengadakan kegiatan.

Hal ini tergambar dalam kegiatan di SMAN 1. SII sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menjadi ajang indoktrinasi ideologi Salafi bagi siswa SMAN 1. Hal ini dikarenakan pengasuh utama kegiatan ini adalah Ustaz Ayub dari Pesantren Imam Bukhori. Menurut penuturan Pak Harno, Ustaz Ayub pun menjadi penceramah utama dalam kajian Rohis (MKI) setiap minggunya.

Alumni yang punya corak Salafi ini menjadi rujukan utama pengurus OSIS dalam kegiatan SII. Bahkan, pengurus OSIS akan komplain kepada guru, jika penceramah saat SII berlangsung tidak sesuai dengan “ideologi” Salafi.

Kuatnya pengaruh Salafi di SMAN 1 ini dibenarkan oleh Pak Harno. Pak Harno mengungkapkan tidak kuasa untuk mencegah berkembangnya ideologi Salafi di SMAN 1. Ia mengaku bahwa mereka sudah lebih dahulu ada dan menjadi mentor bagi kegiatan siswa di SMAN 1 sebelum dirinya mengajar di SMA yang terletak di Jalan Monginsidi No. 40 Banjarsari ini.

Namun, ideologi Salafi ini tidak sekuat dahulu. Sudah ada upaya untuk memberi warna lain selain Salafi. Yaitu dengan mengundang Ustaz dari selain Salafi. Akan tetapi, Pak Harno mengakui bahwa Salafi sangat baik dalam pembinaan aqidah dan ibadahnya. Salafi tidak hanya kuat dalam dalil, namun mereka mempunyai video praktek ibadah yang dapat ditonton oleh siswa secara langsung.

Selain dibina oleh Ustaz dari Salafi, siswa SMAN 1 juga dibina oleh alumni yang tergabung dalam Jamaah Masjid Nurul Huda Universitas Sebelas

Maret Surakarta (UNS). Mereka membina dan menjadi mentor utama dalam kajian rutin hari Selasa dan Kamis. Pada hari Selasa diasuh oleh Ustaz Rendi, sementara hari Kamis diasuh oleh Ustaz Abu Asma.

Tidak hanya itu, dalam kajian akhwat (perempuan) alumni SMAN 1 yang kini tergabung dalam aktivis Lembaga Dakwah Kampus UNS juga mendampingi kajian keperempuanan. Misalnya, ekskul Tahfidz dan Ajang Ziaroh Keliling (Azling). Azling sendiri mempunyai tujuan mempererat ukhuwah antara akhwat SMAN 1 dengan alumni, ustazah, guru, dan atau pengurus Rohis SMA lain.

Selain di SMAN 1, jaringan alumni yang tergabung dalam Kria Mandiri pun cukup dominan menjadi pembina Rohis di SMAN dan MAN. Kria Mandiri adalah wadah alumnus pengurus Rohis yang ternaungi oleh ideologi Ikhwanul Muslimin (Parta Keadilan Sejahtera). Semua SMAN dan MAN kecuali SMAN 1 dibina oleh Kria Mandiri. Corak Ikhwanul Muslimin inilah yang cukup dominan dalam paradigma siswa di Surakarta.

Keberadaan Kria Mandiri ini diamini oleh guru dan pimpinan sekolah setiap sekolah. Pak Sri Widodo mengakui bahwa pembinaan Rohis di SMAN 3 dibina oleh Kria Mandiri. Ia mengaku mereka juga adalah alumni SMAN 3. “Jadi kami tidak terlalu khawatir, karena kami kenal mereka”, ujarnya. Hal yang sama juga diakui oleh Ibu Afifah. “Kami kenal mereka, kami juga sering diskusi tentang materi yang diajarkan”, terang Guru PAI SMAN 6 ini.

Kria Mandiri memang cukup aktif dalam membina siswa SMA. Pak Agung, Kepala Sekolah SMAN 6 menyatakan, bahwa masifnya pembinaan Kria Mandiri di sekolah seakan merupakan sebuah program yang sudah direncanakan dan diarahkan untuk pembimbingan siswa. Namun, ia tidak yakin jika ini adalah sarana untuk mendulang suara pemilu. “Saya tidak menangkap ke pemilih pemula. Kalau anak-anak kami belum menangkap seperti itu. Saya menangkap itu, kebetulan mereka mempunyai background pendidikan, jadi mungkin ada sedikit korelasinya”.

Berdasarkan temuan lapangan, peta aktor dan jejaring di Surakarta sangat dominan dipengaruhi oleh orang luar. Aktor eksternal inilah yang

seringkali menjadi pembentuk watak siswa dalam pandangan keagamaan dan kebangsaan.

#### **4. Karakter Masyarakat, Konteks Sosial Budaya**

##### **a. Profil Kota Surakarta**

Kota Surakarta yang memiliki luas wilayah 44,06 Km<sup>2</sup> terbagi menjadi 5 kecamatan dan 51 desa berbatasan langsung dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah Utara, Kabupaten Sukoharjo di sebelah Selatan, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar di sebelah Barat dan Timur. Sebagian besar lahan digunakan untuk pemukiman sebesar 61,68% dan kegiatan ekonomi berkisar 20% dari luas lahan yang ada. Di samping itu, Surakarta yang dulu merupakan wilayah karesidenan yang meliputi Kota Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten juga diapit oleh Sungai Pepe dan Sungai Bengawan Surakarta. Sungai ini dulu terkenal sebagai kanal transportasi dan menjadi jalur penghubung perdagangan antarkota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain untuk kepentingan perdagangan, Bengawan Surakarta juga dimanfaatkan untuk mobilitas politik dan militer kerajaan serta keperluan-keperluan interaksi sosial-budaya masyarakat sekitar sungai. Karenanya tak mengherankan bila ia dianggap sebagai wilayah yang strategis.<sup>3</sup>

##### **b. Aktivitas Keagamaan**

Dalam konteks keberagaman, Surakarta dikenal sebagai kota yang plural. Tidak hanya Islam yang bersemai, namun juga agama-agama besar lain seperti Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Khonghucu. Hingga kini Islam masih menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kota Surakarta dengan jumlah sekitar 73,18% di tahun 2007. Selanjutnya secara berurutan adalah Katolik berjumlah 13,19%, Protestan berjumlah 12,42%, Buddha sebesar 0,81% dan terakhir Hindu sebesar 0,38%. Menariknya, kontestasi antara jumlah umat Islam dan Kristiani (pemeluk Katolik dan pemeluk Protestan) bukan hanya isu yang dikonsumsi publik, namun angka

---

<sup>3</sup> Ridwan Al-Makassary dan Ahmad Gaus AF. (ed). (2010). *Benih-benih Islam Radikal di Masjid: Studi Kasus Jakarta dan Solo*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta. Hal. 303-304.

juga turut bicara. Dinamika komposisi agama di Surakarta dalam tiga dekade terakhir terus mengalami pergeseran walaupun tidak terlalu banyak. Pemeluk Kristen menunjukkan persentase yang meningkat sementara di sisi lain presentasi umat Islam cenderung mengalami penurunan.

**Tabel 2.** Persentase Umat Islam dan Kristiani

Tahun	Persentase Muslim	Persentase Kristiani
1977	76%	21,68%
1987	73,76%	24,6%
1997	73,07%	25,54%
2007	73,18%	25,61%

Angka di atas mengindikasikan adanya kontestasi antara Islam dan Kristen di Surakarta. Kristenisasi sedikit lebih di depan daripada Islamisasi. Isu Surakarta sebagai pusat Islamisasi khususnya wilayah Salatiga membuat konsolidasi Islamisasi semakin menguat. Di tahun 70-an tampak Kristenisasi menuai hasil positif dengan adanya peningkatan jumlah pemeluk hampir sebesar 3%. Mulai akhir tahun 80-an isu Kristenisasi--Sejatinya isu Kristenisasi sudah ada sejak zaman kolonialisme Belanda. Misalnya, pada tahun 1933 Muhammadiyah bersama 30 organisasi Islam lainnya mengadakan rapat akbar di Surakarta. Agendanya adalah untuk menentang pemberian izin masuknya dua orang misionaris Kristen *Advent* dari pemerintah jajahan di Vorstenlanden (Yogyakarta dan Surakarta)<sup>4</sup> makin kencang berhembus bahkan sampai di level nasional sehingga membuat umat Islam Surakarta berkonsolidasi memperkuat barisan untuk membendunginya.

Efeknya, kenaikan jumlah pemeluk Kristen dari tahun 1987 sampai dengan 1997 tidak terlalu signifikan, yaitu sekitar 0,9%. Pasca Reformasi pergeseran lebih dikuasai oleh kelompok Islam. Pertumbuhan Kristen hanya sekitar 0,07% sementara pertumbuhan Islam kembali naik walaupun kecil yaitu sekitar 0,11%. Ini artinya tren penurunan kuantitas umat Islam dari tahun 1977 sampai dengan 1997 mulai mengalami perubahan pasca Reformasi walaupun fakta ini ada yang membaca sebagai bukan akibat Islamisasi namun hanya akibat pertumbuhan keturunan belaka. Namun kondisi ini berbanding

4 Lihat Adian Husaini, "Mengkristenkan Jawa", <http://www.hidayatullah.com/read/27988/04/04/2013/%E2%80%9Cmengkristenkan-jawa%E2%80%9D.html>, diakses pada 25 Oktober 2013.

terbalik dengan pertumbuhan tempat ibadah pasca Reformasi. Pertumbuhan masjid relatif lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan gereja. Masjid hanya bertambah sekitar 8,44% sementara pertumbuhan gereja mengalami peningkatan sekitar 34,9%. Dari 34,9% ini didominasi oleh pertumbuhan gereja Protestan sementara gereja Katolik tidak mengalami pertumbuhan.<sup>5</sup>

Dalam sejarah, Islamisasi didominasi oleh Kraton Kasunanan pada abad 18-19. Kawasan religius yang terkenal di Surakarta adalah Laweyan, Kauman, dan Pasar Kliwon. Sementara itu perkembangan Islam dipengaruhi oleh tiga tokoh yang memiliki nama depan Abdullah (Trio Abdullah), yaitu Abdullah Sungkar (pendiri Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngruki), Abdullah Thufail Saputra (pendiri Majelis Tafsir Al-Qur'an/MTA), dan Abdullah Marzuki (pendiri Pondok Pesantren Assalam). Tiga tokoh dengan institusinya ini memiliki corak keberagaman yang berbeda namun masing-masing memiliki pengaruh yang sangat kuat sampai saat ini. Namun dalam perkembangannya, radikalisme Islam di Surakarta banyak bersumber dan dialamatkan kepada Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngruki yang biasa dikaitkan dengan Abu Bakar Ba'asyir khususnya. Mereka memiliki jaringan yang sangat rapi atau oleh Sidney Jones disebut dengan *The Ngruki Network*.<sup>6</sup>

Vedi R Hadiz<sup>7</sup> menyebut, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, yang dituduh sebagai aktor utama Jemaah Islamiyah, juga dianggap banyak kalangan memiliki jaringan dengan Komando Jihad (ICG 2002). Ketika keduanya mendirikan Pesantren Al-Mukmin di Ngruki dekat Surakarta, Jawa Tengah, pada awal 1970-an, pembukaannya diresmikan oleh tak kurang Mohammad Natsir sendiri. Almarhum Sungkar, sangat dikenal sebagai seorang pembicara ulung dan individu yang sangat kharismatik, yang dihormati di Surakarta dan Jawa Tengah, karena sikapnya yang menentang Orde Baru secara terang-terangan.

Fenomena menarik terkini adalah pengajian sholawat Habib Syekh dan para pengikutnya yang kebanyakan juga berasal dari luar daerah Surakarta.

---

5 Ridwan Al-Makassary dan Ahmad Gaus AF. (ed). *Benih-benih Islam...*Hal. 308.

6 <http://www.lkis.or.id/v2/berita-183-nyentriknya-radikalisme-islam-di-Surakarta.html>.

7 Vedi Hadiz. (2008). "Menuju Suatu Pemahaman Sosiologis Terhadap Radikalisme Islam di Indonesia", *Harian Indo Progress*, 7 Mei.

Pengajian ini turut menunjukkan wajah kota Surakarta yang *adem ayem* dan penuh saling pengertian. Walaupun demikian beberapa pihak berpendapat bahwa Habib Syekh tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap radikalisme di Surakarta.

Sejatinya, Surakarta adalah kota dengan masyarakatnya yang cenderung permisif. Tidak hanya agama, aliran apa pun bisa berkembang di Surakarta. Maka tak mengherankan bila di kota ini bisa ditemukan Muslim dari aliran apapun sampai ke aliran radikal sekalipun. Sayangnya, gaung pertumbuhan radikalisme lebih mendominasi perwajahan Surakarta daripada moderatisme. Padahal sebelumnya Surakarta telah banyak melahirkan pemikir Islam seperti Munawir Sjadzali dari Pesantren Jamsaren.

### c. Kelompok-Kelompok Ormas dan Partai Politik

Bahkan di Surakarta mistisisme Islam dan sinkretisme juga berkembang pesat seperti ajaran Saptodarmo. Masyarakat abangan juga memberikan warna tersendiri di kota kantong terbesar partai PDI-P di Jawa ini. Di Surakarta parpol pimpinan Megawati ini selalu memperoleh suara jauh di atas partai lain. Pada tahun 1996 terjadi fenomena Mega-Bintang yang dipelopori oleh Mudrik Sangidu yang mengawinkan ideologi antara kelompok abangan dengan kelompok agama (Islam). Ide ini dianggap *genuine* dan menarik simpati dari kalangan Islam di akar rumput sehingga gerakan Mega-Bintang menghimpun pengikut yang sangat banyak.<sup>8</sup>

### d. Karakter Budaya dan Kearifan Lokal

Kota Surakarta terkenal dengan batik, keraton, dan Pasar Klewer. Perekonomian didominasi oleh kegiatan pariwisata, perdagangan, dan jasa. Kota Surakarta lebih dikenal dengan nama Kota Solo. Eksistensi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Mangkunegaran menjadikan Solo sebagai poros sejarah, seni, dan budaya, yang memiliki nilai jual untuk pariwisata. Nilai jual ini termanifestasi melalui bangunan kuno, tradisi kerajaan yang terpelihara, dan karya seni yang menakjubkan. Tatanan penduduk setempat yang tidak lepas dari sentuhan-sentuhan kultural dan

---

8 <http://www.lkis.or.id/v2/berita-183-nyentriknya-radikalisme-islam-di-Surakarta.html>. Baca lebih lanjut Muchtadlirin, Thanthowi Jauhari. (2013). *Laporan Studi Pemetaan Lektur Buku-Buku Keagamaan di Surakarta*. Jakarta: Kementerian Agama.

spiritual keraton semakin menambah daya tarik Surakarta. Salah satu tradisi yang berlangsung turun-temurun dan semakin mengangkat nama daerah ini adalah membatik. Seni dan pematikan menjadikan daerah ini sebagai salah satu pusat batik di Indonesia.

Pariwisata dan perdagangan ibarat dua sisi mata uang. Sektor pariwisata tidak akan ada artinya bila tidak didukung sektor perdagangan. Minimal keberadaan perdagangan cinderamata dan kerajinan khas daerah menjadikan pariwisata semakin berdenyut. Berbeda dengan kegiatan perdagangan, sektor pertanian Surakarta kurang bisa diandalkan. Kebutuhan pokok seperti beras, sayur-sayuran, dan bahan dasar protein yang seharusnya terpenuhi melalui sektor ini harus bergantung dari daerah lain. Pemberdayaan sektor pertanian hampir tidak mungkin dapat dilakukan, sama sulitnya dengan mengembangkan wilayah pemukiman akibat keterbatasan lahan.<sup>9</sup>

Secara kumulatif, sektor tersier yang terdiri dari usaha perdagangan, hotel dan restoran, angkutan, dan komunikasi serta jasa-jasa menjadi andalan daerah. Terdapat beberapa industri pengolahan yang didominasi oleh industri rumah tangga, kebanyakan industri bergerak dalam bidang pembuatan batik dan pakaian jadi yang hasilnya tidak hanya dinikmati oleh pasar setempat dan nasional, tetapi juga pasar internasional. Walaupun demikian, bila dipetakan lebih jauh dapat disimpulkan bahwa Surakarta merupakan kota buruh karena 34,31% dari total tenaga kerja berada di sektor ini. Ada perubahan orientasi *wong Solo* dari *wong cilik* yang berhubungan erat dengan kesadaran kelas dalam masyarakat agraris ke proletariat kota yang ketergantungan terhadap dunia industri semakin besar. Kondisi ini pula yang menjadikan kesenjangan sosio-ekonomi menjadi masalah riil di tengah pembangunan kota Surakarta.<sup>10</sup>

## **B. TEMUAN HASIL**

### **1. Ekskul di Pesimpangan Jalan: Antara Isu dan Realitas (Fenomena Radikalisme di Kalangan Siswa dan Organisasi Kesiswaan)**

Radikalisme di kalangan anak muda bukanlah masalah sepele. Karena seseorang yang terinfiltrasi pandangan radikal dapat berpotensi beranjak

---

9 <http://studiofiveforfighting.wordpress.com/profil-wilayah/>.

10 Ridwan al-Makassary dan Ahmad Gaus AF, *Benih-Benih Islam...* Hal. 305-307.

pada tahap berikutnya, yakni melakukan tindakan teror. Penelitian ini menunjukkan betapa masyarakat, dalam hal ini siswa, di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kota Bengawan cukup potensial menjadi radikal.

Benarlah apa yang pernah dikatakan oleh Noor Huda Ismail. Ia mengatakan selama ini Surakarta menjadi *safe based* atau wilayah aman bagi kelompok tertentu di Indonesia. Alhasil, Surakarta seakan-akan menjadi rumah nyaman bagi banyak kelompok, di antaranya Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), tim Hisbah, Front Perjuangan Islam Surakarta (FPIS), MMI Surakarta, Majelis Tafsir Alquran (MTA), Forum Komunikasi Aktivis Masjid (FKAM), HTI, dan lain sebagainya. Organisasi jihad seperti JI dan JAT juga memiliki basis kuat di Surakarta. JI dengan memiliki ribuan anggota dibawah kendali wakalah pernah punya masa keemasan pada 1996-2003 di Surakarta. Demikian pula dengan JAT selaku ikon baru gerakan jihad menjadi simbol perlawanan yang juga mendapat dukungan dari ribuan anggota serta simpatisan di Surakarta.<sup>11</sup>

Senada dengan hal tersebut, Muhammad Wildan<sup>12</sup> pun menemukan hal yang sama. Wildan memfokuskan penelitiannya pada pemetaan gerakan-gerakan Islam yang tumbuh subur di Surakarta. Inti dari semua gerakan Islamisme radikal di Surakarta adalah pemurnian Islam. Semua gerakan mengaku Salafi, namun Wildan mencoba mengategorisasikan dua Salafi: Salafi murni (*purity*) dan Salafi jihadis.

Dalam kasus Surakarta, Wildan membagi tiga wilayah di sekitar Surakarta sebagai unit analisis. Tiga wilayah tersebut merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda untuk memudahkan pemerintah dalam mengontrol aktivitas komunitas di Surakarta. Ketiga wilayah tersebut adalah Kauman, Laweyan, dan Pasar Kliwon. Kauman adalah komunitas eksklusif bagi para pegawai kerajaan.

Kedekatan masyarakat Kauman dengan kerajaan membantu mereka untuk ikut ambil bagian dalam berbagai kegiatan bisnis masyarakat kelas menengah

---

11 <http://www.Surakartaapos.com/2012/12/13/pengamat-Surakarta-jadi-tempat-nyaman-bagi-kelompok-radikal-357564>).

12 Muhammad Wildan. (2013). "Mapping Radical Islamism in Solo: a Study of the Proliferation of Radical Islamism in a Town in Central Java", dalam Martin van Bruinessen (ed.), *Contemporary Developments In Indonesian Islam, Explaining The Conservative Turn*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies).

seperti berdagang batik dan merintis percetakan buku-buku Islam. Laweyan di sisi lain pada awalnya merupakan daerah yang penduduknya terdiri atas masyarakat abangan dari kelas menengah ke bawah. Dalam hal religiusitas, masyarakat Laweyan tidak sereligius masyarakat Kauman.

Pasar Kliwon memiliki ciri yang berbeda. Wilayah ini ditempati oleh masyarakat Arab yang memainkan peran perdagangan impor. Daerah ini seringkali dikontraskan dengan wilayah Jebres yang banyak dihuni masyarakat Cina. Gerakan Islam radikal muncul di sini disebabkan berbagai faktor, yaitu faktor sosial, budaya, ekonomi dan politik. Fenomena Islam radikal bisa digambarkan sebagai sebuah gerakan perlawanan yang terjadi karena kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, terbentuk oleh kultur yang telah sekian lama sejak masa kolonial. Kurangnya pemimpin religius dan tradisional pada masyarakat Surakarta membentuk identitas baru para masyarakat abangan yang goyah.<sup>13</sup>

Tarikan sejarah yang panjang tentang radikalisme di Surakarta seakan tetap eksis sampai saat ini. Hal ini tergambar dari hasil penelitian ini, bahwa radikalisme telah menjadi laku anak muda. Siswa sekolah menengah atas (SMA) Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sebagai responden utama penelitian ini menguatkan akar kesejarahannya radikalisme di Surakarta.

Dalam kaitannya dengan fenomena radikalisme di sekolah, paham ini masuk dalam proses pembelajaran individu dan juga dalam ekstrakurikuler. Kegiatan pembelajaran individu seperti pencarian informasi melalui internet dan pengajian di masjid-masjid terdekat. Sedangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler fenomena radikalisme masuk melalui kegiatan yang diasuh oleh pihak luar. Seperti Studi Islam Intensif (SII) di SMAN 1.

SII merupakan kegiatan sekolah dalam rangkaian menyambut siswa baru. Setelah mereka mendapatkan materi masa pengenalan lingkungan sekolah, di akhir kegiatan siswa menginap di Asrama Haji Donohudan Solo. Acara itu diasuh langsung oleh Ustaz dari Pesantren Imam Bukhori dan alumni Kerohanian Islam SMAN 1.

---

13 Muhammad Wildan. "Mapping Radical Islam in Solo". Baca juga Muzayyin Ahyar. (2015). "Membaca Gerakan Islam Radikal dan Deradikalisasi Gerakan Islam" *Walisongo*. Vol. 23. Nomor 1. Hal. 5.

SII menjadi semacam pintu masuk pengenalan pandangan keagamaan yang eksklusif, dimana ini menjadi ciri khas Rohis SMAN 1. Rohis SMAN 1 berbeda dengan organisasi keislaman siswa di SMA lain. Corak Rohis SMAN 1 lebih dekat dengan salafi, dan corak Rohis di SMA lain lebih dekat dengan Ikhwanul Muslimin (IM).

## **2. Syariat Islam, Khilafah Islamiyah, dan Pancasila (Kuasa Negara yang Terlupakan)**

Kata khilafah secara bahasa mengandung arti perwakilan, penggantian, kepemimpinan tertinggi, dan kekhilafahan (Hans Wehr, 1971. Ahmad Warson Munawwir, 1984). Ciri utama khilafah adalah dipersatukannya umat Islam di bawah seorang khalifah (kepemimpinan tertinggi), baik secara *de jure* maupun *de facto*.<sup>14</sup>

Belakangan, isu khilafah diangkat kembali oleh Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, yang berdiri pada tahun 1953. Baginya, mempersatukan umat Islam di seluruh dunia di bawah kekhilafahan Islam dan pemberlakuan syariat Islam secara menyeluruh adalah wajib dilakukan oleh umat Islam. Menurut An-Nabhani, sistem khilafah adalah khilafah dalam versi tradisionalnya, yaitu sistem pemerintahan yang menganut sistem kesatuan, bukan federal, bersifat desentralistik, meski kekuasaan di tangan umat, tetapi kedaulatan milik syariah, karena itu sistem demokrasi bertentangan dengan Islam; non-Muslim dalam sistem khilafah memiliki kebebasan dalam keyakinan, ibadah, makanan, minuman, dan pakaian, serta pernikahan, sementara di luar itu berlaku hukum Islam; dikenakan hukum Islam (mati) bagi yang murtad; dalam sistem khilafah seorang khalifah harus laki-laki, muslim, merdeka, baligh, berakal, adil, dan memiliki kemampuan.<sup>15</sup>

Berdasarkan temuan di lapangan, siswa di SMAN dan MAN mempunyai pandangan radikal terutama terkait dengan penegakan syariat Islam dan Khilafah Islamiyah. Mereka sepakat dengan penegakkan syariat Islam di Indonesia. Mereka beralasan bahwa melalui syariat, dunia akan lebih aman dan damai. Melalui Syariat Islam, orang non muslim akan terjamin hak-

---

14 Ridwan al-Makassary dan Ahmad Gaus AF, *Benih-Benih Islam...*Hal. 7-8.

15 *Ibid.*, hal. 23.

haknya. Berbeda dengan saat sistem non syariat Islam yang memimpin. Mesti umat Islamlah yang menjadi korban.

Selain itu, siswa di Surakarta menyatakan sistem khilafah adalah baik. Khilafah perlu didukung. Jika pun tidak mau mendukungnya, mereka yakin bahwa khilafah akan tetap berdiri. Mereka juga yakin, jika ada orang yang tidak sepakat dengan khilafah, maka yang harus diubah adalah mindsetnya, bukan khilafahnya. “Sebelumnya pikiran orang sudah tertutup kalau khilafah sudah tidak pantas diterapkan. Ya kalau gitu, harus dirubah maindsetnya. Itu nggak salah, jadi perlu ditegakkan”, ujar Hasan, Ketua Rohis MAN 2 Surakarta 2016.

Nindya, aktivis Rohis SMAN 3 menambahkan, bahwa ketidaksepahaman seseorang terkait ide khilafah karena mereka belum sadar arti penting sistem bagi kehidupan. “Ya mungkin dari kitanya aja yang belum sadar, karena kesadarannya kurang”

Hasan meyakini bahwa ada maupun tanpa dukungan dari umat Islam, khilafah tetap akan berdiri. Keyakinan itu ia dapatkan dari pengajian Ahad pagi di Masjid Istiqomah Penumping, Surakarta. Ia pun dengan tegas menyebut jika idolanya seperti Felix Y Shiauw, Mu'inudinillah (Ketua Dewan Syariah Surakarta), dan Abdul Manaf, sepakat dengan ide tegaknya khilafah. Ia tidak ragu untuk mengikuti pandangan dan pendapat mereka. “Kalau saya itu dari ustad Felix, ustad Muin, ustad Abdul Manaf, mereka sepakat dengan khilafah. Informasinya tidak simpang siur dan konsisten. Kemudian saya baca di Quran ternyata benar”, ujar Hasan.

Ketua Rokhis MAN 2 itu meyakini bahwa saat khilafah ditegakkan, maka dunia akan aman. Sistemnya pun sesuai dengan ajaran Rasulullah dan khulafaur Rasyidin. Kepemimpinan berdasarkan syariah Islam dan khilafah juga menjamin adanya kedamaian di muka bumi. “Dunia ini akan aman dengan syariah Islam dan khilafah”, katanya dengan tegas.

Hasan menambahkan bahwa kedamaian dunia ini ada karena kepemimpinan Muslim. Ia menyebut bahwa saat dunia ini dipimpin oleh non-Muslim (Kristen), pasti banyak orang dibunuh dan diusir. Baginya, dengan sistem khilafah dan syariah Islam, semua akan aman dan nyaman hidup di

Indonesia. Tidak akan ada pengusiran dan atau pembunuhan yang dilakukan oleh umat Islam. Karena Islam menjamin hak-hak mereka (non-Muslim).

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Pak Prapto, Guru Agama Islam SMAN 5. Bahwa sejujurnya sistem khilafah Islamiyah sudah ada sejak zaman Rasul. “Pemahaman tentang Khilafah Islamiyah dan sebagainya itu kalau jujur ya sudah sejak dari Rasulullah”. Khilafah Islamiyah telah menjadi praktek keseharian Rasul sejak Islam berdiri dan disebarakan ke seantero dunia. Dengan demikian, ia menganjurkan agar selayaknya tidak perlu lagi memperdebatkan tentang sistem khilafah, melainkan cukup menerimanya dengan jujur.

Hasan menjelaskan bahwa saat khilafah tegak, maka tidak akan ada lagi kriminalisasi ulama. “Taktik zaman PKI dulu adalah mengkriminalitaskan ulama dan memutar balikkan fakta” ujarnya. Khilafah ia yakini sebagai obat mujarab untuk mendapatkan kebenaran. Khilafah pun akan menjamin berlangsungnya proses keislaman yang baik. Karena ulama mendapat tempat terhormat tanpa harus berurusan dengan urusan politik.

Hasan tidak sendirian. Hal senada juga disampaikan oleh Nindya, Aktivist Rohis SMAN 3. Ia menyebut bahwa kriminalisasi ulama saat ini karena ketiadaan sistem khilafah dan syariat Islam. Bahkan ia menyebut bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan potret dimana pemerintah sedang melakukan kriminalisasi terhadap Islam. “Pokoknya tuh pemerintah tuh kayak nekan organisasi Islam”, ujarnya.

Kondisi keumatan hari ini merupakan respon terhadap ketidakberdayaan ulama di tengah persaingan politik. Ulama ditangkap dan diadili, namun pelaku tindak kejahatan yang jelas-jelas melanggar undang-undang seperti korupsi malah dibiarkan bebas. Inilah yang seringkali membuat masyarakat bingung. Mana yang benar dan mana yang salah.

Hasan dan Nindya menjadi contoh betapa seorang siswa telah mendapatkan masukan tentang ide khilafah dari faktor eksternal. Artinya, mereka mendapatkan informasi terkait paham keagamaan dan kenegaraan lebih banyak dari luar sekolah daripada di dalam sekolah. Sekolah seakan tidak mampu untuk membendung arus pemikiran seperti ini, sehingga mereka

begitu yakin dengan pandangan dan atau pendapat ustaz daripada guru di sekolah.

Lebih lanjut, pembenaran ide khilafah lebih dikuatkan karena dalam sistem ini tidak ada pemilihan langsung (voting). Dalam sistem khilafah, seseorang dipilih melalui dewan syuro. Inilah yang menurut siswa di Surakarta dianggap sebagai sistem yang sesuai dengan al-Quran.

“Nah itu kan langsung, kalau khilafah itu nggak berdasarkan suara banyak voting, tapi kan berdasarkan kebenaran. Jadinya mesti diselidiki dengan benar-benar, pokoknya sesuai dengan al-Qur’an dan syari’at Islam” (Nindya, Rohis SMAN 3).

Sistem penunjukkan melalui dewan syuro diyakini dua pelajar tersebut sebagai petunjuk kebenaran. Artinya, melalui sistem ini seseorang mendapatkan mandat berdasarkan wahyu kitab suci.

Karenanya, sistem voting atau suara terbanyak dianggap bertentangan dengan syariah Islam. Sebagaimana teorisasi di atas, demokrasi yang dicirikan dengan pemilihan langsung (*one man one vote*), bukan bagian dari syariah Islam. Oleh karena itu, sistem ini perlu diganti agar sesuai dengan petunjuk kebenaran al-Quran.

Namun, dalam proses implementasi di lapangan (kebangsaan dan kenegaraan), penegakkan khilafah tidak perlu dengan mengganti ideologi Pancasila. Bagi mereka, khilafah itu sejalan dengan Pancasila. Pasalnya, Pancasila dirumuskan oleh para pendahulu bangsa yang muslim. Jadi Pancasila dan khilafah bisa sejalan seiring. Mereka berpandangan, misalnya Sila Pancasila itu bersumber dari al-Quran, sehingga tidak perlu mempertentangkan antara Pancasila dan Khilafah Islamiyah.

Pelajar Surakarta lainnya pun menilai bahwa nilai Pancasila dan khilafah selayaknya mampu bersinergi membangun Indonesia yang mayoritas muslim. Namun, karena ada ketakutan dari pihak-pihak tertentu, maka seakan-akan khilafah yang disalahkan. Mereka yakin bahwa ide khilafah pun tidak masalah asal ada dasarnya. “Khilafah bisa dijalankan di negara Islam, kalau Indonesia kan negara demokrat. UU dan Pancasila tidak perlu diganti asal sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kan, Pancasila sudah disusun oleh orang-orang Islam. Jika

sesuai dengan aturan Islam, Pancasila dan UU tidak perlu diganti” (Cholifah, Pengurus OPPK MAN 1 Surakarta)

Hal senada juga disampaikan oleh Pak Prapto, Guru Agama Islam di SMA N 5. “Pancasila itu kan kita (muslim) yang paling berperan. Kemerdekaan Indonesia tidak akan mungkin tercapai kalau tidak ada umat Islam yang berjuang”.

Mengamini apa yang dikatakan oleh gurunya, Yasafi, Rohis SMAN 5 menyebut, “Ya Seperti Pak Prapto tadi, *founding fathernya* Pancasila itu kan juga orang muslim ya, jadi pandangannya Inshaallah Indonesia itu/ Pancasila itu sama seperti pandangan muslim. Jadi sebagai Pemuda kita harus mendukung Pancasila sesuai dengan ajaran Islam. Ya kan tadi Pancasila juga Sesuai ajaran Islam kan sila pertama dari Ketuhanan Yang Maha Esa, kita menjunjung Ketuhanan Yang Maha Esa tadi ya kita harus fanatik terhadap agama dan toleran dengan agama yang lain”.

Keyakinan bahwa Islam berpengaruh kuat dalam sistem Pancasila menjadikan mereka yakin bahwa ideologi bangsa itu senafas dengan nilai dasar agama terbesar di Indonesia. Sehingga dalam proses kenegaraan, ide khilafah Islamiyah pada dasarnya dapat mudah terwujud jika semua mau dan yakin. Pasalnya, Pancasila sendiri telah berdasarkan nilai Islam, sehingga formalisasi syariat Islam itu akan berjalan mudah.

Penegakkan syariat Islam dan khilafah dalam pandangan mereka akan melindungi umat Islam, terutama ulama. Mereka memandang kriminalisasi ulama saat ini karena sistem Negara tidak sesuai syariat Islam dan khilafah. “Kalau ada Khilafah Islamiyah ulama tidak akan dikriminalisasi”, kata Hasan, Rohis MAN 2 Surakarta.

Namun berbeda dengan pendapat di atas, Haikal, anggota Rohis SMA N 6, menyebut bahwa Pancasila yang saat ini kurang Islami. Ia beralasan bahwa penghilangan tujuh kata dalam sila pertama sebagai penanda ke-Islam-an menjadikan Pancasila kurang sesuai dengan Islam. “Ya kalau versi aslinya sebelum diubah dulu yang piagam Jakarta itu Islami, kalau yang sekarang mungkin ada campur tangan ya, saya mikirnya tidak”, ujar siswa yang mengidolakan Yusuf Mansur ini.

Haikal meyakini bahwa hilangnya tujuh kata dalam sila pertama atau dikenal dengan Piagam Jakarta menjadikan Pancasila telah kehilangan ruhnyanya. Pancasila yang terbangun oleh nilai-nilai Islam tidak lagi kuat mencerminkan perjuangan kaum muslim di Indonesia. Sehingga jika ingin mengembalikan kejayaan Islam, maka tujuh kata dalam Pancasila Sila Pertama perlu dikembalikan.

Haikal juga meyakini bahwa Pancasila pun akan menjadi laku yang baik jika tanpa menghilangkan tujuh kata dalam sila pertama. Pancasila tidak akan menjadi ajang pameran sebagaimana kegenitan beberapa orang Indonesia beberapa waktu lalu yang menyebut “saya Pancasila, saya Indonesia”. Bagi Haikal, Pancasila tidak perlu dipamer-pamerkan, dan cukup dijalani saja. Menyebut paling Pancasila justru menurutnya menjadi bukti bahwa sebenarnya dirinya tidak sedang menjalankan Pancasila. Namun, sedang memamerkan apa yang mereka sebut sebagai Pancasila.

Melihat potret yang demikian, Haikal dengan tegas menyebutkan bahwa ia memilih berideologi Islam daripada Pancasila. “Ya mungkin untuk Pancasila sendiri kan ideologi bangsa, sedangkan kalau muslim kan ideologi agama saya. Ya kalau memilih, saya akan pilih muslim”, tegasnya.

Bahkan ia juga menyebut jika ada nilai Pancasila dan atau UUD 1945 yang menyimpang, maka seseorang boleh menolaknya. Namun, baginya ajaran agama tetaplah harus dipatuhi. “Ya mungkin kalau dalam hal Pancasila atau UUD itu ada yang sekiranya menyimpang ya bisalah kita tolak atau terima, tapi ya kita tetap pada apa yang ada di ajaran agama kita”, tambahnya.

Potret dukungan terhadap khilafah di atas seakan sebangun dengan catatan kritik atas pembubaran Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah. Pembubaran HTI oleh pemerintah mereka anggap sebagai bagian dari konspirasi. Lebih tepatnya, ada konspirasi yang ingin menyingkirkan Islam dan ulama. “Ada konspirasi global”, ujar Anggi, Rohis SMA N 3.

Ketidaksetujuan terkait pembubaran HTI juga disampaikan oleh Cholifah, OPPK MAN 1 Surakarta. “Menurut saya tidak tepat. Seakan-akan HTI sudah sangat radikal, dianggap radikal mungkin karena mendakwahkan khilafah sehingga tidak sepakat dengan Pancasila dan UU. Menurut saya ide khilafah

tidak menyalahi aturan. Kalau Pancasila kan juga diambil dari nilai-nilai Islam sehingga tidak bertentangan”.

Para pelajar ini juga berkomitmen untuk membuka pemikiran bahwa khilafah yang baik dan benar adalah agenda bersama. “Pembubaran HTI kurang tepat. Mungkin pemikiran rakyat sudah terlalu tertutup atau sempit kalau pengembalian khilafah bertolak belakang dengan Indonesia. Padahal sebenarnya juga gak papa kalau khilafah dikembalikan untuk menegakkan syariah di Indonesia. Tanpa harus mengganti Pancasila dan Undang-Undang, ide Khilafah tetap bisa masuk.” (Cholifah, Pengurus OPPK MAN 1 Surakarta).

Pembubaran HTI oleh pemerintah pun seakan menunjukkan pemerintah kurang melakukan kajian yang komprehensif terkait ormas ini. Hal tersebut terlontar dari pernyataan Pak Prapto, SMA N 5, “Pembubaran HTI Apakah kira-kira itu kajiannya sudah luas”.

Furqon, Rohis MAN 1 Surakarta juga menanyakan mengapa yang dibubarkan adalah ormas Islam, bukan ormas yang telah dengan gamblang melakukan makar terhadap negara, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM). “Tapi kenapa yang dibubarkan hanya Islam. Padahal seperti OPM yang punya bendera, senjata dan lain-lain tidak ditindak. Ada juga ketanya masyarakat Bali ingin memisahkan diri gara-gara pakaian adat, tapi malah dilindungi pemerintah. Yang Islam malah dibubarkan”, ujarnya dengan geram.

Kritik pelajar di Surakarta terhadap sikap pemerintah dalam membubarkan HTI menjadi penanda betapa pandangan keagamaan dan kebangsaan responden sangat eksklusif. Mereka menganggap pemerintah telah menyalahi aturan dan takut terhadap kemunculan Islam. Padahal jika mau menengok lagi, bagi mereka, khilafah (HTI) dan Indonesia bisa berkolaborasi dalam menegakkan syariat Islam.

### **3. Mereka yang Rentan di Tengah yang Bertahan (Hubungan Sosial Kegamaan)**

Persoalan pandangan kebangsaan dan kenegaraan semakin kompleks saat pelajar muslim di Surakarta enggan untuk berhubungan dengan teman sebaya yang berbeda agama. Mereka beralasan, bahwa iman mereka kurang kuat sehingga dikhawatirkan akan terbawa dalam arus agama non Islam.

Faktor lainnya yang memengaruhi kurang eratnya hubungan beda agama tersebut disebabkan oleh perasaan canggung satu sama lain. Indri, pengurus OSIS MAN 2 Surakarta menyebut berhubungan dengan non muslim menjadikannya kurang nyaman. Terutama saat memasuki waktu salat. “Kalau pas salat jadinya kan gak enak, mereka gak salat sedang kita salat, jadinya bikin gak nyaman”, ungkapnya.

Ia menambahkan, “Bukannya tidak mau dengan Kristen, cuma takut terpengaruh aja. Takut aqidahnya terpengaruh. Takut dari diri sendiri aja, takut tidak bebas, canggung. Soalnya dari kecil sudah terbiasa sekolah berbasis Islam. Tidak ada negeri-negeri gitu. Sekarang negeri tapi kan MAN”.

Hal senada diungkapkan oleh Nisa, Pengurus Rohis SMAN 1. Walaupun ia tidak menyatakan nyaman berhubungan dengan non-Muslim tapi jika diminta memilih maka dia ingin berteman atau berkelompok (dalam mengerjakan tugas) dengan teman yang muslim dan perempuan.

“Ya tidak apa-apa, nyaman-nyaman aja. Namun, apabila diberi kesempatan untuk memilih kelompoknya sendiri, Nisa akan memilih teman-teman yang muslim dan anggotanya akhwat semua” (Nisa, Pengurus Rohis SMAN 1).

Sikap canggung ini tidak hanya dalam hal melaksanakan ibadah saja. Namun, dalam hubungan sosial yang lebih praktis masih ada rasa yang kurang nyaman saat berhubungan dengan teman non-Muslim. Penanda keagamaan, seperti atribut jilbab dan salib seakan menghalangi mereka untuk berteman.

“Waktu main ke rumahnya, tidak enak dengan keluarganya. Tidak enak sendiri. Aku pake jilbab, sedangkan keluarganya, auratnya terbuka. Kalau masuk ke rumahnya, akunya yang nggak suka. Di setiap pintunya ada salib, bahkan di pajangan juga. Bukannya gak suka, tapi ya gitu...” (Indri, Pengurus OSIS MAN 2 Surakarta).

Kondisi tersebut pun akhirnya bermuara pada keengganan untuk mengucapkan selamat natal dan atau perayaan hari besar non-Muslim lainnya. Siswa pengurus Rohis sepakat bahwa mengucapkan selamat natal adalah perbuatan sia-sia dan dosa. Fariz, Rohis SMAN 3, misalnya, menyebutkan bahwa mengucapkan selamat natal adalah bagian dari aqidah. Jadi saat seseorang mengucapkan hal tersebut maka dianggap berdosa.

Dasar hukum dari mengucapkan selamat natal adalah dosa, siswa dapatkan itu dari ceramah keagamaan di masjid-mesjid di Surakarta. Indri mengakui bahwa dirinya pernah mengucapkan selamat natal tiga tahun lalu. Sekarang dia tidak mau lagi. “Pernah mengucapkan selamat natal sudah tiga tahun yang lalu, sekarang tidak mau lagi. Pernah mendengar ceramah kalau itu nggak boleh. Walaupun sama sahabat sendiri”, ujarnya.

Senada dengan Indri, soal hubungan Muslim-Kristen, Endah, Siswa MAN 2 Surakarta menyebut bahwa mengucapkan natal adalah bagian dari aqidah. Natal juga bukan hari raya umat Islam, sehingga tidak perlu untuk mengucapkan atau merayakannya. Bahkan Endah dengan tegas menyatakan bahwa ia juga tidak mau makan atau minum di tempat non-Muslim.

Walaupun tidak setegas Endah, Nanda dan Anis, siswi MAN 1 Surakarta mempunyai pendapat yang sama. Ia masih ragu untuk makan dan minum dari orang Kristen. Apalagi makanan itu dari perayaan Natal. “Nanti saya tanyakan ke Mbak Tutor dulu ya, kami gak tahu”, ucapnya sambil tersenyum.

Dalam konteks hubungan sosial, Fikriyah, siswa kelas XII MAN 2 Surakarta juga berpendapat yang sama, bahwa dalam gotong royong, kerjasama antara Muslim dan Non-Muslim tidak masalah. Baginya, yang menjadi masalah adalah soal aqidah, salah satunya dalam ucapan selamat Natal.

Indri lebih lanjut menyarankan kepada teman yang lain agar dapat memahami batas hubungan antara muslim dan non-Muslim. Seorang muslim tidak perlu mengantarkan atau menemani non-Muslim ke gereja atau perayaan ibadah lainnya. Termasuk di dalamnya dalam berhubungan percintaan dan pernikahan.

“Harus ada batasnya dalam hal-hal kepercayaan dan ibadah. Jangan terlalu berlebihan. Tidak ikut-ikutan itu takut terbawa. Biasa aja. Nggak usah saling nemenin dalam hal-hal tentang kepercayaan dan ibadah. Jangan berlebihan, jangan terlalu dekat, ada batasnya, agar tidak terpengaruh. Jangan sampai ada ikatan tertentu. Soalnya Kristen dan Islam kan nggak boleh berhubungan (pernikahan). Takutnya udah dilarang, sakit hati, terus dendam jadi musuh”. (Indri, Pengurus OSIS MAN 2 Surakarta).

Pandangan yang menarik lagi adalah soal penggunaan jilbab. Penggunaan jilbab menjadi perbincangan menarik bagi siswa karena menyangkut identitas keislaman. Bahkan, menggunakan cadar (niqab) menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keseharian.

Namun, Indri menyebut bahwa kebanyakan masyarakat memiliki stigma negatif tentang perempuan yang bercadar. “Kaya teroris gitu”, katanya. Namun, ia sendiri sebenarnya ingin menggunakan cadar. Bahkan keinginan itu didukung oleh kedua orang tuanya. “Saya sendiri sebenarnya juga pengen. Orang tua juga nyuruh”, ucapnya.

Stigma negatif ini juga dirasakan oleh Endah dan Fikriyah, siswa MAN 2 Surakarta. Namun, mereka berusaha menunjukkan bahwa bercadar dan atau berjilbab besar tidak menghalangi hubungan sosial. Bahkan Endah dan Fikriyah tetap dapat naik gunung yang merupakan hobi mereka, meskipun dalam keadaan memakai cadar.

Endah dan Fikriyah adalah sedikit dari siswa MAN 2 Surakarta yang mengenakan cadar saat di luar sekolah. Mereka menyadari bahwa aturan sekolah tidak memungkinkan menggunakan cadar. Maka, mereka mengenakan cadar saat di rumah dan hanya sampai pintu gerbang sekolah. Saat di sekolah, mereka melepas cadar yang dikenakan sebagai bukti ketaatan mereka terhadap peraturan. Namun, sesekali mereka mengenakan masker sebagai pengganti cadar. Saat jam pelajaran sudah usai, mereka akan mengenakan cadarnya kembali sampai rumah. “Karena sudah aturan sekolah, maka tetap harus dijalani. Nanti setelah pulang sekolah pakai niqab lagi”, ucap Fikriyah santai.

Proses menggunakan cadar ini mereka yakini sebagai pilihan beragama karena lingkungannya mendukung. Endah dan Fikriyah mengakui bahwa lingkungan masyarakat mereka di sekitaran Pesantren Al-Mukmin Ngruki dan Baki Sukoharjo mendukung menggunakan cadar. Cadar bahkan telah menjadi bagian tak terpisahkan bagi perempuan yang telah ‘baligh’ (dewasa).

Menggunakan jilbab (hijab) pun menjadi perbincangan di antara teman sebaya. Mereka seringkali saling menasehati. Ada yang menerima dengan

lapang dada. Namun, ada juga yang tidak terima. Bahkan, mereka disindir sok alim oleh kawan-kawannya.

“Pernah nasehatin, katanya panas. Terus aku menyinggung lewat status. dibilang panas, tapi belum tahu nanti panasnya api neraka. Terus dia langsung nge-chat aku, ‘kamu nyindir aku ya’. Ya aku bilang nggak lah, padahal aku emang maksud nyindir dia. Tapi itu kan juga biar dia bisa mikir, udah ada syariatnya untuk menutup namun nggak dilaksanakan. Hijab gunanya untuk menjaga namun tidak menjaga pandangannya. Misalnya kalau sekarang orang berhijab, tapi masih pacaran. Itu membuat anggapan dari non-Islam, bahwa Islam hanya berhijab saja namun perilakunya seperti itu. Menurutku itu dari fitrahnya saja sih. Kalau untuk menyadarkan sikapnya susah, karena berdasarkan kesadaran masing-masing. Aku sendiri belum merasa cukup untuk dakwah lebih banyak. Mungkin yang paling ampuh, orang tua mereka”. (Indri, MAN 2 Surakarta).

Perbincangan tentang jilbab pun didasarkan pada ketaatan beragama. Bahkan, yang tidak berjilbab, terurai rambutnya walaupun hanya sehelai disebutkan mereka akan menyeret ayahnya ke neraka.

“Kok pede banget. Aku tu lihatnya rambutnya itu. Soalnya kalau lihat rambut-rambutnya gitu aku langsung ingatnya ke papa. Satu helai rambut adalah aurat, yang bisa menyeret ayahnya ke neraka. Udah terbiasa sejak dulu. Jadi kalau lihat orang yang gak berhijab langsung ke rambutnya itu. Udah dari dulu pikirnya kaya gitu, bukannya sok Islami, gak tahu kenapa. Padahal auratnya kan nggak cuma rambut aja” (Indri, MAN 2 Surakarta).

Indri juga mengkritik temannya yang belum menggunakan jilbab karena menunggu akhlaknya baik. Baginya, harusnya berjilbab dulu baru kemudian berakhlak yang baik. Belum yakinnya beberapa teman tentang penggunaan jilbab ditengarai karena mereka telah menjalin asmara dengan lawan jenis. Mereka takut jika menggunakan jilbab akan putus dengan pacarnya dan hubungannya menjadi terbatas dengan lawan jenis.

“Istilahnya dia tu nunggu sifat mereka bersikap baik dulu. Ada yang ngomong kalau mau berjilbab kalau memperbaiki akhlaknya dulu, padahal kan itu kebalik. Hijab dulu, baru akhlaknya akan baik sendiri. Terus aku

nganggapnya juga kalau mereka kalau berjilbab, akan ada batasan untuk berkomunikasi dengan laki-laki. Yang udah pacaran, takut diputusin pacarnya. Kalau pake jilbab kan udah jaga jarak”. (Indri, MAN 2 Surakarta)

Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi siswa Kristen Protestan dan Katolik di empat SMAN di Surakarta tidak ada masalah. Mereka menikmati proses belajar di sekolah tanpa ada diskriminasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Hillary Kirana, siswa Katolik SMAN 1 Surakarta. Ia mengaku bahwa di SMAN 1 semua siswa dilayani dengan baik, tanpa memandang agama. Siswa Katolik juga difasilitasi ruang keagamaan dan pendanaan sebagaimana siswa yang lain. Dalam proses penilaian pun, ia mengaku bahwa tidak ada perbedaan antara siswa Katolik dan Islam. Guru memberikan nilai sesuai dengan kemampuan mereka. Namun, Hillary memberi catatan terkait dengan syarat tidak tertulis menjadi ketua OSIS, yakni harus bisa membaca al-Quran.

Hal itu juga dirasakan oleh Anya, siswa Katolik di SMAN 6. Tidak ada perbedaan pelayanan pendidikan di sekolah. Stevani dan Natasya, siswa Kristen Protestan SMAN 6 juga menyatakan hal senada. Walaupun Stevani mengaku ia sebenarnya lebih suka sekolah di Yayasan Kristen. Pasalnya, di sekolah Kristen, semua proses sekolah dimulai dengan cara Kristen. Berbeda dengan di SMAN, yang mayoritas muslim, sehingga dalam doa upacara bendera lebih dominan menggunakan cara Islam. Guru-gurunya pun lebih sering memulai pelajaran sesuai ajaran Islam.

#### **a. Kepemimpinan Non-Muslim**

Konsepsi tentang hubungan dengan non muslim dan juga ketatnya penggunaan jilbab sebangun dengan pandangan mereka terhadap kepemimpinan non muslim. Kepemimpinan non muslim seperti yang dialami kota Surakarta sekarang, mereka yakini sebagai bukti lemahnya umat Islam. “Kemana saja umat Islam, kok yang terpilih adalah non muslim”, ujar Nisa, Rohis SMAN 1 Surakarta.

Bahkan, Alifa, pengurus Rohis SMAN 1 menyatakan bahwa aturan Ketua OSIS harus laki-laki dan muslim harus tetap ditegakkan di sekolahnya. Aturan ini tidak boleh dihapus walaupun bukan aturan yang tertulis. “Ketua

ya harus muslim dan laki-laki. Tidak sepakat apabila aturan ketua OSIS harus muslim dan laki-laki dihapuskan.” ujarnya

Dalam konteks yang lebih luas, pengajian-pengajian di Surakarta mendorong muslim di sana untuk tidak mementingkan kemampuan daripada urusan aqidah. “Maka jika nasrani lebih kompeten, ya mereka milih yang kompeten itu. Kalau saya memilih yang Islam tidak kompeten, karena kompeten bisa dibangun. Kalau aqidah nggak bisa serta merta dibangun”, tegas Cholifah, OPK MAN 1 Surakarta.

Senada dengan Cholifah, Yusuf, Rohis SMAN 1 Surakarta menegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki dan muslim adalah perintah Allah dalam al-Quran. “Kalau saya boleh memilih, pemimpin itu harus muslim. Di dalam Al Quran juga dijelaskan “Taatilah Allah, taatilah rasul, dan pemimpin di antara kalian, apabila tidak salat jangan kamu ikuti. Dan orang muslim lebih tahu bagaimana bersikap untuk dirinya dan orang yang dipimpinya. Kalau mengikuti orang non muslim, nanti malah muslim yang terdiskriminasi. Namun, apabila sudah terpilih non muslim dan tidak bisa diganti, ya kita hormati untuk urusan duniawi saja”.

Sikap simpati jika pemimpin yang telah terpilih adalah non muslim juga disampaikan oleh Nisa, dari SMAN 1 Surakarta. Nisa menegaskan bahwa ia akan tetap menyayangkan adanya pemimpin non muslim yang terpilih dalam proses demokratisasi.

Meskipun demikian, perbincangan tentang ketidakbolehan kepemimpinan non muslim rupanya merupakan legitimasi dari fatwa MUI terkait kepemimpinan non muslim. Anggi, SMAN 3 menyatakan bahwa dia pernah mendengar ada fatwa dari MUI tentang ketidakbolehan memilih pemimpin non muslim. “Dulu tuh pernah kayak fatwa, kan kayak ada surat gitu buat kayak memilih yang Islam itu, terus dikirim sama temen-temen gitu jadi kayak dibahas-bahas”, ujarnya.

Kepemimpinan non muslim sebagaimana ada di Solo juga mendapat kritik pedas dari Ega. Siswa MAN 2 Surakarta ini berpandangan bahwa kiprah FX Rudyatmo di Solo kurang maksimal dalam mendukung acara atau

kegiatan Muslim. “Wali Kota Solo non muslim kurang tepat. Ketika ada acara muslim tidak didukung maksimal”, ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Furqon, Rohis MAN 1 Surakarta, “Pemimpin non muslim di Surakarta merugikan umat Islam. Karena pemimpin non muslim pasti mendukung kegiatan-kegiatan dan program non-Islam. Kalau pemimpin Islam pasti juga mengembangkan Islam sendiri, itu pasti. Sekarang yang terasa kristenisasi. Sekolah-sekolah Kristen dulu nggak ada sekarang banyak, semakin mewah. Misionaris tersebar di daerah-daerah kurang mampu, diberi sesuatu untuk dipancing datang ke gereja”.

Dalam ranah dan pemahaman teologis, Nindya menyebut bahwa seorang pemimpin harus juga seorang ulama. Syarat menjadi seorang pemimpin adalah harus tahu ilmu agama, akhlaknya bagus, sehingga ia tidak mudah menyeleweng atau menyalahgunakan kekuasaan.

“Pemimpin itu adalah orang-orang yang tahu ilmu agama, kayak ulama-ulama (jadi nggak sembarang orang) yang mungkin pendidikannya bagus, akal nya bagus, tapi akhlaknya nggak bagus. Kalau ulama kan dah jelas mereka itu ilmunya banyak dan akhlaknya juga jelas terjamin jadinya kemungkinan buat untuk penyelewengan-penyelewengan itu kecil. Nah itu sih yang pas menurut saya”. (Nindya, SMAN 3)

Lebih lanjut, kepemimpinan haruslah Islam dan laki-laki. Seorang perempuan mempunyai amal ibadahnya sendiri. Jadi tidak perlu menjadi seorang pemimpin. “Kalau perempuan itu ditakdirkan bukan untuk memimpin dan perempuan itu masih labil dan belum bisa tanggung jawab penuh” ujar Nisa, SMAN 1 Surakarta.

Menyerahkan kepemimpinan kepada perempuan juga mereka yakini sebagai awal dari kehancuran sebuah bangsa. “Jika menyerahkan urusan kepemimpinan kepada perempuan, maka tunggulah kehancurannya”, tegas Hasan, siswa MAN 2 Surakarta, sembari menyitir pendapat sebuah Hadis.

#### **b. Pandangan terhadap Liyan**

Liyan atau orang lain yang berbeda agama maupun berbeda paham tak luput dari pandangan siswa sekolah menengah atas di Solo. Mereka masih menganggap yang berbeda dengan dirinya dengan sebutan kafir atau sesat.

Misalnya, dalam masalah syiah. Pandangan siswa terkait syiah sangat dipengaruhi oleh ceramah keagamaan yang mereka dapatkan dari luar sekolah. Pengajian di masjid kampung yang didukung oleh Ustaz-ustaz idola menambah keyakinan bahwa Syiah bukanlah Islam. Mereka pun dengan lantang menyebut bahwa Syiah perlu dijauhi.

Furqon, Rohis MAN 1 Surakarta misalnya menyebut “Syiah bukan Islam”. Senada dengan itu Fikriyah, MAN 2 Surakarta lebih tegas lagi menyebut bahwa Syiah perlu diperangi. “Ajaran Syiah menyimpang. Syiah aliran sesat. Perlu diperangi. Di depan tidak mengaku syiah, tapi di belakang mengagungkan Ali dan menghina keluarga Nabi”, ujarnya. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Endah, MAN 2 Surakarta menyatakan bahwa Syiah aliran sesat dan harus dijauhi.

Pandangan mereka itu lagi-lagi mereka dapatkan dari pengajian di beberapa masjid. Bahkan di Masjid Baitul Makmur Solo Baru dan An-Nur Madegondo, menurut Fikriyah sering diadakan kajian tentang bahaya laten Syiah yang diisi oleh Ustaz Tengku Azhar.

Kajian serupa juga diakui oleh Furqon. Banyak di masjid-masjid Surakarta yang mengadakan kajian tentang bahaya Syiah secara umum. Bahkan menurutnya, Masjid Nurul Huda Universitas Sebelas Maret juga pernah menggelar pengajian anti Syiah dan PKI. Dalam pandangannya, Furqon yakin bahwa semua itu bertujuan baik, yaitu menyelamatkan umat Islam dari kesesatan Syiah dan bahaya PKI.

Tidak hanya dari siswa, pandangan tentang kesesatan Syiah juga muncul dari kalangan guru. Bahkan, ada guru di MAN 2 Surakarta yang bukan bidang agama, dalam pelajarannya menyisipkan kajian tentang kesesatan Syiah.

“Syi’ah itu menurut saya itu kalau mereka sudah menafikan namanya sahabat-sahabat yang sudah ulama akui seperti Khalifah Abu Bakar Khalifah, Umar Bin Khatab dan sebagainya itu dikatakan bukan Islam”, ujar Pak Prpto, SMA N 5 Surakarta.

Tidak hanya masalah Syiah, dalam memandang media pun, siswa mempunyai pandangan yang cukup menarik. Misalnya, ia memisahkan media

pro Islam dan kontra Islam. Bahkan, jejaring Tionghoa sudah sedemikian menggurita sehingga umat Islam semakin terpinggirkan.

Furqon, misalnya, dengan tegas menyatakan tidak percaya pada beberapa media. Seperti Kompas, Detik.com, dan Metro TV. Baginya media itu tidak mencerminkan Islam. Media itu malah memojokkan Islam sebagai mayoritas di Republik ini.

“Pemiliknya Islam atau bukan? Kalau Kompas saya nggak suka. Republika suka. Kalau di TV sudah nggak suka. Kayak era muslim, muslim.or.id, menurut saya itu termasuk situs terpercaya. Intinya berita-berita online tentang Islam, kalau itu saya yakin. Penyusunnya lebih ke pro Islam, menurut saya tidak menjatuhkan. Menurut saya sekarang banyak media yang ingin menjatuhkan Islam”.

Ia mencontohkan tayangan Metro TV. Tayangan Metro TV seringkali menjelek-jelekkan Islam. Bahkan di acara Talk Show nya pun sudah bernafaskan anti Islam.

“Metro TV itu kan, pemimpinya juga gitu. Bisa dilihat dari acara talk show, dilihat dari judulnya. Headlinenya tidak sesuai, selalu ditampilkan yang jelek-jeleknya saja saat kemarin ada Aksi 212. Ngambilnya dari orang-orang yang sebetulnya sudah tidak suka dengan Islam. Sehingga yang ada hanya berita-berita negatif tentang Islam.” (Furqon, MAN 1 Surakarta)

Dalam peristiwa 212, Furqon mempunyai pandangan bahwa media tidak fair memberitakan sebuah fakta. “Kan kalau kita baca, isinya kaya gini. Akan timbul pertanyaan. Misal aksi 212, di media ditulis hanya ratusan ribu, padahal jutaan orang yang ikut aksi. Pas demo di LAPAS Pak Ahok ada 800.000, padahal yang ada 8 orang”.

Ia pun berkesimpulan bahwa media sekarang jahat terhadap orang muslim. Orang kafir itu maunya menjatuhkan Islam. “Musuhnya Islam kan mereka yang kafir”, ujar Furqon.

Orang kafir adalah mereka yang memusuhi Islam dengan banyak cara, salah satunya dengan media. “Orang yang tidak meyakini kebenaran Islam (non-muslim itu pasti), mencari-cari kesalahan Islam, ingin menjatuhkan Islam, menghancurkan juga”, tegasnya.

Senada dengan Furqon, Kays, siswa MAN 1 Surakarta, menghimbau masyarakat agar jangan terlalu percaya pada media. “Jangan terlalu percaya mengenai kebenaran berita di media. Mungkin bisa menanyakan kepada yang lebih tahu, klarifikasi”, ujarnya.

Maka menurut mereka, umat Islam perlu meningkatkan keimanan, lebih memahami Islam itu sendiri, mengamalkan ajaran-ajaran dalam Islam, dan tidak mendukung produk-produk orang kafir. “KFC, McDonald ndak usah beli aja. Membantu dan mendukung pengusaha muslim, mengingat pengusaha muslim sedikit. Makanya itu, kita harus membantu dengan menjadi konsumennya, tidak membeli di Alfamart, tapi di warung tetangga. Kan itu salah satu berkah juga”, tegas Furqon.

Furqon menambahkan bahwa umat Islam harus sadar diri jangan sampai terlena. Sebenarnya memanjakan namun malah untuk menghancurkan. Seperti kemudahan Alfamart dengan diskon di mana-mana, itu baginya, memanjakan namun di balik itu ada maksud tertentu. “Produk Cina dijual murah. Seperti narkoba untuk merusak generasi anak muda”, tandas Furqon.

Mereka memandang liyan dengan sinis, bahkan mereka merasakan adanya campur tangan dan desain media yang ingin menghancurkan Islam. Mereka mempunyai kesadaran keimanan terkait dengan semakin tidak berdayanya umat Islam di tengah gempuran ekonomi global saat ini.

Pandangan keagamaan semacam ini, sebagaimana tergambar di atas menunjukkan bahwa mereka tidak belajar dari buku atau guru utama. Melainkan mereka belajar dari media sosial. Youtube, WA, dan media online menjadi rujukan utama mereka dalam memahami keagamaan. Padahal Bu Afifah, guru Pendidikan Agama Islam SMAN 6, berulang kali menegaskan kepada siswanya bahwa belajar dari internet (tanpa guru) sama saja belajar dengan setan. Meskipun, nampaknya petuah tersebut kurang mempan terhadap para pelajar, khususnya di Sekolah Menengah Atas Surakarta. Apalagi faktanya pelajar cenderung lebih berminat belajar dengan tokoh agama yang lain di luar sekolah daripada dengan guru agamanya sendiri, hal ini membuat pihak sekolah tak lagi memiliki kendali atas informasi dan pengetahuan apa saja yang siswanya dapatkan di luar jam sekolah. Pelajar seakan selalu haus

akan pengetahuan keagamaan karena jam pelajaran agama yang disediakan sekolah sangat singkat. Dan dahaga itu kemudian berakhir dengan mengikuti pengajian di luar sekolah, dan ‘mengaji’ informasi-informasi di media sosial.

Sementara itu, pemanfaatan media sosial menjadi cara baru bagi kelompok radikal untuk menyebarkan benih-benih ideologi ekstrimis. Facebook, YouTube, Twitter, Blog hingga aplikasi layanan pesan gratis seperti WhatsApp kini menjadi alat yang ampuh bagi kelompok teroris untuk melakukan propaganda, mendapatkan pengaruh, dan menjaring keanggotaan warga di jejaring sosial (netizen). Dalam konteks ini, anak-anak muda menjadi target propagandanya.

Di Indonesia, setiap tahun jumlah pengguna internet berkembang sangat pesat. Laporan penelitian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bersama Pusat Kajian Komunikasi (Pusakom) Universitas Indonesia pada 2014 melaporkan, pertumbuhan jumlah pengguna internet di dalam negeri terus meningkat sejak 2005. Jika pada sepuluh tahun lalu jumlahnya 16 juta orang, pada 2014 telah mencapai 88,1 juta netizen (34,9% dari jumlah penduduk Indonesia 252,4 juta jiwa).

Dilihat dari usia netizen, riset tersebut menjelaskan, sebanyak 49% atau hampir setengahnya berusia 18 tahun hingga 25 tahun. Sementara itu, jenjang pendidikan mereka 64,7% lulusan SMA sederajat. Sebanyak 87% para netizen ini mengaku menggunakan media sosial saat terkoneksi dengan internet, sedangkan 68,7% untuk searching dan browsing.<sup>16</sup>

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa anak muda perlu dibekali pemahaman yang baik terkait penggunaan media sosial. Mereka perlu mendapatkan pengarahan terkait penyaringan informasi yang diambil dari berbagai sumber atau referensi dari internet. Dari hasil penelitian ini, memang didapatkan informasi bahwa belum ada agenda, baik yang direncanakan maupun sudah berjalan, terkait pelatihan siswa di sekolah, khususnya di SMA Surakarta, dalam menangani HOAX. Beberapa guru menyatakan bahwa arahan tersebut sudah cukup disampaikan saja secara umum di sela-sela pelajaran tengah berlangsung. Padahal pengarahan secara khusus terhadap

---

16 Nafi' Muthohirin. (2016). <https://geotimes.co.id/kolom/mewaspadai-radikalisme-islam-di-media-sosial/>.

siswa agar membiasakan klarifikasi dan menanyakan lebih lanjut terkait konten isi di media sosial sangat perlu diagendakan. Guru, ustaz, tokoh agama, dan lainnya memiliki peran penting agar dapat lebih sigap dalam menghadapi era ini. Jika gurunya saja tidak tanggap, maka siswa-siswa sekolahnya akan semakin menjadi target radikalisme kelompok-kelompok tertentu.

#### **4. Mencari Model Ketahanan dari Kasus-kasus di Sekolah**

Ketahanan sekolah menghadapi arus radikalisme tampaknya tidak mudah. Sekolah seolah tak kuasa membendung pemikiran, pemahaman, dan sikap radikal yang melekat pada siswanya. Siswa seakan telah menemukan pemahamannya sendiri yang sulit untuk dipulihkan. Hal ini ditambah dengan ketidakmampuan sekolah dalam memberikan arah pada proses internalisasi nilai kebinekaan. Sekolah masih sekadar melakukan dan mendampingi aktivitas keagamaan siswa. Namun, mereka memilih lepas tangan dengan kegiatan siswa setelah jam pulang sekolah. Hal ini diakui oleh Pembina kesiswaan di MAN 2 “Kami hanya mendidik di sekolah, saat sudah keluar dari gerbang, kami sudah serahkan kepada masyarakat dan keluarga”.

Pernyataan tersebut memang benar adanya. Sekolah bertugas dalam melakukan penanaman nilai saat di lingkungan sekolah. Namun, saat siswa kembali kepada keluarga dan masyarakat, maka tanggung jawabnya berada pada keluarga siswa. Keluarga menjadi benteng pertahanan siswa dalam membangun mental inklusif dan berbineka.

Dalam hal ini, inklusifitas dan kebinekaan perlu menjadi laku dan kerja bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tri Pusat pendidikan— meminjam istilah Ki Hadjar Dewantara perlu bekerja bersama dalam proses internalisasi nilai keindonesiaan yang inklusif.

Dalam ranah yang lebih kecil, yaitu sekolah, data yang didapat dari lapangan menunjukkan pada kerja sekolah masih dalam usaha-usaha preventif. Salah satu usaha pencegahan ini berbentuk screening terhadap mentor. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala Sekolah SMAN 6. “Kami melakukan pengetatan terhadap mentor. Kami harus cek mereka dari mana. Dan Alhamdulillah kami tahu mereka, karena banyak dari alumni sekolah”.

Model pengetatan mentor yang masuk di dalam OSIS dan juga Rohis pun dilakukan oleh Kepala MAN 2 yang merangkap jabatan Kepala MAN 1 Surakarta, Slamet Budiyo. “Kami sangat hati-hati dalam merekrut mentor. Jika ada gelagat yang kurang menyenangkan, kami langsung menghentikan kegiatan”.

Cara ini memang usaha pencegahan yang cukup baik. Namun, saat siswa masih “bebas” mendapatkan informasi dari internet dan pengajian di luar sekolah, maka akan sulit mendapatkan siswa yang berpikiran terbuka.

Model lain yang juga muncul adalah mendorong siswa untuk belajar dari guru. Guru atau Ustaz akan membimbing mereka ke jalan “yang benar”. Salah satu praktek positif yang dilakukan guru dalam mengarahkan siswanya ditemukan di SMAN 6. Guru ini mengatakan, “Belajar tanpa guru dan atau belajar dari internet, berarti belajar dengan setan”, ungkap Guru PAI di SMAN 6 tersebut. Ia mengaku sering menyampaikan hal tersebut kepada siswa saat pelajaran PAI. Penyampaian yang berulang-ulang ini diharapkan dapat memungkinkan siswa sadar bahwa belajar memang harus didampingi oleh seorang guru. Pendampingan ini diperlukan agar mereka tidak terjebak dalam bayangan pemikiran yang mungkin tidak sesuai dengan narasi teks yang ada. Maka, gurulah yang akan membimbing mereka. Gurulah yang akan menjadi mentor mereka dalam menetapkan “kebenaran relatif”.

Model pembelajaran tersebut tampak cukup baik. Sayangnya, keterbukaan siswa kepada guru masih menjadi sebuah tanda tanya tersendiri. Dalam proses pencarian ilmu, seorang siswa berhak untuk berinteraksi lebih dekat dengan guru di luar jam kelas agar mereka mendapatkan transfer ilmu yang lebih optimal. Namun, hampir di setiap sekolah ditemukan sebagian besar guru telah disibukkan dengan urusan non akademik. Kondisi ini memungkinkan kedekatan siswa dengan guru menjadi kurang mesra. Kalaupun ada siswa yang bertanya di tengah pelajaran, dua siswi rohisi dari MAN 2 Surakarta, mengaku hal tersebut dilakukan hanya sebatas formalitas saja untuk menggugurkan “kewajiban” bertanya di kelas. Meskipun demikian, kewajiban bertanya yang dilakukan oleh salah satu guru di MAN 2 Surakarta ini di sisi lain dapat dilihat sebagai proses yang baik, karena guru tersebut

telah membuka ruang dialog dengan siswanya di kelas. Ruang dialog tersebut setidaknya berpotensi mendekatkan guru dengan siswanya agar dapat lebih terbuka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh guru MAN 2 yang bertugas mengajarkan PKN di kelasnya, “Kedekatan dengan siswa menjadikan saya dan siswa dapat berbicara banyak hal. Tidak hanya sebatas masalah pelajaran sekolah, namun juga masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam pergaulan sosial,” ungkapnya.

Lebih jauh lagi, ia mengaku sering menyapa mereka dengan cara memanggil atau menyapa terlebih dahulu. Sapaan inilah yang mengakrabkan guru dan siswa. Siswa pun akhirnya lebih sering dan nyaman belajar di perpustakaan. Pasalnya, sang guru juga menjadi pengelola perpustakaan MAN 2. “Sapaan dan mendorong mereka untuk terus berprestasi, akan mendekatkan kita dengan siswa”, ujar Guru MAN 2 bernama Bu Dyah Nur Aini Fathimah ini.

Guru yang mulai bertugas di MAN 2 sejak tahun 1997 itu mengaku seringkali ditemui siswa saat mereka menghadapi masalah. Kedekatan inilah yang menguatkan mereka saat siswa menghadapi masalah dan juga mendorong prestasinya.

Model kedekatan ini perlu menjadi kerja bersama. Semua guru perlu dekat dengan siswanya. Kedekatan inilah yang akan membuka ruang pergaulan siswa. Siswa akan mendapatkan banyak input yang ia dapatkan dari luar kelas. Input inilah yang memungkinkan mereka mempunyai pandangan dari luar mata pelajaran tentang keagamaan dan kebangsaan.

Nilai keagamaan dan kebangsaan perlu ditanamkan dalam ruang dialog yang halus dan lembut di luar kelas. Pasalnya, jika di dalam kelas, **ruangnya** terbatas pada materi yang harus selesai sesuai dengan target. Membudayakan dekat dengan siswa secara berjamaah akan menguatkan semangat mereka dalam belajar dan memungkinkan keterbukaan sikap dan nilai hidup.

Guru perlu menjadi teman yang baik bagi siswanya. Guru selayaknya tidak canggung menyapa siswa terlebih dahulu. Saat jam istirahat guru dapat menyapa mereka saat di kantin atau ruang perpustakaan.

Proses tersebut tentunya perlu memegang teguh prinsip *empan papan*. Empan papan berarti dapat menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Seorang guru menempatkan posisinya sebagai seorang pendidik, dan siswa memosisikan diri sebagai seorang terdidik. Melalui hubungan ini, maka proses pendidikan akan berlangsung dengan baik dan efektif.

Lebih lanjut, keterbukaan sikap dan pemaknaan dalam nilai hidup ini perlu juga didorong dari lingkungan keluarga yang bersinergi dengan sekolah. Orangtua perlu sesekali datang ke sekolah untuk mengetahui aktivitas sekolah dan seluruh kegiatan yang ada di dalamnya.

Guna mewujudkan kedekatan itu, SMAN 3 Surakarta mewajibkan siswa kelas 10 untuk berangkat diantar orang tuanya dalam setahun. Menurut Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, kegiatan ini selain untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada siswa dan orang tua, juga untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas seringkali terjadi saat siswa belum cukup umur untuk mempunyai SIM sebagai tanda kecakapan mereka dalam mengendarai sepeda motor. Melalui kegiatan ini, guru pun akan tahu kondisi orang tua siswa. Bahkan berkat kebijakan tersebut, seringkali orang tua yang mengantar anaknya, kemudian datang menemui guru untuk sekadar menanyakan aktivitas belajar anaknya. “Bahkan, ada yang sampai bertanya, kenapa anak saya kalah dengan yang lain dalam rangking, padahal mereka juga sudah belajar dengan rajin”, ungkap Kepala Sekolah SMAN 3 Surakarta.

Pertanyaan itu seringkali terlontar dari orang tua yang berasal dari etnis Tionghoa. Etnis ini begitu peduli terhadap anak-anaknya demi masa depan pendidikan anak mereka agar melakukan kegiatan-kegiatan positif. Kedatangan orang tua ke sekolah ini menjadi sebuah terobosan yang unik. Pasalnya, sekolah selalu terbuka untuk mendengar keluhan orang tua. Dengan keterbukaan ini, maka hal-hal yang tidak diinginkan akan dapat dicegah sejak dini.

Inklusifitas dan kebinekaan pun dapat terbangun saat orang tua menanyakan bagaimana proses belajar dari guru dan pimpinan sekolah. SMAN 3 juga rutin melakukan kegiatan pertemuan sekolah dengan orang

tua untuk mendengar dan mendapat masukan terkait dengan kegiatan belajar mengajar.

Selain itu, kegiatan pencegahan munculnya sikap radikalisme di kalangan siswa juga tergambar dari pemaknaan pendidikan karakter. Kepala SMAN 3 selalu menegaskan bahwa semua guru termasuk guru magang harus hafal nilai-nilai utama pendidikan karakter. Ia pun, walaupun mengampu mata pelajaran Matematika juga mendorong setiap siswanya, “Kalau ketemu saya, mesti 10 menit sudah hafal 18 nilai pendidikan. Karena saya mengajarkannya dengan model mengambil huruf-huruf depan dan melafalkannya dengan menyanyi”, ungkap Pak Kepala Sekolah.

Menghafal walaupun bernilai kognitif, namun jika dipraktekkan dengan cara yang baik akan menguatkan keindonesiaan dan keagamaan dalam diri siswa. Kegiatan ini juga akan mendorong mereka tahu apa dan bagaimana pendidikan karakter itu. Melalui kegiatan menghafal, mereka juga didorong untuk tahu dan mampu mempraktekkan pendidikan karakter dalam keseharian.

Nilai kejujuran misalnya. Saat mereka tahu nilai jujur, maka ia akan berusaha mempraktekkan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Model ini pun tampaknya cukup berhasil di lingkungan SMAN 3. Seorang siswa Aktivistis Kerohanian Kristen misalnya, ketika ia ditanya tentang 10 nilai karakter, ia dapat menjawab seluruhnya dengan baik. Ia pun menyatakan dengan tegas nilai religius dan jujur menjadi nilai utama dalam penanaman pendidikan karakter.

Model pencegahan dan ketahanan sekolah menghadapi radikalisme memang beragam. Namun *lesson learn* dari semua ini adalah bagaimana ada kerja bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kerja bersama ini diperlukan agar sekolah tidak hanya menjadi pihak tertuduh saat banyak siswa berpikiran radikal.

## **5. Internalisasi Nilai Kebinekaan, Transmisi dan Penerjemahan Nilai**

Nilai kebinekaan yang telah dipraktikkan oleh siswa di sekolah--walaupun belum terlembaga—sudah dapat ditemukan. Salah satunya nilai gotong royong yang bermakna meringankan beban orang lain. Pengakuan Anya, seorang anggota Roket SMAN 6, sungguh membuncahkan harapan akan

lestariannya nilai kebinekaan. Ia menceritakan bahwa ada siswa Muslim yang tergabung dalam Rohis bersedia dengan sukarela membantu mengumpulkan botol bekas untuk disumbangkan kepada Rokot dalam rangka pengumpulan dana.

Rokat seringkali melakukan kegiatan pengumpulan dana melalui usaha. Salah satunya adalah mengumpulkan botol bekas dari teman sekolah. Mereka mengumpulkan dalam satu tempat, biasanya di ruangan Rokot. Jika sudah banyak, mereka akan menjualnya ke pengepul botol minuman bekas.

Hal tersebut juga diakui oleh Hanifia, Pengurus Rohis SMAN 6. Jika ia mempunyai botol, maka akan dikumpulkan jadi satu dan diserahkan kepada pengurus Rokot. Pengumpulan botol bekas ini sebagai bentuk upaya membantu Rokot dalam mendukung kegiatan mereka.

Kegiatan ini memang kecil. Namun, dapat dilihat sebagai rintisan dalam proses membangun kebinekaan. Pada tahap ini, siswa telah mempunyai kesadaran—walaupun masih belum semua—untuk membantu temannya dari komunitas agama lain untuk mengumpulkan botol bekas.

Lebih jauh lagi, metode pengumpulan botol bekas ini jika dikelola dengan baik, dan melibatkan stakeholder sekolah, dalam hal ini pimpinan sekolah, tampaknya akan mampu merekatkan mereka. Rokot, Rohis, Rokris yang selama ini belum mempunyai agenda dalam membangun inklusifitas dan kebinekaan dapat melakukan dan memulai dari hal kecil ini.

Pengumpulan botol bekas dengan demikian akan menjadi pemantik bagi usaha dan kegiatan melestarikan kebinekaan yang lebih besar. Tidak hanya itu, usaha kecil ini akan mampu mendorong pertemuan antariman yang lebih erat atas dasar kemanusiaan dan keadilan sosial.

'*Best practice*' lain yang telah dilakukan oleh siswa SMAN 6 adalah praktik kepemimpinan minoritas. Oki, pengurus OSIS SMAN 6, bercerita bahwa di kelasnya yang mayoritas muslim dipimpin oleh ketua dan wakil ketua kelas dari Kristen. Mereka pun tidak berkeberatan saat dipimpin oleh pemimpin Kristen. Baginya, dalam kelas yang penting ada tanggung jawab dan dapat saling belajar satu sama lain.

Apa yang diutarakan oleh Oki di atas menjadi sebuah contoh kecil di mana kehidupan yang beradab dapat dibangun dari kepercayaan yang dimulai dari ruang kelas. Ruang kelas dapat menjadi media pembelajaran penumbuhan prinsip musyawarah mufakat dan melatih kepemimpinan tanpa harus memandang agama.

Saat di kelas sudah terbangun '*trust*' (saling percaya) antar sesama pemeluk agama, maka kehidupan kebangsaan akan semakin kuat dan kukuh. Mereka akan terbiasa dengan perbedaan. Mereka pun tidak akan mudah terprovokasi oleh isu kepemimpinan berbasis agama.

Selain di SMAN 6, *best practice* juga muncul dari SMAN 3. Pengurus OSIS di sana mempunyai pandangan yang plural, selain didorong oleh kondisi sekolah, mereka juga menjelaskan terpilihnya mereka tak lepas dari basis dukungan "kelompok supporter SMA 3". Kelompok ini tidak memandang etnis dan agama. Bahkan, salah seorang etnis Tionghoa dan Kristen memilih ketua OSIS yang notabene dari muslim.

Bagi Rifki dan Bintang, Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMAN 3, siapapun yang terpilih tidak masalah. Asalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa kepemimpinan OSIS di SMAN 3 tidak terpengaruh oleh masalah Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Siapa saja dapat maju dan terpilih asal mempunyai kecakapan dan *good looking*.

Praktik baik yang dilakukan oleh Praba, seorang etnis Tionghoa Kristen dan Pengurus MPK SMAN 3, menunjukkan sikap yang lebih dewasa. Ia memilih pasangan calon muslim, karena ia anggap mempunyai kecakapan dalam memimpin OSIS SMAN 3. Padahal saat itu ada juga calon pasangan dari non-Muslim (Kristen). Namun, ia memilih berdasarkan kompetensi, dan bukan didasarkan pada agama.

Apa yang ada di SMAN 3 merupakan potret yang baik dalam membangun keberagaman yang sehat. Melalui latihan kepemimpinan berbasis kecakapan inilah akan muncul bibit bagus bagi kebangsaan dan kenegaraan di masa yang akan datang.

Sikap seperti itu perlu terus disuarakan dan diadopsi di berbagai sekolah, agar sekolah tidak menjadi pertarungan “over dosis agama” melainkan, menjadi persemaian yang baik bagi kehidupan yang lebih baik.

Dalam kaitannya dengan hubungan MPK dan OSIS, SMAN 3 juga layak dijadikan contoh. MPK menjadi mitra strategis OSIS dalam menjalankan organisasi. Mereka menyiapkan serangkaian seleksi calon anggota/pengurus OSIS. Seleksi tidak memandang darimana asalnya, namun lebih pada profesionalitas, dan yang paling utama adalah *good looking*. Sekolah (guru) juga melakukan seleksi untuk menentukan calon pasangan final ketua dan wakil ketua OSIS. Calon dari agama dan etnis apapun bisa menjadi ketua OSIS asal dipilih oleh siswa yang lain.

Spirit kejujuran, kebersamaan, dan keterbukaan ini perlu menjadi contoh bagi sekolah lain dalam menyelenggarakan pemilihan OSIS. Saat OSIS telah mampu memberi contoh bagi keteladanan dalam kehidupan (pemilihan), maka inilah persemaian yang baik bagi kebangsaan di masa yang akan datang.

# 2

## SUKABUMI

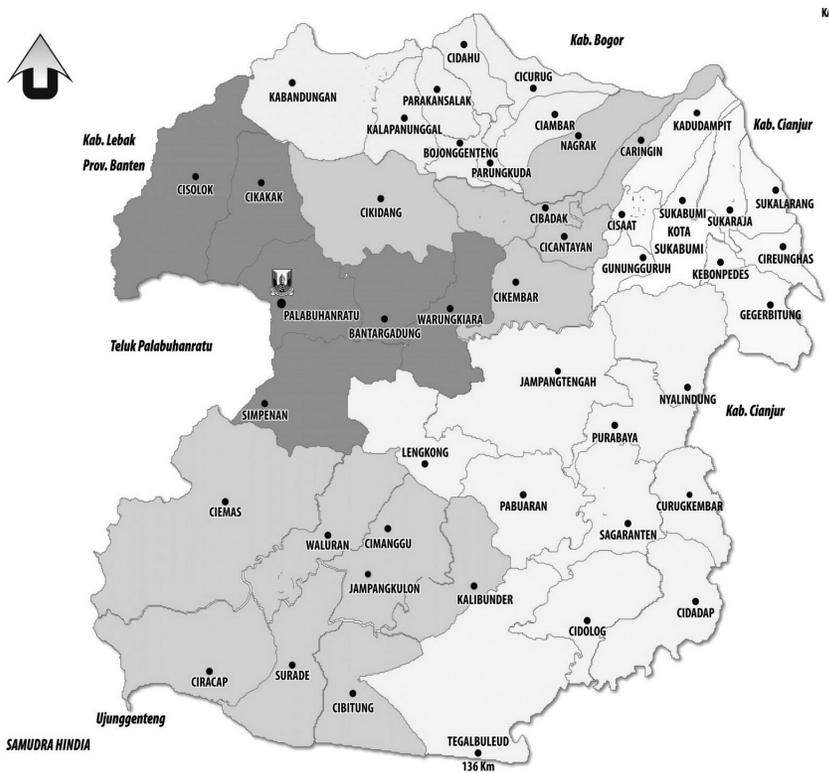
### A. GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN KAB. SUKABUMI

#### 1. Potensi Geografis

Secara geografis Kabupaten Sukabumi berbatasan dengan Kab. Bogor di sebelah Utara, Samudera Indonesia sebelah Selatan, Kab. Lebak sebelah Barat, dan Kab. Cianjur di sebelah Timur. Batasan geografis ini kemudian cukup memengaruhi budaya, bahasa, dan corak keagamaan masyarakat Kabupaten Sukabumi dengan wilayah yang mengelilinginya. Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah terluas kedua di pulau Jawa setelah Banyuwangi, dimana dari tahun 2005 sampai tahun 2008 mengalami pemekaran kecamatan dari 45 menjadi 47 kecamatan, pemekaran desa dari 345 desa menjadi 363 desa dan 4 kelurahan dengan kecamatan Pelabuhan Ratu sebagai ibukota kabupaten. Meskipun begitu, kantor pemerintahan banyak tersebar di Cisaat dan Cibadak dibanding Pelabuhan Ratu itu sendiri. Bahkan Pendopo yang menjadi Kantor Bupati pun secara administratif terletak di wilayah Kota Sukabumi. Selain itu, secara administratif Kabupaten Sukabumi juga berbatasan secara langsung dengan wilayah Kota Sukabumi yang merupakan daerah kantong (*enclave*) dikelilingi beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Sukabumi pada umumnya meliputi permukaan yang bergelombang di daerah Selatan dan bergunung di daerah Utara dan di Tengah dengan luas 27.568,49 ha. Daerah pesisir pantai dengan ketinggian 0-25 m seluas 10.455,45 ha meliputi 10 kecamatan di Sukabumi Selatan yaitu Ciemas, Ciracap, Surade, Cibitung, Tegalbuleud, Cidolog, Pelabuhan Ratu, Simpenan, Cisolok, dan Cikakak. Bentuk topografi ini kemudian menjadikan struktur geologi wilayah Kabupaten Sukabumi

terbagi menjadi dua zona yaitu zona Utara dan zona Selatan, dengan batas Sungai Cimandiri yang mengalir dari arah Timur Laut ke Barat Daya. Zona Utara merupakan kawasan yang dipengaruhi oleh vulkanik dan sebagian besar merupakan daerah yang subur, dimana terdapat kawasan perkebunan, persawahan dan kegiatan pertanian lainnya. Sedangkan zona Selatan merupakan kawasan yang berbukit-bukit yang terdiri atas kawasan pertanian lahan kering, perkebunan dan kehutanan.



Gambar 1. Peta Sukabumi

Pertanian di Kabupaten Sukabumi terutama tersebar di bagian Utara aliran Sungai Cimandiri. Kondisi ini tidak bisa terlepas dari keberadaan Gunung Gede-Pangrango di sebelah Utara dan Gunung Salak di sebelah Barat. Selain karena didukung kondisi lembah dan lereng di kedua gunung tersebut yang melandai ke arah Selatan, juga karena kondisi hutannya yang memberi daya dukung iklim dan tata air yang baik sehingga daerah pertanian relatif lebih subur dibandingkan daerah pertanian bagian selatan aliran sungai Cimandiri.

Dalam sejarahnya, sejak dulu daerah Utara terkenal sebagai penghasil komoditi perkebunan berupa karet dan teh yang sempat memegang peranan penting dalam perekonomian negara di masa lampau. Sementara adanya dukungan tata air yang sangat baik, menyebabkan daerah utara berkembang menjadi daerah persawahan, usaha tani sayur mayur, peternakan dan budidaya ikan air tawar yang cukup potensial. Potensi sumber daya pertanian lain yang juga terdapat di Kabupaten Sukabumi adalah kehutanan. Sebaran kawasan hutan di Kabupaten Sukabumi terdapat di beberapa kecamatan, dengan pengelompokan besar terdapat di Sukabumi-Sukaraja bagian Utara, Cicurug-Parungkuda-Parakansalak-Kalapanunggal-Cisolok, Pelabuhan Ratu, Ciemas, Surade-Jampangkulon-Kalibunder-Lengkong-Tegalbuleud-Cidolog-Sagaranten dan Nyalindung.

Potensi sumber daya pesisir dan kelautan Kabupaten Sukabumi terutama tersebar di 7 (tujuh) wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, yaitu sepanjang  $\pm$  117 km yang memanjang dari wilayah kecamatan Cisolok, Pelabuhan Ratu, Ciemas, Ciracap, Surade, Cibitung, dan Tegalbuleud. Adapun jenis potensi sumber daya pesisir dan kelautan yang ada diantaranya seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, penyus, bahan tambang dan mineral, serta pariwisata. Sejauh ini, pemanfaatan pesisir dan kelautan di wilayah Kabupaten Sukabumi, selain dimanfaatkan untuk pariwisata pantai, juga pelabuhan nelayan sebagai sarana bagi penangkapan ikan. Daerah Pelabuhan Ratu dan sekitarnya yang saat ini menjadi pusat kunjungan wisata, merupakan titik tumbuh dalam pengembangan daerah wisata pantai di bagian Selatan Sukabumi.<sup>1</sup>

## **2. Peta Demografi dan Agama**

Secara demografi, jumlah Penduduk Kabupaten Sukabumi berdasarkan proyeksi tahun 2016 sebesar 2.444.616 jiwa dengan komposisi; 1.239.276 laki-laki dan 1.205.337 perempuan dimana kepadatan penduduk mencapai 590 jiwa per km<sup>2</sup>.<sup>2</sup> Sedangkan secara Agama, penduduk Kabupaten Sukabumi menurut Kementerian Agama Jawa Barat, jumlah pemeluk Islam tercatat

---

1 Data-data ini diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, Bappeda Kabupaten Sukabumi.

2 Sukabumi dalam Angka 2017.

2.508. orang, Kristen 9.137 orang, Katolik 40.608 orang, Hindu 1.250 orang, Buddha 8.875 orang, dan Konghucu 13 orang. Data ini belum memasukkan pemeluk agama-agama di luar yang enam agama resmi tersebut (aliran kepercayaan tradisional). Kemenag juga mencatat ada tiga kelompok aliran sempalan di Sukabumi tanpa keterangan.<sup>3</sup> Di Kabupaten Sukabumi, menurut data Kementerian Agama Jawa Barat, tercatat jumlah masjid sebanyak 1.319, gereja Kristen 15, gereja Katolik 2 (dua) dan 3 (tiga) vihara. Tidak ada pura dan klenteng di kabupaten ini.<sup>4</sup> Jika melihat data tersebut, maka akan terlihat homogenitas masyarakat Kabupaten Sukabumi secara Agama, dimana proporsinya berbeda jauh antar agama Islam dengan agama lainnya.

Sebagian umat Islam tergabung atau terafiliasi dalam sejumlah organisasi keagamaan yang terafiliasi dengan sekte Sunni. Di antaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUI), atau Matlaul Anwar. Sebagian lagi tergabung dalam organisasi atau komunitas keagamaan yang berdiri pasca reformasi seperti Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Reformis Islam Sukabumi (Garis), Gerakan Ormas Islam Bersatu (GOIB), Forum Umat Islam (FUI), Barisan Anti Aliran Sesat (Brantas), atau Gerakan Anak Sukabumi Anti Ketidakadilan (GASAK). Komunitas Muslim minoritas seperti Ahmadiyah berada di antaranya di wilayah Warungkiara, Jampang Tengah dan Parakansalak. Diperkirakan jumlah anggota JAI sebanyak 1.200-an. Versi Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Timkor Pakem) Kabupaten Sukabumi, jumlah pengikut Ahmadiyah diperkirakan sebanyak 1.005 orang dan tersebar di 10 Desa. Beberapa komunitas adat atau yang oleh pemerintah disebut aliran kepercayaan di antaranya adalah Komunitas Ciptagelar dan Sirnaresmi di Kecamatan Cisolok Pelabuhan Ratu. Timkor Pakem Kabupaten Sukabumi di bawah koordinasi Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak, memiliki definisi dan pengkategorian sendiri mengenai aliran kepercayaan. Kategori tersebut bisa

---

3 Jika merujuk pada data Kab. Sukabumi dalam angka tertera bahwa jumlah pemeluk aliran kepercayaan hanya 24 orang, data ini diragukan karena daerah Cisolok yang merupakan basis warga Ciptagelar jumlahnya mencapai 2000 hingga 3000 orang. Angka yang cukup besar dan masyarakat Ciptagelar seluruhnya menganut aliran kepercayaan leluhur mereka.

4 "Rumah Ibadah," Kementerian Agama Jawa Barat, 26 Agustus 2015 <http://jabar.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=27382&t=474>.

dipersoalkan dari sudut akademis maupun sosiologis (Kajari Cibadak, 2014: 1).<sup>5</sup>

Kultur keagamaan di Kabupaten Sukabumi turut dipengaruhi oleh wilayah perbatasan sekitarnya seperti Bogor yang membuka gerbang tarikat-tarikat (Thoriqoh) masuk, Cianjur yang banyak mendistribusikan pengaruh ormas Islam seperti FPI dan turunannya, Banten yang kuat dengan aliran kepercayaannya, dan Kota Sukabumi yang cukup kencang dengan corak Islam trans-nasional yang dibawa oleh PKS. Nampak luar corak ini terlihat beragam, namun hakikatnya semuanya sama yakni cenderung tradisional bahkan dapat dikatakan cukup konservatif.

### **3. Sosial Ekonomi dan Pendidikan**

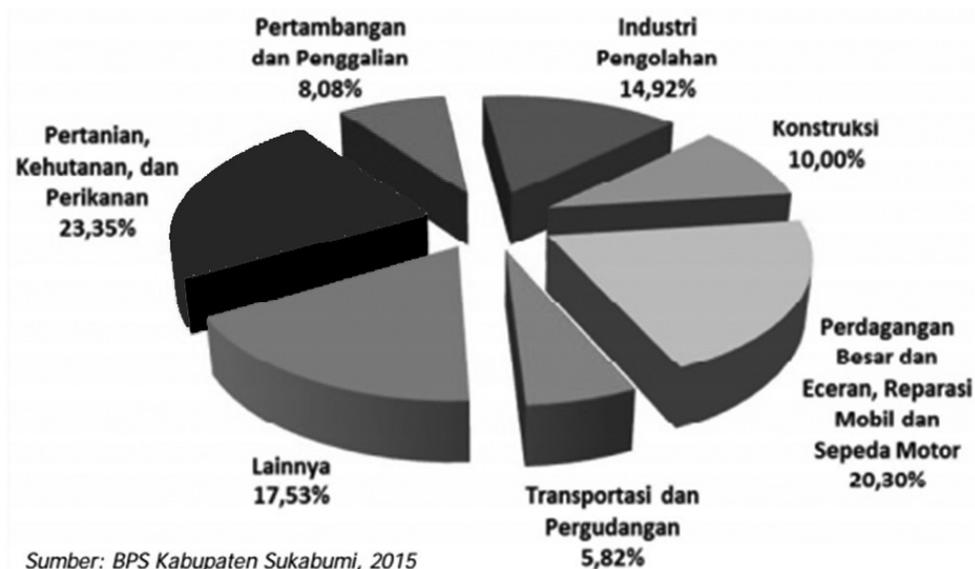
Kondisi wilayah Kabupaten Sukabumi mempunyai potensi wilayah lahan kering yang luas. Saat ini sebagian besar merupakan wilayah perkebunan, tegalan dan hutan. Suatu kondisi penting yang sedang terjadi sehubungan dengan ketenagakerjaan adalah pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian telah menurun. Meskipun secara angka, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, dalam data tenaga kerja di dokumen Kabupaten Sukabumi, masih menempati porsi yang besar, sekitar 30% dari sektor lainnya. Namun jika melihat kondisi, lapangan industri cenderung tumbuh subur di daerah-daerah yang dulunya menjadi kantong-kantong pertanian/perkebunan seperti Cikembar dan Cibadak. Berdasarkan data survei angkatan kerja Agustus 2015, mayoritas pencari kerja adalah mereka yang tamatan SMA/ sederajat sebanyak 17.267 orang. Data ini mengindikasikan bahwa minat akan studi pendidikan tinggi di Kabupaten Sukabumi masih rendah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mencatat ada 20.429 orang pencari kerja di Kabupaten Sukabumi, yang mayoritas adalah perempuan. Dari para pencari kerja ini, Kabupaten Sukabumi juga tercatat sebagai salah satu daerah penyumbang TKI. Rata-rata terbanyak mereka bekerja di Arab Saudi.

Salah satu titik tolak pembangunan suatu daerah yaitu dengan melihat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dari tahun ke tahun. Pertumbuhan

---

5 Baseline Research Potret Hak Kewarganegaraan dan kehidupan Keagamaan, Wahid Institute, LBH, dll.

ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat memang menjadi syarat utama atau indikator keberhasilan pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output (tergantung dari jenis output yang diharapkan/ditetapkan) dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, sehingga keberhasilan pembangunan daerah secara umum dapat terukur. Oleh karena itulah, indikator ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan ke depannya, baik dengan melihat pertumbuhan ekonomi secara periodik maupun pertumbuhan ekonomi sektor lapangan usaha yang potensial. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukabumi berjalan cukup stabil dimana pada tahun 2014 mencapai 5,48 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi paling tinggi sebesar 6,38 persen dan paling rendah pada tahun 2011 sebesar 4,42 persen.



Gambar 2. Struktur Perekonomian Daerah Kabupaten Sukabumi, 2014 (BPS Kabupaten Sukabumi, 2015).

Dari diagram diatas terlihat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih masih menempati porsi terbesar, yakni 23.35%. Hal ini karena sebagian besar struktur geografis Kabupaten Sukabumi mendukung sektor tersebut hanya saja pemanfaatannya belum maksimal dan mulai tergerus menjadi lahan industri. Kestabilan pertumbuhan ekonomi berpotensi memberi “angin

segar” bagi para pelaku ekonomi sekaligus pengambil kebijakan, mengingat pergerakan ekonomi yang stabil menunjukkan keberhasilan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang mendukung pemberdayaan perekonomian daerah. Pertumbuhan perekonomian sektoral pada tahun 2014 didominasi oleh pertumbuhan ekonomi kategori informasi dan komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 16,43 persen dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh sebesar 15,34 persen. Seluruh kategori perekonomian menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif. Meskipun pada kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, pertumbuhannya cukup rendah, yakni hanya sebesar 0,02 persen.<sup>6</sup>

Sementara itu peluang besar terhadap pasar yang dimiliki hingga saat ini belum dimanfaatkan optimal. Keadaan ini menjadi tantangan dan merupakan keharusan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, untuk berupaya lebih keras dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dari sisi sumber daya alam, diperlukan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara bijaksana, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dari sisi kewilayahan, diperlukan peningkatan aksesibilitas wilayah. Dari sisi sumber daya manusia, diperlukan peningkatan kualitas yang memadai, dengan demikian optimalisasi pemanfaatan potensi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dicirikan oleh tingginya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan (terutama kesehatan dan pendidikan), berikut daya belinya.

Untuk Pendidikan, merujuk data yang tersedia di Kabupaten Sukabumi Pada Angka 2016, SMA Negeri yang terdapat di Kabupaten Sukabumi berjumlah 25 sekolah sedangkan SMA Swasta berjumlah 46 sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa di tiap kecamatan belum terdapat SMA Negeri, mengingat kecamatan di Kabupaten Sukabumi berjumlah 47 kecamatan. Adapun jumlah murid, baik di sekolah Negeri maupun Swasta, adalah 26.256 orang. Dan jumlah guru, baik di sekolah Negeri maupun Swasta, adalah 1.271 orang. Sedangkan menurut data Dinas Pendidikan, jumlah sekolah SMA/MA sekitar 195 sekolah & SMK/MAK berjumlah 148 sekolah baik yang dinaungi Diknas maupun Depag. Untuk jumlah pesantren tercatat ada

---

6 Data BPS Kabupaten Sukabumi tahun 2015.

513 pesantren, dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) 2.428 buah. Data tersebut menunjukkan bahwa homogenitas agama masyarakat Kab. Sukabumi berbanding lurus dengan ketersediaan lembaga pendidikan berbasis agama, yakni pesantren di kabupaten tersebut.

Dari uraian dan kondisi indikator di atas menggambarkan bahwa ketersediaan potensi sumber daya dan peluang yang besar tidak menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan pembangunan Kabupaten Sukabumi diperlukan upaya-upaya keras yang bersifat integratif dan kolektif, serta terobosan-terobosan jitu secara kolektif yang melibatkan seluruh pihak terkait (multi stakeholders).

#### **4. Politik dan Pemerintahan**

Saat ini Kabupaten Sukabumi bisa dikatakan menjadi basis kuning (Golkar) karena bupatinya berasal dari Partai Golkar dan secara keterwakilan di DPRD pun sama. Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Periode 2014-2019 terdiri dari Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 8 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebanyak 7 orang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 6 orang, Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 6 orang, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 5 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 4 orang, Partai Demokrat (PD) sebanyak 4 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 4 orang, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebanyak 4 orang, dan Partai Nasional Demokrat sebanyak 2 orang. Kabupaten Sukabumi saat ini dipimpin oleh Marwan Hamami dan Adjo Sardjono sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang memenangkan kontestasi Pilkada pada Desember 2015 lalu. Marwan-Adjo ini didukung oleh partai-partai non Islam seperti Golkar, Demokrat, dan Hanura. Mereka menggantikan Sukmawijaya yang berasal dari PKS sebagai Bupati yang telah memimpin Kabupaten Sukabumi selama dua periode. Meski belum lama menjabat, Bupati saat ini (Marwan Hamami dan Adjo Sardjono) juga memiliki visi & misi yang cukup kental nuansa agamanya yakni “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”. Visi misi tersebut kemudian diimplementasikan dengan adanya perda terkait Infak Shodaqoh dan Gerakan Subuh Berjamaah dimana instruksi yang kedua

merupakan realisasi dari Instruksi Gubernur Jawa Barat. Religius yang dimaksud memang belum terlihat jelas di lapangan, apakah religiusnya dalam bentuk satu pandangan keagamaan saja atau bisa mengakomodir religiusitas semua kelompok agama yang ada di Kabupaten Sukabumi, & tidak hanya yang mayoritas. Realitasnya, dominasi kelompok mayoritas masih mengakar dalam aturan dan pengimplementasiannya, terutama di lembaga pendidikan.

Tanpa mengesampingkan peran Marwan-Adjo sebagai pemimpin, pengaruh Sukmawijaya yang telah memerintah selama dua periode tak bisa dinafikan. Dalam periode kepemimpinannya yang kedua, Sukmawijaya yang kala itu berdampingan dengan Ahmad Djajuli, mematok visi-misi, “mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang berakhlak mulia, maju dan sejahtera”. Dalam dokumen “RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2010-2015”, yang dimaksud dengan akhlak mulia merujuk pada empat sifat Nabi Muhammad Saw: jujur (*shiddiq*), dipercaya (*amanah*), cerdas (*fathanah*), & menyampaikan (*tabligh*). Di bawah kepemimpinan Sukmawijaya juga terdapat sejumlah regulasi dan kebijakan yang diterbitkan terkait dengan pendidikan yang dipandang kental nuansa keislamannya, diantaranya ialah:

- Instruksi Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pemakaian Busana Muslim bagi Siswa dan Mahasiswa di Kabupaten Sukabumi.
- Perbub Nomor 6 Tahun 2006 Program Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan sebagai bagian dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Diniyah.
- Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2007 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Sukabumi.
- Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Sepuluh Pembiasaan Akhlak Mulia di Sekolah.
- Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan.

Dalam mengimplementasikan semua undang-undang tersebut, Sukmawijaya membentuk Badan Bina Keagamaan yang berada langsung di bawah naungan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi bukan melalui dinas pendidikan ataupun departemen agama dimana segala kebijakan terkait pendidikan selama ini ada dibawah dua badan tersebut. Meskipun saat ini Sukmawijaya sudah tidak menjabat, regulasi-regulasi tersebut masih

masif diimplementasikan baik secara formal masuk ke lembaga-lembaga pendidikan maupun “digerakkan” di masjid-masjid besar binaan Badan Bina Keagamaan era Sukmawijaya. Selain itu, menurut stakeholder satuan pendidikan (Sekolah), regulasi tersebut masih relevan bahkan semakin menguatkan tujuan pemerintah pusat yang sedang gencar merealisasikan pendidikan karakter di lembaga pendidikan.

## **5. Subjek dan Dinamika Penelitian**

Pemilihan wilayah Kabupaten Sukabumi diharapkan bisa mewakili kondisi Jawa Barat untuk isu penelitian ini karena bisa dikatakan Jawa Barat merupakan salah satu lumbung dari maraknya gesekan antarkelompok yang berbeda dan juga masifnya gerakan radikalisme yang muncul. Sebagai wilayah terluas di Jawa Barat bahkan pulau Jawa, Kabupaten Sukabumi memiliki karakteristik yang cukup homogen, baik dari bahasa, budaya, hingga agama. Meskipun angka pendatang luar Kabupaten Sukabumi tidak bisa diabaikan, namun pengaruh budaya lain seperti tak terlihat di kabupaten ini. Yang paling kentara dari homogenitas tersebut adalah terkait agama. Meskipun jumlah penganut agama di kabupaten Sukabumi tidak 100% Islam, namun ketika memasuki sekolah-sekolah negeri yang coba kami teliti, siswi-siswi terlihat berjilbab semua. Dan berdasarkan penelusuran data siswa di sekolah-sekolah tersebut, siswa non muslim dari enam sekolah, hanya tiga sekolah yang ada siswa non muslim itupun hanya satu orang (kecuali Cikembar ada sekitar 10 siswa). Homogenitas ini kemudian menjadi menarik jika ditarik pada ranah kepentingan politik dan juga ekonomi karena menjadi alat yang sangat ampuh untuk memperkuat kepentingan kelompok dan memudahkan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang sifatnya kemudian menjadi menggeneralisir semua penduduk yang seakan homogen.

Pemilihan sekolah dan subjek dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan potensi demografis dan geografis. Jika merunut pada pembagian zona yang sudah disinggung di pendahuluan, enam sekolah yang diambil mewakili dua karakteristik zona tersebut yakni; Zona Utara diwakili oleh SMAN 1 Sukaraja, SMAN 1 Cisaat, SMAN 1 Cikembar, dan MAN 1 (Cibadak). Sedangkan untuk zona selatan diwakili oleh SMAN 1 Jampang Kulon, dan

MAN 3 Sukabumi (Surade). Meskipun pada akhirnya pembagian zona ini tidak membedakan terlalu signifikan karakteristik penduduk Kabupaten Sukabumi yang homogen terutama dalam hal agama dan suku, namun bisa terlihat karakter personal karena pengaruh geografis dan demografis tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi dokumen, wawancara serta observasi, konsinyering, dan FGD sebagai alat pengumpul data. Selama kurang lebih 21 hari di lapangan kami berhasil mewawancarai sekitar 117 orang baik dari stakeholder luar sekolah, stakeholder dalam sekolah, siswa-siswi, hingga masyarakat sekitar sekolah.<sup>7</sup> Sebagai wilayah penelitian yang luas, kendala yang dihadapi lebih banyak soal jarak tempuh yang membuat penelitian ini harus tepat secara jadwal antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, subjek hasil *snowball* pun baru bisa dieksekusi pada akhir pekan maupun setelah selesai dengan semua subjek utama (pihak sekolah). Secara birokrasi tidak ada kendala berarti yang kami jumpai. Tipikal karakter penduduk Sukabumi yang ramah dan kesiapan administrasi dari MAARIF Institute (surat, rekomendasi, dsb) memudahkan kami diterima tanpa berbelit oleh semua subjek penelitian.

## **B. PROFIL SEKOLAH**

Ada enam sekolah yang dijadikan subjek penelitian di Kabupaten Sukabumi; SMAN 1 Sukaraja, SMAN 1 Cisaat, SMAN 1 Jampang Kulon, MAN 1 Sukabumi (Cibadak), dan MAN 3 Sukabumi (Surade). Keenam sekolah ini dipilih berdasarkan karakteristik geografis, demografis, agama dan sosial ekonomi yang bisa mewakili penelitian ini. Berikut profil sekolah-sekolah tersebut:

### **1. SMAN 1 Sukaraja**

SMA Negeri 1 Sukaraja didirikan pada tahun 1987 dan merupakan vialial dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi sekarang dengan jumlah rombongan belajar pertama sebanyak tiga kelas. Seiring dengan meningkatnya keinginan dan kebutuhan masyarakat sekitar Kecamatan Sukaraja akan hadirnya sebuah sekolah menengah atas, maka secara yuridis formal, SMA Negeri

---

7 List Informan terlampir.

1 Sukaraja diresmikan oleh Menteri P dan K Prof. Dr. Fuad Hasan pada tanggal 9 Maret 1991 dengan SK No. 0283/O/1991.<sup>8</sup> Visi dari sekolah ini adalah “Menumbuhkan insan cerdas, mandiri, berjiwa Enterpreuner, dengan dilandasi iman dan takwa”. Sebelumnya sekolah ini mempunyai tagline “Eco School” (ini masih terpampang di pintu masuk lobby sekolah). Namun, dengan berubahnya visi sekolah berubah pula tagline nya yang saat ini menekankan pada sisi entrepreneurship sebagai andalan sekolah.

Sekolah ini terletak di Jl. MH Holil No. 261 Sukaraja (dilintasi Jalan Raya Utama Sukabumi - Cianjur / Sukabumi – Bandung) dari jalan raya masuk ke dalam kurang lebih 1km dengan kondisi lingkungan sekitar yang relatif sepi meskipun dipadati rumah penduduk sepanjang jalan menuju sekolah. Secara struktur bangunan sekolah ini berbentuk O berlapis dengan susunan yang kurang beraturan. Memasuki gerbang sekolah kita akan langsung berhadapan dengan parkir dan masjid sekolah<sup>9</sup>, sebelah kiri masjid pintu masuk inti sekolah yang langsung menuju kantor kepala sekolah dan jajarannya, serta ruang guru. Penempatan kelas disesuaikan dengan jenjang dan jurusan. Lapangan sekolah terletak di tengah sebagai pusat segala aktifitas (olahraga, ekskul, dsb), jejeran lab terletak di belakang berdampingan dengan ruang OSIS. Ada dua kantin di sekolah ini, kantin atas dan kantin belakang (kantin belakang berpotensi sebagai tempat nongkrong saat jam pelajaran kosong). Ruang perpustakaan cukup besar hanya saja koleksi buku tidak variatif dan sepertinya tidak terurus dengan baik (bayangkan perpustakaan sekolah jaman dulu). Jika melihat struktur ruang, pusat kontrol stakeholder sekolah menjadi sulit karena ketidakberaturan ini. Sekolah ini memiliki 28 rombel & 2 jurusan; IPA & IPS dengan jumlah siswa 889 orang dan 100% beragama Islam. Latar belakang sosial ekonomi siswa di sekolah ini menengah kebawah yang rata-rata profesi orang tuanya adalah buruh tani ataupun pekerja swasta. Di sekitar sekolah ini, ada beberapa pesantren dan yayasan pendidikan Islam sehingga tidak heran jika ada beberapa siswa sekolah di sini yang nyantri “kobong”

---

8 Diambil berdasarkan data di website resmi SMAN 1 Sukaraja, diakses pada 2 November 2017, pukul 2013 WIB.

9 Letak masjid sekolah diluar bangunan inti menjadikan masjid ini sebagai tempat nongkrong siswa saat jam pelajaran kosong dan juga menjadi tempat persinggahan strategis siswa untuk kabur/bolos dari sekolah bahkan merokok di WC masjid.

(pulang pergi/tidak mukim) di pesantren-pesantren tersebut, ada juga beberapa siswa yang memilih kos karena tinggal cukup jauh dari sekolah.

Seperti sekolah pada umumnya, struktur organisasi SMAN 1 Sukaraja meliputi komite, kepala sekolah, wakasek-wakasek, kasubag, perpustakaan, laboratorium, hingga dewan guru. Guru dan tenaga pendidik yang tersedia di sekolah ini berjumlah 58 orang dengan latar pendidikan sebagian besar dari UPI Bandung atau kampus sekitar Sukabumi, Bogor dan Cianjur. Anatomi struktur organisasi sekolah bisa dilihat disamping ini.

Struktur OSIS di sekolah ini terdiri dari ketua umum, ketua I dan ketua II dimana ketua-ketua ini membawahi sebid-sebid yang ada dan sebid-sebid ini ada beberapa yang membawahi ekskul-ekskul (total ada 12 ekskul). Untuk skema pemilihan pengurus OSIS dan MPK diawali dengan seleksi yang dilakukan oleh pengurus OSIS lama yang kemudian hasil seleksi ini diajukan ke kesiswaan untuk kemudian direkomendasikan. Pemilihan ketua OSIS dilaksanakan dengan rangkaian kampanye dan voting selayaknya pemilihan umum. Jika menilik dari piala yang dihasilkan, prestasi sekolah ini banyak di bidang paskibra.

Dalam beberapa kegiatan OSIS maupun ekskul, pernah beberapa kali melibatkan pihak luar yang kebanyakan dari dinas pemerintah seperti dinas kesehatan, BNN maupun kepolisian. Pelibatan alumni biasanya sebagai pelatih di pramuka atau paskibra. Untuk ekskul kerohanian ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di Sekbid I (ketuhanan/kerohanian) biasanya narasumber yang didatangkan dari ustaz sekitar sekolah dan biasanya hanya untuk mengajar Qiro'ah (lagam baca Qur'an). Sedangkan untuk mengisi kegiatan keputrian atau ceramah Jumat sekolah cukup mengandalkan guru-guru dalam sekolah ini sebagai bentuk antisipasi mereka terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Jikapun ada pihak luar yang dilibatkan dalam mengisi materi keagamaan (mereka pernah bekerjasama dengan UMMI dan An-Nur), biasanya mereka melakukan *screening* tema dan kompetensi pemateri sesuai dengan visi-misi sekolah. Selain itu, sekolah (tepatnya kepala sekolah sebelumnya) mempunyai himbuan jika setiap pembina ekskul maupun pembina OSIS harus selalu mengawasi segala kegiatan yang dilakukan oleh binaannya masing-masing.

Selama tiga hari pengamatan kami di sekolah ini, pelibatan masyarakat sekitar terlihat minim. Seperti yang sudah disinggung di awal, kondisi lingkungan sekitar terlihat sepi meskipun dikelilingi rumah warga. Secara umum, sebagian warga sekitar mengaku sebagai muslim ahlu sunnah wal jamaah dan NU. Yang menarik adalah ada dua masjid yang mengelilingi sekolah ini berbeda karakter, yang satu masjid tersebut memiliki speaker, dan satu lagi tidak. Yang terakhir ini biasa disebut oleh masyarakat sekitar “aspek” atau anti speaker. Sebagai wilayah penopang kota Sukabumi dan jalur perlintasan jalan nasional, Sukaraja sedikit terlihat sibuk dan berdasarkan beberapa laporan media lokal, wilayah ini masih sering terjadi gesekan antar kelompok pemuda (tarkam; tawuran antar kampung). Karena terletak di jalur perlintasan Sukabumi-Cianjur, hal ini juga memengaruhi corak keagamaan mereka yang dominan merujuk kepada FPI yang banyak dibawa dari Cianjur dan banyak masuk ke pesantren-pesantren salafi yang ada di sekitar Sukaraja.

Menurut pengakuan salah satu siswa, Sukaraja terkenal dengan FPI-nya sehingga tidak heran ketika kami masuk ke sekolah dan mencoba menggali pemahaman keagamaan mereka, memang terlihat corak tersebut. Pengaruh “kota” juga terlihat dari cara berpakaian dan sikap warga sekolah di SMAN 1 Sukaraja. Meskipun pihak sekolah menyatakan bahwa mayoritas profesi orang tua mereka buruh tani sehingga masuk kategori kurang mampu, namun lapangan parkir sekolah penuh sesak oleh motor. Sikap sedikit acuh juga nampak dari siswa selama tiga hari pengamatan kami di sekolah. Dari segi pemahaman siswa dan guru terkait isu-isu agama pun cukup terbatas. Yang menarik, meskipun sekolah ini cukup dekat dengan wilayah perkotaan Sukabumi, namun siswa dan warga sekolah lainnya tidak terlalu *update* dengan informasi, dan fasilitas sekolah juga belum cukup memadai dari berbagai aspek jika dibandingkan dengan lima sekolah lain yang kami amati.

## **2. SMAN 1 Cisaat**

SMAN 1 Cisaat terletak di Desa Mangkalaya, Kec. Gunung Guruh, berbatasan dengan Cisaat. Sebagai wilayah dengan kepadatan tertinggi di Kabupaten Sukabumi, kecamatan ini termasuk yang sibuk dan memiliki banyak lembaga pendidikan mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi.

Akses transportasi untuk menuju sekolah ini menggunakan angkot yang beroperasi hanya hingga sore hari. Jalan menuju sekolah ini kecil dan rusak, bahkan ketika hujan deras ditemukan beberapa titik banjir dan tergenang air. Sekolah ini memiliki lapangan dan parkir yang cukup luas, tepat di samping kiri gerbang sekolah terdapat lapangan futsal dan volly juga dua ruang pertama adalah Ruang BK dan Ruang OSIS. Memasuki area utama sekolah terpampang jelas Visi misi sekolah, 10 pembiasaan akhlak mulia di dinding kanan pertama. Dan yang menarik adalah x banner yang berdiri dengan tulisan SMAN 1 Cisaat sebagai sekolah rujukan dan satu-satunya sekolah SMA negeri di Kabupaten Sukabumi yang sudah cukup inklusif bagi difabel<sup>10</sup>. Bentuk huruf U, dimana deretan kiri gedung sekolah adalah kelas X. Di selang ruang guru, deretan kanan gedung lt. 1 kelas XI, lt. 2 kelas XII. Di tengah adalah podium dan taman. Masjid sekolah terletak di bagian tengah belakang panggung dengan daya tampung kurang lebih 200 orang. Perpustakaan sekolah terletak paling belakang dengan koleksi buku 30% umum/fiksi dan sisanya buku pelajaran.

Jumlah siswa di sekolah ini sekitar 1142 dengan komposisi laki-laki 388 siswa dan perempuan 754 siswi, 33 rombel, dan 3 jurusan (IPA, IPS, Bahasa). Latar belakang sosial ekonomi orang tua siswa adalah buruh pabrik, buruh tani, PNS, dll. Latar belakang agama 99,9% muslim. Hanya ada satu siswa kristen (laki-laki) disana itu pun siswa asal dari timur yang ikut ayahnya berdomisili di Cisaat. Layaknya karakter perkotaan, siswa sekolah ini bisa dikatakan cukup “kota” dibanding Sukaraja yang juga berada di pinggiran kota Sukabumi, itu terlihat dari keterbukaan pergaulan dan cara berpakaian. Kebanyakan siswa yang bersekolah disini berasal dari sekitar Cisaat, Cibolang, hingga Pelabuhan Ratu. Sekolah ini menyediakan asrama bagi siswa berprestasi dari jalur non akademik voli, sedangkan untuk siswi disediakan kos-kosan depan sekolah yang disewa sekolah. Untuk jumlah guru dan tenaga pendidik yang ada sekitar 64 orang dimana 100% muslim dan hampir 75% merupakan PNS. Latar belakang pendidikan dari UPI, dan kampus sekitar Sukabumi dan Bogor.

---

10 Tangga dan jalur jalan koridor sekolah sudah dirancang untuk difabel. Fasilitas lainnya belum karena terbentur anggaran.

Sekolah ini memiliki skema seleksi OSIS yang sedikit berbeda dengan yang lain yaitu dalam proses seleksi. Selain seleksi administrasi dan kecakapan pengetahuan organisasi, calon ketua OSIS dalam proses kampanye harus menyampaikan visi misi mereka dan melakukan debat terbuka di depan seluruh warga sekolah. Proses debat ini menjadi salah satu muatan nilai demokrasi dan keterbukaan yang coba diimplementasikan sekolah. OSIS memiliki ketua umum dan dua ketua lainnya yang membawahi sembilan sebid dibawah pengawasan MPK dan Kesiswaan. Beberapa pengurus OSIS disini juga terlihat terlibat aktif dengan kegiatan dan jejaring di luar sekolah seperti Forum Anak, Foksi, dan ada juga kami temui anak-anak pengurus OSIS yang rajin ikut QC. Selain itu, sekolah ini mempunyai sekitar 25 ekskul dan bidang yang paling menonjol di sini adalah bidang olahraga. Bahkan di bidang atletik, mereka sudah tembus ke tingkat nasional.

Tidak jauh berbeda dengan sekolah lainnya, pelibatan pihak luar dalam kegiatan sekolah biasanya dilakukan dengan dinas terkait, kepolisian, dan BNN. Pelibatan masyarakat biasanya dilakukan ketika baksos, qurban, maupun pramuka (kemah). Untuk kegiatan keagamaan, sekolah ini memanfaatkan guru-guru yang punya latar belakang pendidikan agama yang baik, dan sesekali mengundang pemateri dari luar yang biasanya sudah dikenal oleh warga sekolah. Menurut pengakuan ibu kepala sekolah, beliau selalu mengimbau agar anak-anak cukup belajar atau mengikuti kajian keagamaan yang dibuat di sekolah agar terkontrol, dan sebisa mungkin tidak terlibat jejaring kajian keagamaan di luar sekolah kecuali pesantren. Namun, menurut pengakuan pengurus RMAI (Rohis) mereka cukup intens bekerjasama dengan QC untuk mengisi kelas mentoring ekskul RMAI. Yang menarik lainnya adalah 10 pembiasaan akhlak mulia terpampang jelas sekali ketika memasuki area inti sekolah. Namun, secara sikap dan perilaku sepertinya kurang tercermin dan terinternalisasi pada guru-guru maupun siswa di sekolah ini. Hasil pengamatan kami seperti ada jarak antarwarga sekolah.

Cisaat atau Gunung Guruh meskipun termasuk kategori perkotaan, namun cukup banyak pesantren berada di kecamatan ini. Hal tersebut turut memengaruhi karakter keagamaan masyarakat sekitar yang kental akan

nuansa pesantren kobong, dimana mayoritas mereka mengklaim sebagai ahlu sunnah wal jamaah (Aswaja). Selain itu, gerakan-gerakan moderat juga banyak muncul disini, seperti yang dibawa oleh pesantren Al-Masthuriyah dan Sunanul Huda (yang kental dengan NU), LENSEA dan Fopulis yang bergerak untuk isu keagamaan dan kebangsaan, dan di saat yang bersamaan gerakan transnasional yang dibawa PKS melalui QC juga masif masuk ke sekolah-sekolah. Kontestasi gerakan-gerakan tersebut terlihat sekali pengaruhnya pada karakter personal warga sekolah. Sikap stakeholder sekolah SMAN 1 Cisaat terhadap pihak luar cukup acuh bahkan bisa dibilang menjaga jarak. Sikap kritis siswa dari pengamatan kami selama ngobrol dengan mereka juga menarik karena masing-masing punya pandangan berbeda dan tidak normatif seperti lima sekolah lain yang siswanya kami ajak ngobrol baik terkait implementasi kebijakan OSIS dan ekstrakurikuler, pandangan keagamaan mereka, hingga respon terhadap isu-isu keagamaan. Gaya berpakaian dan cara berbicara pun terlihat khas sekali masyarakat perkotaan dan mereka cukup aktif dengan berbagai kegiatan yang ada di luar sekolah karena aksesnya mungkin lebih bisa terjangkau oleh mereka dibanding sekolah lain yang tidak berada di pusaran perkotaan.

Hal ini menjadikan Cisaat secara umum cukup dinamis dan heterogen karakter keagamaannya. Campur tangan kepentingan politik juga ikut mewarnai, selain karena Cisaat sebagai salah satu sentra pemerintahan kabupaten, juga karena roda perekonomian kabupaten salah satunya ada di wilayah ini.

### **3. SMAN 1 Cikembar**

Masih terletak di zona utara, Cikembar menjadi wilayah yang sangat menarik di Kabupaten Sukabumi karena cukup heterogen secara keagamaan dibanding kecamatan lainnya. Bisa dikatakan selain di kota Sukabumi, Cikembar menjadi wilayah dengan sebaran penduduk non muslim (Kristen) terbanyak di Kabupaten Sukabumi. Karena itu terdapat beberapa gereja dan sekolah kristen yang berdiri disini. Menurut sejarahnya, konon Cikembar merupakan jalur perlintasan penjajah untuk mendistribusikan hasil perkebunan di Sukabumi sehingga seiring waktu dijadikan tempat domisili

oleh para misionaris gereja.<sup>11</sup> Pada tahun 1886 dekat Cikembar didirikan sebuah desa Kristen yaitu “Pengharapan” di dalam suatu perkebunan yang telah dibeli oleh NZV.<sup>12</sup> Selain itu, di wilayah ini juga terdapat kompleks TNI dimana kebanyakan merupakan pendatang dari Timur yang beragama non muslim. Hal ini kemudian semakin menambah jumlah populasi non muslim di Cikembar. Meskipun demikian gesekan antar warga hampir tidak pernah terjadi, jikapun ada itu hanya kecil dan biasanya datang dari pihak luar masyarakat Cikembar. Adanya kompleks TNI menguntungkan warga untuk mengantisipasi gesekan-gesekan bernuanasa agama atau keyakinan. Ormas-ormas keagamaan pun tidak terlalu berani bermain disini karena Cikembar mempunyai organisasi kepemudaan yang diinisiasi oleh TNI (FKPNI) dan Polri (FKKPI) sebagai “kaki tangan” mereka untuk mengantisipasi (menjaga stabilitas sosial) hal-hal yang tidak diinginkan.

Heterogenitas keagamaan tersebut ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah siswa non muslim yang bersekolah di SMAN 1 Cikembar. Di sekolah dengan 27 rombel dan jumlah siswa 984 dengan komposisi laki-laki 369 siswa dan perempuan 615 siswi, hanya ada 11 siswa Kristen yang bersekolah di sini. Menurut pengakuan mereka, teman-temannya lebih memilih bersekolah di sekolah Kristen yang ada di Cikembar atau di Kota Sukabumi. Untuk latar belakang sosial ekonomi sebagian besar orang tua siswa berprofesi sebagai buruh pabrik, buruh tani, TNI/Polri, dan wiraswasta dengan kondisi ekonomi menengah kebawah. Domisili siswa kebanyakan daerah sekitar Cikembar. Sekolah ini juga menyewa rumah warga di depan sekolah yang diperuntukan bagi siswa berprestasi dari jalur non akademik volly untuk tinggal disana. Guru dan tenaga pendidik berjumlah 68 orang dengan latar pendidikan UPI, UIN Bandung, dan kampus sekitar Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Sedangkan untuk latar belakang agama 99,9% adalah Islam hanya ada satu guru non muslim.<sup>13</sup>

---

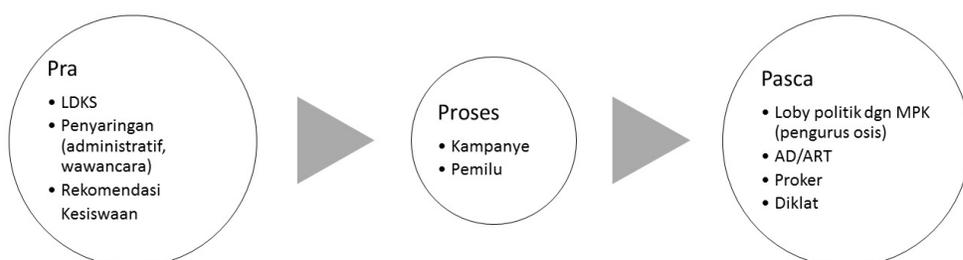
11 Hasil wawancara dengan salah satu guru SMAN 1 Cikembar dan pemuda gereja sekitar.

12 [http://sejarah.co/artikel/gereja\\_pasundan.htm](http://sejarah.co/artikel/gereja_pasundan.htm), diakses pada Sabtu, 4 November 2017 pukul 14.44 WIB.

13 Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru, guru kristen ini tadinya merupakan seorang musim.. namun pindah keyakinan menjadi Kristiani (murtad), karena ditolong secara ekonomi oleh misionaris gereja.

SMAN 1 Cikembar berada di Cikembar arah Pelabuhan Ratu. Jaraknya cukup jauh, sekitar 1 jam kami tempuh untuk sampai ke sekolah dari Cisaat. Sepanjang jalan kami disuguhi hamparan hutan, bukit, dan pabrik-pabrik yang berdiri kokoh dan besar. Sepanjang jalan juga kami dapati pasar tumpah, gereja, dan sekolah-sekolah Kristen berdiri. Sebagai kecamatan yang berada di zona utara, sebenarnya wilayah ini termasuk daerah subur. Namun pergeseran lahan perkebunan dan hutan menjadi pabrik (industri) menjadikan wilayah ini cukup terpapar polusi dan panas. Dari luar tampak bangunan yang cukup luas dan asri karena dikelilingi banyak tumbuhan. Memasuki gerbang sekolah pemandangan lapangan penuh dengan kendaraan yang di parkir disana. Tepat sebelah kiri ada pos satpam. Bangunan sekolah tergambar dengan bentuk segi empat dua lantai. Di tengah terdapat lapangan futsal, volly dan podium di selatan yang membelakangi laboratorium dan kantin sekolah. Ruang pertama di samping kiri adalah ruang OSIS, perpustakaan yang baru saja dipindahkan dan nampaknya masih belum terlihat rapi, di samping ruang kepala sekolah dan administrasi dekat dengan Masjid yang bernama Masjid Al-Ikhlas. Tata ruang kelas disana tidak seperti sekolah yang lainnya, di satu deretan gedung tidak hanya kelas tertentu, tapi sistem acak. Dalam satu deretan ada kelas X, XI. XII.

Skema suksesi OSIS di sekolah ini diurusi oleh KPU (komisi pemilihan umum), dimana KPU ini merupakan calon-calon MPK yang ditugaskan menjadi tim KPU. Yang menarik dan berbeda dari sekolah lainnya adalah siapapun siswa boleh mendaftar sebagai calon ketua OSIS tidak dibatasi harus pengurus OSIS sebelumnya dengan syarat harus mengikuti LDKS (latihan dasar kepemimpinan siswa) selama 2-4 hari.



**Gambar 3. Skema Suksesi OSIS Smancik**

OSIS di sekolah ini hanya punya satu ketua (umum) dan satu koordinator bidang yang membawahi sembilan sebid. Pengurus OSIS ini diawasi oleh MPK dan kesiswaan, dan MPK diawasi oleh DPK dan kesiswaan dalam kinerjanya. Dalam setiap kegiatannya OSIS maupun ekstrakurikuler cukup sering melibatkan pihak luar seperti Dinas terkait (Dinkes, Diknas), Kepolisian, TNI, hingga BNN. Untuk kegiatan keagamaan, selain dinaungi oleh sebid 1 juga banyak dilakukan oleh ekstrakurikuler keagamaan mereka yang disebut FORMA (Forum Remaja Masjid Al-Ikhlas). Selain membuat dan mengatur kegiatan keagamaan di sekolah, Forma juga cukup aktif mengikuti kegiatan di luar seperti Mutiara Pelajar Indonesia dan juga Obsesi (obrolan seputar Islam).<sup>14</sup> Pelibatan pihak luar dalam kegiatan keagamaan juga terlihat cukup intens bekerjasama dengan kampus Ar-Rayyah yang berada tidak jauh dari sekolah. Ar-Rayyah ini merupakan kampus yang didanai oleh Saudi (bisa dikatakan filial dari LIPIA) sehingga ideologi yang disebarkan/disampaikan sangat kental dengan ideologi mereka. Peta jejaring Ar-Rayyah ini didapati dari alumni sekolah ini yang banyak melanjutkan pendidikannya disana sehingga hubungan mereka menjadi sangat kuat dan intens. Meskipun tidak tampak terlihat dari luar, pengaruh pemahaman Ar-Rayyah ini perlu diantisipasi karena, berdasarkan hasil obrolan kami dengan beberapa siswa dan stakeholder sekolah, pemahaman keberagaman mereka cukup dipengaruhi muatan-muatan ideologi Ar-rayyah yang cukup “eksklusif” (meminjam istilah salah satu guru) sehingga mengkhawatirkan timbulnya gesekan di tengah warga sekolah yang “cukup” hetero ini.

#### **4. SMAN 1 Jampang Kulon**

SMAN 1 Jampang Kulon terletak di Jl. Warung Tagog, Nagraksari, Kec. Jampang Kulon. Sekolah ini merupakan sekolah favorit di zona selatan selain karena keberadaannya yang sudah cukup lama, juga karena banyak prestasi dan serapan lulusannya yang tersebar di PTN dan kampus swasta lainnya.<sup>15</sup>

---

14 Dua kegiatan ini biasanya diinisiasi oleh QuC, dan pada masa bupati sukma kegiatan-kegiatan seperti ini cukup intens dilakukan di masjid Pendopo maupun di masjid-masjid besar binaan Badan Keagamaan Pemda Kabupaten Sukabumi.

15 Serapan alumni melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi hingga 50%.

Masyarakat Pajampangan<sup>16</sup> mengategorikan sekolah ini sebagai sekolah anak-anak dari sosial ekonomi keluarga menengah atas. Anggapan masyarakat ini relevan dengan kondisi parkir yang penuh sesak dengan motor dan penampilan siswa-siswi yang terlihat rapih dan “terawat”.<sup>17</sup> Jumlah siswa di sekolah ini cukup banyak yaitu 1.301 siswa dengan komposisi yang cukup berimbang; laki-laki 634 siswa dan perempuan 666 siswi dengan jumlah rombel 36. Dari 1.301 siswa hanya ada satu siswa non muslim (Katolik) yang merupakan siswa asal Medan yang ikut kakak laki-lakinya dinas di Surade sebagai Polisi. Sehingga bisa terlihat secara keberagaman sekolah ini sangat heterogen juga terlihat dari latar belakang agama guru dan tenaga pendidik yang mayoritas muslim. Latar belakang ekonomi orang tua siswa adalah bekerja di Dinas, PNS, wiraswasta, buruh tani, hingga TKI/TKW. Jumlah guru dan tenaga pendidik yang tersedia adalah 65 orang dengan latar pendidikan sebagian besar dari UPI Bandung.

Sebagai sekolah favorit, sekolah ini cukup nyaman dan rapih baik dari tata ruang, administratif, hingga pelayanan. Bentuk sekolah persegi panjang dilengkapi dengan lapangan yang cukup luas, beberapa laboratorium, sekretariat OSIS dan beberapa Ekskul, ruang BK yang sudah memenuhi standar, dan masjid dua lantai. Seperti kebanyakan struktur organisasi sekolah, sekolah ini juga memiliki komite dan beberapa wakasek yang membantu kepala sekolah dalam menjalankan tupoksinya. Penempatan tim di setiap bidang juga tidak asal, seperti wakasek kesiswaan yang mempunyai tim lengkap dan BK yang dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi salah satu tempat berkunjung favorit siswa bukan sebaliknya seperti di kebanyakan sekolah. Selain nyaman bagi kami yang berkunjung, sekolah ini juga menjadi tempat favorit siswa menghabiskan waktunya bahkan saat akhir pekan.

Skema suksesi OSIS di sekolah ini pun sudah merujuk pada sistem pemilu. Struktur organisasi juga menyerupai pemerintahan dimana ada MPK

---

16 Ungkapan yang menunjukkan kepada masyarakat Sukabumi Selatan. Pajampangan di antaranya meliputi Kec. Jampang Kulon, Kec. Surade, dan Kec. Ciracap.

17 Namun, Pihak sekolah mengklaim siswa mereka dari kalangan menengah kebawah, sehingga ada yang namanya infak guru dimana hasilnya diperuntukkan membantu siswa mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Ini juga menjadi kendala sebagian besar siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi (dua pernyataan yang kontradiktif).

yang berfungsi seperti MPR, DPK yang berfungsi seperti DPR, dan OSIS sebagai Eksekutif. Dalam menjalankan roda organisasi, hanya ada satu ketua umum dan satu wakil ketua dalam OSIS, dan mereka membawahi 10 sebid dan juga 14 ekskul. Ada kurang lebih 65 orang pengurus mulai dari MPK, DPK, hingga OSIS. Dalam kegiatan OSIS maupun Ekskul pelibatan pihak luar juga terjadi misal untuk pelatih ekskul taekwondo, Pramuka, dsb. Untuk kegiatan keagamaan juga dilakukan pembiasaan 10 akhlak mulia, dan ada satu ekskul keagamaan yaitu Rohis. Rohis diketuai oleh seorang siswa yang punya latar belakang santri kobong, dan wakilnya seorang perempuan yang, bisa dikatakan, cukup aktif dalam kegiatan QC. Secara karakter keagamaan, ia terlihat berbeda sehingga kegiatan-kegiatan di Rohis pun tidak terlalu menonjol ke arah kajian-kajian ideologi, lebih banyak ke kegiatan seni. Beberapa siswa di sekolah ini juga cukup aktif mengikuti kegiatan rutin bulanan yang diadakan QC di Surade sebagai basis regional III.<sup>18</sup>

Sebagai wilayah yang berada di zona Selatan dan cukup jauh dari kota maupun ibukota kabupaten, Jampang Kulon secara fisik dan infrastruktur terlihat tidak seperti wilayah tertinggal bahkan sebaliknya, jalan-jalan terlihat bagus dan tidak berlubang, bangunan fisik rumah warga pun terlihat bagus-bagus, partisipasi dan kesadaran pendidikan juga cukup tinggi. Hal tersebut cukup memengaruhi corak keberagaman Jampang Kulon sebagai wilayah yang juga cukup banyak terdapat pesantren-pesantren besar di dalamnya. Gesekan-gesekan nyaris tidak terjadi, dan jikapun ada percikan kemudian bisa langsung diatasi oleh tokoh agama atau pesantren tua yang biasanya dijadikan rujukan seperti Al-Aman (Ajengan Fudholi) atau oleh Forum Lintas Iman yang ada di kecamatan Jampang Kulon. Meskipun tidak mencolok, namun pengaruh PKS dari Surade terpapar hingga Jampang Kulon. Sosok mantan bupati Sukma masih dibanggakan sebagai orang Jampang Kulon yang jenius dan berhasil mewakili Pajampangan hingga ke Kabupaten. Namun, mereka juga mengakui tidak ada pembangunan berarti di Jampang Kulon ketika kepemimpinan Pak Sukma, yang berasal dari wilayah mereka, ketika menjabat sebagai bupati.

---

18 Pembagian regional didasarkan wilayah jangkauan QuC, basis Regional 3 ada di Surade di Sekolah Islam Terpadu Darul Amal milik mantan Bupati Sukmawijaya.

## 5. MAN 1 Sukabumi (Cibadak)

Sekolah yang mempunyai visi “*Terwujudnya madrasah yang unggul dalam intelektual, emosional dan spiritual*” ini terletak di Jl. Suryakencana, akses jalan raya Sukabumi-Bogor persis di pinggir jalan raya. Sebagai sekolah Madrasah Aliyah Negeri, sekolah ini cukup favorit di Cibadak setelah SMAN 1 Cibadak. Hal itu terlihat dari jumlah siswa dan rombel yang terus meningkat setiap tahunnya seperti tahun ajaran ini (2017-2018) siswanya mencapai 1.314 siswa dengan 32 rombel 3 jurusan (IPA, IPS, Bahasa). Sebagian besar siswa berasal dari daerah sekitar Cibadak, Parung Kuda, Pelabuhan Ratu, Cisaat, hingga Cigombong. Untuk siswa yang jauh domisilinya, biasanya mereka tinggal di pesantren-pesantren sekitar sekolah seperti salah satu pesantren tahfidz yang banyak siswa dari sekolah ini nyantri di sana yaitu Al-‘Alawi. Selain itu, sekolah juga menyediakan asrama yang dikhususkan bagi siswa yang berprestasi dari segi non akademik seperti volly dan futsal. Untuk latar belakang sosial ekonomi, orang tua siswa kebanyakan dari kalangan menengah kebawah dengan profesi seperti Buruh (Pabrik dan Tani), pegawai swasta, PNS, hingga pekerja serabutan. Dengan jumlah siswa sebanyak itu, sekolah ini difasilitasi hanya 50 guru dan tenaga pendidik yang hampir 50% sudah PNS. Kebanyakan latar belakang pendidikan guru di sekolah ini dari perguruan tinggi Islam seperti UIN (Bandung & Jakarta), Al-Masturriyah, Ibnu Kholdun (Bogor), dan kampus Islam swasta sekitar Sukabumi dan Cianjur.

Selama tiga hari pengamatan kami, sekolah ini cukup sibuk dengan segala aktifitasnya yang padat mulai dari jam 7 pagi hingga 15.30 selama enam hari (Senin-Sabtu). Sebagai sekolah berbasis agama, tentu saja muatan agama begitu kental di sini dalam setiap aktifitasnya termasuk dalam penerapan aturan “*reward & punishment*” nya pun bernuansa agamis, seperti menghafal surat-surat pendek dan menulis ayat-ayat al-Qur’an. Dari lima sekolah lainnya, sekolah ini yang cukup ketat dalam penerapan aturan. Bisa dikatakan layaknya pesantren, karena wakasek kesiswaan dan tim sepertinya begitu menjunjung tinggi kedisiplinan dan akhlak. Sekolah ini juga merupakan satu-satunya sekolah di Kabupaten Sukabumi yang mendeklarasikan diri

sebagai Madrasah Ramah Anak. Belum lama ini juga mereka membuat OCD (*Outdoor Classroom Day*) dimana segala aktifitas pembelajaran dilakukan di luar kelas (semacam kokurikuler).

Meskipun padat dengan muatan pelajaran yang lebih banyak dibanding sekolah umum negeri, sekolah ini sangat konsen dengan kegiatan-kegiatan OSIS dan Ekskul. Ada 10 bidang yang dibawah OSIS dan ada enam ekskul (bercabang) yang begitu hidup aktifitasnya di sekolah ini. Bahkan ada satu hari, yakni hari Sabtu, yang mereka sebut sebagai hari ekskul, bukan saja karena setengah hari dipakai untuk kegiatan ekskul, namun seluruh siswa bebas menggunakan seragam ekskul/OSIS kebanggaannya. Ekskul keagamaan yang cukup padat aktifitasnya adalah Kharisma, kegiatan mereka ada setiap hari mulai dari memantau kegiatan 15 menit sebelum KBM (asmaul husna & baca Al-Qur'an) hingga Shalat Dzuhur berjamaah dan kultum siang. Tidak heran jika ekskul ini sendiri memiliki empat pembina yang menaunginya. Untuk skema suksesi OSIS dilakukan melalui tes seleksi oleh kesiswaan dan guru, setelah itu proses pemilihannya seperti pemilu pada umumnya. OSIS mempunyai 3 ketua (umum, ketua I, dan ketua II), ketua I membawahi sebid genap, sedangkan ketua II membawahi sebid ganjil. OSIS diawasi oleh 35 pengurus MPK dan juga kesiswaan dalam setiap kegiatannya.

Sebagai sekolah dengan jumlah warga yang cukup padat, sekolah ini terbilang besar dengan memiliki dua gedung utama yang dipisahkan oleh jalan warga sehingga menuju ke gedung satunya yang terletak di belakang gedung utama dibuatkan semacam jembatan layang. Gedung utama berbentuk letter U panjang yang diperuntukkan sebagai sentra administratif sekolah yakni; ruang kepala sekolah, ruang wakasek, ruang guru, ruang seni, lab komputer, ruang BK, kantin warga, dan beberapa ruang kelas untuk siswa kelas XII. Di gedung kedua berbentuk persegi panjang berlapis yang terdiri dari; lapangan, ruang kelas yang dipisahkan berdasarkan jenjang kelas, masjid sekolah yang bisa menampung 800 orang, kantin sekolah, perpustakaan dengan koleksi buku yang beragam dan rapih secara administratif, lab, ruang UKS, ruang OSIS, dan aula yang bisa menampung sekitar 300 orang. Struktur ruang sekolah yang luas dan terbagi ini membuat sekolah cukup kesulitan

mengontrol aktifitas siswa, sehingga solusinya sekolah menerapkan aturan kedisiplinan dan pengawasan yang cukup ketat dibanding sekolah lainnya seperti yang sudah disinggung diatas.

Selain konsen dengan Ekskul, sekolah ini juga cukup aktif melakukan kerjasama dengan pihak luar mulai dari Dinas terkait, kepolisian, BNN, KPAI, hingga perusahaan-perusahaan sekitar Cibadak (Yakult, Aqua, BLK) sebagai proses belajar mengajar siswa dan guru, baik di kelas maupun di luar kelas, dan juga prospek penyaluran tenaga kerja hingga peningkatan skill siswa. Pelibatan masyarakat juga dilakukan seperti Qurban dan baksos. Keterkaitan dengan alumni biasanya diwadahi oleh IKAMANDAK (Ikatan Alumni Aliyah Cibadak) dengan berbagai kegiatannya seperti reuni, hingga sumbangan/kontribusi alumni untuk sekolah. Untuk kegiatan keagamaan, sekolah merasa cukup memanfaatkan sumber daya sekolah yang ada seperti guru dan tenaga pendidik yang kebanyakan dari perguruan tinggi Islam. Jikapun melibatkan pihak luar itu sifatnya insidental seperti peringatan hari besar Islam dan sekedar untuk penyegaran pemateri agar warga sekolah tidak bosan.

Cibadak sebagai salah satu “kota” dan sentra pemerintahan Kabupaten Sukabumi, terbilang hidup dan heterogen. Apalagi keberadaan industri, pasar dan RSUD semakin menghidupkan roda ekonomi dan heterogenitas wilayah ini. Banyak pendatang baik dari sekitar Sukabumi maupun daerah luar Sukabumi mestinya menjadikan Cibadak beragam baik dari segi budaya maupun agama. Namun, faktanya tidak terlalu mencolok. Keberadaan pesantren yang tumbuh subur seakan menguatkan hegemoni agama di wilayah ini. Seperti Cisaat, ormas-ormas keagamaan seakan mendapat tempat yang baik melalui legitimasi pesantren.<sup>19</sup> Yang menarik, “*casing*” mereka berbeda namun mereka belum paham betul akan perbedaan tersebut.

---

19 Kekosongan pesantren-pesantren salafi akan muatan isu kebangsaan seakan dimanfaatkan oleh ormas keagamaan seperti FPI dan kawan-kawan, sehingga tidak aneh jika pesantren-pesantren di Kabupaten Sukabumi sering menjadi pemasok “demonstran” untuk isu-isu agama yang “digoreng”. Pesantren-pesantren tahfidz yang kebanyakan sangat eksklusif juga cukup mempengaruhi pandangan keagamaan masyarakat sekitar sehingga muncul tren “hijrah” di kalangan anak-anak muda khususnya.

## 6. MAN 3 Sukabumi (Surade)

MAN 3 Sukabumi terletak di zona Selatan, tepatnya di Kecamatan Surade, kurang lebih 45-60 menit perjalanan dari Jampang Kulon. Lokasi tepatnya berada di kawasan Lapangan Setra Lodaya dimana lokasi ini juga merupakan pusat kawasan lembaga pendidikan karena terdapat beberapa lembaga pendidikan yang mengelilinginya mulai dari PAUD hingga Sekolah Menengah Atas. Akses menuju lokasi ini dari jalan raya Surade harus berjalan kaki kurang lebih 1km untuk sampai ke sekolah. Tidak ada angkot dan hanya ada ojek jika mau berkendara. Oleh karena itu siswa banyak yang membawa motor sebagai alat mobilitas mereka ke sekolah dan rumah. Sekolah ini cukup asri dengan banyak pepohonan rindang mengelilinginya. Bentuk gedung sekolah kotak dua lantai dengan lapangan yang sekaligus difungsikan sebagai parkir kendaraan berada di tengah. Ruang kepala sekolah, lobby dan berada di sebelah kiri gerbang masuk. Ruang guru, ruang BK, dan perpustakaan menjadi pusat pandang dari jejeran ruang kelas, laboratorium, ruang seni, dan Masjid dua lantai di depannya. Di belakang sekolah, tepat sebelah kanan masjid, terdapat asrama pesantren sekolah yang terdiri dari lima lokal (dua lokal putra, dua lokal putri, dan satu lokal pengurus asrama). Antara asrama putra dan putri dipisahkan oleh pintu kecil begitupun pemisah antara sekolah dengan asrama pesantren. Pesantren sekolah yang sudah berdiri selama 8 tahun ini menjadi ciri khas sekolah yang mendukung kegiatan belajar mengajar jurusan IAI (Ilmu Agama Islam). Hal ini juga yang menjadikan struktur organisasi sekolah sedikit berbeda dari sekolah kebanyakan karena ada satu tambahan unsur yaitu wakasek pesantren dan keagamaan yang membantu kepala sekolah dalam implementasi kegiatan keagamaan sekolah. Sekarang sudah ada 130 siswa yang tinggal di asrama dan saat ini siswa yang wajib *boarding school* adalah siswa dengan jurusan IAI.

Di sekolah ini ada sekitar 1.040 siswa dengan komposisi dominan siswi perempuan yang dibagi ke dalam 29 rombel dengan jurusan IPA, IPS, IAI. Siswa yang bersekolah di sini kebanyakan dari wilayah sekitar Surade hingga Jampang Kulon dengan latar belakang sosial ekonomi orang tua menengah kebawah dengan profesi; Angkatan Laut (nelayan), Angkatan Udara (pemanjat

kelapa untuk gula aren)<sup>20</sup>, buruh tani, pegawai swasta, hingga TKI/TKW. Karena banyak juga pesantren salafi di sekitar sekolah dan rumah siswa dan pesantren sekolah hanya memfasilitasi siswa dari jurusan IAI, maka hampir sebagian besar kegiatan siswa usai pulang sekolah adalah nyantri di pesantren-pesantren tersebut. Bahkan yang domisilinya jauh pun menjadi santri mukim atau ada juga yang kos sekitar sekolah. Terdapat 49 Guru dan tenaga pendidik yang tersedia di sekolah ini dengan latar pendidikan kebanyakan dari UPI, UIN (Bandung, Jakarta, Yogyakarta), dan kampus sekitar sukabumi, Bogor dan Cianjur. Guru-guru yang diperbantukan juga banyak dari alumni.

Skema suksesi OSIS dilakukan sesuai KPU. Pemilos – KPU – Pelantikan. Pengurus OSIS dititik beratkan kepada kelas X dan XI dengan melalui tes dan wawancara. Jalur kordinasi dan tanggung jawab OSIS dan MPK; OSIS bertanggung jawab kepada MPK sekaligus Pembina OSIS (ada dua pembina OSIS khusus Putra dan putri), dan MPK bertanggung jawab kepada Pembina. Sedangkan program kerja OSIS disesuaikan dengan kalender sekolah. PORSENIDA adalah salah satu program kerja OSIS dan sekolah yang dilaksanakan untuk mencari/menjaring bibit unggul baik dari akademis maupun non-akademis. Secara gamblangnya, sebagai ajang promosi sekolah kepada Mts atau pun SMP sekitar. Ada 10 bidang yang dibawah OSIS dan 23 ekskul yang kebanyakan ekskul tersebut terkait olahraga dan sains. Tidak heran jika prestasi yang banyak diraih dari sekolah berbasis agama ini kebanyakan di bidang sains dan olahraga. Semua ekstrakurikuler dibina oleh guru dengan melibatkan alumni sebagai pelatih jika mempunyai kompetensi. Yang menarik di sekolah ini tidak ada ekskul keagamaan seperti sekolah lainnya, karena itu sudah diakomodir oleh wakasek pesantren dan keagamaan dengan melibatkan OSIS sebid I dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah mulai dari yang rutin hingga yang sifanya insidental.

Adapula kerjasama yang dilakukan pihak sekolah dengan luar, yaitu dengan dinas-dinas terkait (BNN, Puskesmas, Kepolisian, Koramil, dll). Setiap tiga minggu sekali, upacara dipimpin dari kepolisian atau koramil. Selain itu, MAN peduli lingkungan juga menjadi program sekolah bekerjasama dengan

---

20 Istilah ini dipakai oleh siswa dan guru untuk menyebut profesi orang tua mereka.

dinas perkebunan. Kegiatan ini sebagai bentuk pelibatan sekolah terhadap kepedulian akan lingkungan dan masyarakat sekitar sekolah. Bentuknya tidak hanya berupa pelestarian lingkungan yang berhubungan dengan alam, namun juga bisa berbentuk seperti bakti sosial dan sebagainya. Untuk kegiatan keagamaan, pelibatan pihak luar biasanya untuk mengisi pengajian pagi setiap hari Jumat yang biasanya pemateri diambil dari tokoh agama sekitar sekolah, KUA, hingga komite. Mereka juga pernah mengkomodir kegiatan bulanan QC regional III di masjid sekolah dengan dihadiri kurang lebih 300 pelajar dari wilayah regional III (pajampangan). Menurut pengakuan wakasek kesiswaan, siswa saat ini lebih banyak merujuk pesantren sekolah dalam mencari referensi keagamaan. Sejak ada pesantren, hubungan dengan Rohis atau akses ke majelis-majelis kajian hampir terputus.<sup>21</sup>

Tidak jauh berbeda dengan Jampang Kulon, karakter masyarakat Surade secara umum, baik budaya maupun keagamaan, mengklaim sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Kepala sekolah menyatakan ahlu sunnah yang tradisional karena seperti Jampang, mereka berbeda *casing* tapi inti atau perilaku keberagamaannya sama. Surade termasuk daerah yang dulunya terpapar ideologi PKS cukup besar karena peran Sukmawijaya yang berasal dari Surade dan memiliki sekolah Islam terpadu yang dijadikan sebagai basis gerakan dan kajian mereka yang kemudian berjejaring secara masif ke sekolah-sekolah dan bahkan kampus yang ada di sekitar Surade seperti UMMI. Namun saat ini, pengaruh tersebut mulai meredup karena masyarakat sekitar hanya melihak sosok, bukan ideologi yang dibawa. Sehingga di sini, teman-teman PKS dan jaringannya, secara ideologi terbentur oleh pesantren yang coraknya tradisional, namun ideologi mereka “laku” di kalangan pelajar dan anak muda yang tidak mesantren. Sedangkan untuk mereka yang mesantren, masih tetap coraknya condong ke FPI dan kawan-kawan.

---

21 Dulu ekskul keagamaan di sekolah ini adalah Rohis, sejak ada pesantren jejaring siswa sekolah dengan rohis di luar menurun. Meskipun masih ada yang terlibat aktif dalam kajian rutin jaringan rohis (QuC, MMC) namun jumlahnya hanya belasan menurut pengakuan salah satu siswa yang menjadi ketua jaringan MAN 3.

## C. TEMUAN HASIL PENELITIAN

### 1. Ekskul di Pesimpangan Jalan: Antara Isu dan Realitas (Fenomena Radikalisme di Kalangan Siswa dan Organisasi Kesiswaan)

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>22</sup> Lebih detailnya terdapat pada Pasal 3 bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi murid, Pasal 4 ayat (4) bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, Pasal 12 ayat (1b) menyatakan bahwa setiap murid pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah program kurikuler yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum. Jelasnya bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional (*supplement dan complements*) kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan/kalender pendidikan satuan pendidikan.

Kegiatan ekstrakurikuler menjembatani kebutuhan perkembangan peserta didik yang berbeda; seperti perbedaan *sense* akan nilai moral dan sikap, kemampuan, dan kreativitas. Melalui partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, serta menemukan dan mengembangkan potensinya. Kegiatan ekstrakurikuler juga memberikan manfaat sosial yang besar. Visi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah berkembangnya potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian peserta didik secara optimal melalui kegiatan-kegiatan di luar kegiatan intrakurikuler. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler pada

---

22 Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, dalam permen tersebut dijelaskan bagaimana aturan hingga penilaian ekstrakurikuler.

satuan pendidikan memiliki fungsi pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karir.<sup>23</sup>

Idealisme di atas menjadikan sekolah berlomba-lomba membuat ekstrakurikuler yang bervariasi, dan dari hasil penelitian lapangan ditemukan ke-enam sekolah yang diteliti semua memiliki ekskul dan tidak kurang dari 10 ekskul tiap sekolah (bahkan ada sekolah yang ekskulnya bisa mencapai 20 ke atas). Sudah banyak penelitian dan kajian yang menyatakan bahwa ekstrakurikuler di sekolah memiliki potensi untuk menjadi wadah perkembangbiakan radikalisme. Dari kajian-kajian tersebut, kegiatan yang berpotensi besar menjadi wadah tersebut adalah ekstrakurikuler keagamaan. Alasannya adalah masifnya keterlibatan alumni dan jaringan gerakan yang pro-radikalisme masuk melalui dakwah kampus dimana bibit-bibitnya diambil mulai dari sekolah tingkat menengah (kaderisasi). Jaringan ini masuk ke sekolah dengan berbagai pola; mentoring, keputrian, klub pecinta Al-Qur'an, hingga selebaran rutin mingguan yang didistribusikan melalui mading maupun khutbah Jumat. Beberapa kasus menyebutkan iming-iming masuk ke perguruan tinggi negeri dengan mudah juga menjadi salah satu motif yang cukup berhasil.

Sekolah menjadi ruang terbuka bagi diseminasi paham apapun, termasuk paham keagamaan yang radikal. Karena pihak sekolah terlalu terbuka, maka kelompok radikalisme keagamaan memanfaatkan ruang terbuka ini untuk masuk secara aktif mengampanyekan pahamnya dan memperluas jaringannya. Sebagai konsekuensi dari menguatnya paham-paham keagamaan radikal di lingkungan sekolah, banyak siswa yang pemahaman keislamannya menjadi monolitik dan gemar menyalahkan pihak lain. Karena paham keagamaan yang tidak terbuka ini, maka paham kebangsaan mereka menjadi tereduksi. Ironisnya, pihak sekolah banyak yang tidak peduli dengan paham-paham radikal yang diajarkan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan ekskul ini menjadi pintu masuk yang efektif bagi infiltrasi kelompok-kelompok radikal di kalangan siswa.

---

23 Ibid.

Kabupaten Sukabumi sebagai kabupaten yang sangat homogen secara keagamaan tidak pelak akan isu radikalisasi di kalangan pelajar, namun sejauh ini belum ditemukan banyak radikalisasi itu nyata terjadi di kalangan siswa khususnya melalui ekstrakurikuler.<sup>24</sup> Dari enam sekolah yang diteliti, ekstrakurikuler keagamaan memang mendominasi aktifitas di sekolah. Jika melihat program kerja bidang 1 (bidang Iman dan Taqwa) di OSIS yang membawahi ekstrakurikuler keagamaan, programnya paling banyak diantara bidang maupun ekskul lainnya. Jenis dan ritme kegiatan keagamaannya pun mirip, seperti; baca Al-Qur'an atau Shalawat 15 menit sebelum KBM, Salat Zuhur berjamaah, dan keputrian setiap Jumat. Mengapa ini terjadi di Kabupaten Sukabumi? Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa Kabupaten Sukabumi ketika dipimpin dua periode oleh Bupati Sukmawijaya menelurkan banyak kebijakan pendidikan yang kental dengan nuansa agamis, dan sayangnya kebijakan tersebut seluruhnya diperuntukkan bagi agama Islam saja, namun secara merata dan tidak langsung implementasi di lapangan peruntukannya bagi semua siswa dari semua agama. Kebijakan yang paling kental dan masih rutin diimplementasikan di hampir seluruh sekolah di Kabupaten Sukabumi adalah Pembiasaan 10 Akhlak Mulia, dimana pembiasaan ini penekanan aktifitasnya lebih kepada warga sekolah yang beragama Islam. Mulai dari kewajiban berjilbab bagi semua siswi muslim, kegiatan sebelum belajar mengajar seperti baca Al-Qur'an dan Shalawat, kemudian Salat Zuhur berjamaah, ada juga sekolah yang mengadakan kultum saat Salat Zuhur (MAN 1), peringatan hari besar keagamaan (dari enam sekolah semua hanya merayakan peringatan hari besar agama Islam yang diselenggarakan di sekolah), hingga penyediaan tenaga pengajar pendidikan agama hanya untuk yang beragama Islam.<sup>25</sup>

Mantan Kepala Bina Keagamaan masa Sukmawijaya, yang berperan penting dalam perumusan kebijakan internalisasi "Islamisasi" di lembaga

---

24 Menurut temuan Maarif Insitute dalam penelitian di awal tahun 2017 lalu, ada satu sekolah yang terindikasi berafiliasi jelas dengan HTI. Dan ini sudah berjalan puluhan tahun. Namun, sejak dibubarkan HTI seperti meredam sehingga ketika penelitian lanjutan ini berlangsung geliatnya tidak tampak ditemukan di sekolah-sekolah lain yang menjadi subjek penelitian ini.

25 Alasannya ada aturan pemma yang menyatakan penyediaan tenaga pengajar pendidikan agama jika kuota murid 20 keatas dalam satu sekolah dan harus dalam satu denominasi. Jika kurang dari itu, maka pihak sekolah tidak bisa memfasilitasi dan menyerahkannya ke lembaga keagamaan terkait..

pendidikan, menyatakan bahwa segala peraturan daerah dan aturan turunannya sudah disesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat dan Peraturan Menteri Agama (PMA) terutama yang terkait dengan pendidikan. Hal lain yang menjadi pertimbangan munculnya Perda-Perda tersebut adalah meneruskan warisan kebijakan kepemimpinan sebelumnya.

*Sebelumnya saya ingin klarifikasi soal perda tadi yang poin 8, dimana apa yang dibuat dari bina keagamaan juga merujuk pada Kemenag. Merujuk pada PMA Kemenag Kab. Sukabumi. Tujuan pendidikan adalah menciptakan kepribadian yang baik, potensi harus ditumbuhkan dan dikembangkan. Tersentuh di UU Dasar dan UU Pendidikan. Ilmu itu tidak serta merta menjadi sikap, perlu ada langkah yang harus dilakukan. Ilmu muncul menjadi internasion dalam hati dan nampak dalam perilaku keseharian. Maka pendidikan di Kab. Sukabumi berorientasi ke arah sana. Resolusi semangat keumatan faktanya Kab. Sukabumi berjumlah 2,4 juta sekian dan mayoritas muslim. Sehingga praktisnya ketika membuat kebijakan ya disesuaikan dengan konteks mayoritas, sehingga implementasinya lebih mudah dan resonable. Dan perda no 9 hanya berlaku untuk yang beragama islam, tidak ada paksaan bagi umat agama lain untuk melaksanakannya. Tidak ada motif lain menurut saya segala kebijakan yang dirumuskan tersebut mengikuti konstruksi payung aturan yang sudah ada baik di PMA maupun di Permendiknas yang memang orientasinya sarat keterkaitannya dengan religiusitas.<sup>26</sup>*

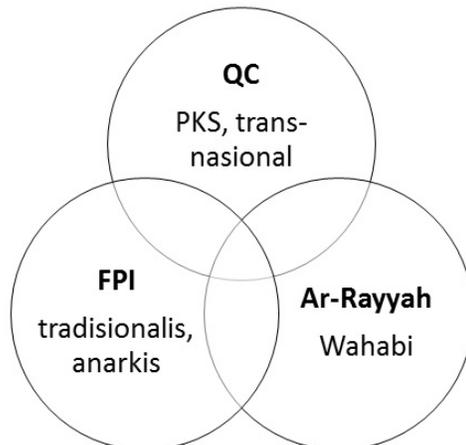
Salah satu stakeholder lain yang juga ikut merumuskan kebijakan tersebut menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut bentuk dari realisasi kontrak politik antara Sukmawijaya dengan partai pendukungnya (PKS). Pola-pola tarbiyah PKS di Kab. Sukabumi ini mirip dengan daerah lain yang pemerintahannya juga dipegang oleh PKS. Mereka memanfaatkan ruang-ruang aktifitas keagamaan yang begitu dominan di sekolah sebagai lahan ajang mengkader bibit-bibit unggul dari sekolah. Dahulu, ketika dua periode kepemimpinan Sukmawijaya, kebijakan ini seakan dipergunakan untuk menjadi mesin penarik simpati kader-kader pemilih pemula dengan membentuk Badan Bina Keagamaan, yang kemudian membentuk Quranic Club (QC) dimana isi dari QC ini adalah siswa-siswi yang aktif dalam kegiatan ekskul keagamaan di sekolah. Meskipun gaungnya sudah meredup karena kepala Badan Bina Keagamaan berganti dan juga Bupati berganti, kegiatan-kegiatan tarbiyah PKS di bawah QC masih bisa ditemui di masjid-masjid

---

<sup>26</sup> Penuturan mantan Kepala Badan Bina Keagamaan dalam FGD stakeholder pada 29 November 2017..

binaan BKPRMI. Karena ketua Bina Keagamaan yang dulu masih menjabat sebagai kepala BKPRMI dan juga salah satu pengurus MUI Kab. Sukabumi.

Indikasi radikalisme memang tidak ditemukan di enam sekolah penelitian, namun yang mengkhawatirkan adalah potensi menjadi intoleran cukup kuat. Ada tiga pemain yang menjadi terduga menanamkan intoleransi di kalangan sekolah maupun masyarakat umum; yakni PKS, FPI, dan Ar-Raayah. PKS sejak kepemimpinan Sukmawijaya gencar dengan penyebaran virus tarbiyah di kalangan sekolah dan universitas melalui QC (Qur'ani Club). FPI yang masuk ke pesantren-pesantren salaf dimana pesantren-pesantren ini kosong akan pengetahuan kebangsaan dan kebinekaan. Dan Ar-Raayah masuk melalui jaringan alumni di Cikembar, wilayah yang masuk kategori Heterogen secara keagamaan di Kab. Sukabumi.



**Gambar 4. Peta Aktor**

Qurani Club atau biasa dikenal (disingkat) dengan QC adalah lembaga pembinaan pelajar yang ada di Kab. Sukabumi. Pada tanggal 20 Desember 2005, H. Sukma Wijaya, MM (Bupati saat itu) mendirikan Qur'ani Club bertempat di Villa Tanpa Nama dan sekretariatnya Daarul Ilmi berada di Jl.Kaum Kulon, Cisaat. QC didirikan sebagai wadah pembinaan akhlak pelajar di Kab.Sukabumi dengan sembojannya “Selamatkan pewaris Negeri!”.<sup>27</sup>

Adapun kegiatan QC ini diantaranya; *Pertama*, TND (Taman Negeri Dongeng), yaitu kegiatan mendongeng untuk anak-anak kurang mampu

<sup>27</sup> Bisa dikatakan QC merupakan wadah pelajar di luar sekolah yang dibentuk sebagai salah satu implementasi dari kebijakan pembiasaan akhlak mulia yang dibuat oleh Sukmawijaya..

yang ada di sekitar sekretariat QC. Dongeng tentang kisah inspiratif baik fiktif maupun kisah nyata dari Siroh Nabawi dan orang-orang Shalih. Kisah-kisah yang akan memberi mereka motivasi dan semangat menyambut masa depan sebagai generasi yang akan mewarisi negeri ini, sesuai dengan semboyan QC. *Kedua*, Mentoring Pelajar, sejenis kajian kelompok yang akan membimbing pelajar dalam menjalani kehidupan yang selamat. Menurut informasi hasil wawancara dengan siswa-siswi yang aktif di QC, kegiatan mentoring ini biasanya dilakukan setiap satu minggu sekali. Tiap sekolah berbeda tempat, di SMAN 1 Cisaat mentoring QC ini biasanya dilakukan di sekolah sedangkan di SMAN Jampang Kulon dan MAN 3 Surade mentoring biasanya dilaksanakan di SMP IT At-Tawazun sebagai salah satu sekretariat QC di regional 6.<sup>28</sup> *Ketiga*, OBSESI (Obrolan Seputar Studi Islam). Kegiatan ini biasanya dilakukan setiap bulan dengan mengundang seluruh pelajar dari berbagai sekolah yang menjadi anggota QC dan biasanya dilaksanakan per-wilayah di sekretariat QC maupun di sekolah yang bekerjasama dengan QC. Tema-tema yang diangkat dalam OBSESI ini biasanya terkait hal yang berhubungan dengan remaja seperti; Peran pemuda untuk bangsa, Islam dan bangsa, Cinta, Hijrah, menjadi muslim dan muslimah yang sesuai dengan Al-Qur'an, dan sebagainya.<sup>29</sup> *Keempat*, Kabita (Kajian Khusus Muslimah). Tema-tema kajian ini belajar bagaimana menjadi Wanita Muslimah yang baik dan taat seperti Khadijah binti Khuwaylid, Nusaybah binti Ka'ab, Khawla Binti Al-Azwar, A'isyah binti Abu Bakar serta deretan muslimah teladan lainnya. Intinya bagaimana menjadi muslimah yang baik secara penampilan maupun akhlak.<sup>30</sup>

QC begitu populer di kalangan pelajar di sekolah-sekolah negeri Kab. Sukabumi, terutama bagi mereka yang di keluarga maupun lingkungannya kurang dari ajaran keagamaan (seperti pesantren atau pengajian-pengajian

---

28 SMP IT At-Tawazun merupakan sekolah milik Sukmawijaya dan lembaga ini berciri khas tarbiyah PKS. QC koordinasinya dibagi per-wilayah. Oleh karena itu, salah satunya, muncul istilah regional 6. Pembagian ini juga mengatur koordinasi seluruh sekolah (pelajar) yang terlibat QC di wilayah tersebut. Jadi tiap wilayah punya koordinator, begitupun tiap sekolah ada kordinator; dua kordinator, Ikhwan dan Akhwat.

29 Tema-tema terkait syariat Islam, anti pluralisme dsb biasanya disajikan di kalangan mahasiswa seperti yang pernah peneliti ikuti di salah satu sekretariatnya QC di Masjid Tijanul Anwar.

30 Kabita biasanya dilaksanakan di minggu keempat tiap bulannya, ba'da dzuhur di Masjid Tijanul Anwar. Kajian ini lebih banyak diikuti oleh mahasiswi dibanding pelajar.

kitab klasik). Siswa-siswi yang aktif dan konsisten mengikuti QC menyatakan bahwa kenapa QC menjadi begitu populer dan menciptakan gerakan tarbiyah yang masif dan diterima oleh sekolah adalah karena memberikan perubahan positif terhadap siswa-siswi mereka. Ini kemudian yang menjadikan QC begitu mudah melenggang masuk ke sekolah, bahkan ketika kegiatan seperti ‘*liqo*’ maupun mentorship di sekolah tidak melalui izin sekolah. Dalam proses rekrutmen anggota, QC menawarkan *reward* bagi mereka yang membawa anggota baru masuk dalam QC. *Reward* tersebut bisa berupa mushaf Al-Qur’an atau buku-buku keagamaan. Yang menjadi daya tarik QC bagi para pelajar adalah nilai *Muhasabah* dan *Ukhuwah* yang ditanamkan dalam setiap kajiannya.

*Saya awalnya ikut karena diajak teman dan saya belum berjilbab. Pas ikut kajiannya sekali, saya langsung memutuskan berjilbab dan panjang jilbabnya. Ini adalah hijrah saya dari masa jahiliyah. Yang menurut saya dan teman-teman menarik dari QC adalah kami diajak bermuhasabah setiap pertemuan dan ukhuwah yang terjalin begitu kuat.<sup>31</sup>*

QC sebagai wadah pembinaan remaja, baik pelajar maupun mahasiswa, sebenarnya bisa menjadi salah satu gerakan yang baik untuk pelajar jika saja nilai-nilai Islam yang ditanamkan mengarah pada Islam yang *Rahmatan lil ‘Alamin*, Islam yang penuh kasih terhadap sesama, dan Islam yang begitu menghargai perbedaan. Sayangnya nilai-nilai Islam yang ditanamkan dalam QC ini lebih didominasi pada nilai-nilai Islam satu kelompok saja.<sup>32</sup> Dan jika melihat polanya, QC ini kental sekali unsur politisnya, dimana kepentingan para pendirinya begitu terlihat untuk menarik suara pemilih pemula bagi partai mereka. Pola kaderisasi yang sukses dipakai oleh PKS di berbagai wilayah, dan salah satu indikasi yang membuat PKS selalu bisa bertahan dua periode kepemimpinan dimanapun mereka menguasai pemerintahan. Peran QC dan massanya juga tidak bisa diabaikan dalam isu-isu agama. Meski tidak semua ambil bagian secara langsung dengan terjun ke lapangan dalam aksi-aksi bela Islam ataupun yang lain, namun mereka masif menyebarkan syiar bela agama

---

31 Penuturan N. Salah satu anggota QC yang ikut dalam FGD di Hotel Anugrah tanggal 29 November 2017.

32 Bisa dilihat dari tulisan-tulisan hasil kegiatan mereka di blog <http://qcindo.blogspot.co.id/p/blog-page.html> dan pengamatan peneliti ketika mengikuti kajiannya di masjid Tijanul Anwar..

tersebut melalui sosial media, apalagi kebanyakan anggota dari QC ini adalah remaja milenial yang eksis di media sosial.

*Kami dibawah PKS sama seperti ODOJ (one day one juz), dan relawan rumah zakat. Kami juga terafiliasi dengan KAMMI dan juga ikut ambil bagian untuk aksi-aksi bela Islam, tapi yang akhwat kebanyakan ikutnya nyebarin di sosial media. Kaya kemaren aksi 212 dan lanjutannya, rohingya juga.<sup>33</sup>*

Gerakan mereka di media sosial ini juga diduga menjadi salah satu pemicu populernya QC di kalangan remaja dan anak muda. Pola tarbiyah yang disesuaikan dengan konteks milenial menjadi daya tarik yang tidak bisa dihindarkan dan digemari oleh mereka.

Pemain kedua adalah FPI. FPI biasanya masuk ke pesantren-pesantren salaf yang begitu mengutamakan “dalih agama” sebagai tuntunan hidupnya. Selain pesantren, FPI di Kab. Sukabumi juga tumbuh subur di kalangan masyarakat yang senang sekali membentuk ormas keagamaan, sehingga tidak heran jika di wilayah ini banyak sekali ormas keagamaan dan hampir 80% merupakan bentukan FPI. Selain isu anggaran dan pembagian lahan bajakan, anak-anak ormas FPI ini dibuat untuk memperkuat dan menyamakan nama FPI yang bisa dikatakan tidak terlalu bagus di beberapa wilayah di Kab. Sukabumi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan FPI biasanya tabligh akbar, dzikir bersama, implemementasi “Nahi Munkar” (pembubaran tempat maksiat, aliran sesat), dsb.<sup>34</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelajar, banyak dari mereka yang menjadi santri di pesantren salaf. Di pesantren inilah mereka mengenal FPI dan terkadang ikut dalam kegiatan-kegiatan FPI. Yang banyak ditemukan di enam sekolah yang diteliti, siswa yang juga santri salaf ini turut berpartisipasi dalam aksi mobilisasi massa untuk demo berjilid di Jakarta. Mereka difasilitasi akomodasi dan mendapatkan restu bahkan dianjurkan oleh pihak pesantren dan juga sekolah. Alasannya adalah membela agama Islam yang sudah dilecehkan.

---

33 Penuturan N dalam FGD di Hotel Anugrah tanggal 29 November 2017.

34 Menurut penuturan beberapa informan di luar subjek penelitian (supir ojek online, tokoh masyarakat, pengusaha, dan masyarakat) FPI di beberapa wilayah punya *image* kurang bagus karena salah satu ormas bentukannya seperti GHOIB lebih dikenal sebagai ormas *debt collector*, dan latar belakang anggotanya kebanyakan “preman”, bukan santri. Konon, jasa mereka sering dipakai oleh dealer motor ataupun penyedia pinjaman.

FPI menjadi menarik bagi remaja sekolah yang berada di pesantren karena bagi mereka nilai persaudaraan dan persatuan sebagai umat “Islam” menjadi sebuah kebanggaan. Selain itu, layaknya nilai pesantren akan keberkahan kyai dan ulama, itu juga yang mereka pegang. Bagi mereka, para habaib dan ulama FPI yang tegas dan berani tersebut merupakan keberkahan jika mengikutinya dan menjadikan mereka panutan.

*Nilai yang saya dapat dari ikut FPI itu bahwa kita semua saudara, Islam semua bersaudara. Ketika seperti itu kita bisa dekat dengan ulama dan ketika kita dekat dengan ulama hidup kita jadi berkah.<sup>35</sup>*

Nilai “persaudaraan” dan “berkah ulama” yang ditanamkan oleh FPI ini kemudian yang menjadikan mereka dengan mudah membawa isu agama untuk menggiring opini dan massa dalam setiap aksinya.

Yang terakhir adalah Ar-Rayyah. Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA) ini merupakan afiliasi dari LIPIA yang ada di Jakarta, dimana salah satu sumber dananya berasal dari Saudi Arabia.<sup>36</sup> Ar-Rayyah berdiri di wilayah Cikembar, dimana mayoritas masyarakatnya beragama Katolik. Ar-Rayyah masuk ke sekolah melalui jaringan alumni yang ada di SMAN 1 Cikembar. Menurut penuturan pengurus OSIS bidang keagamaan dan koordinator ekskul keagamaan, Ar-Rayyah biasanya menjadi salah satu narasumber untuk kajian-kajian keagamaan dalam kegiatan ekskul. Ini sudah berlangsung lama. Bahkan, menurut salah satu guru, Ar-Rayyah susah terputus karena alumni dari sekolah ini banyak yang melanjutkan ke STIBA tersebut. Beliau juga menyatakan bahwa Ar-Rayyah masuk dalam kategori Islam yang cukup Eksklusif. Namun sayangnya peneliti tidak bisa menggali lebih jauh terkait Ar-Rayyah karena keterbatasan waktu.

Dari ketiga “aktor” yang populer di kegiatan keagamaan sekolah tersebut, bisa terbaca bagaimana internalisasi nilai Islam yang mereka tanamkan kepada para pelajar yang menjadi pengikutnya. Siswa-siswi yang aktif dalam kegiatan QC cenderung “menjaga diri”<sup>37</sup> (seperti berpakaian

---

35 Penuturan AC dalam FGD siswa di Hotel Anugrah tanggal 29 November 2017.

36 Seperti diketahui LIPIA sangat kental dengan wahabisme. Mereka juga sangat eksklusif dan pandangan-pandangan keagamaannya cenderung intoleran.

37 Istilah dari mereka..

yang menutup aurat; menggunakan manset dan kaos kaki untuk menutup aurat kaki dan tangan, berjilbab lebar untuk muslimah, dan tidak menyentuh tangan ketika bersalaman dengan lawan jenis), dari gesture dan cara mereka berbicara pun sedikit berbeda dengan siswa lainnya, terkesan lebih dewasa dan menyangkutkan segala hal dengan Al-Qur'an maupun dalil-dalil agama. Mereka sering sekali melontarkan pernyataan bagaimana menjadi remaja muslim yang seharusnya sesuai Al-Qur'an. Meskipun keterlibatan mereka bersifat mingguan atau bulanan, kenyataannya internalisasi nilai yang mereka tanamkan cukup tumbuh subur di kalangan pelajar.

Siswa yang aktif ataupun pernah aktif dalam kegiatan FPI cenderung berani dan berani-apei ketika kami mencoba menggali respon mereka terhadap isu-isu agama yang marak di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh salah satu siswa yang merupakan mantan ketua OSIS MAN 3 yang menyatakan bahwa

*“Saya tidak setuju dengan toleransi, karena toleransi berasal dari akar kata “membiarkan”. Jika kita toleran artinya kita membiarkan mereka di luar kita (Islam) melakukan semaunya. Yang benar adalah Tasammuh, tenggang rasa dalam hal sosial bukan agama. Karena dalam Al-Qur'an tegas dikatakan Islam satu-satunya agama yang benar”<sup>38</sup>*

Mereka juga cenderung tegas dan pro terhadap aksi-aksi yang menurut mereka merupakan jalan membela Islam, karena bagi mereka itu salah satu cara menguatkan Islam yang mulai lemah.

Sedangkan siswa yang terpapar oleh Ar-Rayyah sayangnya tidak tergalai jauh karena kendala waktu. Temuan yang sama adalah respon mereka terhadap isu-isu agama<sup>39</sup>; mereka sepakat dengan penerapan syariat Islam namun bukan Negara Islam karena Indonesia memiliki dasar negara tersendiri, pro terhadap aksi-aksi bela Islam, anggapan sesat bagi mereka yang berbeda baik secara tata ibadah maupun aqidah di luar Islam mayoritas yang mereka kenal seperti NU dan Muhammadiyah, dan PKI itu jahat dan banyak membantai ulama.

Sementara untuk isu kebinekaan, tidak tertangkap jelas karena mereka berada dalam lingkungan yang sangat homogen baik di sekolah maupun di

---

38 Mengutip ayat Al-Qur'an surat Al-Imron ayat 19.

39 Isu agama yang mereka tahu hanya; Aksi bela Islam, Rohingya, dan PKI.

rumah. Mereka seakan nyaman dengan dunia dan lingkungan mereka yang seperti itu. “*Tidak mau cari tahu lebih dalam, takut terjerumus, cukup tahu saja*” menurut salah satu siswi SMAN 1 Sukaraja. Dari keenam sekolah, hanya ada satu yang memfasilitasi kegiatan yang bersentuhan langsung dengan siswa dari agama lain maupun dari suku/etnis lain yaitu SMAN 1 Cikembar karena di sekolah ini siswa non muslim (Protestan) ada sekitar 10-15 siswa (cukup banyak dibanding lima sekolah lainnya). Sedangkan sekolah-sekolah lain tidak ada inisiatif membangun dan menanamkan nilai-nilai kebinekaan yang aplikatif karena menurut mereka hal tersebut tidak perlu. Toh mayoritas warga sekolah adalah muslim. Meskipun ada siswa non muslim di sekolah mereka, namun seperti tak terlihat, jikapun ada singgungan antarsiswa muslim dan non muslim hanya pada ranah *sharing* ketika jam pelajaran agama, itupun hanya terjadi di SMAN 1 Cisaat.

Kondisi keagamaan sekolah-sekolah ini didukung oleh masyarakat yang tergolong tradisional dalam beragama (mengaku NU meskipun “*cassingnya*” beragam). Mereka tidak begitu paham apa itu organisasi keagamaan trans-nasional, salafi, maupun moderat. Sebagian besar dari mereka hanya tahu NU dan Muhammadiyah. Di satu sisi ini mungkin menjadi positif karena mereka hanya tahu hitam dan putih. Namun di sisi lain ini bisa menjadi negatif karena mereka begitu mudah disusupi paham-paham yang mempunyai potensi intoleran dan mengabaikan kebinekaan. Dan faktanya, itulah yang sedang terjadi di Kab. Sukabumi. Sekolah dan masjid-masjid menjadi garapan golongan trans-nasional dan politis seperti PKS dan PUI, dan pesantren-pesantren salaf yang begitu banyak tersebar di Kab. Sukabumi menjadi lahan garapan ormas yang punya *image* “keras” dan intoleran seperti FPI.

Fenomena radikalisme di kalangan siswa maupun warga sekolah memang tidak ditemukan. Namun internalisasi nilai keislaman mayoritas (tradisional) yang begitu kental menjadikan warga sekolah, baik tenaga pendidik maupun peserta didik, menjadi nyaman dan abai terhadap nilai-nilai kebinekaan. Secara tidak langsung ini akan memupuk sikap intoleransi jika ruang-ruang kosong ini terus diisi oleh mereka yang begitu kuat sentimen golongannya. Seperti yang disampaikan oleh banyak kalangan, intoleransi dahulu radikal

kemudian. Belum diketahui jelas apakah ini merupakan kerinduan mereka untuk kembail ke Islam yang kaffah<sup>40</sup> jika melihat dari tradisi masyarakat pasundan Sukabumi yang sangat dekat dengan nilai-nilai eksklusif dan konservatif. Atau justru ini memang lebih besar karena politisasi agama.

Temuan yang menarik lainnya adalah terdapat siswi bercadar di dua sekolah yaitu MAN 1 dan MAN 3. Kedua sekolah ini merupakan sekolah negeri berbasis agama yang biasanya diduga lebih moderat pemahaman keislamannya dibanding sekolah negeri umum. Setelah coba didalami, semua siswi yang bercadar tidak terindikasi ikut dengan gerakan maupun paham radikal. Mereka mendapatkan “ilham” untuk bercadar dari sosial media,<sup>41</sup> buku 401 hadits Purdah dan QS.Al-Ahzab, keluarga, dan teman sebayannya yang sudah lebih dulu bercadar.

*“Saya anak rumahan jadi tidak ikut kajian atau mondok dimana-mana, memutuskan bercadar karena sering mengikuti tulisan dan ajakan di media sosial terkait hijrah”. SN, siswi MAN 1.*

*“Saya terinspirasi oleh kakak kelas yang lebih dulu menggunakan cadar, melihatnya sejuk. Kemudian saya tanya dan saya diberikan buku 401 hadits tentang purdah. Setelah membaca itu saya jadi mantap bercadar”. NA, siswi MAN 3.*

*“Seluruh perempuan dari pihak bapak menggunakan cadar, meskipun ibu tidak tapi keluarga sudah biasa dan sangat mendukung. Pemahaman tentang purdah didapat dari kitab-kitab yang dipelajari di pesantren keluarga. Kami sering berdiskusi soal agama disana”. NS, siswi MAN 3.<sup>42</sup>*

Fenomena cadar/purdah ini menarik karena peran media sosial dengan gerakan hijrahnya dan teman sebaya menjadi yang dominan sebagai acuan mereka. Pihak sekolah ketika dikonfirmasi menyatakan sempat khawatir jika anak-anak yang bercadar ini terindikasi mengikuti gerakan atau paham radikal. Sekolah pun kemudian mencari tahu dan coba mendekati anak-anak tersebut dan ketika ditanya alasan mereka sepenuhnya untuk menjaga aurat

---

40 Instropeksi kedalam diri ini dikaitkan dengan jumlah ODHA yang begitu tinggi di Kab. Sukabumi sehingga agama dijadikan jalan untuk kembali.

41 Gerakan hijrah yang massif di sosial media, bahkan beberapa perempuan bercadar populer menjadi selebgram di IG dan biasanya menjadi contoh anak-anak remaja. Selain itu, penulis dan ustaz medsos seperti Felix Shiaw dan sejenisnya menjadi rujukan dan bahan bacaan mereka.

42 NS berasal dari keluarga dimana ayahnya merupakan Jamaah Tabligh.

dan lebih nyaman dengan penampilan seperti itu. Pihak sekolah mengaku tidak bisa melarang karena takut dituduh melanggar Hak Anak. Oleh karena itu, sekolah hanya membatasi jika mau bercadar cukup menggunakan masker atau tidak terlalu menjuntai dan terus mengawasi dari jauh. Pihak sekolah juga berusaha memberikan pengertian bahwa dengan penampilan seperti itu akan membuat mereka memiliki banyak keterbatasan terutama dalam aktifitas belajar dan ekskul.

**a. Pemahaman dan Referensi Keagamaan Siswa**

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pemahaman siswa terkait keagamaan masih sangat minim. Bagi mereka, ketika Tuhannya sama dan praktik ibadahnya sama, maka itu Islam yang sama (mereka menyebutnya *Ahlu sunnah wal jama'ah*). Bagi yang aktif dalam kajian QC, ketika ada ajaran-ajaran fikih yang berbeda dengan apa yang mereka yakini sebelumnya, maka mereka tidak mengikutinya. Ini menjadi ambigu karena apa sebenarnya yang mereka yakini dengan yang mereka praktikkan dalam keseharian ternyata berbeda.

*Saya ikut QC, tapi saya NU. Jadi kalo ada praktik fikih yang beda saya gak ikutin.*<sup>43</sup>

*Menurut saya, saya ahlu sunnah wal jama'ah, di luar itu Muhammadiyah.*<sup>44</sup>

Preferensi sosok yang ditokohkan juga sesuai dengan corak keagamaan yang mereka ikuti. Misalnya, siswa-siswi yang aktif dalam kajian QC mereka banyak merujuk pada sosok Felix Siauw, dan Abdusshomad. Mereka yang aktif dalam FPI merujuk Habib Rizieq Shihab, Zakir Naik, hingga Erdogan sebagai panutan ulama yang harus diikuti dan dibela karena ketegasan dan keberanian mereka membela Islam. Sedangkan bagi mereka yang berasal dari kalangan moderat seperti IPPNU, Fopulis, dan santri Sunanul Huda, menjadikan Gus Dur, Gus Mus, dan Habibie sebagai preferensi ulama dan tokoh yang menurut mereka pemikirannya kontekstual, progresif, dan mampu membanggakan Indonesia. Mereka juga lebih memilih Guru, Kyai, Ustaz,

---

43 Penutiran NN dalam FGD siswa di Hotel Anugrah tanggal 29 November 2017.

44 Penuturan AC dalam FGD siswa di Hotel Anugrah tanggal 29 November 2017.

Habib, dan ‘*Murobbi*’ sebagai sosok yang bisa membawa mereka dalam pencerahan keilmuan agama dibanding orang tua. Melihat ini, peran sosok-sosok tersebut menjadi sangat berpengaruh bagi sebagian besar pelajar karena bisa menggantikan peran orang tua dalam penanaman pendidikan keagamaan bagi mereka.

Untuk isu keagamaan yang populer adalah aksi bela Islam, dimana aksi ini untuk melawan “penista” agama. Dari hasil FGD mereka sepakat bahwa memang ada sebagian yang menginginkan pemimpin seagama. Namun banyak juga dari mereka yang menyatakan bukan soal pemimpin seagama tapi lebih kepada penistaan yang dilakukan oleh Ahok. Bagi mereka, yang dimaksud pemimpin seagama dalam konteks keagamaan bukan dalam konteks duniawi seperti pemerintahan.

## **2. Kuasa Negara yang Terlupakan (Implementasi Permen dan Aturan-aturan)**

Untuk melihat implementasi kebijakan di level sekolah, penelitian ini memfokuskan pada kebijakan terkait OSIS dan ekstrakurikuler yang tercantum dalam Permendiknas No. 39 Tahun 2008, Permendikbud No. 23 Tahun 2015 terkait budi pekerti, dan kebijakan-kebijakan daerah terkait pendidikan.

Secara keseluruhan, dari enam sekolah yang diteliti, lima diantaranya tidak mengetahui secara detail kebijakan-kebijakan yang termuat dalam Permendiknas, Peraturan Kementerian Agama (PMA), maupun Peraturan Daerah terkait Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan ekstrakurikuler.<sup>45</sup> Hanya waka kesiswaan dari MAN 1 yang merespon cukup detail ketika ditanyakan terkait aturan-aturan tersebut. Dalam pelaksanaannya, satuan pendidikan (sekolah) mengikuti aturan yang sudah ada atau menduplikasi kegiatan dari kepengurusan OSIS dan ekstrakurikuler sebelumnya. Perumusan kebijakan maupun aturan di sekolah, baik untuk OSIS maupun ekstrakurikuler, didasarkan pada musyawarah pengurus dengan pembina OSIS/kesiswaan yang diturunkan menjadi AD/ART hingga program kerja. Sebenarnya sosialisasi terkait aturan kebijakan baru selalu ada dan dilakukan baik oleh Dikbud maupun Depag. Hanya saja mereka mengaku hanya mengetahui

---

<sup>45</sup> Stakeholder (kepala sekolah & kesiswaan) juga siswa tidak faham aturan-aturan tersebut.

sekilas, tidak mendetail. Dan Permen tersebut sudah lama sehingga dalih lupa yang mereka gunakan.

**a. Implementasi Permendikbud No. 39 Tahun 2008**

Menurut semua stakeholder yang menjadi informan penelitian ini, implementasi Permendikbud No. 39 Tahun 2008 sudah terakomodir dalam kepengurusan dan program kerja OSIS. Kepengurusan OSIS terdiri dari minimal 9 hingga 11 bidang di dalamnya. Bidang-bidang ini sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ingin dicapai dalam Permendikbud tersebut sesuai dengan lampiran permen terkait materi apa saja yang perlu diinternalisasi melalui OSIS.

Dalam skema suksesi OSIS, semua sekolah sudah memberlakukan sistem pemilihan umum layaknya pemilihan kepala daerah atau presiden di Indonesia. Biasanya yang berperan sebagai KPU adalah pengurus MPK (Majelis Permusyawaratan Kelas), dibantu oleh DPK (Dewan Perwakilan Kelas). MPK dan DPK secara fungsi mirip seperti MPR dan DPR dalam pemerintahan, dimana mereka mengawasi kinerja pengurus OSIS, membantu Pembina dan Kesiswaan. Selain itu, MPK juga banyak berperan membantu OSIS dalam eksekusi kegiatan-kegiatan OSIS. Tahapan seleksi calon kandidat OSIS hampir serupa di 6 sekolah; rekomendasi kesiswaan, wawancara dengan kesiswaan dan dewan guru, kampanye, debat terbuka, pemilu, LDKS (latihan dasar kepemimpinan siswa), hingga perumusan program kerja dan kepengurusan. 5 sekolah yang diteliti sepakat memasukan syarat menjadi ketua OSIS harus mereka yang punya pengalaman menjadi pengurus OSIS di periode sebelumnya sehingga tidak terbuka peluang bagi siswa non pengurus OSIS untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Namun berbeda dengan SMAN 1 Cikembar, mereka memberikan kebebasan kepada seluruh siswa baik yang pernah menjabat sebagai pengurus OSIS periode sebelumnya ataupun yang tidak untuk mengajukan diri menjadi calon kandidat ketua OSIS dengan syarat mereka yang ingin mengajukan harus ikut LDKS yang biasanya diselenggarakan selama 3-5 hari. Berbeda dengan lima sekolah lainnya dimana LDKS dilakukan di akhir, ketika ketua OSIS sudah terpilih, di sekolah ini LDKS justru dilakukan di awal sebagai bagian dari proses seleksi.

3 dari 6 sekolah (SMAN 1 Cisaat, SMAN 1 Cikembar, dan SMAN 1 Jampang Kulon) yang diteliti memiliki siswa non muslim meskipun persentasenya tidak sampai 1 %. Dari ketiga sekolah tersebut tidak satupun siswa non muslim yang aktif dan masuk dalam kepengurusan OSIS, MPK, DPK maupun ekskul. Ketika digali mereka mengatakan tidak tertarik, sudah terlalu banyak aktifitas, hingga tidak nyaman menjadi minoritas dalam kepengurusan. Hal ini kemudian berimplikasi pada program kerja OSIS yang hanya mengakomodir satu agama mayoritas yaitu Islam. Ide-ide pembauran dengan minoritas pun tidak muncul dalam program kerja mereka.

Dalam Permendiknas No. 23 Tahun 2008 di Pasal 3 dijelaskan bahwa Pembinaan Kesiswaan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Dalam Permen tersebut juga dilampirkan materi pembinaan kesiswaan apa saja yang mesti diinternalisasi melalui OSIS yaitu meliputi :

1. Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia;
3. Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara;
4. Prestasi Akademik, Seni, dan/atau Olahraga sesuai bakat dan minat;
5. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial dalam konteks masyarakat plural;
6. Kreativitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan;
7. Kualitas Jasmani, Kesehatan, dan Gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi
8. Sastra dan Budaya;
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
10. Komunikasi dalam Bahasa Inggris;

Kesepuluh materi tersebut kemudian diterjemahkan oleh sekolah menjadi bidang-bidang kepengurusan dalam OSIS. Bidang-bidang ini yang kemudian membuat program kerja sesuai dengan materi pembinaannya. Bidang-bidang ini tidak mutlak sama di seluruh sekolah, ada yang membentuk 10 bidang sesuai dengan urutan dalam permen, adapula yang memisahkan satu materi ke dalam beberapa bidang. Bidang-bidang ini sebagian besar membawahi ekstrakurikuler, namun tidak semua bidang mempunyai ekstrakurikuler.

Bentuk program atau kegiatan yang terkait dengan materi 1; Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa biasanya berbentuk aktifitas ibadah keagamaan seperti; baca Al Qur'an 15 menit sebelum KBM, membaca Asmaul Husna/shalawat sebelum KBM, Salat Duha berjamaah<sup>46</sup>, Salat Zuhur berjamaah, kultum Zuhur (MAN 1), Pengajian Jumat pagi (MAN 3), perayaan hari besar agama (hanya Islam), dan membawahi ekskul keagamaan (RMA, FORMA, KHARISMA, RMAI, dsb)<sup>47</sup>. Materi 2; Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia biasanya programnya masuk ke dalam penerapan disiplin siswa dan banyak dibantu oleh ekskul keagamaan untuk aktifitasnya. Bidang ini juga yang menjadi pengawas untuk penerapan 10 Pembiasaan Akhlak Mulia di enam sekolah. Materi 3; Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara biasanya program kerjanya terkait pelaksanaan upacara mingguan, perayaan hari besar nasional dan membawahi ekskul Paskibra dan Pramuka. Materi 4; sangat beragam dan membawahi banyak cabang ekskul seperti; teater, paduan suara, band, dan tari. Materi 5; implementasinya biasanya berupa suksesi pemilihan OSIS, musyawarah dan rapat-rapat pengurus OSIS dan tidak ada ekskul yang di bawahinya. Materi 5 ini merupakan materi yang paling relevan dengan isu penelitian ini, namun dari semua sekolah yang diteliti, implementasi nilai toleransi dan kepekaan terhadap masyarakat plural luput dari program kerja mereka. Materi 6; program kerja bidang ini lebih banyak terkait dengan kewirausahaan dan biasanya sebagai cara untuk menggalang dana kegiatan. Dan tidak semua sekolah memiliki bidang ini. Materi 7; implementasinya melalui ekskul-ekskul olahraga<sup>48</sup>. Materi 8; sebagian besar program kerjanya adalah Mading sekolah dan ekskulnya KIR (kelompok ilmiah remaja). Materi 9 dan 10; implementasinya banyak membentuk klub-klub bahasa maupun IT.

---

46 Di SMAN Jampang Kulon, Salat Duha berjamaah dilakukan setiap dua minggu sekali di lapangan sekolah, selang-seling dengan upacara bendera.

47 Tiap sekolah nama ekskul keagamaan biasanya disesuaikan dengan nama masjid sekolah sehingga nama-nama ekskul keagamaan tiap sekolah akan berbeda. Mudah-mudahan, lebih dikenal dengan istilah Rohis (Kerohanian Islam).

48 Enam sekolah yang diteliti mengunggulkan olahraga Volly dan Futsal. Bahkan kedua cabang olahraga ini dijadikan jalur seleksi non-akademis dan siswa yang lulus melalui seleksi ini mendapatkan beasiswa dan fasilitas asrama.

Dalam realisasinya, OSIS dan ekskul lebih banyak berperan sebagai EO (*event organizer*) sekolah dimana mereka lebih banyak melaksanakan program yang direncanakan sekolah. Keterlibatan OSIS, MPK, dan DPK sebagai penentu dan pengambil kebijakan di sekolah sangat terbatas karena mereka selalu harus melalui persetujuan pembina OSIS dan Kepala Sekolah. Dari temuan di lapangan, hanya OSIS di SMAN 1 Cisaat yang punya inisiatif mengedarkan kotak aspirasi melalui DPK dan MPK. Program ini sebagai wadah seluruh siswa dan warga sekolah untuk bisa menyampaikan apa-apa yang menurut mereka tidak sesuai dan sesuai bagi siswa, baik itu aturan maupun program sekolah. Skema alur koordinasi aspirasi ini sebenarnya menarik karena bisa menjadi salah satu cara dimana OSIS dan jajarannya bisa turut ambil peran dalam menentukan kebijakan. Namun dalam realisasinya, semua aspirasi ini lebih banyak yang diabaikan dan ditolak oleh sekolah.

*“Sebenarnya menarik ini seru, karena ada dinamika dari DPK, MPK, hingga sampai ke OSIS. Proses sharing dan adu pendapat hidup, tapi sayang ketika kita ajukan ke waka kesiswaan dan kepala sekolah apa yang jadi aspirasi mereka kebanyakan ditolak. Hehehe” SB, Siswi SMAN 1 Cisaat.*

Sejak adanya otonomi daerah, kebijakan-kebijakan daerah lebih banyak dibuat oleh pemerintah daerah termasuk bidang pendidikan. Implikasinya adalah sebagian besar implementasi kebijakan di level satuan pendidikan di daerah lebih banyak mengadopsi kebijakan daerah dibanding pusat. Sayangnya kebijakan-kebijakan tersebut hanya mengakomodir satu agama yakni Islam. Kebijakan pendidikan bernuansa agama ini kemudian diwadahi oleh Badan Bina Keagamaan dalam merealisasikan implementasinya. Mulai dari perencanaan, perumusan kurikulum, hingga aturan-aturan detail yang ada di dalamnya.

#### **b. Implementasi Permendikbud No. 23 Tahun 2015**

Permendikbud No. 23 Tahun 2015 mengatur tentang Penumbuhan Budi Pekerti di kalangan satuan pendidikan mulai dari kepala sekolah hingga masyarakat sekitar sekolah. Tujuan dari Permen ini adalah menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan; menumbuhkembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk

pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat; menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga; dan/atau menumbuhkembangkan lingkungan dan budaya belajar yang serasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pelibatan seluruh warga sekolah menjadi penting demi tercapainya semua tujuan tersebut.

Permen ini sebenarnya sangat bagus jika diimplementasikan dengan serius oleh sekolah karena sarat akan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Hanya saja fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerjemahan Permen ini lebih banyak ke ranah ibadah ritual keagamaan seperti baca Al-Qur'an dan shalawat sebelum KBM, Salat berjamaah, berpakaian "Islami", hingga puasa sunnah. Nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan yang menjadi corong dari permen ini luput. Padahal, seperti diketahui bersama, sekolah negeri bukan sekolah agama, sekolah negeri adalah sekolah milik pemerintah sehingga seharusnya nilai-nilai kebangsaan yang lebih ditonjolkan. Namun di Kab. Sukabumi sekolah negeri umum (SMAN) dan sekolah negeri berbasis agama (MAN) tidak berbeda, baik secara aturan fisik (cara berpakaian) dan implementasi budi pekerti (sikap). Pemahaman stakeholder sekolah dan guru terkait Permen ini juga sangat sempit. Bagi mereka, siswa yang berbudi pekerti adalah yang berakhlak mulia. Penerjemahan akhlak di sini lebih cenderung pada mereka yang rajin ibadah ritualnya. Mereka meyakini ketika siswa cukup baik ibadahnya maka dia cukup kuat fondasi keimanannya dan akan berimplikasi terhadap perilaku sosialnya. Sayangnya ibadah amaliyahnya tidak banyak dipupuk oleh pihak sekolah sehingga tidak bisa menjamin anak yang rajin ibadah bisa bersikap moderat dan toleran.

Implementasi kebijakan ini kalah dengan 10 Pembiasaan Akhlak Mulia, enam sekolah sepakat bahwa 10 Pembiasaan Akhlak Mulia merupakan inti dari pendidikan budi pekerti. Pembiasaan tersebut sesuai dengan konteks homogenitas masyarakat Kab. Sukabumi yang mayoritas Islam.

Dalam Permen di pasal 5 ini disebutkan skema monitoring dan evaluasi atas implemenasinya yaitu; bahwa Pemantauan dan Evaluasi kegiatan MOPDB dilaksanakan pada awal tahun pelajaran baru oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; Pemantauan dan evaluasi kegiatan pembiasaan serta interaksi dan komunikasi di sekolah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; Pemantauan dan evaluasi kegiatan saat kelulusan dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam pasal tersebut jelas seharusnya ada keterlibatan pemerintah dalam proses monev kebijakan ini. Namun fakta di lapangan menunjukkan pemerintah tidak hadir. Pemantauan hanya selesai pada tataran sosialisasi kebijakan tanpa ada evaluasi rutin yang seharusnya dilakukan jika mengacu pada pasal tersebut. Hal ini kemudian menjadikan penerjemahan yang “kurang tepat” atas penanaman budi pekerti di tataran satuan pendidikan terus berlangsung dan mengakar.

### **c. Implementasi Perda terkait Agama dan Pendidikan**

Sejak adanya otonomi daerah, kebijakan daerah yang disesuaikan dengan konteks lokal juga berimplikasi di ranah pendidikan. Implementasi kebijakan-kebijakan terkait pendidikan lebih banyak berasal dari Pemerintah Daerah. Sehingga tidak pelak jika terkadang kebijakan daerah tumpang tindih dengan kebijakan pusat. Sejak awal 2017, kebijakan dan pengelolaan terkait, sekolah menengah umum dan sederajat sudah berada di Provinsi. Namun, pengalihan yang cukup baru tersebut belum berpengaruh banyak bagi kebijakan pendidikan di Kab. Sukabumi. Kebijakan yang masih berlaku dan terealisasi adalah produk pemerintahan bupati sebelumnya, seperti yang sudah disinggung dalam uraian-uraian sebelumnya, dimana Kab. Sukabumi menelurkan banyak kebijakan pendidikan yang kental nuansa agamanya (hanya Islam) ketika kepemimpinan Sukmawijaya. Berikut kebijakan Pemerintah Daerah terkait pendidikan dan agama:

- Instruksi Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pemakaian Busana Muslim bagi Siswa dan Mahasiswa di Kabupaten Sukabumi;
- Perbub No. 6 Tahun 2006 tentang Program Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan sebagai bagian dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Diniyah;

- Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2007 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Sukabumi;
- Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Sepuluh Pembiasaan Akhlak Mulia di Sekolah;
- Perda No. 8 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan.

Keenam Perda ini saling mendukung satu sama lain hingga kemudian semakin menegaskan “Islamisasi” di lingkungan pendidikan yang mestinya mejadi tempat yang netral, bahkan menjadi rumah bagi anak-anak didik untuk belajar kebinekaan. Perda-perda ini sebenarnya akan menjadi sangat positif jika saja internalisasi nilai-nilai Islam direalisasikan dalam bentuk yang lebih luas dan semakin memperkokoh kebinekaan. Sayangnya yang terjadi adalah sebaliknya. Perda-perda ini bisa menjadi gunung es yang berpotensi melunturkan nilai kebinekaan.

Yang sangat terlihat dan mendarah daging impelementasinya di Kab. Sukabumi adalah kebijakan Pemerintah Daerah terkait wajib Belajar Pendidikan Keagamaan Tahun 2006 dan 2009 dan Pembiasaan Akhlak Mulia. Kebijakan-kebijakan ini dibuat sebagai bagian dari kontrak politik Sukmawijaya dengan pendukungnya. Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Sepuluh Pembiasaan Akhlak Mulia di sekolah direalisasikan dalam bentuk ritual ibadah keagamaan yang sudah disinggung sebelumnya. 10 Pembiasaan Akhlak Mulia ini juga diklaim lebih dulu (revolusioner) dibanding Permen terkait budi pekerti yang dibuat Pemerintah Pusat. Sehingga sekolah-sekolah menyatakan bahwa “*kami sudah melaksanakannya lebih dulu.*”<sup>49</sup> Penerjemahan budi pekerti yang sempit ini (karena hanya mengakomodir satu golongan saja) begitu mengakar sehingga homogenitas di sekolah-sekolah yang diteliti menjadi semakin menguat. Menguatnya hal tersebut secara tidak sadar menjadikan warga sekolah menjadi mayoritas yang abai terhadap minoritas.

Sedangkan Perda No. 6 Tahun 2006 dan No 8 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan dilakukan melalui Badan Bina Keagamaan. Menurut penuturan Kasi Pelayanan Pendidikan, perumusan kurikulum

---

49 Semua stakeholder sekolah mempunyai pemikiran yang sama soal ini, budi pekerti sama dengan akhlak mulia. Akhlak mulia artinya siswa terampil dalam ritual ibadah.

pendidikan agama dikoordinir oleh badan ini dengan melibatkan Diknas dan Depag. Sayangnya perumusan kurikulum ini hanya untuk Pendidikan Agama Islam. Untuk Perda No. 6 Tahun 2006 realisasinya adalah Sertifikat Diniyah menjadi salah satu syarat masuk sekolah tingkat pertama. Siswa yang tidak mempunyai sertifikat tersebut tidak bisa melanjutkan ke jenjang sekolah tingkat pertama. Kebijakan ini juga kemudian menimbulkan industrialisasi pendidikan. Ini bisa terbaca dari angka pertumbuhan ekonomi dari sektor pendidikan yang terus meningkat dan jumlah madrasah diniyah sebagai lembaga penyelenggara dan yang mengeluarkan sertifikat tersebut tumbuh subur dimana hingga tahun 2016, jumlah Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah (MDTA) sebanyak 2428 lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Kab. Sukabumi.<sup>50</sup>

Jika melihat dari data lapangan, proses implementasi kebijakan-kebijakan di atas masih dalam tataran sosialisasi. Skema monitoring dan evaluasi, baik dari satuan pendidikan, pemerintah daerah hingga pusat belum terlihat. Monitoring dan evaluasi patut dilaksanakan karena merupakan bagian vital sebagai proses perbaikan dan penerjemahan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang lainnya ingin diinternalisasi.

### **3. Mereka yang Rentan di Tengah yang Bertahan (Daya Tahan dan Strategi Sekolah dalam Menghadapi Isu dan Infiltrasi Gerakan Radikal)**

Banyak penelitian terkait isu radikalisme menyatakan pelajar SMA sederajat menjadi sasaran utama bagi penyebaran paham tersebut. Kaderisasi yang kuat dan militan di perguruan tinggi pun banyak terindikasi dipupuk sejak mereka masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Stakeholder sekolah mereka tidak menafikan temuan tersebut. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa ada upaya-upaya kecil yang dilakukan Pemerintah Daerah dan sekolah dalam infiltrasi gerakan radikal. Pada level pemerintahan, kekuatan politik PKS mulai melemah. Bupati sekarang yang “cukup nasionalis” membuat terobosan untuk memfilter gerakan-gerakan intoleran maupun radikal dengan merestrukturisasi Badan Bina Keagamaan yang selama ini memiliki andil

---

50 Data diambil dari dokumen Kabupaten Sukabumi dalam Angka tahun 2017..

besar dalam implementasi kebijakan keagamaan di sekolah dan merubah nama dan fungsinya menjadi Badan Bina Sosial dan Keagamaan. Harapannya badan ini bisa menjadi pendukung isu-isu sosial dan keagamaan yang lebih mengedepankan kebangsaan dan kebinekaan.

FKPPI dan FKPNi yang merupakan wadah anak-anak purnawirawan polisi dan TNI juga cukup berperan menjaga stabilitas kebinekaan di Kab. Sukabumi, terutama di daerah Cikembar. Menurut penuturan salah satu tokoh pemuda Cikembar, selama ini Cikembar relatif stabil dan tidak mudah tersulut konflik karena pihak luar yang biasanya menjadi sumber konflik berfikir ulang untuk masuk karena pantauan dua organisasi ini.

Sedangkan sekolah punya cara tersendiri dalam menangkal radikalisme. Mulai dari memonitoring segala aktifitas OSIS dan ekstrakurikuler (SMAN 1 Sukaraja, MAN 3 Sukabumi, MAN 1 Sukabumi), meminimalisir narasumber dari luar sekolah untuk mengisi kajian-kajian keagamaan di ekstrakurikuler atau OSIS (SMAN 1 Cisaat, MAN 1 dan 3 Sukabumi, SMAN 1 Sukaraja), memaksimalkan ekstrakurikuler sebagai wadah kegiatan siswa di sekolah (SMAN 1 Jampang Kulon, MAN 1 Sukabumi), hingga pembentukan pesantren sekolah (MAN 3 Sukabumi). Sekolah juga rutin bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk mengisi upacara bendera yang biasanya dilakukan 1 bulan 1 kali. Sekolah menyatakan bahwa ini bagian dari upaya membentengi peserta didik dari informasi hoax yang banyak berkembang dan juga sebagai upaya menanamkan nasionalisme kebangsaan.

Homogenitas agama dan budaya di Kab. Sukabumi menjadikan Pesantren dan Ekstrakurikuler salah dua yang bisa menjadi alternatif ketahanan sekolah membendung arus ideologi eksklusif hingga radikal. Ekstrakurikuler menjadikan siswa belajar bagaimana proses berfikir kritis dan kreatif, dan pesantren menjadi sumber rujukan “shahih” jika diisi dengan wawasan kebangsaan.

#### **4. Internalisasi Nilai Kebinekaan dan Kebangsaan**

Internalisasi nilai kebinekaan yang dilakukan sekolah tidak terlalu terlihat kentara, karena semua sekolah yang diteliti sangat homogen. Meskipun begitu, ada upaya-upaya kecil yang dilakukan seperti di SMAN 1 Cikembar

yang merupakan sekolah dengan jumlah non muslim terbanyak (sekitar 15 orang) dibanding lima sekolah lain, yakni pelibatan siswa non muslim sebagai pengisi acara di peringatan Hari Besar Islam.

*“Karena saya masuk di paduan suara, jadi waktu itu saya bernyanyi lagu religi Islam, kalo gak salah lagunya gigi pas acara Maulid atau Isra Mi’raj deh. Saya seneng dipercaya buat nyanyi lagu itu”. Al, Siswi SMAN 1 Cikembar.*

Meskipun tidak ada kegiatan yang memang khusus untuk menginternalisasi nilai kebinekaan di sekolah, dalam proses interaksi sosial siswa non-muslim di sekolah mengaku nyaman menjadi minoritas, meskipun kadang ada perlakuan berbeda. Teman-teman sebaya mereka pun tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan itu, bahkan mereka mengaku senang punya teman yang berbeda.

*“Seneng, karena kita bisa ngobrol hal-hal yang beda dari agama kita. Biasanya kita nanya kalo puasa di agama kamu gimana, Kristen tuh ada berapa macem, dsb”. HN Siswa SMAN 1 Cikembar.*

*“Mereka suka nanya-nanya kamu kalo ibadah gimana, terus nanya-nanya sejarah agama. Seneng sih. Saya juga jadi tau, dan gak masalah”. WK, siswa non muslim SMAN 1 Cisaat.*

Sedangkan untuk menanamkan nilai kebangsaan, sekolah biasanya bekerjasama dengan TNI dan Polri. Semua sekolah mengundang TNI/Polri untuk menjadi pembina upacara. Selain itu, mereka juga melibatkan TNI untuk menjadi salah satu pemateri di LDKS (SMAN 1 Cisaat, MAN 3, SMAN 1 Cikembar). Sekolah menyatakan jika internalisasi nilai kebinekaan dan kebangsaan lebih banyak dilakukan di kegiatan belajar mengajar melalui pelajaran sejarah, PKN, dan Agama. Inisiatif-inisiatif lain belum muncul bahkan tidak terpikirkan oleh mereka.

## **5. Mencari Model Ketahanan dari Kasus-Kasus di Sekolah**

### **a. Pesantren Sekolah**

Pondok Pesantren Ulul Albab MAN 3 Sukabumi yang berdiri tahun 2010 merupakan proyek disertai kepala sekolah saat itu (Pak Ujang). Misinya adalah terwujudnya pesantren pilihan, unggul, maju, terpercaya dan sinergis.

Pesantren ini diperuntukkan bagi siswa jurusan IAI (Ilmu Agama Islam) dengan menerapkan sistem kelembagaan kolegal, sehingga pesantren berada di bawah naungan Sekolah Madrasah Negeri (wakasek pesantren dan keagamaan) bukan milik perorangan. Di bawah Wakasek Pesantren dan Keagamaan, pesantren ini, juga segala aktifitas keagamaan sekolah dikoordinir, dan dibantu oleh OSIS bidang 1. Semenjak adanya pesantren, hubungan dengan Rohis nyaris terputus. Siswa lebih banyak mencari referensi keagamaan ke pesantren sekolah.

Dalam aktifitas kepesantrenan, Pesantren Ulul Albab menggabungkan kitab klasik dan kontemporer sebagai bahan kajian santri dan asatiznya. Penanggung jawab pesantren, Wakasek Pesantren dan Kegamaan, merupakan lulusan Ushuluddin IAIN (sekarang UIN) Yogyakarta, selalu meninjau ulang kurikulum dan kegiatan-kegiatan pesantren. Capaiannya adalah peserta didik bisa menjadi generasi penerus yang mempunyai pemikiran terbuka dan moderat. Dukungan dari kepala sekolah dan tenaga pendidik menjadikan pesantren ini terus berkembang. Harapannya bisa menjadi alternatif rujukan anak-anak dan masyarakat sekitar Surade untuk pengetahuan agama yang *'rahmatan lil 'alamin'*.

#### **b. Ekstrakurikuler dan Sekolah Ramah Anak**

Sebagai sekolah berbasis agama dan satu-satunya sekolah yang mendeklarasikan diri sebagai Sekolah Ramah Anak di Kab. Sukabumi, MAN 1 Sukabumi sangat konsen terhadap kegiatan ekstrakurikuler, sehingga peserta didik selain disibukkan dengan segudang pelajaran, mereka juga disibukkan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam. Dukungan sekolah terhadap ekskul ini kemudian mengantarkan anak-anak didiknya aktif dan kreatif. Bahkan sekolah membuat hari ekskul setiap hari Jum'at dimana anak-anak bebas mengenakan kostum ekskul kebanggaan mereka. Sekolah juga tidak menutup ide-ide metode pembelajaran kreatif seperti OCD (*Out Class Day*) dimana ini merupakan bagian dari bentuk penanaman budi pekerti dan nilai kebersamaan melalui kegiatan kokurikuler. Latar belakang pendidikan tenaga pendidik juga memengaruhi keterbukaan sekolah dan guru dalam proses

kegiatan belajar mengajar, pemahaman terkait nasionalisme dan kebinekaan pun menjadi salah satu hal yang dipupuk oleh pihak sekolah.

**c. Organisasi Kemasyarakatan**

Gerakan-gerakan masyarakat dan organisasi moderat juga cukup mengisi ruang untuk menangkal intoleransi dan radikalisme. Seperti yang dilakukan oleh Fopulis (Forum Pemuda Lintas Iman) yang mempunyai program “*Goes to school*”. Program ini mencoba menarik dan melibatkan pelajar di sekolah, terutama di tingkat SMP dan SMA, untuk mengenal dan memahami isu kebinekaan. Mereka juga membuka ruang-ruang perjumpaan dengan golongan yang berbeda dari mayoritas yang ada di sekolah, baik itu dari agama maupun kepercayaan di luar mayoritas (Islam). Sehingga mereka bisa, setidaknya lebih *aware* dengan yang minoritas demi terwujudnya nilai kebinekaan. Teman-teman dari NU seperti IPPNU dan PMII juga cukup aktif menggaungkan konsep “*Tawasut*”. Bagi mereka, konsep ini ideal untuk melihat dan menghadapi golongan yang terlalu konservatif sehingga bisa menimbulkan sikap intoleran hingga radikal.

*Bagian Dua*

RADIKALISME  
DALAM BENTUK  
LATEN



# 3 PADANG

## A. GAMBARAN UMUM LOKASI

### 1. Profil Sekolah: OSIS, Rohis dan Jaringannya

Jumlah satuan pendidikan setingkat SMA di kota Padang sebanyak 61 sekolah, terdiri dari 16 SMA Negeri, 2 Madrasah Aliyah (MA) Negeri, 6 MA Swasta dan 37 SMA Swasta. Untuk sekolah swasta, selain SMA swasta umum juga ada swasta yang berlatar belakang keagamaan dan mayoritas sekolah Islam seperti SMA Adabiyah, SMA Muhammadiyah, SMA Persatuan Guru Agama Islam (PGAI), SMA Islam Adzkiya dan lainnya. Sedangkan SMA non-Muslim hanya ada tiga yaitu SMA Don Bosco Salamun, SMA Katolik Xaverius, & SMA Kristen Kalam Kudus. Semua sekolah non-Muslim ini rata-rata berada di Padang Selatan dan Padang Barat. Hal ini karena di kota Padang, orang-orang *Tionghoa* dan non-Muslim banyak tinggal di wilayah Selatan dan Barat Kota Padang, yang lebih dekat dengan daerah pelabuhan sebagai pusat perniagaan.

Sampel sekolah yang dipilih adalah 6 (enam) sekolah terdiri dari 4 (empat) SMA Negeri dan 2 (dua) MA Negeri. Untuk SMA, sekolah terpilih adalah SMAN 1, SMAN 2, SMAN 9 dan SMAN 16. Pemilihan sekolah ini merepresentasikan karakter dan lokasi yang menggambarkan keragaman sekolah di Kota Padang. SMAN 1, SMAN 2 dan MAN 2 termasuk salah satu SMA unggulan yang terletak di pusat kota (wilayah perkotaan-*Urban*), sedangkan MAN 1, SMAN 9 dan SMAN 16 berlokasi di pinggiran kota mewakili daerah perdesaan-*Rural*. Sebenarnya ada satu sekolah lagi yang layak untuk dipilih sebagai sampel penelitian yaitu SMAN 10, yang

merupakan salah satu sekolah favorit di Kota Padang. Tapi kemudian tidak jadi diambil dengan alasan administratif.<sup>1</sup>

Segi latar belakang sosial ekonomi murid, siswa SMAN 1 dan SMAN 2 sebagian besar dari sosial ekonomi kelas menengah atas. Hal ini terbukti dari beberapa orang tua siswa yang masuk dalam Komite Sekolah merupakan beberapa pejabat penting seperti anggota DPRD, wakil ketua Pengadilan Negeri, Dosen Universitas Andalas, pengusaha dan lainnya. Sedangkan untuk komite SMAN 9, pernah ada kasus hukum antara Komite Sekolah di SMAN 9 dengan kepala sekolah terkait kasus korupsi dana bansos dari Kemdikbud tahun 2012-2013. Selain itu Komite Sekolah lebih banyak dilibatkan pada hal-hal yang bersifat pemenuhan kebutuhan fisik sekolah, iuran wali murid, dan lainnya.

Sebagai daerah yang berpenduduk mayoritas Muslim, hampir semua SMA di Kota Padang memiliki Masjid atau Musala. Masjid atau Musala ini digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti Salat Duha, Salat Zuhur atau Salat Jumat berjamaah. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan kajian yang dibina oleh anak-anak Rohis. Pola keberagaman siswa yang lebih mengedepankan kesalehan normatif simbolis sangat terasa dalam kehidupan siswa. Sekolah membuat aturan tentang kewajiban salat berjamaah, hafalan ayat al Qur'an, mengaji, membaca Asmaul Husna, (ceramah) kultum setelah Salat Zuhur, dan lainnya. Bahkan ada sekolah yang memiliki presensi kepada siswa untuk hadir Salat Zuhur berjamaah atau Salat Duha berjamaah. Bagi masyarakat Kota Padang, keberagaman dengan menampilkan kesalehan ritual simbolik adalah sebuah kewajiban yang perlu dikedepankan sebagai sebuah ciri masyarakat yang beragama.

Untuk latar pendidikan guru, hampir sebagian besar produk perguruan tinggi lokal seperti UNP (Universitas Negeri Padang), Unand (Universitas Andalas), UIN Imam Bonjol, UBH (Universitas Bung Hatta) dan ada sebagian lulusan luar<sup>2</sup>. Untuk SMAN 1, ada guru penghafal al-Qur'an (tahfidz) yang

---

1 Menurut informasi dari asisten peneliti, SMAN 10 dianggap sangat eksklusif dan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa dan non-Muslim. Akhirnya SMAN 10 tidak jadi diambil sebagai sampling karena tidak masuk dalam enam sekolah yang dipilih untuk lokasi penelitian.

2 Yang dimaksud lulusan luar adalah lulusan perguruan tinggi di luar kota Padang atau diluar Sumatera Barat.

bernama Ustadz Aria, alumni al-Azhar Mesir. Mereka semua bergelar S1 (Sarjana) dan ada beberapa yang sudah S2 Magister Pendidikan. Ada sebagian yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya, tapi ada juga sebagian yang tidak sesuai dengan latar pendidikan formal S1-nya, tapi yang bersangkutan dianggap memiliki kompetensi dalam bidang tersebut.

Jaringan aktor internal yang terlibat penting dan langsung dalam kegiatan pembinaan kesiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah adalah wakil kepala sekolah (wakasek) bidang kesiswaan. Sementara aktor internal lain seperti Komite Sekolah, Pengawas Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi (Disdik Prov) tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan pembinaan kesiswaan dan ekstrakurikuler terutama terkait penanganan persoalan radikalisme di sekolah. Seperti pengawas sekolah, dimana tugas dan fungsinya lebih kepada pengawasan sekolah terkait aspek manajerial dan akademik. Pengawasan manajerial lebih kepada Kepala Sekolah, sedangkan pengawasan akademik kepada para guru.<sup>3</sup>

Demikian juga dalam Permendiknas No 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah/madrasah disebutkan bahwa pengawas sekolah atau madrasah memiliki tugas dan fungsi melakukan penilaian dan pembinaan melalui supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Pengawas sekolah atau madrasah melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada jenjang pendidikan yang ada, dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan hasil prestasi belajar serta bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Ada 4 (empat) kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam melakukan supervisi akademik dan supervisi manajerial yaitu *Inspecting* (pengawasan), *Advising* (menasehati), *Monitoring* (pemantauan), *Coordinating* (mengkoordinasi) dan *Reporting* (pelaporan).

Sedangkan Dinas Pendidikan Provinsi yang baru diberikan amanah dalam pengelolaan SMA juga tidak banyak melakukan pembinaan terhadap SMA terkait persoalan radikalisme di kalangan siswa SMA karena masih dalam

---

3 Lihat pasal 5 Peraturan MenPAN dan RB No 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsi Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

masa transisi setelah sebelumnya dikelola oleh Kabupaten/Kota.<sup>4</sup> Selama setahun transisi ini, Disdikprov masih belum memiliki kebijakan khusus terkait pembinaan siswa SMA. Hal ini karena mereka masih merasa bingung akan belum jelasnya aturan teknis transisi pengelolaan SMA dari kota ke provinsi, serta masih terkendala persoalan anggaran.<sup>5</sup>

Komite sekolah sebagai sebuah forum yang melibatkan peran masyarakat dalam meningkatkan layanan pendidikan di sekolah, juga tidak banyak secara langsung bersentuhan dengan persoalan siswa di sekolah. Urusan internal siswa di sekolah lebih banyak domain guru dan kepala sekolah. Komite sekolah tidak secara langsung terlibat pengawasan di dalamnya termasuk urusan pencegahan radikalisme. Hal ini karena komite sekolah lebih banyak terlibat di luar ketimbang di dalam (proses belajar mengajar siswa).

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 44/U/2002 Tahun 2002 tentang Komite Sekolah, disebutkan bahwa Komite Sekolah bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, termasuk di dalamnya aspek transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi proses penyelenggaraan layanan pendidikan. Dengan kata lain, hubungan sekolah dan Komite Sekolah lebih sebagai mediasi untuk menjembatani kebutuhan sekolah terkait urusan keuangan & sarana prasarana. Hal ini penting karena sejak adanya BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah, sekolah dilarang melakukan pungutan kepada siswa. Sementara anggaran BOS masih belum mencukupi semua kebutuhan operasional sekolah. Disinilah fungsi dan peran Komite Sekolah, diantaranya menjembatani kebutuhan sekolah antara pihak sekolah dengan orang tua siswa.

Dalam konteks pencegahan radikalisme di kalangan siswa, maka fungsi dan peran yang utama dipegang oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan wali kelas yang secara langsung berhadapan dengan siswa. Munculnya perilaku dan sikap radikalisme, ekstrimisme dan intoleransi akan berdampak terhadap prestasi akademik siswa serta lingkungan belajar yang tidak kondusif. Fungsi guru dan wakasek kesiswaan dalam hal ini mencegah berkembangnya

---

4 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XIV/2016 atas uji materi perkara No 31/PUU-XIV/2016.

5 Berdasarkan wawancara dengan Kabid Pembinaan SMA Disdik Provinsi Sumatera Barat.

pemikiran, sikap dan tindakan ekstrimisme-radikalisme di kalangan siswa, karena akan berpengaruh terhadap situasi dan kondisi lingkungan belajar.

Sedangkan aktor eksternal adalah para alumni yang kuliah di PTN (Perguruan Tinggi Negeri) atau PTS (Perguruan Tinggi Swasta) sekitar kota Padang seperti di IAIN Imam Bonjol, Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Andalas (Unand), Universitas Bung Hatta (UBH) ataupun di luar kota Padang. Para alumni berpengaruh terhadap pembentukan pola pikir dan sikap keagamaan siswa, karena mereka lah yang selama ini intensif melakukan pembinaan kepada adik-adiknya. Selaku senior yang sudah lulus sekolah, para alumni diberikan ruang dan kesempatan pihak sekolah dalam melakukan pembinaan kepada adik-adiknya. Pihak sekolah merasa tidak ada kecurigaan dan kekhawatiran terhadap para alumni karena dianggap masih berasal dari satu sekolah yang sama, sehingga sudah ada saling kepercayaan antara sekolah dan alumni.

Secara umum, arus utama pemikiran dan kultur keagamaan masyarakat kota Padang relatif sama (homogen) yaitu bersifat *Puritanis-Revivalis*<sup>6</sup> tapi masih berkaitan dengan adat budaya lokal.<sup>7</sup> Pemikiran keagamaan yang cenderung puritan sangat dominan mewarnai masyarakat Padang dengan jargon ‘Kembali kepada al-Quran dan as Sunnah’, pola pemikiran yang *Salafy-Wahabis*<sup>8</sup>, bahkan cenderung konservatif. Hal yang sama juga terdapat pada beberapa alumni sekolah yang rata-rata mereka aktif di kegiatan LDK (Lembaga Dakwah Kampus), aktif di Tarbiyah, Gerakan Salafi dan lainnya. Sikap keberagaman model Salafi yang sangat puritan dan cenderung eksklusif inilah yang selama ini didoktrinasi kepada adik-adiknya di SMA. Namun, pihak sekolah atau kepala sekolah tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang

---

6 Istilah puritanis merujuk kepada pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl dalam bukunya. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan* (2006, Serambi Semesta) bahwa puritanis sebagai absolutisme yang tidak mengenal kompromi dan cenderung muni (*pure*) dalam memandang berbagai realitas sosial dan tidak toleran atas pluralitas yang ada. Keberagaman yang puritan berarti keberagaman yang ingin memurnikan praktik ajaran agama agar hanya bersumber dari satu sumber ajaran agama yang pokok dan yang dipraktikkan oleh para pemeluk awal Islam (generasi sahabat, salafus shaleh). Praktik keberagaman puritanis dianggap tidak toleran karena cenderung menafikan pluralitas yang ada.

7 Kaitan dengan budaya lokal karena dalam filsafat budaya orang Minang, adat dan budaya tidak bisa dipisahkan dari agama dan menjadi satu kesatuan. Filosofi orang Minang yang terkenal yaitu *adat basandi syara, syara basandi kitabullah* menegaskan eratnya relasia adat (budaya) dengan agama.

8 Istilah salafi hampir sama dengan puritanis yaitu sama sama memahami ajaran agama sebagaimana yang dipraktikkan pada zaman generasi awal Islam (kaum salaf) yaitu masa sahabat nabi, tabiin dan tabiu tabiin. Istilah wahabi merujuk kepada salah satu sosok Muhammad Bin Abdul Wahab sebagai salah satu tokoh ulama yang memiliki pemikiran salafi dengan konsep pemikiran keagamaan yang sangat tekstualis, literalis.

kurang baik atau berbahaya, karena itu sudah menjadi kecenderungan umum budaya keagamaan masyarakat kota Padang.

Selain itu juga ada beberapa ustaz dari pesantren dan perguruan tinggi agama seperti IAIN, STAI PIQ di Kota Padang yang mengisi kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah. Salah satu pesantren yang terkenal adalah Pesantren Ar Risalah. Pesantren Ar Risalah dikelola oleh Yayasan Perguruan Islam Ar Risalah, awal berdiri tahun 2003 di Kota Solok dan tahun 2005 pindah ke kota Padang.<sup>9</sup> Pesantren Ar Risalah sendiri memiliki lembaga pendidikan formal SMP dan SMA, serta mengklaim sebagai lembaga pendidikan agama terbaik di kota Padang. Karakter keberagaman pesantren Ar Risalah berpaham *Salafi Wahabi* dimana sebagian besar ustaz-ustaznya alumni dari LIPIA Jakarta, sebuah lembaga pendidikan Islam dan Bahasa Arab cabang dari Universitas Ibn Su'ud Saudi Arabia.<sup>10</sup> Secara politik, Pesantren Ar Risalah memiliki kedekatan ideologis politik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bahkan konon Walikota Padang sekarang, Mahyeldi Ansharullah termasuk salah satu pengurus Pesantren Ar Risalah.

Jaringan aktor eksternal lainnya yang berkaitan dengan pembinaan OSIS kesiswaan yaitu dari organisasi Assalam, sebuah Asosiasi Pelajar Islam yang menjadi tempat berhimpun aktifis Rohis. Assalam dibentuk oleh Lembaga Pembinaan Pelajar Muslim (LPPM) melalui musyawarah Rohis SLTP dan SLTA se-Sumatera Barat tanggal 27 Oktober 1999 di Masjid Nurul Iman Kota Padang. Assalam merupakan organisasi lokal yang menjadi tempat berhimpun aktifis Rohis. Struktur kepengurusannya terdiri dari DPD dan DPP. DPD adalah struktur kepengurusan Assalam untuk tingkat kabupaten/kota. Sedangkan DPP adalah struktur kepengurusan Assalam untuk tingkat pusat

---

9 Salah seorang ustadz dari Perguruan Islam Pesantren Ar-Risalah yang pernah diundang mengisi kajian di SMAN 1 adalah Ustadz Urwatul Wutsqa.

10 LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab) awalnya bernama LPBA (Lembaga Pengajaran Islam dan Bahasa Arab) berdiri pertama kali tahun 1980-an, yang didirikan oleh pemerintah Arab Saudi dan bagian dari cabang Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Su'ud Saudi Arabia. LIPIA dianggap bagian dari upaya pemerintah Saudi Arabia untuk mengembangkan sayap pemahaman salafi wahabi di Indonesia. Hal ini karena paham keagamaan Saudi Arabia yang lebih banyak mengacu kepada pemikiran keagamaan Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya disebut wahabi. Selain itu pembentukan LIPIA tidak lepas dari upaya Saudi untuk menyebarkan salafi wahabisme dalam rangka menangkal pengaruh revolusi Iran. Mahasiswa LIPIA berasal dari berbagai macam pesantren besar seperti Gontor, Persis, Al-Irsyad, pesantren jaringan DDII dan juga pesantren dibawah NU. Lihat Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad; Islam, Militansi dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru* (2008, Jakarta, LP3ES) hal 58-59, juga bisa dibaca penelitian tesis S2 Ahmad Sujai berjudul *Pengaruh Paham Wahabi di Indonesia: Studi atas pengaruh paham keagamaan wahabi terhadap praktek keagamaan mahasiswa Lembaga Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA)*, Program Pascasarjana UI, 2008.

yaitu se-Sumatera Barat dan berkantor di Kota Padang. Sekarang Assalam sudah terbentuk di 24 kabupaten kota se-Sumatera Barat.

Secara orientasi keagamaan, aktifis Assalam lebih dekat kepada kelompok kelompok Tarbiyah dan Salafi dengan pola dakwah menggunakan model Mentoring Liqo, dan Halaqah. Secara afiliasi politik, Assalam lebih dekat kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bahkan kegiatan-kegiatan Assalam difasilitasi oleh salah seorang seniornya dengan menggunakan tempat di lembaga bimbingan belajar Nurul Fikri. Nurul Fikri adalah lembaga bimbingan belajar yang diinisiasi oleh gerakan tarbiyah sekaligus aktifis PKS.<sup>11</sup>

Semua kegiatan OSIS dan Rohis, termasuk pembinaan yang melibatkan pihak luar harus sepengetahuan wakasek bidang kesiswaan, seperti kegiatan keagamaan yang mengundang pembicara dari luar, ataupun kegiatan pembinaan Rohis yang melibatkan alumni Rohis yang sudah kuliah. Meski demikian, selama ini memang tidak ada mekanisme baku atau aturan resmi sekolah dalam pengawasan terhadap potensi munculnya radikalisme di sekolah, melalui kegiatan keagamaan yang menghadirkan narasumber dari luar ataupun pembinaan Rohis dari para alumni. Artinya, sesuatu yang dianggap sebagai potensi radikalisme tapi oleh pihak sekolah atau masyarakat bahkan pihak pemerintah daerah dianggap bukan sebagai sesuatu hal yang membahayakan.

Dari 6 (enam) sekolah yang diteliti, tidak ada mekanisme khusus atau kebijakan khusus dari pihak sekolah dalam mengawasi kegiatan kesiswaan yang berkaitan atau mengundang pihak luar sekolah. Kepala sekolah hanya memberikan satu kebijakan umum terkait kegiatan sekolah yang tidak boleh bertentangan dengan tujuan sekolah atau merugikan citra baik sekolah. Pihak sekolah merasakan bahwa para alumni yang melakukan Mentoring atau pembinaan terhadap adik-adiknya di sekolah, adalah dalam rangka membantu sekolah melakukan pembinaan dan dianggap sebagai sumbangan dari senior (alumni) kepada juniornya (adik tingkat sekolah). Jadi, tidak perlu ada yang dicurigai atau dikhawatirkan dari materi-materi pembinaan para alumninya. Termasuk kegiatan keagamaan, Halaqah, pengajian dan lainnya.<sup>12</sup>

---

11 Untuk mengetahui lebih detail relasi antara Nurul Fikri dengan PKS, termasuk peran gerakan Tarbiyah dalam pembinaan kelompok Rohis, bisa dibaca bukunya Ali Said Damanik, 2002. *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta, Mizan.

12 Wawancara dengan Pak Maidun, Wakasek Bidang Kesiswaan SMAN 2 Padang.

## 2. Karakter Sosial Budaya Masyarakat

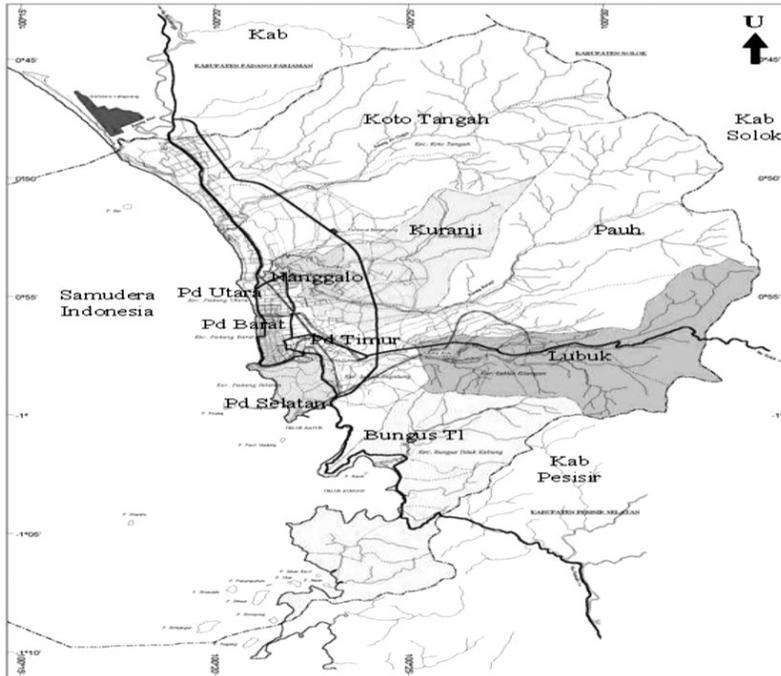
Secara geografis, Kota Padang sebagai ibukota Sumatera Barat, terletak di pinggiran laut Barat pulau Sumatera menghadap Samudera Hindia. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan, 104 kelurahan dan 19 pulau-pulau kecil yang tersebar di sepanjang pantai dengan luas wilayah mencapai 694,93 km<sup>2</sup>. Berdasarkan data statistik 2017, jumlah penduduk kota Padang sebanyak 914.968 jiwa dengan tingkat kepadatan 1.317 orang/km<sup>2</sup>. Untuk pemeluk agama, mayoritas 90% penduduk kota Padang beragama Islam, sementara sisanya Katolik, Kristen dan Hindu.<sup>13</sup> Hampir di seluruh Sumatera Barat, penduduknya beragama Islam kecuali di Kabupaten Mentawai yang sebagian besar penduduknya beragama Kristen. Sedangkan dari sisi suku, penduduk kota Padang sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau, yang pada awalnya ada di perkampungan nelayan Muara Batang Arau, lalu berkembang menjadi kawasan pelabuhan setelah masuknya konsorsium perusahaan dagang Belanda bernama VOC tahun 1669. Selain etnis Minangkabau, juga ada etnis Tionghoa, Jawa, Nias, Batak, Sunda dan lainnya. Mereka yang beragama non-Muslim rata-rata berasal dari Tionghoa, Nias, Batak, dan sebagian Jawa. Sangat sulit kita menjumpai orang asli Minang yang non-Muslim.

Di Kota Padang ada semacam segregasi sosial dalam domisili masyarakat, dimana warga non-Muslim khususnya dari etnis Tionghoa, Nias, & Batak banyak bertempat tinggal di wilayah Selatan atau yang dikenal dengan kampung Pondok. Di daerah itu ada kampung Pecinan dimana banyak tinggal warga Tionghoa bertempat tinggal dengan mata pencaharian sektor jasa dan perdagangan. Berbeda dengan orang Tionghoa di daerah lain, di kota Padang, sejak tahun 1861 orang Tionghoa memiliki perkumpulan HTT (Himpunan Tjinta Teman) dan tahun 1871 lahir HBT (Himpunan Bersatu Teguh). Kedua perkumpulan tersebut sebagai wahana orang Tionghoa untuk membaaur, berasimilasi dan akulturasi dengan penduduk asli Minang. Hal ini terlihat di kawasan Pondok, dimana banyak dijumpai orang-orang Tionghoa yang mahir berbahasa Minang dengan logat mandarin. Situasi kondisi ini membuat orang Tionghoa merasa aman dan nyaman dalam kehidupan sosialnya. Hampir tidak

---

13 Lihat data statistik Padang Dalam Angka 2017, BPS Kota Padang.

pernah ada kerusuhan atau konflik sosial bernuansa SARA di Kota Padang. Bahkan pada saat terjadi gerakan reformasi 1998, dimana banyak terjadi kerusuhan sosial anti Tionghoa, tapi situasi itu tidak terjadi di kota Padang.<sup>14</sup>



Gambar 5. Peta Kota Padang

Karakter sosial budaya masyarakat kota Padang sangat kental dengan nuansa keagamaan. Hal ini dikarenakan kuat dan eratnya relasi antara adat dan agama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Kedekatan tersebut dinyatakan dalam sebuah falsafah budaya “*Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah. Syara’ Mangato Adat Mamakai Alam takambang jadi guru*” yang artinya adat bersendi syara (Agama) dan Agama bersendikan Kitabullah yaitu al Qur’an dan Hadits. Agama mengatur, Adat yang memakai, menggunakan atau melaksanakan. Alam berkembang jadi guru, yaitu alam semesta adalah guru sebagai sumber kebajikan dan ilmu pengetahuan. Implikasinya adalah agama sebagai simbol identitas dan praktik ritual menjadi sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan dan perilaku sosial masyarakat

14 Bisa dibaca Disertasi S3 Erniwati, 2012. *Cina Padang dalam Dinamika Masyarakat Minangkabau; Dari Revolusi sampai Reformasi*. Dosen Ilmu Budaya UNP yang dikenal sebagai ahli tentang cina di Kota Padang.

kota Padang, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Hampir semua kantor pemerintahan, sekolah, lembaga pendidikan, & pusat perdagangan selalu ada musala atau masjid untuk shalat dan ramai dengan kegiatan shalat jamaah khususnya pada saat Zuhur dan Asar.

Kedekatan relasi adat dan agama bagi masyarakat Minangkabau bukanlah sesuatu yang *taken for granted*, tapi melalui proses perjuangan yaitu ketika terjadi peperangan antara kaum Padri dan kaum Adat pada masa kolonial Belanda, yang kemudian muncul kesadaran bersama sehingga bersatulah kaum adat dan kaum Padri dalam melawan penjajahan Belanda. Bagi orang Minang, falsafah Adat *Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah* merupakan harga mati yang harus dipertahankan mati-matian. Karena bagi mereka, adat tidak hanya sekedar sebuah tradisi atau kebiasaan, tapi juga sistem nilai, norma, dan budaya yang diyakini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Sementara Syara' diyakini sebagai pedoman hidup yang berasal dari ajaran agama Islam dan bersumber dari kitab suci. Oleh sebab itulah Agama dan Syara' dianggap tidak boleh bertentangan dengan sumber ajaran kitab suci yaitu al-Qur'an dan Hadis. Inilah yang bisa menjelaskan sikap dan pola keberagamaan masyarakat Minang yang sangat kental bernuansa keagamaan bercorak sangat puritanis, karena semangat dari falsafah budaya Minang di atas sangat mendorong kepada watak pemurnian pelaksanaan ajaran agama dan adat budaya yang mengacu kepada kitab sucinya.

Masyarakat Minang kota Padang juga menganut sistem Matrilineal yaitu garis keturunan bersumber dari ibu, dan laki laki tidak mendapatkan warisan harta pusaka. Sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minang sangat menarik di satu sisi, sedangkan disisi lain masyarakat Minang sangat kuat memegang tradisi ajaran agama Islam yang cenderung Patrilineal. Selain soal warisan dan garis keturunan, dalam sistem Matrilineal, peran kaum ibu juga sangat besar dalam setiap pengambilan keputusan penting di keluarganya. Sistem Matrilineal juga berkorelasi dengan tradisi budaya merantau masyarakat Minang. Karena tradisi merantau juga berawal dari sistem Matrilineal dimana

laki-laki yang tidak dapat warisan, harus pergi merantau untuk menambah pengalaman hidupnya, mencari kekayaan, kemasyhuran dan aktualisasi diri.<sup>15</sup>

Secara sosial politik, meskipun masyarakat kota Padang dikenal sangat kuat keberagamaannya, tapi partai-partai politik berbasis keagamaan seperti PBB, PPP, PKS tidak pernah menang mutlak dalam setiap pemilu. Suara partai-partai Islam hampir sama dan merata dengan suara partai “sekuler” seperti Hanura, Golkar dan Gerindra. Hal ini memperlihatkan bahwa pandangan keagamaan tidak selalu berkorelasi dengan orientasi pilihan politik.

Ormas keagamaan masyarakat kota Padang yang paling besar adalah Muhammadiyah, sebuah organisasi keagamaan modern yang memiliki semangat puritanisme dan pembaharuan keagamaan dengan semangat kembali kepada sumber ajaran Islam al-Quran dan Hadis. Beberapa tokoh Muhammadiyah pada level nasional berasal dari Sumatera Barat seperti Buya Hamka, Buya Sutan Mansur, Ayzumardi Azra, M. Natsir, Yunahar Ilyas dan lainnya. Sedangkan untuk ormas Islam yang tradisional ada Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Perti ini merupakan ormas Islam tradisional yang terbesar di Sumatera Barat, dan kantor pusatnya di Kota Padang. Adapun NU tidak terlalu banyak berkembang di kota Padang. Hal ini karena budaya keberagaman NU yang cenderung feodalis tidak cocok dengan kultur masyarakat Minang yang sangat egalitarian.

## **B. TEMUAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Ekstrakurikuler: Dominasi Budaya Mayoritas di Tengah Minoritas Tertindas**

Kegiatan ekstrakurikuler sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran sekolah bertujuan untuk mendukung tercapainya salah satu tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan demokratis. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan pembinaan kesiswaan (Permendiknas No. 39 Tahun 2008) dan penanaman budi pekerti

---

15 Lihat Kato, Tsuyoshi. 2005. *Adat Minangkabau dan Merantau*. Jakarta, Balai Pustaka. Hal. 37-40 dan 113.

(Permendiknas No. 23 Tahun 2015), dan Permendikbud No. 81 A tentang Implementasi Kurikulum, yang di dalamnya terdapat muatan kegiatan ekstrakurikuler, yang kemudian dipisah dan dimandirikan aturannya dengan adanya Permendikbud No. 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler.

Kegiatan ekstrakurikuler yang tercantum dalam Permendikbud No. 81 A diantaranya terkait pedoman penyusunan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), pedoman pengembangan muatan lokal, pedoman ekstrakurikuler, pedoman umum pembelajaran, dan pedoman evaluasi kurikulum. Pada pengembangan muatan lokal ditentukan salah satu jenis pertimbangannya adalah budaya lokal, yang berisikan tentang pandangan yang mendasar (falsafah budaya daerah), nilai-nilai sosial, artefak material yang dianggap luhur dan bersifat lokal. Sedangkan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler lebih pada pengembangan minat bakat potensi siswa (musik, seni, bela diri, jurnalistik, teater, pecinta alam dan lainnya), krida (Pramuka, LDKS, Paskibra, PMR), karya ilmiah, dan lainnya.

Pada konteks kota Padang, sebelum adanya beberapa Permendikbud tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan yang secara tidak langsung berkaitan dengan kegiatan pembinaan kesiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler. Kebijakan tersebut telah ada jauh sebelum munculnya ketiga Permendikbud di atas. Ada Perda Kota Padang No. 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Perda ini menjadi wajib bahkan menjadi syarat untuk anak-anak yang akan melanjutkan jenjang pendidikan menengah dan atas, bahkan konon menjadi syarat juga untuk menikah di KUA. Bagi orang Minang, anak-anak muslim di kota Padang wajib bisa membaca al-Qur'an karena identitas budaya Minang identik dengan budaya Islam. Keberadaan regulasi baca tulis Al-Quran merupakan salah satu implementasi dari jargon falsafah budaya Minang yaitu Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah, dimana agama dan adat sudah menyatu erat dan memengaruhi kebijakan negara. Baca tulis al-Qur'an bertujuan agar anak didik sejak dini sudah memiliki kemampuan membaca dan menulis al-Qur'an sebagai sebuah Kitabullah, sumber ajaran agama Islam.

Selain itu juga ada Peraturan Walikota Padang No 451.442/Binsos-iii/2005 tanggal 7 Maret tahun 2005 tentang Pelaksanaan Wirid Remaja, Didikan Subuh dan Anti Togel/Narkoba serta pakaian Muslimah bagi siswi SD/MI, SMP/MTs, SMA, SMK/ MA. Wirid Remaja di peruntukkan untuk siswa-siswi SMP dan SMA tiap Jumat malam sehabis shalat Magrib sampai Isya. Wirid remaja dilakukan di masjid di sekitar tempat tinggal siswa. Kegiatannya adalah mengaji dan belajar agama kepada ustaz yang ada di masjid atau musala tersebut. Untuk membuktikan bahwa para siswa mengikuti kegiatan Wirid remaja, ada semacam laporan atau rapor yang harus diserahkan siswa kepada pihak sekolah. Pihak masjid atau musala yang menyelenggarakan kegiatan Wirid remaja ini mendapatkan honor dari pemerintah kota Padang.

Sedangkan kegiatan Didikan Subuh berupa kegiatan mengaji al-Qur'an, hafalan surat-surat dan ayat pendek, hafalan doa harian, praktek ibadah, belajar pidato (*muhadlarah*) bagi seluruh santri TPA dan Diniyah se-kota Padang. Biasanya dilaksanakan sebulan sekali sehabis salat Subuh sampai siang sekitar jam 8 pagi secara bergiliran yang diikuti oleh beberapa santri TPA/TPQ dari perwakilan tiap masjid dalam satu kecamatan. Sedangkan busana Muslimah yaitu busana jilbab menjadi wajib bagi semua siswi Muslim tapi "Tidak Wajib" bagi siswa non-Muslim. Jilbab dalam pandangan budaya Minang merupakan simbol identitas seorang Muslim.

Untuk kegiatan penanaman budi pekerti, implementasi di tingkat lokal dan sekolah juga sangat identik dengan penanaman nilai budi pekerti yang bercorak ke-Islam-an, seperti pembiasaan kegiatan baca al-Qur'an sebelum kegiatan belajar mengajar, kegiatan Salat Duha, Salat Zuhur berjamaah, kultum setelah Salat Zuhur, baca Asmaul Husna, dan lainnya. Selain baca tulis al-Qur'an, sejak 2013 juga terdapat Peraturan Walikota No. 33 Tahun 2013 tentang Pendidikan Hafalan Al-Qur'an. Para siswa sejak SD hingga SMA didorong tidak hanya mampu membaca, menulis al-Qura'an tapi juga menghafal al-Qur'an. Pemerintah juga memberikan *reward* bagi siswa-siswa yang mampu menghafal al-Qur'an lebih banyak. Siswa SD/MI yang mampu menghafal al Qur'an satu Juz misalnya, mendapat kemudahan bebas memilih SMP yang mau dimasuki, siswa SMP /MTs yang hafal 2-3 Juz misalnya,

mendapatkan beasiswa dan kemudahan memilih SMA yang akan dimasuki. Demikian juga siswa SMA/MA yang hafal 5 Juz misalnya bebas memilih PTN atau PTS di Kota Padang yang akan dimasukinya.

*“Hafalan al-Qur’an di SMAN 1 ini wajib bahkan menjadi program unggulan sekolah. Siswa yang sudah kelas 2 diharapkan bisa hafal 2-8 juz. Di kota Padang, hafalan sudah dijadikan salah satu materi dalam Olimpiade yang ikut dilombakan. Bagi kami, siswa yang hafal al-Qur’an ada pengaruhnya terhadap budi pekerti dan moral siswa. Rata rata siswa yang hafal al-Qur’an beberapa juz, prestasi akademiknya sangat bagus dan akhlak moralnya baik.”<sup>16</sup>*

Kebijakan pendidikan al-Qur’an tidak hanya dilakukan di tingkat sekolah, tapi juga melibatkan *stakeholder* terkait yaitu Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag, pihak Lurah, unit kerja terkait dan lainnya. Mereka yang mengikuti program hafalan al-Qur’an akan mendapatkan sertifikasi hafalan Qur’an dari dinas pendidikan. Tenaga pendidik dan pengajar program Tahfidz adalah guru guru PAI atau tenaga kependidikan yang khusus diangkat untuk program ini. Pendidikan Tahfidz al-Qur’an merupakan bagian dari muatan lokal (mulok) kota Padang.

Beberapa kebijakan pemerintah daerah di atas sebagai bentuk implementasi dari kebijakan pemerintah pusat dalam kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan kesiswaan dan penanaman budi pekerti yang lebih dominan berwarna ke-Islam-an, dianggap sangat diskriminatif dan tidak toleran terhadap siswa-siswi yang non-Muslim. Contoh tentang penggunaan busana jilbab bagi seluruh siswi sekolah, meskipun awalnya tidak berlaku semua atau tidak wajib bagi siswa non-Muslim, akan tetapi pada prakteknya terjadi “pemaksaan” secara tidak langsung terhadap siswi non-Muslim.<sup>17</sup> Hampir semua guru dan kepala sekolah di SMAN 1, SMAN 2, SMAN 9 dan SMAN 16 yang ditanyakan soal penggunaan jilbab, menjawab jilbab tidak wajib bagi siswi non-Muslim.<sup>18</sup>

---

16 Wawancara dengan Ustadz Aria, alumni al-Azhar Mesir, guru PAI sekaligus pembimbing Tahfidz di SMAN 1, 5/10/2017.

17 Beberapa siswi non muslim yang diwawancarai menggunakan jilbab, mereka mengaku tidak ada paksaan dalam berjilbab tapi mereka juga mengakui ada perasaan tidak nyaman kalau tidak menggunakan jilbab karena identitasnya akan lebih nampak berbeda dibandingkan dengan mayoritas siswi muslim yang semuanya berjilbab.

18 Seorang informan waka kesiswaan SMAN 2 menggunakan istilah tidak wajib tapi menyesuaikan terkait penggunaan jilbab bagi siswi non muslim.

Akan tetapi dalam praktek keseharian, mereka para siswi non muslim tetap terpaksa atau dipaksa oleh situasi kondisi secara tidak langsung untuk menggunakan jilbab.

Hal ini karena siswi non-Muslim yang ada di sekolah-sekolah negeri jumlahnya sangat sedikit. Seperti jumlah siswi di SMAN 1 yang kurang dari sepuluh orang siswi non-Muslimnya, dan 14 orang untuk siswa non-Muslim di SMAN 2. Mereka “terpaksa” menggunakan jilbab karena merasa ada beban psikologis jika tidak menggunakan jilbab, seolah ada jarak psikologis dan akan mudah diidentifikasi sebagai kelompok yang berbeda di tengah mayoritas muslim. Seorang informan siswi non-Muslim di SMAN 1 mengakui bahwa mereka menyesuaikan pakaian jilbab karena mengikuti situasi dan biar tidak kelihatan berbeda dengan yang lainnya.<sup>19</sup> Ada tiga alasan mengapa siswi non-Muslim tetap mau menggunakan jilbab; *Pertama*, biar tidak merasa berbeda dan dibedakan dengan yang lain. *Kedua*, alasan praktis-pragmatis karena menggunakan jilbab lebih simpel dan tidak perlu menggunakan *make up* karena bagian kepala sudah tertutupi jilbab. *Ketiga*; mereka memandang pakaian jilbab bukan sebagai pakaian ideologis, tapi sebagai pakaian biasa yang tidak berkaitan dengan urusan keimanan.<sup>20</sup>

Kalangan pihak non-Muslim sebenarnya sudah mengkritik, memprotes dan tidak setuju dengan beberapa kebijakan Pemda bidang pendidikan yang dianggap sangat Islamis ini, mereka merasa kebijakan tersebut sangat menindas dan mendiskriminasi kelompok minoritas di kota Padang. Kebijakan soal penggunaan jilbab yang berlaku di sekolah negeri dianggap sangat bertentangan dengan kondisi kemajemukan masyarakat. Pihak Katolik berharap agar sekolah-sekolah negeri harus bercorak umum tidak mengarah kepada kelompok tertentu. Mereka merasakan bahwa meskipun kebijakan itu hanya berlaku untuk siswi Muslim, akan tetapi banyak siswi-siswi Katolik yang juga menggunakan jilbab ketika sekolah. Permasalahannya adalah

---

19 Wawancara dengan informan siswi non muslim SMAN 1 Kota Padang. Rata rata siswi non muslim di SMAN 1 Padang berasal dari luar kota Padang, yaitu dari Mentawai, sebuah daerah kabupaten kepulauan di Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya Kristen dan Katolik. Mereka para siswa ini diutus sebagai perwakilan dengan beasiswa dari Pemkab Mentawai.

20 Wawancara dengan Yasrul Huda, seorang Dosen UIN Imam Bonjol yang penelitian S3 nya tentang Perda-Perda bernuansa Syariat islam terkait baca tulis al-Qur'an, busana jilbab.

karena pendidikan merupakan bagian dari otonomi daerah, jadi daerah merasa kebijakan itu tidak melanggar aturan dan karena kota Padang kental dengan budaya keagamaan, maka kebijakan itu dianggap biasa dan tidak bermasalah.

*“ Kami tidak bisa lagi mengadvokasi ini. Kalau sudah masuk dalam masalah otonomi daerah dan itu bagian dari implementasi budaya adat Minang yang dekat dengan Islam, kalau sudah masuk wilayah itu (falsafah budaya Minang) kami tidak bisa berbuat apa apa. Kondisi ini sudah berlangsung lama. Akibat pemberlakuan ini kita sering melihat pada hari Jumat ada siswi Katolik berjilbab yang mengikuti kegiatan gereja.<sup>21</sup>”*

Demikian juga dengan kebijakan penanaman budi pekerti berupa pembiasaan hal-hal positif yang bernuansakan budaya agama mayoritas, dianggap sangat mendiskriminasi dan tidak toleran terhadap mereka yang minoritas. Menurut kalangan non-Muslim, kebiasaan positif dalam rangka penanaman budi pekerti harusnya bersifat umum dan tidak mencerminkan dominasi satu golongan. Hal ini karena pembiasaan positif tersebut lebih dominan satu warna dan tidak mencerminkan beragam warna meskipun mereka minoritas. Seperti kebijakan pesantren kilat tiap bulan Ramadhan yang menjadi wajib bagi siswa Muslim, sementara siswa non-Muslim disuruh mengikuti kegiatan keagamaan di pastoral atau gereja masing masing. Padahal program kegiatan gereja belum tentu sama dengan masjid atau pondok pesantren.

Beberapa kebijakan Pemkot Padang bidang pendidikan yang sangat kental dengan nuansa keagamaan dianggap masih belum sesuai dengan kebijakan pemerintah di tingkat pusat. Ketiga aturan kebijakan pemerintah pusat terkait kegiatan ekstrakurikuler dan penanaman budi pekerti sebagai turunan dari UU No 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya sekedar mendidik siswa menjadi beriman dan bertakwa, tapi juga berjiwa demokratis. Nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan siswa di sekolah akan terbentuk jika kebijakan yang ada juga sangat demokratis, & tidak cenderung menguntungkan satu kelompok tertentu. Siswa harus dibentuk dalam kultur, karakter dan tradisi yang memberikan peluang dan kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan

---

21 Wawancara dengan Bapak Cahyo, Keuskupan Katetik Katolik Kota Padang 16/10/2017..

dirinya. Dengan aturan-aturan yang sangat demokratis, siswa diajarkan untuk lebih hormat, dan saling menghargai terhadap keyakinan pihak lain. Aturan kebijakan lokal yang ada selama ini cenderung bersifat eksklusif hanya bagi kelompok Muslim tapi mengabaikan mereka yang non-Muslim.

Kebijakan penggunaan busana jilbab salah satu contohnya. Meskipun dikatakan tidak berlaku untuk siswi non-Muslim, tapi pihak sekolah tidak pernah melarang bahkan cenderung membiarkan dan malah menyuruh mereka untuk berjilbab kepada siswi non-Muslim. Padahal seharusnya pihak sekolah melarang dan tidak memperbolehkan siswi non-Muslim menggunakan jilbab, karna busana Jilbab adalah pakaian ideologis, bukan sekedar simbolis aksesoris. Pihak sekolah seharusnya menghargai pakaian siswi non-jilbab juga sebagai seragam resmi di sekolah. Dengan membiarkan kelompok minoritas untuk tetap memperkenalkan identitas primordialnya (non-jilbab), maka disitulah keberagaman yang beragam akan terwujud dengan semangat demokratis.

Di kalangan para guru, kepala sekolah dan pimpinan dinas pendidikan, mereka mengaku tidak ada pemaksaan dalam penggunaan busana jilbab, tapi mereka juga mengakui bahwa ada penyesuaian dari siswi—tepatnya pemaksaan terselubung, secara tidak langsung kepada siswi non-Muslim—untuk menggunakan busana jilbab dengan alasan agar tidak ada perbedaan atau diperlakukan berbeda. Mereka beralasan bahwa kebijakan ini juga tidak berlaku di sekolah-sekolah non-Muslim seperti sekolah Don Bosco dan Prayoga. Padahal mereka mengakui bahwa 60% siswa-siswi Don Bosco adalah Muslim. Seorang informan yang pernah menjadi guru di SMA Don Bosco Kota Padang menyatakan:

*“ Kalau persoalan toleransi mau diperlakukan sama, maka seharusnya sekolah sekolah non-Muslim juga memperbolehkan siswi Muslim untuk mengenakan jilbab, akan tetap kenyataannya tidak demikian.”<sup>22</sup>*

Dari pihak pengelola sekolah non-Muslim sendiri mengakui bahwa di sekolah mereka tidak ada siswi menggunakan busana jilbab. Alasannya karena ini adalah sekolah swasta yang mempunyai ciri keagamaan (Kristen—

---

22 Seperti disampaikan Reno Fernandes, mantan guru Sosiologi di SMA Don Bosco pada FGD di Padang 28/11/2017..

Katolik). Hal ini sebenarnya, secara tidak langsung, mereka juga mengakui bahwa busana jilbab adalah busana ideologis yang hanya khas dimiliki oleh kelompok tertentu. Sejak awal, orang tua yang mendaftarkan anaknya ke Don Bosco sudah faham dan mengetahui bahwa di Don Bosco juga tidak ada guru pendidikan agama Islam, dan tidak boleh menggunakan busana jilbab. Kedua hal ini sangat berkaitan dengan identitas Don Bosco sebagai sekolah bercirikan keagamaan.

Itulah kondisi toleransi di kota Padang terkait kebijakan penggunaan busana Muslimah. Semua pihak saling mengaitkan dan melihat pihak lain dalam bertoleransi. Sekolah negeri seharusnya menjadikan ruang bersama dan memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh siswa dari seluruh kelompok siswa. Tidak boleh ada kebijakan yang mendiskriminasi kelompok lain yang berbeda keyakinan. Pihak sekolah dan pemerintah daerah juga perlu memberikan ruang kebebasan siswa beda agama untuk mengekspresikan kebebasan keyakinannya (tidak menggunakan jilbab) dan memenuhi hak siswa non-Muslim dengan menyediakan guru-guru agama sesuai amanah UU Sisdiknas. Demikian juga sebaliknya, pihak pengelola sekolah non-Muslim juga perlu memberikan kebebasan kepada siswa Muslim untuk menggunakan busana jilbab dan mendapatkan guru pendidikan agama Islam.

## **2. OSIS di Simpang Jalan: Ketimpangan Gender, Pencarian Jati diri dan Radikalisme Setengah Hati**

Dalam permendiknas No 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, disebutkan bahwa Organisasi Siswa Intra Sekolah alias OSIS merupakan satu-satunya organisasi intra sekolah. OSIS dalam satu sekolah tidak terkait atau terafiliasi dengan OSIS di sekolah lain. Kebijakan menjadikan OSIS sebagai satu-satunya organisasi intra sekolah, seolah merupakan kelanjutan dari kebijakan rezim orde baru dengan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) dari kehidupan politis, dimana siswa dan mahasiswa tidak diperbolehkan aktif dalam kegiatan-kegiatan politik di kampus.

Meski demikian, dalam praktiknya OSIS dan Rohis, sebuah lembaga kerohanian Islam yang ada di SMA kota Padang ternyata memiliki asosiasi

dan afiliasi tersendiri. OSIS memiliki asosiasi dan keterkaitan dengan OSIS di sekolah lain dalam bentuk FON (Forum OSIS Nusantara), sebuah asosiasi OSIS tingkat nasional. Sedangkan Rohis juga memiliki asosiasi kelembagaan bernama Assalam, yang berpusat di kota Padang. Kedua lembaga asosiasi OSIS dan Rohis ini memiliki afiliasi politik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Karena selama ini, aktifis PKS yang sebagian besar aktifis Gerakan Tarbiyah yang banyak menggarap anak-anak Rohis.<sup>23</sup> Para aktifis Tarbiyah yang melakukan pembinaan terhadap Rohis dilakukan secara berkelanjutan. Biasanya alumni Rohis yang sudah lulus sekolah tetap menjalin hubungan dan komunikasi dengan para juniornya, melakukan mentoring dalam bentuk kajian keagamaan, bimbingan belajar, *try out*, seminar, pelatihan kepemimpinan, motivasi, pengajian dan lainnya.

Menurut seorang informan aktifis Rohis SMAN 1, dalam kegiatan ROHIS, setiap siswa yang aktif dalam kegiatan Rohis ada pembinaan dan *baiat*, yaitu semacam sumpah janji setia dan komitmen dalam kegiatan dakwah Islam tanggung jawab sebagai pribadi Muslim. Isi baiat itu berupa komitmen bagi kader Rohis untuk tetap setia kepada nilai-nilai Islam, berperilaku sesuai ajaran Islam dan aktif memperjuangkan dan mendakwahkan ajaran Islam. Kegiatan pelatihan Rohis berupa LAMDAS (Latihan Manajemen dan Dakwah Sekolah) dilakukan di luar sekolah, dengan para pemateri training dari para senior dan alumni Rohis yang sudah kuliah. Beberapa materi dalam kegiatan Rohis seperti bagaimana pergaulan seorang Muslim, sikap Muslim terhadap non-Muslim, dan sikap Muslim terhadap pemerintah. Terkait hubungan dengan non-Muslim, mereka mengakui bahwa selama itu tidak terkait masalah Aqidah, maka masih diperbolehkan. Sebaliknya jika sudah berurusan dengan persoalan aqidah, mereka akan membatasinya.<sup>24</sup>

---

23 Seorang mantan Rohis MAN 1 yang sekarang sudah kuliah di Unand dan aktif di LDK, mengaku dulunay pernah aktif di Assalam dan sampai sekarang masih melakukan pembinaan kepada adik adiknya yang di SMA. Di Kota Padang kegiatan Assalam difasilitasi oleh salah seorang pengurusnya menggunakan fasilitas gedung Nurul Fikri, sebuah lembaga bimbingan belajar yang dikelola oleh kawan kawan PKS.

24 Wawancara dengan Cholillur Rahman mantan ketua ROHIS SMAN 1, 5/10/2017..

Rohis sebagai forum untuk pengembangan minat-bakat keagamaan, memiliki beberapa bagian, diantaranya ada BRM (Bina Remaja Muslim)<sup>25</sup> untuk para siswa, & untuk siswi mereka memiliki Forum An-Nisa' yaitu sebuah forum khusus bagi siswi Muslimah. Materi utama kegiatan ini adalah kajian-kajian seputar kewanitaan dalam perspektif Islam. Narasumber mentoring kajian biasanya dilakukan oleh para alumni atau senior Rohis yang sudah kuliah.

Keterkaitan Assalam sebagai forum bersama aktifis Rohis di Padang dan OSIS dengan FON tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menjadikan OSIS sebagai lembaga internal sekolah dan tidak memiliki hubungan dengan OSIS sekolah lain atau asosiasi dengan organisasi lain di luar sekolah. OSIS dan Rohis yang semula bersifat internal sekolah, & apolitis, pada realitasnya sangat berbeda. FON (Forum OSIS Nusantara) dan Rohis yang sangat kental dengan nuansa gerakan Tarbiyah, memiliki afiliasi secara kultural dengan partai politik tertentu yaitu PKS. Relasi antara Rohis dengan PKS karena para mentor Rohis berasal dari gerakan tarbiyah kampus dalam bentuk LDK (Lembaga Dakwah Kampus). Kelompok Tarbiyah dan LDK ini merupakan embrio kelompok yang membentuk Parati Keadilan (sebelum menjadi PKS). Kelompok tarbiyah dan LDK melalui jaringan Rohis sekarang ini merupakan pemain tunggal dalam melakukan rekrutmen dan pembinaan siswa di sekolah. Siswa tidak memiliki pilihan lain atau kompetitor sebagai pembanding dari Rohis semisal organisasi pelajar ekstra sekolah seperti PII (Pelajar Islam Indonesia), IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah), dan atau IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama').

Salah seorang tokoh pendiri sekaligus ketua umum Assalam pertama, Mahdifan Shafwan, merupakan *public figure* bagi para aktifis Assalam. Dia adalah seorang dosen Matematika Universitas Andalas, lulusan S3 dari Nottingham University. Kegiatan-kegiatan Assalam lebih banyak mengarah kepada gaya hidup Muslim muda terpelajar yang serba gaul, modern, terbuka, rasional, *melek* teknologi, & orientasi masa depan dan lainnya. Istilah atau

---

25 Di beberapa sekolah, istilah Rohis digantikan dengan sebutan BRM (Bina Remaja Muslim). Hal ini tidak lepas karena adanya stereotype negatif terhadap ROHIS yang dianggap identik dengan radikalisme seperti hasil penelitian beberapa lembaga riset dari Jakarta tentang Rohis.

bahasa yang digunakan dalam acara-acara Assalam menggunakan bahasa gaul anak muda zaman sekarang, seperti TREN (Training Pelajar Keren), Seminar dan Talk Show Pelajar Zaman Now, Pelajar anti-*hoax*, dan lainnya. Dari sisi materi-materi pembinaan dakwah, Assalam—dengan jargonnya inspirasi pelajar Indonesia—lebih berorientasi kepada pembentukan pribadi muslim (*syakhsiyah Islamiyah*) atau kesalehan individu, sebuah model dakwah khas gerakan Tarbiyah yang tidak bersentuhan dengan masalah-masalah *Ushuluddin*, *fiqhiyah*, aliran madzhab, relasi Muslim-non-Muslim, isu isu politik keagamaan dan lainnya.<sup>26</sup>

Meski demikian, bukan berarti anak-anak Rohis yang tergabung dengan Assalam tidak tertarik dengan isu-isu terkait persoalan umat Islam Internasional seperti kasus Rohingya, isu Palestina-Israel, kasus Suriah dan lainnya. Pada kasus Suriah, para aktifis Assalam melakukan aksi solidaritas peduli Syam dan aksi penggalangan dana sebagai solidaritas umat Muslim kepada kaum muslimin di Suriah. Assalam melakukan pengumpulan dana kepada seluruh siswa-siswa lewat jaringan Rohis dan menyalurkannya melalui sebuah lembaga Forum Peduli Indonesia—Syam (FPIS) yang berpusat di Jakarta.<sup>27</sup>

FPIS merupakan sebuah asosiasi LSM dan ormas yang memiliki kepedulian dengan menyalurkan bantuan untuk mengatasi krisis yang terjadi di Syam (Palestina, Suriah, Lebanon, dan Jordania).<sup>28</sup> Fenomena Assalam sebagai wadah berhimpun anak-anak Rohis di kota Padang merupakan sebuah wadah untuk melakukan apa yang disebut *counter culture* terhadap

---

26 Assalam memiliki portal informasi assalamsumbar.com yang menginformasikan kegiatan kegiatan Assalam se Sumatera Barat.

27 Wawancara dengan Dewi, alumni ROHIS dari MAN 1 Padang yang sudah lulus dan kulilah di Unand tapi masih aktif melakukan mentoring dan pembinaan kepada adik adiknya yang aktif di ROHIS MAN 1. 13/10/2017.

28 Beberapa tokoh pengurus dalam FIPS selama ini dikenal sebagai tokoh yang memiliki pemikiran *puritanis*, berpaham *salafi-wahabi*, seperti Fahmi Salim, seorang ulama muda alumni al-Azhar Mesir yang aktif di MIUMI (Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia), sekaligus aktif di MUI. Selain itu juga ada Ustaz Bahtiar Nasir (UBN) yang dianggap pro dengan gagasan khilafah dan salah seorang tokoh PP Muhammadiyah. Selain itu juga ada Achmad Miqdan, salah seorang anggota Tim Pengacara Muslim (TPM) pembela Abu Bakar Ba'asyir. FIPS sendiri saat mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Suriah lewat Turki sempat terjadi salah paham antara pemerintah Turki dengan FPIS karena dianggap FPIS pro kepada ISIS (*Islamic State Iraq-Suriah*) yang dianggap sebagai organisasi teroris. Tokoh lainnya dalam FPIS adalah Ustaz Abu Harits, yang juga aktif di HASI (*Hilal Ahmar Society* Indonesia) atau Masyarakat Bulan Sabit Indonesia, sebuah organisasi *nir-laba* yang bergerak di bidang kemanusiaan, mirip dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Hanya yang membedakan HASI dengan PMI, HASI lebih didedikasikan untuk isu isu kemanusiaan yang menimpa umat Islam nasional dan internasional.

perilaku kehidupan pelajar yang dianggap sudah sangat *hedonis*, konsumtif, dan kegiatan lain yang serba hura-hura. Salah satu contohnya adalah Gerakan mengaji 30 juz pada malam tahun baru 2017 di depan Masjid Sumatera Barat. Gerakan mengaji ini dimulai sejak siang hari berakhir sampai malam tahun baru.



Gambar 6. Gerakan Mengaji 30 Juz Malam Tahun Baru 2017 Di depan Masjid Raya Sumatera Barat

Isu lain yang berkaitan dengan OSIS adalah masalah gender dan intervensi pihak sekolah tampaknya juga masih menjadi persoalan. Pada salah satu sekolah yang diteliti, di MAN 2 misalnya, ketua OSIM (Organisasi Siswa Intra Madrasah) tidak boleh dari perempuan. Jika terjadi pemilihan (*voting*) terbuka atau pemilihan langsung dengan suara terbanyak dari perempuan, maka pihak sekolah mencoba mengkompromikan agar siswa laki-laki yang tetap jadi ketua OSIM.<sup>29</sup>

Pandangan relasi gender dalam persoalan kepemimpinan dalam OSIS/OSIM tampaknya hanya kasuistik di satu sekolah tapi tidak berlaku untuk beberapa sekolah lain. Dari enam sekolah yang diteliti, sebagian besar menyatakan tidak ada masalah kepemimpinan OSIS/OSIM dipegang oleh perempuan. Bahkan di SMAN 2, MAN 1 ketua OSIS/OSIM dijabat oleh perempuan. Mereka tidak mempersoalkan faktor gender dalam kepemimpinan di OSIS/OSIM dan membebaskan para siswa untuk menentukan siapa yang layak jadi ketua OSIS/OSIM tanpa harus mempertimbangkan faktor gender.

29 Wawancara dengan bapak Al Anshari wakasek MAN 2 Kota Padang, 03102017.

Kebijakan pemerintah yang tampak diskriminatis dan cenderung dianggap intoleran terhadap kelompok minoritas, ternyata tidak selalu berdampak terhadap perilaku interaksi siswa di sekolah. Relasi siswa non-Muslim dengan siswa Muslim dalam keseharian relatif tidak berjarak. Kepala sekolah SMAN 16 mengatakan bahwa;”

*“....Siswa non-Muslim di sini bahkan ikut serta menjadi pengiring musik terhadap acara-acara keagamaan yang dilaksanakan oleh Rohis. Mereka pernah bilang ke saya pak boleh tidak saya ikut menjadi pengiring musik untuk acara temen-temen Rohis? Saya jawab silahkan saja”<sup>30</sup>*

Seorang siswi non-Muslim mengaku kalau disuruh memilih antara memakai jilbab atau membuka jilbab, mereka lebih suka tidak memakai jilbab. Mereka sendiri mengakui ada perasaan berat/*stress* ketika harus menggunakan jilbab di sekolah, karena tidak tahu bagaimana cara menggunakannya.

Kami pada awalnya bingung tidak tahu bagaimana cara menggunakan jilbab. Dan setiap kali memakai jilbab kami mengalami perasaan berat stress karena ini tidak sesuai dengan keyakinan kami. Nanti orang melihat kok ada orang Kristen ke sekolah memakai jilbab? Tapi lama kelamaan akhirnya jadi biasa juga.<sup>31</sup>

Meski demikian, di kalangan siswa-siswi non-Muslim mereka tampaknya masih ada sikap tidak setuju atau memandang negatif terhadap beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan politik dan keagamaan. Beberapa siswi non-Muslim mengaku kalau mendengar beberapa terminologi tentang Piagam Jakarta, Khilafah, Negara Islam, *tone-*nya sangat tidak setuju atau negatif. Hal ini karena istilah-istilah tersebut memberikan makna yang dianggap sangat diskriminatif dan merugikan keyakinan kelompoknya.<sup>32</sup>

### **3. Mereka yang Rentan Di Tengah yang Bertahan**

Isu radikalisme dalam konteks kehidupan siswa di enam sekolah yang diteliti, tidak ditemukan dalam artian potensi yang mengarah kepada radikalisme. Hal ini karena karakter keberagamaan siswa SMA di masyarakat kota Padang sangat kritis terhadap isu-isu yang berkembang. Di sisi lain kultur

---

30 Seperti disampaikan pak Amrman (mewakili) dari SMAN 16 dalam FGD 18/11/2017 di Padang.

31 Seperti disampaikan seorang siswi dari SMAN 2 Padang peserta FGD 28/11/2017.

32 Seperti disampaikan beberapa siswi non muslim peserta FGD 28/11/2017.

keberagamaan masyarakat kota Padang yang relatif egaliter dan independen membuat para siswa tidak cukup mudah terpengaruh dengan isu-isu yang berkembang di luar, termasuk di media sosial. Menurut Ustadz Aria, seorang guru PAI sekaligus pembimbing Tahfidz di SMAN 1, siswa SMAN 1 yang ikut kajian-kajian keagamaan selama ini masih belum ada yang terindikasi mengikuti paham-paham radikal. Mereka akan secara kritis mencermati dalam menerima informasi dari setiap narasumber. Jika ada yang tidak cocok atau tidak pas, siswa tidak segan untuk mempertanyakan.

Seorang informan yang sekarang menjadi Kabid Pengawasan Madrasah di Kanwil Kemenag Sumatera Barat mengakui bahwa ada indikasi masuknya potensi radikalisme di kalangan siswa yang terjadi melalui proses mentoring oleh para alumni yang ada di Perguruan Tinggi dan dilakukan terhadap juniornya yang ada di SMA dalam bentuk kajian-kajian atau halaqah. Guru-guru agama di madrasah dan SMA selama ini memang ada laporan dan koordinasi dengan Bimas Islam di Kanwil Kemenag. Sebagai orang yang pernah aktif juga di FPI, informan ini mengakui bahwa walaupun ada paham-paham radikal yang muncul di kalangan siswa, maka itu bukan berasal dari sekolah tapi dari luar sekolah diantaranya oleh para alumni sekolah tersebut.<sup>33</sup>

Problem kehidupan siswa di kota Padang yang terbesar bukan soal radikalisme, tapi potensi terjadinya intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas terutama kalangan non-Muslim. Hal ini terlihat dari adanya beberapa Perda baik pada level Sumatera Barat maupun Kota Padang. Berdasarkan data yang ada, total ada 27 Perda Syariah<sup>34</sup> atau yang berindikasikan syariah baik pada tingkat provinsi Sumatera Barat maupun di kabupaten kota se-Sumatera Barat.<sup>35</sup> Perda yang diindikasikan sebagai perda Syariah seperti Perda terkait baca tulis al-Qur'an, busana Muslimah, togel narkoba, zakat, infaq dan hafalan al-Qur'an. Untuk kota Padang, Perda-perda syariah tersebut sudah ada sejak zaman Walikota Fauzi Bahar periode 2003-

---

33 Kashmir, Bidang Pengawasan Madrasah, Kanwil kemenag Sumatera Barat seperti disampaikan dalam FGD 28/11/2017 di Kota Padang.

34 Sebenarnya tidak ada yang namanya Perda Syariah. Istilah Perda Syariah mengacu kepada sebuah istilah peraturan daerah yang kontennya berkaitan dengan pengaturan urusan moral keagamaan di ruang publik, urusan pendidikan, dan tata kelola pemerintahan dan bersumber kepada ajaran agama khususnya Islam.

35 <http://heru2273.blogspot.co.id/2014/04/perda-syariah-di-sumatera-barat.html>.

2008 yaitu Perda Kota Padang No. 6 Tahun 2003 tentang Wajib Pandai Baca Tulis Al-Quran bagi peserta didik sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, dikaitkan dengan instruksi walikota Padang No. 451.442/Binsos-iii/2005 tanggal 7 Maret tahun 2005 tentang Pelaksanaan Wirid Remaja, Didikan Subuh dan Anti Togel/Narkoba serta pakaian Muslimah bagi siswi SD/MI, SMP/MTs, dan SMA, SMK/MA.

Sosok walikota Fauzi Bahar yang berasal dari militer dan diusulkan oleh PAN (Partai Amanat Nasional) banyak mengeluarkan perda-perda bernuansa syariah. Oleh sebagian kalangan, kebijakan walikota Fauzi Bahar banyak dianggap melakukan politisasi dan komodifikasi agama dalam kebijakan publiknya. Sedangkan walikota yang sekarang yaitu Mahyeldi Ansharullah yang berasal dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan pernah menjadi wakil-walikota nya Fauzi Bahar, tidak banyak melakukan kritik atau koreksi terhadap kebijakan walikota sebelumnya terkait perda-perda bernuansa syariah. Tapi Mahyeldi ikut merasakan dan menikmati dari perda syariah era Fauzi Bahar. Beberapa kebijakan zaman Fauzi Bahar tetap diteruskan dan dilaksanakan pada zaman Mahyeldi, termasuk Peraturan Walikota (Perwako) No. 33 tahun 2013 tentang Pendidikan Tahfidz al Qur'an pada periode Fauzi Bahar juga masih diteruskan dan dilanjutkan pada masa Mahyeldi. Dengan memberikan *reward* bagi siswa yang hafal al-Qur'an dengan beberapa kemudahan untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.<sup>36</sup>

Beberapa kebijakan soal kebijakan pendidikan lebih memprioritaskan kelompok mayoritas sekaligus merugikan kelompok minoritas. Jika kebijakan soal hafalan al-Qur'an dilaksanakan, maka kebijakan tersebut berpotensi mendiskriminasi kelompok lain dan merusak sistem pendidikan nasional, karena seleksi rekrutmen siswa atau pelajar lebih mengandalkan jumlah hafalan ketimbang capaian prestasi akademik. Kebijakan ini dianggap mendiskriminasi kelompok agama lain yang tidak memiliki tradisi hafalan kitab suci.

Kebijakan lain dari Pemkot Padang yang dianggap merugikan kelompok non-Muslim adalah tidak adanya guru Pendidikan Agama Kristen atau Katolik

---

36 <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/04/16/93188/siswa-penghafal-quran-di-kota-padang-peroleh-keistimewaan.html>.

di kota Padang, padahal di sekolah tersebut ada siswa non-Muslim. Kebijakan ini sangat bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana seorang siswa harus mendapatkan pengajaran agama dari guru yang seagama. Undang-Undang tidak menyebutkan jumlah batas minimal berapa jumlah siswa yang ada di sekolah, sehingga berhak mendapatkan pengajaran dari guru yang seagama.

Tampaknya untuk mensiasati aturan kebijakan UU tersebut, pemerintah kota Padang membuat kebijakan bahwa pengajaran agama untuk siswa non-Muslim diserahkan kepada pengurus agama atau pihak gereja yang ada di sekitarnya. Jadi siswa-siswa non-Muslim ini untuk mata pelajaran agamanya didapatkan dari para Pendeta, Pastoral yang dia menjadi jamaahnya. Sekolah hanya terima bersih dari nilai mata pelajaran agama yang diserahkan oleh pihak gereja. Namun yang menjadi persoalan sebenarnya, mereka yang memberikan mata pelajaran agama Kristen/ Katolik bukanlah berlatar belakang pendidikan guru, tapi tokoh Pendeta atau Pastor. Mereka sebenarnya bukan guru, tapi para pendeta atau aktifis gereja yang mengajar dan tidak menguasai metode pembelajaran dan penilaian.

Kalangan pihak Katolik dan Kristen sudah mengaku sudah mengajukan protes dan mengadvokasi permasalahan ini. Intinya agar di Kota Padang di sediakan guru-guru pendidikan Agama Kristen dan Katolik. Bahkan dari pihak Kristen menyatakan bahwa mereka sudah mengajukan usulan kepada Dinas Pendidikan, dan Kantor Kemenag siap menyediakan guru-guru Pendidikan Agama Kristen meskipun tidak dibayar, dengan status Guru Tidak Tetap.<sup>37</sup> Akan tetapi sampai sekarang belum bisa terpenuhi. Salah satu alasan yang sering disampaikan secara tidak formal adalah untuk penghematan, karena jumlah mereka yang sangat kecil sehingga dianggap percuma. Argumen ini tidak hanya melanda kalangan awam, tapi juga termasuk kalangan intelektualnya seperti dosen, guru, ulama dan lainnya.

Salah satu alasan kenapa pihak Pemkot tidak menyediakan guru pendidikan agama Kristen atau non-Muslim, menurut Dinas Pendidikan Provinsi karena adanya moratorium pengangkatan guru. Selain itu juga alasan jumlah yang

---

37 Wawancara dengan Yefris Hasugian, kepala Bimas Agama Kristen Kanwil Kemenag Sumatera Barat.

terlalu sedikit sehingga tidak layak mendapatkan guru pendidikan agama.<sup>38</sup> Padahal rata-rata siswa non Muslim di SMA di kota Padang minimal ada sepuluh orang, bahkan sampai lima belas orang. Kalau berprinsip kesetaraan dan keadilan, tidak ada alasan untuk tidak dipenuhi hak pengajaran agama anak didik karena itu merupakan amanah Undang-Undang.

Kelompok-kelompok radikal yang ada di kota Padang tidak banyak dan tidak menjadi *mainstream* sebagaimana di kota-kota lainnya. Di kota Padang ada kepengurusan FPI yang dibentuk setahun terakhir tepatnya 12 Desember 2016 yang diketuai oleh Buya Muhammad Busyra. Selain itu juga ada MTKAAM (Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau), sebuah organisasi adat budaya Minangkabau yang diketuai oleh Dr. Irfianda Abidin, MBA. Irfianda Abidin ini adalah sosok pengusaha pemilik beberapa Hotel Syariah di Kota Padang dan Batu Sangkar, serta pemilik sebuah SPBU. Beberapa informan menyatakan bahwa sosok Irfianda Abidin bukanlah berlatar belakang aktifis Islam, bahkan konon masa lalunya terkait hal hal yang kurang baik. MTKAAM sendiri sebenarnya tidak dikenal dalam struktur kelembagaan adat Minangkabau. Yang ada selama ini hanya Wali Nagari, KAN (Kerapatan Adat Nagari), LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau).<sup>39</sup>

Bagi kalangan pelajar SMA di kota Padang, keberadaan kelompok-kelompok radikal tersebut tidak terlalu berpengaruh, & tidak banyak yang berminat untuk terlibat di dalamnya. FPI dan MTKAAM adalah kelompok minoritas radikal yang sangat vokal menyuarakan isu-isu soal hubungan Muslim dan non-Muslim, anti-Kristenisasi, anti-Kemaksiatan dan lainnya. Ketika terjadi kasus pembantaian terhadap umat Islam di Rohingya, maka itu tidak berpengaruh negatif terhadap siswa, sehingga menimbulkan gesekan dan semangat anti-Hindu.

Dua kelompok itulah yang selama ini cukup vokal dalam beberapa isu menyangkut hubungan antaragama seperti pada kasus Penolakan RS Siloam yang dibangun LIPPO Group dengan tokohnya James Riady. Kelompok-

---

38 Seperti disampaikan informan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar dalam FGD 28/11/2017 di Kota Padang.

39 Seperti disampaikan oleh informan MT Dosen Sosiologi UIN Imam Bonjol Padang 18/10/2017.

kelompok ini yang selama ini menganggap sebagai representasi masyarakat Padang yang menolak keberadaan RS Siloam karena dikhawatirkan menjadi pusat kegiatan Kristenisasi dan *missionaris*, dua hal yang dianggap sangat merugikan dan bisa merusak budaya adat Minangkabau yang sangat kental nuansa ke-Islam-annya. MTKAAM dan FPI juga yang mengoordinasikan dalam mobilisasi massa aksi demo 212 di Jakarta, mengerahkan massa sangat besar dengan menyewa bus dan menyewa dua pesawat Lion Air dan Sriwijaya.

#### **4. Mencari Model Ketahanan di Sekolah**

Kebinekaan atau keragaman merupakan sebuah keniscayaan, dan harus dipelihara juga diberikan kesempatan dan ruang yang sama untuk melakukan aktualisasi diri. Kelompok minoritas yang berlatar belakang suku dan agama juga harus diberikan kebebasan dalam mengekspresikan identitas personalnya melalui simbol-simbol baik yang bercirikan keagamaan maupun non-keagamaan. Penggunaan simbol jilbab merupakan pakaian yang memiliki karakter identitas keagamaan Muslim, dan seharusnya pihak non-Muslim pun juga tidak perlu disamakan atau tidak perlu menyesuaikan diri penampilannya dengan menggunakan jilbab hanya karena posisinya yang minoritas.

Temuan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa model ketahanan sekolah dalam mempertahankan kebinekaan di kota Padang bisa dilakukan jika ada ruang kebebasan dan jaminan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Bagi sekolah negeri, pihak sekolah tetap harus memberikan kebebasan keberagaman kepada siswa yang minoritas non-Muslim untuk menyatakan identitasnya secara independen. Pihak sekolah harus memberikan larangan kepada siswa non-Muslim yang menggunakan jilbab hanya karena mereka tidak ingin terlihat berbeda dengan yang lain.

Internalisasi nilai kebinekaan bagi sekolah negeri juga bisa dilakukan dengan memberikan kewajiban pihak sekolah kepada siswa non-Muslim dengan menyediakan guru-guru agama sesuai ajaran agamanya. Hal ini selain sesuai dengan UU Sisdiknas juga bagian dari amanah konstitusi UUD 1945. Pihak pemerintah daerah dan kepala sekolah hendaknya tidak menjadikan alasan atau faktor finansial atau jumlah yang sangat sedikit sebagai alasan

untuk tidak mengangkat guru agama dari pihak non-Muslim demi memenuhi kebutuhan kewajiban negara terhadap rakyatnya dalam layanan pendidikan.

Hal yang sama juga terjadi kepada siswa-siswa sekolah non-Muslim seperti Don Bosco, SMA Prayoga yang dimiliki oleh kalangan Katolik, yang juga menyediakan guru agama untuk siswa yang muslim. Meskipun mereka bercirikan sekolah keagamaan, tapi pihak sekolah tetap harus memberikan layanan kepada siswa muslim dengan menyediakan guru agama yang Muslim, termasuk kepada siswi yang muslim untuk bebas menggunakan pakaian jilbab.

# 4

## DENPASAR

### A. GAMBARAN UMUM LOKASI

#### 1. Profil Sekolah

##### a. Data Murid

Data yang diperoleh dari empat sekolah dan dua madrasah menunjukkan bahwa ada variasi jumlah laki-laki dan perempuan serta jumlah anak didik berdasarkan pada agama yang dianut. Di satu sekolah ada yang memiliki jumlah siswa laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Dan sebaliknya di sekolah lain jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Misalnya siswa di SMAN 2 Denpasar (Resman), dimana jumlah laki-lakinya lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Dari jumlah keseluruhan sebanyak 1.213, Jumlah laki-laki adalah 625 orang dan perempuan 588 orang. Berbeda dengan tiga sekolah lainnya yang justru jumlah peserta didik perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Misalnya SMAN 3 (Trisma), jumlah keseluruhan murid sebanyak 862 orang yang terdiri dari, 375 laki-laki dan 487 perempuan. Sementara SMAN 4 (Foursma), dari 1001 siswa ada 453 laki-laki dan 548 perempuan. Sedangkan di SMAN 8 Denpasar (Smapan), sebanyak 1254 orang, terdiri dari 603 laki-laki dan 651 perempuan.

Jika dilihat dari segi agama, mayoritas siswa keempat sekolah negeri tersebut beragama Hindu, dengan jumlah di atas 85%. Siswa SMAN 2 Denpasar yang beragama Hindu sebanyak 994 orang, sementara Islam 162, Kristen 37, Katolik 9, Buddha 9, dan Konghuchu 2 siswa. Sedangkan siswa SMAN 3 Denpasar terdiri dari 812 Hindu, 72 Islam, 1 Buddha, 6 Protestan dan 6 Katolik. Siswa SMAN 4 Denpasar ada 824 Hindu, 110 Islam, 22 Buddha, 15 Katolik, dan 3 Kristen. Sementara di SMAN 8 Denpasar, Hindu ada 1173 orang, Islam sebanyak 63 orang, Buddha 5 siswa, Protestan 5 orang, dan Katolik 6 orang.

**Tabel 3.** Jumlah Siswa berdasarkan Jenis Kelamin dan Agama

No	Nama sekolah	Laki-laki	Perempuan	Hindu	Islam	Kristen	Katolik	Buddha	Konghuchu
1	SMAN 2	625	588	994	162	37	9	9	2
2	SMAN 3	375	487	812	72	6	6	1	
3	SMAN 4	453	548	824	110	3	15	22	
4	SMAN 8	603	651	1173	63	5	6	5	
5	MA Al-Ma'ruf	71	95						
6	MA Tawakkal	69	81						

Berdasarkan tabel di atas, jumlah siswa non-Hindu cukup bervariasi di setiap sekolah. Siswa muslim berkisar antara 63 hingga 162 siswa, Kristen antara 3 hingga 37 siswa, Katolik antara 6 hingga 15 siswa, Buddha antara 1 hingga 22 orang, dan Konghuchu hanya ada 2 orang di SMAN 2 Denpasar. Tingkat keragaman agama lebih menonjol di SMAN 2 dan SMAN 4 Denpasar. Hal ini dapat dipahami karena dari segi lokasi, keduanya terletak di tengah kota Denpasar yang plural dan majemuk.

Jika dilihat dari jumlah siswa non-Hindu per kelas, dari jumlah siswa per kelas sebanyak 30-40 siswa, jumlah siswa non-Hindu berkisar antara 1 hingga 13 orang. Bahkan ada yang dalam satu kelas seluruhnya beragama Hindu seperti di kelas XI S4 dan X S4 di SMAN 8. Akan tetapi jika dilihat dari jumlah siswa non-Hindu kelas paralel, maka jumlah mereka lebih banyak. Adanya keragaman agama dan keyakinan di sekolah akan berpengaruh kepada hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Di sini, ada tanggung jawab sekolah untuk menyediakan guru agama yang sesuai dengan agama peserta didik.

Bagaimana dengan madrasah? Jika jumlah siswa sekolah negeri berkisar antara 850 siswa hingga 1250 siswa, maka berbanding terbalik dengan kondisi murid Madrasah Aliyah. Misalnya MA Al-Ma'ruf. Berdasarkan data pada bulan Oktober 2017, jumlah murid Madrasah Aliyah Al-Ma'ruf sebanyak 166 siswa. Jumlah siswa Al-Ma'ruf tersebut bertambah menjadi

166 dari 150 orang karena ada siswa tambahan sementara dari madrasah aliyah dan sekolah di Kabupaten Karangasem yang sedang dilanda musibah dengan meningkatnya aktifitas Gunung Agung. Sementara jumlah siswa MA Tawakkal juga sebanyak 150 orang.

**b. Sosial Ekonomi Murid**

Secara sosial ekonomi, siswa sekolah negeri Denpasar berasal dari kelas menengah ke atas. Mereka adalah anak pejabat, pengusaha, pegawai, tokoh masyarakat, dan sedikit dari kelas kalangan bawah. Sedangkan dua sekolah Islam, secara sosial ekonomi, sebagian besar orang tua murid Al-Ma'ruf dan Tawakkal berasal dari kelas menengah ke bawah. Mereka adalah pedagang kaki lima sebagai penjual bakso, sate, mie ayam, warung, gerobak, dan lain-lain. Meskipun ada juga orang tua siswa MA Tawakkal yang berprofesi sebagai pegawai negeri dan polisi. Mereka tidak hanya berasal dari wilayah sekitar tengah kota atau sekitar Terminal Ubung, tetapi juga dari Kuta yang berada jauh dari sekolah.

Kemampuan ekonomi orang tua yang bervariasi membuat biaya pendidikan dirasa mahal untuk sebagian kalangan. Biaya SPP bulanan minimal sebesar Rp. 250.000 seringkali tidak bisa dibayar sesuai dengan ketentuan. Padahal sebagian besar operasional sekolah, termasuk untuk kegiatan ekstrakurikuler, dibiayai dari SPP yang tidak mencukupi dari dana BOS. Meskipun kondisi tersebut dirasakan oleh semua sekolah, tetapi sekolah swasta, termasuk sekolah Islam, merasakan dampak secara langsung karena semua kebutuhan sekolah termasuk gaji guru berasal dari dana tersebut.

**c. Data Guru/ Lulusan Alumni Guru**

Jumlah guru sekolah negeri di Denpasar cukup bervariasi. Jumlah guru di SMAN 2 Denpasar sebanyak 61 orang, SMAN 3 sebanyak 36 orang, SMAN 4 sebanyak 56 orang, dan SMAN 8 sebanyak orang. Dari jumlah tersebut, mayoritas guru beragama Hindu. Sementara yang non-Hindu di SMAN 2 ada 5 orang, SMAN 3 ada 1 orang, SMAN 4 ada 2 orang, dan SMAN 8 ada 4 orang.

Guru agama masing-masing sekolah juga beragam. SMAN 2 Denpasar ada 5 guru agama terdiri dari 3 guru agama Hindu, 1 guru agama Islam dan

1 guru agama Buddha. Sementara di SMAN 3 ada 2 guru agama Hindu dan 2 guru agama Islam yang diampu oleh Pak Fathurrahman, yang juga merupakan guru SMAN 7 Denpasar. Adapun guru agama Kristen, Katolik dan Konghuchu tidak ada. Akan tetapi ketiadaan guru agama tetap di sekolah bukan berarti tidak ada guru yang mengajarkan agama. Guru agama Islam misalnya diambil dari sekolah lain dengan status kontrak atau diambil dari tokoh agama setempat. Hal tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing sekolah. Para guru di sekolah negeri merupakan alumni dari perguruan tinggi lokal seperti Universitas Udayana, Universitas Saraswati; & perguruan tinggi di Jawa dan Lombok.

Sementara di Madrasah Al-Ma'ruf, jumlah guru sebanyak 20 orang yang terdiri dari 8 laki-laki dan 12 perempuan. Sebagian besar guru berpendidikan sarjana, sementara yang master sebanyak 3 orang, termasuk kepala sekolah. Para guru ada yang merupakan lulusan dari IAIN, pesantren, Universitas Udayana, Universitas Negeri Malang, dan lain-lain.

Sedangkan di Madrasah Tawakkal, jumlah guru madrasah sebanyak 20 orang, dengan 6 orang laki-laki termasuk kepala sekolah dan 14 orang perempuan. Rata-rata guru berpendidikan S1 dengan berbagai latar belakang keilmuan.

#### **d. Struktur Ruang Sekolah**

Struktur ruang sekolah beragam. Ada yang berbentuk segi empat, letter U, dan letter L, tergantung pada luas tanah dan letak bangunan. Ruang sekolah yang berbentuk segi empat panjang dapat dilihat dari SMAN 2 dan SMAN 4. Letter U tampak pada SMAN 3 dan Madrasah Aliyah Al-Ma'ruf. Sedangkan bentuk letter L adalah SMAN 8 dan Madrasah Aliyah Tawakkal.

Secara umum, sekolah di Bali sangat menonjolkan ciri khas bangunan lokal dan terdapat tempat persembahyangan. Setiap sekolah pasti memiliki Patung Dewi Saraswati, Patung Ganesha, Pelinggih, dan Padmasana. Patung Dewi Saraswati adalah lambang ilmu pengetahuan, yang selalu diperingati setiap enam bulan sekali oleh para warga sekolah. Peringatan Hari Saraswati tersebut dilakukan berdasarkan wuku, tahun Bali yang jatuh setiap tujuh bulan sekali, berdasarkan tahun masehi. Peringatan ini jatuh setiap hari sabtu.

Akan tetapi, persiapan untuk persembahyangan dilakukan sehari sebelumnya. Persiapan ini melibatkan semua warga sekolah dan dimeriahkan dengan memakai pakaian adat Bali. Sedangkan Patung Ganesha adalah lambang dari orang yang menuntut ilmu. Patung ini biasanya terletak di depan gerbang masuk, seolah-olah mengucapkan selamat datang kepada para siswa yang akan belajar dan menuntut ilmu di sekolah. Sedangkan Padmasana adalah pura tempat persembahyangan umat Hindu. Di tempat inilah para siswa dan juga guru dan pegawai melakukan ritual persembahyangan pada waktu pagi, siang dan sore hari. Selain itu, ada juga pelinggih yang berbentuk patung dalam ukuran yang lebih kecil. Setiap pagi, para siswa dan guru memulai hari dengan berdoa di Padmasana, Pelinggih dan Patung Ganesha, kemudian dilanjutkan dengan meletakkan sesajen yang diperuntukkan bagi dewa-dewa.

Selain ada tempat persembahyangan umat Hindu, di beberapa sekolah juga ada tempat ibadah umat Islam. Misalnya di SMAN 2 terdapat musala yang berukuran 3x4 yang terletak di belakang ruangan guru. Musala ini digunakan oleh para siswa dan guru muslim untuk menunaikan ibadah salat. SMAN lainnya yang juga mempunyai musala adalah SMAN 7. Namun setelah terjadi renovasi gedung, tidak ada lagi ruangan tempat salat. Akan tetapi sekolah membolehkan siswa muslim untuk salat di aula sekolah yang bisa menampung sekitar 160 siswa untuk salat Jumat.

Sekolah negeri selain mempunyai halaman sekolah yang luas, asri, dan nyaman untuk belajar, ia juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti ruang perpustakaan, laboratorium, *student center*, lapangan upacara, koperasi, kantin, dan aula. Sebaliknya di madrasah aliyah, yang lokasinya tidak hanya sempit, tetapi juga fasilitas yang terbatas. Yang ada hanyalah ruang belajar, ruang guru dan kepala sekolah, dan aula. Tidak ada ruang penunjang belajar lainnya. Bahkan aula juga berfungsi sebagai musala.

## **2. Anatomi atau Struktur Organisasi di Sekolah**

### **a. Profil OSIS dan MPK**

Meskipun OSIS ditetapkan sebagai organisasi intra siswa secara nasional, tetapi dalam pelaksanaannya setiap sekolah memiliki kebijakan sendiri tentang



OSIS. Ada keragaman struktur OSIS di masing-masing sekolah. Misalnya, di SMAN 3 Denpasar, aturan tentang OSIS ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Denpasar tentang kegiatan ekstrakurikuler. Pada pasal 14 dan pasal 15 disebutkan bahwa:

1. OSIS adalah satu-satunya wadah siswa yang sah di sekolah.
2. OSIS adalah pendukung utama pelaksanaan program sekolah karena program OSIS juga adalah program sekolah.
3. Pengurus OSIS wajib melakukan koordinasi di dalam melaksanakan programnya dengan pembina OSIS, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah.
4. 14.4. Pengurus OSIS terdiri dari 16 orang dengan masa jabatan satu tahun dan pemilihannya dilaksanakan secara demokratis dengan memperhatikan kemampuan akademis, kemampuan emosional, kemampuan sosial, dan kemampuan moral spiritual dengan kategori amat baik.
5. 14.5. Setiap siswa wajib menjadi anggota OSIS dan wajib mendukung programnya serta mengikuti kegiatan-kegiatannya.
6. 14.6. Setiap siswa dilarang mengikuti organisasi apapun selain organisasi OSIS di sekolah.

Pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa tugas dan fungsi OSIS adalah untuk membantu program sekolah. Karena hanya bersifat membantu program sekolah, maka OSIS tidak boleh melakukan program apapun di luar program yang sudah ditetapkan sekolah. Artinya OSIS hanya menjadi pelaksana program. Oleh karena itu, tidak ada sebuah terobosan program yang dilakukan oleh OSIS selain dari program yang telah ditetapkan.

Pengurus dan kegiatan OSIS dipantau oleh pihak sekolah melalui pembina OSIS serta waka kesiswaan. Setiap kegiatan yang mereka lakukan, harus dengan sepengetahuan pihak sekolah (pembina OSIS). Termasuk dalam hal ini adalah, ketika menghadiri kegiatan di luar sekolah, maka para pengurus wajib memberitahukan kepada guru pembina.

Oleh karena itu, ketua OSIS terpilih harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah. Pihak sekolah bisa mengintervensi jika ternyata hasil pemilihan tidak sesuai dengan kriteria tersebut. Ini terjadi di MA Al-Ma'ruf. Ketika ketua terpilih adalah laki-laki yang secara kemampuan akademis dan

non-akademis kualitasnya berada di bawah kandidat perempuan, pada saat itulah sekolah mengintervensi untuk mengubah hasil pemilihan meskipun keduanya mempunyai jabatan yang sama, tetapi dibuat seperti model struktur organisasi Nahdatul Ulama, ada ketua umum dan ketua harian. Ketua umum dipegang oleh perempuan, yang notabene suaranya kalah dengan ketua harian. Dalam konteks itu, ketua umum secara struktural berada di atas ketua harian.<sup>1</sup>

MPK (Majlis Perwakilan Kelas) kedudukannya seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Meskipun secara organisasi setara dengan OSIS, tetapi dalam pelaksanaannya, ia berhak untuk memantau kegiatan OSIS dan mengusulkan program untuk dijalankan oleh pengurus OSIS. MPK hanya ditemukan di dua sekolah yakni SMAN 2 dan SMAN 8 Denpasar. Kebetulan di kedua sekolah ini, ketuanya adalah perempuan dan terlihat lebih tegas dibandingkan dengan ketua OSIS yang notabene adalah laki-laki. Sementara itu di SMAN 4, tidak ditemukan MPK, yang ada hanyalah PK (Perwakilan Kelas).

#### **1). Kegiatan-kegiatan OSIS**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kegiatan OSIS sekedar sebagai pelaksana program sekolah. Bidang Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa misalnya, bertugas untuk mengatur peribadatan di sekolah. Dalam konteks sekolah negeri di Bali, bidang ini bertugas untuk menjadwalkan siswa secara bergiliran dari kelas X hingga kelas XII untuk memberikan sesajen di tempat ibadah: Padmasana, Pelinggih dan Patung Ganesha. Mereka yang mendapatkan giliran harus datang terlebih dahulu ke sekolah. Mereka juga menjalankan tugas ketika siswa lain sedang mengikuti upacara bendera. Selain ibadah harian, mereka juga bertanggung jawab untuk kegiatan ibadah bulanan dan tahunan sekolah yang terkait dengan penyiapan peribadatan pada waktu Purnama Tilem dan Hari Saraswati dan Siwalatri.

Bidang kedua yakni Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia bertugas untuk membantu sekolah berkaitan dengan pelaksanaan aturan sekolah. Misalnya di SMAN 3, siswa tidak boleh membawa mobil ke sekolah. Aturan ini pernah

---

1 Rifa'i, Kepala Sekolah Madrasah Al-Ma'ruf, Wawancara tanggal 3 Oktober 2017.

dilanggar oleh salah satu siswa dan akhirnya ia dimintai keterangan terkait dengan pelanggaran tersebut.

Bidang ketiga, Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara bertugas untuk membantu sekolah menyiapkan perangkat upacara pada hari-hari besar nasional. Bidang keempat, Prestasi Akademik, Seni Budaya, dan Olahraga adalah membantu sekolah dalam kegiatan seni dan budaya di sekolah. Misalnya acara pentas seni, HUT sekolah, dan sebagainya.

Bidang kelima, Demokrasi HAM, Pendidikan Politik dan Konteks Masyarakat yang Plural. Bidang ini lebih bertugas sebagai humas sekolah yang berkaitan dengan kegiatan di luar sekolah. Bidang keenam, Kreatifitas, Keterampilan dan Kewirausahaan bertanggung jawab atas koperasi sekolah dan bazar.

Sedangkan bidang ketujuh, Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Gizi bertanggung jawab terhadap UKS dan memberikan pertolongan terhadap siswa yang sakit. Bidang kedelapan, Seni sastra dan budaya mirip dengan bidang keempat yakni bertanggung jawab terhadap kegiatan seni dan budaya di sekolah. Bidang kesembilan dan kesepuluh, Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Komunikasi dalam Bahasa Inggris, yang bertanggung jawab atas mading di sekolah serta *english corner*.

Sementara untuk kegiatan di madrasah tidak seperti halnya sekolah negeri. OSIS di madrasah lebih simpel tetapi tetap bertugas untuk membantu program sekolah. Bidang Keamanan bertugas untuk menertibkan kelas agar disiplin dan tidak keluar kelas pada saat guru tidak ada di ruangan. Sementara Bidang Kerohanian bertugas untuk kegiatan keagamaan di sekolah seperti perayaan hari besar Islam atau ibadah harian seperti Salat Duha serta membaca dan menghafal al-Quran. Bidang Minat dan Bakat bertugas untuk membantu sekolah dalam kegiatan seni dan budaya di sekolah seperti lomba-lomba yang diadakan setelah ujian sekolah. Terakhir adalah Bidang Kebahasaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pidato yang dilakukan setiap hari Jumat di sekolah. Pidato tersebut menggunakan Bahasa Inggris dan Arab.

Selain mempunyai program sekolah, OSIS di Kota Denpasar juga mempunyai forum OSIS yang bernama Forum Komunikasi (Forkom) OSIS

Kota Denpasar. Forum ini mewadahi semua OSIS yang ada di kota Denpasar baik dari sekolah negeri atau swasta. Kepengurusan Forkom sebanyak 52 orang yang mewakili 52 sekolah di Kota Denpasar baik negeri maupun swasta. Pengurus inti Forkom beragam dan lintas agama yang menunjukkan kebinekaan dan keragaman dalam kepengurusan.

Beberapa kegiatan Forkom adalah kemah bersama dan deklarasi bersama sebagai *Duta Remaja Keren tanpa DARTS*. Keren adalah singkatan dari Keren, Respek, dan Energik. Sementara Darts adalah *drug, alcohol, relationship* (pergaulan bebas), *time waste*, dan *smoking*. Kegiatan lain Forkom adalah Bakti Sosial, persembahyangan bersama ke Pura, dan buka puasa bersama.

#### **b. Struktur OSIS**

Jumlah pengurus OSIS masing-masing sekolah cukup beragam. Pengurus OSIS SMAN 3 dan SMA 4 masing-masing sebanyak 16 orang. Sementara SMAN 2 dan SMAN 8 masing-masing 50 dan 43 orang. Adapun pengurus di madrasah 22 orang.

Secara umum struktur OSIS terbagi menjadi dua, yakni pengurus inti dan koordinator serta anggota bidang/sie. Pengurus inti ada enam orang, yakni ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Sedangkan bidang/sie ada 10. Kesepuluh bidang ini dibuat berdasarkan Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah. Kesepuluh bidang tersebut adalah:

1. Sie 1: Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Sie 2: Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia.
3. Sie 3: Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan & Bela Negara.
4. Sie 4: Prestasi Akademik, Seni Budaya, dan Olahraga.
5. Sie 5: Demokrasi, HAM, Pendidikan Politik dan Konteks Masyarakat yang Plural.
6. Sie 6: Kreatifitas, Keterampilan dan Kewirausahaan.
7. Sie 7: Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Gizi.
8. Sie 8: Seni Sastra dan Budaya.
9. Sie 9: Teknologi Informasi dan Komunikasi
10. Sie 10: Komunikasi dalam Bahasa Inggris

Sementara OSIS Madrasah Tawakkal dan Al-Ma'ruf terdiri dari 26 orang pengurus. Ada 6 pengurus inti dan 20 orang anggota bidang. Pengurus inti adalah ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara. Ada empat bidang yang ditemui yakni Bidang Keamanan, Kerohanian, Minat Bakat dan Kebahasaan dengan masing-masing terdiri dari lima orang anggota.

### c. Mekanisme Suksesi OSIS

Mekanisme pemilihan OSIS baik di sekolah maupun di madrasah secara umum adalah sama, yakni melalui pemilihan secara langsung. Meskipun demikian, kepala sekolah dan guru juga mempunyai hak untuk menentukan ketua OSIS berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Pengurus OSIS dipilih berdasarkan perwakilan dari kelas X dan XI. Akan tetapi, di SMAN 4 semua pengurus OSIS hanya perwakilan dari kelas X. Artinya, ini tergantung pada kebijakan masing-masing sekolah. Sementara kelas XII umumnya tidak dipilih karena mereka harus mempersiapkan diri untuk ujian nasional. Siswa yang terpilih dari kelas masing-masing diwajibkan untuk mengisi formulir dan melakukan wawancara yang dilakukan oleh OSIS sebelumnya. Formulir berisi biodata mereka masing-masing. Sementara wawancara dilakukan tidak hanya untuk mengetahui kecerdasan akademik mereka, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual.

Pengurus OSIS direkrut oleh MPK (Majelis Permusyawaratan Kelas) dengan cara mencari calon dari perwakilan kelas untuk melengkapi beberapa persyaratan seperti surat persetujuan dari orang tua, nilai raport bagus, mempunyai prestasi non akademik, dan ada kemauan dari yang bersangkutan.

Berbeda dengan sekolah lain, SMAN 4 melakukan proses penjaringan calon pengurus OSIS sejak mereka menjadi siswa baru. Sekolah mengadakan wawancara terhadap calon siswa tidak hanya terkait dengan wawasan akademik, tetapi juga pengalaman mereka ketika SMP. Siswa yang aktif di organisasi ketika SMP, dijaring dan menjadi kandidat ketua OSIS. Dengan demikian, Pengurus OSIS disaring berdasarkan pengalaman dan keterampilan para siswa.

Dari 6 ketua OSIS di 6 sekolah dan madrasah, terdapat 2 ketua OSIS perempuan yakni di SMAN 4 Denpasar dan Madrasah Al-Ma'ruf, dan 2 ketua

MPK perempuan yaitu di SMAN 2 dan SMAN 8. Ketua MPK SMAN 8 selain ia perempuan, ia juga muslim.

### **3. Peta Jejaring**

#### **a. Aktor Internal**

Secara umum, guru di sekolah tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga menjadi pembina OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Guru juga selalu memonitor dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Sebaliknya siswa berkewajiban untuk mengikuti perintah guru serta bersikap sopan dan santun terhadap mereka.

Komite, sebagai perwakilan orang tua, mempunyai peran yang sangat penting untuk mendukung program sekolah. Ia tidak hanya berperan dalam hal pendanaan, tetapi juga dalam mendesain program sekolah.

Pengawas sekolah. Perubahan kebijakan tentang pendidikan yang memisahkan antara pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang menetapkan pendidikan dasar di bawah naungan kabupaten/kota, sementara menengah di bawah naungan Provinsi, sedikit menyulitkan kerja pengawas sekolah. Jumlah pengawas SMA di Denpasar bisa dikatakan memadai, yakni satu pengawas mengawasi tujuh SMA.

Berbeda dengan pengawas SMA yang berada di bawah naungan provinsi, pengawas madrasah aliyah berada di bawah Kementerian Agama Kota/Kabupaten. Untuk pengawas MA di Kota Denpasar hanya ada satu orang yang mengawasi seluruh madrasah, yakni sebanyak empat madrasah. Sebaliknya, jumlah pengawas PAI di Kota Denpasar hanya satu orang yang bertugas untuk mengawasi 350 sekolah dari sekolah dasar hingga SMA.

#### **b. Aktor Eksternal**

Hampir semua sekolah dan madrasah mempunyai hubungan yang baik dengan para alumni, narasumber dari luar maupun tokoh masyarakat di sekitar sekolah. Di beberapa sekolah, bahkan beberapa alumni juga menjadi ketua komite sekolah dan pembina pramuka. Di SMAN 3 ada kegiatan “Alumni Berbagi”, ajang berbagi pengalaman dan kesuksesan dari alumni ke siswa.

Sekolah dan madrasah menjalin kerjasama dengan pihak luar terutama kaitannya dengan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler. Kalangan profesional dijadikan sebagai pembina ekstrakurikuler tersebut mayoritas untuk kegiatan olahraga. Seperti bulu tangkis, tenis meja, catur, renang, dan sebagainya. Sedangkan Madrasah juga mengundang narasumber dari luar atau mereka kerjasama dengan pihak luar seperti puskesmas dan kepolisian untuk kegiatan pesantren kilat.

## **B. KONTEKS SOSIAL BUDAYA BALI**

### **1. Aktifitas Keagamaan**

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000, mayoritas penduduk Bali memeluk agama Hindu, yakni mencapai 2.751.828 jiwa atau 87,44 persen dari seluruh penduduk. Kemudian penganut agama Islam sebanyak 323.853 jiwa atau 10,29 persen, dan sisanya beragama Kristen Protestan 30.439 jiwa (0,97%), Kristen Katolik 23.834 jiwa (0,76%), Buddha 16.569 jiwa (0,53%), dan aliran kepercayaan/lainnya 476 jiwa (0,02%).<sup>2</sup>

Akan tetapi, 10 tahun kemudian, terjadi perubahan. Jumlah pemeluk agama Hindu mengalami penurunan sedangkan pemeluk agama lain mengalami peningkatan. Hasil sensus penduduk tahun 2010, pemeluk agama Hindu turun dari 87,44% pada tahun 2000 menjadi 83,46% pada tahun 2010. Sebaliknya penduduk muslim naik dari 10,29% menjadi 13,37%. Protestan juga naik dari 0,97% menjadi 1,66%. Katolik naik dari 0,76% menjadi 0,81%. Buddha naik dari 0,53% menjadi 0,54%.<sup>3</sup> Meskipun semua agama non-Hindu mengalami kenaikan jumlah pemeluk, tetapi kenaikan yang cukup signifikan terjadi di agama Islam. Kenaikan jumlah pemeluk Islam naik sebesar 3% dalam jangka waktu 10 tahun.

Trend kenaikan jumlah pemeluk agama non-Hindu juga terjadi di Kota Denpasar. Jika dilihat dari data yang ada, pada tahun 2012, semua pemeluk agama mengalami peningkatan dengan jumlah yang variatif. Akan tetapi setahun kemudian, tahun 2013, penduduk Hindu mengalami penurunan

---

2 Bali Dalam Angka 2010.

3 Bali Dalam Angka 2015.

sekitar 34.000 orang, sementara penduduk agama lain bertambah antara 10.000 hingga 36.000 orang. Jumlah pemeluk agama di Kota Denpasar dari tahun 2009 hingga tahun 2013 adalah sebagai berikut<sup>4</sup>:

**Tabel 4.** Jumlah Pemeluk Agama Kota Denpasar tahun 2009-2013.

<b>Tahun</b>	<b>Hindu</b>	<b>Islam</b>	<b>Katolik</b>	<b>Protestan</b>	<b>Buddha</b>
2013	535 768	242 893	17 359	37 346	12 460
2012	569 113	206 201	18 229	26 755	13 440
2011	538 166	195 045	17 249	25 272	12 704
2010	434 379	156 805	14 075	19 864	10 103
2009	434 379	156 805	14 075	19 864	10 103

Sementara jumlah sarana ibadah (tempat peribadatan) di Bali selama tahun 2009 sebanyak 6.864 buah, meliputi sarana ibadah umat Hindu 6.086 buah, masjid sebanyak 470 buah, gereja Kristen Protestan 146 buah, wihara Buddha 128 buah, dan gereja Kristen Katolik 34 buah.<sup>5</sup> Jumlah tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2014. Jumlah tempat peribadatan Hindu adalah 4835 buah, masjid sebanyak 719, gereja Protestan 235 unit, gereja katolik 39 buah, wihara 49 unit, serta tempat ibadah Konghuchu 12 unit.<sup>6</sup>

Masyarakat Bali adalah masyarakat yang religius, toleran dan terbuka. Religiusitas tampak pada adat dan budaya Bali yang tidak terlepas dari agama. Agama menjadi sumber dari budaya dan budaya merupakan pancaran dari agama. Dalam budaya Bali dikenal dengan istilah Tri Hita Kirana, tiga unsur yang saling terkait yakni Tuhan, alam, dan manusia.

Nilai-nilai religiusitas Hindu Bali tidak terlepas dari unsur estetika. Antara agama dan seni tidak bisa dipisahkan karena adanya konsep tentang lingkungan sekala dan niskala. Lingkungan sosial dan spiritual. Bahwa setiap aspek sosial pasti memiliki aspek spiritual. Sedangkan keberadaan aspek kesenian terkait erat dengan sistem religi orang Bali. Seni arsitektur, seni ukir, seni tari, seni tabuh, seni suara dan lainnya adalah persembahan mulia terhadap Sang Pencipta. Kedua unsur tersebut (religi dan kesenian) saling terkait dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Unsur kesenian

4 Denpasar Dalam Angka 2014.

5 Lihat Bali Dalam Angka / Bali In Figures 2010.

6 Sumber: Bali Dalam Angka 2015.

memancarkan nuansa estetika atau keindahan bagi sistem religi, sebaliknya unsur religi memberikan nuansa religius bagi kesenian.

Berdasarkan pada konsep ini, dapat dipahami jika pernah terjadi protes terhadap modifikasi tarian Bali. “Tarian Bali Syariah” yang menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah Aliyah Al-Ma’ruf dan dipentaskan di sebuah acara nasional, diprotes atas nama adat dan budaya Bali. Modifikasi tarian tersebut terletak pada pakaian yang digunakan. Penari menggunakan jilbab dan manset yang serupa dengan warna kulit. Atas protes tersebut, kegiatan ekstrakurikuler tarian Bali di Madrasah Aliyah Al-Ma’ruf ditiadakan.

Sebagai daerah pariwisata, Bali terbuka dan toleran terhadap pendatang yang ingin menikmati keindahan alam, budaya, & adat istiadat Bali. Mereka menerima keragaman pendatang yang berasal dari berbagai negara, etnis, ras, agama, dan suku bangsa. Pariwisata membuka banyak lapangan pekerjaan, tidak hanya bagi penduduk lokal, tetapi juga pendatang. Para pendatang mengisi sektor ekonomi informal yang tidak diisi oleh penduduk asli Bali.

Para pendatang tersebut tidak hanya membantu perekonomian masyarakat, tetapi juga mengubah tatanan budaya Bali yang sebelumnya mayoritas dihuni oleh para pengikut agama Hindu. Secara ekonomi, pendatang banyak yang sukses dan berhasil sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi antara penduduk lokal dan pendatang. Secara budaya, perubahan terjadi karena para pendatang, termasuk para wisatawan, membawa budaya dan tradisi lokal mereka ke Bali. Terhadap gempuran budaya tersebut, masyarakat Bali tetap bertahan dengan tradisinya meskipun tidak dipungkiri bahwa tradisi yang dibawa oleh para pendatang juga mempengaruhi kebudayaan Bali.

Hubungan antara Hindu dan Islam di Bali telah terjalin dengan baik sejak masa kerajaan Bali. Jadi, umat Islam di Bali bukan sebagai pendatang baru tetapi mereka telah menetap di Bali sejak ratusan tahun lalu. Pada abad ke-17, orang Bugis Islam masuk di Loloan Jembarana.<sup>7</sup>

Muslim datang dari Jawa, Lombok dan Makassar atas permintaan Raja Bali. Mereka menjadi pengawal dan pembantu kerajaan. Atas hubungan baik

---

7 <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/menyambangi-kampung-kampung-muslim-di-bali>.

tersebut, Raja memberikan tanah sebagai tempat tinggal umat Islam. Hingga saat ini ada beberapa kampung muslim di Bali. Di antara kampung tersebut adalah Kopaon dan Kampung Jawa di Denpasar, Kampung Serangan, Gelgel di Klungkung, & Kampung Kecicang di Karangasem. Kampung-kampung Islam tersebut memperlihatkan akulturasi budaya Bali dan Islam yang kental. Misalnya di Kampung Kopaon Denpasar, sebagian masyarakat Islamnya menggunakan nama Bali untuk nama-nama panggilan mereka seperti Putu, Kadek, Komang, dan Ketut.<sup>8</sup>

Toleransi antarumat beragama terjalin dengan baik. Dalam konteks hubungan antarumat beragama, pemerintah Bali mempunyai ikon Puja Mandala yang terdapat lima tempat ibadah secara berdampingan. Kuburan Siti Khadijah yang merupakan keturunan dari Raja Bali terletak di Pemakaman Umum Badung, tempat pemakaman Hindu dan Ngaben dilaksanakan. Penjaga makam tersebut juga orang Hindu.

Dalam praktik keberagamaan, pembacaan doa Tri Sandya dilakukan secara beriringan dengan suara azan di masjid.<sup>9</sup> Ketika Salat Jumat, para Pecalang ikut membantu mengamankan tempat ibadah/masjid. Demikian juga dengan umat Islam. Mereka ikut membantu umat Hindu dalam persiapan upacara keagamaan. Bantuan tersebut tidak hanya berupa bantuan tenaga tetapi juga bantuan material. Terutama pada waktu Hari Raya Nyepi. Pada waktu Nyepi, kantor dan sekolah libur. Pada saat itu, umat Islam juga ikut tidak beraktivitas di luar rumah dan menyalakan lampu. Jika Raya Hari Nyepi tersebut jatuh pada hari Jumat bersamaan dengan waktu Salat Jumat, maka umat Islam dipersilakan untuk pergi ke masjid terdekat tanpa menggunakan kendaraan dan pengeras suara dari masjid.<sup>10</sup>

Pada acara keagamaan, baik hari besar Islam maupun hari besar Hindu terdapat tradisi saling mengucapkan hari raya dan saling berkunjung/

---

8 "Menyama Braya" Studi Perubahan Masyarakat Bali dalam *repository.uksw.edu/bitstream/.../D\_902008005\_BAB%20VII.pdf*.

9 Berdasarkan observasi di Masjid Baitul Makmur Monang Maning Denpasar pada tanggal 17 Oktober 2017. Pembacaan Tri Sandya dilakukan 3 kali sehari yakni pada jam 6 pagi, 12 siang dan 6 sore. Doa tersebut disiarkan melalui speaker dari Banjar-Banjar sehingga terdengar dengan jelas dari kejauhan. Pada waktu-waktu tersebut bersamaan dengan waktu Salat umat Islam.

10 Informasi dari beberapa narasumber. Diantaranya Ibu Redyan Nurjannah, Pengawas Madsrah Kota Denpasar, wawancara tanggal 14 Oktober 2017.

silaturahmi serta tradisi saling berbagi makanan. Pada waktu pesta, umat Hindu menyiapkan makanan halal bagi undangan muslim.<sup>11</sup>

Pada hari raya Idul Adha, madrasah atau umat Islam yang berkorban juga membagikan daging hewan kurban kepada tetangga yang berada di sekitar tempat tinggalnya termasuk yang beragama Hindu.<sup>12</sup> Untuk menghormati sapi sebagai hewan suci bagi masyarakat Hindu, maka sebagian umat Islam di Bali tidak menyembelih sapi sebagai hewan kurban tetapi mereka menyembelih kambing.<sup>13</sup>

Bom Bali tahun 2002 tidak hanya berimbas pada perekonomian masyarakat Bali, tetapi juga berdampak pada hubungan antarumat beragama. Stigma negatif terhadap umat Islam sebagai pelaku teror dan kekerasan masih ada hingga saat ini. Pada beberapa kasus stereotype tersebut diceritakan secara turun temurun meskipun sebagian generasi muda sudah mulai tersadar dan kritis.<sup>14</sup> Pelaku Bom Bali adalah perbuatan oknum yang tidak mewakili umat Islam secara keseluruhan.<sup>15</sup> Kesadaran kritis ini penting untuk menumbuhkan sikap saling percaya dan toleransi di kalangan masyarakat Bali.

Bom Bali juga yang memunculkan Ajeg Bali<sup>16</sup>, sebuah upaya untuk mengembalikan identitas Bali. Identitas tersebut adalah “*Agama adalah*

---

11 Abdul Kadir Jaylani, Guru Al-Ma'ruf dan warga muslim asli Bali, wawancara tanggal 2 Oktober 2017.

12 Rifa'i, Kepala Sekolah Madrasah Al-Ma'ruf, wawancara tanggal 3 Oktober 2017.

13 Menurut KH. Mustafa al-Amin, mantan ketua MUI Kota Denpasar, bahwa hewan yang disembelih pada hari raya Idul Kurban di Bali cukup berimbang antara sapi dan kambing. (Hasil FGD Kota Denpasar tanggal 22 Nopember 2017). Akan tetapi khusus di sekolah, mereka menyembelih kambing karena daging tersebut juga dibagikan kepada warga sekolah non-Muslim. Informasi dari Bapak Rifa'i; Mawar, Ketua MPK dan siswa muslim di SMA 8 Denpasar, wawancara tanggal 13 Oktober 2017.

14 Seperti diceritakan oleh Agung, pengurus OSIS bidang ketakwaanan SMAN 8 Denpasar. Nenek dan orang tuanya mempunyai stereotip dan stigma negatif terhadap Islam. Akan tetapi dirinya tidak mewarisi stigma tersebut. Ia berbeda dengan mereka karena pendidikan dan pergaulannya yang lintas agama. Demikian juga dengan Dima, Ketua Osis SMAN 8, yang pernah mempunyai stereotipe negatif tentang Islam dan muslim sebagai pelaku kekerasan. Hal ini ia dapatkan dari media tentang konflik yang terjadi antara muslim dan Hindu di Lampung, ketika ia masih duduk di bangku SMP.

15 Pernyataan ini juga diungkapkan oleh peserta FGD pengurus OSIS pada tanggal 22 November 2017.

16 Istilah Ajeg Bali dipopulerkan pertama kali oleh Gubernur Bali I Dewa Beratha pada waktu peresmian Bali TV pada bulan Mei 2002. Ia mengajak pemirsanya untuk mengajegkan adat dan budaya Bali. Secara konseptual, Ajeg Bali masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan budayawan Bali. Akan tetapi, sepertinya ada kesepakatan untuk menjaga identitas ke-Bali-an. Jika dilihat dari konteks historis, maka Ajeg Bali awalnya merupakan gerakan budaya namun kemudian berkembang kepada gerakan sosial dan politik. Beberapa informasi tentang Ajeg Bali antara lain I Wayan Wesna Astara, *AJEG BALI : Mitos atau Ideologi Pembangunan Mengabdikan Pada Sang Penindas*, Singhadwala, Edisi 44, Februari 2011.; Pamela Allen & Carmencita Palermo, *Ajeg Bali: multiple meanings, diverse agendas*, <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13639810500449115?scroll=top&needAccess=true>, namun sayangnya tidak bisa diakses secara gratis.

*Hindu, adat istiadat budaya, kesenian dan bahasa adalah Bali.*” Di satu sisi Ajeg Bali ini memberikan makna positif bagi pelestarian budaya Bali. Tetapi di sisi lain, ia bermakna negatif bagi kehidupan masyarakat bagi yang majemuk dan plural. Kemajemukan Bali tidak hanya dari agama tetapi juga etnis, suku, dan bangsa. Terlebih lagi jika Ajeg Bali ditunggangi oleh kepentingan politik identitas menjelang Pilkada.

Penonjolan identitas Hindu dan budaya Bali berarti juga menafikan identitas lain yang hidup dan berkembang di Bali. Adanya razia KTP dan KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman) bagi pendatang yang mayoritas beragama non-Hindu dan non-Bali, memunculkan diskriminasi dan intoleransi terhadap pendatang. Bali memunculkan wajah garang bagi masyarakat yang berbeda identitas.

Keharusan memiliki KIPEM yang dilegitimasi oleh pemerintah daerah merupakan ajang pemerasan bagi pendatang yang mengais rezeki ke Bali. Mereka harus membayar biaya sekitar Rp. 50.000 hingga Rp. 200.000 per orang yang dibayar per tiga bulan kepada Banjar selama mereka tinggal di Bali.<sup>17</sup> Hal ini tentu sangat memberatkan bagi mereka yang bekerja di sektor informal seperti tukang ojek, pedagang kaki lima, dan pedagang kecil lainnya.

Penjelasan di atas menunjukkan adanya resistensi dan kontestasi antara Hindu dan Muslim di Bali. Resistensi dan kontestasi itu muncul dari kedua belah pihak, baik Hindu maupun muslim. Di balik isu agama, ada isu politik dan ekonomi. Pilkada dan kesenjangan ekonomi menjadi penyebab rentannya hubungan antar kedua agama.

Penguatan identitas keagamaan tidak hanya terjadi di kalangan Hindu tetapi juga di kalangan muslim Bali. Seperti seruan gerakan salat tepat waktu di masjid, kemunculan majelis-majelis taklim dengan berbagai aliran, kesadaran terhadap makanan halal, serta pembiasaan bersedekah dan membantu sesama.

Jumlah pemeluk Islam di Bali semakin meningkat tidak hanya karena semakin banyak pendatang muslim ke Bali, tetapi juga karena perpindahan

---

17 Informasi dari tukang ojek online yang berasal dari Jawa dan Bu Yuni, pegawai salon di Denpasar yang juga berasal dari Jawa. Jika mereka tidak mempunyai atau belum memperbaharui KIPEM, maka mereka akan didenda oleh pecalang yang datang merazia tempat tinggal para pendatang. Besaran denda sekitar Rp. 150.000. Meskipun demikian, ada juga yang mengelak untuk membayar dengan alasan tidak mempunyai uang. Akan tetapi, menurut KH Mustafa al-Amin, seharusnya KIPEM itu diberikan secara gratis karena sudah ada dana desa. Wawancara tanggal 18 Oktober 2017.

agama (muallaf). Di beberapa masjid terdapat *muallaf center* yang melayani proses pengislaman disertai dengan beberapa persyaratan administratif. Bagi orang Hindu Bali yang masuk Islam, sebagian ada yang diterima dengan baik oleh keluarga, tetapi juga ada yang dibuang oleh keluarganya. Bahkan ada kasus proses penguburan mayatnya dipermasalahkan.<sup>18</sup>

Demikian juga sebaliknya, ada muslim yang masuk Hindu. Proses perpindahan agama yang terjadi di masyarakat Bali menyebabkan adanya keragaman agama dalam keluarga. Keragaman ini tidak selalu baik dan positif, tetapi juga negatif. Dari segi positif, keragaman ini memunculkan sikap toleransi antar anggota keluarga. Tetapi negatifnya, ada kebingungan anggota keluarga (anak) dalam menentukan agama yang dianutnya. Bahkan muncul perselisihan antarorang tua untuk mempengaruhi keyakinan anak masing-masing.

## **2. Kelompok-kelompok Organisasi Keagamaan (Ormas) dan Partai Politik (Parpol)**

Ada beberapa kelompok organisasi keagamaan atau organisasi masyarakat dan politik yang berkembang di Bali baik dari Hindu maupun Islam. Mereka adalah Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang termasuk Islam moderat. Kelompok Islam radikal seperti Salafi, HTI, FPI, dan Ikhwanul Muslimin; kelompok Islam Jihadis seperti JI, JAT dan, kelompok Islam minoritas seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) serta Ahmadiyah dan Syiah Di Wangaya juga berkembang.

Dua organisasi terbesar Islam di Indonesia yang berkembang dengan baik di Bali adalah Muhammadiyah dan NU. Sikapnya yang moderat membuat kedua ormas ini diterima oleh masyarakat Bali. Muhammadiyah mempunyai beberapa amal usaha yang menjadi bagian dari dakwah Islam di Bali. Sekolah-sekolah Muhammadiyah menjadi tumpuan harapan orang tua muslim untuk menyekolahkan anaknya. Selain karena pertimbangan akidah, pergaulan menjadi alasan bagi mereka untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Islam.

---

18 Informasi dari Agung Alit, aktivis kebinekaan Bali dan pemilik Fair Trade Bali. Menurutnya, ketika ibunya yang sudah muallaf meninggal, ia harus dikebumikan secara Hindu atas permintaan neneknya. Meskipun ibunya sendiri telah membuatkan surat wasiat untuk dikuburkan secara Islam. Wawancara tanggal 18 Oktober 2017.

Meskipun bagi sebagian orang, sekolah Islam lebih mahal dibandingkan dengan sekolah negeri atau sekolah Hindu.

Nahdatul Ulama dengan ikon Gus Dur, sangat diterima oleh masyarakat Bali. Kedekatan Gus Dur dengan beberapa tokoh Hindu memberikan makna positif bagi warga NU Bali. Seperti halnya Muhammadiyah, Nahdatul Ulama juga mempunyai lembaga pendidikan yang dikelola secara individu oleh orang-orang NU. Kedua ormas ini sangat berperan dalam membantu umat Islam di Bali terutama terkait dengan hal-hal yang sensitif dan tabu bagi orang Bali Hindu. Misalnya mayat bagi orang Hindu dianggap sebagai pembawa sial. Jika suatu tempat ditempati oleh mayat, maka wajib dibersihkan dengan upacara persembahyangan yang memakan banyak biaya dan tenaga. Oleh karena itu, kedua ormas ini dengan sukarela dan ikhlas mengurus mayat terutama mayat orang Islam.

Sementara untuk organisasi keagamaan Hindu ada PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia). Tugas dari PHDI adalah mengurus masalah sosial keagamaan umat Hindu tidak hanya di Bali tetapi juga di Indonesia. Pengurus PHDI pusat secara umum berasal dari Bali. Karena mayoritas umat Hindu di Indonesia memang tinggal di Bali. Secara struktural, PHDI dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian yang mengurus agama yang terhimpun di dalamnya para pendeta agama Hindu. Tugas mereka adalah memberikan fatwa atau mengurus hal-hal yang terkait dengan agama. Sementara manajemen organisasi dipegang oleh para ahli, birokrat, akademisi, pengacara, pengusaha, dan sebagainya.

Pemuka agama Hindu disebut dengan Sulinggih dan Pemangku. Sulinggih adalah Pandita Hindu yang termasuk di dalamnya Sarwa Sadhaka (Pedende, Sri Mpu, Rsi Bhujangga, dan Sira Mpu) yang bertugas untuk memimpin ritual agama Hindu. Pada upacara besar dipimpin oleh sulinggih atau pedanda yang telah memenuhi persyaratan yakni mediksa, proses penyucian dan medwijati, dan Amari aran. Sementara upacara kecil disetiap Pura dilakukan oleh Pinandita, Jero Gede, atau Jero Mangku. Akan tetapi, dalam tradisi upacara/upacara keagamaan, termasuk Ngaben di Bali, Desa Pakraman tidak menggunakan Pandita tetapi dipimpin oleh Pemangku.

Sedangkan organisasi masyarakat, ada Brigas Bali, Laskar Bali dan Baladika. Organisasi yang lain yaitu KMHDI, Gases, Keluarga Besar Bulldog, Cakrawayu, Eling Nusantara, Puskor Hindunesia, cukup aktif dalam menyuarakan “Ajeg Bali” termasuk mengkritisi budaya dan tradisi lain di luar Hindu. Mereka lah yang berada di balik penolakan wacana wisata syariah di Bali.

Ada beberapa partai politik yang eksis di Bali. Berdasarkan data dari KPU tentang anggota DPRD Kota Denpasar tahun 2014, mereka berasal dari enam partai politik besar yakni PDIP, Nasdem, Golkar, Gerindra, Hanura, dan PKS. Anggota legislatif dari lima partai yang disebutkan awal, semuanya beragama Hindu. Sementara umat Islam diwakili oleh PKS dengan jumlah perwakilan 3 orang. Artinya, dari 45 orang anggota legislatif terpilih, terdapat 3 orang yang beragama Islam.

Adapun anggota legislatif DPRD I Provinsi Bali ada 55 orang yang berasal dari 8 partai politik yakni Nasdem, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, Hanura, dan PKPI. Partai politik yang terbanyak anggotanya adalah PDI Perjuangan dengan jumlah 22 orang. Artinya, PDIP menguasai hampir setengah parlemen Bali.<sup>19</sup>

Di tingkat nasional, DPRD RI Dapil Bali diwakili oleh 9 orang yang berasal dari 4 partai besar yakni PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, dan Gerindra. Sedangkan anggota DPD Dapil Bali ada 4 orang. Salah satu di antara mereka adalah Arya Wedakarna, politisi muda yang sangat lantang menyuarakan Ajeg Bali. Politisi yang juga mantan artis dan cover majalah nasional tersebut mendapatkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat Bali. Salah satu yang dikritisi oleh masyarakat adalah pengakuannya sebagai keturunan Raja Majapahit di Bali. Banyak orang yang mempertanyakan pengakuan tersebut. Tetapi kemunculannya dalam mempertahankan dan memperjuangkan tradisi dan adat Bali juga mendapatkan respon positif terutama di kalangan orang tua. Namun, bagi sebagian aktivis, sepak terjangnya tersebut tidak lain sebagai

---

19 <http://kpu-d-Baliprov.go.id/index.php?pg=lelangdetail&id=50>.

upaya untuk merebut kekuasaan sebagai kandidat calon Gubernur Bali pada Pilkada tahun 2018.<sup>20</sup>

### **3. Karakter Budaya atau Kearifan Lokal**

Meskipun Bali dikenal sebagai daerah pariwisata yang dikunjungi oleh berbagai orang dari seluruh penjuru dunia dengan berbagai/beragam budaya, adat, agama, dan ideologi, tetapi masyarakat Bali tetap bisa melestarikan budaya dan tradisi lokal. Hal itu terjadi karena mereka selektif dalam menyaring pengaruh luar dan mengambil yang cocok dan selaras dengan sistem budaya lokal Bali. Di samping itu, masyarakat Bali mempunyai corak masyarakat yang kolektif, komunal, dan ritualistik.<sup>21</sup>

Nilai-nilai agama dan budaya tidak hanya menjadi pedoman hidup tetapi juga membentuk karakter manusianya melalui pembiasaan dan praktik nilai-nilai tersebut dalam kehidupan. Nilai juga menjadi semacam referensi mengenai kebenaran, kepatutan, dan kebaikan. Jadi, nilai berfungsi sebagai panduan dalam membantu manusia menjadi lebih tertib dan berbudaya. Nilai-nilai yang tidak hanya bersumber dari moral masyarakat tetapi juga berdasarkan nilai-nilai transendental yang bersumber dari agama, adat dan tradisi lokal.

Di antara kearifan lokal Bali adalah Tat Twam Asi (saling asih) dan gotong royong (Menyama Braya). Keduanya adalah bentuk toleransi antar sesama. Menyama Braya (kita bersaudara) adalah sikap toleransi dan saling menghargai bagi masyarakat Bali. Mereka menghargai setiap orang yang datang asalkan tidak mengganggu kehidupan mereka. Karena mereka sangat percaya dengan karma, balasan dari perbuatan seseorang. Jika seseorang berbuat baik, maka ia akan memperoleh kebaikan. Dan sebaliknya, jika seseorang berbuat buruk, maka keburukan akan menyimpannya. Masyarakat Bali biasa hidup berdampingan tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan alam sekitar dan alam supranatural yang tidak kasat oleh mata.

Ketika Menyama Braya memaknai orang lain seperti saudara, maka berarti sebagai bentuk penghargaan dan toleransi terhadap perbedaan. Bentuk

---

20 Informasi dari Dewi (nama samaran), aktivis perempuan Bali.

21 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianBali/article/download/.../1104>.

Menyama Braya dalam tataran praktik kehidupan masyarakat Bali adalah kegiatan pernikahan, pemberian nama, kematian, gotong royong, saling memberi, perayaan agama, dan pengelolaan organisasi (seka dan subak).<sup>22</sup> Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Bali mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor baru yang dianggap lebih relevan dengan kondisi kekinian. Dalam konteks ini, sesuatu yang lama dianggap tidak lagi memuaskan dan digantikan dengan yang baru. Perubahan juga terjadi karena adanya interaksi dengan orang lain. Interaksi tersebut mengakibatkan banyak terjadi perjumpaan budaya dan tradisi yang kemudian saling mempengaruhi satu sama lain. Tidak jarang bersifat etnosentris, dimana orang mempunyai stereotipe tertentu tentang budaya dan orang lain.

Bali saat ini menghadapi berbagai persoalan budaya, agama, politik dan ekonomi. Budaya Bali semakin tergerus oleh pendatang termasuk pada perkawinan antaragama. Agama non-Hindu diperkenalkan dan secara otomatis mengubah budaya setempat. Misalnya jika terjadi perkawinan antara Hindu dengan Muslim, maka banyak hal yang berubah seperti pakaian, makanan, pergaulan, dan sebagainya. Di bidang agama, masjid dan gereja semakin tumbuh dengan pesat meskipun sekarang ada upaya pembatasan izin pembangunan. Persaingan ekonomi juga terjadi dengan para pendatang yang saat ini menguasai aspek-aspek kehidupan informal di Bali.

Perubahan tersebut juga mempengaruhi kearifan lokal Bali tentang Menyama Braya. Jika dulu pendatang dari Jawa dipanggil dengan nyama Jawa atau nak Jawa (saudara Jawa), tetapi sekarang dipanggil dengan jelema Jawa (orang Jawa). Keduanya mempunyai makna yang berbeda. Jika nyama atau nak berarti saudara yang mengandung makna kedekatan hubungan secara emosional, maka jelema bermakna sebaliknya. Ia berarti jauh, tidak ada kedekatan emosional antara mereka. Ini menunjukkan bahwa ada kesan ancaman dari pendatang bagi masyarakat Bali.

Secara umum, ada dua faktor yang mempengaruhi perubahan karakter masyarakat Bali yakni internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya

---

22 [repository.uksw.edu/bitstream/.../D\\_902008005\\_BAB%20VII.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/.../D_902008005_BAB%20VII.pdf).

perubahan budaya agraris kepada jasa industri pariwisata. Sedangkan faktor eksternal adalah industri pariwisata telah mengubah mata pencaharian masyarakat Bali dari pertanian ke industri pariwisata, gaya hidup dari produktif ke gaya hidup konsumtif, pandangan hidup dari kolektif ke individualisme, dan perubahan karakter dari yang dulu ramah, santun, menjadi cenderung beringas, dan suka konflik.<sup>23</sup>

Pergeseran tersebut berdampak pada kehidupan sosial yang anti pluralistik, anti multikultural, yang mengarah kepada diskriminasi terhadap “yang lain” agama, etnis, ras, budaya, dan tradisi. Hal ini juga dikukuhkan dengan penetapan Ajeg Bali yang hanya mengakui agama Hindu dan budaya Bali sebagai identitas ke-Bali-an. Yang dimaksud dengan identitas Bali adalah agama Hindu, Bahasa Bali, kesenian, adat istiadat, arsitektur, dan sistem kemasyarakatan Bali. Termasuk dalam pariwisata yang hanya mengakui adat, tradisi, dan budaya Bali sebagai pariwisata Bali. Tentunya hal ini mempengaruhi Bali yang dikenal sebagai masyarakat yang sebelumnya toleran dan terbuka menjadi intoleran dan tertutup terhadap pendatang dan budaya luar.

## **C. TEMUAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Mayoritas VS Minoritas: Eksklusifitas Pengurus OSIS, Dominasi Ritual Ibadah Hindu dan Intoleransi terhadap Minoritas**

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan tentang adanya dominasi mayoritas terhadap minoritas di sekolah di Denpasar. Yang dimaksud dengan dominasi mayoritas adalah dominasi siswa yang beragama Hindu, sebagai agama mayoritas di Bali terhadap minoritas siswa yang beragama lain seperti Islam, Kristen, Protestan, Budhha, dan Konghuchu. Berdasarkan data sebelumnya bahwa jumlah siswa yang beragama Hindu pada setiap sekolah negeri adalah di atas 90%. Sementara 10% sisanya adalah siswa yang beragama lain. Bentuk dominasi tersebut adalah adanya eksklusifitas pengurus OSIS, dominasi ritual ibadah Hindu serta intoleransi dan diskriminasi terhadap minoritas.

---

23 repository.uksw.edu/bitstream/.../D\_902008005\_BAB%20VII.pdf.

#### a. OSIS: Eksklusifitas Kepengurusan

Secara organisasi, eksistensi OSIS diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Pada Bab III Pasal 4 tentang Organisasi disebutkan bahwa organisasi kesiswaan di sekolah berbentuk organisasi siswa intra sekolah, dan Organisasi kesiswaan tersebut merupakan organisasi resmi di sekolah yang tidak memiliki hubungan organisatoris dengan organisasi kesiswaan di sekolah lain.

OSIS sebagai lembaga intra sekolah yang netral dan semestinya terbuka bagi seluruh siswa dari berbagai etnis, agama, status sosial, dan gender, dalam kenyataannya seringkali hanya mengakomodir siswa dari golongan dan kelompok tertentu. Dalam konteks OSIS di Kota Denpasar, OSIS didominasi oleh siswa yang beragama Hindu.

Ada dua sekolah yang semua pengurus OSISnya beragama Hindu. Sekolah tersebut adalah SMAN 3 dan SMAN 4 Denpasar. Jumlah pengurus di kedua sekolah tersebut adalah 16 orang. Menurut Pak Komang, Pembina OSIS di SMAN 4,<sup>24</sup> sebenarnya tidak ada kesengajaan atas eksklusifitas OSIS di sekolah tersebut. Semuanya berdasarkan mekanisme dan persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah serta tanpa ada upaya untuk mengabaikan siswa dari agama lain. Menjadi pengurus OSIS, selain ada kemauan dari diri sendiri, dukungan orang tua, juga harus didukung oleh pengalaman sebelumnya ketika di SMP. Ketika penerimaan siswa baru, ada wawancara khusus tentang potensi, bakat, serta pengalaman berorganisasi siswa. Dan secara kebetulan, siswa yang memenuhi persyaratan adalah siswa Hindu. Selain karena mayoritas, juga karena siswa non-Hindu jarang ada yang mendaftar sebagai pengurus. Bayu, ketua OSIS SMA 3 menambahkan bahwa bisa jadi, suatu saat siswa non-Hindu akan menjadi ketua OSIS seperti yang pernah ada sebelumnya bahwa pernah ada ketua OSIS muslim di SMAN 3. Akan tetapi, menurutnya, pengurus OSIS non-Hindu akan mengalami kesulitan serta tidak bisa bekerja secara optimal karena tugas OSIS secara umum adalah

---

24 Komang, Pembina Osis SMAN 4 Denpasar, FGD Kota Denpasar, 22 Nopember 2017.

untuk membantu program sekolah, utamanya adalah terkait dengan kegiatan keagamaan Hindu.

Meskipun dalam tata tertib tentang kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 3 tidak menyebutkan tentang agama, pada pasal 14.4 disebutkan bahwa pengurus OSIS terdiri dari 16 orang dengan masa jabatan satu tahun dan pemilihannya dilaksanakan secara demokratis dengan memperhatikan: kemampuan akademis, kemampuan emosional, kemampuan sosial, dan kemampuan moral spiritual dengan kategori amat baik. Pertanyaannya, apakah tidak ada siswa non-Hindu yang mempunyai kemampuan seperti yang telah disebutkan di atas? Jawabannya pasti belum tentu. Namun kenyataannya, siswa non-Hindu tidak ada yang aktif di OSIS. Mereka aktif di beberapa organisasi ekstra seperti jurnalistik atau PMR. Misalnya Bagus, siswa muslim yang memilih aktif di Jurnalistik.

Berbeda dengan kepengurusan OSIS di kedua sekolah negeri di atas yang eksklusif, OSIS di dua sekolah lainnya yakni di SMAN 2 dan SMAN 8 cenderung inklusif. Inklusifitas tersebut dapat dilihat dari susunan kepengurusan yang mengakomodir siswa non-Hindu meskipun mereka hanya sebagai anggota. Sementara itu pengurus inti sebagai pemegang jabatan strategis juga Hindu. Jumlah pengurus non-Hindu di OSIS SMAN 2 adalah kurang dari 10 orang dari jumlah keseluruhan pengurus OSIS sebanyak 50 orang. Sedangkan di SMAN 8, dari 43 orang pengurus OSIS, ada 4 orang yang non-Hindu. Inklusifitas SMAN 8 sangat terlihat di kepengurusan MPK (Majlis Perwakilan Kelas). Ketua MPK adalah seorang perempuan yang beragama Islam. Ini menunjukkan bahwa ketika semua siswa diberikan kesempatan yang sama tanpa melihat latar belakang agama, maka jabatan strategis bisa diraih oleh siapapun yang mempunyai kapasitas dan kemampuan. Semuanya tergantung kepada pemilih.

Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan di OSIS juga bervariasi. Komposisi yang bagus terlihat di SMAN 4 Denpasar, dimana ketua OSIS adalah perempuan dan pengurus OSIS berimbang antara laki-laki dan perempuan, 8 laki-laki dan 8 perempuan. Meskipun secara keseluruhan, jumlah siswa perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah siswa

laki-laki kecuali di SMAN 2 Denpasar. Tidak jarang terjadi persaingan yang ketat antara laki-laki dan perempuan untuk meraih posisi sebagai ketua OSIS. Hal ini terjadi di OSIS SMAN 2 dan MA Al-Ma'ruf. Ketua OSIS terpilih SMAN 2 sebelumnya harus bersaing ketat dengan seorang perempuan yang juga mempunyai kualitas dan kapasitas yang sama. Sedangkan di MA Al-Ma'ruf, persaingan antara laki-laki dan perempuan akhirnya dimenangkan oleh perempuan.

**b. Dominasi Ritual Agama Hindu melalui Bidang Ketakwaan**

Dalam kepengurusan OSIS, ada sebuah bidang khusus yang menangani agama. Bidang tersebut adalah Bidang Ketakwaan yang dikenal juga dengan bidang 1. Di antara bidang yang lain, bidang ini mempunyai tugas yang cukup berat karena terkait dengan kegiatan ritual keagamaan di sekolah.

Masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, sangat memelihara tradisi dan budaya yang bersumber dari ajaran Hindu. Tidak terkecuali di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya sebagai salah satu wadah untuk melestarikan budaya tersebut. OSIS juga bertugas untuk menjaga tradisi tersebut melalui bidang I, Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun dari identitas bidang lebih umum dan tidak menyangkut kepada salah satu agama, tetapi bidang ini hanya mengurus keagamaan Hindu. Tugas utama mereka adalah mengoordinasikan tugas peribadatan sehari-hari maupun hari besar agama Hindu lainnya.

Tugas harian dari bidang ini adalah membuat jadwal harian bagi para siswa untuk memberikan sesajen dan berdoa di Padmasana, Pelinggih dan Patung Ganesha. Para siswa yang mendapatkan jadwal harus datang lebih awal ke sekolah. Atau ketika hari Senin, pada waktu siswa lain sedang upacara bendera, mereka melaksanakan tugas yang didampingi oleh seorang pembina. Misalnya, Di SMAN 3 Denpasar.<sup>25</sup> Peneliti melihat dua orang siswi dan satu pembina lengkap dengan baki dari bambu yang berisi sesajen berupa kumpulan bunga-bunga berwarna warni yang diwadahi daun kelapa yang sudah dibentuk persegi empat. Mereka membawanya dengan tangan kiri. Mereka juga mengikat selendang yang berwarna kuning atau merah di pinggang. Mereka berjalan beriringan, dan secara bergantian berdoa

---

25 Observasi tanggal 8 Oktober 2017.

dan memberikan sesajen di tempat-tempat peribadatan tersebut. Sementara di sekolah lain, peneliti melihat siswa berdoa baik sendiri-sendiri maupun berkelompok di Padmasana atau di Patung Ganesha.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa SMAN 3 adalah sekolah negeri yang mempunyai karakteristik ke-Hindu-an yang sangat kental. Di sini ada Padmasana yang cukup besar dan megah yang terletak di depan halaman upacara bendera. Selain itu, setidaknya ada lima pelinggih yang terletak di depan gerbang sekolah, di samping pojok pos satpam, depan samping laboratorium bahasa yang terletak di samping ruang kepala sekolah, guru dan komite sekolah. Pelinggih yang lain terletak di samping kantin bagian belakang.

Pemeliharaan tradisi Hindu juga melalui kegiatan ekstra lainnya di bidang seni. Seni Bali mempunyai dua macam yakni seni sebagai kreasi manusia dan seni sebagai ritual sakral yang terkait dengan ibadah. Seni yang dikembangkan di sekolah adalah seni tabuh, sandia gita, mejejahitan, dan kreket. Mejejahitan adalah pembuatan upakara atau sarana prasarana untuk upacara keagamaan di Bali. Misalnya canang, sampian, daksina. Nama-nama untuk masing-masing kegiatan juga sangat dipengaruhi oleh bahasa sanskerta seperti Sunari Kencana untuk nama kelompok seni tari, Buddhi Citta Sandhi nama seni tabuh, & shindu.

Di SMAN 3, pembiasaan tradisi keagamaan dianggap sebagai salah satu upaya untuk menanamkan pendidikan karakter kepada siswa. Pendidikan karakter juga diasah melalui olahraga naik gunung. Para siswa wajib naik empat gunung di Bali dan satu gunung tidak diwajibkan. Keempat gunung wajib tersebut adalah Gunung Batur (1.717 meter) yang berlokasi di Bangli dan pernah meletus sekitar 30.000 tahun lalu. Gunung Batur meletus dan menghasilkan bencana yang dahsyat di bumi. Gunung Merbuk (1.356 meter) di Jembrana, Gunung Patas (1.414 meter) di Buleleng, dan Gunung Seraya (1.058 meter) di Karangasem. Satu gunung yang tidak wajib didaki adalah Gunung Agung yang saat ini sering beraktivitas. Gunung Agung merupakan titik tertinggi di Bali setinggi 3.142 meter. Gunung berapi ini terakhir meletus

pada Maret 1963. Filosofi dari naik gunung adalah adanya kebersamaan, kemandirian, kesabaran, olah fisik dan psikis.

Kegiatan lainnya yang dilaksanakan adalah kegiatan olah nafas/yoga. Dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah SMAN 3 Denpasar tentang tata etika warga sekolah, pada pasal 8 tentang pakaian sekolah poin 8.3.d. disebutkan bahwa kegiatan olah nafas/yoga dilaksanakan sesuai dengan jadwal menggunakan pakaian atas kaos identitas resmi sekolah dan bawah menggunakan celana olah nafas dengan alas kaki sepatu hitam bukan sandal.

Yoga tidak hanya menjadi kegiatan wajib di SMAN 3, tetapi juga beberapa sekolah lainnya. Di salah satu sekolah swasta di Denpasar, kegiatan olah nafas ini pernah diprotes oleh orang tua murid yang menganggap bahwa yoga merupakan bagian dari peribadatan agama Hindu. Orang tua murid tersebut dipanggil dan diberikan penjelasan tentang kegiatan yoga tersebut. Sekolah juga memberikan solusi jika orang tua masih keberatan. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah jika orang tua keberatan dengan kegiatan sekolah tersebut, maka ia bisa mencari sekolah lain untuk anaknya. Akan tetapi setelah diberikan penjelasan, orang tua menerima dan mengikuti tata tertib sekolah.<sup>26</sup> Di SMAN 3 ada peringatan pendidikan karakter yang diperingati melalui kegiatan upacara pendidikan karakter. Pada hari tersebut, para siswa wajib menggunakan pakaian pramuka.

Pembiasaan terhadap praktik keagamaan tidak hanya tampak di SMAN 3 Denpasar, tetapi juga di sekolah lainnya. Di SMAN 4 Denpasar, peneliti melihat beberapa siswa dan siswi berkelompok sedang khusyuk' sembahyang di Padmasana yang terletak di samping depan sekolah. Di SMAN 2 juga beberapa siswa dan siswi secara bergantian bersembahyang ketika siswa yang lain sedang istirahat. Mereka sembahyang secara individual maupun berkelompok.

Bidang Ketakwaan tidak hanya mengordinir ritual keagamaan harian, tetapi juga pada hari besar Hindu di sekolah. Secara umum, ada tiga macam kegiatan keagamaan di sekolah negeri di Denpasar, ritual harian, bulanan dan tahunan. Untuk ritual harian, yakni berupa pemberian sesajen di Padmasana

---

26 Informasi dari Bapak Sujana, Pengawas SMA Provinsi Bali. Wawancara tanggal 20 Oktober 2017.

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Kegiatan bulanan terkait dengan Hari Purnama Tilem (Hari Purnama adalah ketika bulan sedang purnama. Sedangkan Tilem adalah kebalikan dari purnama, yakni ketika bulan sedang tidak terlihat sama sekali).

Pada Hari Purnama, diadakan kegiatan budaya dengan menggunakan pakaian adat Bali. Di SMAN 3 Denpasar, ada beberapa ketentuan tentang pakaian adat tersebut yakni:

- Bagi siswa putri menggunakan kamen, selendang, rambut dijalin dengan rapi dan kebaya berbahan kain yang tidak transparan;
- Bagi putra menggunakan kamen, saput, selendang, udeng, dan baju berkerah bukan kaos polo;
- Tidak menggunakan alas kaki berupa sandal jepit.

Sedangkan bagi siswa non-Hindu, SMAN 4 Denpasar menetapkan lebih longgar. Mereka tetap menggunakan pakaian adat Bali meski tidak selengkap siswa Hindu. Berbeda dengan SMAN 4, siswa SMAN 2 yang non-Hindu tidak diwajibkan menggunakan pakaian adat Bali tetapi mereka hanya menggunakan pakaian sekolah biasa. Sementara pada Hari Tilem, siswa menggunakan pakaian sekolah sesuai hari dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebenarnya sekolah mempunyai aturan tentang pakaian sekolah. Salah satu aturan tersebut adalah dilarang menggunakan pakaian identitas agama. Pertanyaannya adalah apakah pakaian adat Bali bukan merupakan pakaian agama? Apalagi pakaian tersebut digunakan ketika hari raya agama Hindu, Hari Purnama yang dirayakan dengan persembahyangan Hindu. Terkait dengan hal ini, Waka Kesiswaan SMAN 4 mengatakan bahwa pakaian tersebut bukan pakaian agama tetapi merupakan pakaian adat, tepatnya pakaian adat yang digunakan untuk upacara keagamaan. Penggunaan pakaian adat ini sempat menimbulkan pertanyaan dari orang tua murid yang muslim. Apakah Islam membolehkan muslim untuk menggunakan pakaian adat tersebut? Sepertinya aturan ini memang dibuat untuk melarang penggunaan identitas keagamaan tertentu. Dalam hal ini adalah Islam yang mewajibkan setiap muslimah yang sudah baligh untuk mengenakan jilbab.

Ritual tahunan bagi siswa sekolah adalah peringatan Hari Saraswati dan Siwalatri. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Saraswati adalah Dewi Ilmu Pengetahuan. Patung Dewi Saraswati yang biasanya terletak di depan sekolah atau berdampingan dengan Padmasana adalah patung seorang putri cantik jelita yang memakai mahkota, lengkap dengan kalung dan gelang, dan berselendang. Patung yang berwarna putih atau putih keemasan tersebut digambarkan sedang memegang dawai dan berdiri di atas angsa dan bunga teratai. Di pinggul putri cantik tersebut disematkan kain yang berwarna kuning. Peringatan Hari Saraswati jatuh pada hari Sabtu dihitung berdasarkan tahun Wuku, tahun Bali yang jatuh setiap tujuh bulan pada tahun masehi atau enam bulan tahun Bali. Masyarakat Hindu Bali mempunyai sistem kalender tersendiri. Jika satu bulan masehi sebanyak 29-31 hari, maka dalam kalender Bali sebanyak 35 hari sebulan. Sehingga 6 bulan Bali sama dengan 7 bulan masehi.

Pada Hari Saraswati, diadakan persembahyangan di Padmasana sekolah dan hanya diikuti oleh siswa Hindu. Meskipun menurut penuturan Pak Fathurrahman, Guru Agama Islam SMAN 7<sup>27</sup>, bahwa ada juga siswa muslim yang ikut sembahyang. Sementara siswa lainnya yang non-Hindu diliburkan. Untuk memperingati hari yang sangat penting ini, sekolah membutuhkan waktu sekitar dua hari. Satu hari untuk persiapan dan satu hari untuk persembahyangan. Untuk mempersiapkan hari yang selalu jatuh pada hari Sabtu ini, pada hari Jumat, seluruh siswa baik Hindu maupun non-Hindu bekerjasama dan bergotong royong. Ada yang iuran secara material dan ada juga yang membantu dengan tenaga.

Selain berdoa di padmasana setiap pagi, para siswa melakukan persembahyangan bersama di kelas atau yang dikenal dengan Tri Sandya. Tri Sandya ini dilaksanakan sebelum jam pelajaran dimulai. Mereka berdoa sambil berdiri untuk keselamatan dan kelancaran sekolah. Sementara bagi siswa yang beragama lain, mereka ikut berdiri dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing.

---

27 Wawancara tanggal 20 Oktober 2017.

Berbagai upacara keagamaan Hindu yang diselenggarakan di sekolah baik yang harian, mingguan, bulanan maupun tahunan, dengan berbagai persiapan dan upacara yang dilakukan, membutuhkan waktu, tenaga dan materi yang tidak sedikit. Pada masyarakat Hindu Bali, sekolah adalah salah satu tempat untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Bali dan agama Hindu. Namun, bagaimana dengan kegiatan keagamaan bagi siswa non-Hindu?

Kegiatan keagamaan siswa non-Hindu bukannya tidak ada tetapi hanya sedikit. Bagi siswa muslim, kegiatan keagamaan diadakan pada waktu Idul Adha dan Bulan Ramadhan. Tetapi itu juga kegiatan yang dilakukan oleh perkumpulan siswa muslim yang ada di sekolah. Di SMAN 2 dan SMAN 4 ada kerohanian Islam yang bersifat informal. Rohis tersebut dibimbing oleh para guru yang beragama Islam. Di SMAN 2 Denpasar ada Rismanda (Remaja Islam SMAN 2) dan SMAN 4 ada Krisma (Kelompok Remaja Islam SMAN 4).

Baik Rismanda maupun Krisma, seluruh anggotanya adalah siswa muslim di SMAN 2 dan SMAN 4 Denpasar. Ia mempunyai struktur kepengurusan tersendiri seperti organisasi lain. Kepengurusan terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus dipilih oleh internal mereka sendiri. Kegiatan rutin Krisma adalah pengajian bulanan dan pesantren kilat. Pengajian diadakan setiap bulan yang dilakukan secara bergiliran dari rumah ke rumah. Dalam pengajian tersebut, ada penceramah yang diundang untuk memberikan ceramah agama. Penceramah dicarikan sendiri oleh tuan rumah, jika tidak ada, maka pengurus Krisma yang berusaha untuk mencarikannya. Materi pengajian yang disampaikan tidak hanya tentang ibadah tetapi juga tentang persoalan kekinian, atau sesuai dengan permintaan anggota. Pengajian ini selain menjadi wadah bersilaturahmi antar siswa juga sebagai media pembinaan dari guru agama. Guru agama yang juga menjadi pembina mereka tetap diundang untuk mengikuti pengajian. Sedangkan pesantren kilat diadakan setiap bulan puasa selama tiga hari berturut-turut. Pesantren kilat ini dilaksanakan di sekolah dan dibimbing oleh guru agama.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Rismanda. Mereka melakukan kegiatan pada hari besar Islam. Misalnya perayaan Idul Adha dan bulan

Ramadhan. Pada waktu Idul Adha, mereka juga berkorban dengan memotong kambing di sekolah. Umumnya umat muslim berkorban dengan sapi atau kambing. Akan tetapi mereka memilih kambing, karena sapi dalam tradisi Hindu adalah binatang yang disucikan. Ia tidak dimakan sebagai bentuk penghormatan terhadap binatang tersebut. Para siswa iuran untuk membeli kambing. Daging kambing dipotong dan dibagikan kepada warga sekolah. Sementara untuk bulan Ramadhan, mereka mengadakan buka puasa bersama dengan mengundang pihak sekolah. Hal yang sama juga dilakukan di SMAN 8. Meskipun mereka tidak mempunyai perkumpulan atau organisasi seperti Krisma dan Rismanda, tetapi mereka yang beragama Islam juga merayakan hari besar Islam di sekolah, dengan mengadakan pemotongan hewan kurban dan buka bersama pada bulan puasa.

Atas inisiatif dari MGMP, dibentuk perkumpulan Rohis se-Kota Denpasar pada tahun ini. Selain bertujuan untuk silaturahmi, perkumpulan rohis ini juga dihajatkan untuk melakukan kegiatan keagamaan bersama terutama untuk memperingati hari besar Islam. Untuk memperingati maulid Nabi pada tahun ini, mereka akan mengadakan berbagai perlombaan agama.

Akan tetapi, secara legal formal, Rohis tidak mempunyai kekuatan sebagaimana halnya OSIS Bidang Ketakwaan yang hanya mengurus keagamaan Hindu di sekolah. Secara organisasi, Rohis Rismanda dan Krisma bersifat nonformal dan hanya perkumpulan biasa. Eksistensinya tergantung kepada pengurus dan anggota serta guru agama Islam yang sekaligus menjadi pembinanya.

### **c. Pandangan tentang Terorisme**

Peneliti tidak menemukan adanya potensi gerakan radikal di sekolah baik di sekolah negeri maupun di madrasah. Siswa dari kedua madrasah, Al-Ma'ruf dan Tawakkal mempunyai pandangan yang sama tentang tentang radikalisme dan terorisme. Happy, ketua OSIS Al-Ma'ruf tidak setuju dengan pelabelan teroris dan radikal kepada Islam.<sup>28</sup> Menurutnya, semua orang bisa terlibat aksi radikal dan teror tanpa memandang agama, suku, bangsa, dan etnis. Ia mengungkapkan ketertarikannya pada isu radikalisme ketika ia menonton

---

28 Wawancara tanggal 2 Oktober 2017.

salah satu televisi nasional yang menayangkan isu tersebut. Ia termasuk salah satu siswa yang sangat kritis menanggapi isu-isu kontemporer yang terkait dengan Islam. Dan ia sangat tidak setuju jika terorisme dan radikalisme selalu dikaitkan dengan Islam. Islam cinta damai, katanya. Demikian juga dengan Firman, ketua OSIS MAN Tawakkal.<sup>29</sup> Ia sependapat dengan Happy yang menolak radikalisme dikaitkan dengan Islam. Pembekalan yang dilakukan oleh Polda Bali tentang Radikalisme tentunya menambah wawasan dan pengetahuan mereka tentang isu tersebut. Sekaligus juga mereka kritis dengan cara bertanya tentang contoh kasus terorisme dan radikalisme di masyarakat Bali. Narasumber dari Polda pun memberikan jawaban bahwa Bom Bali adalah salah satu contohnya.

Sosialisasi tentang Radikalisme di madrasah juga mendapatkan tanggapan dari kepala sekolah MAN Tawakkal.<sup>30</sup> Seharusnya sosialisasi tersebut tidak hanya diberikan kepada siswa madrasah tetapi juga siswa lainnya di sekolah negeri dan swasta lainnya yang tidak berlabelkan agama Islam.

Peneliti sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tersebut. Terutama untuk memberikan pemahaman bahwa teroris dan radikal tidak menganut agama dan etnis tertentu. Misalnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Kasus teror di Amerika dan Inggris yang menewaskan beberapa orang yang tidak bersalah ternyata dilakukan oleh warga negara Amerika yang mempunyai rekam jejak sebagai orang baik. Tetapi mereka tidak disebut dengan teroris karena bukan Islam. Karenanya sangat penting untuk mengampanyakan bahwa Islam bukan teroris dan teroris bukan Islam.

Stigma dan stereotip bahwa Islam adalah teroris juga ditemukan di stakeholder dan siswa sekolah. Adalah menarik ketika peneliti bertanya kepada salah satu Waka Kesiswaan tentang radikalisme.<sup>31</sup> Ia langsung menyatakan bahwa “teroris itu tidak ada di Bali. Berbeda dengan di Jawa yang banyak pesantrennya...” Pernyataan ini mengisyaratkan secara tidak langsung bahwa ia juga memahami bahwa teroris itu identik dengan pesantren dan Islam. Ini menunjukkan bahwa sebagian orang berpandangan bahwa Islam

---

29 Wawancara tanggal 5 Oktober 2017.

30 Wawancara tanggal 5 Oktober 2017.

31 N (inisial), Wawancara tanggal 8 Oktober 2017.

adalah teroris. Dan orang tersebut adalah orang yang berpendidikan tinggi dan terpelajar.

Sementara di kalangan siswa, ada perubahan pandangan tentang stereotipe tersebut. Dima, ketua OSIS SMAN 8<sup>32</sup> mengatakan bahwa sebelumnya ia mempunyai pandangan yang negatif tentang Islam. Peristiwa pertikaian di Lampung yang melibatkan masyarakat Hindu dan Muslim menjadi penyebabnya. Ia memandang bahwa orang Islam adalah jahat. Tetapi seiring dengan waktu dan pendidikan yang semakin tinggi, pandangannya tentang Islam berubah. Menurutnya, pelaku kekerasan, radikalisme dan terorisme adalah oknum yang menganut agama tertentu. Karena oknum, maka hanya pelakunya yang disalahkan bukan agama yang dianut oleh agama pelaku apalagi orang lain yang seagama yang tidak terkait dengan pelaku tersebut.

Sependapat dengan Dima, Agung, Pengurus OSIS Bidang Keimanan dan Ketakwaan SMAN 8 Denpasar<sup>33</sup> menyatakan bahwa ia tidak setuju jika Islam dikaitkan dengan teroris. Meskipun sebelumnya ia juga berpendapat bahwa Islam itu radikal. Stigma negatif tentang Islam ia dapatkan dari rumah. Nenek dan ayahnya memiliki stereotip tentang Islam. Hal ini mungkin karena mereka memiliki pengalaman yang buruk tentang Bom Bali yang dilakukan oleh oknum muslim. Namun seiring dengan semakin tinggi tingkat pendidikannya, ia mempunyai pendapat yang berbeda dengan generasi pendahulunya. Pandangan ini juga sama dengan pengurus OSIS lainnya. Mereka bisa membedakan antara oknum pelaku dengan agama yang dianut oleh pelaku.

#### **d. Intoleransi Agama**

Secara umum, ada bentuk intoleransi yang dihadapi oleh siswa muslim terkait dengan kewajiban menjalankan perintah agama di sekolah. Persoalan tersebut adalah tentang Salat Zuhur, Salat Jumat, ruangan untuk Salat, pelajaran agama di luar jam belajar dan pemakaian jilbab.

Sebagai muslim, siswa wajib melaksanakan salat lima kali sehari semalam. Sementara kegiatan belajar berlangsung jam 07.00-14.45. Artinya ada waktu Salat Zuhur yang harus dilaksanakan sebagai seorang muslim.

---

32 Wawancara tanggal 13 Oktober 2017.

33 Wawancara tanggal 13 Oktober 2017.

Waktu Salat Zuhur berlangsung sekitar jam 12.30. Memang, ada waktu yang cukup panjang untuk melaksanakan Salat Zuhur karena waktunya cukup lama sekitar tiga setengah jam hingga jam 15.00. Oleh karena itu, sebagian siswa muslim memilih untuk Salat di rumah atau di waktu istirahat sekolah. Muthia dan Marissa, anggota Rismanda SMAN 2<sup>34</sup> memilih untuk Salat di rumah karena tidak ada kesempatan untuk Salat Zuhur di sekolah. Demikian juga dengan Bagus, siswa SMAN 3. Ia lebih sering Salat Zuhur di rumah. Dari sekitar 7 jam lebih waktu belajar, hanya ada waktu untuk istirahat satu kali, yakni jam 09.30.00-10.00. Persoalan waktu Salat inilah yang menyebabkan Ibu Endah, salah seorang orang tua murid memilih untuk memindahkan anaknya dari sekolah negeri ke sekolah Islam.

Lain halnya dengan SMAN 4, ada waktu istirahat siang berlangsung selama 30 menit dari jam 12.00-12.30. Karena sekolah tersebut menerapkan Penguatan Pendidikan Karakter, masuk dari jam 07.17 hingga 16.00. Para siswa muslim diberikan waktu untuk Salat di masjid terdekat sekolah. Menurut Anya, salah satu siswa muslim di SMAN 4, ia dan kawan-kawan pergi Salat ke masjid dekat sekolah. Mereka bisa membagi waktu istirahat setengah jam tersebut untuk Salat dan makan siang.

Dari empat sekolah negeri yang menjadi lokasi penelitian, ada satu sekolah yang menyediakan ruang untuk Salat atau Musala di sekolah. Di SMAN 2 Denpasar, Musala terletak di belakang ruang guru dengan ukuran skitar 3x3 meter. Di dalamnya tersedia karpet Salat dengan gambar masjid berwarna hijau, dan beberapa mukena yang digunakan oleh para siswi untuk Salat. Sebelumnya, musala ini terletak di lantai atas sekolah. Setelah ada renovasi, musala dipindahkan ke bawah. Musala ini telah ada sejak tahun 1998. Artinya, sekolah telah menyediakan tempat Salat bagi siswa muslim sejak lama, jauh sebelum kasus jilbab di sekolah ini mencuat menjadi isu nasional.

Satu lagi sekolah yang menyediakan tempat untuk Salat, khususnya Salat Jumat, yakni SMAN 7 Denpasar. Sekolah ini tidak menjadi lokasi penelitian. Akan tetapi atas informasi dari Pak Syamsuddin bahwa di sekolah ini ada

---

34 Wawancara tanggal 12 Oktober 2017.

juga guru agama Islam, maka peneliti berusaha untuk menghubungi Pak Fathurrahman, guru PAI di sekolah tersebut. Di sekolah ini terdapat aula yang cukup besar yang dipergunakan untuk Salat Jumat bagi siswa muslim. Jika dilihat dari gambar yang terdapat di lantai, aula ini dijadikan sebagai tempat bermain bulu tangkis. Dengan luas aula tersebut, tempat ini mampu menampung sekitar 160 orang siswa muslim di sekolah tersebut. Mereka Salat Jumat dengan dipandu dan dibimbing oleh Pak Fathurrahman. Siswa laki-laki secara bergiliran menjadi imam dan khathib. Meskipun seperti yang dikatakan oleh Pak Fathurrahman bahwa bacaan Salat mereka masih belum lancar, tetapi kemauan siswa untuk belajar agama sangat besar. Yang mengikuti Salat Jumat juga bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Sebelumnya sekolah memberikan ruang sendiri untuk Salat di ruang lantai atas. Tetapi karena ada renovasi gedung, ruang tersebut digunakan oleh guru dan tempat Salat pindah ke tempat ini. Di luar aula, terdapat satu lemari khusus untuk menyimpan alat dan perlengkapan Salat seperti mukena, sarung, peci, dan karpet. Aula tersebut digunakan untuk Salat sejak tahun 2005. Pada awalnya, Pak Fathurrahman meminta kepada sekolah untuk menyediakan ruangan untuk praktik ibadah. Kemudian diperbolehkan untuk digunakan untuk Salat Jumat.<sup>35</sup>

Yang menarik adalah di SMAN 8, meskipun sekolah tidak menyediakan fasilitas ibadah untuk siswa muslim, tetapi kepala sekolah memberikan keleluasaan kepada siswa muslim untuk melakukan ibadah di sekolah dengan menggunakan ruangan yang ada. Beliau mempersilahkan kepada murid muslim untuk menggunakan ruangnya, ruang kelas, atau aula sekolah. Meskipun demikian, Mawar, siswa muslim lebih memilih untuk melakukan Salat di rumah.<sup>36</sup>

Terkait dengan Salat Jumat, sekolah mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Beberapa sekolah memberikan dispensasi khusus siswa muslim untuk Salat Jumat tetapi ada juga sekolah yang jam belajarnya berakhir sebelum tiba waktu Salat Jumat. Di SMAN 2 Denpasar, jam pelajaran pada hari Jumat

---

35 Wawancara tanggal 20 Oktober 2017.

36 Wawancara tanggal 13 Oktober 2017.

berakhir pada jam 12.00 siang sehingga siswa muslim langsung bisa Salat Jumat di masjid terdekat sekolah. Demikian juga dengan SMAN 4, jam belajar berakhir pada jam 12.00 tetapi setelah itu, ada pengayaan dan pembinaan dari wali kelas. Bagi siswa muslim yang akan Salat Jumat, harus seizin guru BK. Izin untuk Salat juga dilakukan oleh siswa SMAN 3. Siswa muslim SMAN 3 melakukan Salat Jumat di masjid terdekat dengan sekolah yakni masjid at-Taqwa Polda Bali yang terletak sekitar 1 km dari sekolah. Ada *affirmative action* yang diperoleh dari guru pelajaran dalam waktu yang bersangkutan. Guru memberikan toleransi kepada siswa untuk melaksanakan Salat tetapi juga sekaligus menjadi persoalan bagi murid karena ia akan ketinggalan pelajaran. Sedangkan jam belajar pada SMAN 8 pada hari Jumat hingga jam 12.30. Artinya, siswa muslim tidak bisa melaksanakan Salat Jumat karena waktu Salat telah lewat.

Jam belajar yang melewati waktu Salat Jumat tentunya menyulitkan bagi siswa untuk melaksanakan ibadah. Ditambah lagi dengan adanya aturan untuk izin kepada guru BK seperti aturan di SMAN 4. Hal ini pernah menjadi masalah di SMP 10 Denpasar. Orang tua menuntut sekolah untuk menyediakan waktu Salat untuk anaknya yang muslim. Tetapi aturan tidak bisa diubah, dan akhirnya anak tersebut pindah sekolah ke luar Bali.<sup>37</sup>

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa murid wajib mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Guru agama disediakan oleh sekolah. Akan tetapi tidak semua sekolah mempunyai guru agama. Guru Agama Islam di tingkat SMA di Denpasar hanya ada dua orang yakni di SMAN 2 dan SMAN 7 Denpasar. Pak Fathurrahman selain mengajar agama Islam di SMAN 7, ia juga mengajar pelajaran yang sama di SMAN 3. Jika tidak ada, maka sekolah memanggil guru agama dari luar sekolah. Di SMAN 4, guru agama Islam adalah tokoh agama di kampung dekat sekolah.

Pengadaan guru agama non-Hindu di sekolah negeri terkendala dengan biaya untuk menggaji guru yang bersangkutan. Menurut Pak Ariful Akmal, pengawas PAI sekolah negeri, kebijakan pemerintah yang tidak membolehkan

---

37 Informasi dari Pak Ariful Akmal, Pengawas PAI Kota Denpasar. Wawancara tanggal 20 Oktober 2017.

sekolah untuk memungut biaya pendidikan dari orang tua menyulitkan sekolah untuk menggaji guru termasuk guru agama. Hal ini berimbas pada ketidakadaan guru agama yang tersedia di sekolah. Sementara siswa hanya mendapatkan pelajaran agama dari sekolah. Sebagaimana diungkapkan oleh Nabil, siswa SMA 2. Meskipun Pak Syamsuddin sebagai guru agama di SMAN juga memberikan pelajaran agama tambahan di rumah siswa jika ada permintaan dari orang tua.

Pelajaran agama non-Hindu diberikan di luar jam pelajaran. Ketika para siswa pulang sekolah, siswa muslim mendapatkan mata pelajaran dari guru agama. Durasi pelajaran agama adalah 3x45 menit sesuai dengan jumlah jam pelajaran Hindu. Pelajaran agama diberikan berdasarkan rombongan belajar dengan jumlah murid minimal 20 orang.<sup>38</sup> Mereka dibagikan berdasarkan kelas. Kelas X, XI, dan XII mendapatkan pelajaran agama secara terpisah. Sementara siswa Kristen mendapatkan pelajaran agama di gereja pada hari minggu. Akan tetapi di SMAN 7 Denpasar kelas XII, pelajaran agama Islam dilaksanakan bersamaan dengan waktu pelajaran agama Hindu. Siswa Hindu menerima pelajaran di dalam kelas, sedangkan siswa muslim di luar kelas, di perpustakaan atau di bale bengong. Jumlah siswa muslim per kelas yang hanya 2-5 orang, tidak banyak diisi dengan materi pelajaran agama tetapi lebih banyak diskusi antara siswa dan guru. Terkadang juga, pada saat itu, para siswa curhat kepada guru tentang keluarganya seperti perbedaan agama orang tua yang menyebabkan anak bingung untuk memilih dan menentukan agamanya. Ternyata kawin beda agama yang banyak terjadi di Denpasar atau Bali pada umumnya menyisakan masalah bagi anak-anak. Jadi, pelajaran agama lebih banyak diberikan dalam bentuk diskusi terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh siswa. Pelajaran agama non-Hindu yang diberikan sepulang sekolah atau pada hari libur, membuat tidak semua siswa mengikuti pelajaran agama tersebut. Meskipun semua siswa mendapatkan nilai pelajaran agama di raport.

Pelajaran agama tidak hanya diberikan kepada siswa di sekolah negeri tetapi juga hal itu berlaku di sekolah swasta. Di sekolah Saraswati, yang

---

38 Informasi dari Pak Syamsuddin, guru Agama Islam SMAN 2 Denpasar. Wawancara tanggal 18 Oktober 2017.

bernaung di bawah yayasan Hindu, para siswa mendapatkan pelajaran agama Islam pada hari minggu ketika siswa non-muslim libur. Kebetulan salah satu pengajar agama Islam di sana adalah Pak H. Sukirman, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bali. Beliau sudah mengajar di yayasan tersebut sejak tahun 1980-an.<sup>39</sup> Sementara di salah satu sekolah Kristen, pelajaran agama diberikan setelah ada komplain dari orang tua murid yang menginginkan anaknya mendapatkan pelajaran agama di sekolah. Pihak sekolah mengakomodir permintaan tersebut. Meskipun pada saat yang bersamaan, beberapa siswa muslim yang sekolah di salah satu sekolah Kristen juga ikut sembahyang di gereja.<sup>40</sup>

Jika pelajaran agama bagi siswa non-Hindu dilakukan di luar jam pelajaran, maka tidak demikian halnya dengan pelajaran agama Hindu. Siswa yang beragama Hindu dapat mengikuti pelajaran agama pada jam pelajaran. Sementara siswa muslim dan non-Hindu lainnya berada di luar kelas ketika pelajaran agama sedang berlangsung. Mereka bisa menghabiskan waktu di perpustakaan untuk membaca buku hingga pelajaran usai. Berdasarkan pengamatan peneliti, pada saat peneliti sedang berada di perpustakaan SMAN 2, ada tiga orang murid, dua laki-laki dan satu perempuan masuk ke perpustakaan. Mereka berada di sana karena teman lainnya sedang ada pelajaran agama Hindu.

Pemisahan siswa berdasarkan agama tidak hanya terjadi pada pelajaran agama tetapi juga pada waktu upacara keagamaan. Setiap bulan, umat Hindu Bali merayakan dua hari keagamaan yakni purnama dan tilem. Pada saat siswa beragama Hindu melaksanakan sembahyang di Padmasana, siswa non-Hindu berada di ruang kelas atau di perpustakaan selama kurang lebih dua jam persembahyangan berlangsung.

Terkait dengan pemakaian jilbab bagi siswi, tidak ditemukan adanya larangan secara tertulis. Dalam aturan dan tata tertib sekolah tentang pakaian dan rambut di sekolah, hanya diatur tentang model pakaian dan larangan memakai atribut keagamaan. Beberapa aturan sekolah tersebut adalah sebagai berikut: Aturan tentang pakaian di SMAN 3 Denpasar adalah (untuk putri)

---

39 Wawancara tanggal 17 Oktober 2017.

40 Informasi dari Ibu Indah, orang tua murid MI Al-Ma'ruf. Wawancara tanggal 6 Oktober 2017.

- Baju hem lengan pendek tanpa jahitan belakang lengkap dengan atribut sekolah dan atribut bendera merah putih, panjang bawah 25 cm – 30 cm dari pinggang, lebar lengan 7 cm dari lengan dan panjang lengan sejajar dengan siku.
- Baju hem/kaos setelah dimasukkan ke rok, ikat pinggang agar Nampak.
- Rok abu-abu dengan panjang maksimal 10 cm minimal 5 cm di bawah lutut (saat duduk) dengan ketentuan model yang udah ditetapkan.
- Wajib menggunakan pakaian dalam dan singlet berwarna putih.
- Topi abu-abu.
- Ikat pinggang hitam SMA Negeri 3 Denpasar.
- Sepatu hitam polos dan kaos kaki polos dengan tinggi minimal 5 cm di atas mata kaki.

Di buku Student's Diary SMAN 2 Denpasar terdapat gambar pakaian siswa/siswi dengan ukuran dan model yang hampir sama dengan ketentuan pakaian SMAN 3. Baju hem lengan pendek diatas siku dan rok dibawah lutut. Dengan model rambut diikat di belakang. Pada peraturan dan tata tertib tentang kewajiban siswa di poin 13 disebutkan bahwa berpakaian seragam sekolah dengan atributnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah. Selanjutnya pada poin 16, dijelaskan bahwa berpakaian yang beridentitas sekolah pada saat mengikuti ekstrakurikuler maupun kegiatan lain yang diatur oleh OSIS dan sekolah.

Dalam tata tertib siswa SMA Negeri 8 Denpasar ditambahkan tentang ketentuan rambut bagi putra dan putri. Pada bagian A tentang kewajiban siswa disebutkan pada poin 3. A. siswa putra dicukur 3,2,1 dan berwarna hitam. 3.b. siswa putri diikat rapi bagi yang berambut panjang dan bagi yang berambut pendek disisir rapi serta berwarna hitam. Pada bagian B tentang larangan-larangan disebutkan pada poin 14. Siswa dilarang menggunakan atribut agama, berpakaian bebas, kecuali hari-hari tertentu atas ijin/perintah sekolah.

Sementara ketentuan pakaian di SMAN 4 juga disebutkan dalam tata tertib sekolah. Pada poin 1.e. tentang pakaian seragam disebutkan bahwa setiap purnama seluruh warga sekolah memakai pakaian adat Bali. Pada aturan sekolah yang terletak di dinding sekolah, terdapat aturan tentang pakaian poin 1.5. tidak menggunakan atribut/pakaian keagamaan. Poin 1.9. menggunakan pakaian adat Bali pada hari Purnama dan hari besar agama Hindu. Adapun

ketentuan tentang rambut untuk putri adalah bagi yang berambut panjang diikat, bagi yang berambut pendek disisir rapi, dan tidak disemir.

Terkait dengan aturan pakaian ini, pihak sekolah mengadakan pemeriksaan secara rutin terhadap model pakaian dan atribut yang digunakan para siswa. Di SMAN 2, pada pagi hari, peneliti mendapatkan beberapa siswa sedang diperiksa kelengkapan pakaiannya oleh guru piket yang dibantu oleh satpam yang mengarahkan siswa yang masuk gerbang menggunakan motor agar menghadap guru piket. Pada pagi hari itu, sebagian murid berolahraga di lapangan Renon, tidak jauh dari sekolah. Mungkin karena itu, sebagian diantara mereka tidak menggunakan pakaian lengkap seperti dasi. Ada juga murid yang diperiksa celananya yang terlalu panjang. Ia diminta untuk membuka bawah celananya. Tampaknya sekolah juga tidak terlalu ketat untuk menerapkan aturan pakaian. Beberapa siswi tampak menggunakan pakaian yang agak ketat dan rok di atas lutut. Penampilan mereka trendi dan modis layaknya anak perkotaan.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa tidak ada larangan secara eksplisit tentang larangan berjilbab kecuali kalimat “tidak menggunakan atribut keagamaan”, maka secara lisan siswi yang berjilbab sering mendapatkan pertanyaan tentang pakaian yang digunakannya. Seperti “kok pake pakaian yang beda”. Pertanyaan tersebut muncul karena memang tidak banyak siswi muslim yang menggunakan jilbab di sekolah. Menurut Pak Syamsuddin, Guru Agama Islam di SMAN 2 Denpasar, dari satu angkatan dengan jumlah murid sekitar 350 orang, dari 60 orang siswa muslim yang menggunakan jilbab hanya satu atau dua orang. Dalam konteks tersebut, maka jilbab dianggap sebagai “pembeda”, di luar kebiasaan lain yang mayoritas. Atau bisa jadi, bagi sebagian orang ini adalah bentuk intimidasi terhadap keputusannya untuk “berbeda” dengan yang lain. Tentunya ada beban psikologis yang berat bagi anak-anak yang berbeda tersebut. Hal ini juga yang dihindari oleh Muthia, salah satu siswa muslim yang menamatkan SMPnya di sekolah Islam al-Banna. Atas nama kebersamaan dan tidak ingin tampil berbeda, ia memutuskan untuk melepaskan jilbab. Ia memilih sekolah negeri karena pertimbangan masa depan pendidikannya. Ia ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri favorit impiannya.

Pernah ada kasus jilbab yang mencuat secara nasional di Denpasar. Adalah siswa SMAN 2 Denpasar menuliskan apa yang dialaminya di sekolah melalui media sosial. Ia sering mendapatkan pertanyaan dari teman dan gurunya tentang pakaian yang ia gunakan dengan kalimat “kok pake jilbab sih” atau “kok berbeda sih”. Perlakuan tersebut kemudian diungkapkan di media sosial dan mendapatkan respon dari luar. Pak Syamsuddin, guru agama di sekolah tersebut menceritakan bahwa sebenarnya siswa tersebut tidak menggunakan jilbab dari awal masuk sekolah. Ia menggunakan jilbab ketika naik ke kelas XI dan setelah bergabung dengan sebuah organisasi di luar sekolah. Sementara ada juga temannya yang lain, mungkin mendapatkan sikap yang sama dari teman tetapi ia diam saja. Kasus tersebut kemudian mendapatkan investigasi dari Komnas HAM. Dan Pak Syamsuddin adalah salah satu orang yang dimintai keterangan. Dia sendiri menyesalkan apa yang dilakukan oleh siswi tersebut. Ia lebih memilih agar siswi diam jika ia mendapatkan pertanyaan yang sama. Sikap tersebut menunjukkan bahwa sebagai minoritas, ia tidak mempunyai kekuatan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai muslim. Ada proses pembungkaman terhadap hak-hak minoritas yang dilakukan secara terstruktur termasuk di bidang pendidikan yang seharusnya lebih independen, dan tercerahkan dari politik dan kepentingan apapun. Di sisi lain tidak ada ruang negosiasi untuk siswa yang melakukan “pelanggaran terhadap aturan sekolah” meskipun atas nama agama, sebagai hak dasar seorang manusia.

Jika merunut ke belakang, sebenarnya kasus jilbab di sekolah di Bali bukan hal yang baru. Ibu Redyan, Pengawas Madrasah Kota Denpasar menceritakan tentang kasus yang menimpa anak sulungnya pada tahun 1989-1990. Anaknya sekolah di salah satu SMA Negeri di Denpasar dan menggunakan jilbab. Akan tetapi, ia ditegur oleh pihak sekolah karena keputusannya tersebut. Bukan hanya temannya yang sesama muslim yang mendukung dan membelanya tetapi juga teman-temannya yang beragama Hindu. Akan tetapi ia tetap tidak bisa memperjuangkan haknya tersebut. Akibat dari teguran tersebut, ia hanya menggunakan jilbab di luar lingkungan sekolah, ketika datang dan pulang sekolah. Dari rumah, ia menggunakan jilbab dan ketika memasuki gerbang sekolah, ia melepaskannya. Begitu pula ketika pulang. Ia menggunakan jilbab kembali ketika berada di luar sekolah.

Pengalaman tersebut juga dialami oleh beberapa murid sekolah dasar di Denpasar yang bertemu dengan peneliti di tengah jalan. Empat murid SD yang berasal dari Lombok tersebut harus mengikuti ketentuan cara berpakaian yang sudah ditentukan sekolah. Jika tidak, maka akan dikeluarkan dari sekolah. Bahasa yang digunakan oleh guru mereka tidak vulgar tetapi menggunakan bahasa halus “... jika tidak mengikuti aturan sekolah, mereka dipersilahkan untuk mencari sekolah lain...” Bahasa yang sama juga disampaikan oleh Waka kesiswaan SMAN 3 Denpasar dan pengawas sekolah terhadap kasus yoga di salah satu sekolah di Denpasar ketika ia menanggapi protes yang dilayangkan oleh orangtua murid yang keberatan terhadap kegiatan tersebut.

Kepala Sekolah SMAN 2 Denpasar<sup>41</sup> mengatakan bahwa jilbab tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Tetapi ia menyarankan agar semua siswa sebaiknya mengikuti aturan sekolah. Dengan alasan “demi kebersamaan”, maka sebaiknya siswa mengikuti aturan berpakaian sekolah. Sebaliknya penggunaan atribut keagamaan yang digunakan oleh siswa pada waktu hari Purnama dianggap sebagai bukan bagian dari pakaian keagamaan tetapi penggunaan adat pakaian daerah Bali. Aturan ini sempat dipertanyakan oleh orang tua siswa melalui konsultasi dengan guru Agama Islam. Pak Fathurrahman, Guru Agama Islam di SMAN 7 Denpasar memberikan penjelasan atas keresahan orang tua dengan menyampaikan bahwa hal itu tidak bermasalah sepanjang anak-anak tidak mengikuti acara pesembahyangan.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan sekolah swasta. Jika sekolah negeri yang secara implisit melarang penggunaan jilbab, di sekolah Hindu justru yang terjadi sebaliknya. Siswa muslim diperbolehkan untuk menggunakan jilbab. Penggunaan jilbab di sekolah Saraswati ini telah lama berlangsung. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Pak Sukirman, Ketua PW Muhammadiyah dan juga guru agama di yayasan pendidikan Hindu tersebut. Yayasan Saraswati menjadi salah satu pilihan orang tua untuk menyekolahkan anaknya karena pertimbangan biaya dan lokasi. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang orang tua siswa. Dengan biaya Rp. 250.000 perbulan, sekolah ini lebih murah dibandingkan dengan sekolah Islam.<sup>42</sup>

---

41 Wawancara tanggal 12 Oktober 2017.

42 Informasi dari Bu Yuni, pegawai salon yang berasal dari Jawa. Wawancara tanggal 17 Oktober 2017

Jika siswa diharuskan untuk mengikuti aturan tentang tata cara menggunakan pakaian sekolah dan adanya pelarangan penggunaan atribut keagamaan, maka hal itu tidak berlaku bagi guru. Guru perempuan muslim diperbolehkan untuk menggunakan jilbab. Di SMAN 4 Denpasar, peneliti menemukan guru yang berjilbab. Satu lagi staff di perpustakaan sekolah. Di SMAN 8 juga mempunyai guru BK perempuan berjilbab. Demikian juga di sekolah Taman Pendidikan 45 Denpasar. Ada beberapa guru perempuan berjilbab. Menurut Waka Kesiswaan SMAN 4, aturan berjilbab bagi guru adalah kebijakan dari kepala sekolah. Untuk menghormati dan menghargai hak guru. Artinya yang menentukan aturan boleh atau tidaknya menggunakan atribut keagamaan adalah pihak sekolah.

**Tabel 5.** Bentuk Eksklusifitas dan Intoleransi di Sekolah

No	Nama sekolah	Bentuk kegiatan OSIS	Kebijakan	Keterangan
1	SMAN 3 dan SMAN 4	Semua pengurus OSIS Beragama Hindu	Tidak tertulis	Alasan: Siswa non-Hindu tidak memenuhi persyaratan, tidak mendaftar, mayoritas siswa Hindu, dan Program OSIS 75% adalah ritual ibadah Hindu
2	SMAN 2 dan SMAN 8	Ada pengurus OSIS non-Hindu tetapi hanya sebagai anggota	Tidak tertulis	Alasan yang sama dengan di atas
3	SMAN 2, 3, 4, dan 8	Kegiatan Bidang Keimanan dan Ketakwaan hanya untuk agama Hindu.	Tupoksi bid. ketakwaan	Di SMAN 3, Bidang 1 dibantu oleh Shindu, Siswa Hindu (Rohis Hindu)
4	SMAN 2 dan SMAN 4	Ada Rohis Rismanda dan Krisma tetapi bersifat informal, hanya perkumpulan siswa muslim serta tidak bisa disandingkan dengan Bidang Ketakwaan OSIS yang memiliki legalitas formal dari sekolah Agama		Ada kegiatan tahunan ketika Idul Adha dan Ramadhan. Tahun ini diselenggarakan forum Rohis yang diadakan oleh MGMP Kota Denpasar

No	Nama sekolah	Bentuk kegiatan OSIS	Kebijakan	Keterangan
5	SMAN 2, 3, 4, dan 8	<p>Pada waktu siswa Hindu sembahyang, siswa non-Hindu di kelas atau di perpustakaan</p> <p>Pembiasaan praktik keagamaan khusus Hindu:  Berdoa dan memberi sesajen di Padmasana, Pelinggih dan Patung Ganesha (harian)  Sembahyang Tri Sandya dan berdoa sebelum pelajaran di mulai (harian)  Peringatan Hari Purnama Tilem (bulanan): memakai pakaian adat dan sembahyang  Peringatan Hari Saraswati, Hari Ilmu Pengetahuan (per-6 bulan tahun Bali, 7 bulan sekali tahun masehi)</p>	<p>Tidak tertulis</p> <p>Tata tertib sekolah dan jadwal kegiatan keagamaan harian OSIS</p>	<p>Ketika siswa Hindu Tri Sandya, siswa non-Hindu berdoa menurut agama masing-masing</p> <p>Pada peringatan hari Purnama, seluruh siswa menggunakan pakaian adat Bali. Pada saat ibadah, siswa non-Hindu berada di dalam kelas atau perpustakaan</p> <p>Pada hari Saraswati, semua siswa bekerjasama menyiapkan acara persembahyangan. Pada saat sembahyang, sekolah diliburkan</p>
6	SMAN 2	Pelaksanaan ibadah ritual menjadi salah satu penilaian akhlak mulia dan kepribadian	Tertulis	Penilaian yang sama tidak bisa diterapkan kepada siswa non-hindu karena pelaksanaan ibadah non-Hindu tidak diatur oleh sekolah
7	SMAN 3	Pada hari Purnama, siswa wajib menggunakan pakaian adat Bali.	Aturan tertulis	Pakaian adat Bali dianggap tidak termasuk sebagai atribut keagamaan meskipun pakaian tersebut digunakan untuk upacara keagamaan. Pemakaian pakaian adat ini juga menimbulkan pertanyaan (bukan protes) bagi orang tua siswa muslim karena dianggap sebagai pakaian keagamaan.
8	SMAN 2, 3, 4, dan 8	Larangan pemakaian atribut keagamaan (jilbab)	Tata tertib sekolah, Student Diary, dan teguran lisan	Jilbab tidak dilarang dan tidak diperintah tetapi sebaiknya mengikuti aturan pakaian sekolah dan demi kebersamaan

No	Nama sekolah	Bentuk kegiatan OSIS	Kebijakan	Keterangan
9	SMAN 2, 3, 4, dan 8	Pelajaran agama non-Hindu diberikan di luar jam sekolah, sepulang sekolah, per-rombel	Aturan tentang jadwal pelajaran	Pada waktu pelajaran agama Hindu, siswa non-Hindu belajar di perpustakaan atau mengikuti pelajaran tersebut
10	SMAN 2, 3, dan 8	Waktu Salat Zuhur dan Salat Jumat bersamaan dengan waktu pelajaran	Aturan tentang jam pelajaran dan istirahat	Jam belajar: 07.00-14.45 Jam istirahat: 09.30-10.00 kecuali SMAN 4, istirahat jam 12.00-12.30 Pada hari Jumat pulang jam 12.30 kecuali SMAN 2 pulang jam 12.00
11	SMAN 3 dan 4	Salat Jumat harus seizin guru BK (SMAN 4) dan guru mata pelajaran (SMAN 3)		SMAN 4, pulang jam 12.00 tetapi dilanjutkan dengan pembinaan dari wali kelas
12	SMAN 3 dan 4	Tidak tersedia ruang ibadah bagi siswa non-Hindu	Tata Ruang sekolah	Musala ada di SMAN 2 Kepala sekolah SMAN 8 mempersilakan siswa non-Hindu untuk ibadah di ruang sekolah Di SMAN 3, Siswa muslim menggunakan kelas sebagai tempat ibadah
13	SMAN 3, SMAN 8	Pandangan tentang terorisme dan radikalisme. Ada stigma dan stereotip tentang Islam adalah teroris dan pelaku kekerasan.		Ada perubahan pandangan tentang Islam di kalangan siswa dari stigma negatif ke positif. Pelaku teror tidak dikaitkan dengan agama tertentu tetapi dipandang sebagai "oknum" Polda Bali melakukan Sosialisasi tentang radikalisme dan intoleransi hanya disekolah Islam. Menunjukkan bahwa pihak aparat sendiri "mencurigai" umat Islam yang berpotensi menjadi teroris atau radikal.

Berdasarkan data di atas, terjadinya eksklusifitas dan intoleransi di sekolah karena adanya dominasi mayoritas terhadap minoritas. Kalangan mayoritas, dalam hal ini adalah Hindu, merasa berhak untuk menginterpretasikan kebijakan sesuai dengan kepentingannya. Sementara siswa non-Hindu harus

beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut. Tidak ada ruang untuk negosiasi aturan. Jika siswa keberatan dengan aturan sekolah, maka sekolah mempersilakan siswa untuk mencari sekolah lain atau mengikuti aturan yang ada.

Selain itu, praktik eksklusifitas dan intoleransi dilakukan secara struktural melalui kebijakan sekolah. Kebijakan tersebut dituangkan melalui tata tertib dan aturan sekolah yang wajib ditaati oleh seluruh siswa. Disamping itu juga ada kebijakan tidak tertulis yang mengarah kepada praktik intoleransi tersebut.

## **2. Kuasa Negara yang Terlupakan**

Kebijakan tentang pembinaan kesiswaan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 39 Tahun 2008. Pada pasal 3 disebutkan:

1. Pembinaan kesiswaan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler.
2. Materi pembinaan kesiswaan meliputi:
  - a. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia
  - c. Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara
  - d. Prestasi Akademik, Seni, dan/atau Olahraga sesuai bakat dan minat
  - e. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial dalam konteks masyarakat plural
  - f. Kreatifitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan
  - g. Kualitas Jasmani, Kesehatan, dan Gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi
  - h. Sastra dan Budaya
  - i. Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - j. Komunikasi dalam Bahasa Inggris

Adapun implementasi dari pembinaan kesiswaan tersebut di sekolah dan madrasah di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kegiatan pembinaan keagamaan di sekolah dan madrasah berdasarkan pada aturan sekolah. Aturan tersebut dituangkan dalam tata tertib atau tata etika sekolah. Adapun kegiatan keagamaan yang diatur oleh sekolah adalah terkait sembahyang sebelum pelajaran, ucapan salam, pakaian yang digunakan pada hari keagamaan.

Misalnya Surat keputusan Kepala SMA Negeri 3 Denpasar No. 420/360/SMAN3Dps/2017 pasal 4 tentang waktu belajar, pada poin 4.1 disebutkan bahwa sebelum pelajaran pertama dimulai, siswa beragama Hindu diwajibkan sembahyang Puja Trisandya. Trisandya disebut juga dengan Gayatri Mantram. Doanya sebagai berikut:<sup>43</sup>

*Om, Om Om Bhur Bhuwah Swah, Tat Sawitur Warenyam, Bhargo Dewasya  
Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat,*

*Om Narayanad Ewedam Sarwam, Yad Bhutam Yasca Bhawyam, Niskalo  
Nirlano Nirwikalpo,*

*Nlraksatah Suddho Dewo Eko, Narayana Nadwityo Asti Kascit.*

*Om Twam Siwah Twam Mahadewah, Iswarah Parameswara, Brahma  
Wisnusca Rudrasca, Purusah Parikirtitah,*

*Om Papo'ham Papakarmaham, Papatma Papasambhawah, Trahi Mam  
Pundarikaksah,*

*Sabahyabhyantara Suci.*

*Om Ksama Swamam Mahadewa, Sarwaprani Hitangkarah, Mam Mocca  
Sarwapapebhyah,*

*Palayaswa Sadasiwa.*

*Om Ksantawya Kayika Dosah. Ksantawyo Wacika Mama, Ksantawya  
Manasa Dosah,*

*Tat Pramadat Ksamaswa Mam.*

*Om Santi, Santi, Santi Om*

Trisandya dilakukan dengan cara berdiri sambil meletakkan kedua tangan di bawah dagu dan menundukkan kepala. Doa ini berlangsung sekitar 5 hingga 10 menit. Pada saat yang bersamaan, siswa non-Hindu juga diwajibkan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Sembahyang tersebut dipimpin oleh salah satu pengurus kelas yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia

---

43 Sumber: <https://www.mediahindu.com/doa-sehari-hari/puja-trisandya-dan-terjemahannya.html>.

Raya. Meskipun tidak diatur dalam tata tertib sekolah, praktik keagamaan Hindu tidak hanya berdoa ketika akan memulai pelajaran, tetapi juga ketika datang dan pulang sekolah. Pada pagi hari, siswa secara bergiliran berdoa dan memberikan sesajen di Padmasana, Pelinggih, dan Patung Ganesha yang terdapat di area sekolah.

Berikutnya pada poin 4.3 dijelaskan bahwa ketika guru memasuki kelas, hendaknya semua siswa memberi salam. Salam juga diucapkan ketika bertemu dengan guru dengan mengucapkan “om swastiastu” atau assalamu’alaikum bagi muslim. Ucapan salam ini dibarengi dengan mengangkat kedua tangan sambil diletakkan di dada dan menundukkan kepala yang disertai dengan senyuman.

Pada poin 8.3.a. dijelaskan tentang kegiatan budaya pada Hari Purnama dan Tilem atau hari ketika bulan purnama dan bulan mati. Kegiatan pada kedua hari yang diperingati setiap bulan ini adalah upacara persembahyangan di Padmasana yang diikuti oleh seluruh siswa beragama Hindu. Sembahyang ini berlangsung selama 2 jam sejak jam 07.00 hingga jam 09.00. Adapun siswa non-Hindu tidak mengikuti acara tetapi mereka berada di kelas atau perpustakaan. Sedangkan pakaian yang digunakan pada hari Purnama adalah pakaian adat Bali sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Demikian juga tata tertib di SMAN 2, SMAN 4 dan SMAN 8 Denpasar mengatur tentang persembahyangan Tri Sandya, perayaan hari Purnama dan Tilem. Kata *Purnama* berasal dari kata “purna” yang artinya sempurna. Purnama dalam kamus umum Bahasa Indonesia berarti bulan yang bundar atau sempurna (tanggal 14 dan 15 kamariah). Pemujaan dimaksudkan saat purnama ini ditujukan ke hadapan Sanghyang Candra, dan Sanghyang Ketu sebagai dewa kecemerlangan untuk memohon kesempurnaan dan cahaya suci dari Ida Sanghyang Widhi Wasa dalam berbagai wujud Ista Dewata. Biasanya pada hari suci purnama ini disebutkan umat Hindu menghaturkan Daksina dan Canang Sari pada setiap pelinggih dan pelangkiran yang ada di setiap rumah.

Hari Raya Tilem dirayakan ketika bulan mati, ketika langit gelap tanpa ada sinar bulan. Ditinjau dari pengetahuan Astronomi bahwa pada bulan tilem itu posisi bulan berada di antara Matahari dengan Bumi sehingga suasana menjadi gelap gulita di malam hari. Upacara Tilem bermakna sebagai upacara pemujaan terhadap Dewa Surya, diharapkan semua umat Hindu melakukan pemujaan dan bersembahyang dengan rangkaian berupa upacara Yadnya. Umat Hindu meyakini pada saat hari Tilem ini mempunyai keutamaan dalam menyucikan diri dan berfungsi sebagai pelebur segala kotoran/mala yang terdapat dalam diri manusia, juga karena bertepatan dengan Dewa Surya beyoga/semadhi memohonkan keselamatan kepada Hyang Widhi.<sup>44</sup>

Di luar aturan tersebut, ada juga perayaan Siwaratri dan Saraswati. Siwaratri artinya malam Siwa, yang terdiri dari 2 kata, yaitu Siwa dan Ratri. Siwa dalam bahasa Sanskerta berarti baik hati, suka memaafkan, memberi harapan dan membahagiakan. Siwa dapat juga diartikan sebagai sebuah gelar atau nama kehormatan untuk salah satu manifestasi Tuhan yang diberi nama atau gelar kehormatan Dewa Siwa, dalam fungsi beliau sebagai pemerelina untuk mencapai kesucian atau kesadaran diri yang memberikan harapan untuk kebahagiaan. Sedangkan Ratri artinya malam, yang dapat diartikan juga sebagai kegelapan. Jadi Siwaratri dapat diartikan sebagai malam pemerilina atau pelebur kegelapan dalam diri dan hati untuk menuju jalan yang lebih terang. Hari Raya Siwaratri dilaksanakan setahun sekali setiap purwaning tilem ke-7 (sasih kepitu) tahun Caka. Hari Raya Siwaratri ialah hari suci yang digunakan dalam rangka melakukan pemujaan terhadap Sang Hyang Widhi dalam manifestasi-Nya sebagai Dewa Siwa.

Siwalatri dirayakan untuk memperingati Dewa Siwa yang jatuh setiap hari rabu setiap tujuh bulan Wuku Tahun Bali. Pada peringatan Siwalatri ini diadakan upacara sembahyangan dari sore hingga pagi hari. Selama satu malam, umat Hindu mengadakan perenungan dan introspeksi diri atas perbuatan yang dilakukan selama ini. Serta memohon diberikan ampunan atas dosa yang diperbuat. Secara rinci kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada hari Siwaratri adalah sebagai berikut:

---

44 <http://inputBali.com/budaya-Bali/makna-dan-cara-pelaksanaan-siwaratri-dalam-hindu-Bali>.

1. Sebelum melaksanakan seluruh kegiatan, maka terlebih dahulu dilaksanakan persembahyangan yang diperkirakan selesai tepat pada jam 06.00 dini hari.
2. Monabrata atau berdiam diri dan tak berbicara. Pelaksanaannya dilangsungkan di pagi hari dan dilakukan selama 12 jam tepatnya dari jam 06.00 – 18.00.
3. Mejagra atau tidak tidur selama semalaman. Pelaksanaannya berlangsung dari pagi sampai pagi hari di keesokan harinya yang dilakukan selama 36 jam dari jam 06.00 – 18.00 di keesokan harinya.
4. Upawasa atau tidak makan dan tidak minum. Puasa ini dilakukan selama 24 jam dari jam 06.00 – 06.00. Apabila sudah 12 jam maka diperbolehkan untuk makan dan minum dengan syarat bahwa nasi yang dimakan ialah nasi putih dengan garam dan minum air putih. (air tawar tanpa gula).<sup>45</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, sekolah-sekolah di Bali sangat kental dengan tradisi Hindu. Lembaga pendidikan sebagai salah satu sarana untuk melestarikan dan menjaga budaya Bali. Secara umum, keshalehan warga sekolah dapat juga dilihat secara kasat mata dari simbol-simbol yang ada di tubuh mereka. Siswa dan guru menggunakan gelang kesholehan yang didapatkan dari pura sebagai tanda ketaatan mereka. Gelang tersebut terbuat dari tali benang berwarna-warni. Di jidat mereka, terdapat beras putih yang ditempelkan. Di telinga juga dipasangkan bunga kamboja. Ketika sembahyang mereka juga memakai selendang yang dieratkan di pinggang. Itu semua simbol dari kesalehan.

Sementara kegiatan keagamaan di madrasah adalah Salat Duha, membaca al-Quran dan menghafal al-Quran. Di Madrasah Aliyah Al-Ma'ruf, kegiatan sekolah diawali dengan Salat Duha bersama dan dilanjutkan dengan membaca al-Quran, dengan metode tilawati dan tahfidz. Program tilawati dikhususkan untuk anak-anak yang belum lancar mengaji. Tidak semua bisa mengaji karena sebagian dari mereka berasal dari SMP yang pendidikan agamanya minim. Sementara tahfidz diberikan kepada mereka yang sudah lancar membaca al-Quran. Untuk yang hafidz mereka diharuskan untuk menyetorkan

---

45 <http://inputBali.com/budaya-Bali/makna-dan-cara-pelaksanaan-siwaratri-dalam-hindu-Bali>.

hafalan mereka dua atau tiga ayat setiap hari. Program membaca al-Quran juga dilakukan penilaian dalam buku tersendiri. Buku tersebut terdapat dua macam penilaian yakni tadarus dan tahfidz yang memuat lembar setoran harian tahfidz dan tadarus.

Program membaca al-Quran dengan model Tilawati ini mendapatkan sertifikat resmi dari Pesantren al-Quran Nurul Falah Surabaya. Anak-anak murid yang berhasil menyelesaikan al-Quran dengan baik akan '*munaqasah*', diuji kemampuan untuk membaca al-Quran dengan '*tartil*'. Ijazah ini bisa dipergunakan untuk menjadi guru mengaji dengan metode tilawati di TPA yang tersebar di Bali. Di balik Ijazah, ada daftar nilai yang terkait dengan *fashohah*, *tajwid*, *ghorib musykilat*, suara dan lagu. Selain itu juga ada nilai untuk *microteaching*. Dimana anak-anak yang sudah pandai mengajar mengaji kepada anak-anak yang belum lancar mengaji. Mereka dibimbing oleh guru profesional, yang ahli tilawati dan tahfidz. Mereka berasal dari salah satu pesantren di Tabanan.

Hampir sama dengan program membaca al-Quran di Al-Ma'ruf, Madrasah Tawakkal mewajibkan setiap siswa untuk menghafal ayat al-Quran. Hafalan tersebut disetor kepada wali kelas setiap pagi hari sebelum pelajaran dimulai. Jumlah ayat yang dihafal tidak ditentukan oleh guru tetapi sangat tergantung kepada kemampuan menghafal siswa.

Di kedua madrasah tersebut terdapat program pidato setiap hari Jumat pagi. Pada setiap hari Jumat, diadakan pidato dalam berbagai Bahasa. Pilihan tergantung kepada kemampuan siswa untuk menguasai Bahasa yang disampaikan. Tetapi secara umum, mereka berpidato dalam Bahasa Arab, Inggris atau Bahasa Daerah. Tema yang diangkat juga beragam, tergantung kepada siswa yang mendapatkan giliran untuk menyampaikan pidato tersebut. Ada yang menyampaikan tema tentang ibadah, masalah remaja, hingga isu-isu kontemporer. Tentunya mereka juga harus mengutip ayat al-Quran dan hadis yang mendukung tema yang diangkat. Program ini tidak hanya bermanfaat bagi anak untuk belajar menyampaikan ide-idenya tetapi juga melatih rasa percaya diri, kedisiplinan, dan komunikasi dengan baik. Pada

bulan Ramadhan, madrasah mengadakan Pondok Ramadhan atau pesantren kilat selama tiga hari.

Peringatan hari besar agama di sekolah negeri di Bali juga menunjukkan adanya praktik toleransi antarumat beragama. Para siswa muslim ikut berperan serta dalam mempersiapkan pesembahyangan pada hari-hari besar agama Hindu. Demikian juga dengan peringatan hari besar Islam, khususnya Idul Adha. Siswa muslim merayakan idul kurban dengan menyembelih kambing dan dibagikan kepada siswa dan guru yang beragama lain. Binatang yang dikurbankan pada hari tersebut juga bukan sapi, hewan yang sangat dihormati oleh umat Hindu.

#### **a. Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia**

Di antara jenis kegiatan pembinaan budi pekerti luhur adalah melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah, melaksanakan gotong royong dan kerja bakti, melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tata krama pergaulan, menumbuhkembangkan kesadaran untuk rela berkorban terhadap sesama, menumbuhkembangkan sikap hormat dan menghargai warga sekolah, dan melaksanakan kegiatan 7K (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian, dan kerindangan).

Adapun penjabaran aturan tersebut dalam kebijakan sekolah adalah dengan membuat aturan tentang kegiatan belajar di sekolah. Misalnya tata tertib di SMAN 3 Denpasar terkait dengan waktu belajar, waktu istirahat, waktu jam pelajaran kosong, penampilan siswa dan pakaian sekolah, transportasi ke sekolah, perangkat kelas, kelompok 7K, upacara bendera, kegiatan ekstrakurikuler, dan keamanan sekolah.

Sekolah juga sangat ketat terhadap kekerasan di lingkungan sekolah. Di depan sekolah terdapat Baliho besar yang melarang melakukan pelecehan, perundungan, penganiayaan, perkelahian, perpeloncoan, pemerasan, pencabulan, pemerkosaan, dan diskriminasi SARA.

Aturan yang sama juga berlaku di sekolah negeri lainnya di Denpasar. Tetapi ada beberapa yang berbeda seperti tentang HP. Tiga sekolah lainnya memperbolehkan siswa untuk membawa HP. Akan tetapi ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Misalnya di SMAN 4 Denpasar, siswa tidak

boleh mengaktifkan HP pada saat pelajaran berlangsung. Hal yang sama juga berlaku di SMAN 2 Denpasar, siswa akan mendapatkan peringatan jika mengaktifkan HP pada saat berlangsung KBM, UUB, UH. Sementara di MA Tawakkal, siswa diperbolehkan untuk membawa HP tetapi pada saat pelajaran berlangsung, semua HP dikumpulkan di guru piket. HP boleh dipergunakan kembali ketika pulang sekolah atau ketika ada pelajaran yang membutuhkan informasi dari internet.

Aturan lain yang dilarang adalah tentang ulang tahun, berciuman atau pacaran di lingkungan sekolah, duduk bermesraan, di lingkungan SMAN 2, SMAN 4 dan SMAN 8 Denpasar. Ada beberapa tata tertib tambahan di SMAN 8 yakni tentang larangan menaruh sepeda motor di luar lingkungan sekolah dan larangan membawa motor yang tidak standar/tidak lengkap ke sekolah, dilarang membawa mobil, dan siswa dilarang menggunakan atribut agama, berpakaian bebas kecuali hari-hari tertentu atas ijin/perintah sekolah.

Sebelumnya, SMAN 3 mempunyai aturan juga tentang alat transportasi ke sekolah. Dulu, sekolah tersebut tidak membolehkan siswanya untuk menggunakan motor atau mobil tetapi harus menggunakan sepeda. Seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan siswa, maka aturan tersebut dihapus dan digantikan dengan kebolehan menggunakan sepeda motor.

SMAN 2 mempunyai pedoman tentang penilaian akhlak mulia dan kepribadian yang meliputi 10 aspek yakni kedisiplinan, kebersihan, kesehatan, tanggung jawab, sopan santun, percaya diri, kompetitif, hubungan sosial, kejujuran, dan pelaksanaan ibadah ritual.

Siswa yang melanggar aturan tersebut, akan diberikan sanksi. Dari berupa koordinasi dengan orang tua, peringatan lisan dan tertulis, skorsing, dan dikembalikan kepada orang tua. Pelanggaran terhadap tata tertib, siswa akan mendapatkan sanksi berupa skor. Skor menunjukkan jenis pelanggaran dan hukuman terhadap pelanggaran tersebut.

**Tabel 6.** Jenis pelanggaran meliputi beberapa aspek yakni kerajinan, kedisiplinan, ketertiban, etika, dan moral.

Skor	Jenis pelanggaran
Skor 1: peringatan	Tidak mengerjakan tugas

Skor 2: peringatan dengan melakukan pembersihan lingkungan	Terlambat masuk sekolah, terlambat masuk kelas, tidak masuk tanpa surat, tidak ikut upacara bendera, melompat tembok, meninggalkan kelas tanpa izin, buang sampah sembarangan, menyalahgunakan dispensasi.
Skor 4: membuat surat perjanjian yang ditanda tangani oleh siswa dan wali kelas	Bolos, membuat gaduh, melakukan modifikasi motor knalpot bersuara bising, membuat surat palsu, membawa HP/tablet/ipad, memalsukan tanda tangan.
Skor 6: membuat surat perjanjian yang ditanda tangani oleh siswa, orang tua, wali kelas, dan guru BK	Judi, membawa petasan, melecehkan lawan jenis, mengunggah foto atau menulis status yang tidak santun, menindik kuping (untuk laki-laki).
Skor 10: Belajar di rumah	Tidak sopan terhadap guru/pegawai, merokok/membawa rokok, melakukan corat-coret, membawa senjata tajam, mengancam keselamatan orang, mencuri, membawa buku/CD porno, membawa/mengonsumsi minuman keras, memakai tato, melakukan pemerasan.
Keluar	Membawa/mengonsumsi narkoba, buronan pihak berwajib, hamil dan menikah selama sekolah.

Sementara di madrasah aliyah juga mempunyai tata tertib yang sama. Akan tetapi ada tambahan tentang kewajiban menjalankan Salat Zuhur dan Jumat. Selain itu, ada juga aturan tidak tertulis tentang tata cara berpakaian di MA Tawakkal. Aturan tersebut adalah kewajiban menggunakan legging dan ciput bagi perempuan. Legging adalah celana panjang yang dipakai oleh perempuan yang bentuk kaos atau kain yang biasanya digunakan di dalam sebelum rok panjang. Penggunaan legging diwajibkan karena ada kasus dimana siswa perempuan naik sepeda motor dan kelihatan betisnya. Sementara ciput diwajibkan agar rambut tidak kelihatan. Ini menunjukkan bahwa trend pakaian muslimah saat ini yang longgar, lebih tertutup, ikut mempengaruhi model pakaian sekolah. Padahal jika dibandingkan dengan tahun 1990-an, pakaian sekolah di sekolah-sekolah Islam tidak seketat saat ini. Ketika peneliti sekolah di Madrasah Muallimaat Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1987-1993, rambut terlihat menyembul dari balik kerudung tidak ada masalah. Bahkan ada beberapa guru yang menggunakan baju kebaya tipis dan kerudung yang diselempang di atas bahu, mirip seperti pakaian Ibu Sinta Nuriyah saat ini.

Di SMAN 3 Denpasar ada tata tertib khusus tentang kelompok 7K. Pada pasal 12 disebutkan sebagai berikut:

1. Pada setiap kelas siswa wajib ikut melaksanakan tugas sebagai kelompok 7K.
2. Tugas kelompok 7K dilakukan secara bergilir dan terjadwal yang pengaturannya dilakukan oleh ketua kelas bersama pengurus yang lain dengan sepengetahuan wali kelas.
3. Tugas pokok 7K adalah menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan keselamatan/kesehatan.
4. Petugas 7K khususnya kebersihan agar sudah hadir di sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai.
5. Setiap siswa wajib turut memelihara sarana prasarana kelas dan sekolah, menjaga kebersihan, keindahan kelas, sekolah dan halaman sekolah.
6. Setiap siswa hendaknya membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan.
7. Setiap siswa yang sakit di sekolah wajib untuk dilaporkan dan dibawa ke ruang UKS untuk diberikan perawatan.
8. Setiap siswa wajib membangun diri dengan budaya atau gaya hidup bersih dan sehat untuk meraih prestasi.
9. Setiap siswa tidak diizinkan untuk merayakan ulang tahun di sekolah.

**b. Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara**

Untuk pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara, diimplementasikan dalam bentuk upacara bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, melaksanakan kegiatan pramuka (Perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu di MA Al-Ma'ruf dan Kibar, kemah ilmiah bersama di SMAN 4), dan Pra Pengabdian Masyarakat di MA Al-Ma'ruf, kegiatan ekstrakurikuler dan kerjasama dengan sekolah lain.

Upacara bendera dilakukan pada setiap hari Senin pagi sebelum masuk kelas. Semua sekolah negeri di Denpasar dapat melaksanakan upacara dengan baik sesuai dengan tata aturan yang ada karena tersedianya fasilitas yang lengkap. Sementara untuk madrasah aliyah, ada pengecualian. Tidak setiap saat mereka bisa melaksanakan upacara bendera sebagaimana mestinya.

Ketiadaan halaman dan ruangan yang terbatas, membuat mereka “terpaksa” melakukan upacara sesuai dengan kondisi yang ada.

MA Al-Ma’ruf melaksanakan upacara di aula yang sangat terbatas. Siswa sebanyak 150 orang dan ditambah dengan guru sebanyak 20 orang terasa sangat sesak. Pada saat peneliti menghadiri acara sosialisasi tentang Radikalisme dan intoleransi dari Polda Bali, aula tersebut tidak bisa memuat semua murid. Sebagian terpaksa duduk di lorong yang berukuran sekitar 2 meter. Oleh karena itu, upacara bendera tetap dilaksanakan akan tetapi tidak ada prosesi menaikkan bendera merah putih karena tempat yang tidak memungkinkan.

Sementara upacara bendera di MA Tawakkal harus meminjam tanah milik orang lain yang berada di sebelah madrasah. Karena lokasi madrasah yang sempit, tidak ada ruangan dan halaman untuk upacara dan aktifitas lainnya. Sempitnya lahan menjadi salah satu problem sekolah Islam di Denpasar. Bahkan MA Al-Ma’ruf belum mempunyai tanah sendiri dan masih dalam status sewa selama 30 tahun. Sebelum mereka melaksanakan upacara di ruangan aula, mereka upacara bendera di halaman depan sekolah. Karena kebutuhan penambahan ruangan untuk kepala sekolah, maka dibuatkan satu ruang khusus untuk kepala sekolah di halaman depan samping yang berukuran sekitar 3x5 meter. Sementara halaman yang tersisa sekarang digunakan untuk parkir sepeda motor siswa.

Lagu Indonesia Raya dinyanyikan setiap awal pelajaran setelah pelaksanaan sembahyang Tri Sandya. Akan tetapi menurut salah seorang guru di salah satu sekolah negeri,<sup>46</sup> lagu Indonesia Raya tidak setiap hari dilaksanakan karena sangat tergantung dengan guru mata pelajaran yang masuk pada jam pertama. Adakalanya mereka langsung memberikan pelajaran setelah doa dan sembahyang dilakukan.

Berdasarkan Permendikbud, ada dua jenis kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Pertama adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib yakni pramuka dan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak wajib. Kegiatan ekstra di SMAN 2

---

46 Informasi diperoleh tanggal 13 Oktober 2017.

Denpasar sebanyak 36 buah yang terdiri dari olah raga, seni, dan klub Bahasa. Para siswa wajib memilih satu di antara kegiatan ekstra tersebut.

Di SMAN 3, kegiatan ekstrakurikuler disebutkan dalam tata tertib sekolah pada pasal 15.

1. Kelompok ekstrakurikuler merupakan bagian dari kegiatan OSIS.
2. Setiap siswa wajib memilih salah satu kelompok ekstrakurikuler yang ada dan diminati.
3. Jika siswa yang bersangkutan pindah kegiatan ekstrakurikuler diberi batas waktu satu semester dengan mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh orang tua.
4. Setiap kelompok ekstrakurikuler wajib memiliki pengurus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan maksimal 30 orang dan dilakukan pemilihan secara demokratis dengan sepengetahuan pembina/koordinator kelompok/pelatih.
5. Kehadiran siswa kurang dari 75% dari kegiatan ekstrakurikuler tidak mendapat nilai.

Selanjutnya ada aturan di SMAN 3 yang tidak membolehkan ada organisasi lain selain OSIS di dalam sekolah. Bab VII kegiatan Ekstra Kurikuler Pasal 14 ayat 14.6 disebutkan bahwa setiap siswa dilarang mengikuti organisasi apapun selain OSIS di sekolah. Tentunya pasal ini berbeda aturan di SMAN 2 dan SMAN 4 yang membolehkan adanya organisasi lain selain OSIS. Seperti Rismanda dan Krisma yang dilegalkan dan diakui oleh sekolah.

Semangat kepahlawanan ditularkan melalui beberapa cara diantaranya adalah dengan mengambil *quote* mereka sebagai penyemangat dalam belajar, bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air. Misalnya di MA Al-Ma'ruf ada beberapa *quote* bung Karno, presiden pertama RI yang terpampang di dinding sekolah. "Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang". "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya". "Orang tidak bisa mengabdikan kepada Tuhan dengan tidak mengabdikan kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin". Di setiap kelas ada gambar burung garuda, foto presiden dan wakil presiden, foto pahlawan perjuangan, dan bendera merah putih.

SMAN 4 Denpasar telah melakukan pertukaran siswa antarnegara dengan beberapa negara. Misalnya dengan Jurong High School Singapore, Pierce Secondary Singapore, Affiliated High School to KNUE (Korean National University of Education) dan Melbourne Australia.

**c. Pembinaan Prestasi Akademik, Seni, dan atau Olahraga sesuai bakat dan minat**

Sesuai dengan visi sekolah yang mengunggulkan tri kecerdasan, yakni kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, sekolah di Denpasar sangat memperhatikan prestasi akademik maupun non-akademik siswa. SMAN 3 dan SMAN 4 Denpasar adalah dua di antara sekolah unggulan di Denpasar. Keduanya tidak hanya mempunyai siswa yang berprestasi di bidang akademik tetapi juga non-akademik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu siswa SMAN 4 Denpasar atas nama Ni Kadek Vani Apriyanti adalah peraih NIM tertinggi di Indonesia. Menurut penuturan Pak Budi Adyana, Ketua Komite SMAN 4 yang juga alumni di sekolah yang sama, para siswa memang ditekankan untuk mendapatkan prestasi akademik. Pada masanya, sepulang sekolah, para siswa tidak langsung pulang ke rumah tetapi ada pelajaran tambahan hingga jam 6 sore. Pelajaran tersebut berupa pembahasan soal-soal yang akan diujikan di ujian nasional. Dan hasilnya adalah hampir semua siswa mendapatkan PMDK, tiket tanpa tes masuk perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia.

Dalam bidang akademik, berbagai kejuaraan dan perlombaan telah diraih oleh siswa SMAN 4. Misalnya olimpiade fisika dan biologi di Inggris, Taiwan, Luvia, Bellarusia; Olimpiade Matematika di Vietnam; karya tulis remaja di Singapura; debat Bahasa Inggris di Afrika Selatan dan Korea. Berbagai kejuaraan nasional juga telah diraih di ajang OSN biologi, kimia, fisika, dan komputer.

Demikian juga dengan SMAN 3. Ketika peneliti datang ke sekolah pada tanggal 8 Oktober 2017, SMAN 3 yang mempunyai moto “Datang dan Pergi untuk Sebuah cita-cita” baru saja memenangkan salah satu kejuaraan dunia di Polandia mewakili Indonesia. Kejuaraan tersebut diumumkan pada waktu selesai upacara bendera. Untuk tingkat sekolah, mereka juga

menyelenggarakan olimpiade penelitian siswa sains dan humaniora yang diselenggarakan setiap tahun. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum Peneliti Muda Trisma ini menghadirkan juri dari berbagai universitas di Bali. SMAN 8 Denpasar yang terletak di pinggir Kota Denpasar ini juga tidak kalah dalam prestasi internasional. Pada tahun ini mereka menjuarai olahraga softball di Jepang.

Madrasah juga tidak tertinggal dengan sekolah negeri. Meskipun serba terbatas dalam fasilitas dan sumber daya manusia, MA Al-Ma'ruf menjadi langganan juara kasidah tingkat nasional dan beberapa kejuaraan lainnya seperti olimpiade dan seni. Puluhan jumlah piala yang berderet dengan rapi di ruang kepala sekolah menunjukkan prestasi yang telah diraih oleh siswa selama ini.

Secara umum, ada tiga jenis kegiatan ekstrakurikuler yakni olahraga, seni, dan studi club. Jenis olahraga adalah basket, sepak bola, atletik, pencak silat, sepak takraw, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, soft ball, KSPAN, catur, renang, senam lantai, date ball, tarung derajat, dan panjat tebing. Sedangkan untuk seni adalah teater, seni tari, seni tabuh, seni rupa, seni musik, sandia gita, mejejahitan, grafis dan photography, dan kreket. Mejejahitan adalah pembuatan bahan untuk upacara keagamaan Hindu. Sementara untuk studi club adalah Bahasa Inggris, KIR, Bahasa Mandarin, Bahasa Perancis, Bahasa Jepang, Jurnalistik, PMR, dan Komputer. di SMAN 4 ada beberapa klub mata pelajaran seperti matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, ekonomi, astronomi, komputer. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler ada 34 macam dimana setiap siswa hanya boleh mengikuti 1 jenis kegiatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap sore Senin hingga Kamis, sepulang sekolah dari jam 16.00-17.30.

Untuk madrasah aliyah, mereka tidak hanya belajar seni Islam tetapi juga belajar seni daerah Bali misalnya tari Bali. Tarian ini sempat menjadi kegiatan ekstrakurikuler siswa. Mereka menarikan tari Bali dengan bagus sehingga mendapatkan apresiasi untuk tampil di acara nasional di Bali. Pertunjukkan siswa yang sangat menawan di satu sisi menunjukkan bagaimana madrasah aliyah berusaha untuk beradaptasi dengan budaya lokal Bali. Di sisi lain, ada

sekelompok orang yang protes dengan pementasan tersebut karena dianggap telah mengubah pakem tarian Bali. Perubahan yang dimaksud adalah modifikasi pakaian penari dengan menggunakan pakaian muslim: jilbab dan manset. Setelah adanya protes tersebut, maka kegiatan ekstrakurikuler tarian Bali ditiadakan.

**d. Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial dalam konteks masyarakat plural**

Untuk mengembangkan pembinaan demokrasi, beberapa sekolah mengadakan latihan kepemimpinan khusus untuk pengurus OSIS. Di SMAN 8 Denpasar, para pengurus OSIS yang telah terpilih mengadakan kemah bersama. Pada perkemahan ini, mereka mendapatkan materi tentang kepemimpinan dari beberapa narasumber yang telah ditunjuk. Sementara di Madrasah Aliyah Tawakkal juga melakukan hal yang sama. Mereka membekali pengurus OSIS baru untuk dilatih tentang kepemimpinan, manajemen, dan teknologi informasi. Mereka bekerjasama dengan beberapa narasumber dari luar seperti PMI. Sementara SMAN 4 mempunyai program KIBAR (kemah ilmiah bersama) sebagai bentuk penguatan pendidikan pengenalan lingkungan.

Madrasah Aliyah Al-Ma'ruf melaksanakan sebuah kegiatan yang dinamakan dengan Pra Pengabdian Masyarakat (PPM). Selama ini, kegiatan tersebut dilaksanakan di Pulau Serangan. Pulau Serangan adalah salah satu pulau di Bali yang sebagian penduduknya beragama Islam. Mereka telah ada sejak zaman kerajaan Bali. Mayoritas dari mereka berasal dari Makassar. Itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa memilih Pulau Serangan sebagai tempat pra pengabdian masyarakat. Dalam kegiatan yang berlangsung selama satu minggu ini, para siswa diberikan keluasaan untuk menyalurkan bakat dan minatnya masing-masing. Jika mereka berbakat untuk mengaji, maka mereka mengajar di taman pendidikan al-Quran, azan, membersihkan masjid, dan administrasi. Sekolah tidak membatasi semua dikerjakan sesuai dengan kemampuan anak. Kegiatan ini sekaligus sebagai ajang untuk promosi sekolah.

#### e. **Pembinaan Kreatifitas, Keterampilan dan Kewirausahaan**

Untuk pembinaan kreatifitas, keterampilan dan kewirausahaan, ada dua sekolah yang menarik untuk dijadikan contoh. Mereka adalah SMAN 3 Denpasar dan Madrasah Aliyah Al-Ma'ruf. Di SMAN 3 ada koperasi siswa dengan konsep kantin kejujuran. Koperasi siswa yang bernama Satya Dana Sejahtera yang terletak di samping lapangan upacara bendera ini, tidak ada penjaganya. Setiap siswa yang membeli barang, dapat mengambil barang tersebut dengan sendirinya dan membayarnya di tempat yang telah ditentukan. Jika ada uang kembalian, maka ia dapat mengambilnya sendiri. Kantin dengan ukuran sekitar 3x6 meter ini menjual berbagai barang kebutuhan siswa seperti pensil, pulpen, buku, pengerut pensil. Dengan menggunakan tembok kaca, setiap orang yang masuk dapat terlihat dari luar. Di depan pintu masuk terdapat seperangkat komputer dan brankas uang untuk meletakkan uang hasil pembelian barang. Di atasnya terdapat kertas untuk mengidentifikasi nama pembeli serta barang yang dibeli. Di atas kertas ada hari serta tanggal pembelian. Di bawahnya ada form yang berisi nomor, nama pembeli, kelas, nama barang, jumlah barang yang dibeli, serta harga. Juga disertai dengan langkah-langkah berbelanja berikut:

1. Klik kolom kode barang.
2. Jika barang sudah terdapat barcode, scan pada alat scan.
3. Bila tidak terdapat barcode pada barang, ketik kode barang yang telah tercantum pada tabel.
4. Selanjutnya jika ingin membeli barang yang sama lebih dari 1, tulis di kolom jumlah yang berada di sebelah kanan kolom kode barang (ketik jumlah yang diinginkan).
5. Selanjutnya klik enter pada keyboard, maka total harga akan tertera pada layar komputer.
6. Buka cas drawer dan taruh uang sejumlah total.
7. Untuk membuka lembaran baru klik F9 pada keyboard.

Di bagian dinding kantin terdapat tulisan “selamat datang di konter kejujuran, self service, self payment”. Di bagian bawah belakang rak barang terdapat perintah “silakan pilih dan ambil barang yang anda inginkan” dengan background gambar empat siswa sedang melihat dan mengucapkan terima

kasih dengan tangan di depan. Dengan slogan “jujur itu hebat”, kantin ini mempunyai visi menjadikan wirausaha muda yang berintegritas. Misinya ada 3 yakni:

1. Menjadikan generasi muda yang unggul dan kompetitif dalam menghadapi tantangan global.
2. Mengembangkan kreatifitas dan menumbuhkan jiwa bewirausaha sebagai wadah penyaluran bakat dan kemampuan.
3. Menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan kreatif, dan mendorong siswa melakukan kegiatan wirausaha.

Selain mempunyai kantin kejujuran, koperasi ini juga mempunyai program simpan pinjam dan lomba *entrepreneurship trisma competition*.

Untuk menumbuhkan jiwa wirausaha, sekolah juga mempunyai program expo kewirausahaan dan alumni berbagi. Pada expo kewirausahaan, dijual berbagai barang kreatifitas siswa. Expo tidak hanya diselenggarakan di sekolah tetapi juga bekerjasama dengan hotel-hotel di Bali. Salah satu hasil karya siswa adalah bantal kursi yang terletak di ruang kepala sekolah. Sementara pada kegiatan alumni berbagi, sekolah mengundang beberapa alumni SMAN 3 yang telah sukses dan berhasil dalam berwirausaha. Mereka membagikan ilmu, pengetahuan, dan pengalamannya kepada para siswa.

Jiwa kewirausahaan juga menjadi program unggulan Madrasah Aliyah Al-Ma'ruf. Ada kegiatan *Bisnis Day*, *Cooking Day*, dan bazar. Pada kegiatan *Bisnis Day*, sekolah memberikan modal Rp. 50.000 kepada murid dan mereka mengelola uang tersebut untuk membuat masakan. Mereka menjual makanan tersebut di sekitar sekolah. Hasil penjualan tersebut ditabung ke bank dan digunakan untuk membiayai kegiatan OSIS. Menurut Happy, ketua OSIS Madrasah Aliyah Al-Ma'ruf, mereka bisa menabung sampai Rp. 1.000.000. Sebagian hasil juga digunakan untuk kegiatan berikutnya, *Cooking Day*. Mereka bisa memasak di rumah masing-masing. Kegiatan ini dilakukan per semester setelah selesai ujian sekolah.

Bazar dilakukan untuk pengumpulan dana menghadiri kejuaraan dan perlombaan di luar sekolah. Penggalangan dana dilakukan untuk membiayai perlombaan yang akan diikuti oleh para siswa di tingkat nasional. Mereka mengadakan kegiatan bazar kerjasama dengan beberapa pengusaha seperti

rumah makan Wong Solo. Selain dari bazar, orang tua siswa yang ikut perlombaan juga dimintai partisipasinya untuk membayar sebagian dari biaya yang dibutuhkan.

**f. Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Gizi**

Sebagai salah satu bentuk pembinaan terhadap kualitas jasmani, kesehatan dan gizi, semua sekolah bersikap tegas terhadap narkoba. Siswa yang ketahuan membawa atau mengonsumsi narkoba, diberikan sanksi yang berat yakni dikeluarkan dari sekolah. Narkoba yang kini menyasar ke semua golongan, status sosial ekonomi, usia, menjadi salah satu perhatian pemerintah. Kampanye anti narkoba yang didengungkan di berbagai tempat dan dengan berbagai pihak, termasuk ke sekolah, dengan harapan agar anak-anak Indonesia terhindari dari narkoba. Sekolah juga mengadakan sosialisasi kepada seluruh siswa dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencegah narkoba dan minuman keras seperti kepolisian dan BNN.

Tidak hanya narkoba, rokok dan minuman keras yang beralkohol juga menjadi perhatian yang serius. Di SMAN 3 Denpasar, siswa yang merokok atau membawa rokok dan membawa/mengonsumsi minuman keras, termasuk melakukan pelanggaran dengan skor 10. Artinya siswa tersebut tidak diperbolehkan untuk masuk sekolah atau belajar di rumah. Perilaku hidup sehat juga diatur dalam tata tertib tentang kewajiban untuk membangun budaya atau gaya hidup bersih dan sehat, tidak membuang sampah sembarangan. Jika ada siswa yang sakit, maka wajib dilaporkan dan dibawa ke ruang UKS untuk diberikan perawatan.

**g. Pembinaan Sastra dan Budaya**

Masyarakat Bali sangat menghargai budaya. Karena budaya bukan hanya sekedar kreasi manusia tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Budaya lokal yang secara turun temurun dilestarikan dengan cara mengajarkannya kepada anak-anak sejak dini. Setiap banjar mempunyai bale banjar yang digunakan untuk mementaskan seni, baik yang dipentaskan oleh anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Seni tidak hanya berarti budaya dan adat tetapi juga menyangkut agama. Beberapa kesenian yang dilestarikan mempunyai makna mendalam tentang religiusitas dan spiritualitas. Kesenian tersebut

dikembangkan di sekolah sebagai salah satu bentuk ekstrakurikuler. Misalnya kesenian seni tabuh, gendang yang dimainkan oleh siswa. Kesenian ini juga dimainkan untuk mengiringi acara kematian. Pada hari sabtu, 8 Oktober 2017, peneliti berkesempatan untuk menghadiri acara Ngaben salah seorang guru SMAN 8 yang meninggal dunia. Acara tersebut diiringi dengan gendang yang dimainkan oleh siswa sekolah.

Apresiasi budaya tampak pada peringatan hari-hari besar agama Hindu. Misalnya hari Purnama Tilem, Saraswati, Siwalatri, Galungan, dan Kuningan. Pada hari tersebut, siswa harus menggunakan pakaian adat Bali. Sementara di Madrasah Aliyah Al-Ma'ruf pembinaan sastra dan budaya dalam bentuk lomba menyanyi antarkelas dan *stand up* komedi pada waktu setelah ujian semester berakhir.

#### **h. Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Perkembangan teknologi dan informasi juga dimanfaatkan oleh pihak sekolah sebagai media pembelajaran. Semua sekolah kecuali SMAN 3 Denpasar, siswa diperbolehkan untuk membawa HP ke sekolah. Berdasarkan pengamatan peneliti di SMAN 4, para siswa yang berada di perpustakaan sekolah menggunakan HP mereka untuk mencari tugas yang diberikan oleh guru dan berdiskusi dengan temannya.

Akan tetapi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa meskipun siswa dipebolehkan untuk membawa dan menggunakan HP, tetapi pada saat pelajaran di kelas mereka tidak boleh menggunakannya. Demikian juga ketika sedang ulangan atau ujian. Di Madrasah Aliyah Tawakkal, ketika siswa masuk kelas, HP mereka dikumpulkan kepada wali kelas. Setelah terkumpul, mereka kemudian melanjutkan pelajaran dengan menyetor hafalan al-Quran kepada wali kelas.

#### **i. Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Inggris**

Ada berbagai jenis pembinaan Bahasa Inggris di sekolah. Di antaranya adalah dengan mendirikan *Club* Bahasa Inggris, ada *English corner*, dan Pidato Bahasa Inggris. Di madrasah aliyah, ada program '*muhadharah*' setiap Jumat. Pidato tersebut selain menggunakan Bahasa Indonesia, juga menggunakan Bahasa Inggris dan Arab.

### 3. Mereka yang Rentan di Tengah yang Bertahan

Pasca Bom Bali tahun 2002, pemerintah dan tokoh adat Bali menggagas tentang wacana Ajeg Bali. Wacana ini digulirkan sebagai upaya untuk mempertahankan identitas Bali dan juga sekaligus sebagai bentuk resistensi terhadap para pendatang. Ajeg Bali tidak hanya diperkenalkan di masyarakat dan pemerintahan tetapi juga di sekolah. Selain melalui ritual keagamaan, Ajeg Bali juga diperkenalkan melalui seni dan budaya Bali yang dikembangkan di sekolah.

Sekolah-sekolah di Bali secara umum tidak mudah untuk dimasuki oleh gerakan-gerakan radikal dari luar. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh luar sekolah yang diterima oleh siswa melalui media sosial dan hasil interaksi dengan orang luar melalui pariwisata, tetapi secara umum, masyarakat Bali mempunyai ketahanan budaya yang sangat baik. Penyatuan antara agama dan budaya menjadi salah satu faktornya. Budaya terinspirasi dari agama dan agama memberikan warna terhadap budaya. Budaya tidak hanya sebagai *art* semata tetapi mempunyai unsur spiritualitas dan bersifat transendental.

Selain itu, para siswa tidak hanya dituntut untuk berprestasi secara akademik tetapi juga prestasi non-akademik dengan memperhatikan keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan spiritual. Hal tersebut terlihat dari visi sekolah. SMAN 2 mempunyai visi Vidyaya Prajnam Prapnumahe, terwujudnya output dan outcome bermutu berwawasan budaya; SMAN 3 dengan visi Datang dan Pergi demi cita-cita, SMAN 4 menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual; Keragaman aktivitas siswa di sekolah, secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap siswa untuk menghindari pengaruh dari luar. Dengan demikian waktu siswa habis untuk belajar di sekolah.

Sekolah sebagai wawasan wiyata mandala. Di website SMAN 2 Denpasar disebutkan bahwa:

1. Sekolah merupakan wiyata mandala (lingkungan pendidikan) sehingga tidak boleh digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan di luar tujuan pendidikan.

Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh proses pendidikan dalam lingkungan sekolahnya dan harus berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
  - b. Meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan budi pekerti,
  - c. Memperkuat kepribadian,
  - d. Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
2. Antara guru dan orang tua murid harus ada saling pengertian dan kerja sama yang baik untuk mengemban tugas pendidikan.
  3. Para guru di dalam maupun di luar lingkungan sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru sebagai manusia yang dapat digugu (dipercaya) dan ditiru (diikuti) betapapun sulitnya keadaan yang melingkunginya.
  4. Sekolah sebagai wiyata mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya tetapi harus mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang secara sadar atau tidak, dapat menimbulkan pertentangan di antara kita karena perbedaan suku, agama, asal usul keturunan, dan tingkat sosial ekonomi serta perbedaan paham politik.

Berdasarkan aturan yang ada, sekolah memang diproteksi dari pengaruh luar. Bahkan di SMAN 3 dijelaskan dalam tata tertib bahwa organisasi yang diakui di sekolah hanyalah OSIS. Adapun cara untuk mencapai hal tersebut disebutkan dalam poin berikutnya tentang kewenangan kepala sekolah untuk menciptakan sekolah yang unggul secara spiritualitas, intelektualitas, emosional, dan cinta tanah air. Selanjutnya hubungan antara guru dan orang tua murid harus terjalin dengan baik, keteladanan guru di sekolah dan luar sekolah serta memelihara kebinekaan.

Lingkungan sekolah yang asri, nyaman, aman, serta hubungan harmonis antarwarga sekolah, membuat anak didik betah di sekolah. Mereka terpacu untuk belajar dan menjadi yang terbaik di bidang masing-masing melalui kegiatan ekstrakurikuler. Bidang seni dan budaya diarahkan untuk menjaga tradisi dan budaya Bali.

Untuk menghadapi gerakan radikal, sekolah mempunyai program penguatan karakter kebangsaan. Program-program yang dimaksud adalah pramuka, upacara bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan memperbanyak aktivitas siswa di sekolah. Di Madrasah Aliyah Al-Ma'ruf,

ada kegiatan pramuka yang diberi nama perjusami (perkemahan Jumat, Sabtu dan Minggu). Dalam kegiatan ini diadakan berbagai kegiatan lomba seperti LKBB, latihan baris berbaris, lintas alam. Biasanya kegiatan itu diadakan di Pulau Serangan tetapi karena kondisi, maka untuk tahun ini diadakan di sekitar sekolah saja.

**a. Internalisasi Nilai Kebinekaan: Transmisi dan Penerjemahan Nilai**

Meskipun ada praktik eksklusifitas dan intoleransi, tetapi ada beberapa praktik kebinekaan di sekolah. Salah satunya tentang toleransi. Toleransi antaragama terlihat dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Pada hari besar Hindu, semua siswa bergotong royong dan berpartisipasi dalam menyiapkan upacara keagamaan. Bentuk partisipasinya adalah materi dan tenaga. Mereka ikut mengumpulkan uang untuk biaya upacara seperti '*banten*', bahan untuk sesajen. Sebenarnya bentuk toleransi seperti ini tidak hanya terjadi di sekolah, pada perayaan hari besar agama Hindu di masyarakat, warga non-Hindu juga ikut menyumbang dan saling membantu untuk menyiapkan upacara tersebut seperti persiapan ogoh-ogoh yang dilakukan sehari setelah Hari Nyepi. Bahkan tidak jarang, remaja muslim ikut menyemarakkan Nyepi dengan membawa ogoh-ogoh.

Demikian juga pada perayaan hari besar Islam. Misalnya pada waktu Idul Adha, sekolah tidak hanya membuka ruang untuk tempat penyembelihan hewan kurban seperti yang terjadi di SMAN 2 dan 8, tetapi hewan kurban tersebut juga dibagikan kepada warga non-muslim sekitar sekolah sebagaimana yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah Tawakkal dan Al-Ma'ruf. Jika masyarakat muslim di luar Bali menyembelih hewan kurban berupa sapi, maka siswa muslim tidak menyembelih sapi sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap warga Hindu yang menganggap sapi sebagai makhluk suci. Demikian juga pada Bulan Ramadhan, di SMAN 2, 4, dan 8 diadakan buka puasa bersama dengan mengundang siswa dan guru non-muslim. Pada hari raya agama, mereka juga saling mengucapkan selamat.

Nilai-nilai kebersamaan dan kesederhanaan diajarkan melalui aturan di sekolah. Misalnya di SMAN 3, sebelumnya siswa tidak diperbolehkan untuk menggunakan sepeda motor. Mereka hanya diperbolehkan untuk

memakai sepeda. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, mereka kini diperbolehkan. Terkait dengan ketentuan adanya SIM bagi pengguna kendaraan bermotor, Polisi Bali lebih mengedepankan kepentingan anak-anak sekolah daripada urusan administrasi berkendara. Siswa yang menggunakan sepeda motor dan menggunakan seragam sekolah, diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor sendiri meskipun mereka belum mempunyai SIM asalkan mereka menggunakan kelengkapan bermotor seperti helm.

Sebagai bentuk kebersamaan, sekolah juga tidak memperkenankan para pengantar yang menggunakan mobil untuk mengantar anaknya hingga gerbang sekolah. SMAN 3 terletak masuk ke dalam gang sekitar 50 meter dari jalan besar. Dalam aturan sekolah Bab IV tentang transportasi sekolah pasal 9 sebagai berikut:

1. Seluruh siswa diperkenankan untuk mengendarai kendaraan bermotor (dengan kelengkapan motor sesuai dengan peraturan lalu lintas) dan tanpa atribut di luar tujuan ke sekolah.
2. Apabila siswa bersangkutan diantar ke sekolah dengan kendaraan bermotor (mobil), hanya diperkenankan sampai di ujung jalan SMA Negeri 3 Denpasar, sedangkan kendaraan bermotor boleh di depan pintu gerbang.
3. Siswa tidak diperkenankan menggunakan mobil ke sekolah.

#### **b. Mencari Model Ketahanan dari Kasus-kasus di Sekolah**

Ada beberapa model dan contoh yang baik untuk kebinekaan dan kehidupan inklusif di sekolah. Dari aspek gender, sekolah memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi pengurus OSIS. Perempuan yang menjadi ketua bukan karena *affirmative action* (adanya pengkhususan yang diberikan kepadanya), tetapi karena ia mampu bersaing dan mengungguli laki-laki. Jika perempuan diberikan kesempatan, maka ia akan mampu bersaing dengan laki-laki. Sekolah yang diketuai oleh perempuan adalah OSIS SMAN 4, OSIS Madrasah Aliyah Al-Ma'ruf, MPK SMAN 2, dan MPK SMAN 8 Denpasar. Ada dua dari enam OSIS dan MPK yang diketuai oleh perempuan.

Selain perempuan, ada juga hak-hak minoritas yang diperhatikan. Misalnya Ketua MPK SMAN 8 Denpasar, tidak hanya ia adalah perempuan

tetapi juga ia seorang muslim. Hak-hak minoritas lainnya yang terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Adanya Guru Agama Islam di SMAN 2 dan SMAN 7 Denpasar serta Guru Agama Buddha di SMAN 2 Denpasar.
2. Adanya ruang untuk Salat atau Musala di SMAN 2 Denpasar serta diperbolehkannya aula dijadikan sebagai tempat Salat Jumat di SMAN 7 Denpasar. Kepala sekolah SMAN 8 Denpasar juga mempersilakan siswa muslim untuk melaksanakan Salat Zuhur di sekolah dengan menggunakan ruangan kelas atau aula.
3. Siswa muslim kelas XII SMAN 7 Denpasar mendapatkan pelajaran agama pada saat siswa lain mendapatkan pelajaran agama Hindu. Tetapi ini tidak berlaku bagi siswa di kelas lain atau sekolah lain. Mereka mendapatkan pelajaran agama di luar jam pelajaran, sepulang sekolah atau pada hari Minggu. Secara umum yang berlaku adalah ketika siswa Hindu mendapatkan pelajaran agama, siswa non-Hindu belajar di perpustakaan.
4. Adanya organisasi rohis, kerohanian Islam di luar organisasi OSIS dan ekstrakurikuler lainnya di sekolah. Di SMAN 2 ada Rismanda (Remaja Islam SMAN 2) dan di SMAN 4 ada Krisma (Kelompok Remaja Islam SMA 4). Kedua organisasi ini langsung dibimbing dan dibina oleh Guru Agama Islam atau guru yang beragama Islam di sekolah masing-masing.

Toleransi antara umat beragama terlihat pada perayaan hari raya agama Hindu dan Islam. Pada hari raya Hindu, siswa non-Hindu ikut berpartisipasi untuk mempersiapkan persembahyangan di sekolah. Ketika siswa Hindu sedang sembahyang di Hari Purnama Tilem, siswa non-Hindu belajar di kelas atau di perpustakaan, sedangkan pada Hari Saraswati dan Siwalatri, mereka libur.

Untuk pendidikan karakter, SMAN 3 Denpasar mengembangkan program sekolah yang menyeimbangkan antara akademik dan religiusitas, antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Selain pembiasaan nilai-nilai ke-Hindu-an, sekolah ini juga unggul dalam riset. Karya ilmiah menjadi prasyarat kelulusan siswa.

Sekolah yang unggul secara akademik dan mempunyai jejaring dengan luar negeri adalah SMAN 4 Denpasar. Untuk menciptakan siswa yang unggul secara akademik, sekolah memberikan jam tambahan pelajaran di luar jam

sekolah. Berbagai kerjasama internasional telah dilakukan untuk program pertukaran siswa dengan sekolah di Singapura, Australia dan Korea Selatan.

Sedangkan model sekolah survival adalah Madrasah Aliyah Al-Ma'ruf. Di tengah keterbatasan fasilitas, sekolah ini mampu menorehkan prestasi di berbagai event tingkat lokal dan nasional. Ada beberapa program unggulan seperti kasidah dan tilawah. Untuk mengatasi masalah pendanaan, mereka melaksanakan bazar bekerjasama dengan pihak lain. Program unggulan madrasah aliyah adalah tilawah dan kasidah. Madrasah aliyah juga mampu berperan di tingkat lokal Bali melalui forum OSIS se-Kota Denpasar dengan menempatkan salah satu siswanya sebagai pengurus forum.

Madrasah Aliyah Tawakkal adalah sekolah inklusif keIslaman. Sekolah ini berusaha untuk merangkul keragaman organisasi dan ideologi Islam. Jika Al-Ma'ruf adalah sekolah Nahdatul Ulama, meskipun secara organisasi tidak berafiliasi ke NU, maka Tawakkal tidak berada di bawah naungan salah satu organisasi Islam.

**Tabel 7.** Praktik Kebinekaan di Sekolah:

No	Kegiatan OSIS	Sekolah
1	Pengurus OSIS setara gender	SMAN 4
2	Ketua OSIS perempuan	SMAN 4 dan MA Al-Ma'ruf
3	Ketua MPK perempuan dan muslim	SMAN 8
4	Rohis sebagai organisasi informal di sekolah	Rismanda SMAN 2 dan Krisma SMAN 4
	Ibadah	
5	Saling mengucapkan selamat hari raya	Semua sekolah
6	Penyediaan tempat ibadah bagi non-Hindu	SMAN 2
7	Ada kebijakan lisan Kepala sekolah untuk menggunakan fasilitas sekolah sebagai tempat ibadah	SMAN 8
8	Gotong royong dalam mempersiapkan upacara keagamaan Hindu	Semua sekolah
9	Buka puasa bersama	Semua sekolah
10	Berkurban pada hari raya Idul Adha	Semua sekolah
11	Berbagi pada non-muslim di hari raya Idul Adha	MA Al-Ma'ruf dan MA Tawakkal
12	Pada hari raya Idul Adha, hewan yang disembelih bukan sapi melainkan kambing sebagai bentuk penghormatan kepada umat Hindu yang menghormati sapi sebagai hewan suci	Rismanda, Krisma, siswa muslim SMAN 8, MA al-Ma'ruf dan MA Tawakkal
13	Ketersediaan guru agama Islam dan Buddha	SMAN 2



*Bagian Tiga*

TOLERANSI  
STANDAR  
GANDA



# 5 CIREBON

## A. LANSKAP PENELITIAN

### 1. Konteks Masyarakat

Penelitian tentang kebijakan ekstrakurikuler ini dilakukan di Cirebon, tepatnya di wilayah Kabupaten. Kabupaten Cirebon sendiri memiliki luas 990,36 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk mencapai 2.163.69 jiwa dibagi atas 40 kecamatan, yang dibagi lagi atas 412 desa dan 12 kelurahan.<sup>1</sup>

Empat daerah yang menjadi batas wilayah yaitu Kabupaten Indramayu di sisi Utara, Kabupaten Majalengka di sisi Barat, Kabupaten Kuningan di sisi Selatan dan Kota Cirebon di sisi Timur, sering diidentifikasi sebagai wilayah Cirebon juga. Ini merupakan perjalanan historis dan politis yang memasukkan semua kota tersebut menjadi wilayah 3 Cirebon atau bagian *gemeente* (Keresidenan) Cirebon yang dirintis Belanda sejak tahun 1906. Keempat daerah ini sampai sekarang terlibat dalam dinamika budaya dan proses sosial yang terjadi di masyarakat.

Ali Humaedi yang pernah melakukan penelitian terhadap masyarakat Cirebon menilai telah terjadi hibrida dalam budaya masyarakat Cirebon.<sup>2</sup> Maksudnya, telah terjadi pembauran antara kesadaran kebudayaan diri dengan kebudayaan lain. Di saat yang sama, kebudayaan lain ini sangat sulit untuk menunjukkan eksistensinya secara utuh dalam kehidupan masyarakat. Baginya, Kebudayaan Cirebon yang ada sekarang merupakan kombinasi antara pengaruh kebudayaan Jawa (Mataram) di satu sisi, dan Kebudayaan China-Arab disisi lainnya.

---

1 Badan Pusat Statatistik Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cirebon dalam Angka, (Cirebon, BPS, 2016).

2 M. Alie Humaedi, 'Budaya Hibrida Masyarakat Cirebon' *Jurnal Humaniora*, Vol. 25, No. 3 Oktober 2013: 281-295.



**Gambar 8. Bagan Produksi Kebudayaan Cirebon yang Melahirkan Hibriditas Kebudayaan**

Sebagaimana digambarkan dalam grafik yang dibuat Ali Humedi di atas, di jantung dasar kebudayaan terdapat kebudayaan Sunda yang secara genealogis menjadi budaya mainstream yang membentuk identitas masyarakat Cirebon sejak lama. Dari pembauran ini kemudian melahirkan kebudayaan Cirebon yang kita kenal sekarang, yaitu Jawa Koek atau Jawa Reang. Ini mengindikasikan adanya sebuah tarik ulur yang terus menerus antara kebudayaan Sunda sebagai budaya mainstream dengan budaya Jawa dan China-Arab yang marginal. Wujud dari interaksi kebudayaan ini paling terlihat dari pemakaian bahasa sehari-sehari masyarakat, yaitu Jawa Cirebon atau Jawa Koek. Bahasanya cukup berbeda dengan bahasa Jawa standar karena ada campuran Sunda.

Sebagai daerah dengan mayoritas Islam (98%), praktik keagamaan yang ada di masyarakat sangat kental dengan warna Islam tradisonal. Namun, warna organisasi keagamaan yang ada di Cirebon sangatlah variatif. Dari 149

Ormas yang ada di Cirebon, 134 ormas merupakan Ormas Islam. Diantara Ormas Islam ini, selain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, di Cirebon juga terdapat sejumlah ormas radikal maupun organisasi teroris seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), FUI, Al-Manar, GAPAS, Jamaah Ansharut Tauhid maupun Jamaah Ansharus Syariah. Sejumlah Ormas Islam inilah yang mewarnai dinamika kehidupan keagamaan di Cirebon saat ini. Sebagaimana akan dibahas dibagian selanjutnya, dinamika keagamaan di Cirebon saat ini sangat dipengaruhi oleh pertarungan antara kelompok moderat dan intoleran dalam perebutan ruang publik bersama, seperti masjid. Kelompok moderat diwakili oleh Nahdlatul Ulama dan kelompok Islam garis keras yang di wakili utamanya oleh FUI dan GAPAS.

## **2. Konteks Sekolah**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten dan Kota Cirebon. Di Kabupaten, Penelitian mengambil sekolah SMAN yang berlokasi di Kecamatan Sumber, Arjowinangun, Jamblang dan Plumbon. Adapun untuk MAN mengambil sekolah yang berlokasi di Kecamatan Plered dan Ciwaringin. Sementara di Kota Cirebon, penelitian dilakukan di dua sekolah yang berlokasi di kecamatan Kejaksan. Namun, dua sekolah yang terletak di kota ini sifatnya hanya sekunder. Dalam arti sebagai perbandingan dan verifikasi dari data primer yang diperoleh di sekolah-sekolah di Kabupaten. Karena itu, dua sekolah tersebut tidak akan dibahas secara detil pada bagian ini.

Berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya, MAN 2 Babakan Ciwaringin sebenarnya merupakan gabungan dari lima Madrasah Salafiyah yang ada di pesantren-pesantren Babakan Ciwaringin tahun 1968.<sup>3</sup> Sesuai dengan SK Menteri Agama RI No.17 tahun 1978, nama MAN Babakan Ciwaringin Kab. Cirebon secara resmi dipakai. Sebelumnya, nama yang dipakai adalah Madrasah Aliyah Al Hikamus Salafiyah, Pesantren Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon ini kemudian berubah menjadi Madrasah Aliyah Agama

---

3 Kelima Madrasah Salafiyah ini adalah Madrasah Salafiyah (Msy) Diniyah Takmiliah Awaliyah, Madrasah Salafiyah (Msy) Diniyah Takmiliah Wustho, Madrasah Salafiyah (Msy) Diniyah Takmiliah Ulya menggunakan Kurikulum Pesantren ditambah Kurikulum Departemen Agama, Madrasah Hikmatu Salafiyah (MHS) Tingkat Ibtida'iyah dan Madrasah Hikmatu Salafiyah (MHS) Tingkat Tsanawiyah.

Islam Negeri ( MAAIN).<sup>4</sup> Meski begitu, apa yang tak lekang dari perubahan nama itu adalah ciri khas sekolah. Sampai kini, kultur pesantren masih sangat terasa kuat pengaruhnya di sekolah ini. Sebanyak 1.645 siswa yang dikelompokkan menjadi 38 Rombongan Belajar (ROMBEL) di sekolah dengan luas 16.418 m<sup>2</sup> ini memang 90% berstatus santri. Sekolah ini sendiri pernah menjadi salah satu MAN Model dari 35 MAN Model seluruh Indonesia tahun 1998.

Madrasah aliyah berikutnya yang menjadi kajian penelitian ini adalah MAN 1 Cirebon, sekolah dengan luas lahan mencapai 10.760 m<sup>2</sup> yang berdiri pada tahun 1978 berlokasi di Jl. Kantor Pos No. 36 Weru. Saat ini 1.408 siswa (375 laki-laki dan 1033 perempuan) yang tergabung dalam 34 Rombel tercatat menjadi peserta didik MAN 1 Cirebon.<sup>5</sup> Keberadaan MAN Cirebon 1 Kabupaten Cirebon di Weru berdampingan dengan 3 (tiga) lembaga pendidikan lain, yaitu SMK Al-Musyawirin, SMP Modern Al-Musyawirin dan MTsN Cirebon II. Meski tidak ada pengaruh pesantren secara langsung sebagaimana yang terjadi pada MAN 2, namun kebijakan MAN 1 sangat condong ke arah pendidikan pesantren. Selain mengadopsi kurikulum pendidikan dari Kementerian Agama, sekolah mencoba mengadaptasi pendidikan pesantren dengan menghadirkannya di sekolah. Pesantren yang dimaksud fokus pada pembinaan siswa dalam menghafal al-Quran.

Di antara SMAN yang menjadi kajian ini adalah SMAN 1 Sumber. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 29.750 m<sup>2</sup> ini berlokasi di jalan Sunan Malik Ibrahim No. 4, Sumber Kabupaten Cirebon. Sekolah ini pertama kali dibuka tahun 1985. Saat ini tercatat ada 1.207 peserta didik yang tergabung dalam 35 Rombel di sekolah ini. Sekolah ini dahulu berpredikat RSBI di Provinsi Jawa Barat dari 44 SMA.<sup>6</sup> Namun, pada tahun 2013 setelah hasil putusan MK melalui surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penghapusan sistem RSBI, maka SMA Negeri 1 Sumber berubah menjadi Sekolah Nasional unggulan saja. Dengan statusnya sebagai sekolah unggulan,

---

4 Lihat dalam profil sekolah atau website resmi sekolah, <http://www.manciwaringin.sch.id/>.

5 Lihat dalam Profil sekolah tahun 2017 atau website resmi sekolah, <http://www.man1cirebon.sch.id/45154/#>

6 Lihat dalam Profil sekolah SMAN 1 Sumber tahun 2017.

maka menjadi sesuatu yang wajar jika sekolah ini menjadi rujukan pertama bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon dalam menyekolahkan anaknya.

Selanjutnya adalah SMAN 1 Arjowinangun. Sekolah yang berlokasi di Jl. Sutan Syahrir Arjowinangun ini berdiri di atas tanah seluas 15.040 m<sup>2</sup> memiliki peserta didik sebanyak 1.155 yang tergabung dalam 27 Rombel.<sup>7</sup> Di antara lima sekolah lain, ini merupakan satu-satunya sekolah yang saat ini sangat fokus pada pembangunan gedung dan prasarana sekolah. Di bawah kepemimpinan Suharyono, pembangunan sarana fisik tersebut diklaim sebagai bagian dari implemmentasi program peningkatan mutu pendidikan karakter di sekolah.<sup>8</sup>

Di sebelah Barat kota Cirebon, penelitian ini mengambil fokus di SMAN 1 Jamblang. Sekolah yang berdiri pada tahun 1989 ini semula merupakan sekolah guru olahraga (SGO). Saat ini sekolah yang terletak di Jl. Nyi Mas Rarakerta ini memiliki 1.060 peserta didik yang terbagi menjadi 28 Rombel. Siswa-siswa ini rata-rata berasal dari desa-desa di Kecamatan Jamblang.<sup>9</sup> Sebagai catatan, Kecamatan Jamblang sendiri sering diasosiasikan sebagai sarang terorisme di Cirebon. Ini bukan hanya dikaitkan dengan asal daerah Dian Yulia Novi, teroris Bekasi dari Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamblang, namun juga fakta penangkapan tiga orang terduga teroris di Desa Orimalang, Jamblang, Kabupaten Cirebon yang disinyalir berkaitan dengan bom yang terjadi di Thamrin, Jakarta Pusat tahun 2016 lalu.

Tidak jauh dari SMAN 1 Jamblang, penelitian ini juga melakukan penggalan data di SMAN 1 Plumbon. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 8.578 m<sup>2</sup> ini terletak di Jl Yudistira Kec. Plumbon, Kab. Cirebon.<sup>10</sup> SMA ini dulunya merupakan bagian dari SMA Negeri 1 Palimanan, sebelum berdiri sendiri pada tahun 1985. Saat ini sekolah memiliki 1.050 peserta didik (338 laki-laki dan 712 perempuan) tergabung dalam 29 Rombel. Patut disinggung sekilas bahwa ini merupakan satu-satunya sekolah yang pernah membuat kebijakan khusus untuk menghadirkan organisasi pelajar, yaitu

---

7 Informasi detail tentang SMAN 1 Arjowinangun bisa dilihat dari Profil Sekolah tahun 2017.

8 Wawancara dengan Suharyono, 8 Oktober 2017.

9 Informasi detail tentang SMAN 1 Jamblang bisa dilihat dalam profil sekolah 2016 atau di website resmi sekolah, <https://sman1jamblang.sch.id/>.

10 Informasi detail tentang SMAN 1 Plumbon bisa dilihat di website resmi sekolah, <http://sman1plumbon-crb.sch.id>.

Ikatan Pelajaran Nahdlatul Ulama (IPNU) di lingkungan sekolah sebagai strategi untuk menghalau arus radikalisme di sekolah.

Sekolah-sekolah tersebut dipilih dengan mengacu kepada beberapa kategori: perkotaan-pedesaan, homogen-heterogen, dan unggulan-non unggulan. SMAN 1 Sumber, SMAN 1 Plumbon dan juga MAN 2 Ciwaringin merepresentasikan sekolah unggulan. Sementara SMAN 1 Jamblang, SMAN 1 Arjowinangun dan MAN 1 Cirebon bukan merepresentasikan sekolah unggulan. Jika dilihat dari heterogenitas siswa, siswa SMAN 1 Jamblang, SMAN 1 Plumbon dan MAN 2 relatif heterogen. Untuk ketagori MAN ini terlihat setidaknya dari latar belakang etnis siswa. Sementara SMAN 1 Arjowinangun latar belakang siswa relatif homogen, demikian juga dengan MAN 1. Dari sisi rural-urban, hanya SMAN 1 Sumber yang terletak di Kota, sisanya berlokasi di pedesaan.

**Tabel 8.** Kategori Sekolah

Nama Sekolah	Prestasi		Siswa		Lokasi	
	Unggulan	Non-Unggulan	Heterogen	Homogen	Pedesaan	Perkotaan
SMAN 1 Sumber	v		v			v
SMAN 1 Jamblang		v	v		v	
SMAN 1 Plumbon	v		v		v	
SMAN 1 Arjowinangun		v		v	v	
MAN 2 Ciwaringin	v		v		v	
MAN 1 Plered		v		v	v	

**a. Latar Sosial Siswa dan Guru**

Dari sekolah-sekolah tersebut, jika dilihat dari latar belakang sosial ekonomi murid, enam sekolah-sekolah tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori; *Pertama, sekolah kelompok kelas menengah atas.* Adalah kelompok kelas menengah atas yang menjadi mayoritas murid di SMAN 1 Sumber. Ini terlihat dari latar belakang profesi orang tua siswa. Sekolah ini menjadi rujukan sejumlah pejabat untuk menyekolahkan anaknya. Ini termasuk sejumlah pejabat yang ditugaskan sementara di Cirebon. *Kedua, sekolah dengan kondisi ekonomi murid yang berasal dari kelas menengah.*

MAN 1 Babakan Ciwaringin masuk dalam kategori ini. Berbeda dengan model pesantren zaman dulu yang kerap diasosiasikan dengan sekolah kaum miskin. Santri-santri yang bersekolah di MAN Babakan Ciwaringin memiliki latar belakang ekonomi kelas menengah. Para siswa ini bukanlah warga asli Ciwaringin, namun masyarakat luar kecamatan atau bahkan luar kabupaten. Di saat yang sama, selain bersekolah mereka juga masuk pesantren. Ketiga, *sekolah dengan kategori murid dari ekonomi miskin*. Selain di SMAN 1 Sumber dan MAN 2 Cirebon, empat sekolah sisanya memiliki latar belakang ekonomi murid dari keluarga miskin. Mereka berasal dari penduduk di sekitar sekolah. Rata-rata mata pencaharian orang tua mereka adalah petani dengan total pendapatan tidak lebih dari satu juta per bulan. Sebagai catatan, meski daerah Plumbon pernah tercatat sebagai daerah industri rotan, namun sejak perusahaan-perusahaan itu gulung tikar, penduduk kembali menggantungkan hidupnya pada pertanian.

Terkait data jumlah guru maupun latar belakang pendidikan mereka, antar satu sekolah dengan sekolah lain sangatlah beragam. Untuk SMAN 1 Sumber jumlah guru mencapai 71 orang (10 magister), SMAN 1 Jamblang terdapat 60 orang guru (6 Magister), SMAN 1 Arjowinangun terdapat 67 guru (7 orang Magister), SMAN 1 Plumbon 64 orang guru (5 Magister), MAN 1 Plered 66 orang guru (4 Magister), MAN 2 Ciwaringin 66 orang guru (8 Magister). Sekilas bisa kita lihat bahwa semakin favorit suatu sekolah, maka jumlah guru yang bergelar Magister semakin banyak. Sementara terkait dengan latar belakang pendidikan guru, bisa dikatakan bahwa semua sekolah yang dikaji merupakan lulusan dari sejumlah perguruan tinggi luar kota seperti UNJ Jakarta, UMJ Jakarta, UPI Bandung atau UNPAD. Namun, ada juga sejumlah guru yang merupakan lulusan dari kampus lokal di Cirebon seperti UMC, Univeristas Widyagati atau IAIN Syekh Nurjati.

Latar belakang pendidikan guru, menentukan materi pelajaran yang dia ampu. Artinya, selama penelitian ini berlangsung, belum ditemukan fakta bahwa guru-guru mengajar di luar jurusan dan keahliannya. Sebagai catatan tambahan, untuk guru mata pelajaran PAI yang sangat terkait dengan fokus penelitian, hampir semuanya adalah lulusan dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Selain mengampu materi pelajaran PAI, mereka juga merupakan Pembina kegiatan ekstrakurikuler Rohis.

Apa yang menarik di Cirebon adalah bahwasanya guru-guru di SMAN ataupun MAN merupakan lulusan atau pernah di pesantren. Pesantren yang menyumbangkan tenaga guru terbesar adalah Pesantren Babakan, Ciwaringin. Dari sini terlihat jelas bahwa jaringan pesantren sangat memberikan pengaruh terhadap tenaga pendidik yang ada di MAN maupun SMAN. Tidak hanya itu, lulusan pesantren ini rata-rata menduduki posisi kunci dalam kebijakan sekolah seperti Wakil Kepala Kesiswaan atau pembina kegiatan ekstra.

#### **b. Tata-ruang Sekolah**

Terkait dengan struktur ruang sekolah, pertama kali yang harus dijadikan sandaran adalah Permediknas No. 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA). Aturan ini bukan hanya mengatur rasio minimum luas lahan dan bangunan yang digunakan untuk KBM, melainkan juga sarana dan prasarana yang harus ada di sekolah.

Khusus terkait dengan kajian penelitian ini, dijelaskan bahwa keberadaan ruang organisasi kesiswaan merupakan standar minimum terpenuhinya sarana dan prasarana di sekolah SMA/MA. Semua sekolah yang diteliti, baik itu MAN/SMAN memiliki ruang OSIS. Apa yang membedakan satu sekolah dengan lainnya adalah tersedianya ruang khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler yang notabene dibawah OSIS. Selain SMAN 1 Sumber, adalah SMAN 1 Arjowinangun yang memiliki perhatian khusus terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekstrakurikuler. Di kedua sekolah ini, selain ruang OSIS, setiap kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola di bawah OSIS disediakan ruang khusus. Sedangkan di sekolah-sekolah lainnya, keberadan ruang khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler ini pada umumnya hanya difokuskan pada kegiatan ekstrakurikuler yang wajib, seperti Pramuka atau Paskibra. Ruang khusus bagi kegiatan keagamaan atau Rohis, meski menjadi ekstrakurikuler pilihan, namun selalu disediakan sekolah.

Secara umum, enam sekolah yang diteliti rata-rata memiliki tata ruang yang hampir sama. Sekolah berbentuk persegi empat dimana ditengah-tengahnya pasti bisa ditemui adanya lapangan. Lapangan ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan upacara, tapi juga untuk tempat siswa berolahraga dan melakukan kegiatan ekstrakurikuler dan untuk melakukan aktivitas keagamaan yang reguler seperti istighosah, pengajian bersama atau tahlilan. Di saat yang sama juga pasti bisa ditemukan adanya masjid. Letak umumnya ada di sudut sekolah. Selain dipakai untuk kegiatan ekstra Rohis, masjid ini juga digunakan siswa dan guru untuk melakukan sholat zuhur berjamaah.

Struktur penataan ruang yang saling berhadapan di mana ruang kepala sekolah dan guru menjadi sentral, menandakan adanya kontrol dan pendisiplinan. Dalam artian pendisiplinan kepada siswa untuk mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Penataan tata ruang ini merupakan bagian dari cara pendisiplinan siswa yang diharapkan melahirkan siswa yang patuh. Kontrol terjadi dalam dua arah. Di satu sisi kontrol dari guru yang ditempatkan di gedung utama. Di saat yang sama adalah kontrol antara siswa dimana setiap aktivitas yang dilakukan siswa akan diketahui dari siswa, terutama dari kelas lain.

Penempatan ruang kepala sekolah dan guru di sentral bangunan memberi keluasaan untuk mengawasi semua siswa dengan satu kriteria tunggal. Dengan penempatan ruang kepala sekolah dan guru di sentral ini menjadikan siswa berusaha menahan diri mereka sendiri. Mereka takut dipantau. Di saat yang sama, keberadaan ruang kelas yang terbuka menandakan adanya saling kontrol dan pengawasn antar satu siswa atau satu kelas dengan lainnya. Tata ruang sekolah ini bisa diartikan merupakan suatu mekanisme kekuasaan dan disiplin bagi siswa, di luar aturan dan tata tertib sekolah yang tertulis dan seperangkat aturan-aturan lainnya.<sup>11</sup>

### **3. Anatomi OSIS di Sekolah**

Sekolah diyakini merupakan salah satu wahana strategis untuk mengembangkan dan mencapai tujuan pendidikan untuk pengembangan

---

11 Seno Joko Suyono, *Tubuh Yang Rasis* (Yogyakarta: Pustaka Relajar, 2002), hlm., 424-426.

pengetahuan dan pembentukan kepribadian peserta didik. Bukan hanya pengembangan pengetahuan, sekolah juga mempunyai mandat untuk mengembangkan sikap dan nilai pada siswa.

Dalam konteks itulah, secara spesifik pemerintah melalui Permendikbud No 23 Tahun 2015 menyebut mandat kedua itu sebagai bagian dari penanaman budi pekerti. Penanaman budi pekerti ini terjadi di ruang kelas maupun di luar kelas dalam kegiatan ekstrakurikuler. Berdasarkan Permendiknas No 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, disebutkan bahwa OSIS merupakan satu satunya organisasi kesiswaan di sekolah. Melalui OSIS inilah pembinaan dan penanaman budi pekerti siswa dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler. OSIS diharapkan menjadi sarana berlatih berorganisasi dan wadah kegiatan bagi siswa di sekolah. OSIS menampung kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang menunjang kurikulum, serta bersifat intra sekolah. Artinya tidak ada hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain.<sup>12</sup>

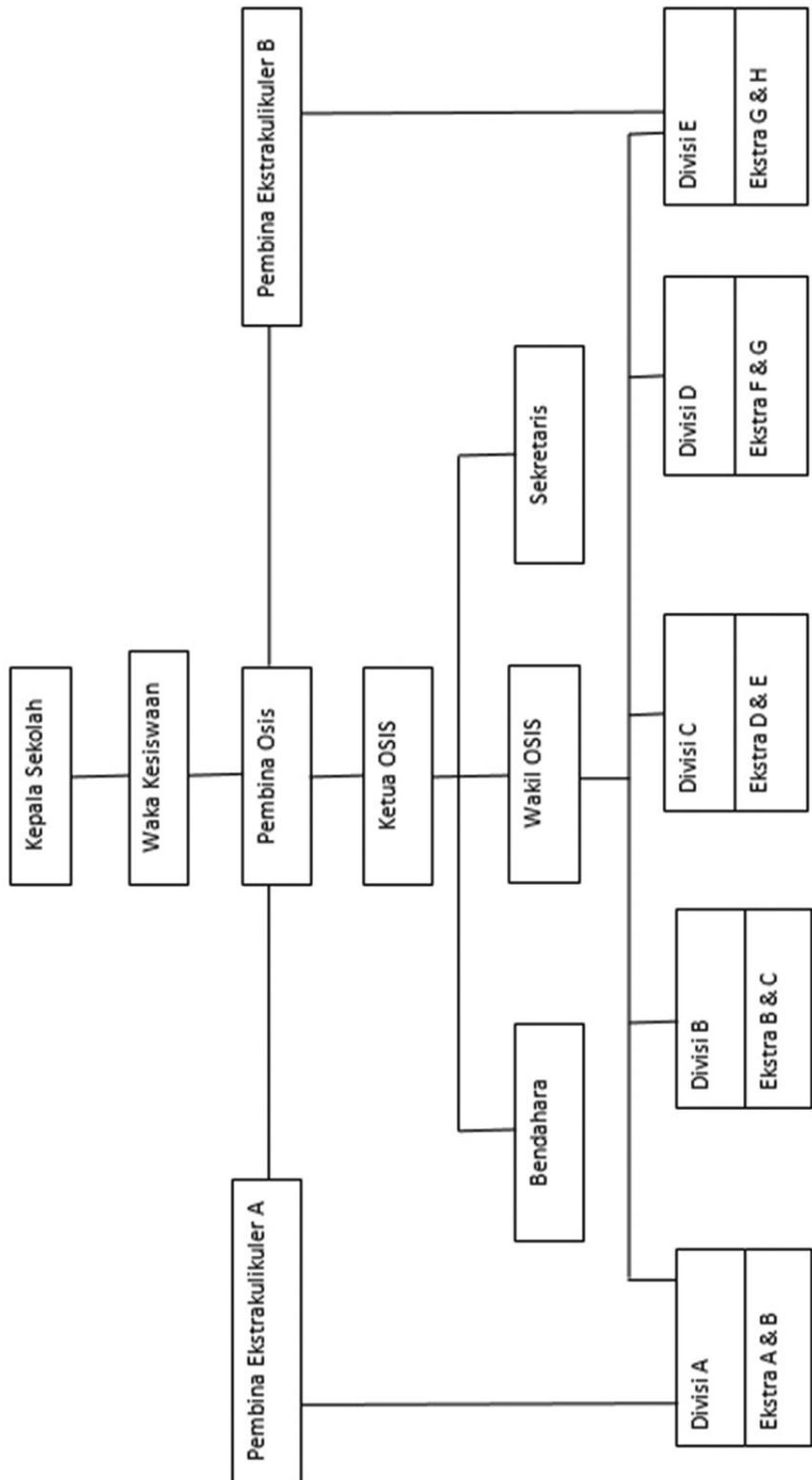
Sebagai bagian dari organisasi intra sekolah, OSIS merupakan unit kegiatan induk yang memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler lainnya. OSIS menjadi katalisator dalam membina hubungan antar kegiatan ekstrakurikuler yang terdapat di sekolah. Dengan kata lain, OSIS berfungsi sebagai penyambung program sekolah dengan program ekstrakurikuler.<sup>13</sup> Di semua sekolah yang dikaji, program kerja OSIS berpedoman pada garis besar program OSIS dan juga program kerja sekolah. Meski terkesan OSIS hanya merupakan penyambung kebijakan dari sekolah, namun OSIS juga memiliki posisi tawar. Meski tidak merata di semua sekolah, siswa melalui pengurus OSIS juga diberikan kewenangan untuk mengusulkan program OSIS yang baru untuk kemudian disepakati oleh Pembina dan Kepala Sekolah.

Terkait proses pemilihan anggota OSIS, tidak ada perbedaan signifikan antara satu sekolah dengan yang lain. Mekanisme pemilihan dilakukan secara langsung oleh siswa. Tidak ditemukan adanya model penunjukkan Ketua dan Pengurus OSIS dari pihak sekolah. Demikian pula halnya dengan struktur kepengurusan OSIS. Di setiap sekolah ada perangkat OSIS yang terdiri dari

---

12 Bandingkan Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan dengan Laporan Kesiswaan MAN 2 Ciwaringin 2016.

13 Lihat dalam Laporan Program OSIS MAN 1 Cirebon 2016/2017.



Gambar 9. Bagan Anatomi Struktur OSIS

Pembina OSIS, Perwakilan Kelas atau MPK, dan Pengurus OSIS. Sedangkan Pengurus OSIS terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Seksi atau Divisi. Di bawah seksi inilah pada umumnya kegiatan ekstrakurikuler bernaung.

Jumlah kegiatan ekstrakurikuler yang bernaung di bawah OSIS inilah yang membedakan satu sekolah dengan yang lain. Ada kegiatan ekstrakurikuler yang salah satunya wajib diikuti siswa seperti PMR, Paskibraka, Pramuka. Ada juga kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat pilihan seperti Rohis, Futsal, Basket, Pecinta Alam dan bentuk kegiatan ekstra lain. Pada umumnya, ragam kegiatan ekstrakurikuler di bawah divisi OSIS ini sangatlah tergantung dari usulan guru ditambah dengan minat siswa.<sup>14</sup>

**Tabel 9.** Ragam Kegiatan Ekstrakurikuler

<b>Nama Sekolah</b>	<b>Wajib</b>	<b>Pilihan</b>
SMAN 1 Sumber	5	15
SMAN 1 Jamblang	4	10
SMAN 1 Plumbon	5	8
SMAN 1 Arjowinangun	5	9
MAN 2 Ciwaringin	5	8
MAN 1 Plered	5	7

#### 4. Peta Aktor

Untuk aktor internal, yang paling banyak terlibat dalam kegiatan OSIS adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan guru pembina. Pembinaan kesiswaan juga melibatkan tokoh internal lain seperti komite sekolah, dewan pengawas dan guru yang bukan pembina secara langsung.

Keterlibatan guru pembina ini sangatlah sentral dalam kegiatan OSIS. Dalam perumusan program kerja, ia bertindak untuk memberikan pengarahan dan memberikan persetujuan. Sementara dalam konteks implementasi, guru pembina diwajibkan untuk tetap terlibat dan mengawasi jalannya kegiatan OSIS. Bahkan warna dari kegiatan OSIS di sekolah-sekolah Cirebon sangat dipengaruhi oleh guru Pembina.

<sup>14</sup> Dalam kasus tertentu kegiatan ekstrakurikuler ini juga merupakan usulan dari alumni seperti Ekstra Perfilman di SMAN 1 Kota Cirebon.

Sedangkan kadar keterlibatan dewan pengawas ini berbeda-beda antara satu sekolah dengan yang lain. Ketika dewan pengawas itu memiliki ikatan kuat dengan sekolah seperti di MAN 2 Cirebon, dia memiliki perhatian terhadap pembinaan guru-guru dan arah program sekolah.<sup>15</sup> Maksud dari ikatan kuat disini adalah bukan hanya berdasarkan ikatan dinas. Namun, fakta pada umumnya, peran dewan pengawas ini tidak begitu terasa dalam kegiatan ekstrakurikuler dibandingkan dengan guru pembina maupun instruktur dari luar.

Dinamika keterlibatan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas itu sama dengan yang terjadi dengan Komite Sekolah. Meski pada umumnya peran komite sekolah ini lebih banyak tercurah pada persoalan anggaran, namun di sejumlah sekolah di Cirebon mereka memiliki peran penting dalam kegiatan ekstrakurikuler. Komite Sekolah di MAN 2 Cirebon misalnya, ikut melakukan pengawasan terhadap program sekolah. Bahkan secara reguler melakukan pembinaan terhadap para guru pembina ekstrakurikuler.<sup>16</sup> Peran komite sekolah di SMAN 1 Sumber juga sangatlah kentara dalam kegiatan ekstra. Bahkan komite sering terlibat dalam kegiatan ekstra secara langsung.<sup>17</sup> Sejumlah sekolah seperti SMAN 1 Jamblang misalnya, sengaja menunjuk komite sekolah dari orang tua siswa di sekitar sekolah. Tujuannya sederhana, agar dia terlibat dalam pengawasan siswa.<sup>18</sup>

Selain aktor internal, terdapat aktor eksternal yang terlibat dalam pembinaan kesiswaan. Di Cirebon sendiri aktor eksternal ini bisa mewakili individu atau lembaga. Individu-individu tertentu sengaja dihadirkan sekolah ketika ia memiliki kompetensi dalam bidang tertentu. Bidang ini biasanya tidak dikuasai oleh guru pembina. Jadi ukuran instruktur dari luar disini lebih pada skill dan kompetensinya dibanding ikatan lain.

Di antara kegiatan ekstrakurikuler yang sering melibatkan aktor luar selain kegiatan-kegiatan ekstra yang bercorak keterampilan, seperti olahraga, seni, paskibra atau pramuka, adalah juga kegiatan Rohis. Instruktur Rohis

---

15 Wawancara dengan H Lukman Hakim, Pengawas MAN 2 Cirebon, 4 Oktober 2017.

16 Wawancara Baidlawi, Komite Sekolah MAN 2 Cirebon, 5 Oktober 2017.

17 Wawancara dengan Mustofa, Komite Sekolah SMAN 1 Sumber, 3 Oktober 2017.

18 Wawancara dengan Ahmad, Wakakesiswaan SMAN 1 Jamblang, 8 Oktober 2017.

ini biasa didatangkan dari pesantren tradisional di sekitar sekolah. Ukuran sederhana dari instruktur Rohis di sekolah-sekolah Cirebon adalah menguasai ilmu agama dan bisa membaca kitab kuning. Pengajian kitab kuning nampak menjadi materi wajib dalam kegiatan Rohis di semua sekolah yang diteliti.

Di luar individu, ada sejumlah pihak mewakili lembaga yang ikut terlibat dalam pembinaan kesiswaan. Diantaranya adalah TNI dan Polri. TNI sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan Paskibraka. Bukan hanya dalam konteks penguatan fisik, TNI di sini dinilai juga menjadi pihak penting dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan bela negara. Adapun pihak kepolisian sering terlibat dalam program penyuluhan, khususnya dalam kegiatan ekstrakurikuler Polisi Sekolah. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa keterlibatan Polri disini sering kali sifatnya seremonial dan berhubungan langsung dengan sekolah daripada dengan siswa langsung sebagaimana TNI. Dalam kegiatan keagamaan atau kegiatan Rohis, peran kementerian agama juga tidak bisa diabaikan. Secara reguler, Kementerian Agama Kota Cirebon mempunyai program untuk memperkuat kapasitas pengurus Rohis di Kota Cirebon terkait Islam Moderat dan Kebinekaan.

Dalam peta jaringan aktor ini, apa yang tidak kelihatan perannya secara langsung adalah alumni. Sejumlah sekolah memang memiliki ikatan alumni yang kuat seperti MAN 1 Babakan Ciwaringin, SMAN 1 Sumber atau SMAN 1 Kota Cirebon, namun tidak terkait langsung dengan pembinaan kesiswaan. Alumni ini sering dilibatkan sekolah dalam seremoni tertentu seperti pekan pendidikan atau ulang tahun sekolah, namun terkait pembinaan ekstra mereka seringkali hanya sebatas rekomendasi. Adalah pihak sekolah dan guru yang pada ujungnya menentukan apakah rekomendasi itu hendak diimplementasikan atau tidak. Jaringan alumni ini pada umumnya memiliki peran dan pengaruh diantara para alumni sendiri, namun tidak langsung ke sekolah.

## **B. TEMUAN HASIL PENELITIAN**

Ada dua hal yang harus diperhatikan terkait dengan kajian atas kebijakan kebinekaan dalam pendidikan ekstrakurikuler di Sekolah Menengah Cirebon. Pertama, adalah terkait dengan kebijakan keagamaan yang menjadi konteks

dimana kebijakan sekolah itu lahir. Ada atau tidaknya kebijakan kebinekaan dalam ranah pendidikan bagaimanapun juga sangat dipengaruhi oleh warna kebijakan keagamaan di daerah. Keberadaan regulasi pendidikan di level pemerintah, baik di Pusat maupun Daerah, yang menjadi dasar rujukan sekolah dalam merumuskan kebijakan merupakan dimensi kedua yang harus diperhatikan.

Dalam konteks itu, bisa dikatakan bahwa level kebijakan keagamaan di tingkat pemerintah daerah yang cenderung diskriminatif dan anti kebinekaan akan memengaruhi pula warna kebijakan pendidikan di sekolah, begitu juga sebaliknya. Penelitian yang dilakukan MAARIF Institute pada tahun 2017 menyimpulkan bahwa proses radikalisasi pada siswa tidak bisa dilepaskan dari aspek kebijakan, baik kebijakan di level pusat, daerah, maupun internal sekolah. Dalam konteks kebijakan nasional, dikatakan bahwa radikalisme timbul karena lemahnya artikulasi dan implementasi kebijakan nasional di sekolah. Maksudnya, kebijakan pemerintah yang seyogyanya bisa mendorong penguatan kebinekaan dan inklusifitas, namun lemah dalam level implementasi di sekolah. Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti diantaranya. Kelemahan ini kemudian dikuatkan dengan kebijakan di daerah yang turut mempromosikan intoleransi dan diskriminasi seperti keberadaan Perda Syariah di Aceh. Alih-alih mampu menjadi wahana penumbuhan karakter dan budi pekerti siswa yang unggul, keberadaan Perda ini kemudian mendorong sekolah untuk melahirkan model pembinaan yang intoleran kepada siswa.

Terkait dengan dua variabel utama penelitian tersebut, tulisan pada bagian ini akan disusun menjadi tiga pembahasan utama secara berurutan. Pembahasan bagian pertama lebih fokus pada pengaruh situasi keagamaan di ranah pendidikan. Dalam bagian ini secara lebih spesifik akan dikaji fenomena radikalisme di kalangan siswa dan organisasi kesiswaan di Cirebon. Pembahasan kedua lebih fokus pada kebijakan ekstrakurikuler dalam mendorong kebinekaan dan toleransi pada siswa. Sementara bagian terakhir lebih fokus pada inisiatif sekolah dalam mendorong kebinekaan dalam kegiatan

OSIS, sekaligus ingin menariknya menjadi model pembelajaran bagaimana sekolah dalam menghadapi pengaruh radikalisme dalam pendidikan.

## 1. Ekskul di Persimpangan Jalan: Antara Isu dan Realitas

Jamak dikatakan bahwa situasi kebinekaan di Cirebon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi yang terjadi di Jawa Barat. Dalam laporan reguler sejumlah lembaga baik pemerintah maupun masyarakat sipil, seperti Komnas HAM, Setara Insitute atau Wahid Institute, radikalisme keagamaan di Jawa Barat selalu dikatakan yang tertinggi dibanding Provinsi lain selama lima tahun terakhir. Laporan ini pada ujungnya menggiring pada kesimpulan bahwa apa yang terjadi di Cirebon tidak berbeda dengan yang terjadi di Jawa Barat pada umumnya. Namun riset ini hendak menunjukkan bahwa fenomena radikalisme di Cirebon memiliki kekhususan dan warna tersendiri jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat.

### a. Konteks Radikalisme dan Terorisme di Cirebon

Dalam laporannya yang berjudul, *Radikalisme Agama di Jawa Barat dan Jabodetabek; Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, Setara Insitute menyebutkan bahwa radikalisme di Jawa Barat tumbuh karena dua faktor; yaitu karena akar historis dan kedua karena faktor urbanisasi.<sup>19</sup> Dari faktor yang berbeda ini kemudian melahirkan model gerakan radikal yang berbeda pula.

Model radikalisme Islam yang didorong faktor urbanisasi, kesenjangan sosial (kaya-miskin), dan sentimen agama yang terus-menerus diprovokasi banyak menghiasi model radikalisme di daerah-daerah yang berdekatan dengan ibukota Jakarta, seperti Bekasi, Depok, dan Bogor. Model radikalisme keagamaan di sini lebih identik dengan radikalisme Islam berbasis pada massa, terutama majelis taklim, masjid, dan perkumpulan pemuda pengangguran, atau bahkan preman yang dibalut jubah dan mau meneriakkan jihad.

Sementara itu apa yang terjadi di Cirebon lebih mirip dengan apa yang terjadi di wilayah Priangan Timur. Faktor tumbuhnya radikalisme keagamaan banyak dipengaruhi oleh sejarah dimana daerah tersebut secara politik pernah

---

19 Ismail Hasani, et all. *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat; Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, (Jakarta; Pustaka Setara Institute, 2011) h. 39.

menjadi basis utama pendukung Masyumi dan menjadi salah satu daerah basis perjuangan untuk merebut kekuasaan dan mendirikan Negara Islam melalui Gerakan Darul Islam (DI). Model keislaman seperti gerakan DI itu diyakini masih mewarnai karakter keislaman masyarakat di dua wilayah itu hingga kini.

Ciri lainnya adalah kuatnya keterlibatan pesantren dalam gerakan radikal. Pesantren menjadi tempat yang kondusif bagi tumbuh suburnya gerakan Islam radikal di kedua wilayah Jawa Barat tersebut.<sup>20</sup> Keterkaitan antara pesantren dan radikalisme ini pernah diangkat dalam karya Solahudin yang berjudul *NII Sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia*. Menurutnya, berbagai aksi terorisme yang terjadi di Indonesia banyak melibatkan alumni pesantren, seperti kasus Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 dan Bom Masjid Adz Dzikro di Cirebon pada tanggal 15 April 2011. Bukan hanya pesantren yang terkait dengan Jamaah Islamiyah (JI) seperti Pondok Pesantren Al- Mukmin Ngruki, Al-Muttaqien dan Darusy Syahadah di Jawa Tengah, melainkan juga pesantren yang tidak memiliki afiliasi dengan Jamaah Islamiyah (JI) seperti Pondok Pesantren Al-Manar (pesantrennya Abdullah Sunata) dan Pondok Pesantren Al Hikmah, yang salah satu pengajarnya adalah Aman Abdurrahman, seorang pemimpin *Jamaah Tauhid wal Jihad*.<sup>21</sup> Keterlibatan alumni pesantren dengan aksi radikalisme dan terorisme ini ditengarai bukan hanya disebabkan oleh ajaran agama di internal pesantren, tapi juga interaksi alumnus pesantren dengan organisasi-organisasi keislaman yang literalis.<sup>22</sup>

Di Cirebon sendiri tercatat ada sejumlah pesantren yang diduga kuat berpotensi menjadi basis tumbuhnya gerakan yang melahirkan kekerasan. Pesantren radikal di Cirebon bisa dikategorikan menjadi tiga tipologi, pertama adalah pesantren Salafi murni dengan model paham keagamaan tekstualis.<sup>23</sup> Model pesantren ini banyak meniru pola keagamaan “Wahabi” yang diterapkan di Arab Saudi. Tipologi kedua adalah Salafi Tradisionalis,

---

20 *Ibid*, h. 41.

21 Solahuddin, *NII Sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia*, (Depok: Komunitas Bambu, 2011), hlm. 53-69.

22 Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012), hlm. 95-106.

23 Wawancara dengan Idris Masud, Dosen UNU Jakarta, 17 Oktober 2017.

dimana sumber pemahaman keagamaan diambil dari Sudan bagian Utara. Pola keagamaan yang mereka anut lebih keras dan intoleran daripada model pesantren pertama. Sedangkan yang ketiga adalah tipologi pesantren Salafi Jihadi. Bukan hanya intoleran, pesantren model ketiga ini bahkan mengajarkan jihad kepada santrinya.

Dalam pemahaman awam masyarakat Cirebon, Pondok Pesantren As-Sunnah yang berlokasi di Jl. Kalitanjung, Karyamulya, Kesambi disebut merupakan pesantren di Cirebon yang mengajarkan radikalisme kepada peserta didiknya. Kesimpulan ini diambil dari fakta bahwa baik guru maupun murid pesantren ini menolak upacara bendera dengan alasan *thogut*.<sup>24</sup> Namun demikian, dari penelitian yang dilakukan oleh sejumlah kalangan, potensi intoleransi memang ada, meskipun potensi radikalisme sangat rendah di pesantren ini. Model pemahaman keagamaan di pesantren ini memang kaku dan intoleran, tapi tidak pernah mengajarkan muridnya untuk berjihad.<sup>25</sup>

Tipologi kedua adalah pesantren salafi tradisional. Pesantren Dhiya'us Sunnah yang berlokasi di Jl. Duku Semar, Harjamukti, Kota Cirebon disebut mengajarkan pola keagamaan salafi tradisional. Ustadz Muhammad Umar as Sewed yang merupakan pimpinan pesantren lulusan Hadramaut, Yaman dinilai memiliki pemahaman keagamaan radikal. Namun demikian yang perlu dicatat, model radikalisme yang dia anut dan diinstitutionalisasi dalam pendidikan pesantren sebatas memiliki pemahaman keagamaan yang kaku dan intoleran. Pesantren lain adalah Pondok Pesantren Ar-Royyan yang terletak di Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Pesantren Ar-Royyan ini diidentikkan dengan pemahaman keagamaan yang dimiliki oleh Jama'ah Tabligh yang menolak pemahaman kelompok keagamaan lainnya, seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah.

Dua pesantren yang masuk kategori salafi Jihadi adalah Pesantren Al-Muttaqien di Desa Patapan Kecamatan Beber dan Pesantren Nurul Hadid di Desa Winduhaji, Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon. Indikasinya, sejumlah Pimpinan dan Pengasuh Pesantren Al Muttaqin merupakan alumni

---

24 Wawancara dengan Nurhuda, Anggota Dewan Pendidikan Cirebon dan Mantan Direktur Fahmina, 10 Oktober 2017.

25 Wawancara dengan M Ali, Dosen Fahmina yang pernah mengangkat disertasi tentang Pesantren As-Sunnah di Kalitanjung. 22 Oktober 2017.

pesantren Al-Mukmin, Ngruki Solo. Di saat yang sama, sejumlah teroris di Indonesia terindikasi pernah berjejaring dengan pesantren ini, antara lain adalah Salik Firdaus dan Sholahuddin al-Ayubi.<sup>26</sup> Salik Firdaus adalah salah satu dari tiga pelaku bom bunuh diri dalam tragedi Bom Bali II tahun 2005, sedangkan Sholahuddin al-Ayubi terduga teroris yang ditahan dalam penggerebekan polisi di Wonosobo pada bulan April 2006.

Dalam laporan International Crisis Group tahun 2009, disebutkan bahwa pesantren Al-Muttaqin merupakan jaringan “teroris” kelompok Nordin M. Top. Disebutkan pula bahwa Al-Muttaqin diyakini memiliki keterkaitan kuat dengan anak keturunan tokoh-tokoh DI dan memiliki afiliasi dengan Jamaah Islamiah (JI).<sup>27</sup> Setelah terjadinya transformasi gerakan radikal dan teroris di Indonesia, kedua pesantren ini diyakini saat ini masih memiliki afiliasi dengan Jamaah Ansharus Syariah (JAS).<sup>28</sup>

Pesantren lainnya adalah Pesantren Nurul Hadid. Pesantren ini dikatakan sebagai Amal Usaha dari Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Umat Nurul Hadid di Jatibarang Indramayu. Pesantren ini diidentifikasi mengajarkan radikalisme pada siswanya. Bahkan Muhammad Salik Firdaus, pelaku bom bunuh diri Bali II, tercatat sebagai seksi Humas Yayasan Nurul Hadid. Dia juga pernah tercatat sebagai pengacara sekaligus bendahara pada kurun tahun 2003-3004.<sup>29</sup>

Kedua pesantren salafi radikal ini sebenarnya merupakan satu jaringan. Sallim Badjri, Ustadz Abdul Muid dan Muhammad Salik Firdaus merupakan orang-orang yang tercatat memiliki peran penting di kedua pesantren itu. Penasehat Pesantren Nurul Hadid adalah Prof. Dr. H. Salim Bajri yang juga merupakan salah satu pendiri Al-Muttaqin. Ustadz Abdul Muid, Ketua Yayasan Nurul Hadid Jatibarang juga memiliki peran penting dalam pendirian

---

26 International Crisis Group (ICG), *Indonesia: Noordin Top's Support Base*, Asia Briefing N°95 27 Aug 2009, <http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/B095-indonesia-noordin-tops-support-base.aspx>, diunduh pada 25 September 2017.

27 Malindo Institute, *Agama sebagai Potensi Konflik dan Kekerasan (Studi Terhadap Pandangan Pimpinan Pesantren di Indramayu, Cirebon, Kuningan, Majalengka dan Ciamis tentang Jihad, Kekerasan dan Kekuasaan)*, Tahun 2006, h. 3.

28 Wahid Institute, *Preliminary Reserach; Intolerance, Radicalism and Teorisme in Indonesia*, 2014.

29 International Crisis Group (ICG), *Indonesia: Noordin Top's Support Base*, Asia Briefing N°95 27 Aug 2009, <http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/B095-indonesia-noordin-tops-support-base.aspx>, diunduh pada 15 Oktober 2017.

Al-Muttaqin. Terakhir, selain pernah tercatat sebagai pengajar di Pesantren Al-Muttaqin juga pernah menjadi Humas di Nurul Hadid.

Keunikan lain dari fenomena radikalisme di Cirebon adalah berhentinya ketersambungan antara gerakan radikal dan gerakan teroris. Adalah fenomena M Syarif yang melakukan bom bunuh diri di Mapolresta Cirebon dan Yoseva Hayat, pelaku bom bunuh diri di Gereja, Kepunton, Solo yang kemudian melahirkan sejumlah kajian tentang fenomena transformasi dari Islam radikal ke Islam jihadis/teroris.<sup>30</sup> Setara Institute dan International Crisis Group misalnya meyakini keberadaan organisasi radikal dan teroris menunjukkan relasi yang cukup dekat dan beberapa diantaranya mengalami transformasi dari radikal menjadi teroris.<sup>31</sup>

Fenomena tersebut dikatakan sebagai dinamika baru dari peta gerakan Islam di Indonesia. Namun apa yang terjadi di Cirebon berbeda. Fahmina Institute mencatat bahwa aksi radikalisme keagamaan yang dilakukan oleh Organisasi Islam radikal seperti Forum Umat Islam (FUI), Gerakan Pemuda Anti Separatisme (GAPAS), Al-Manar dan sejumlah ormas radikal lainnya berhenti sejak 2015.<sup>32</sup> Namun hingga kini diyakini bahwa aksi teror yang terjadi di Tanah Air tak lepas dari jaringan di Cirebon. Sejak peristiwa bom bunuh diri di Masjid Polres Cirebon Kota (Polresta) Cirebon pada 2011, hingga kini sudah terdapat enam Warga Cirebon menjadi pelaku terorisme dan 24 Warga ditangkap karena diduga terlibat aksi teroris. Terakhir adalah penangkapan IM (31) terduga teroris yang ditangkap di Bandara Cakrabhuwana pada September 2017 lalu.

#### **b. Radikalisme di Institusi Pendidikan**

Berbicara tentang fenomena radikalisme sekolah di Cirebon, pertanyaan pokok yang harus diajukan adalah sejauhmana fenomena radikalisme dan terorisme di Cirebon tersebut memiliki pengaruh di sekolah? Jika keterkaitan ini ada, bagaimana proses radikalisme terjadi pada siswa?

---

30 Tim Setara Institute, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta*, (Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara, 2012), h 12-16.

31 International Crisis Group, *Indonesia: From Vigilantism to Terrorism in Cirebon*, 26 January 2012.

32 Marzuki Wahid menyebutkan bahwa tercatat ada 42 kasus Intoleransi dan radikalisme agama dalam 5 tahun terakhir yang dilakukan oleh ormas radikal.

Sejumlah laporan dan informan dalam penelitian mengatakan bahwa arus radikalisme di sekolah maupun di pesantren sebenarnya memiliki akar yang sama.<sup>33</sup> Sama halnya dengan keberadaan Pesantren Nurul Hadid dan Al Muttaqin, cikal bakal radikalisme di Cirebon tidak bisa dilepaskan dari sosok Prof. Dr. Salim Badjri yang dulu aktif di Kelompok Pengajian dan kemudian di lembaga Al-Irsyad.<sup>34</sup> Melalui Al-Irsyad inilah sayap radikalisme di Cirebon mulai disebar. Rohis di SMAN 1 Kota Cirebon dan SMAN 4 Kota Cirebon dinilai sebagai bakal radikalisme di sekolah.<sup>35</sup> Dari kedua sekolah inilah watak Rohis yang radikal mulai disebar ke sekolah-sekolah lain di Cirebon.

Sementara di level masyarakat, gerakan terjadi melalui pembentukan Majelis Taklim di Syarif Hidayatullah yang berpusat di daerah pasar Gunung Sari Jln. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon. Majelis Taklim Hidayatullah ini kemudian melahirkan gerakan radikal seperti Majelis Mujahidin Indonesia-Cirebon dan sejumlah ormas radikal kontemporer seperti Forum Umat Islam (FUI) Cirebon. Dibawah FUI, ada sejumlah lembaga pendidikan yang bernaung, seperti Pesantren Al-Sunnah dan Al-Dziasunnah.

FUI di Cirebon tidak semata-mata merupakan cabang dari FUI Jakarta Pimpinan Al-Khatat. FUI pimpinan Andi Mulya ini dinilai memiliki watak yang lebih ideologis dan radikal. Karena afiliasinya dengan MMI dan JAT yang begitu kuat, FUI Cirebon diinformasikan mengizinkan anggotanya untuk melakukan jihad. Dengan demikian, bukan hanya rumah ibadah non-muslim atau tempat hiburan yang jadi sasaran organisasi ini, melainkan juga mewujudkan eksistensi negara Islam. Salah satu indikasinya adalah bahwa Kelompok Ashabul Kahfi, kelompok dimana M. Syarif berafiliasi, para anggotanya awalnya adalah anggota dari FUI.

Terkait dengan jaringan teroris, bisa dicatat juga bahwa Pesantren Nurul Hadid dan Al-Muttaqin diyakini berafiliasi dengan JAT sebelum kemudian

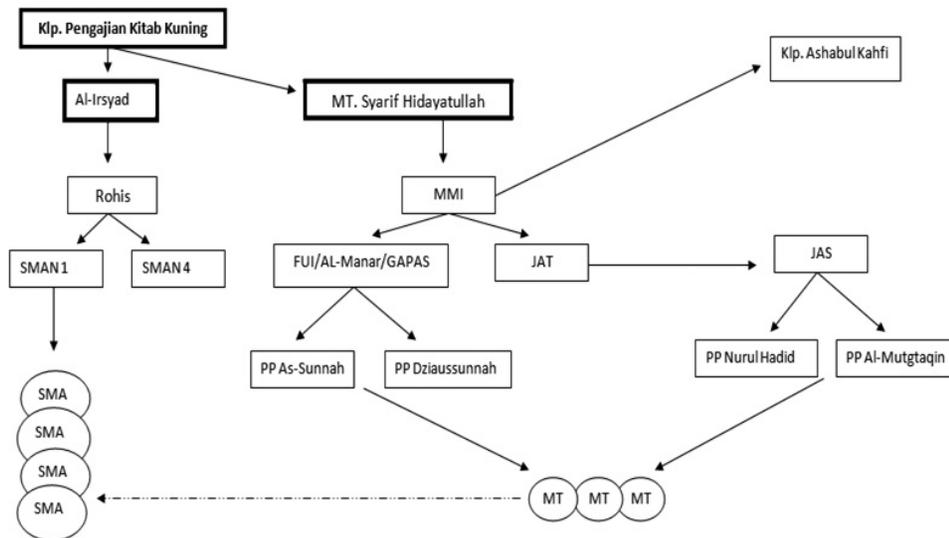
---

33 Wawancara dengan M Ali, Dosen Fahmina dan Doktor CRCS UGM, 19 Oktober 2017.

34 Wawancara dengan Nurzaman, GP Anshor dan Ketua Densus 99, 16 Oktober 2017.

35 Kegiatan Rohis sampai saat ini menjadi Ekstrakurikuler unggulan di SMAN 1 Kota Cirebon. Kuatnya Rohis ini diyakini menjadi ciri khas sekolah yang ingin terus dibangun dan dikembangkan sekolah. Rohis bahkan dinilai menjadi pembeda SMAN 1 dengan sekolah-sekolah lainnya. Wawancara dengan M Fadri, Pembina Rohis SMAN 1 Kota Cirebon, 19 Oktober 2017.

pindah ke JAS. Perpecahan dalam tubuh organisasi Ansharut Tauhid (JAT), yang salah satunya melahirkan Jama'ah Ansharus lebih Syariah (JAT) diyakini karena perbedaan cara pandang tentang arti pendirian Negara Islam. JAT berafiliasi dengan ISIS, sementara JAS berafiliasi dengan Jabal Al-Nusra.<sup>36</sup>



**Gambar 10. Bagan Geneologi dan Arus Radikalisme di Lembaga Pendidikan**

**c. Sumber Pengaruh Radikalisme pada Siswa**

Diasumsikan bahwa radikalisme dalam dunia pendidikan akan terjadi seiring dengan radikalisme di level masyarakat. Terlebih ketika keduanya memiliki akar yang sama dan sejumlah pesantren yang menyebarkan paham radikal masih eksis hingga kini.

Pada tahun 2015 misalnya, GP Ansor pernah merilis dua sekolah yang siswanya terindikasi paham radikal. Informasi lain mengatakan bahwa sekolah yang terindikasi disusupi paham radikal ini adalah siswa SMAN 1 Palimanan dan SMAN 1 Plumbon. Kurang lebih 10 Siswa SMAN 1 Palimanan dan SMAN 1 Plumbon diyakini mengikuti paham radikal. Siswa di SMAN Palimanan menolak mengikuti upacara bendera dan pelajaran sejarah dengan alasan bagian dari *Thogut* dan mengkafirkan gurunya sendiri.<sup>37</sup>

36 Wawancara dengan Idris Masud, Dosen UNU yang melakukan riset tentang radikalisme Pesantren dan Masjid di Cirebon, 17 Oktober 2017.

37 Radar Cirebon, Dua SMA Terindikasi Disusupi Paham Radikal, 5 Juli 2015.

Tidak hanya itu, Ketua Rohis di SMAN 1 Kota Cirebon misalnya, pernah menolak mengikuti sholat secara berjamaah dengan siswa lainnya. Di saat yang sama, dia juga mengkonsolidasi para anggotanya untuk membentuk perkumpulan Rohis sendiri karena Rohis yang diampu OSIS dinilai tidak mengajarkan Islam secara benar. Bahkan dia juga tidak segan mengkafirkan siswa lain dan menuduh agama yang diyakini tidak kaffah.<sup>38</sup>

Bahkan pada level guru sekalipun, radikalisasi ini juga terjadi. Salah satu Guru Bahasa Inggris di SMAN 1 Jamblang diinformasikan menolak membayar Iuran PGRI dengan alasan *thogut*.<sup>39</sup> Bahkan dia juga pernah mengirimkan siswanya yang non-muslim untuk mengikuti pendidikan di Pesantren Ar-Royyan karena tidak lulus mata pelajaran yang dia ampu.

Bagaimana proses radikalisasi pada siswa terjadi di Cirebon? Sejumlah kalangan, terutama PC NU Cirebon, meyakini bahwa radikalisme di kalangan siswa dan guru itu tumbuh dan bersemai dalam kegiatan ekstrakurikuler, yaitu Rohis. Rohis dinilai menjadi kendaraan utama organisasi Islam radikal untuk melakukan kaderisasi pada peserta didik.<sup>40</sup> Strategi awalnya adalah ingin melakukan pembinaan keagamaan kepada siswa melalui Rohis. Dari model ini kemudian mereka memasukkan materi dan paham radikal kepada siswa.

Sejumlah catatan yang bisa dibuat dari temuan tersebut adalah bahwa penyebaran paham radikal ke dalam organisasi Rohis rata-rata masuk bukan melalui jaringan alumni sebagaimana temuan di daerah lain. Ini terjadi murni melalui anggota kelompok Islam Radikal yang masuk ke sekolah secara formal. Mereka terhubung ke sekolah bisa melalui siswa atau langsung mendatangi sekolah. Dengan melakukan penyebaran pamflet dan kemudian melakukan kajian terhadap isi pamflet tersebut, salah satu anggota kelompok Islam Trans-nasional pernah mencoba masuk ke MAN 1 Cirebon.<sup>41</sup> Kasus yang terjadi di SMAN 1 Plumbon pun mempunyai pola yang hampir serupa. Upaya penyebaran paham radikal dilakukan oleh salah satu anggota Partai Tarbiyah dengan alasan ingin melakukan penguatan pemahaman keislaman siswa.

---

38 Wawancara dengan Ahmad Fadji, Pembina Rohis Ikhwan di SMAN 1 Kota Cirebon, 19 Oktober 2017.

39 Wawancara Qoidah, Guru PAI dan Mantan Pembina Rohis SMAN 1 Plumbon, 6 Oktober 2017.

40 Wawancara dengan AH Nurzaman, Mantan PC NU Cirebon, 14 Oktober 2017.

41 Wawancara dengan A Muhadjir, Waka Kesiswawann MAN 1 Cirebon, 5 Oktober 2017.

Selain itu, dari internal sekolah, proses radikalisisasi melalui guru pemberi materi pelajaran keagamaan juga hampir tidak ditemukan. Setali tiga uang dengan minimnya keterlibatan alumni dalam proses radikalisisasi siswa di Cirebon, indoktrinasi guru-guru agama hampir tidak ditemukan. Latar belakang pendidikan guru agama yang rata-rata pernah menimba ilmu di salah satu pesantren tradisional di Cirebon dan kemudian melanjutkan ke IAIN Syekh Nur Jati Cirebon turut memberikan andil dari absenya faktor guru dalam penyebaran radikalisme. Sebaliknya, tidak bisa dipungkiri bahwa latar belakang pendidikan ini membentuk moderatisme di kalangan guru-guru agama di enam sekolah yang jadi sasaran penelitian.

Berbeda dengan temuan sebelumnya, penelitian ini menemukan fakta bahwa pengaruh terbesar proses radikalisme pada siswa terjadi melalui keikutsertaan mereka dalam majelis taklim yang dikelola oleh pesantren radikal yang dikemukakan dimuka. Dibandingkan dengan informasi keagamaan dari internet, sejumlah siswa di Cirebon yang berhasil diwawancarai mengatakan bahwa materi pelajaran tambahan diperoleh melalui keikutsertaan dalam majelis taklim.<sup>42</sup> Bahkan kasus terjadinya radikalisisasi pada siswa SMAN 1 Kota Cirebon dimulai dari keikutsertaan siswa dalam kegiatan salah satu majelis taklim yang dikelola pesantren radikal.

Sebagai masyarakat pesantren, siswa di Cirebon bagaimanapun juga mempunyai semacam keyakinan bahwa ilmu keagamaan yang paling sah adalah diperoleh melalui seorang guru. Kadar legitimasi bertambah ketika guru tersebut juga seorang kiai yang mengampu pondok pesantren.

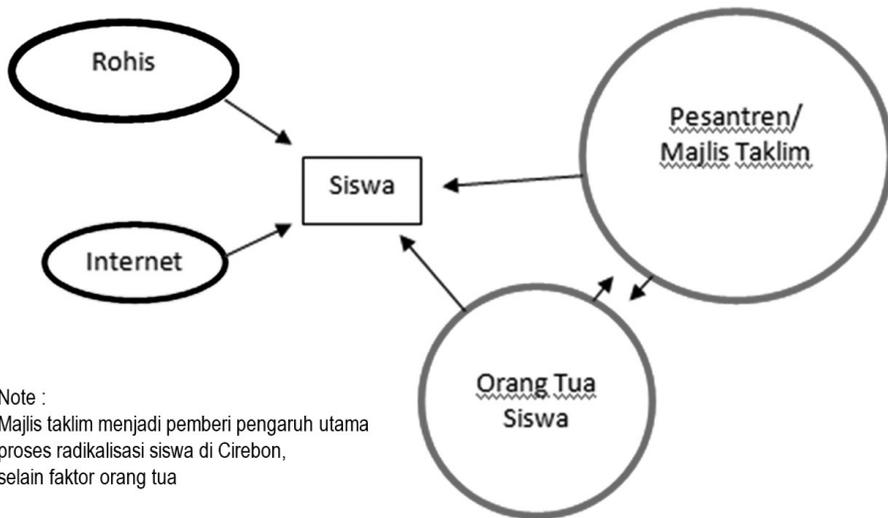
Selain itu, proses radikalisisasi melalui majelis taklim ini semakin intens ketika mendapat dukungan dari orang tua. Maksudnya, pemahaman keagamaan siswa yang intoleran, misalnya di SMAN 1 Kota Cirebon juga menjadi keyakinan keagamaan yang dimiliki oleh orang tuanya. Ini artinya, proses inkubasi radikalisme ini juga terjadi jika keluarga juga mendukung dan memberi informasi keagamaan yang radikal kepada siswa. Dalam konteks ini bisa dikatakan bahwa, dibalik majelis taklim terdapat orang tua siswa yang

---

42 Wawancara dengan siswa MAN 1 Ciwaringin dan Guru-guru di SMAN 1 Jamblang. SMAN 1 Sumber dan SMAN 1 Kota Cirebon.

turut berkontribusi dalam pembentukan pandangan dan sikap keagamaan anak-anak mereka.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa proses radikalisme siswa di Cirebon terjadi karena beberapa faktor; keikutsertaan dalam kegiatan Rohis, dan keikutsertaan dalam pengajian yang kemudian dikuatkan oleh orang tua. Namun, jika dilihat besar-kecilnya pengaruh proses radikalisisasi itu, majelis taklim dan orang tua menduduki porsi terbesar pembentuk paham keagamaan radikal pada siswa. Ini artinya, fenomena radikalisisasi pada siswa secara khusus di Cirebon sangat minim kaitannya dengan eksistensi Rohis secara mandiri. Bahkan bisa dikatakan, Rohis tidak menjadi wahana radikalisisasi. Begitupun dengan para alumni yang kerap dinilai sebagai aktor penyebar paham radikalisme kepada para adik kelasnya di sekolah.



**Gambar 11. Sumber Pengaruh Radikalisme Pada Siswa di Cirebon**

Ditemukan fakta bahwa ada jalur melingkar dalam proses radikalisisasi di ranah pendidikan. Prosesnya tidak langsung melalui Rohis. Tapi melalui siswa yang mengikuti majelis-majelis taklim yang mengindoktrinasi paham radikal. Dari siswa inilah proses penyebaran radikalisisasi kepada siswa lain mulai terjadi. Sejumlah pesantren radikal yang disebutkan di atas memang hampir tidak pernah masuk dalam lingkungan sekolah menengah negeri. Ada kemungkinan besar proses transmisi nilai radikal lebih difokuskan di internal

pesantren mereka sendiri. Selain itu, sejumlah kiai dan guru pesantren itu lebih memfokuskan dakwah keagamaan di majelis taklim dan masjid-masjid di seputar Cirebon. Majelis-majelis taklim ini kemudian diikuti secara reguler oleh sejumlah siswa berikut orang tua mereka.

#### **d. Dinamika Baru Radikalisme di Sekolah**

Pengalaman sekolah dalam menghadapi radikalisasi pada siswa itu memang pernah terjadi. Tapi fenomena itu berhenti terakhir tahun 2015. Ini mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan yang konsisten dan statis terkait potensi teroris di Cirebon dengan fenomena radikalisme di sekolah. Menguatnya gerakan kelompok teroris dan jihadis tidak dibarengi dengan penyebaran ideologi mereka dalam institusi pendidikan negeri. Kesamaan akar dan jaringan radikalisme di Cirebon sebagaimana dijelaskan dimuka nampak telah mengalami perubahan. Arus gerakan radikal pada dunia pendidikan yang dulu berpusat di Al-Irsyad telah berpisah dari arus gerakan radikal yang menyasar masyarakat melalui medium majelis taklim.

Surutnya arus radikalisme pada siswa sekolah menengah di Cirebon terjadi karena menguatnya gerakan kelompok moderat. Ini utamanya ditandai dengan penguasaan ruang publik yang sebelumnya dijadikan sebagai basis konsolidasi kelompok radikal. Watak eksklusifitas Masjid Jami Al-Taqwa saat ini sudah tidak terlihat. Masjid kembali menjadi ruang publik bersama Umat Islam Cirebon. Padahal, masjid ini dulunya pernah tercatat sebagai basis konsolidasi dan syiar kelompok-kelompok radikal.<sup>43</sup>

Di saat yang sama, patut disebutkan tentang perubahan pola gerakan kelompok radikal dan teroris di Cirebon. Kelompok ini tidak menjadikan sekolah negeri sebagai basis intervensi. Masjid-masjid di sejumlah perusahaan BUMN berikut dengan Majelis Taklimnya menjadi ruang publik yang diintervensi. Pengaruh kelompok *Islam Transnasional* seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) intervensinya ke sekolah semakin menurun akibat pelarangan yang dilakukan pemerintah.

Pelarangan yang dilakukan pemerintah terhadap HTI memberikan basis legitimasi pada sekolah untuk menolak dan menghentikan intervensi mereka

---

43 Wawancara dengan Marzuki Wahid pada 12 Oktober 2017.

ke siswa.<sup>44</sup> Pada kasus yang terjadi pada MAN 1 Cirebon misalnya, sebelum adanya pelarangan pemerintah terhadap HTI, secara reguler selebaran dan pamflet HTI yang mengkampanyekan Khilafah Islamiyah dapat dengan mudah masuk ke sekolah, terutama ketika selebaran itu dibawa oleh salah satu murid dan kemudian disebarakan kepada teman sebayanya. Munculnya regulasi pemerintah tersebut, bagaimanapun memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada sekolah untuk melakukan kontrol terhadap penyebaran paham-paham yang anti-kebinekaan.

Berdasarkan data temuan penelitian di Cirebon tersebut, bisa dipahami bahwa penguatan terorisme tidak serta merta didahului oleh penguatan intoleransi dan radikalisme. Dalam kasus Cirebon saat ini, kedua fenomena tersebut harus diposisikan sebagai dua fakta yang berbeda. Pada saat yang sama, menguatnya gerakan radikalisme dan jaringan teroris di Cirebon tidak serta merta berimplikasi pada proses radikalisasi dalam ranah pendidikan.

Harus diakui bahwa memang ada titik persinggungan antara keberadaan sejumlah pesantren dengan fenomena radikalisme di sekolah. Namun, pengaruhnya tidak bersifat langsung. Ada medium majelis taklim. Proses radikalisasi siswa terjadi ketika siswa secara reguler mengikuti majelis taklim yang dikelola kelompok radikal. Setelah mengalami proses radikalisasi, kemudian siswa menyebarkan keyakinan pada kawan sebayanya. Bukan melalui jaringan alumni dan kegiatan rohis secara khusus sebagaimana proses radikalisasi yang terjadi pada temuan di daerah lain, melainkan akibat keterlibatan siswa dalam kegiatan majelis taklim. Perlu dicatat pula bahwa proses radikalisasi pada siswa sekolah menengah di Cirebon mengalami stagnasi ketika kelompok moderat mengalami penguatan. Di saat yang sama, ini juga terjadi lantaran perubahan pola penyebaran paham keagamaan kelompok radikal yang tidak menysasar sekolah, tapi masjid-masjid di sejumlah perusahaan plat merah.

## **2. Kuasa Negara yang Terlupakan**

Pembicaraan terkait dengan kebijakan ekstrakurikuler tidak bisa dilepaskan dari keberadaan lingkungan kebijakan, rumusan, implementasi

---

44 Wawancara dengan A Sabrun, Pembina Tahfidz Man 1 Cirebon pada 12 Oktober 2017.

dan kinerjanya.<sup>45</sup> Maksud dari lingkungan disini adalah konteks sosial-politik di mana kebijakan itu timbul atau faktor yang memengaruhi munculnya kebijakan. Dari lingkungan itu kemudian muncul rumusan kebijakan, bagaimana implementasinya dan juga kualitas pelaksanaannya.

Bagian ini akan membahas secara spesifik pada kebijakan ekstrakurikuler (OSIS) di sekolah dengan pendekatan *institutional model*, untuk melihat sejauhmana sekolah membuat dan melegitimasi kebijakannya, serta bagaimana aktor-aktor terkait menggunakan pengaruhnya agar kebijakan yang dibuat dilaksanakan.<sup>46</sup> Kebijakan di atasnya hanya akan dilihat jika memiliki relevansi. Bagian ini akan difokuskan pada pembahasan terkait dengan watak dan ragam kebijakan ekstrakurikuler di sekolah. Akan dibahas pula tentang implementasi dan dampak kebijakan tersebut kepada siswa, khususnya yang termasuk ke dalam kelompok minoritas.

#### **a. Watak Kebijakan Ekstra: Berlomba Menjadi Sekolah Islami**

Berbicara tentang penguatan kebijakan ekstrakurikuler dalam kaitannya dengan usaha penguatan kebinekaan pada siswa, setidaknya ada tiga regulasi yang bisa dijadikan rujukan. Regulasi ini mengatur tentang pembinaan kesiswaan, penanaman budi pekerti, dan kegiatan ekstra.

Di Cirebon sendiri tidak ada regulasi khusus dari pemerintah Kota maupun Kabupaten sebagai turunan dari Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dalam implementasi kegiatan ekstrakurikuler, sekolah mengikuti regulasi dari pemerintah pusat. Di setiap sekolah terdapat kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Apa yang membedakan adalah ekstrakurikuler pilihan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh sekolah dan dapat diikuti oleh peserta didik sesuai keinginan, minat, dan bakatnya masing-masing.

Dalam kaitannya dengan pembinaan kesiswaan dan penanaman budi pekerti, ada warna khas yang ingin ditampilkan di Cirebon. Pembinaan kesiswaan yang bertujuan mengembangkan potensi siswa secara optimal,

---

45 Danim, S.. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2005).

46 Dunn, W.N. *Analisa Kebijakan Publik*. (peny.: Muhadjir Darwin). (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003).

memantapkan kepribadian dalam rangka mewujudkan ketahanan sekolah agar terhindar dari pengaruh negatif, dan menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 39 Tahun 2006 *dimaknai untuk memperkuat siswa dalam hal keagamaan, keislaman*. Begitu juga dengan penanaman budi pekerti. Penanaman budi pekerti yang bertujuan untuk menanamkan kebiasaan baik bagi siswa dan juga menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan melalui pembiasaan sikap dan perilaku positif kepada siswa sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2015 ditafsirkan sebagai penanaman nilai-nilai dan akhlak Islam pada siswa. Maksud dari “Islami” disini bukanlah pemaksaan atas penerapan syariat secara murni, tapi bentuk dari pengejawantahan ajaran Islam tradisional Nahdlatul Ulama.

Di level sekolah SMA, kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan pembinaan kesiswaan dan penanaman budi pekerti yang Islami ini masuk dan menjadi bagian Rohis. Bahkan di sekolah tertentu seperti SMAN 1 Kota Cirebon, kegiatan Rohis disebut merupakan andalan kegiatan ekstra di sekolah. Tidak seperti sekolah-sekolah lain, yang memosisikan Rohis setara dengan kegiatan ekstra lain, Rohis di SMAN 1 Kota mendapat tempat istimewa.<sup>47</sup> Minat siswa dalam mengikuti Rohis tentu menjadi pertimbangan untuk mengistimewakannya. Dari sudut pandang guru, latar belakang murid yang tidak belajar ilmu agama secara formal di pesantren, menjadikan sekolah memberikan perhatian khusus pada Rohis sebagai pembinaan karakter dan budi pekerti siswa.<sup>48</sup> Hal senada juga menjadi alasan siswa mengikuti Rohis. Karena mereka sekolah di sekolah umum, maka Rohis menjadi media khusus dalam mendalami ilmu agama.<sup>49</sup> Di SMAN 1 Kota Cirebon, Rohis adalah satu-satunya kegiatan ekstra yang paling banyak diminati. Begitupun dengan

---

47 Wawancara dengan Fadri, Guru Pembina Rohis SMAN 1 Kota Cirebon., 19 Oktober 2017.

48 Wawancara dengan Rosyidin, Pembina Rohis SMAN 1 Kab. Cirebon, 5 Oktober 2017.

49 Wawancara dengan Devi, anggota Rohis SMAN 1 Kab. Cirebon, 14 Oktober 2017.

SMAN 1 Kab Cirebon.<sup>50</sup> Kedua sekolah tersebut adalah sekolah favorit mewakili Kota dan Kabupaten.

Sementara di MAN, karakter khusus dari kegiatan ekstra yang terkait dengan pembinaan kesiswaan budi pekerti tidak lebih merupakan implementasi dari materi pelajaran keislaman dalam kelas. Maksudnya, sebagai sekolah agama Islam, watak kegiatan ekstra yang terkait dengan pembinaan dan budi pekerti adalah pendalaman apa yang didapat di dalam ruang kelas. Ini artinya, kegiatan ekstra lebih mementingkan *technical skill* daripada pemahaman dan penguasaan materi keagamaan.

Di MAN 2 Cirebon misalnya, watak kegiatan ekstra lebih diarahkan pada bagaimana mempraktikkan ilmu agama yang dipelajari di kelas. Pendalaman ilmu agama dinilai tidak diperlukan lagi, karena siswa yang notabene merupakan santri diyakini sudah mempelajarinya di pesantren masing-masing. Melalui Majelis Bina Dakwah (MBD), siswa MAN 2 tidak hanya dilatih untuk menguasai skill berdakwah, tapi juga bagaimana menyampaikannya di tengah masyarakat agar diterima. Selama tiga hari, siswa kelas 10 anggota MBD diwajibkan untuk praktik kerja dakwah di kampung-kampung di sekitar Kabupaten Cirebon.<sup>51</sup>

Berbeda dengan MAN 2 Kabupaten Cirebon, MAN 1 yang tidak bersentuhan langsung dengan pesantren, mencoba menghadirkan kegiatan keagamaan ini dalam bentuk pesantren sekolah. Pesantren yang dimaksud adalah pesantren tahfidz yang bertujuan untuk membimbing siswa tertentu yang ingin menghafal al-Quran. Sekolah juga menyediakan asrama bagi siswa yang terdaftar di Pesantren Tahfidz.<sup>52</sup> Awalnya pesantren ini di bawah Rohis (Wahdaniyah), namun sejak dua tahun terakhir menjadi bagian mandiri di bawah tanggungjawab langsung kepala sekolah. Apa yang ingin ditonjolkan dari keberadaan pesantren ini adalah bahwa, sebagai sekolah Islam, tentu menjadi keharusan bagi sekolah untuk mendidik siswa secara lebih intensif

---

50 Wawancara dengan Adrian, Pembina OSIS SMAN 1 Kab. Cirebon, 4 Oktober 2017.

51 Wawancara dengan Anto, Wakakesiswaan MAN 2 Cirebon, 3 Oktober 2017.

52 Wawancara dengan Muhadjirin, Wakakesiswaan MAN 1 Cirebon, 5 Oktober 2017.

terkait materi keagamaan. Caranya adalah dengan menghadirkan model pendidikan pesantren di sekolah.<sup>53</sup>

Perlu dikatakan bahwa pembinaan kesiswaan dan penanaman budi pekerti dengan warna Islami ini, bukan hanya pengaruh dari sekolah secara murni, tapi juga pengaruh regulasi di tingkat provinsi dan juga dari masyarakat Cirebon. Sekolah-sekolah di Cirebon merujuk pada program yang digariskan oleh Provinsi. Program Jabar Menghafal atau Baca Quran sebelum Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) misalnya, terimplementasikan dengan baik di sekolah-sekolah Cirebon. Bahkan sejumlah sekolah mengaku bahwa mereka menerapkan program pemerintah provinsi ini karena sesuai dengan arah pembinaan karakter dan budi pekerti siswa. Program pemerintah provinsi ini secara umum lebih diimplementasikan di SMA negeri, daripada MAN. Sebut saja misalnya apa yang terjadi di SMAN 1 Kab. Cirebon, mereka secara bersamaan menerapkan kedua program pemerintah provinsi itu. Melalui program “*One Day One Ayat, One day One Word*” siswa diwajibkan bukan hanya untuk menghafal satu ayat al-Qur’an, tapi juga menghafal satu *vocabulary* setiap harinya.<sup>54</sup> Tidak hanya itu, siswa juga diwajibkan untuk membaca al-Quran sebelum KBM dimulai. Program yang terakhir ini sebenarnya tidak hanya bisa ditemui penerapannya di SMA 1 Kab Cirebon, 4 dari 6 SMAN yang dikaji melakukan hal yang sama, seperti di SMAN 1 Jamblang, SMAN 1 Plumbon, dan SMAN 1 Kota Cirebon.

Warna keislaman dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah Cirebon tersebut pada saat yang sama tidak bisa dilepaskan dari kultur masyarakat. Dengan tradisi *nahdliyin* yang sangat kuat, ditambah lagi dengan keberadaan sejumlah pesantren besar seperti Buntet, Kempek, Arjowinangun dan Babakan-Ciwaringin berikut jaringan alumninya yang tersebar di sejumlah sekolah, maka menjadi sesuatu yang tidak mengherankan jika sekolah-sekolah juga menyelenggarakan pengajian kitab kuning, istighosah, dan tahlilan. Setidaknya satu minggu sekali, semua sekolah yang dikaji

---

53 Wawancara dengan Mukarom, Pembina Pesantren Tahfidz MAN 1 Cirebon, 5 Oktober 2017.

54 Wawancara dengan A Jazuli, Waka kesiswaan SMAN 1 Kab. Cirebon, 3 Oktober 2017.

melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan sebagai bagian dari pembinaan budi pekerti.<sup>55</sup>

Selain itu, pengajian kitab kuning nampak menjadi muatan yang wajib ada dalam kegiatan Rohis. Bukan hanya di MAN, tapi juga di SMAN. Salah satu kitab kuning yang bisa ditemui di sejumlah sekolah adalah *Sulam Al-Taufiq*. Kitab karangan Syekh Abdullah Ibn Husein yang kemudian diterjemahkan Imam Nawawi Al Bantani ini membahas tentang tauhid atau teologi. Sejumlah pihak mengatakan bahwa kitab ini tergolong kitab yang mengajarkan intoleransi, karena tegas mengecam segala tindakan yang dinilai sebagai kemurtadan atau keluar dari Islam. Bahkan berbicara kepada orang non-Muslim disebut sebagai bagian tindakan Murdad secara lisan.<sup>56</sup>

Marzuki Wahid mengakui bahwa memang kitab tersebut sebagian besar isinya tidak mengajarkan toleransi, dan bisa dikatakan ketinggalan zaman untuk konteks sekarang. Namun dengan tegas dia mengatakan bahwa intoleransi tidak terjadi kepada santri atau siswa yang mengaji kitab *Sulamu al-Taufiq*, karena mereka masih melihat perilaku kiai yang tidak pernah menunjukkan sikap permusuhan atau kebencian kepada non-muslim. Jadi, letak pokoknya bukan hanya pada materi keagamaan yang dikaji, tapi juga siapa yang mengajar dan bagaimana perilaku pengajar ini sehari-sehari yang patut dipertimbangkan.<sup>57</sup>

#### **b. Nasib Kelompok Minoritas**

Dengan karakter kebijakan ekstrakurikuler yang condong ke arah Islam tersebut, lalu bagaimana nasib kelompok siswa yang non-Muslim? Inilah yang patut dijawab di sekolah-sekolah negeri yang tidak semua siswanya beragama Islam. Meski menjadi kelompok minoritas, aspek kesetaraan dan keadilan merupakan prasyarat utama lahirnya suatu kebijakan yang berbineka dan terbuka di sekolah.

Apa yang menarik di sekolah-sekolah yang menjadi kajian penelitian ini, siswa non-Muslim tidak pernah mendapat paksaan untuk mengikuti kegiatan sekolah yang bernuansa Islam. Meski tidak ada organisasi kesiswaan di luar

---

55 Wawancara dengan Nugroho, Kepala Sekolah SMAN 1 Plumbon, 14 Oktober 2017.

56 Wawancara dengan Haryono, Alumni Pesantren Babakan Ciwaringin, 6 Oktober 2017.

57 Wawancara dengan Marduzki Wahid, Fahmina dan PBNU, 16 Oktober 2017.

Rohis, namun siswa non-Muslim diberikan keleluasaan untuk mengikuti atau tidak mengikuti kegiatan sekolah maupun kegiatan ekstra sekolah. Ketika siswa Muslim melakukan kegiatan pengajian, siswa Non-Muslim dipersilahkan untuk mengikuti kegiatan serupa di majelis keagamaan terdekat, misalnya di Yayasan Santa Maria untuk siswa Katolik dan BPK Penabur untuk Siswa Kristen.<sup>58</sup>

Tidak hanya itu, dalam kepengurusan OSIS pun, siswa non-Muslim mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus. Di SMAN 1 Jamblang yang sarat dengan radikalisme di sekolah sendiri, pernah ada siswa non-Muslim yang menjadi pengurus OSIS.<sup>59</sup> Begitu juga yang terjadi di SMAN 1 Kab. Cirebon.

Hal yang sama juga terjadi dalam isu perempuan. Siswi perempuan mendapatkan kesempatan dan akses yang sama untuk menduduki kepengurusan OSIS. Informasi demikian hampir bisa didengar dalam statemen semua Pembina maupun Pengurus OSIS di enam sekolah yang dikaji. Namun, hanya di SMAN 1 Plumbon, Ketua OSIS perempuan nampak telah menjadi tradisi di sekolah. Dalam dua kepengurusan terakhir, perempuan berhasil menduduki jabatan Ketua OSIS.

Penting untuk disinggung pula bahwa kesetaraan bagi semua siswa ini bukan hanya terjadi dalam kegiatan ekstra saja. Tapi juga dalam KBM di ruang kelas. SMAN di Kota maupun Kabupaten yang dikaji telah mengimplementasikan UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 berikut aturannya seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di mana setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.<sup>60</sup> Sekolah-sekolah di Cirebon memfasilitasi siswa non-Muslim untuk mengikuti materi pelajaran keagamaan di majelis keagamaannya. Pemberian nilai mata pelajaran agama

---

58 Wawancara dengan Puji, Guru Kimia dan Humas SMAN 1 Kota Cirebon, 19 Oktober 2017.

59 Wawancara dengan Ahmad, Waka Kesiswaan SMAN 1 Jamblang, 7 Oktober 2017.

60 Lihat pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan, [http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/06/PP\\_55\\_2007-Pendidikan-Agama-Keagamaan.pdf](http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/06/PP_55_2007-Pendidikan-Agama-Keagamaan.pdf), (diakses 30 Oktober 2017).

bagi siswa non-Muslim juga diserahkan pada guru di majelis agama terkait. Ini mengindikasikan bahwa kesetaraan bagi siswa dari kelompok minoritas bukan hanya diberikan dalam kaitannya dengan ekstrakurikuler, tapi juga dalam kegiatan dalam kelas. Berbeda dengan KBM yang didasarkan atas regulasi pemerintah, praktik inklusi dalam kebijakan ekstrakurikuler nampak lebih didasarkan atas kebijakan murni dari sekolah.

### c. Aktor Kebijakan

Penelitian ini menunjukkan bahwa aktor utama di balik lahirnya suatu kebijakan ekstrakurikuler adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan pembina. Guru pembina ekstrakurikuler di sejumlah sekolah menjadi inisiator utama lahirnya suatu kebijakan. Watak kebijakan yang dihasilkan pun mewakili pemahaman dan interpretasi atas maksud pembinaan budi pekerti pada siswa.

Model kebijakan ekstrakurikuler yang sarat dengan nuansa Islam pesantren itu tidak bisa dipisahkan dari latar belakang pendidikan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan guru pembina. Waka kesiswaan dan guru pembina Rohis, rata-rata memiliki latar belakang pendidikan pesantren. Sejumlah guru pembina dari sekolah yang dikaji merupakan lulusan Pesantren Ciwaringin. Setamat dari pesantren, mereka kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Syekh Nurjati, Universitas Negeri Yogyakarta atau Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sehingga tidak begitu aneh jika model kebijakan ekstrakurikuler yang dihasilkan pun sarat dengan nilai-nilai Islam pesantren yang moderat.<sup>61</sup>

OSIS sendiri dalam kebijakan ekstrakurikuler nampak tidak memiliki kewenangan. Dalam banyak hal, dominasi guru sangat kentara dalam perumusan maupun implementasi. Selain berkewajiban untuk mendampingi siswa sewaktu melakukan setiap kegiatan ekstra, guru pembina juga memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan setiap kegiatan. Meski demikian, bukan berarti ruang dialog antara guru pembina dan OSIS tertutup. Meski tidak terjadi di semua sekolah, pengurus OSIS tetap diberikan ruang untuk mengusulkan kegiatan di luar dari yang telah digariskan sekolah dan guru

---

61 Statemen Jazuli, Waka kesiswaan SMAN 1 Kab. Cirebon, 23 Oktober 2017.

pembina.<sup>62</sup> Ini artinya, meski sekolah secara khusus nampak dominan dalam kebijakan ekstrakurikuler, namun keberadaan OSIS tidak bisa dinafikan begitu saja. Ruang diskusi dan usulan dari siswa, tetap menjadi pertimbangan guru dan sekolah atas kebijakan ekstrakurikuler.

Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan ekstrakurikuler, ada peran sejumlah aktor baik dari internal maupun eksternal. Sebagaimana disebutkan dimuka, aktor di internal sekolah terdiri dari guru, OSIS, Komite Sekolah, Dewan Pengawas dan siswa pada umumnya. Sementara di luar sekolah, terdapat instruktur yang sengaja dihadirkan sekolah. Instruktur luar ini bisa mewakili per-orangan atau mewakili lembaga.

Mewakili per-orangan, salah satu aktor eksternal yang paling banyak mewarnai dalam implementasi kebijakan ekstrakurikuler pilihan adalah guru atau kiai pesantren. Kelompok ini tidak hanya dilibatkan dalam acara-acara keagamaan tertentu, tapi juga dilibatkan secara penuh sebagai instruktur kegiatan ekstrakurikuler. Dengan watak pembinaan budi pekerti yang mengarah pada pembentukan karakter keislaman tradisional, merupakan hal yang wajar jika jaringan pesantren mendapat peran penting, terlebih di SMAN. Penguasaan mereka atas kitab kuning menjadi nilai lebih dan legitimasi bagi sekolah untuk menjadikan mereka sebagai instruktur kegiatan Rohis.<sup>63</sup>

Dengan pertimbangan yang sama, TNI dan Polri menjadi pilihan utama sejumlah sekolah dalam kegiatan ekstrakurikuler. Terkait misi Bela Negara yang ingin dimasukkan dalam kegiatan ekstra lah yang menjadi alasan sekolah menghadirkan dua institusi ini di sekolah. Bahkan SMAN 1 Plumbon telah melakukan pakta perjanjian kerjasama secara tertulis dengan Koramil 2007 Plumbon dalam hal penguatan karakter kebangsaan pada siswa<sup>64</sup>.

Dengan demikian, apa yang perlu dicatat di sini adalah bahwa tidak ada kebijakan khusus yang mendorong kebinekaan di sekolah-sekolah Cirebon baik SMAN maupun MAN. Apa yang ditemui adalah watak kebijakan ekstrakurikuler pilihan yang mengarah pada kebijakan Islami. Islami bukan berarti penerapan syariat Islam secara kaku, tapi pada praktik keislaman

---

62 Pernyataan Eki, Ketua OSIS SMAN 1 Kab. Cirebon, 23 Oktober 2017.

63 Wawancara dengan Imron, Instruktur Rohis SMAN 1 Kab. Cirebon, 14 Oktober 2017.

64 Wawancara dengan Nugroho, Kepala Sekolah SMAN 1 Plumbon, 14 Oktober 2017.

tradisional yang memang menjadi bagian laku keagamaan masyarakat Cirebon. Di sisi lain, hal ini merupakan pengaruh sejumlah pesantren dan jaringan alumni yang tersebar di sekolah-sekolah. Adalah suatu hal yang tidak wajar, jika sekolah baik SMAN maupun MAN tidak menyelenggarakan tahlilan atau pengajian setidaknya satu minggu sekali. Pengajian kitab kuning nampak menjadi materi wajib dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan.

Dalam konteks tertentu, model kebijakan ekstra yang sarat dengan muatan lokal inilah yang mampu menjadi pendorong lahirnya suatu kebijakan ekstrakurikuler yang berbineka. Karakter pembinaan budi pekerti yang mengikuti ajaran Islam tradisional yang moderat harus diakui cukup mampu menjadi panahan laju intoleransi dan radikalisme keagamaan di Sekolah.

Namun, apa yang penting untuk dicatat adalah bahwa sejumlah kebijakan ekstra yang disebutkan di atas sifatnya masih menjadi kebijakan negatif, dalam arti tidak pernah tertulis. Ragam kebijakan tersebut nampak merupakan kesepakatan yang kemudian diimplementasikan begitu saja oleh guru dan siswa. Karena itu, suatu hal yang wajar dan bukan merupakan hal aneh jika pergantian kepala sekolah yang bisa berdampak pada perubahan kepentingan para elit berakibat pula pada pergantian kebijakan ekstrakurikuler yang telah dicanangkan.

Karakter kepemimpinan kepala sekolah dalam banyak kasus menjadi faktor yang sangat penting yang mewarnai kebijakan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Sebut saja misalnya SMAN 1 Arjowinangun sebagai contoh, karena orientasi kepala sekolah lebih pada pembangunan gedung, warna kebijakan ekstra pun diukur dari penyediaan fasilitas.<sup>65</sup> Contoh lain adalah apa yang terjadi di SMAN 1 Plumbon dengan adanya pergantian kepala sekolah sangat memiliki dampak pada ragam kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Tidak hanya kegiatan Rohis yang relatif tidak mendapat dukungan,<sup>66</sup> bahkan sejumlah kegiatan ekstra pilihan seperti musik cenderung mati suri. Dikatakan bahwa kegiatan pengembangan seni musik bagi siswa sudah lama tidak berkegiatan sejak adanya pergantian kepala sekolah.<sup>67</sup>

---

65 Wawancara dengan Suyanto, Kabid Humas SMAN 1 Arjowinangun, 7 Oktober 2017.

66 Wawancara dengan Qoidah, Guru PAI dan Mantan Pembina Rohis SMAN 1 Plumbon, 11 Oktober 2017.

67 Hasil FGD dengan siswa SMAN 1 Plumbon, 23 Oktober 2017.

### **3. Mereka yang Rentan di Tengah yang Bertahan**

Daya tahan dan strategi sekolah dalam menghadapi infiltrasi gerakan radikal sebenarnya menjadi lebih mudah dipetakan dengan adanya kebijakan khusus terkait kebinekaan di internal sekolah. Namun, sebagaimana diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa kebijakan positif yang dimaksud tidak ditemukan, strategi sekolah ini pada ujungnya bersandar pada dinamika para aktor dan dinamika hubungan antar kelembagaan. Maksud dari aktor disini lebih mengarah pada aktor internal sekolah. Sementara dinamika hubungan antar lembaga terkait dengan relasi sekolah dengan institusi luar yang turut mempromosikan kebinekaan di ranah pendidikan.

#### **a. Peran Para Aktor**

Dalam menahan laju radikalisasi di sekolah, guru pembina kegiatan ekstra memiliki peranan penting. Secara formal, keterlibatan mereka dalam pendampingan setiap kegiatan ekstra dan ketatnya proses pemilihan instruktur di luar sekolah menjadi faktor penentu utama dari implementasi strategi sekolah. Di luar itu, yang penting dicatat adalah sejumlah inisiatif dan itikad dari guru dalam mempromosikan kebinekaan kepada murid.

Dalam kajian tentang proses radikalisme di sekolah, sebelumnya dikatakan bahwa radikalisme pada siswa terjadi akibat pengaruh dari jaringan alumni yang menjadikan Rohis sebagai wahana indoktrinasi. Strategi yang digunakan adalah dengan menjadikan alumni sebagai instruktur salah satu kegiatan ekstra, yaitu Rohis. Namun, dalam kasus Cirebon, enam sekolah yang menjadi kajian penelitian ini sangat sedikit melibatkan alumni dalam kegiatan Rohis. Tercatat hanya satu sekolah yang menjadikan alumni sebagai instruktur, yaitu MAN 1 Kota Cirebon. Namun sebagai instruktur Rohis, perannya hanya sebatas penguatan skill dakwah. Dia tidak terlibat langsung terhadap kontrol atau materi dakwah yang harus didalami dan disampaikan siswa. Kontrol utama terdapat pada guru pembina.<sup>68</sup>

Dalam kajian keagamaan secara khusus, sejumlah sekolah lebih condong mengundang guru-guru yang notabene merupakan lulusan pesantren moderat.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Mukarom, guru sekaligus pembina Wahdaniyah (Rohis) di MAN 1 Cirebon, pada 10 Oktober 2017.

Pasalnya, guru-guru inilah yang bisa membaca dan memahami kitab kuning, seperti *Safinatun Najah* atau *Sulamu Taufiq*.<sup>69</sup> Sebagaimana kita tahu, bahwa ukuran dasar dari seorang santri adalah dalam kemampuannya menguasai *ilmu alat* seperti Nahwu-Sharaf yang kemudian bisa dia gunakan dalam membaca kitab kuning. Dari penguasaan *ilmu alat* inilah diyakini penguasaan akan ilmu agamanya juga mumpuni.

Masih terkait dengan instruktur dari luar sekolah, dalam kegiatan ekstrakurikuler selain Rohis, keberadaan instruktur dari luar dipilih dari kelompok profesional. Untuk kegiatan Karate misalnya, instruktur yang dipilih adalah mereka yang benar-benar menguasai ilmu tersebut dan setidaknya pernah juara. Di sini guru pembina memiliki peran sentral dalam pemilihan instruktur kegiatan ekstra. Di enam sekolah yang dijadikan sasaran penelitian, guru pembina memiliki wewenang lebih dalam pemilihan instruktur dari luar.

Fakta ini menunjukkan setidaknya ada dua faktor utama di internal sekolah yang menyebabkan surutnya radikalisme pada siswa Cirebon masa kini, yaitu eksistensi guru pembina dan pemilihan secara ketat instruktur kegiatan ekstrakurikuler dari luar sekolah. Di luar itu, sejumlah guru di sekolah menengah Cirebon juga memiliki inisiatif khusus dalam mempromosikan kebinekaan. Pertama, adalah dengan mengenalkan siswa kepada pemeluk agama lain. Menghadirkan organisasi kepemudaan di lingkungan sekolah menjadi inisiatif kedua yang penting dicatat. Selain itu, terdapat usaha sekolah untuk melibatkan jaringan aktor eksternal sekolah dalam pembinaan kesiswaan. Dari OSIS, itikad untuk mempromosikan kebinekaan melalui kegiatan karnaval menjadi hal penting yang perlu diperhatikan pula.

#### **1). Menghadirkan Organisasi Kepemudaan di Sekolah**

Menyadari betapa rawannya siswa dari pengaruh radikalisme, seorang Guru Pendidikan Agama Islam sekaligus Pembina Rohis berinisiatif untuk menghadirkan organisasi pelajar di sekolah. Pengalamannya dalam berhadapan dengan kader Islam Radikal yang hendak menawarkan penguasaan materi keislaman, membuatnya untuk mencoba sesuatu yang tidak wajar, yaitu mendeklarasikan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di SMAN 1 Plumbon.

---

69 Wawancara dengan Imron, Instruktur Rohis di SMAN 1 Sumber pada 14 Oktober 2017.

Alasannya, daripada melalui jalur sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan oleh kader Islam tarbiyah, maka lebih baik memilih jalur formal.<sup>70</sup>

Pilihannya terhadap IPNU bukan lantaran dia adalah kader Nahdlatul Ulama. Melainkan hanya organisasi inilah yang dia ketahui. Di saat yang sama, di organisasi ini pula dia memiliki jaringan dan perkawanan dengan tokoh-tokoh moderat di Cirebon. Bahkan dia juga mempersilahkan jika organisasi kepemudaan turut terlibat dalam kegiatan ekstra.

Usahanya ini cukup efektif dalam menghalau gerakan Islam radikal masuk ke sekolah. Sejak deklarasi organisasi kepemudaan di lingkungan sekolah ini, tercatat upaya untuk infiltrasi gerakan radikal sudah tidak ada. Pada saat yang sama, siswa-siswa yang mengikuti kegiatan Rohis dapat dipastikan memiliki pemahaman kebangsaan yang luas dan pemahaman keagamaan yang lebih moderat. Karena secara reguler, siswa anggota Rohis terlibat juga dalam kegiatan NU ataupun kegiatan promosi kebinekaan di Cirebon.

Bukannya tanpa tantangan. Upaya yang dilakukan di SMAN 1 Plumbon dinilai melanggar prinsip dasar sekolah yang menerapkan Wawasan Wiyata Mandala dimana sekolah harus diposisikan sebagai lingkungan pendidikan murni. Maksudnya, sekolah harus terhindar dari beragam intervensi baik yang bernuansa politik maupun agama.<sup>71</sup> Sebenarnya pendapat demikian tidak begitu beralasan jika dikontraskan dengan fakta radikalisme di sekolah. Sudah jamak bahwa sejumlah ormas radikal mengintervensi kegiatan keagamaan siswa secara diam-diam.

Selain itu, sebenarnya inisiatif yang dilakukan di SMAN 1 Plumbon bukan hal yang baru sama sekali. Dewan Pengawas MAN Kab. Cirebon misalnya pernah menjelaskan bahwa untuk menghalau arus radikalisme di sekolah, pilihannya adalah dengan menghadirkan kembali sejumlah ormas kepemudaan di sekolah. Kehadiran ormas ini diyakini bukan hanya bisa memperdalam kemampuan siswa dalam berorganisasi, tapi juga mampu mengenalkan siswa terhadap perbedaan sejak dini. Usulan kebijakan ini

---

70 Wawancara dengan Qoidah, Guru PAI dan Mantan Pembina Rohis SMAN 1 Plumbon, 10 Oktober 2017.

71 Wawancara dengan Ahmad, Pembina OSIS SMAN 1 Plumbon, 9 Oktober 2017.

baginya merupakan pilihan paling strategis ditengah kuatnya arus radikalisme pada siswa.<sup>72</sup>

## **2). Mengenalkan Siswa tentang Fakta Kebinekaan**

Daya tahan lain sekolah yang perlu dicatat adalah inisiatif yang dilakukan oleh Pembina Paskibraka di SMAN 1 Jamblang. Bukan hanya menanamkan nilai-nilai kebinekaan dan kebangsaan melalui kegiatan paskibraka, secara sengaja pembina yang juga merupakan Guru Sosiologi tersebut, juga memperkenalkan siswa tentang realitas kebinekaan secara langsung.<sup>73</sup> Dalam mata pelajaran praktik, secara reguler dia menugaskan siswa untuk berkunjung ke tempat ibadah agama non-Muslim dan mengenal agama lain secara langsung.

Kunjungan ke sejumlah tempat ibadah agama non-muslim ini baginya merupakan satu-satunya cara yang paling realistis dalam memperkenalkan multikulturalisme. Guru tersebut mengaku selalu menekankan pada siswanya bahwa meski Islam merupakan agama mayoritas di Cirebon, bukan berarti boleh bersifat semena-mena terhadap pemeluk agama lain. Karena Indonesia bukan negara agama yang menganut agama tertentu dalam konstitusinya, maka setiap warganegara dari agama apapun mempunyai posisi yang setara.

Upaya yang dilakukan di SMAN 1 Jamblang ini nampaknya perlu mendapatkan perhatian utama. Pengenalan terhadap kebinekaan ini sangat penting bagi siswa di Jamblang. Karena di satu sisi, sekolah ini sangat dekat dengan Pesantren Ar-Royan yang diindikasikan kuat mengajarkan paham radikalisme. Dan di saat yang sama, siswa di Jamblang sangat dekat dengan fenomena terorisme. Beberapa waktu lalu, pelaku teroris Bom Panci Bekasi diketahui merupakan warga asli Jamblang. Sejumlah teroris juga ditangkap di daerah ini dan diyakini telah menjadi bagian dari warga Jamblang.<sup>74</sup>

### **b. Memperkuat Keterlibatan Jaringan**

Mekanisme yang berbeda dilakukan oleh MAN 2 Babakan Ciwaringin. Dalam upaya melakukan pembinaan maupun pengawasan kepada siswa,

---

72 Wawancara dengan H Badawi, Komite Sekolah MAN 1 Ciwaringin sekaligus Dewan Pengawas Madrasah Aliyah Kab. Cirebon, 5 Oktober 2017.

73 Wawancara dengan Maulana, Guru Sosiologi dan Pembina Paskibraka, 6 Oktober 2017.

74 Wawancara dengan Dedi, Komite sekolah SMAN 1 Jamblang, 9 Oktober 2017.

pihak sekolah tidak hanya melibatkan murid melalui ekstrakurikuler Polisi Sekolah (PKS) dan komite sekolah. Di saat yang sama mereka juga melibatkan alumni. Alumni ini terdiri dari alumni pesantren maupun alumni MAN secara khusus. Melalui upaya ini, proses radikalisme pada siswa yang biasanya terjadi di luar jam sekolah bisa diantisipasi dan dicegah.<sup>75</sup>

Ini menunjukkan bahwa bukan hanya guru yang memainkan peran sentral dalam pembinaan siswa dan mencegah dari proses radikalisme, tapi juga pesantren dan alumni. Keberadaan alumni baik pesantren maupun sekolah ini bisa memberikan warna yang beragam pada sekolah. Tidak hanya pada model kegiatan ekstrakurikuler, namun juga pada pilihan masa depan pendidikan siswa. Dalam kaitan ini, pengaruh alumni tertentu yang mencoba memengaruhi paham keagamaan siswa untuk menjadi radikal bisa dicegah dengan adanya alumni lain yang relatif mempunyai kedudukan yang sama di hadapan sekolah. Dua sekolah yang bisa dicatat dengan pengaruh alumni yang kuat adalah SMAN 1 Kota Cirebon dan MAN 2 Ciwaringin.<sup>76</sup>

### c. Karnaval Kebinekaan

Di luar itu, kreasi kegiatan OSIS di sekolah tertentu turut berperan penting dalam mendorong kebinekaan di sekolah. Kegiatan Karnaval bersama yang dilakukan oleh OSIS SMAN 1 Kab. Cirebon diakui turut memperkenalkan siswa terhadap keberagaman dan kebinekaan. Keharusan untuk menggunakan pakaian adat tertentu atau menggunakan pakaian pahlawan nasional tertentu secara tidak langsung merupakan praktik pengenalan terhadap keragaman yang ada di Indonesia. Dengan mengikuti kegiatan ini, siswa menjadi lebih mengerti bahwa Indonesia dibangun bukan hanya oleh umat agama tertentu, tapi oleh semua warga dengan latar belakang agama dan suku yang berbeda-beda. Tercermin dari beragamnya latar belakang agama dan suku tokoh-tokoh pahlawan Indonesia.<sup>77</sup>

---

75 Wawancara dengan Martono, Pembina OSIS MAN 2 Babakan Ciwaringin, 3 Oktober 2017.

76 Wawancara dengan Mujamil, ketua Ikatan Alumni MAN 2 Ciwaringin, 4 Oktober 2017.

77 Pernyataan Eki, Ketua OSIS SMAN 1 Kab. Cirebon dalam FGD temuan penelitian, 23 November 2017.

#### d. Dinamika Hubungan antar Lembaga

Strategi sekolah dalam menahan laju arus radikalisme di lingkungan sekolah tidak bisa dilepaskan dari peran lembaga di luar sekolah yang turut mendorong kebinekaan. Organisasi maupun institusi ini terdiri dari lembaga pemerintah dan masyarakat sipil. Yang perlu dicatat di sini adalah bahwa terkait kerjasama ini, pengaruh antara lembaga internal sekolah dan pihak eksternal bersifat dinamis. Dalam kasus tertentu, pihak sekolah yang lebih proaktif dalam menghadirkan pihak luar. Sementara dalam kasus lain, pihak luar yang lebih berperan.

Dari institusi pemerintah, adalah TNI dan Polri yang kerap mendorong adanya penguatan karakter kepada siswa. SMAN 1 Plumbon misalnya dengan sengaja melakukan penandatanganan kesepakatan dengan TNI terkait pembinaan kebangsaan kepada siswa. Di sekolah lain pun, Kodim secara reguler melakukan penyuluhan ke sekolah tentang bahaya radikalisme dan teorisme. Bahkan dalam kegiatan ekstra seperti Paskibraka atau Pramuka, instrukturnya berasal dari TNI. Hal yang sama juga dilakukan oleh Polres Cirebon. Namun derajat keterlibatannya nampak lebih rendah daripada yang dilakukan oleh TNI.

Apa yang dilakukan TNI tersebut bisa dinilai menyalahi Perundangan No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Keberadaan undang-undang ini telah mencabut asas dwi fungsi ABRI dan kembali menempatkan TNI dalam barak untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik. Namun, sekolah menilai bahwa salah satu institusi yang tidak bisa diragukan wawasan kebangsaan dan bela negaranya adalah TNI. Karena itu, dalam konteks pembinaan dan penguatan karakter kebangsaan, TNI menjadi pihak terdepan.

Dalam derajat tertentu, Kementerian Agama baik di Kota maupun di Kabupaten juga berperan dalam penguatan kebinekaan. Secara reguler, Kementerian Agama misalnya, melakukan penguatan kapasitas kepada guru-guru pengampu materi pelajaran Agama Islam tentang wawasan Islam Moderat.<sup>78</sup> Namun, Kemenag sendiri mengaku tidak bisa mendorong pencegahan arus radikalisme dari hulu, dalam arti pengaruh pesantren radikal

---

78 Wawancara dengan Imron, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cirebon, 16 Oktober 2017.

di Cirebon. Kewenangan Kopontren terbatas hanya untuk mendata, bukan untuk melakukan intervensi. Pada akhirnya, intervensi yang bisa dilakukan untuk mencegah arus radikalisme adalah dengan menysasar para guru.

Dengan fokus sasaran pada murid, Kementerian Agama Kota Cirebon melakukan hal yang berbeda. Setiap tahun ajaran baru dan pergantian pengurus Rohis, Kementerian Agama melakukan penguatan kapasitas kepada pengurus Rohis. Melalui program pesantren kilat, secara reguler Kementerian Agama melakukan penguatan kapasitas kepada pengurus Rohis tentang wawasan kebangsaan dan kebinekaan di pesantren-pesantren moderat di Cirebon.

Yang tidak kalah penting adalah upaya yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat sipil, baik itu pesantren ataupun lembaga swadaya masyarakat. Melalui program Sekolah Cinta Perdamaian misalnya, sejak tiga tahun terakhir Fahmina Cirebon secara reguler dan konsisten melakukan penguatan kapasitas kepada siswa terkait kebinekaan.<sup>79</sup> Meski tingkat keterlibatan siswa dalam mengikuti kegiatan ini naik turun, namun program ini berhasil meng-counter infiltrasi paham radikal di sekolah.

Dari arah yang berbeda, tercatat Aliansi Indonesia Damai (AIDA) juga pernah melakukan penguatan kapasitas kepada siswa. Meski kegiatan ini sifatnya temporer, namun dampak yang ditimbulkan terasa hingga kini. Bukan hanya terkait dengan Islam Moderat, kemampuan guru untuk menilai dan mengontrol institusi luar yang hendak menginfiltrasi radikalisme pada siswa juga didapat dari AIDA.<sup>80</sup>

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa daya tahan sekolah dalam menghalau kelompok radikal bukan hanya karena pengaruh internal sekolah. Ada sejumlah lembaga di luar sekolah yang ikut menentukan warna kebinekaan di sekolah. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah bahwa peran guru pembina sangat menentukan dalam mendorong kebinekaan dalam kegiatan ekstra. Inisiatif yang dilakukan sejumlah guru pembina bagaimanapun harus diakui sebagai inovasi dan terobosan baru dalam mempromosikan kebinekaan di lingkungan pendidikan.

---

79 Wawancara dengan Rudy Setiady, Kordinator Program Staman, 15 Oktober 2017.

80 Wawancara dengan Jazuli, Wakakesiswaan SMAN 1 Sumber 4 Oktober 2017.

#### **4. Mencari Model Ketahanan di Tengah Kerawanan**

Daya tahan sekolah dalam menghalau arus radikalisme pada dasarnya sangat terkait dengan adanya kebijakan spesifik yang mendukung kebinekaan. Tanpa kebijakan, praktik baik yang dilakukan guru maupun hubungan kelembagaan yang mempromosikan kebinekaan akan sangat rentan terhadap perubahan ketika pengambil kebijakan berubah. Konsekuensi logisnya, tanpa adanya kebijakan positif di level sekolah, sekolah tetap menjadi ruang terbuka bagi proses radikalisasi.

Dalam kasus Cirebon, kemungkinan itu pasti ada. Pasalnya, lingkup sosial-masyarakat dimana siswa tumbuh dalam mencari informasi keagamaan sangat dekat dengan pengaruh kelompok radikal. Terlebih ketika majelis taklim menjadi pilihan utama siswa sekolah umum dalam memperdalam ilmu pengetahuan. Majelis taklim merupakan pilihan instan siswa dari sekolah umum untuk memperdalam ilmu agama dibandingkan harus masuk pondok pesantren yang butuh waktu bertahun-tahun untuk menguasai ilmu agama.

Sebagaimana kajian Cici Farha yang mengatakan bahwa proses radikalisasi pada siswa sangat tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik dan tarik ulur kepentingan sekolah adalah benar adanya. Dalam kasus SMAN 1 Plumbon, pergantian kepala sekolah misalnya, bisa membuat kebijakan ekstrakurikuler berubah. Inisiatif yang dilakukan untuk menghadirkan organisasi kepemudaan di sekolah kini tidak terdengar lagi gemanya Di satu sisi karena kepala sekolah tidak begitu memiliki konsen terhadap kegiatan ekstrakurikuler, dan di saat yang sama juga terjadi karena pergantian pembina Rohis sendiri.

Pada level kebijakan di luar sekolah, ketiadaan panduan yang jelas terkait penguatan kebinekaan dan inklusifitas sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti merupakan titik rawan berikutnya yang harus mendapat perhatian. Pembinaan kesiswaan dan penumbuhan budi pekerti ini sering dimaknai sebagai upaya sekolah dan guru dalam mendorong siswanya untuk menjadi manusia yang Islami. Cara

yang dilakukan guru selain dengan memperbanyak kegiatan keislaman di sekolah, juga dengan menganjurkan siswa untuk mengikuti majelis-majelis taklim di luar jam sekolah. Hal tersebut dilakukan tanpa petunjuk dari guru terkait mana majelis taklim yang selayaknya diikuti siswa. Maka siswa pun memilih majelis taklim yang mengajarkan intoleransi dan radikalisme karena lebih populer.<sup>81</sup> Ini artinya, tanpa adanya panduan yang jelas, inisiatif yang dilakukan oleh guru ini bisa menjadi blunder dan tanpa sengaja menjadi medium proses radikalisasi pada siswa.

Di tengah kerawanan yang masih membayangi sekolah-sekolah di Cirebon itulah, sejumlah pengalaman dan praktik baik di sejumlah sekolah perlu diangkat menjadi kebijakan. Upaya untuk menghadirkan organisasi kepemudaan di sekolah maupun pengenalan multikulturalisme, melibatkan alumni maupun jaringan sekolah dalam pembinaan siswa, juga praktik kebinekaan yang dilakukan OSIS sebagaimana disebutkan dimuka, sangatlah urgen untuk diangkat menjadi sebuah kebijakan. Adapun di level internal sekolah adalah bagaimana menjadikan praktik-praktik baik itu sebagai sebuah kebijakan positif, sehingga menjadi sistem yang berkelanjutan. Sementara di level pemerintah, praktik baik ini harus dijadikan sebagai input penting dalam perumusan kebijakan kebinekaan dan toleransi di masa mendatang.

---

81 Wawancara dengan M Fadjri, Guru Pembina Rohis Ikhwan SMAN 1 Kota Cirebon, 19 Oktober 2017.

# 6

# TOMOHON

## A. GAMBARAN UMUM LOKASI

### 1. SMAN 1 Tomohon

SMAN 1 Tomohon merupakan sekolah rujukan di Kota Tomohon. Sekolah yang sudah berdiri sejak tahun 1946 ini termasuk sekolah favorit bagi para siswa dan orang tuanya. Mayoritas siswa di SMAN 1 Tomohon ini berasal dari Tomohon, dan wilayah sekitarnya seperti Kabupaten Minahasa dan Tondano. Letak sekolah ini berada di pusat kota, tepatnya di Jl. Siswa No. 129 Tomohon Selatan. Tahun ini jumlah siswa SMAN 1 Tomohon mencapai 1.320 siswa. Jumlahnya meningkat jika dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 1.301 siswa. Peningkatan jumlah siswa ini karena adanya penambahan bangunan kelas, bahkan saat peneliti datang di sekolah ini sedang ada pembangunan 3 lokal gedung kelas baru. Diperkirakan, SMAN 1 di tahun ajaran berikutnya bisa menampung 1400-an siswa. Tata letak ruangnya terbagi menjadi 3 *cluster* yang memanjang. *Cluster* 1 yang berhadapan dengan jalan raya adalah *cluster* utama. Di dalamnya terdiri dari dua lantai. Lantai dasar adalah kantor utama para petinggi sekolah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wakil kepala bidang kesiswaan (waka kesiswaan), ruang tata usaha, ruang bimbingan konseling dan unit kesehatan siswa. Sedangkan lantai atas adalah ruang belajar untuk kelas X. Lapangan utama yang biasa digunakan untuk upacara bendera, dan sarana olah raga seperti basket, futsal dan bola voli berada di *cluster* ini. *Cluster* 2 terdiri atas ruang guru, ruang OSIS, ruang koperasi, ruang seni dan budaya, ruang multimedia dan ruang belajar untuk kelas XI. *Cluster* ini memiliki gerbang samping yang berhadapan dengan gang masuk perumahan. Sedangkan

*cluster* 3 terdiri dari ruang serba guna (aula), ruang agama dan ruang belajar untuk kelas XII. *Cluster* ini sejajar dengan *cluster* 2 yang memiliki gerbang dan berhadapan dengan gang masuk perumahan. Pembangunan 3 ruang baru sedang dibangun di *cluster* ini.

Sekolah yang memiliki luas lahan 14.580 m<sup>2</sup> ini memiliki 36 rombongan belajar (rombel); kelas X ada 12 rombel, kelas XI ada 13 rombel, dan kelas XII ada 11 rombel. Masing-masing rombel sudah terbagi ke dalam tiga peminatan, yaitu peminatan bahasa, IPA, dan IPS. Kepala Sekolah SMAN 1 Tomohon, Dra. Meytha J. Tambengi, MM menyatakan bahwa sejauh ini sekolahnya tidak memiliki kendala dalam mengurus sejumlah siswa tersebut.<sup>1</sup> Hal ini karena jumlah guru dan karyawannya cukup proporsional yakni 65 guru dan 12 karyawan. Begitu pula dengan kesesuaian latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampu. Hanya ada 3 mata pelajaran yang belum sesuai dengan pendidikan gurunya yaitu 1 guru antropologi dan 2 guru sejarah. Mayoritas guru-guru di SMAN 1 Tomohon ini adalah lulusan dari IKIP Manado yang saat ini berganti nama menjadi Universitas Negeri Manado (Unima).

Sekolah ini memiliki sumber daya yang kuat. Selain sumber daya pendanaan yang bersumber dari pemerintah yang besar, SMAN 1 Tomohon juga memiliki sumber daya alumni dan jaringan orang tua murid. Tahun 2017, alumni sekolah ini sudah mencapai 69 angkatan. Para alumni sekolah ini sudah banyak yang menduduki posisi pemerintahan, pengusaha, dan akademisi. Maka tidak heran jika guru-guru di sekolah ini hampir seluruhnya adalah alumni sekolah ini, begitu juga dengan para birokrat pemerintah daerah Kota Tomohon dan Sulawesi Utara. Alumni dalam penyelenggaraan reuni sekolah senantiasa menggalang dana untuk bantuan ke sekolah ini. Bentuknya bisa uang ataupun barang. Uang tersebut digunakan untuk pembangunan ataupun kebutuhan peningkatan kualitas pengajaran, pembinaan ataupun pelatihan untuk para siswa. Sedangkan jaringan wali murid yang dikoordinir oleh komite sekolah tentu juga menjadi kekuatan dari sekolah ini. Ketua Komite

---

1 Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMAN 1 Tomohon pada tanggal 11 Oktober 2017.

Sekolah SMAN 1 adalah seorang pejabat di Polres Kota Tomohon dan sudah menjabat sebagai ketua komite sejak 2001 atau selama 16 tahun.

## **2. SMAN 2 Tomohon**

Sekolah berikutnya adalah SMAN 2 Tomohon. Sekolah ini berada di Kelurahan Taratara Tiga, Tomohon Barat. Lokasinya berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya, sekolah ini berada jauh dari pusat kota dan pusat keramaian. Siswa-siswa dari sekolah ini seluruhnya berasal dari pelosok daerah Tomohon Barat dan hampir seluruhnya berasal dari kalangan ekonomi menengah kebawah. Kualitas dan kuantitas sekolah ini sangat jauh berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya. Meski demikian, sekolah ini sudah berstatus negeri sejak pendiriannya. Sekolah ini membuka kelas pertama pada tahun 2003 dan secara resminya pada tahun 2005. Guru yang ada di SMAN 2 Tomohon berjumlah 27 orang. Sedangkan siswanya berjumlah kurang dari 200 orang.

OSIS SMAN 2 Tomohon memiliki struktur organisasi yang sama dengan OSIS SMAN 1 Tomohon yang terbagi dalam 8 bidang. Adapun dalam strukturnya terdapat sepuluh bidang, yakni Bidang Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Bidang I), Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Bidang II), Bidang Pendidikan dan Bela Negara (Bidang III), Bidang Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur (Bidang IV), Bidang Berorganisasi, Pendidikan, Politik dan Kepemimpinan (Bidang V), Bidang Keterampilan dan Kewirausahaan (Bidang VI), Bidang Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi (Bidang VII), Bidang Persepsi, Apresiasi, Kreasi Seni (Bidang VIII), Bidang Keamanan (Bidang IX), dan Bidang Informasi Teknologi (Bidang X). Semua bidang yang ada di strukur tersebut masing-masing dibawah binaan guru-guru yang sudah ditunjuk oleh kepala sekolah. Semua guru dibawah kendali pengawasan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan (Waka Kesiswaan).

Jejaring alumni dan wali murid di sekolah ini tidak seperti di SMAN 1. Kepedulian para alumni hanya sebatas kehadiran dalam kegiatan reuni saja. Belum ada upaya penggalangan dana ataupun bantuan lainnya. SMAN 1 bisa berani mendatangkan mentor profesional untuk membina beberapa kegiatan OSIS sedangkan SMAN 2 masih mengandalkan relawan dari alumni. Sejauh

ini hanya ada satu alumni yang berperan untuk membantu kegiatan OSIS di SMAN 2, yakni untuk tambahan personel untuk paduan suara. Perbedaan lainnya adalah jejaring wali murid. Salah satu anggota komite sekolah adalah guru di sekolah ini. Kondisi komite sekolah saat ini sedang tidak begitu aktif. Mayoritas wali murid termasuk komite sekolah adalah petani. Begitu juga dengan latar belakang keagamaan wali murid. Sebagian besar beragama Kristen dan Katolik.

### **3. MA Mardhatillah**

Ulasan berikutnya adalah MA Mardhatillah. Madrasah aliyah ini berada di desa Kinilow, Tomohon Utara. Lokasinya paling mudah ditemukan dibandingkan dengan sekolah menengah atas lainnya karena berada persis digerbang masuk Kota Tomohon jika dari arah Manado. Selain itu, sekolah ini adalah sekolah satu-satunya yang memiliki karakter dan visi Islam di Kota Seribu Gereja. MA Mardhatillah menjadi bagian dari Pondok Pesantren Hidayatullah. Hidayatullah merupakan ormas yang memiliki banyak pesantren di pelosok negeri. Abdullah Said pada 7 Januari 1973 mendirikan Pesantren Hidayatullah pertama di atas lahan wakaf seluas 120 hektar di Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pesantren ini menjadi pusat laboratorium perkaderan yang mana santri-santrinya yang sudah dianggap mapan secara keilmuan akan dikirim sebagai pendakwah ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, khususnya daerah-daerah minoritas muslim. Tidak hanya itu, para santri yang bertugas tersebut justru mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat dakwah di masing-masing daerah. Salah satu daerah tersebut ada di kota Tomohon yang menjadi sentral dari dakwah di wilayah-wilayah Sulawesi Utara. Ust. Abdul Qadir Abdullah mendirikan Pesantren Hidayatullah di Tomohon sejak tahun 1989. Saat itu, Tomohon masih menjadi bagian dari Kabupaten Minahasa.

Sebagaimana sekolah yang terintegrasi dengan pondok pesantren, siswa MA Mardhatillah lebih sering disebut sebagai santri. OSIS secara *de facto* kurang dikenal di madrasah ini. Siswa yang menjadi pengurus di organisasi kesiswaan lebih dikenal dengan sebutan Dewan Santri. Meski demikian, menurut Kepala Sekolah MA Mardhatillah, Ust. Taufiq, OSIS secara

administratif masih digunakan.<sup>2</sup> Dewan Santri MA Mardhatillah tidak banyak memiliki bidang-bidang. Hal ini karena jumlah di sekolah ini yang hanya ada 16 siswi dan mereka semua adalah perempuan. Dalam stuktur lembaga OSIS atau Dewan Santri terdapat bidang kebersihan, bidang keindahan, dan bidang ketaqwaan. Bidang kebersihan adalah mereka yang mengurus jadwal piket kebersihan sekolah baik di luar ruangan atau di dalam ruangan. Bidang keindahan adalah mereka yang bertugas untuk mengelola tanaman hias dan mengatur tata letak pot bunga hias. Selain itu juga yang membuat dekorasi ornamen di dalam kelas, masjid dan asrama. Sedangkan bidang ketaqwaan adalah mereka yang mengatur jadwal pengajian dan mengelola santri saat kegiatan-kegiatan pengajian.

Semua yang sekolah di madrasah ini kebanyakan berasal dari luar Kota Tomohon. Begitu juga para guru di sekolah ini lebih umum disebut *asatidz* (para ustadz dan ustadzah). Dari 12 guru yang bertugas di sekolah ini, latar belakang pendidikan mereka bervariasi yakni ada 1 orang berijazah S2, 7 orang berijazah S1, 1 orang berijazah D3 dan 3 orang berijazah MA (SMA). Guru yang berlatar belakang MA ini adalah alumni dari MA Mardhatillah itu sendiri. Selain itu, Kepsek MA Mardhatillah menjelaskan,

*“Guru-guru dan pembina di aliyah ini, hampir semuanya punya ikatan dengan Hidayatullah, termasuk staff kami di bagian kerumah tanggian, kebersihan juga keamanan. Saya juga lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Hakim (STAIL) Surabaya. Tapi tidak semuanya alumni dari Hidayatullah (sekolah, pesantren atau perguruan tinggi), ada istri dari alumni yang turut bantu, dia bukan alumni (Hidayatullah). Untuk sekolah ini, kami terbuka, bisa juga untuk yang berkenan mengajar di sekolah ini, kami bisa terima.”<sup>3</sup>*

Ia juga menjelaskan latar belakang santri atau siswa MA Mardhatillah. Semua siswa madrasah aliyah ini mayoritas statusnya yatim piatu dan berasal dari luar Kota Tomohon. Mereka kebanyakan berasal dari Gorontalo, Ambon, Bitung, Sangir dan Bolaang Mongondow. Ada beberapa dari mereka masih memiliki keluarga. Pada pergantian tahun ajaran, mereka ada yang datang

---

2 Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MA Mardhatillah pada 3 Oktober 2017 di Pesantren Hidayatullah Desa Kinilow.

3 *Ibid.*

untuk mengengok anaknya, adiknya atau cucunya yang menjadi santri di sekolah tersebut. Namun banyak juga keluarga mereka yang tidak datang karena keterbatasan biaya transportasi. Siswa atau santri yang mengenyam pendidikan di sekolah ini berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Selama ini, pihak yayasan yang mencukupi kehidupan sehari-hari santrinya baik itu makan, alat mandi, dan kebutuhan kamarnya. Karena kondisi demikian, Komite Sekolah MA Mardhatillah dipegang oleh para pengurus yayasan Hidayatullah Kinilow.

#### **4. SMA Lokon St. Nikolaus**

Pembahasan berikutnya adalah SMA Lokon Santo Nikolaus. Sekolah ini dianggap oleh para pelajar sebagai sekolah unggulan. Fasilitas sarana dan prasarana di sekolah ini sangat lengkap. Sekolah yang beroperasi sejak tahun 2002 ini berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Lokon yang dipimpin Ronald Korompis. Secara tertulis, sekolah ini terbuka untuk semua kalangan. Didalamnya terdapat siswa yang memiliki latar belakang yang variatif. Dari sudut pandang agama, siswa yang sekolah di sini mayoritas beragama Kristen dan Katolik, sedangkan minoritasnya ada yang beragama Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meski demikian, sekolah ini menerapkan kurikulum pendidikan berbasis kehidupan atau integral holistik. Pendidikan integral holistik merupakan gabungan dari beberapa aspek yang kami terapkan untuk membentuk siswa dalam seluruh aspek pembelajaran baik spiritual, moral, imajinatif, budaya, estetika, emosi dan fisik. Sistem ini sebagai implementasi dari visi sekolah yang memiliki semangat kekatolikan yakni *veritas* (kebenaran), *virtus* (kebajikan) dan *fides* (iman). Sehingga untuk mewujudkan pendidikan integral-holistik tersebut siswa diwajibkan untuk berasrama. Mereka tidak hanya sekolah di kelas tetapi juga di asrama (*boarding school*).

Sekolah ini meskipun berskala lokal tetapi jejaringnya sangat luas. Hal ini terindikasi dari beberapa hal. *Pertama*, fasilitas standar nasional dan internasional. Manajemen organisasi yayasan ini mengelola SMP, SMA, asrama, laboratorium fisika, kimia, biologi, bahasa, komputer, observatorium atau teropong bintang, *mini "teather"*, perpustakaan dan *student center*,

lapangan olah raga termasuk kolam renang, klinik dan dokter, *dinning room*, laundry, konveksi, *guest house*, sampai dengan Mandarin Center.<sup>4</sup>*Kedua*, keberagaman siswanya. Saat ini SMA Lokon memiliki 240 siswa yang berasal dari berbagai daerah seperti dari Tomohon, Manado, Papua Barat, Timika, Kupang, Mataram, Bangka Belitung, Makasar, Samarinda, sampai Marauke. *Ketiga*, guru-gurunya yang kompeten. Untuk menjadi guru di sekolah ini, ia harus melewati 4 rangkaian tes yakni tes psikologi, tes potensi akademik, *micro teaching*, dan tes wawancara baik dengan kepala sekolah dan dengan pengurus yayasan. Bahkan untuk mengajar Bahasa Mandarin dan Jepang, pihak sekolah mendatangkan guru langsung dari Cina dan Jepang. *Keempat*, lulusan dari sekolah ini banyak yang melanjutkan pendidikannya ke Amerika Serikat, Australia, Jepang dan Tiongkok.<sup>5</sup>

Adapun mengenai OSIS, sekolah ini memiliki 10 bidang. Bidang I adalah kerohanian, yakni bidang yang mengatur kegiatan keagamaan siswa. Bidang II adalah bidang budi pekerti. Bidang ini yang membantu sekolah dalam menertibkan aturan-aturan sekolah atau asrama. Mereka berkoordinasi dengan Waka Kesiswaan dan Pembina Asrama. Bidang III yaitu bidang Bela Negara. Bidang ini yang mengatur kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upacara bendera baik ketika di sekolah ataupun di luar sekolah. Bidang IV yakni bidang yang mengatur kegiatan-kegiatan siswa terkait dengan olah raga. Bidang V yaitu bidang yang mengelola kegiatan-kegiatan siswa yang terkait dengan kepemimpinan. Kemudian ada Bidang VI yang mengelola kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Bidang VII adalah bidang yang terkait dengan program-program kesehatan siswa. Bidang VIII tentang bidang yang terkait dengan seni dan budaya. Bidang IX yang mengelola kegiatan yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dan Bidang X yang mewadahi minat dan bakat siswa di penguasaan bahasa asing.

Sekolah yang baru diresmikan tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini memiliki jejaring alumni dan wali murid yang kuat. Alumni SMA ini sebagian melanjutkan pendidikannya ke Australia, Amerika, Jepang dan Tiongkok. Sebagian lainnya kuliah di sekitaran universitas di Sulawesi

---

4 Lihat <http://smalokontomohon.blogspot.co.id> , diakses pada 3 Oktober 2017.

5 Wawancara dengan Pengurus Yayasan Lokon Bidang Operasional pada 16 Oktober 2017.

Utara dan Jakarta. Pihak yayasan memiliki akses ke universitas-universitas di luar negeri. Hal ini yang menjadi pertimbangan banyak calon wali murid untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Ketua komite sekolah ini adalah Ketua DPRD Papua Barat, sedangkan anggotanya ada dari kalangan pengusaha dan akademisi di Universitas Sam Ratulangi. Para alumni dan wali murid hanya bertemu saat ada kegiatan akhir tahun ajaran. Selain di momen itu, alumni tidak ada yang datang ke sekolah ini kecuali memiliki kepentingan tertentu.

## 5. SMA Kristen 1

Ulasan berikutnya adalah SMA Kristen 1. Sekolah ini adalah salah satu dari lembaga pendidikan yang berada langsung di bawah naungan unit pendidikan dan persekolahan Yayasan GMIM Dr. AZR Wenas. Data terakhir pada tahun 2005, GMIM mengelola banyak lembaga pendidikan di Sulawesi Utara dari tingkat Taman Kanak-kanak yang berjumlah 332 sekolah, 364 Sekolah Dasar (SD), 64 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 20 Sekolah Menengah Atas, 6 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan sebuah universitas dengan sebuah fakultas teologi, Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT). Di Kota Tomohon ada dua sekolah tingkat SMA yakni SMA Kristen 1 dan SMA Kristen 2 Bina Khusus (Binsus).

Di Kota Tomohon, SMA Kristen 1 merupakan salah satu dari sekolah favorit dan sekolah unggulan. Sekolah favorit karena banyak diminati oleh para pelajar kota Tomohon yang ingin melanjutkan pendidikannya dan unggulan karena sekolah ini sudah banyak menoreh prestasi baik yang akademik ataupun non-akademik. Sekolah yang terletak di Jl. Kampus Telete II, Tomohon Tengah ini, menampung 924 siswa. Mereka terbagi menjadi 30 rombongan belajar. Sekolah ini juga terbuka untuk semua kalangan. Ini yang berbeda dengan SMA Kristen 2 Bina Khusus (Binsus), sekolah ini tertutup hanya untuk kalangan Kristiani karena orientasi sekolah ini menerapkan sistem *boarding school* seminari. Sedangkan SMA Kristen 1, terbuka untuk umum dan tidak ada sistem asrama. Sekolah ini menjadi salah satu tujuan penelitian kami mengenai OSIS dan terkait dengan kebijakan kebinekaan. Di

sekolah ini terdapat siswa yang beragam. Salah satunya siswa yang berlatar belakang agama Islam.

Pengurus OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) SMA Kristen 1 berjumlah 58 orang. Adapun dalam strukturnya terdapat delapan bidang, yakni Bidang Ketaqwaan (Bidang I), Bidang Budi Pekerti (Bidang II), Bidang Seni dan Olah Raga (Bidang III), Bidang Demokrasi dan HAM (Bidang IV), Bidang Wawasan dan Kebangsaan (Bidang V), Bidang Kreatif Siswa (Bidang VI), Bidang Komunikasi (Bidang VII), dan Bidang Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) atau Bidang VIII. Semua bidang yang ada di struktur tersebut masing-masing dibawah binaan guru-guru yang sudah ditunjuk oleh kepala sekolah. Sekolah ini memiliki 53 orang, 44 diantaranya lulusan dari Universitas Negeri Manado (Unima) atau IKIP Manado. Oleh sebab itu, SMA Kristen 1 tidak kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam membagi tugas pembinaannya. OSIS di bawah pengawasan Wakil Kepala Bidang Kesiswaan (Waka Kesiswaan). Bidang I membawahi seksi Kerohanian Islam (Rohis) dan Seksi Kerohanian Kristen (Rokris). Sehingga kegiatannya dibawah pembinaan guru mata pelajaran agama masing-masing. Adapun Guru Bahasa Indonesia membina Bidang II, Guru Olah Raga dan Guru Bahasa Jepang membina Bidang III, Guru Fisika membina Bidang IV, Guru PKn membina Bidang V, Guru Geografi dan Guru Ekonomi membina Bidang VI, Guru Bahasa Inggris membina Bidang VII, dan Guru TIK membina Bidang VIII. Dalam setiap kegiatannya, alumni masih diberdayakan untuk membantu waka kesiswaan mempersiapkan tim untuk mengikuti kegiatan di luar sekolah. Menurut Waka Kesiswaan SMA Kristen 1, para alumni lebih banyak dibutuhkan dalam kegiatan kompetisi paduan suara. Alasannya karena setiap kompetisi ini membutuhkan jumlah yang banyak juga kompetisi ini membutuhkan suara yang sudah terlatih dan matang. Sedangkan untuk bidang-bidang yang lain, OSIS SMA Kristen 1 jarang sekali melibatkan alumni.

Jejaring alumni dan wali murid SMA Kristen 1 hampir sama dengan SMAN 1 Tomohon. Banyak alumninya yang sudah menjadi pejabat di Pemerintah Daerah Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara atau di kabupaten-

kabupaten lainnya di Minahasa. Dari sekian banyak alumni, ada beberapa momen yang mana sekolah mengundang alumni untuk membantu kegiatan di sekolah khususnya kegiatan OSIS yang sudah dijelaskan di atas. Selain itu, penggalangan dana dari para alumni juga cukup terkoordinir. Sementara jaringan wali murid, Ketua Komite Sekolah SMA Kristen 1 adalah Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tomohon. Yayasan Dr. Azr Wenas (GMIM) yang menaungi sekolah ini juga turut memperkuat jaringan di SMA Kristen 1.

## **6. SMA Lentera Harapan**

Selanjutnya adalah Sekolah Lentera Harapan (SLH) Tomohon. Sekolah ini bagian dari jaringan nasional Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Yayasan ini membawahi Sekolah Pelita Harapan, Sekolah Dian Harapan, Universitas Pelita Harapan, UPH College, Yayasan Pendidikan Harapan Papua. Semua yayasan yang berkantor pusat di Tangerang ini memiliki jejaring masing-masing, termasuk Sekolah Lentera Harapan. Saat ini, ada 17 sekolah SLH dengan 7.656 siswa yang didirikan di semua sekolah dengan 519 siswa TK, 3.258 siswa Pratama, 2.153 siswa SMP dan 1.186 siswa SMA. Orang tua dan siswa sama-sama telah membantu anak-anak ini untuk menerima pendidikan yang layak dengan menyumbangkan buku atau dukungan finansial melalui Program Orang Tua Asuh.<sup>6</sup>

SMA Lentera Harapan Tomohon berada satu kompleks dengan SD Lentera Harapan dan satu gedung dengan SMP Lentera harapan. Sekolah yang berada di Tomohon Timur ini usianya baru 2 tahun. Meski demikian, sarana dan prasarana sekolah ini sudah siap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ruang unit kesehatan siswa (UKS), ruang belajar, ruang seni dan ruang ibadah (chapel) sudah tersedia. Begitu juga dengan guru-gurunya. Di sekolah ini ada 27 guru dan 22 diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Mayoritas latar pendidikan guru-guru di sekolah ini adalah alumni dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang. Mereka adalah mahasiswa yang selama kuliah di UPH mendapatkan beasiswa penuh dari yayasan

---

6 Lihat [www.lentera.sch.id](http://www.lentera.sch.id), diakses pada 1 Oktober 2017.

sehingga tugas pengabdianannya adalah mengajar di sekolah-sekolah jaringan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan.

Visi misi sekolah ini sengaja dirancang untuk memberikan pendidikan berkualitas. Sasaran sekolah Lentera Harapan adalah untuk siswa yang berlatar belakang ekonominya dari kelas menengah kebawah. Mereka menerapkan subsidi silang bagi siswanya. Adapun sistem pendidikan yang diterapkan berupa pendidikan yang memadukan *scientific-religious*. Visi sekolah ini sebagaimana visi Yayasan Pendidikan Pelita Harapan yakni Pengetahuan yang Benar, Iman kepada Kristus, dan Karakter Ketuhanan. Mereka menerapkan sistem pendidikan yang memadukan kegiatan sekolah dengan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti bimbingan konseling dengan seorang pastor atau pendeta.

Sebagai sekolah yang baru berdiri, OSIS yang ada di sekolah ini masih terbatas. Beberapa bidang yang ada di sekolah ini secara rinci adalah sebagaimana berikut: Bidang I yang mengelola kegiatan keagamaan. Dalam hal ini adalah kegiatan apel ibadah dan literasi al-kitab. Bidang II yang mengelola bidang seni kreatif. Bidang ini yang menjaring, merekrut dan memfasilitasi siswa yang memiliki minat dan bakat di bidang seni kreatif. Bidang III atau Bidang Gizi dan Kesehatan. Ini yang tidak ditemukan di OSIS lainnya di Tomohon. Di sekolah Lentera Harapan, secara khusus membawahi kegiatan-kegiatan yang terkait budaya dan pemahaman siswa akan pentingnya asupan gizi dan kesehatan. Salah satu kegiatannya adalah yang mengelola Unit Kesehatan Siswa (UKS). Bidang lainnya yakni Bidang IV. Bidang ini yang mengawasi pelaksanaan aturan di sekolah. Mereka menyambut siswa ketika datang ke sekolah, memberi hukuman ke siswa yang terlambat atau aturan-aturan lainnya yang telah dilanggar. Bidang V adalah bidang minat dan bakat. Bidang ini yang mencari dan mempromosikan minat dan bakat siswa untuk disalurkan ke kegiatan-kegiatan di sekolah. Bidang VI merupakan bidang yang mengurus kebersihan di lingkungan sekolah.

SMA Lentera Harapan belum memiliki jejaring alumni, tetapi jejaring wali murid sudah terjalin. Belum ada satupun alumni sekolah ini karena baru berdiri 2 tahun terakhir. Sedangkan komite sekolah baru terjalin satu tahun

terakhir. Saat ini ketua komite sekolah dipegang oleh salah satu pendeta GMIM. Wali murid hanya datang pada momen penerimaan raport tetapi komunikasi komite sekolah dengan wali murid dan pihak sekolah sangat intens. Selama ini SMA Lentera Harapan masih banyak didominasi oleh pihak Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH) baik pendanaan, guru, kurikulum ataupun kebutuhan lainnya.

## **7. SMA Kosgoro**

Sekolah selanjutnya adalah SMA Kosgoro. Peneliti mengkategorikan sekolah ini pada sekolah tipe ketiga. Sekolah ini bukan sekolah yang berstatus negeri dan bukan juga sekolah yang berada di bawah naungan yayasan keagamaan. Sekolah ini bagian dari Yayasan Kosgoro (Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong), yayasan yang dibentuk pada tahun 1957. Meskipun nama Kosgoro ditemukan di banyak tempat, yayasan ini tidak sekuat Yayasan Pendidikan Lentera Harapan, Hidayatullah ataupun GMIM. Mereka tidak begitu ketat dalam mengelola jaringannya. SMA Kosgoro Kota Tomohon berdiri pada tahun 1987 dan telah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Saat ini sekolah yang berada di Tomohon Selatan ini sedang mengalami kemunduran. Jumlah siswa yang berminat meneruskan pendidikan di sekolah ini semakin berkurang. Jumlah siswanya saat ini ada 74 siswa. Begitu juga dengan jumlah guru yang hanya ada 18 orang.

OSIS di sekolah ini masih sederhana. Sederhana bukan dari jumlah bidang dalam struktur saja tetapi sederhana karena penyesuaian jumlah bidang dengan jumlah siswanya. Ada beberapa bidang yang masih ada dalam struktur dan masih berjalan. Pertama, bidang I atau bidang ketaqwaan. Bidang ini yang mengelola kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah. Sekolah ini memiliki keragaman latar belakang siswa dari sudut pandang agamanya. Mayoritas beragama Kristen dan minoritasnya beragama Katolik dan Islam. Ada sekitar 20 siswa yang beragama Islam. Hal ini karena lokasinya yang dekat dengan Kampung Jawa yang banyak dihuni oleh penduduk Tomohon yang beragama Islam. Sebelumnya, di sekolah ini bidang I memiliki dua sub-bidang yakni Kerohanian Islam (Rohis) dan Kerohanian Kristen (Rokris). Akan tetapi karena tidak adanya guru agama Islam disekolah ini maka keberadaan Rohis

sudah tidak terlihat lagi kegiatannya. Kejadian ini sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir. Selanjutnya adalah Bidang II, bidang bela Negara. Bidang ini yang mengatur kegiatan-kegiatan upacara bendera di sekolah atau di luar sekolah. Bidang III kaitannya dengan kegiatan OSIS di bidang olah raga. Mereka mencari minat dan bakat siswa, melatih dan mengelolanya agar dipersiapkan menjadi atlet sekolah. Kemudian ada bidang IV, yang mengelola kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kesenian dan kreatifitas.

Meskipun sekolah ini berdiri sudah lama tetapi potensi jejaring alumni dan wali murid tidak begitu kuat. Sekolah ini berjaya ketika rezim Orde Baru berkuasa melalui Yayasan Kosgoro, yang banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Setelah masa transisi politik terjadi, sekolah ini terus menerus mengalami kemunduran. Para alumni tidak lagi solid seperti masa-masa itu. Acara reuni sekolah tidak lagi banyak didatangi oleh para alumni. Selain itu, jejaring wali murid juga tidak begitu terkonsolidasi. Saat ini peran komite sekolah dipegang oleh salah satu guru SMA Kosgoro. Hal ini karena ketua komite sekolah yang dipilih berdasarkan pemilihan wali murid tidak begitu aktif.<sup>7</sup>

Dari semua sekolah yang menjadi objek penelitian ada gambaran relasi antara sekolah dengan pemerintah, masyarakat dan partai politik. Berbagai instansi negara di wilayah Kota Tomohon pro-aktif memberikan arahan kepada para siswa di sekolah-sekolah. Mulai dari Dinas Pendidikan Kota Tomohon, TNI, Polres Kota Tomohon, Kejaksaan Kota Tomohon, Dinas Kesehatan Kota Tomohon, dan Badan Narkotika Nasional. Sedangkan dengan masyarakat, tidak semua sekolah memiliki relasi. Kebanyakan mereka menjalin kerjasama dalam satu kegiatan baik langsung atau tidak langsung, baik antara lembaga atau antar sekolah dengan individu (tokoh masyarakat). Hampir seluruh bentuknya berupa kegiatan keagamaan yang terkait dengan gereja. Sedangkan relasi sekolah dengan partai politik, tujuh sekolah yang menjadi objek penelitian seluruhnya tidak ada relasi baik langsung atau tidak langsung yang terjalin antara partai politik dengan sekolah, OSIS, ataupun siswa, guru, komite sekolah dan kepala sekolah secara individu.

---

7 Wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Kosgoro pada 11 Oktober 2017.

## B. TEMUAN HASIL PENELITIAN

### 1. Ekskul di Pesimpangan Jalan: Antara Isu dan Realitas

Sudah banyak penelitian yang menunjukkan fakta-fakta mengenai radikalisme di sekolah, salah satu ruang infiltrasinya melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Selama ini hasil riset dari beberapa lembaga tertuju pada sekolah-sekolah negeri di daerah yang mayoritas muslim. Umumnya yang disorot adalah siswa, guru dan alumninya yang berkelindan dengan jaringan radikalisme dan terorisme. Survei dilakukan oleh Setara Institute di tahun 2015, mengenai persepsi siswa terhadap fenomena ISIS. Mereka melakukan survei terhadap pelajar sekolah menengah umum di Jakarta dan Bandung. Hasilnya, 16,9 persen menyatakan bahwa ISIS adalah pejuang-pejuang yang hendak mendirikan agama Islam. Sementara hasil riset dari Wahid Foundation pada tahun 2016 menunjukkan angka yang membuat kita perlu waspada. Menurut proyeksi, dari 150 juta penganut muslim di Indonesia, sekitar 7,7 persen atau 11,5 juta orang berpotensi bertindak radikal sedangkan 0,4 persen atau 600 ribu orang pernah terlibat.

Data yang paling mutakhir adalah hasil penelitian dari PPIM tahun 2017 yang menyoal sikap keberagaman generasi Z. Jumlah responden survey nasional ini adalah 2.181 orang yang terdiri dari 1.522 siswa, 337 mahasiswa, 264 guru dan 58 dosen. Hasilnya menunjukkan pada tingkat opini siswa atau mahasiswa, 51.1% pemahaman mereka intoleran dan 58.5% pemahaman mereka radikal. Sementara dalam sikap, aksi intoleransi mereka 34.1% dan aksi radikalnya 7.0%. Survey ini juga melihat bagaimana generasi Z mendapatkan informasi mengenai ajaran agama Islam. Hasilnya, 54.87% mereka mengakses internet.

Data-data yang sudah dirilis tersebut memiliki kategorisasi tertentu khususnya pada lokasi-lokasi yang dianggap rentan dengan jaringan radikal terorisme. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah pernah dilakukan survei di daerah yang minoritas Muslim dan mayoritas Kristen. Ini yang menjadi *standing point* penelitian ini di mana lokasi penelitian ditujukan pada daerah atau wilayah yang mayoritas Kristen, yakni Tomohon. Seperti yang sudah disebutkan di latar belakang, Tomohon adalah salah satu kota yang

secara kultural dan struktural didominasi oleh orang-orang Kristen Gereja Masehi Injil di Minahasa (GMIM). Ketika terjadi penguatan penyebaran paham radikal-terorisme yang banyak ditunjukkan oleh sebagian umat Islam Indonesia, pertanyaan yang muncul adalah apa yang dipersepsikan oleh umat Kristiani Tomohon mengenai hal ini. Pertanyaan lainnya, apakah umat Islam yang ada di Tomohon mengalami stigmatisasi dan diskriminasi dari kalangan mayoritas serta mencari tahu apa respon umat Islam Tomohon. Mereka akan melakukan resistansi ataukah beradaptasi.

Penelitian ini ingin menunjukkan gambaran kenyataan situasi nasional tersebut dalam memengaruhi kebijakan-kebijakan di sekolah di Kota Tomohon, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Radikal dalam terminologi politik mengacu pada persoalan doktrin-doktrin anti-*status quo*.<sup>8</sup> Bagi wilayah-wilayah mayoritas Islam masih dapat ditemukan para pendukung paham radikalisme khususnya yang mendambakan berdirinya *Khilafah Islamiyah*, meskipun tidak mendukung aksi teror atau kekerasan. Di Kota Tomohon akan sangat sulit menemukannya, hal ini karena ada dua hal. *Pertama*, selama ini gerakan radikalisme dan terorisme selalu dikaitkan dengan doktrin-doktrin agama Islam. *Kedua*, situasi di Tomohon, penduduk yang beragama Islam di Tomohon hanya 2.3%. Secara kuantitas akan memengaruhi umat Islam untuk tidak melakukan tindakan provokatif dan pasti akan cenderung asimilatif.

Maka dapat dikatakan, realitas yang bisa ditemukan di sekolah-sekolah di Tomohon bukanlah pemahaman radikalisme dan terorisme tetapi punya peluang menemukan ekstremisme dan intoleransi. Ekstremisme dan intoleransi dominan bersumber dari fanatisme pada suatu agama, junjungan (idola) ataupun kesukuan. Fanatisme ini bisa membahayakan kultur sosial,

---

8 Leon Baradat menempatkan *radikal* dalam spektrum politik berlawanan dengan status quo, atau posisi yang saat ini berkuasa atau berlaku. Tuntutan kalangan yang menempati posisi radikal adalah kalangan yang menginginkan perubahan secara mengakar dan fundamental. Dalam konteks Indonesia saat ini, radikal merujuk pada kalangan yang ingin mengubah nilai dan sistem politik seperti Pancasila dan demokrasi untuk digantikan dengan formalisasi hukum Islam dalam sistem khilafah Islamiyah, yakni sistem pemerintahan universal yang berlandaskan kesamaan hukum dan sistemnya. Lihat Leon P. Baradat, *Political Ideologies: Their Origins and Impact* (Fifth Edition), New Jersey: Prentice Hall, 1994, hal. 16.

struktur sosial atau kemanusiaan tetapi tidak membahayakan fondasi Negara.<sup>9</sup> Sekolah-sekolah yang menjadi objek penelitian ini terdiri dari 2 sekolah negeri, 4 sekolah swasta yang berbasis yayasan keagamaan, dan 1 sekolah swasta yang berbasis non-agama. Dari sekolah-sekolah tersebut ditemukan siswa yang beragam latar belakang yakni SMAN 1, SMA Kristen 1, SMA Lokon, dan SMA Kosgoro. Sedangkan sisannya homogen yakni berlatar belakang Katolik dan Kristen.

Untuk sekolah yang heterogen, di dalamnya terdapat siswa yang beragama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Konghucu, dan Buddha. Untuk SMA Lokon, semua agama yang disebut tersebut ada. Sedangkan di SMAN 1, Kristen 1 dan SMA Kosgoro hanya ada Kristen, Katolik dan Islam. Seluruh informan dari 4 sekolah ini mengetahui bahwa sekolahnya memiliki siswa dan guru yang heterogen. Salah satu siswi muslim kelas XII SMA 1 Tomohon menceritakan, *“Di sini, saya bermain dengan yang lain (beda agama), biasa saja. Tapi kala waktu shalat (tiba) tentu saya akan berbaur dengan yang sesama muslim”*. Pernyataan senada juga dijelaskan oleh siswa Hindu kelas XII di SMA Lokon. Menurutnya,

*“Sejak awal saya di sini sudah dibiasakan memahami perbedaan, ada yang beragama Kristen, Katolik, Islam. Dan juga selain Minahasa, ada Ambon, Papua, Nusa Tenggara, macam-macam. Pas di kamar, teman-teman suka cerita daerah masing-masing, ibadah mereka juga beda-beda. Kalau yang Buddha kan kadang bakar dupa, saya jadi tau.”*

Akan tetapi hanya 1 sekolah yang memiliki kebijakan afirmatif terhadap kebutuhan siswanya dan terwujud dalam kegiatan OSIS, yakni SMAN 1 Tomohon. Di sekolah ini terdapat sub-bidang dibawah naungan Bidang I atau Bidang Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) yaitu Kerohanian Kristen (Rokris), Kerohanian Katolik (Rohat), dan Kerohanian Islam (Rohis). Tiga sub-bidang tersebut tidak secara tertulis tertera dalam struktur OSIS akan tetapi dari kegiatannya masing-masing memiliki program khusus. Berdasarkan informasi dari siswa kelas XII yang beragama Islam dan siswa kelas XI yang beragama Katolik, menyebut bahwa mereka saling tahu

---

9 Karlina Supelli, dkk., “Dari Kosmologi ke Dialog: Mengenal Batas Pengetahuan, Menentang Fanatisme”, dalam Fanatisme, Ekstremisme, dan Penyingkiran Ciri Antropologis Pengetahuan, *Jurnal KAWISTARA* Vol. 3 No. 2, 17 Agustus 2013, Hal. 117.

kegiatan masing-masing. Informan dari siswa Katolik kelas XI memberikan contoh kegiatan yang dilakukan oleh para siswa Muslim, yakni agenda buka puasa bersama. Sedangkan informan Muslim, siswa kelas XII juga memberikan contoh kegiatan khusus para siswa Katolik yaitu retreat.

Sementara kondisi yang berbeda terjadi di SMA Kosgoro, SMA Kristen 1 dan SMA Lokon. Tiga sekolah tersebut tidak memiliki kebijakan afirmatif pada kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler. Di SMA Kosgoro, siswa Muslim tidak diberikan kebutuhan mata pelajaran agama Islam. Hal ini karena di sekolah ini tidak memiliki guru agama Islam. Selain itu, dalam bentuk kegiatannya, OSIS di sekolah ini tidak ada sub-bidang atau kegiatan yang mengakomodir siswa muslim. Di SMA Kosgoro hanya ada pendidikan agama Kristen dan Katolik dan kegiatan OSIS Bidang Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang mencerminkan ritual kekristenan. Kondisi yang sama juga ada di SMA Kristen 1 dan SMA Lokon. Di SMA Kristen 1 terdapat satu siswa muslim, sedangkan di SMA Lokon beragam latar belakang agama yakni Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Hindu dan Konghucu. Di SMA Kristen 1 hanya ada mata pelajaran agama Kristen, sementara SMA Lokon hanya ada mata pelajaran agama Katolik. Kondisi yang sama juga terjadi di kegiatan siswanya.

SMAN 2 Tomohon, SMA Lentera Harapan dan MA Mardhatillah tidak memiliki kebijakan atau kegiatan khusus untuk mempererat kebinekaan. Hal ini karena di sekolah-sekolah tersebut siswanya homogen. Di MA Marhatillah semua siswanya beragama Islam. Sedangkan di SMAN 2 dan SMA Lentera Harapan hanya ada Katolik dan Kristen. Meskipun memiliki perbedaan tetapi dalam praktik kebijakan dan kegiatan siswanya cenderung sama. Di SMAN 2 masih ada pembedaan dalam kurikulum pelajaran agama Kristen dan Katolik tetapi untuk SMA Lentera Harapan hanya ada pelajaran agama Kristen.

## **2. Kuasa Negara yang Terlupakan**

Negara melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki tiga aturan yang terkait langsung dengan kegiatan siswa. Beberapa diantaranya adalah Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan,

Permendikbud No. 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler, dan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Tiga kebijakan tersebut dikeluarkan guna memastikan bagaimana pendidikan di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan memastikan pembinaan kegiatan-kegiatan siswa dalam wadah organisasi siswa intra sekolah (OSIS). Permendikbud No. 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler memastikan kegiatan kepanduan diterapkan di sekolah. Dan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti memastikan adanya budaya-budaya siswa yang positif tumbuh di lingkungan sekolah.

Sekolah-sekolah menengah atas di Kota Tomohon pada umumnya sudah menerapkan kebijakan yang pertama terkait pembinaan siswa. Materi-materi pembinaan dalam Permendiknas No. 39 Tahun 2008 diwujudkan dalam bentuk bidang-bidang dalam struktur OSIS. Penulis melihatnya sebagai perpaduan implementasi Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan dengan Permendikbud No. 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler. Dari tujuh sekolah yang menjadi objek penelitian, ada empat sekolah yang memiliki kesamaan. Mereka menerjemahkan Permendiknas tentang Pembinaan Kesiswaan dalam bidang-bidang di dalam OSIS. Fungsi pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah dengan menugaskan guru-gurunya untuk menjadi pembina bidang-bidang di dalam OSIS. Sekolah-sekolah tersebut yaitu SMAN 1, SMAN 2, SMA Lokon St. Nikolaus, dan SMA Kristen 1 yang pada umumnya menerjemahkan Permendiknas No. 39 Tahun 2008 diinstitusionalisasikan di dalam OSIS. Sekolah-sekolah tersebut memiliki struktur bidang-bidang yang sama. Bab I Pasal (3) Poin (2) Permendiknas No. 39 Tahun 2008 menyebutkan ada 10 materi pembinaan kesiswaan yang harus diimplementasikan. Materi pembinaan kesiswaan tersebut meliputi:

- a. Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Budi pekerti luhur atau akhlak mulia
- c. Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela Negara
- d. Prestasi akademik, seni, dan/atau olahraga sesuai bakat dan minat

- e. Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural
- f. Kreatifitas, keterampilan, dan kewirausahaan
- g. Kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi
- h. Sastra dan budaya
- i. Teknologi informasi dan komunikasi

Meski demikian, pengalaman pengelolaan dari empat sekolah tersebut berbeda-beda. Berdasarkan penjelasan dari Ketua OSIS SMAN 1, OSIS di sekolah ada sepuluh bidang: *Pertama*, Bidang Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bidang ini biasanya fokus pada kegiatan kerohanian dan anggota bidang ini ada yang agama Islam, Katolik dan Kristen. Mereka mengkoordinir setiap siswa yang seagama untuk melakukan ibadah pagi hari sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Sekretaris bidang (sekbid) membuat jadwal untuk ibadah beserta petugasnya. Jabatan Sekbid biasanya diisi oleh perwakilan dari masing-masing agama. Program lainnya adalah membuat buku lagu kerohanian yang bekerjasama dengan guru agama. *Kedua*, Bidang Budi Pekerti Luhur. Bidang ini yang mengusulkan dan menertibkan aturan-aturan sekolah. Mereka menitikberatkan pada penumbuhan tatakrama dan sopan santun para siswa. Program yang paling menonjol adalah operasi semut, program senyum-sapa-salam di setiap pagi. Pengurus OSIS bidang ini membuat jadwal piket. Petugas piket berjaga di depan gerbang menyambut para siswa SMAN 1 dan tugasnya bergantian. Selain melakukan 3S (senyum-sapa-salam), petugas piket juga melakukan penertiban seragam. Contohnya menggunakan atribut sekolah; perempuan memakai rok yang panjangnya sampai lutut, kalau laki-laki ukuran celana yang bagian kakinya 18 cm; sepatu siswa harus berwarna hitam; dan rambut perempuan harus diikat. Di setiap harinya selalu ada yang melanggar. Penertiban dilakukan oleh OSIS dan bekerjasama dengan guru. Bagi yang melanggar akan mendapatkan hukuman. Misalkan jika ada yang tidak memakai sepatu warna hitam, maka sepatunya akan diambil atau ditahan sampai jam pelajaran habis sehingga bisa

diambil kalau sudah pulang. Ada juga siswa yang terlambat datang ke sekolah akan mendapatkan hukuman untuk membersihkan tempat-tempat tertentu. Di setiap bulannya ada pemeriksaan ponsel, jika ditemukan konten-konten yang tidak sesuai dengan umur, maka biasanya pengurus OSIS bekerjasama dengan guru untuk memberikan tindakan menghapus konten tersebut.

*Ketiga*, Cinta Tanah Air dan Bela Negara. Kegiatan utama bidang ini adalah mengatur jadwal petugas upacara dan melatih petugas upacara tiap kelas di hari kamis dan jumat. Mereka juga turut membantu Bidang I dalam pengaturan barisan saat kegiatan ibadah di setiap pagi.

*Keempat*, Prestasi Akademik. Biasanya identik dengan berbagai macam lomba baik akademik maupun non akademik dan itu bekerjasama dengan guru. Misalkan ada undangan masuk ke sekolah kemudian ke OSIS. Pengurus inti OSIS akan konsultasi dengan Sekbid IV untuk mencari siapa yang bisa ikut lomba. Beberapa kegiatan lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang pernah diikuti oleh SMAN 1 Tomohon adalah di bidang matematika, kimia, geografi, biologi, astronomi, ekonomi, fisika dan komputer.

*Kelima*, Cinta Lingkungan. Bidang ini yang mengatur dan memastikan lingkungan sekolah senantiasa bersih dan rapi. Ada aturan yang paling menonjol di sekolah ini yaitu budaya pemasangan bendera hijau, kuning dan hitam. Aturan ini tertulis dan sudah menjadi budaya turun temurun dari pengurus-pengurus sebelumnya. Setiap hari pengurus di bidang ini akan keliling kelas untuk menilai kelas. Setiap kelas biasanya memiliki taman. Jika tamannya kotor dan kelasnya kotor maka kelas tersebut akan diberi pasang di atas pintu masuk kelas dengan bendera hitam. Sementara untuk kelas yang bersih dan tampak rapi tetapi tamannya kotor maka akan dipasang bendera warna kuning. Kelas yang telah terpasang dua kali bendera kuning maka hari dimana mereka melanggar lagi akan dipasang bendera warna hitam. Kelas yang bersih dan rapi akan dipasang warna hijau. Program ini baru berjalan selama tiga tahun dan selama ini biasanya paling banyak warna kuning dan belum pernah ada yang warna hitam. Hampir setiap hari ada saja kelas yang terpasang warna kuning. Bidang ini juga mengatur jadwal kebersihan toilet yang bergilir dari kelas ke kelas.

*Keenam*, Olah Raga. Selama ini olah raga yang paling banyak diminati siswa SMAN 1 adalah basket, bola voli, futsal, bulutangkis dan karate. Kegiatan latihan selalu diselenggarakan di setiap hari sabtu karena jadwal kegiatan belajar mengajar (KBM) libur.

*Ketujuh*, Kewirausahaan. Bidang kewirausahaan membentuk sebuah usaha seperti stiker SMANTO (SMAN 1 Tomohon). Selain itu ada produk pangan seperti kue. Bidang ini menjajakan produknya kepada para siswa langsung yang ada di sekoah dan menitipkannya di kantin sekolah.

*Kedelapan*, Kesenian. Ada kegiatan mengenal dan mempelajari alat-alat musik daerah dan tarian daerah seperti kulintang, tarian maengket dan tarian kreasi populer. Ada juga yang membentuk kelompok-keompok seperti tarian katrili, *marching band*, *group band*, *press band* (alat yang di tiup), tarian kabasaran<sup>10</sup> dan musikalisasi puisi.

*Kesembilan*, kemampuan berbahasa Inggris. Bidang ini yang mengkoordinir klub-klub belajar. Di setiap tahunnya ada kompetisi intra sekolah, dimana salah satunya Debat Bahasa Inggris antar kelas.

*Kesepuluh*, Teknologi Informasi dan Komputer (TIK). Bidang ini menjalankan fungsi dokumentasi kegiatan OSIS atau kegiatan lainnya dan juga mempublikasikan di media sosial seperti instagram, facebook dan twitter OSIS. Selain itu juga Sekbid ini bekerjasama dengan Sekbid yang lain untuk meminta bantuan dan pembinaan pada guru TIK.

Pola pembinaan siswa melalui OSIS di SMAN 1 Tomohon tidak jauh berbeda dengan SMAN Kristen 1 dan SMA Lokon St. Nikolaus, begitu juga dengan kegiatan ekstrakurikuler. Penulis melihat ketiganya memiliki keunggulan dalam manajemen kegiatan dan pembinaan. Ketiga sekolah ini selalu bersaing dalam kompetisi kegiatan siswa baik level daerah, nasional ataupun internasional. Prestasi siswa-siswa dari tiga sekolah ini juga sangat kompetitif. Salah satu siswi dari SMAN 1 Tomohon tahun pada 2016 pernah menjadi petugas Paskibraka di HUT RI di Istana Merdeka. Begitu juga dengan SMA Kristen 1 pada tahun 2015, salah satu siswanya juga ada

---

10 Tarian Kabasaran adalah tarian adat etnik Minahasa. Menurut salah satu tokoh kebudayaan dari Minahasa, Jessy Wenas, Tarian Kabasaran adalah tarian adat untuk perang atau tarian untuk mengawal salah satu tokoh adat penting di Minahasa. Lihat <http://www.sulutprov.go.id/Tari-Kabasaran.html>, diakses pada 30 Oktobe r 2017.

yang menjadi petugas Paskibraka di momen dan tempat yang sama. Kedua sekolah ini sama-sama memiliki siswa yang mencapai ribuan. SMA Lokon tidak kalah dengan SMAN 1 Tomohon dan SMA Kristen 1 terutama dalam jaringan potensi sekolah. Di sekolah ini meski siswanya hanya ada 240-an tetapi manajemennya sangat profesional dan ditunjang dengan fasilitas sekolah yang paling lengkap. Kegiatan pembinaan juga sama yakni dikelola dengan manajemen yang profesional.

Benang merah ketiga sekolah tersebut adalah memastikan pembinaan siswa dibantu oleh guru-guru di masing-masing mata pelajaran yang terkait dengan bidang-bidang yang ada di OSIS. Oleh sebab itu, guru-guru di tiga sekolah ini sangat dituntut kemampuan dan profesionalitasnya. Tiga sekolah ini juga tidak segan-segan membayar atlet, seniman atau dosen dari luar untuk membantu pembinaan siswa terutama saat menjelang kompetisi. Dalam catatan penulis, sekolah yang paling tinggi bayarannya adalah SMA Lokon. Di sekolah ini, guru bahasa asing seperti Mandarin, Inggris dan Jerman berasal dari Australia dan China. Begitu juga dengan guru Geologi yang berasal dari Jepang.

Kondisi berbeda ditemukan di SMAN 2 Tomohon. Bidang-bidang dalam OSIS di sekolah ini sama dengan di SMAN 1, SMA Kristen 1 dan SMA Lokon. Dari sepuluh bidang yang ada, hanya ada empat bidang yang masih berjalan yakni Bidang Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Bidang I), Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Bidang II), Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi (Bidang VII), dan Persepsi, Apresiasi dan Kreasi Seni (Bidang V). Jika dilihat dari jumlah siswanya, sekolah ini tidak jauh berbeda dengan di SMA Lokon. Waka Kesiswaan SMAN 2 berargumen bahwa kondisi pembinaan kesiswaan belum optimal karena siswanya yang kurang aktif. Akan tetapi dari catatan penulis, kemunduran pembinaan kesiswaan ini karena manajemen pembinaan yang kurang terkonsolidasi. Kepala Sekolah SMAN 2 baru diangkat dalam 5 bulan terakhir. Beliau sebelumnya adalah guru di SMAN 1 Tomohon. Beliau menerangkan bahwa model pembinaan kesiswaan di SMAN 2 akan direformasi. Pola yang akan dikembangkan adalah pola

yang sudah diterapkan di SMAN 1, yakni penguatan guru-guru yang akan membantu pembinaan di bidang-bidang di dalam struktur OSIS.

Pembinaan mengenai demokrasi dan pendidikan politik, keempat sekolah tersebut memiliki kesamaan. Pemilihan ketua OSIS dilakukan secara demokratis. Para siswa diperkenankan untuk mengajukan diri menjadi kandidat pengurus OSIS. Ada yang dibatasi, seperti di SMAN 1, yang satu kelas hanya 5 siswa, dan ada yang dibebaskan dan menyesuaikan batasan jabatan seperti di SMA Kristen 1, SMA Lokon dan SMAN 2. Ada aturan bagi para pendaftar tersebut yakni wajib mengikuti latihan kepemimpinan. Masing-masing sekolah memiliki jumlah hari dan model pelatihan yang berbeda-beda. SMA Kristen 1 mengadakan pelatihan kepemimpinan satu minggu penuh dan hanya di siang hari. Sedangkan di SMA Lokon diselenggarakan selama 3 hari dan menginap 2 malam. Sementara SMAN 1 dan SMAN 2 dilakukan hanya pada hari Sabtu dalam tempo 1 bulan. Meskipun berbeda-beda tetapi keempat sekolah tersebut sama-sama menggunakan kegiatan pelatihan kepemimpinan sebagai momen monitoring calon pengurus potensial. Para peserta pelatihan akan dinilai oleh petugas pemilihan (yang kebanyakan berasal dari pengurus OSIS yang akan diganti dan duduk di kelas 3) dan pihak sekolah khususnya Waka Kesiswaan. Peserta akan terseleksi hingga menjadi dua atau tiga kandidat ketua. Dari sinilah mulai masuk ke proses kampanye dan pemilihan umum.

Sedangkan tiga sekolah lainnya, yakni Kosgoro, Lentera Harapan dan MA Mardhatillah belum memenuhi kriteria dari Permendiknas tersebut. Kepala sekolah SMA Kosgoro menjelaskan bahwa penerjemahan Permendikbud di sekolah ini mengalami pasang surut. Setelah disosialisasinya Permendikbud, SMA Kosgoro menerjemahkannya menjadi 10 bidang-bidang di dalam struktur OSIS. Karena saat ini jumlah siswanya terbatas, sehingga 10 bidang tersebut mengalami penyusutan atau penggabungan dengan bidang lainnya. Salah satu contohnya adalah bidang demokrasi dan pendidikan politik yang dimasukkan dalam Bidang Bela Negara.

Sementara Kepala sekolah MA Mardhatillah memiliki argumentasi lain. Organisasi kesiswaan di sekolah ini disebut Dewan Santri. Istilah ini digunakan

karena MA Mardhatillah bagian dari Pondok Pesantren Hidayatullah Kinilow. Bidang-bidang dalam Dewan Santri berbeda dengan OSIS pada umumnya. Dalam struktur Dewan Santri hanya ada Bidang Kebersihan, Bidang Keamanan, dan Bidang Keindahan. Tiga bidang ini menyesuaikan siswanya yang berjumlah 18 orang dari kelas 1 sampai 3 dan semuanya perempuan. Dewan Santri, menurut Kepala Sekolah MA Mardhatillah, Ust. Taufiq sebagai bentuk lain dari OSIS. Untuk urusan administrasi dengan dinas-dinas terkait, sekolah ini tidak menggunakan Dewan Santri tetapi OSIS. Penerjemahan Permendiknas mengenai pembinaan kesiswaan akan terintegrasi dengan sistem pesantren. Sejauh ini, Dewan Santri memiliki kegiatan yang mengangkat minat dan bakat siswa seperti pencak silat, membuat puisi, dan latihan drama. Kegiatan-kegiatan ini disesuaikan dengan siswa yang semuanya adalah perempuan.

Pemandangan berbeda ditemukan di MA Mardhatillah dalam mengimplementasikan Permendikbud No. 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler. Para siswa akan diberi ruang untuk kegiatan ekskul setelah isya atau sekitar jam 7 malam. Hal ini karena sekolah ini menerapkan pendidikan holistik-integratif yang memadukan sekolah dan asrama.<sup>11</sup> Kegiatan belajar mengajar (KBM) hanya sampai jam 1 siang, setelah itu mereka akan ke masjid untuk mengikuti pengajian atau kajian keIslaman yang bersumber dari *kitab kuning* atau kitab-kitab kajian Islam klasik. Selain pola pendidikan pesantren, sekolah ini tidak meniadakan kegiatan ekskul seperti yang diamanatkan Permendikbud seperti kepanduan (Pramuka), Paskibaraka yang langsung dilatih oleh tentara, tenis meja, dan pencak silat Setia Hati Terate. Pencak silat ini belum terselenggara secara maksimal karena terkendala Pembina yang sudah pindah tugas 4 bulan lalu. Ada juga kegiatan-kegiatan ekskul yang dilakukan di malam hari seperti latihan pidato (*muhadharah*) yang rutin diselenggarakan setiap selesai sholat magrib, latihan seni kaligrafi

---

11 Konsep pendidikan holistik-integratif merujuk pada pola pendidikan dan pelayanan yang tidak hanya tidak hanya dalam satu bidang pendidikan saja, akan tetapi pelayanan yang mencakup kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi, pola pengasuhan dan perlindungan siswa. Konsep ini pada dasarnya merujuk pada Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Istilah ini muncul pada wawancara dengan Kepala Sekolah MA Mardhatillah, konsep ini tercermin dalam aturan, kegiatan dan fasilitas dari pondok pesantren Hidayatullah yang melayani siswa (santri) tidak hanya pada pendidikannya tetapi juga kehidupan sehari-hari siswa. Hasil wawancara dengan Kepala MA Mardhatillah pada 3 Oktober 2017.

dan mading, drama (*teater*), serta cipta dan baca puisi. Kegiatan penunjang lainnya adalah kegiatan menumbuhkan entrepreneurship seperti kegiatan tatabusana, taman bunga dan kebun sayuran.

Meskipun dengan fasilitas yang tidak mendukung serta kurangnya pembina dalam mengembangkan minat dan bakat para siswi. Hal ini tidak mengurangi prestasi yang diraih oleh para siswa MA Mardhatillah. Ini dibuktikan dengan prestasi yang diraih oleh Yuli (Ketua Dewan Santri) yang memperoleh Juara 3 Olimpiade Ekonomi Tingkat Kota dan Ayu (siswi kelas 2 /non-OSIS) yang juga memperoleh Juara 3 Lomba Baca Puisi Tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Kepala Sekolah MA Mardhatillah juga mengatakan bahwa para siswa sebenarnya memiliki potensi yang cukup, hanya saja mereka masih malu dalam berinteraksi dengan para guru atau orang-orang yang luar, sehingga bakat yang mereka miliki terpendam dan belum tergali. Ini juga tidak terlepas dari kurangnya pembinaan para siswa.

Lain halnya dengan SMA Lentera Harapan. Sekolah ini juga belum menerapkan Permendiknas mengenai pembinaan kesiswaan secara eksplisit di dalam struktur OSIS. Akan tetapi beberapa kebijakan sekolah sudah mengarah pada penanaman dan pengalaman pendidikan politik dan demokrasi kepada siswanya. Saat ini OSIS dipilih berdasarkan rekomendasi dari wali kelas, waka kesiswaan, guru bimbingan konseling dan kepala sekolah. Mereka menjadi pengurus OSIS bergiliran. Kepala Sekolah SMA Lentera Harapan menjelaskan kondisi kesiswaan saat ini masih satu angkatan. Kondisi ini memengaruhi jumlah bidang yang ada dalam struktur OSIS dan kesiapan siswanya. Materi-materi pembinaan sudah masuk dalam struktur tetapi ada beberapa yang masih dalam *pilot project* seperti materi demokrasi, toleransi sosial dan pendidikan politik. Sukses kepemimpinan untuk OSIS berikutnya akan diterapkan mekanisme demokrasi yang mana siswa bebas mengajukan diri dan bersedia mengikuti pelatihan kepemimpinan. Rangkaian agendanya dimulai dari prose latihan kepemimpinan yang akan dilakukan di bulan desember menjelang libur natal dan tahun baru.

Sementara untuk kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di sekolah ini belum dijalankan. Di sekolah-sekolah lainnya, para siswa menggunakan seragam

pramuka dan memasukan *Dasa Darma* dalam kurikulum pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama dan dalam aturan-aturan sekolah. Simbol-simbol kepanduan tidak ditemukan ada di SMA Lentera Harapan. Setiap hari jumat mereka dibebaskan memakai pakaian bukan seragam asal masih sopan. Khusus setiap jumat, siswa memiliki kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah, beribadah di *chapel*,<sup>12</sup> dan melakukan konseling siswa dan guru. Setelah itu para siswa dibebaskan untuk mengikuti latihan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing seperti olah raga, paduan suara dan desain grafis.

Kebijakan yang terakhir adalah Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan Budi Pekerti. Semua sekolah menyatakan bahwa mereka sudah membuat aturan-aturan dan budaya menumbuhkan budi pekerti. SMAN 1, SMAN 2 dan SMA Kosgoro memiliki kesamaan. Mereka menerjemahkan penumbuhan budi pekerti melalui aturan dan kegiatan-kegiatan sekolah seperti apel ibadah di setiap pagi dan sore hari dan membudayakan literasi di pagi hari setelah apel dan sebelum masuk jam pelajaran. Hanya di SMAN 1 saja yang apel ibadahnya dipisah antara siswa muslim dengan siswa Kristen dan Katolik. Untuk yang muslim, akan dikoordinir oleh Sekbid Bidang I yang beragama muslim dan dibawah pembinaan guru agama Islam. Sementara yang Kristen dan katolik digabung jadi satu dan dikoordinir oleh Sekbid I yang beragama Kristen dan Katolik dan dibawah pembinaan guru agama Kristen dan Katolik. Tugas guru agama tersebut selain dalam apel ibadah juga menumbuhkan budi pekerti dan wawasan ajaran agama masing-masing saat pelajaran agama. Sekolah ini memiliki kebijakan untuk membebaskan siswanya memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan dari pusat. Untuk siswi muslim boleh berjilbab dan memakai baju dan rok yang panjang. Sedangkan untuk siswi yang beragama Kristen dan Katolik harus memakai rok yang panjangnya minimal sampai ke lutut. Sedangkan di SMAN 2 dan SMA Kosgoro hanya memberlakukan satu apel ibadah saja yakni dengan cara Kristen. Aturan lain yang terkait dengan penumbuhan budi pekerti baik di

---

12 *Chapel* atau kapel adalah gereja kecil di asrama biara. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 3 Novemebr 2017.

SMAN 1, SMAN 2 ataupun SMA Kosgoro adalah membudayakan 3S atau senyum, sapa dan salam. Kegiatan ini dilakukan sepanjang hari.

SMA Kristen 1 pada dasarnya sama dengan tiga sekolah di atas. Penumbuhan budi pekerti dilakukan mulai dari aturan, kegiatan dan pelajaran agama. Namun SMA Kristen 1 memiliki program pembinaan siswa sampai ke gereja. Sebagaimana informasi sebelumnya bahwa SMA Kristen 1 ini dibawah naungan GMIM sehingga sekolah ini terkait erat dengan gereja. Siswa yang Kristen saat ibadah hari minggu akan mendapatkan pengawasan dari pihak sekolah. Pengurus OSIS Bidang I akan mendata siswa dan gerejanya. Di sana mereka akan mencatat kehadiran siswanya. Selain itu, sekolah ini seringkali mendapatkan tugas untuk memimpin ibadah di gereja-gereja GMIM yang ada di Tomohon. Begitu juga paduan suaranya yang sering kali diundang oleh gereja untuk menyanyikan lagu-lagu rohani di sana. Waka Kesiswaan SMA Kristen 1 menyebut hal ini adalah bagian dari pembinaan menumbuhkan budi pekerti yang melayani Tuhan.

Ada tiga sekolah yang memiliki kekhasan masing-masing dalam menerjemahkan penumbuhan budi pekerti, yakni MA Mardhatillah, SMA Lokon dan SMA Lentera Harapan. MA Mardhatillah ingin menjadi kampus miniatur peradaban Islam. Tujuan sekolah ini sebagaimana cita-cita Ormas Hidayatullah adalah untuk menggerakkan dakwah dan rekrutmen anggota baru Hidayatullah, menyelenggarakan pendidikan integral berbasis Tauhid, menyelenggarakan pasar dan ekonomi keumatan yang berdaya saing, memberdayakan kaum *dhuafa* dan *mustadh'afin*, dan mengembangkan lingkungan kampus yang alami, ilmiah dan Islamiah. Sistem pendidikan yang diterapkan adalah sistem pesantren. Sekolah ini bagian dari pendidikan di Pesantren Hidayatullah. Budi pekerti, menurut Kepala Sekolah MA Mardhatillah harus diterapkan sejak anak usia dini. Di pesantren ini penumbuhan budi pekerti dimulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Budi pekerti yang dimaksud di sekolah ini adalah budi pekerti yang Islami. Para siswa, yang kemudian disebut santri diajarkan dan disadarkan bahwa ia tidak hanya sebagai makhluk hidup tetapi juga sebagai makhluk Allah swt.

SMA Lokon St. Nikolaus menerapkan sistem *boarding school*. Sekolah ini mengusung visi pendidikan berbasis Kehidupan. Kurikulum ini memadukan antara kurikulum nasional (K-13) dengan pendidikan karakter. Menurut Waka Kesiswaan SMA Lokon, proses hidup bersama menjadi bagian penting dari pembentukan karakter siswa, sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia. Pada dasarnya pendidikan di sekolah bertujuan untuk mengembangkan aspek-aspek kemanusiaan peserta didik secara utuh, yang meliputi aspek kedalaman spiritual, aspek perilaku, aspek ilmu pengetahuan dan intelektual, serta aspek keterampilan. Di era digital saat ini, tuntutan akan ketersediaan sumber daya manusia semakin tinggi.

Seperti halnya dengan MA Mardhatillah, SMA Lokon juga basis kurikulum baik di sekolah ataupun di asramanya adalah nilai-nilai dan karakter dari salah satu agama. Penumbuhan karakter dan budi pekerti siswa dimulai dari kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Siswa di sekolah ini beragam agama dan suku. Meskipun ia Islam, Kristen, Hindu, Buddha ataupun Konghucu tetap yang ditekankan adalah budi pekerti yang disari dari ajaran Katolik. Dalam konteks pembinaan siswa mereka diajarkan membaur satu sama lain. Pembauran tersebut selain di kelas juga di dalam pembagian kamar. Sekolah ini sangat menjunjung tinggi kedisiplinan. Para siswa dibudayakan untuk antri, tertib, disiplin, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Seperti tertib pada saat siswa mengantri di kantin, tidak keluar atas izin guru atau pembina asrama, dan interaksi dengan teman sekamar dan sekelas yang berbeda latar belakang. Selain dalam aturan, penumbuhan budi pekerti juga tertanam dalam mata pelajaran khususnya di pelajaran agama Katolik dan kegiatan apel ibadah.

Sekolah lain yang memiliki kekhasan adalah SMA Lentera Harapan. Sekolah ini seperti MA Mardhatillah dan SMA Lokon yang memiliki kurikulum berbasis salah satu agama. Visi sekolah ini yaitu *True Knowledge, Faith in Christ, and Godly Character*. Sekolah menekankan bahwa mereka bukanlah pendidik utama. Pendidik utama sesungguhnya adalah orang tua atau keluarganya. Berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya, sekolah ini selain mendidik siswa juga menyadarkan kepada orang tua mengenai betapa

pentingnya pendidikan di rumah (keluarga). Seperti yang dikatakan oleh Kepala Sekolah SMA Lentera harapan, siswa yang bermasalah di sekolah adalah siswa yang memiliki masalah di rumahnya. Penumbuhan karakter dan budi pekerti siswa adalah menjadi manusia yang melayani Tuhan. Mereka mendidik siswa dengan aturan, kurikulum pelajaran, ekstrakurikuler dan pembinaan iman (konseling).

### 3. Mereka yang Rentan di Tengah yang Bertahan

Pada sub-bab sebelumnya sudah ditegaskan bahwa dalam penelitian di Kota Tomohon tidak ditemukan adanya gerakan yang mengarah pada upaya radikalisme ataupun terorisme, yang mungkin ada adalah tindakan intoleransi. Realitas di sekolah-sekolah di wilayah yang mayoritas menunjukkan adanya upaya infiltrasi gerakan radikalisme dan terorisme masuk di ranah siswa. Mereka masuk ke kegiatan-kegiatan kerohanian seperti majelis-majelis, pengajaran guru-guru agama ataupun visi dari kepala sekolah. Banyak riset menganulir adanya doktrin radikalisme dan terorisme di kegiatan dan pengajaran yang didominasi kalangan muslim. Hal ini bukan berarti paham ini hanya ada di kalangan muslim.

Dalam Milis Dikusi yang diselenggarakan oleh *Minahasa Raya Network Community* menyebutkan, jika pemaknaan radikalisme ini merujuk pada upaya makar atau perjuangan menggantikan Pancasila dan NKRI tentu belum ditemukan adanya gerakan ini di Indonesia bagian manapun. Akan tetapi jika radikalisme dimaknai dari pendekatan sosiologi agama, tentu akan ditemukan adanya radikalisme wacana di kalangan Kristen. Inti dari radikalisme wacana adalah terdapat pemahaman, sikap intoleran tetapi belum muncul dalam bentuk perilaku.<sup>13</sup> Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu pendeta GMIM, Ruth Wangkai (Ketua Asosiasi Perempuan Berpendidikan Teologi Indonesia/PERUTI) dalam diskusi *Mawale Movement*, diskusi yang diikuti oleh peneliti di Tomohon. Menurutnya, di Tomohon ada kalangan radikal Kristen,<sup>14</sup>

---

13 Lihat makalah Dr. Ioanes Rahmat, *Radikalisme Kristen di Indonesia, Adakah?*, yang didiskusikan di Minahasa Raya Network Community dan diposting pada tahun 2011 oleh Nina Nayoan di <http://info-minahasa.weebly.com/uploads>, diakses pada 2 November 2017.

14 Peneliti mengikuti diskusi *Kajian Mawale Movement* pada 7 Oktober 2017 pukul 17.00 WITA di Kediaman Pdt. Ruth Wangkai. Turut hadir dalam diskusi ini, Prof Olaf Schumman, teolog Indonesianis Jerman sekaligus dosen tamu kajian Islamologi di Universitas Kristen Tomohon Indonesia (UKIT).

*“Di Tomohon juga ada kalangan Kristen radikal. Saya tidak bisa sebutkan mereka, tapi mereka ada, nyata. Mereka suka menyampaikan ketidaksetujuannya dengan Waruga (kuburan batu kas etnik Minahasa). Keberadaan mereka sudah diketahui oleh orang-orang GMIM. Kalau gerakan infiltrasi ke sekolah, saya belum pernah mendengar laporan.”<sup>15</sup>*

Peneliti mencoba mengonfirmasi kabar tersebut saat mewawancarai para siswa di 7 sekolah yang menjadi sampel penelitian. Masing-masing sekolah memiliki kondisi yang berbeda. Di SMA Lokon dan SMA Kristen 1 tidak memiliki kebijakan afirmatif. Jika melihat siswanya yang beragam latar belakang, sekolah ini hanya sampai pada penerimaan perbedaan. Kondisi yang sama juga terjadi di SMAN 1 Tomohon. Sebagai sekolah yang bertatus negeri, sekolah ini pada dasarnya sudah memiliki kebijakan afirmatif. Contoh konkretnya adalah diterima dan diakui kegiatan-kegiatan siswa yang terkait dengan kebutuhan siswa Muslim dan Katolik. Setiap kegiatan siswa Muslim dan Katolik, Kepala Sekolah SMAN 1 selalu hadir.<sup>16</sup> Ada juga bentuk kebijakan dispensasi waktu bagi siswa muslim untuk shalat dzuhur karena meninggalkan kelas. Mereka yang meninggalkan kelas dan tidak mengikuti beberapa menit jam pelajaran, tidak mendapatkan skorsing atau pengurangan nilai siswa. Akan tetapi dalam pemberian fasilitas, sekolah ini masih belum menunjukkan adanya kebijakan afirmasi yang utuh. Contohnya adalah mushola yang tidak ada dalam lingkungan sekolah ini. Bagi sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Dr. Azr Wenas GMIM dan Yayasan Lokon tidak menyediakan fasilitas mushola karena alasan sekolah tersebut milik swasta dan berbasis agama Kristen dan Katolik. Berbeda dengan SMAN 1 Tomohon yang jelas dimiliki negara dan sudah seharusnya menyediakan fasilitas semua agama. Kepala Sekolah SMAN 1 berargumen bahwa selama ini siswa muslim bisa pergi ke masjid terdekat (sekitar 1 kilometer dari sekolah) untuk shalat Jumat. Untuk shalat dzuhur, siswa masih shalat di perpustakaan. Sekolah ini sudah berusia 72 tahun dan selalu ada siswa muslim di setiap angkatan tetapi masih belum memiliki mushola. Kegiatan keagamaan siswa di sekolah-sekolah ini

---

15 Pernyataan ini disampaikan kepada peneliti pada pertemuan di kajian tanggal 7 Oktober di kediamannya dan kunjungan kedua pada 8 Oktober 2017 di kediaman Ketua Mawale Movement yakni Rikson Karundeng.

16 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMAN 1 Tomohon dan dikonfirmasi oleh pernyataan Guru Agama Islam dan Guru Agama Katolik di SMAN 1 Tomohon pada 19 Oktober 2017.

hanya sebatas apel ibadah pagi, pembacaan kitab suci dan agenda peringatan hari-hari besar keagamaan semata. Agenda-agenda keagamaan lainnya diserahkan kepada masing-masing siswa dengan gerejanya dan masjidnya.

Kondisi yang lain tergambar di MA Mardhatillah dan SMA Kosgoro. Di MA Mardhatillah, peneliti menggali mengenai pemahaman para santri soal fenomena-fenomena radikalisme baik dalam skala lokal ataupun nasional. Di masing-masing sekolah terpampang ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang *kafir* dan mereka menyadari bahwa mereka berada di wilayah mayoritas non-muslim. Hubungan komunikasi dengan non-muslim baik dengan siswa di sekolah lain ataupun tetangga sekitar, mereka membatasi diri. Hal ini karena ada batas-batas toleransi yang terkadang non-muslim tidak memahami. Salah satu contohnya adalah batasan berkomunikasi/bercengkrama dengan laki-laki kecuali ada *mahrom*-nya.<sup>17</sup>

Sementara di sekolah SMA Kosgoro, juga menarik untuk diketahui. Lokasinya yang sangat dekat dengan Kampung Jawa, kelurahan yang dihuni oleh masyarakat Muslim Tomohon, sudah sewajarnya jika ada kebijakan afirmasi. Ada 11 siswa muslim yang sekolah di SMA Kosgoro. Akan tetapi sampai saat ini, SMA Kosgoro tidak memiliki guru agama Islam. Kepala Sekolah SMA Kosgoro saat itu beralasan,

*“Selama ini kami punya siswa muslim, selama kami belum mendapatkan guru agama, mereka belajar agama di Masjid Kampung Jawa (Masjid Nurul Iman). Kami sudah melayangkan surat ke Kemenag (Tomohon), masih belum direspon. Dulu kami ada bu Armi, beliau ngajar di SMAN 1, katanya jadwal di sana padat, beliau tidak sempat ngajar di sini.”*

Sedangkan untuk SMA Lentera Harapan dan SMAN 2 Tomohon tidak ada kebijakan atau kondisi khusus. Siswanya yang homogen cenderung tidak ada tanda-tanda radikalisme masuk ke lingkungan sekolah. SMA Lentera Harapan menggunakan prosedur dan kontrol dari Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Mekanismenya sangat ketat sehingga kecil kemungkinan adanya radikalisme di sekolah ini. Sementara di SMAN 2 Tomohon, guru, pembina dan siswanya cair dan hanya dikontrol oleh pemerintah. Kepala Sekolah dan guru agama Katolik di sekolah ini, sebelumnya bertugas di SMAN 1

---

17 Wawancara dengan Kepala Sekolah MA Mardhatillah pada 3 Oktober 2017.

Tomohon. Guru Agama Katolik SMAN 2 menceritakan, buku-buku yang diajarkan kebanyakan terbitan UKSW (Universitas Kristen Setya Wacana). Jika hal yang menjadi perhatian para pendeta GMIM, maka yang paling potensial adalah SMAN 2 Tomohon. Lokasinya yang berada jauh dari pusat kota, dikelilingi masyarakat yang homogen (umat Kristiani dan sub-etnik Tombulu) dan mekanisme kontrol yang paling longgar dibandingkan sekolah lainnya yang berada di bawah pengawasan yayasan, pemerintah dan unsur-unsur masyarakat sipil.

#### **4. Internalisasi Nilai Kebinekaan: Transmisi dan Penerjemahan Nilai**

Fanatisme pada suatu ideologi, agama, panutan (idola) ataupun kelompok dan suku akan mendatangkan benih-benih radikalisme, intoleransi bahkan terorisme.<sup>18</sup> Upaya untuk menangkal fanatisme adalah kesadaran bahwa pluralitas dan kesetaraan adalah suatu keniscayaan. Narasi kebangsaan atau narasi keagamaan bisa digunakan untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun hal ini bukan satu-satunya cara melawan fanatisme yang berujung pada intoleransi, radikalisme atau terorisme, transmisi dan penerjemahan nilai-nilai kebinekaan perlu dilakukan.

Tujuh sekolah yang menjadi objek penelitian memiliki cara masing-masing dalam mentransmisi dan menerjemahkan nilai-nilai kebinekaan. Semua sekolah mengajarkan kepada siswanya tentang pluralitas suku, etnik, bahasa dan agama yang berbeda-beda melalui pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Selain itu, semua sekolah juga menerjemahkannya dalam bentuk kegiatan siswa di OSIS Bidang Kesenian dan Budaya. Meski demikian, tidak semua sekolah menerapkan dalam pembiasaan sehari-hari siswanya. Dari tujuh sekolah hanya ada tiga sekolah yang mentransformasi nilai-nilai kebinekaan dalam kehidupan keseharian siswa. *Pertama*, SMA Lokon. Sekolah ini menumbuhkan kebersamaan dalam perbedaan sejak pembagian kamar asrama. Pembina asrama SMA Lokon menjelaskan bahwa pembagian kamar dilakukan dengan sistem semi-acak. Di setiap kamar

---

18 Karlina Supelli, dkk., "Dari Kosmologi ke Dialog: Mengenal Batas Pengetahuan, Menentang Fanatisme", *Ibid.*

berisi 4 siswa, siswa baru akan diacak tanpa melihat ia berasal dari mana dan beragama apa, tetapi di setiap kamar sudah ada kakak kelas satu orang.<sup>19</sup>

Parasiswa yang menjadi informan turut mengonfirmasi, mereka mempelajari agama lain secara lebih dekat dengan teman sekamarnya. Contohnya adalah ritual agama Islam yang shalat harus 5 waktu dan puasa satu bulan (ramadhan), Konghucu yang setiap pagi membakar dupa, Hindu yang melakukan *nyepi*, Katolik yang melakukan *retret*, dan sebagainya. Selain keberagaman agama, di sekolah ini juga siswanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Marauke, Papua Barat, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan sebagainya. Mereka melihat langsung perbedaan warna kulit, bahasa, tradisi, dan adat teman-temannya. Poin penting dari pembagian kamar ini adalah pengetahuan pluralitas, penerimaan perbedaan, dan menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai.

Nilai kejujuran dan keterbukaan juga diajarkan kepada siswa mulai dari sistem *boarding School* ini. Ketua OSIS SMA Lokon menceritakan,

*“Di setiap kamar disediakan 2 lemari, satu lemari untuk dua orang. Jadi kalau 2 lemari, satu kamar untuk 4 orang. Kita boleh terkunci, kita tidak dikasih kunci, kita sedang dilatih untuk bersikap jujur dan saling percaya, menahan diri untuk tidak mencuri barang temannya.”*<sup>20</sup>

Pembina asrama turut menambahkan,

*“Upaya penumbuhan nilai-nilai ini tidak mudah. Pernah kejadian ada pencurian oleh siswa, tetapi pamong asrama (petugas yang ditunjuk oleh yayasan untuk menjadi pembina kamar) mampu menyelesaikan persoalan ini dengan cara kekeluargaan”.*

*Kedua*, SMA Lentera Harapan. Sekolah ini mengedepankan pendekatan partisipatif-konsultatif. Pembiasaan budaya tertib, jujur dan penumbuhan nilai-nilai kebinekaan dimulai dari pembentukan aturan sekolah, kurikulum dan apel ibadah. Yang berbeda dengan sekolah lainnya adalah dijadikannya hari jumat sebagai hari kekeluargaan. Semua kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di hari jumat. Dalam satu bulan, dua minggu sekali diadakan kerja bakti.

---

19 Hasil wawancara dengan pembina asrama SMA Lokon pada 17 Oktober 2017.

20 Hasil wawancara dengan ketua OSIS SMA Lokon pada 17 Oktober 2017.

Selain itu, ada kegiatan konseling atau biasa disebut ruang konseling. Ruang konseling adalah upaya sekolah untuk mendekatkan siswanya pada ajaran Kristus, dan yang menjadi konsultannya adalah pendeta yang ditunjuk oleh pihak Yayasan Pelita Harapan. Kegiatan ruang konseling ini diperuntukan tidak hanya untuk siswa tetapi juga untuk guru dan wali murid.

Jadwal konseling masing-masing level berbeda hari. Kegiatan konseling siswa dengan pendeta diadakan setelah ibadah jumat di kapel yang tersedia di lantai atas. Selain dengan pendeta, wali kelas juga kadang menjadi konsultan siswa. Jadwalnya bisa di setiap jam istirahat pas kegiatan belajar mengajar berlangsung. Untuk menjadi konsultan, wali murid harus mengikuti pembinaan spiritual dari pendeta. Wali murid akan diperkenankan menjadi konsultan ketika sudah dianggap cukup oleh pendeta. Sedangkan ruang konsultasi untuk guru dilakukan setiap dua minggu sekali. Adapun ruang konseling untuk wali murid dilakukan temporal dan dijadwalkan berdasarkan kesepakatan waktu antara wali murid dengan pendeta. Menurut Kepala Sekolah SMA Lentera Harapan, ruang konseling dijadikan ruang transformasi nilai-nilai agama Kristen, ketauladanan pribadi Yesus dan meneguhkan nilai kemanusiaan serta kebangsaan.

*Ketiga*, SMA Kristen 1. Meskipun porsinya sedikit tetapi di sekolah ini ada agenda tahunan mengunjungi lokasi bersejarah. Ketua OSIS SMA Kristen 1 menjelaskan, di setiap tahun ada agenda mengunjungi waruga dan makam pejuang muslim di Tondano. Kegiatan ini hanya memperkenalkan kearifan lokal yang digagas oleh guru sejarah kepada pada siswanya. Di waruga, guru menceritakan terlebih dahulu tentang sejarah etnis Minahasa dan kepercayaannya. Selain itu juga menjelaskan kehadiran pejuang muslim di tanah Minahasa.

## **5. Mencari Model Ketahanan dari Kasus-kasus di Sekolah**

Kasus-kasus yang terjadi di beberapa sekolah di Indonesia menjadi gambaran bahwa lingkungan sekolah perlu ditingkatkan pengawasannya. Model penyemaian paham radikalisme dan intoleransi di sekolah bisa dilihat dari pola *bottom-up* dan *top-down* atau vertikal-horizontal. Ada banyak kasus menunjukkan polanya dari kebijakan atau visi pemerintah daerah yang

kemudian diturunkan dan diterapkan di sekolah, ada juga yang terhegemoni dari kultur sosial masyarakat sehingga menjadi suatu kebijakan atau kegiatan di suatu sekolah, dan ada juga yang memang diinisiasi langsung oleh kepala sekolah, guru atau siswanya.

Untuk melihat pola ketahanan sekolah di Kota Tomohon dari infiltrasi dari fanatisme, radikalisme dan intoleransi, perlu di mulai dari membaca berbagai pola terlebih dahulu. Di beberapa wilayah di Indonesia, ada aturan-aturan yang bersifat lokalistik yang terwujud dalam Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub) ataupun Peraturan Bupati/Walikota. Masing-masing daerah memiliki kultur dan kearifan lokal sehingga mereka meneguhkannya dengan menerbitkan suatu kebijakan lokal. Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat dan beberapa daerah lainnya memiliki peraturan yang menjadikan ajaran-ajaran Islam dan kegiatannya menjadi hukum positif. Kebijakan ini kemudian disebut dengan Perda Syariah. Daerah lainnya yang menunjukkan kekhasannya sebagai daerah yang didominasi oleh masyarakat Hindu dan kebijakannya adalah Pemda Denpasar (Bali). Sebagai wilayah yang mayoritas Kristen dan memiliki visi relijiusitas, Kota Tomohon tidak memiliki Perda atau Perwalkot yang meneguhkan ajaran atau kegiatan Kristen. Visinya justru meneguhkan kebinekaan, “*Terwujudnya Masyarakat Kota TOMOHON yang Religius, Berdaya Saing, Demokratis, Sejahtera, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Kota Wisata Dunia*”, justru Tomohon mewujudkannya dalam kebijakan yang menjunjung tinggi keharmonisan.

Pada 27 Februari 2017, Pemerintah Kota Tomohon menerima Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin di Mercure Convention Center Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim *Assessment* Kementerian Agama. Tahun 2017 Provinsi Sulawesi Utara yang di dalamnya ada Kota Tomohon berada di peringkat kedua nasional dalam hal kerukunan umat beragama.<sup>21</sup> Penghargaan ini berbanding terbalik dengan wilayah lain yang secara eksplisit memiliki Perda

---

21 Lihat <https://www.tomohon.info/featured/kota-tomohon-jadi-yang-pertama-di-sulut-terima-harmony-award/>, diakses pada 4 November 2017.

Syariah. Wilayah dan daerah yang menerbitkan Perda-Perda Keagamaan terutama Perda-Perda Syariah justru mendapatkan temuan sebagai wilayah atau daerah yang toleransinya rendah.<sup>22</sup>

Dari visi misi dan capaian pemerintah tersebut tentu merupakan kabar yang menggembirakan. Namun apakah usaha menjaga kerukunan oleh Pemerintah Kota Tomohon juga punya penetrasi ke kebijakan sekolah. Penulis mencatat beberapa temuan terkait pemerintah dalam menjaga kerukunan masyarakat di Tomohon. *Pertama*, tidak ada kebijakan khusus keagamaan yang terbit di Kota Tomohon. Pada tahun 2015 pernah muncul inisiasi dari DPRD Kota Tomohon yang mewacanakan Perda mengenai Jumat Agung, Paskah dan Pengucapan Syukur. Selain untuk memeringati kegiatan keagamaan, rencana Perda tersebut menjelaskan soal penerapan kebijakan dalam dasar dan payung hukum berupa adanya pembatasan kendaraan di dekat gereja dan masjid, pengurangan jam berjualan di pusat kota, adanya penutupan tempat hiburan seperti tempat karaoke dan sebagainya. Perda ini terbit untuk memfasilitasi Jumat Agung sebagai hari sakral dan menunjang Tomohon sebagai Kota Religius. Namun rencana penerbitan Perda ini gagal ditetapkan.

*Kedua*, berdasarkan penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tomohon bahwa Pemkot Tomohon sangat mendukung Tomohon sebagai Kota Pendidikan. Bentuk dukungannya tersebut dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pendanaan untuk kemajuan pendidikan. Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Tomohon mengalokasikan dana sebesar 30.65 % dari APBD atau senilai Rp. 185 Miliar. Dana tersebut termasuk ditujukan untuk kesejahteraan para guru dan kepala sekolah. Pemkot mengalokasikan dana sekitar Rp. 7 Miliar per tahun untuk tunjangan tambahan penghasilan guru dan kepala sekolah.<sup>23</sup> Tidak hanya itu, ketika pemerintah pusat mengalami keterlambatan pencairan sertifikasi guru di tahun 2017, Pemkot Tomohon membuat kebijakan penalangan dana sertifikasi tahap 1 di triwulan 2. Keputusan ini bertujuan memotivasi guru untuk tetap melaksanakan tugas mengajarnya dengan baik. Informasi yang

---

22 Lihat <http://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-tahun-2017>., diakses pada 4 November 2017.

23 Lihat <http://manado.tribunnews.com/2015/09/16/eman-minta-guru-buktikan-tomohon-kota-pendidikan>., diakses pada 4 November 2017.

disampaikan Kepala Dinas tersebut juga dikonfirmasi oleh Kepala Sekolah MA Mardhatillah,

*“Meskipun kami minoritas, kami merasa diperhatikan. MA Mardhatillah mendapatkan bantuan dana dari Pemkot Tomohon untuk membangun perpustakaan sekolah senilai Rp. 90 Juta. Selain itu, untuk guru-guru juga diperhatikan.”*

*Ketiga*, Pemkot Tomohon termasuk Dinas Pendidikannya senantiasa menjaga kerukunan masyarakatnya dengan berbagai cara. Penulis mencatatnya sebagai temuan yang menarik mengenai bagaimana pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan merespon isu-isu nasional yang terkait dunia pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tomohon menjelaskan bahwa pihaknya selalu mengumpulkan kepala sekolah atau guru-guru yang terkait ketika ada isu yang dapat memengaruhi dunia pendidikan di Tomohon. Ketika di media sosial sedang populer (viral) video tentang *skip challenge*, permainan pelajar yang menekan dada temannya sampai teman tersebut kekurangan oksigen, Dinas Pendidikan Kota Tomohon menggelar seminar sehari mengenai bahaya praktik *skip challenge* di sekolah. Dinas Pendidikan Kota Tomohon, berdasarkan informasi dari Kepala Sekolah Lentera Harapan pernah menggelar seminar Islamologi.<sup>24</sup> Guru-guru agama di sekolah-sekolah menengah atas se-Tomohon diajak berdiskusi mengenai keIslaman. Acara ini sebagai respon dari situasi di DKI Jakarta akhir tahun 2016 yang mendemo Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Narasi-narasi yang berkembang adalah persoalan agama yang mana massa Islam mencoba memenjarakan Ahok karena dia beragama Kristen dan beretnis Cina. Seminar ini bertujuan untuk melihat bahwa Islam adalah agama yang damai dan kejadian di Jakarta adalah oknum yang bukan representasi dari ajaran Islam tetapi lebih pada agenda politik semata.

Dari ketiga hal tersebut, visi misi kerukunan yang dijaga oleh Pemkot Tomohon secara nyata diturunkan dalam kebijakan, program dan monitoring untuk sekolah-sekolah. Wujud dari implementasi Pemkot ini salah satunya yang ada di SMAN 1 Tomohon. Sekolah ini menjadi *pilot project* dari Pemkot Tomohon sebagai Sekolah Rujukan. Maksudnya adalah sekolah

---

24 Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Lentera Harapan Tomohon pada 12 Oktober 2017.

yang menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah menengah atas lainnya yang ada di Tomohon ataupun sekolah-sekolah di luar Tomohon. Simbol-simbol kerukunan juga terlihat di sekolah ini sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Kota Tomohon hanya ada dua sekolah negeri yakni SMAN 1 dan SMAN 2. Untuk sekolah yang berstatus negeri bisa diintervensi oleh pemerintah langsung. Sejak tahun 2017, sekolah menengah atas sudah dibawah pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Kenyataan ini tentu bisa memengaruhi situasi sekolah saat ini karena sudah diluar kendali Pemkot Tomohon langsung.

Sedangkan untuk sekolah lainnya yang berdiri dibawah naungan yayasan akan berbeda polanya. Ada empat sekolah yang sangat didominasi oleh yayasan masing-masing yakni SMA Lokon, SMA Lentera Harapan, SMA Kristen 1 dan MA Mardhatillah. SMA Lokon dan MA Mardhatillah sama-sama menerapkan sistem pendidikan berasrama. Keduanya memiliki mekanisme yang ketat dalam mengontrol dan mengawasi pengajaran dan kegiatan siswa. Meski demikian, MA Mardhatillah pernah disusupi salah satu guru yang ternyata di kemudian hari ditangkap oleh Densus 88 karena terkait dengan jaringan *Jamaah Islamiyah*. Kepala Sekolah MA Mardhatillah menceritakan, pada tahun 2005 sang guru datang ke pesantren dan melamar sebagai ustaz. Karena ia memiliki hafalan al-Qur'an 15 juz maka pihak yayasan menganggap ia layak menjadi ustaz. Hanya dalam 6 bulan mengajar dan hampir dinikahkan dengan salah satu santrinya, ia pergi keluar dari pesantren. Alih-alih 3 bulan kemudian pihak pesantren mendapat kabar dari kepolisian setempat (kantor Polsek Tomohon Utara persis di depan pesantren) bahwa sang ustaz adalah salah satu dari jaringan teroris. Setelah itu, yayasan ini memperbaiki dan memperketat mekanisme rekrutmen tenaga pendidiknya, salah satunya adalah adanya rekomendasi dari Hidayatullah pusat.<sup>25</sup>

Dua sekolah lainnya adalah SMA Lentera Harapan dan SMA Kristen 1. SMA Lentera Harapan memiliki kurikulum, mekanisme pengajaran dan agenda kegiatan siswa yang berbeda dengan sekolah lainnya. Sekolah ini menerapkan sistem evaluasi kegiatan belajar mengajar (KBM) catur wulan,

---

25 Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MA Mardhatillah pada 3 Oktober 2017.

bukan sistem semester. Konten pelajarannya pun terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya. Contohnya dalam pembahasan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) akan didahului dengan pelajaran agama dan sejarah. Guru agama akan menyinggung persoalan kemanusiaan, ketuhanan dan kenabian yang kemudian dilanjutkan oleh mata pelajaran sejarah tentang sejarah manusia, kenabian dan kebangsaan. Pembahasan berikutnya akan diulas pelajaran PKn tentang bangsa dan Negara Indonesia. Selain itu, kontrol dari yayasan terhadap sekolah, kurikulum dan guru serta karyawannya sangat ketat. Sekolah mengontrol dan guru dan siswanya juga sangat ketat. Sedangkan SMA Kristen 1 dikontrol dan diawasi oleh unit pendidikan Yayasan Dr. Azr Wenas, GMIM. Lokasi yang berada di kompleks Sinoge GMIM tentu sangat mudah dimonitor. Selain yayasan, SMA Lentera Harapan dan SMA Kristen 1 juga diawasi oleh wali murid. Kedua sekolah ini membuka ruang partisipatif kepada wali murid melalui komite sekolah untuk mengevaluasi kegiatan anak-anaknya.

Di luar pemerintah, yayasan dan sekolah, ada peran masyarakat yang turut memengaruhi pola ketahanan sekolah dari infiltrasi fanatisme, radikalisme dan intoleransi. Salah satu masjid dari tiga masjid yang ada di kota ini, Masjid Mujahidin diberlakukan pelarangan adzan memakai pengeras suara *outdoor* (toa). Menurut Deni Pinotoan, narasumber lokal dalam FGD penelitian ini, pelarangan tersebut bagian dari konsekuensi kesepakatan antar denominasi Kristen di Tomohon tahun 1952.<sup>26</sup> Saat itu disepakati untuk tidak menggunakan pengeras suara *outdoor* untuk gereja manapun. Hal ini karena terjadi keresahan di masyarakat, khususnya untuk gereja-gereja di tengah kota. Alasan ini cukup menjaawab pertanyaan peneliti sebab larangan penggunaan pengeras suara *outdoor* saat adzan tidak berlaku di Masjid Nurul Iman (Kampung Jawa) dan Masjid at-Taqwa (Hidayatullah Kinilow). Dua masjid yang disebutkan tersebut berada di pinggiran kota Tomohon.

Saat ini, lokasi Masjid Mujahidin menjadi basis kegiatan umat Islam di Tomohon. Di komplek masjid sudah berdiri sekolah-sekolah Islam sepeti

---

26 *Forum Discussion Gorup* (FGD) penelitian ini diselenggarakan pada 27 November 2017. Selain Deni Pinotoan selaku narasumber lokal, turut hadir guru-guru dan kepala sekolah serta para siswa yang sebelumnya menjadi narasumber dalam penelitian ini. Tujuan FGD ini untuk mengkonfirmasi ulang temuan dan memperdalam hasil temuan saat wawancara.

PAUD, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang berada dibawah naungan Yayasan Mujahidin. Ketua Yayasan Mujahidin menceritakan, tahun ini pengurus Yayasan Mujahidin dan segenap masyarakat Muslim Tomohon sedang merancang pendirian Madrasah Aliyah. Rencana tersebut sudah dikonsultasikan dengan walikota. Masjid ini berdiri di tengah bangunan gereja-gereja. Selain itu, bentuk lainnya adalah adanya kegiatan Lomba Paduan Suara Gereja se-Tomohon 2017 yang dalam pembukaannya dimulai dengan pertunjukan seni qasidah ibu-ibu Majelis Taklim Mujahidin.<sup>27</sup> Bentuk kegiatan lainnya adalah adanya dukungan dari masyarakat Kristen dalam kegiatan Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Sulawesi Utara. Perwakilan *qariah* Kota Tomohon, salah satu siswi SMA Kosgoro berhasil menjadi juara pertama. Kondisi sosial masyarakat ini turut memberikan andil dalam konstruksi model ketahanan sekolah dari fanatisme, radikalisme dan intoleransi di Kota Tomohon.<sup>28</sup>

Dari semua pola ketahanan sekolah yang dilakukan oleh pemerintah lokal, yayasan, sekolah dan masyarakat, dasarnya adalah kearifan lokal. Sebagai kota yang menjaga keharmonisan kehidupan antar agama, ada beberapa poin yang menjadi kekhasan masyarakat Tomohon. *Pertama*, masyarakat Tomohon masih menjunjung tinggi nilai dan norma Minahasa. Masyarakat Minahasa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pahlawan nasional yang lahir di Tondano, Dr. Sam Ratulangi telah menggelorakan “*Si Tou Timou Tumou Tou*”. Artinya adalah *Manusia hidup untuk menghidupi (sesama) manusia* atau *manusia dikatakan manusia, jika ia memanusiaakan manusia*. Falsafah ini sudah menjadi semboyan hidup masyarakat Minahasa, termasuk masyarakat Tomohon.

*Kedua*, masyarakat Tomohon sudah sejak awal abad ke-19 sudah terbentuk masyarakat lintas iman. Kampung Jawa Tomohon adalah wilayah yang terbangun atas perkawinan beda ras dan agama. Penduduk yang menempati kampung ini generasi keturunan Jawa-Minahasa dan Islam-Kristen. Secara

---

27 Hasil wawancara dengan Ketua Pengurus Masjid Mujahidin pada 20 Oktober 2017.

28 Pengakuan ini disampaikan oleh siswi Kelas XII SMA Kosgoro di FGD yang diselenggarakan pada 27 Oktober 2017 di Tomohon.

silsilah, masyarakat di sini merasa bagian dari satu garis keturunan meski beda keyakinan. Deni Pinotoan menjelaskan,

*“Perbedaan-perbedaan yang ada, tidak muncul dan menjadi akar masalah sosial, selama masyarakat di Tomohon masih memegang teguh motto Torang Semua Basudara, artinya kita semua bersaudara. Semangat persaudaraan itu masih terpegang oleh para siswa di sekolah-sekolah di Tomohon. Acara pengucapan syukur biasa dilakukan oleh umat Kristiani, siswa yang menyelenggarakannya akan mengundang temannya yang muslim untuk hadir. Makanan untuk yang muslim, sudah disiapkan penyelenggara. Nah, begitu juga perayaan lebaran ketupat, acara tahunan yang diselenggarakan satu minggu setelah idul fitri, siswa muslim selalu mengundang teman-temannya yang lain (Kristen dan Katolik) untuk hadir di acara tersebut.*

*Aktivitas lainnya yang menarik adalah kegiatan saling membantu atau gotong royong. Kita sebut ini Mapalus, kegiatan yang mencerminkan masyarakat yang terbuka, inklusif dan saling menghargai satu sama lain dalam ikatan persaudaraan.”*

Pernyataan Deni tersebut dikuatkan oleh Ketua OSIS SMA Lokon saat FGD berlangsung. Ia menceritakan,

*“Keluarga kakek ada yang beragama Islam. Kalau lebaran, saudara yang Kristen akan datang berkunjung, membatu membuat kue lebaran. Begitu juga sebaliknya, kalau mau natal, saudara kami yang muslim membantu bikin kue natal. Dalam keluarga kami, sudah terbiasa jika salah satu anggotanya berpindah keyakinan dan atau berbeda keyakinan, tapi tidak menjadi masalah dan tetap berkeluarga (menjadi bagian dari keluarga).”<sup>29</sup>*

---

29 Pengakuan ini disampaikan oleh Ketua OSIS SMA Lokon pada *Forum Discussion Group* (FGD) yang diselenggarakan pada 27 November di Tomohon.

# MENCIPTA SEKOLAH PENUH KEBINEKAAN, MENOLAK RADIKALISME BERBAJU PENDIDIKAN

## *Sebuah Catatan Penutup*

Lembaga pendidikan merupakan salah satu tempat strategis untuk membentuk karakter individu sebagai pribadi dan warga Negara. Namun, unsur politisasi dalam pengelolaan lembaga pendidikan bisa saja terjadi, yaitu masuknya berbagai macam kekuatan, kekuasaan, kepentingan politik dan ideologi yang memengaruhi kinerja lembaga pendidikan. Kodrat kelembagaan yang demikian membuat lembaga pendidikan berada dalam sebuah situasi konflik. Di satu sisi, lembaga pendidikan sangat rentan terhadap politisasi, dan di sisi lain, lembaga pendidikan memiliki potensi strategis dalam rangka pembentukan karakter kebangsaan. Pembentukan karakter kebangsaan yang dihasilkan melalui lembaga pendidikan diharapkan membentuk pribadi yang mampu menghargai kebinekaan, menjaga persatuan, dan menghormati keragaman bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Persoalan radikalisme yang menggejala di masyarakat, terutama yang terjadi di lingkungan pendidikan tentu menjadi persoalan serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Hasil riset yang dilakukan oleh MAARIF Institute menunjukkan bahwa di satu sisi masih ada banyak tantangan dalam lembaga pendidikan untuk mengatasi masuknya paham radikal di lingkungan pendidikan, dan di sisi lain, riset ini juga menunjukkan adanya peluang dan harapan dalam rangka memperkuat semangat kebinekaan dan persatuan bangsa. Selain menemukan akar persoalan, riset ini juga menemukan praktik baik dalam lembaga pendidikan yang bisa diterapkan di sekolah lain.

Paham radikalisme beserta jaringan aktivisnya telah memasuki lingkungan Sekolah Mengah Atas (SMA) merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Madrasah Aliyah pun menunjukkan gejala serupa jika tak dikelola dengan baik. Bukan hanya sekolah swasta yang berada di bawah pengelolaan lembaga-lembaga keagamaan tertentu, tetapi sekolah negeri yang seharusnya membangun nilai-nilai universal dan kebangsaan bersama pun menjadi persemaian subur paham ini. Sekolah negeri sekalipun “tidak aman” dari tawaran-tawaran kekerasan atas nama agama yang disodorkan oleh paham radikalisme. Keterbatasan siswa terhadap pengetahuan dan pemahaman keagamaan, disertai kerinduan tentang kejayaan kekuasaan politik atas nama agama di masa lalu dari para aktivis radikal bertemu bersama dalam forum-forum kegiatan kesiswaan. Berbagai kegiatan kesiswaan, khususnya bidang kerohanian (baik Islam, Kristen, Katolik dan Hindu) dimanfaatkan begitu rupa oleh jaringan radikalisme untuk memasukkan unsur dan semangat yang mengedepankan pada pengakuan kebenaran sepihak. Sayangnya, banyak komponen sekolah, dari kepala sekolah, guru, pengurus OSIS, dan komite sekolah terlibat dalam aktivitasnya, atau setidaknya membiarkan aktivitas radikalisme berjalan dan mendampingi para siswanya.

Dalam konteks masuknya paham radikalisme di sekolah, peranan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) menjadi sangat penting. OSIS merupakan sasaran strategis mengingat mereka ini adalah anak-anak muda yang masih memiliki prospek di masa depan untuk dibentuk kepribadiannya. Bila tidak didampingi dengan baik, OSIS bisa menjadi organisasi laten yang malah menyebarkan paham radikal di lingkungan sekolah. Lebih dari itu, sasaran kelompok radikal adalah para pemimpin muda yang berada di sekolah. Komunitas yang efektif untuk dipengaruhi ajaran seperti ini adalah para pengurus dan anggota OSIS. Sebagai organisasi internal di lingkungan sekolah, OSIS memiliki peranan dalam menentukan corak dan bentuk kegiatan peserta didik di sekolah melalui berbagai macam seksi dan program yang dimilikinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa OSIS rentan mengalami infiltrasi dari paham dan gerakan radikal yang menyebabkan munculnya paham anti kebangsaan dan intoleransi pada siswa. Kerentanan ini terjadi

dalam bentuk berbagai macam kegiatan yang dipromosikan di lingkungan sekolah yang sesungguhnya mendiskriminasi peserta didik lain yang berbeda ajaran agama dan keyakinan. Selain kegiatan keagamaan, paham radikal juga mulai masuk ke sekolah melalui para pelaku lain dari luar sekolah.

Keterlibatan jaringan alumni, lembaga keagamaan, dan partai politik di dalam aktivitas dan organisasi kesiswaan menguatkan kenyataan di atas. Dalam praktiknya, organisasi kerohanian siswa seperti “kerajaan otonom” yang mengatur dan mengkoordinasikan sendiri kegiatannya tanpa kendali dari ketua OSIS dan pimpinan sekolah. Hal ini menjadi penanda penting bahwa gerakan dan paham radikalisme mulai memasuki lingkungan sekolah. Guru dan siswa yang sudah terinfiltrasi dengan paham radikal akan menjadi motor penggerak internal berbagai kegiatan yang memberikan ruang bagi paham radikal terus berkecambah. Hal ini semakin menguat ketika kebijakan nasional pendidikan tentang nilai-nilai kebangsaan, yang dikenal dengan penguatan pendidikan karakter, hanya diterjemahkan dengan penguatan nilai keagamaan saja, dan melupakan nilai-nilai universalitas sebuah bangsa. Beberapa sekolah yang menjadi lokasi penelitian proyek ini, seperti SMA dan MA di wilayah Padang, Sukabumi, Cirebon, Surakarta, Denpasar, dan Tomohon, telah menunjukkan adanya penguatan paham radikalisme di kalangan siswa dan organisasi kesiswaannya.

Muncul pertanyaan, mengapa siswa-siswi SMA/MA yang menjadi target penting dari paham dan gerakan radikal? Target kepada para siswa SMA/MA ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari persemaian benih-benih dan jaringan radikal di dunia kampus. Beberapa perguruan tinggi telah terkontaminasi dengan jaringan paham radikal sejak akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Institut Teknologi Bandung (ITB), Institute Pertanian Bogor (IPB), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan sebagainya merupakan kampus-kampus yang menjadi pionir utama dari persemaian paham radikal di dunia perguruan tinggi. Melalui dunia kampus, jejaring alumninya kemudian berusaha mengembangkan pahamnya ke sekolah-sekolah yang menjadi tempat bekerjanya atau tempat di mana ia dahulu bersekolah. Pola pengembangannya seperti sistem *Multi Level*

*Marketing* (MLM) dalam jaringan perdagangan suatu produk. Ketokohan dan posisi seseorang sangat ditentukan di dalam proses rekrutmen para calon kader, baik dilihat dari sisi kuantitas ataupun kualitasnya.

Siswa-siswi di SMA/MA menjadi target strategis dalam pengembangan paham radikal, baik secara sosial ataupun politik. Secara sosial, mereka akan menjadi agen-agen perubahan sosial masa depan sebagaimana yang diharapkan berdasarkan perspektif kelompok radikal. Persiapan dan pembinaannya harus dilakukan sedini mungkin, khususnya kepada anak-anak pada usia SMA/MA. Pelajar SMA/MA dianggap sedang berada pada usia peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Usia seperti ini disebut-sebut sebagai usia kritis dalam penerimaan nilai-nilai yang dianggapnya baik dan sesuai dengan kepribadiannya. Oleh karena itulah, para penanam nilai yang dianggap memesonakan dalam menyampaikan pahamnya akan lebih diterima dibandingkan penanam nilai yang biasa-biasa saja, terlebih ketika para penanam paham tersebut merupakan kader-kader yang sangat militan, terorganisir, dan ulet.

Internalisasi nilai radikal akan mudah dipahami oleh para siswa, dan bahkan ada keinginan kuat dari mereka untuk segera menerjemahkannya secara langsung pada praktik-praktik kehidupan kesehariannya. Identitas “hijrah” bagi mereka yang sudah menjalankan praktik yang diajarkan, dan identitas “jahiliyah” bagi para siswa yang belum mengikuti atau tidak mau melaksanakan ajaran dari *murabbi* adalah tanda-tanda yang seringkali disematkan dalam pergaulan sosial di sekolah-sekolah yang sudah terinfiltrasi dengan paham radikal ini.

Kegiatan pembelajaran dan penanaman paham-paham radikal pada siswa di atas pada akhirnya akan menghadirkan empat karakter radikalisme yang ada.

*Pertama*, munculnya sikap intoleran, yang tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain yang berbeda dengannya. Hal ini akan terlihat jelas pada pergaulan sosial, termasuk dalam pemilihan-pemilihan ketua organisasi kesiswaan, ketua kelas, dan sebagainya. Selain itu, kelompok siswa yang sudah terpapar paham radikal selalu berusaha menghindari kontak-kontak dengan siswa yang memiliki agama yang berbeda. Mereka tidak mau membeli barang-barang dari siswa agama lain, walaupun bukan

dalam bentuk makanan. Mereka juga enggan meminjam atau meminjamkan buku-buku pelajaran dan barang lainnya kepada siswa yang berbeda agama;

*Kedua*, sikap fanatik yang berlebihan, yaitu berpegang teguh terlalu kuat pada suatu keyakinan, sehingga terwujud pada sikap “merasa diri paling benar” dan orang lain salah. Sikap fanatik yang ditunjukkannya terlalu berlebihan dan “mengganggu kehidupan sosial orang lain”. Fanatisme dalam beragama diperbolehkan, bahkan diwajibkan, tetapi ia adalah fanatisme yang bersifat internal, yaitu sebuah keyakinan yang tidak perlu ditampakkan dengan pelekatan identitas tertentu kepada kelompok-kelompok lain yang berbeda agama. Sebutan “sesat”, “kafir” dan sebagainya seringkali menjadi *labelling* bagi mereka yang tidak sepaham atau tidak seagama dengan mereka. Banyak siswa di sekolah-sekolah yang diteliti menunjukkan gejala tersebut, terlebih pada siswa di Sukabumi, Padang, dan Surakarta;

*Ketiga*, sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan atau paham dari orang kebanyakan (*mainstream*). Sikap seperti ini merupakan perwujudan dari sikap pertama dan kedua, di mana sikap intoleran dan fanatisme pada umumnya akan menghasilkan eksklusifitas sendiri ataupun demikian sebaliknya. Sikap ini dilakukan karena didasarkan pada prinsip bahwa (i) dirinya yang benar, dan orang lain salah; (ii) memisahkan diri demi kebaikan dirinya agar tidak terkontaminasi kembali dengan nilai-nilai yang dianggapnya tidak baik, dan sebagainya; (iii) untuk apa bergaul dengan orang yang berbeda paham atau berbeda agama, karena ada kekhawatiran bahwa mereka akan menyerupai perilaku dan nilai-nilai yang ada, sehingga jalan hijrah dan pencapaian kebenarannya tidak lagi akan bersifat sempurna. Sikap eksklusif di kalangan siswa tersebut dapat diwujudkan dengan beberapa cara, misalnya (1) cara berpakaian yang sangat berbeda dengan kelompok siswa lainnya; (2) tidak mau bergaul secara umum; (3) tidak mau makan bersama; (4) tidak mau mengikuti kegiatan OSIS lainnya, selain bidang kerohanian; (5) lebih percaya dan patuh kepada patron pahamnya dibandingkan kepada guru atau pihak lain yang berada dalam lingkup sekolah; dan (6) jarang terlihat aktif dalam kegiatan sekolah atau kelas, tetapi akan terlihat sangat aktif ketika hal tersebut berhubungan dengan kegiatan dan jaringan paham radikalnya.

*Keempat*, sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai sebuah tujuannya. Sikap ini memang tidak ditunjukkan oleh para siswa secara vulgar, tetapi cara berpikir yang mengarah pada praktik kekerasan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda benar-benar terlihat jelas. *Labelling* “sesat” bagi kelompok siswa lain yang tidak sepaham dengan mereka merupakan bentuk kekerasan verbal, yang di dalamnya terkandung makna bahwa kelompok “sesat” itu wajib diperangi agar sadar untuk kembali ke jalan agama sebagaimana yang dipahami oleh siswa yang sudah terpapar radikalisme. Demikian juga keikutsertaan mereka dengan kelompok atau organisasi keagamaan yang memiliki kecenderungan pada praktik kekerasan, seperti Front Pembela Islam, Organisasi Keagamaan Islam Garis Lurus (Garis) dan organisasi lainnya yang mengatasnamakan agama akan dianggap sebagai bagian penerjemahan sikap revolusioner tersebut. Keterlibatan mereka dalam aksi demonstrasi 411 dan 212, misalnya, yang disertai dengan ancaman kekerasan di dalamnya, dapat dianggap juga sebagai bentuk sikap revolusioner tersebut.

Empat karakteristik di atas dapat dibaca secara keseluruhan, sehingga akan menjadi radikalisme yang mengarah pada praktik-praktik kekerasan atas nama agama. Kasus keterlibatan siswa di salah satu sekolah di Cirebon yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS merupakan perwujudan yang sempurna dari empat karakter radikalisme di atas. Namun, karakter di atas dapat dibaca secara terpisah-pisah atau per bagian, sehingga akan melahirkan tingkat-tingkat pemahaman dan tindakan radikalismenya sendiri-sendiri. Karakter pertama dan kedua lebih bersifat konsepsi, sehingga hanya akan melahirkan cara pandang. Sementara karakter ketiga dan keempat sudah lebih mengarah pada perilaku atau tindakan sebagai upaya pembuktian diri mereka yang merasa benar. Bentuknya tidak lagi bersifat laten, tetapi telah bersifat manifest dan menganggap yang berbeda paham dan agamanya adalah kafir, sesat, dan harus dimusnahkan dari muka bumi. Tingkatan pemahaman empat karakter radikalisme di atas juga telah terpetakan pada siswa-siswa di enam lokasi penelitian yang ada.

Penelitian tentang OSIS dalam menangkal paham radikalisme di satu sisi, sekaligus mengokohkan kebinekaan di sisi lain yang dilakukan menjadi sangat penting untuk mengungkap proses penyebaran dan penanaman paham radikalisme di tengah kegiatan OSIS. Aktor-aktor internal dan eksternal sekolah menjadi sangat penting diungkap untuk mengetahui peran masing-masing dalam penyemaian paham radikal beserta penguatan jejaring sosial di dalamnya. Penelitian ini semakin menarik ketika pilihannya jatuh pada enam lokasi yang dianggap menjadi potret umum wajah radikalisme di Indonesia.

Enam wilayah di atas adalah (i) Padang, kota ini cukup produktif dalam mengirim aktivis-aktivis dalam berbagai kegiatan yang menyiratkan simbolisasi Islam radikal; (ii) Sukabumi, sebagai wilayah yang memiliki fenomena penanaman paham radikalisme di sekolah dengan memanfaatkan kekuatan “tiga batu tungku”, antara politisi (partai politik), juru dakwah, dan kader yang militan. Wilayah ini juga merupakan wilayah lama yang menjadi basis dari kelompok-kelompok radikal di Jawa Barat; (iii) Cirebon, sebagai wilayah yang dianggap memiliki kecenderungan kuat rekrutmen pelaku terorisme dari lingkungan sekolah. Padahal kota ini disebut-sebut sebagai kota tradisionalitas dalam aspek kehidupan beragamanya; (iv) Surakarta, sebagai wilayah yang seringkali dianggap menjadi persemaian dan barometer kehidupan kaum radikal di belahan nusantara. Selain itu, kontestasi organisasi keagamaan sangat kuat, sehingga memungkinkan adanya pengaruh ke lingkungan sekolah; (v) Denpasar, dalam posisinya sebagai kota wisata dunia, tentu akan sangat menarik apakah kenyataan ini berpengaruh dalam membuka wawasan para siswa atau memilih kepada kecenderungan keagamaan yang fanatik. Terlebih kota ini pernah mengalami satu situasi bersejarah tentang tragedi korban terorisme; (vi) Tomohon, mampu mengungkap fenomena radikalisme ke-Kristenan di kota yang disebut-sebut sebagai kota penuh toleransi dan damai, di mana umat Islam merupakan kelompok minoritas di tengah populasi Kristen. Keenam lokasi penelitian di atas telah memberikan ilustrasi penting tentang pola, mekanisme, dan jaringan yang terlibat dalam penanaman dan pengembangan paham radikalisme pada kegiatan kesiswaan di lingkungan sekolah.

Kerentanan sebuah lembaga pendidikan dalam menahan infiltrasi paham dan gerakan radikal bisa terjadi karena faktor lingkungan sosial dan budaya di sekitar sekolah. Penelitian ini menempatkan fenomena ketahanan sekolah dalam menghadapi paham radikalisme dari sudut pandang kolaborasi antara sekolah dengan lingkungan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Secara umum, dalam penelitian ini ditemukan adanya kaitan dan keterpengaruhan kultur masyarakat setempat dengan dinamika kegiatan pendidikan yang terjadi di lingkungan sekolah. Diskriminasi yang secara umum sering terjadi dan tanpa sadar dilakukan adalah pengarusutamaan (*mainstreaming*) pembiasaan dari agama mayoritas yang dianut di lingkungan sosial budaya setempat. Sebagai contoh, di Denpasar ditemukan bahwa kebudayaan Hindu dan berbagai macam ritual dan tradisi Hindu selalu ada di sekolah dan menjadi bagian dari kegiatan rutin sekolah. Demikian juga yang terjadi di Sukabumi, meskipun jumlah penganut agama di Kabupaten Sukabumi tidak 100% Islam, namun ketika memasuki sekolah-sekolah negeri banyak ditemukan para siswi berjilbab. Homogenitas siswa di sekolah dan juga pengarusutamaan agama mayoritas menjadi sumber potensial lahirnya tindakan diskriminasi, meskipun tindakan ini tidak secara langsung berkorelasi dengan paham radikal. Bahkan ada kecenderungan Pemerintah Daerah pun membuat kebijakan yang sifatnya kemudian menjadi menggeneralisir semua penduduk seolah-olah mereka memiliki satu kesamaan kultur dan kepercayaan.

Selain pengaruh kultur setempat, kekuatan politik juga menyeruak masuk di lingkungan sekolah sehingga kebijakan dari partai politik tertentu juga terlihat di lingkungan sekolah. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya, menerapkan pola-pola tarbiyah PKS di Kabupaten Sukabumi dan Kota Padang. Hal ini mirip dengan daerah lain yang pemerintahannya juga dipegang oleh PKS dimana mereka memanfaatkan ruang-ruang aktifitas keagamaan yang begitu dominan di sekolah sebagai lahan mengkader bibit-bibit unggul dari sekolah.

Kehadiran kelompok-kelompok politik dan organisasi massa yang terlibat di dalam aktivitas pendidikan bisa berpotensi melahirkan proses pendidikan yang intoleran. Sekolah yang membuka pintu kuat pada organisasi politik

atau organisasi massa di luar memiliki potensi menjadi intoleran cukup kuat. Ada lima pemain yang menjadi terduga menanamkan intoleransi di kalangan sekolah maupun masyarakat umum; yaitu PKS, FPI, Wahabi, HTI, dan Salafi. PKS, di Sukabumi, sejak kepemimpinan Sukmawijaya gencar dengan penyebaran virus tarbiyah-nya di kalangan sekolah (dan juga universitas) melalui QC (Qur'ani Club). FPI yang masuk ke pesantren-pesantren salafi di mana pesantren-pesantren ini kosong akan pengetahuan kebangsaan dan kebinekaan, dan Ar-Rayyah (Wahabi) masuk melalui jaringan alumni di Cikembar dan Cibadak, wilayah yang masuk kategori heterogen secara keagamaan di Kabupaten Sukabumi. HTI mencoba masuk ke beberapa sekolah di Cirebon, yang mendapat respon guru agama yang juga pembina Rohis. Sementara Salafi mengokohkan dirinya di SMAN 1 Surakarta. Demikian sebagai contoh.

Tim peneliti MAARIF Institute telah berhasil menemukan dan menjelaskan beberapa hal terkait upaya infiltrasi radikalisme pada kegiatan kesiswaan beserta organisasinya, dan respons terhadapnya. Selain itu, tim juga berhasil memetakan potensi-potensi positif yang dimiliki sekolah sebagai daya tahan dalam menghadapi pengembangan paham radikal di sekolah. Beberapa persoalan itu dapat terjabarkan sebagai berikut:

### ***Ekskul di Pesimpangan Jalan: Antara Radikalisme dan Moderatisme***

Bagian ini mengarah pada upaya menggali fenomena radikalisme di kalangan siswa dan organisasi kesiswaan di sekolah-sekolah pada enam lokasi yang menjadi sampel penelitian. Ditemukan fakta bahwa sekolah SMA dan MA di Padang, Sukabumi, Cirebon, dan Surakarta memiliki kecenderungan kuat pada penanaman nilai-nilai ajaran agama yang berpaham pada radikalisme. Jaringan dari partai politik (PKS), juru dakwah organisasi keagamaan yang identik dengan paham radikalisme seperti Arrayah, HTI, pesantren kobong, Pesantren Nurul Hadid dan Al-Muwwafiq, serta kader militan dari kelompok mahasiswa LDK ikut terlibat dalam organisasi kesiswaan. Bahkan disebut-sebut jaringan Pesantren Ngruki juga ikut terlibat aktif di salah satu sekolah di Surakarta.

Mekanismenya, para aktivis tersebut sengaja diundang oleh pihak kerohanian siswa, ataupun mereka sengaja menawarkan diri untuk mendampingi para siswa dan organisasi kesiswaannya, baik dengan alasan pengembangan diri ataupun dengan alasan penguatan keagamaan. Pihak pimpinan sekolah seringkali membiarkan jaringan luar masuk, terlebih atas nama alumni, dan memberikan pengaruh keagamaannya kepada para siswa. Pertimbangan yang seringkali diberikan adalah lebih baik siswa diberikan pengaruh keagamaan ketimbang mereka terjebak pada dunia pergaulan bebas, gank motor, obat-obatan dan sebagainya. Sementara sekolah-sekolah di Tomohon memang menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada para siswanya, tetapi dalam beberapa hal lebih mengedepankan aspek keagamaan Kristen dan Katolik ketimbang aspek-aspek universal kehidupan berbangsanya. Kendati demikian, perlu dicatat bahwa beberapa pihak melakukan respons terhadap infiltrasi tersebut. Seorang guru PAI sekaligus Pembina Rohis di SMAN 1 Plumbon Cirebon, misalnya mendirikan IPNU dan IPPNU serta bekerjasama dengan Fahmina Institute dalam rangka membendung arus radikalisme tersebut. Sejauh upaya itu dilakukan dengan dukungan dan kerjasama dari kelompok moderat, terbukti berhasil. Namun yang menjadi persoalan di kemudian hari adalah, upaya seperti itu tidak terdokumentasikan secara tertulis. Sehingga ketika kepala sekolah berganti, turut berimbas kepada kebijakan yang diambil.

### ***Kuasa Negara yang Terlupakan***

Pada aspek ini, penelitian telah menggali pemahaman dan efektivitas implementasi Permendiknas atau Permendikbud dan aturan-aturan sekolah terkait pada penanaman nilai-nilai kebangsaan dan penguatan karakter siswa. Banyak sekolah di enam lokasi penelitian yang tidak atau kurang mengetahui adanya berbagai regulasi terkait organisasi kesiswaan dan persoalan nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah. Beberapa regulasi seperti (i) Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan dan (ii) Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tidak atau sangat jarang

diterima, disosialisasikan, apalagi dipraktikkan di tingkat sekolah. Demikian pula, selain kedua regulasi tersebut, ada regulasi lain yang acapkali dikaitkan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang juga belum dipahami dengan baik oleh pihak sekolah. Regulasi yang dimaksud adalah Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Persoalan tentang pembentukan karakter kebangsaan yang mampu menumbuhkan semangat keragaman dan kebinekaan sesungguhnya telah lama menjadi keprihatinan pemerintah dengan menciptakan berbagai regulasi yang menyemai kebinekaan. Regulasi terbaru berupa Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter secara jelas menunjukkan bagaimana kepala sekolah selaku satuan pendidikan merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam keseluruhan proses pendidikan peserta didik selama di sekolah, termasuk ketika mereka melakukan kegiatan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Keterlibatan publik, terutama orang tua dan masyarakat, harus tetap diletakkan dalam kerangka penguatan pendidikan karakter peserta didik. Dengan adanya Perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter ini diharapkan sekolah memiliki daya tahan saat gerakan radikal masuk ke dalam lingkungan sekolah. Sementara dari sisi pendidikan kebangsaan, dengan adanya penguatan pendidikan karakter, sikap dan pola pikir cinta tanah air bisa bertumbuh dengan lebih baik. Pesan dalam Perpres ini jelas, bahwa pendidikan tidak bisa terlepas dari kolaborasi antara sekolah, keluarga dan masyarakat. Tiga pusat pendidikan ini diharapkan mampu menjaga satuan pendidikan dari masuknya paham radikal yang masuk melalui kegiatan OSIS.

Berbagai regulasi yang mampu mengelola lembaga kesiswaan beserta muatan substansi kegiatannya sebenarnya telah ada, tetapi sayangnya hal ini belum secara maksimal disosialisasikan ataupun diberikan pengarahannya kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Selain itu, regulasi-regulasi tersebut acapkali kontradiktif antara pusat dan daerah. Para pemangku kebijakan di tingkat daerah, yang akhirnya berimbas sekolah karena berbagai sebab, seringkali mereduksi penerjemahan kebijakan menjadi sebatas aspek keagamaan semata. Hal paling utama yang menyebabkan itu adalah pandangan

dunia berupa akhlak mulia yang didominasi oleh pandangan keagamaan tertentu, yang dianggap sebagai bentuk nyata penguatan pendidikan karakter. Hal ini pada akhirnya turut mendiskriminasi kelompok minoritas.

Oleh karenanya, wajar jika pihak sekolah kemudian menerjemahkan kebijakan OSIS berupa program yang bernuansa keagamaan semata. Akhirnya juga bisa dipahami ketika sekolah membiarkan atau bahkan mengizinkan jaringan alumni ikut campur dalam pengembangan kegiatan kesiswaannya. Karena jaringan alumni tersebut membawa dalih penguatan keagamaan. Ironisnya, di beberapa sekolah tersebut ada yang merasa bangga ketika mereka mampu bisa bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu, padahal pihak tersebut telah terdeteksi memiliki kedekatan dengan paham dan gerakan radikalisme. Persoalan pengembangan kapasitas pelaku pendidikan dalam ekosistem pendidikan ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, sebab riset ini menunjukkan bahwa kadang kala karena ketidaktahuan para pelaku pendidikan di sekolah, mereka justru membuka pintu bagi masuknya paham radikal ke sekolah tanpa mereka sadari.

### ***Mereka yang Rentan di Tengah yang Bertahan***

Jika diperhatikan proses pembiaran jaringan luar bisa masuk dan ikut terlibat dalam kegiatan kesiswaan, maka hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah sangat rentan disusupi paham radikalisme. Kerentanan ini disebabkan oleh ketidakpahaman pihak sekolah dalam menerjemahkan regulasi terkait pembinaan kesiswaan dalam bentuk mekanisme dan standar operasional prosedur kegiatan dan pengembangan OSIS. Jika pun mereka telah paham dan memiliki mekanismenya, maka tidak jarang campur tangan komponen sekolah, baik yang berasal dari pimpinan sekolah, pembina, ataupun guru pada umumnya, juga menjadi alasan penting persemaian paham radikalisme tetap ada di berbagai sekolah di enam lokasi itu. Keengganan sekolah untuk menegur pihak-pihak terlibat tersebut pada umumnya didasarkan pada persoalan senioritas, rasa tidak nyaman mengganggu pertemanan/persahabatan, dan takut karena legitimasi cukup kuat dalam memberikan keputusan.

Sementara bagi sekolah-sekolah tertentu seperti SMAN 3 Surakarta, MAN 1 Sukabumi, dan lainnya, telah mengatur mekanisme yang cukup ketat dalam mengontrol kegiatan kesiswaan. Pemilihan keterlibatan dari pihak luar benar-benar dilakukan pimpinan sekolah dengan mekanisme pelaporan secara ulang alik. Pihak kerohanian siswa terlebih dahulu melaporkan ke ketua OSIS, dan ketua OSIS melakukan silang informasi dan uji kompetensi, dan setelah dianggap memenuhi syarat maka ia akan diajukan ke pimpinan sekolah. Demikian juga, pimpinan sekolah akan melakukan penelusuran terkait kecenderungan aktivis yang terlibat. Jika terdeteksi berafiliasi kepada organisasi keagamaan yang memiliki kecenderungan radikalisme, maka ia dibatalkan. Selain itu, beberapa sekolah juga mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat komunal tanpa membedakan identitas keagamaan dan kesukuannya. Praktik harmoni seperti ini sengaja dilakukan untuk menanamkan kepada para siswa bahwa toleransi dan nilai-nilai kemanusiaan lebih baik dikembangkan di dalam lingkungan sekolah, masyarakat dan keluarganya.

### ***Internalisasi Nilai Kebinekaan: Transmisi dan Penerjemahan Nilai***

Nilai-nilai kebangsaan, khususnya terkait pada penguatan kebinekaan, budi pekerti, nasionalisme, toleransi, dan keberagaman pada umumnya telah diusahakan oleh sekolah-sekolah di enam lokasi yang menjadi sampel penelitian. Mereka sebenarnya telah diikat secara jelas dengan regulasi yang mendorong nilai-nilai kebangsaan muncul dan tertanam dalam diri siswa. Berbagai kegiatan kesiswaan dan prosesnya seringkali diarahkan untuk menerjemahkan nilai-nilai kebangsaan tersebut di satu sisi. Seperti pemilihan OSIS, dengar pendapat, penghargaan kepada orang lain dan sebagainya selalu didorong pada pilar-pilar demokrasi dan kemanusiaan. Namun di sisi lain, pandangan mengenai OSIS sebagai katalisator sekolah dengan kegiatan ekstrakurikuler tak terbantahkan, yang menyebabkan sekolah, melalui pembina atau guru lainnya, mendominasi usulan program. Padahal jika diberi sedikit keleluasaan, OSIS di beberapa sekolah terbukti mampu

menginternalisasikan nilai kebinekaan. Misalnya, melalui penyelenggaraan Karnaval Kebinekaan oleh salah satu OSIS di salah satu sekolah di Cirebon.

Namun tak bisa dibantah bahwa ada kecenderungan kuat jika pihak sekolah dan OSIS lebih banyak menerjemahkan nilai-nilai kebangsaan dengan pendekatan keagamaan atau dengan pemilihan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Pilihan tersebut menyebabkan segregasi sosial terhadap siswa yang berbeda agama seringkali tampak ke permukaan. Akibatnya, pemupukan perasaan diri dan ego komunal yang bersifat pengakuan sepihak akan sangat kuat dilakukan pada siswa-siswa yang memiliki kesamaan agamanya. Mereka pun telah berusaha mengambil jarak dengan kelompok-kelompok siswa lainnya. Hal ini terlihat jelas pada ketiadaan kerjasama lintas agama, komunikasi silang budaya dan agama, persepsi tentang ketua OSIS harus seagama dengannya, dan lain sebagainya. Akhirnya, transmisi dan penerjemahan nilai kebinekaan atau kebangsaan seringkali dibatasi oleh sekat-sekat primordialisme atas nama keagamaan, dan hal ini didukung oleh respons positif dari pihak sekolah.

### ***Mencari Model Ketahanan dari Kasus-kasus di Sekolah***

Dari berbagai temuan yang terlihat pada sekolah-sekolah di enam lokasi penelitian, dapatlah dinyatakan bahwa kecenderungan kuatnya proses pengembangan dan pembentukan karakter kesiswaan dengan pendekatan keagamaan seringkali terjadi. Walaupun ia tidak selalu pada prinsip pengembangan empat karakteristik radikalisme sebagaimana disebutkan di atas, tetapi penekanan pada perspektif keagamaan yang bersifat khusus telah memberikan rasa kekhawatiran baru, yaitu menguatnya segregasi sosial berdasarkan primordialisme keagamaan di kalangan siswa. Ada semacam kecenderungan eksklusif dalam penyelenggaraan kegiatan agama, yang tanpa disadari sesungguhnya mensegregasi antar peserta didik berdasarkan agama. Segregasi ini akan mempersulit integrasi sosial di antara siswa yang berbeda agama. Bahkan, konsep toleransi sebagian besar dipahami dalam konteks segregasi ini. Dampaknya, eksklusifitas dan pengakuan kebenaran sepihak (*truth claim*) akan semakin terasa dalam pergaulan sosialnya. Selain eksklusifitas, peserta didik juga kehilangan kesempatan untuk memiliki

pengalaman perjumpaan dan berkolaborasi dengan mereka yang memiliki perbedaan keyakinan dan kepercayaan. Fenomena ini mengajak para pelaku pendidikan untuk mengembangkan model ketahanan sekolah berhadapan dengan fenomena radikalisme.

Beberapa pengembangan model ketahanan dari paham dan gerakan radikalisme pada lingkungan sekolah khususnya terkait organisasi dan kegiatan kesiswaan perlu dikembangkan. Ada beberapa model yang bisa diangkat sebagai bentuk baru ketahanan penangkal radikalisme di lingkungan sekolah. *Pertama*, pengembangan model sekolah inklusif, sebagaimana yang terjadi pada SMA 3 Surakarta menjadi penting digalakkan. Inklusivitas akan selalu didasarkan pada tuntutan sikap keterbukaan, toleransi, harmoni dan penghargaan kepada semua siswa dan semua golongan tanpa melihat latar belakang keagamaan, kesukubangsaan, dan afiliasi politiknya.

*Kedua*, pengembangan model sekolah berbasiskan pada kekuatan patron harmoni dan pluralisme. Banyak siswa di sekolah yang diteliti sesungguhnya tidak memiliki patron atau idola yang baik dalam soal toleransi dan nilai-nilai kebangsaan. Mereka kesulitan menentukan idolanya. Kalaupun ada, idola non artis, rata-rata adalah sosok yang tampil di media massa dan media sosial, khususnya terkait pada perjuangan Islam dalam versi tertentu. Aspek inilah yang bisa digarap strategis, dengan mengenalkan tokoh-tokoh moderat bagi siswa-siswa tersebut.

*Ketiga*, pengembangan model sekolah yang menjunjung tinggi kebangsaan dan nasionalisme. Walaupun tidak bergaya ala sekolah militer, pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme dapat dituangkan dalam praktik-praktik sederhana kehidupan para siswa. Penggunaan mekanisme organisasi kesiswaan dapat didorong ke arah sana.

*Keempat*, pengembangan model sekolah dengan menjadikan guru dan siswa menjadi benteng utama anti paham dan gerakan radikalisme. Mekanismenya seperti praktik *panopticon*, di mana guru dan siswa diberikan kesempatan untuk menyatakan kebenaran tentang informasi yang ada, dan informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan pendekatan persuasif yang mendidik dan mencerahkan sivitas yang terlibat.

Empat model yang tergambarkan dari kasus-kasus sekolah lokasi penelitian di atas setidaknya dapat mendorong agar sekolah, khususnya sekolah negeri kembali menjadi lembaga penting dalam pembentukan karakter anak secara holistik, yaitu penggabungan antara karakter kebangsaan dan karakter keagamaan.

Dengan demikian, sekolah tetap memiliki target pada penanaman karakter kebangsaan yang tercakup di dalamnya nilai-nilai kebinekaan, toleransi, anti-diskriminasi, anti-kekerasan, dan anti-radikalisme. Sekolah harus mampu mengedepankan nilai-nilai kebangsaan sebagaimana yang dikuatkan dengan berbagai kebijakan pemerintah. Penerjemahan kebijakan yang mengedepankan pada nilai keagamaan saja, khususnya pada agama-agama tertentu, harus dihindarkan semaksimal mungkin. Terlebih nilai keagamaan yang mengarah pada paham radikalisme yang mampu menciptakan empat karakteristik, sebagaimana dijabarkan di atas, bagi para siswanya.

Akhirnya, penelitian ini telah berhasil mengungkap fenomena penanaman paham radikalisme di lingkungan sekolah di satu sisi, dan di sisi lain mampu mengungkap proses dan capaian penanaman nilai-nilai kebangsaan. Harapan ke depannya adalah bahwa melalui penelitian ini ada ikhtiar pemerintah dan seluruh pihak untuk merevitalisasi kebijakan organisasi kesiswaan, sehingga dapat membatasi kecenderungan pengembangan paham radikalisme di sekolah. Penelitian ini juga dapat menjadi pemantik positif dalam menentukan langkah-langkah lanjutan bagi semua pihak yang berusaha melakukan upaya penanaman nilai-nilai kebangsaan pada dunia pendidikan demi kehidupan berbangsa yang damai, sejahtera, aman, dan harmonis. Semoga.

## STUDI KASUS 1

# Menuju Pesantren Inklusif: Potret Pengelolaan Pesantren Sekolah dalam Rangka Menangkal Radikalisme

*Hadiansyah Yudistira*

Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Jawa, pesantren memiliki peran strategis dalam proses transformasi sosial-keagamaan di Indonesia. Pesantren telah memberikan sumbangsih yang sangat penting dan krusial sebagai *transmitter* ilmu-ilmu Islam, regenerasi dan kaderisasi ulama, pemeliharaan keilmuan (*turats*) dan tradisi Islam, bahkan ekspansi dan pembentukan masyarakat muslim santri.<sup>1</sup>

Pada awal berdirinya, pesantren berhasil menanamkan (internalisasi) nilai-nilai kesederhanaan, keikhlasan dan kemandirian ---sebagai stereotipe yang khas--- terutama pada masyarakat pedesaan. Pesantren juga mampu menjalankan misi dakwahnya dengan baik. Bahkan, ia juga dapat menunjukkan eksistensinya, tidak hanya sebagai institusi pendidikan *an sich*, namun juga memainkan peran sebagai lembaga ‘humanis’.<sup>2</sup>

Dalam perjalanannya, banyak pengalaman pahit yang dirasakan pesantren. Berbagai tekanan, baik dalam bentuk labelisasi, monitoring, maupun donasi yang di dalamnya tersirat adanya ‘titipan kepentingan’. Tak berhenti di situ, serangan dari kelompok-kelompok Islam lain pun tak jarang turut mendiskreditkan. Akan tetapi, ----pada derajat tertentu--- keadaan ini justru semakin memperkokoh keberadaan lembaga ini. Pengalaman spiritual yang bersandar pada ortodoksi dan ortopraksi di lingkungan pesantren, seolah menjadi kekuatan tersendiri bagi terbentuknya masyarakat santri yang patuh, kokoh, dan humanis.

---

1 Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*, Cetakan I (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 184-185.

2 Bahtiar Efendi, “Nilai Kaum Santri”, dalam M. Dawam Raharjo (ed), *Pergulatan Dunia Pesantren*, Cetakan Pertama, (Jakarta: P3M, 1985), hlm. 49.

Kini, tantangan pesantren jauh lebih pelik dan kompleks. Era globalisasi --dengan dampak positif dan negatifnya-- telah mengubah banyak hal. Paradigma masyarakat tentang *way of life* pun mengalami pergeseran, termasuk di dalamnya pandangan mengenai kiprah pesantren di era milenial. Pesantren benar-benar menghadapi situasi dilematis, di satu sisi, menghadapi gencarnya serbuan berbagai faham yang berkembang luas di masyarakat. Sebut saja misalnya, sekulerisme, liberlasime, pragmatisme, individualisme dan hedonisme yang mengakar kuat dalam arus kapitalisme global.<sup>3</sup>

Sementara di sisi lain, muncul fenomena baru yang cukup massif di kalangan umat Islam. Para pakar menyebutnya dengan istilah ‘radikalisme’.<sup>4</sup> Faham ini berkembang cukup signifikan akhir-akhir ini. Bahkan menguat semenjak pecahnya konflik di Timur Tengah (Irak, Libya, Yaman, Syiria serta Palestina) dan beberapa wilayah di Negara-negara Asia (Afghanistan, China, Filipina dan Myanmar). Puncaknya ketika muncul gerakan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syiria*) di Irak pada 29 Juni 2014. Disadari atau tidak, fenomena ini membawa pengaruh cukup kuat. Sehingga tak sedikit umat Islam di Indonesia yang terinspirasi, menabur benih-benih konflik dengan mewacanakan radikalisme melalui konsep ‘Jihad’ yang terstruktur dan sistematis. Tak pelak, implikasinya, pesantren pun dituduh sebagai sarang teroris dan penyebar radikalisme dan fundamentalisme Islam.<sup>5</sup>

Ancaman radikalisme di Nusantara memang bukan isapan jempol semata. Perlahan tapi pasti, faham ini mulai menggema di mana-mana akhir-akhir ini. Isu penegakan syari’ah, khilafah, jihad dan ‘takfiri’ digadang-gadang, bukan hanya pada wilayah diskusi dan pengajian, lebih dari itu sudah mulai menyusup pada gerakan massa. Keadaan ini jika dibiarkan, tentu akan membahayakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang relatif sudah mapan<sup>6</sup>.

---

3 Pip Jones, Liz Bardbury, dan Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-teori Sosial dari Teori Fungsionalise hingga Post-Modernisme*, Edisi Revisi (Terj), (Jakarta; Yayasan Obor, 2016), hlm. 249.

4 Zainudin Fananie, Atiqa Sabardila dan Dwi Pumanto, *Radikalisme Keagamaan* (Asia Foundation, 2002), hlm. 1.

5 Endang Turmuzdi dan Riza Sihbudi (ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hlm. 133.

6 Herdi Sahrasad dan Al-Chaidar, *Fundamentalisme, Terorisme dan Radikalisme; Perspektis Atas Agama, Masyarakat dan Negara*, (Create Space Independent Publishing Platform, 2016).

Dalam konteks di atas, pesantren mau tidak mau harus ‘hadir’, menjawab berbagai isu yang muncul. Tugas pesantren menjadi tak mudah. Pengkajian atas teks-teks liturgis (keagamaan) harus benar-benar dilakukan secara komprehensif dan holistik. Sehingga tidak muncul tafsiran yang reduktif dan distortif. Idealnya, pesantren harus mampu melakukan kajian inter-disipliner (bukan hanya ilmu agama, namun juga ilmu umum lainnya).

Ada beberapa model pengembangan pesantren yang selama ini menjadi acuan. Pertama, Pesantren Salafi. Kedua, Pesantren Khalafi. Ketiga, Pesantren Kilat. Keempat, Pesantren Terintegrasi.<sup>7</sup> Pilihan atas desain ini tentu sangat beralasan. Namun yang pasti, apapun modelnya, dalam situasi perubahan sosial, ekonomi dan politik yang cenderung berubah-ubah, integritas dan inter-dependensi pesantren benar-benar diuji. Jika tidak, pesantren hanya akan menjadi subordinasi kekuasaan dan menjadi alat kepentingan kelompok tertentu. ‘Khittah’ pesantren tidak boleh tergerus oleh pragmatisme sesaat, dalam bentuk pemberian ijazah/*syahadah* kepada para santrinya, tanpa memedulikan lagi *out put* yang dihasilkan. Ujung-ujungnya, pesantren tidak mampu lagi mencetak generasi yang ‘tercerahkan’ (*‘tafaqquh fi al-ddien’*, berakhlakul karimah dan berwawasan luas).

Oleh karenanya, perubahan mutlak dilakukan. Mulai dari sistem pengelolaan, orientasi, dan spesialisasi keilmuan (struktur kurikulum). Di antara terobosan yang perlu mendapat perhatian serius dari para *stakeholder* dan pemegang kebijakan, yakni perlunya keberadaan pesantren di sekolah. Di era revolusi digital ini, siswa begitu mudah mengakses berbagai layanan informasi, sehingga sangat rentan terpapar faham-faham keagamaan

---

7 Beberapa pakar membagi pesantren menjadi empat tipologi : 1) Pesantren salafi, yaitu pesantren yang tetap mempertahankan pelajaran dengan kitab-kitab klasik dan tanpa diberikan pengetahuan umum. Model pengajarannya pun sebagaimana yang lazim diterapkan dalam pesantren salaf yaitu dengan metode sorogan dan wetonan/balagan; 2) Pesantren Khalafi yaitu pesantren yang menerapkan sistem pengajaran klasikal (*madrasa*) memberikan ilmu umum dan ilmu agama serta juga memberikan pendidikan keterampilan; 3) Pesantren Kilat yaitu pesantren yang berbentuk semacam training dalam waktu relatif singkat dan biasa dilaksanakan pada waktu libur sekolah. Pesantren ini menitik beratkan pada keterampilan ibadah dan kepemimpinan. Sedangkan santri terdiri dari siswa sekolah yang dipandang perlu mengikuti kegiatan keagamaan dipesantren kilat; 4) Pesantren terintegrasi, yaitu pesantren yang lebih menekankan pada pendidikan vocational atau kejuruan sebagaimana balai latihan kerja di Departemen Tenaga Kerja dengan program yang terintegrasi. Sedangkan santri mayoritas berasal dari kalangan anak putus sekolah atau para pencari kerja. Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Proyek Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah pada Pondok Pesantren, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, (Jakarta : 2003), h. 24-25.

yang menyimpang, termasuk radikalisme di dalamnya. Doktrin teologis – syurgawi-- yang ditawarkan, bisa menjadi ‘mesiu’ yang cukup mematikan. Dalam kondisi psikologis siswa yang belum stabil, hadirnya pesantren di sekolah —dengan bimbingan para kyai/ustadz yang berwawasan luas dan mumpuni-- kiranya bisa menjadi solusi alternatif untuk menangkal berbagai faham intoleran yang berakar pada ideologi radikal.

Harus diakui, pengelolaan pesantren di sekolah, nampaknya belum begitu populer. Namun di beberapa lembaga pendidikan swasta, justru sudah banyak yang berikhtiar ke arah itu. Konkretnya, mereka mendirikan asrama/pemondokan di lingkungan sekolah, dengan menjalankan sistem pesantren terpadu. Ini jelas berbanding terbalik kondisinya dengan sekolah-sekolah negeri pada umumnya. Kebijakan pemerintah yang belum memprogramkan pengelolaan pesantren di sekolah, tampaknya menjadi kendala utama. Dalam pengertian, belum ada legalitas secara yuridis-formalnya.<sup>8</sup> Belum lagi, adanya stigma lama terhadap pesantren, yang cenderung dinilai tertutup, tradisional dan kaku (*rigid*). Terlebih, minimnya dukungan *stakeholder* dan masyarakat (orang tua siswa), makin mempersulit langkah untuk mewujudkan cita-cita ideal tersebut.

Sejatinya, pengelolan pesantren di sekolah bisa dilakukan secara gradual dan multi-desain. Dengan kata lain, bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Pertama, sekolah membangun gedung asrama/pemondokan bagi siswa secara mandiri, sebagaimana dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta dengan menganut sistem *boardingschool*. Kedua, mengadakan kontrak kerja antar instansi terkait. Misalnya saja, sekolah —dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-- bekerja sama dengan Kementerian Agama yang secara institusional menangani penyelenggaraan kepesantrenan. Ketiga, sekolah menitipkan peserta didiknya di pesantren terdekat, dengan tetap melakukan monitoring berbagai kegiatan siswa. Keempat, menyelenggarakan pesantren kilat atau mengadakan kajian-kajian keagamaan (*religious study*), baik secara rutin (harian, mingguan atau bulanan), maupun insidental (hari-

---

8 Menteri Pendidikan Nasional, *Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003*, tentang SISDIKNAS, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), h. 5-6.

hari keagamaan tertentu), dengan mendatangkan beberapa narasumber, yang otoritas keilmuannya tidak diragukan.

Begitu pula terkait dengan masalah strategi, pendekatan dan metode pembelajaran pesantren sekolah. Pada prinsipnya bisa dilakukan lebih leluasa dengan cara adopsi, adaptasi dan seleksi dari beberapa pesantren yang ada. Bisa juga melakukan terobosan baru melalui berbagai inovasi dan elaborasi. Namun, intinya tetap mensinergikan antara kajian khasanah keislaman (tauhid, fiqih, akhlak, tafsir, hadis, ilmu bahasa dan lain-lain), kemodernan (ilmu pengetahuan dan teknologi), dan berbagai kearifan lokal (tradisi dan budaya). Dengan begitu, diharapkan akan lahir generasi (siswa/santri) yang relijius, toleran dan berfikiran luas (*open minded*).

Dengan dimensi kulturalnya, pesantren bukan saja harus memenuhi kebutuhan kognitif, afektif dan konatif para santri, namun lebih dari itu harus mampu menanamkan faham inklusif ---dengan perspektif keagamaan yang lebih luas dan luwes-- sebagai nilai instrinsik dalam kehidupan nyata. Sekaligus menyadarkan kepada para siswa, betapa pentingnya hidup harmoni, mau berdampingan dan saling menghormati dengan kelompok lain di negeri yang sangat heterogen ini. Ajaran 'tasamuh' dalam Islam, tidak boleh terdegradasi menjadi primordialisme sempit yang mengarah pada faham ekstrem kanan atau kiri. Ringkasnya, pesantren sekolah harus mampu menghadirkan 'wajah Islam yang ramah' namun tetap kritis terhadap berbagai isu dan persoalan yang muncul baik dalam skala lokal maupun global.

Di wilayah kerja Kementerian Agama, rintisan pengelolaan pesantren sekolah sebenarnya sudah berjalan dan bisa dikatakan cukup berhasil. Ini dapat dilacak dari lahirnya sistem pendidikan terpadu yang pernah dilaksanakan pada sistem Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) yang diprakarsai oleh Menteri Agama RI (H. Munawwir Sadzali) melalui KMA No.57 tertanggal 30 April 1987, lalu didirikan MAPK di lima tempat, yaitu :

No	Madrasah	Lokasi
1	MAN Darussalam	Ciamis, Jawa Barat
2	MAN 1 Yogyakarta	DI Yogyakarta
3	MAN Ujung Pandang	Ujung Pandag, Sulsel
4	MAN Kotabaru	Padang Panjang, Sumbar
5	MAN Jember	Jember, Jawa Timur

Pada Tahun 1993, Menteri Agama RI (Dr. H. Tarmizi Taher) saat itu, melalui KMA No. 371 tertanggal 22 Desember 1993, merubah nama MAPK menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Penamaan MAK ini untuk membedakan dengan nama MA (Madrasah Aliyah). Struktur kurikulum MAK didominasi pelajaran agama Islam, berbeda dengan MA yang struktur kurikulum didominasi pelajaran umum. Perubahan nama ini, diikuti dengan perubahan struktur kurikulum berdasarkan KMA No. 374 tertanggal 22 Desember 1993 tentang Kurikulum MAK.

Perkembangan kebijakan pemerintah selanjutnya, dalam hal ini Kementerian Agama terlihat semakin jelas, dengan diterbitkannya Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1293 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Keagamaan di Madrasah Aliyah. Semua program yang dilaksanakan di Madrasah, khususnya, Program Keagamaan dalam bidang pembinaan kehidupan keagamaan diupayakan untuk memunculkan kesadaran, partisipasi dan tanggung jawab peserta didik sebagai calon pemimpin di masa depan yang memiliki pemikiran terbuka, moderat, toleran serta berwawasan ke-Indonesiaan<sup>9</sup>

Meskipun masih jauh dari konsep ideal mengenai pengelolaan pesantren sekolah, namun dengan tekad yang kuat, pada tanggal 1 Juli 2010 MAN 3 Sukabumi (MAN Surade) mendirikan Pondok Pesantren Ulul Albab, seiring dengan dibukanya Jurusan Ilmu Agama Islam (IAI) untuk pertama kalinya. Lahirnya pesantren ini didasari cita-cita mulia yakni menyiapkan wadah pembinaan pendidikan keagamaan siswa/santri dalam menghadapi arus

---

9 Kementerian Agama, *Keputusan Direktorat Kementerian Agama Nomor 1293 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Keagamaan di Madrasah Aliyah* (Kementerian Agama, Jakarta, 2016), hlm.8- 9.

globalisasi yang cenderung menggerus nilai-nilai moralitas dan spiritualitas. Tujuan ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Nurcholis Madjid.<sup>10</sup>

Yang tak kalah penting, dengan segala potensi yang dimiliki (SDM, Sarana dan Prasarana serta Struktur Kurikulum), Pesantren Ulul Albab MAN 3 Sukabumi (MAN Surade), berupaya menangkal berbagai paham ekstrem dan radikal yang sangat mencemaskan. Upaya ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai ajaran Islam kepada para santri/siswa, yang berorientasi pada konsep: *tawassuth* (moderasi), *tawazzun* (harmoni), *tasyawwur* (musyawarah) dan '*Adil* (proporsional dalam beraksi dan bereaksi).

Pesantren Ulul Albab MAN 3 Sukabumi (MAN Surade) telah melakukan berbagai langkah strategis, agar para santri/siswa tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu terkait SARA, yang bisa menyulut konflik. Misalnya saja dengan mengadakan berbagai kegiatan rutin maupun insidental, di antaranya: *kulliyatul 'am* (stadium general), *Bahtsul Masa'il* (Studi Kasus), *halaqah ilmiah* (diskusi panel) serta bimbingan dan konsultasi khusus. Adapun tema yang diangkat seperti : 1) Konsep Jihad dalam Islam; 2) Toleransi menurut ajaran *Ahluss-Sunnah wal Jama'ah*; 3) Islam dan Kearifan Lokal; 4) Wajah-wajah Islam di Indonesia dan 5) Islam; Agama *Rahmatan Lil'alamin*. Pada akhirnya, ke depan, pesantren Ulul Albab MAN 3 Sukabumi (MAN Surade) diharapkan bisa menjadi lembaga strategis dan sinergis baik dalam pengkajian keilmuan keislaman maupun ilmu-ilmu lainnya, secara teoritis maupun secara praktis.

---

10 Menurut Nurcholish Madjid, tujuan pembinaan santri pada pondok pesantren adalah "membentuk manusia yang memiliki kesadaran tinggi bahwa ajaran Islam merupakan nilai-nilai yang bersifat menyeluruh. Selain itu produk pesantren diharapkan memiliki kemampuan tinggi untuk mengadakan respons terhadap tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu. Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, ( Jakarta : Paramadina, 1997), h. 6.

## STUDI KASUS 2

# Potret Toleransi dari Rohis, IPNU dan IPPNU

*Koidah*

(Guru SMAN 1 Plumbon – Cirebon)

Realitas keberagaman di Cirebon tidak bisa ditolak, karena telah menjadi bagian dari kultur masyarakat Cirebon. Hingga perkembangannya saat ini, kondisi di Cirebon sangat bergeser dari kesan ketenteraman, dengan beberapa kali pemberitaan media tentang pengeboman yang dilakukan Syarif di Masjid Kapolresta Kota Cirebon beberapa tahun silam, penggerebekan para remaja pelaku percobaan bom di beberapa daerah, termasuk di Ibu Kota Jakarta yang pelakunya adalah remaja asal Wilayah tiga Cirebon.

Berbicara tentang realitas keberagaman di Cirebon, tentu saja tidak akan terlepas dari peran pendidikan, baik itu pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan agama ataupun sejenisnya. Sebagai seorang guru, miris rasanya melihat kenyataan yang terjadi di kalangan remaja saat ini yang haus akan nilai-nilai agama, sehingga para remaja ini memuaskan dahaga pencarian ilmunya melalui media sosial. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan remaja terjebak dalam paham intoleransi. Pertama ialah desakan ekonomi, yang sangat berpengaruh terhadap psikologi remaja dalam memandang agama. Kedua, remaja berada pada sebuah fase perkembangan kematangan seorang individu dalam memilih jalan hidup, prinsip, hobi, berkumpul dengan teman-teman (*nge-genk*) dan kadangkala sedikit nyeleneh dengan mempertanyakan apa agama yang saya anut. Selain perbedaan pandangan hidup, pola pikir, gaya dan *style* remaja lebih cenderung berada pada posisi gamang, galau, gelisah, gundah dan setumpuk hayalan-hayalan lain yang menjadi beban, pengaruh, hasrat, rendahnya tingkat kepercayaan diri, dan belum matangnya proses berpikir, sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi.

Beberapa faktor penyebab lain yang ikut memengaruhi terjadinya intoleransi pendidikan di Cirebon adalah kebijakan Daerah dan minimnya pengawasan Pemerintah Daerah terhadap kurikulum dan praktiknya di lapangan. Sehingga pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Departemen Agama dan Pemerintah Daerah belum dilakukan secara maksimal, terarah, berkesinambungan dan terkontrol.

Cirebon merupakan sebuah kota pelabuhan yang terkenal dan dihuni oleh banyak orang yang berasal dari berbagai latar belakang keyakinan dan adat budaya yang beragam. Perkembangan dan pembangunan yang terjadi di Cirebon terus mengalami peningkatan, sebagaimana yang terjadi saat ini. Tak jarang Cirebon bahkan disebut dengan kota seribu mall, melihat banyaknya pembangunan infrastruktur yang terjadi di Cirebon yang kebanyakan adalah tempat perbelanjaan (Mall). Hal tersebut tentunya membawa dampak positif sekaligus negatif pada saat yang sama. Dampak lainnya adalah, belum siapnya sumber daya manusia lokal dalam menghadapi perkembangan Cirebon saat ini.

Serba-serbi kemudahan yang disajikan, menjadikan adanya pergeseran nilai-nilai, terutama terhadap kalangan anak muda dalam memandang sesuatu. Pemuda sebagai embrio bangsa di usianya masih sangat rentan terhadap berbagai hal baru yang masuk. Pemuda lebih banyak melakukan sesuatu yang dianggapnya menyenangkan dan tidak menyusahkan. Pemuda merasa bahwa dirinya ingin memiliki kebebasan, pendapatnya ingin selalu didengar dan dilaksanakan, nasihat-nasihat yang disampaikan kepada mereka jika dirasa tidak senada, maka dianggap sebagai bentuk pembatasan diri untuk berkembang, bahkan dianggap bahwa orang tua telah mengebiri kebebasan mereka untuk berkembang lebih luas lagi. Segala sesuatu yang disajikan serba instan dan mudah menjadikan anak muda malas dan enggan untuk melakukan sesuatu. Kemalasan tersebut kemudian dilegitimasi dengan istilah-istilah kekinian, seperti kudet, tidak modern, lama dan kuno. Dimulai dari dasar-dasar pemikiran inilah, remaja membangun suatu kerangka berfikir untuk melihat dan menilai sesuatu dari eksistensi yang nampak semata, yang tidak jarang malah berujung pada perilaku diskriminasi, intoleran, bahkan bisa juga

mengarah pada perilaku radikalisme. Nilai-nilai yang sebenarnya terbentuk secara tidak sadar tersebut menjadi sangat berpengaruh dan menjadi suatu hal yang biasa karena telah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk riil dari konsep tersebut sangat berbahaya, apalagi jika dibumbui dengan topik atau dalih agama. Karena agama, kepercayaan, adat dan budaya adalah satu hal terpenting dalam masyarakat yang hidup dan pasti ada. Istilah-istilah tersebut sangat sensitif di kalangan masyarakat.

Banyak pemuda yang terjebak dalam ideologi radikal melalui indoktrinasi dari luar dengan dalih ketaatan, sudah dekatnya kiamat, atau jaminan ke surga.. Doktrin-doktrin yang tidak benar terkait agama dengan kerangka berfikir yang sudah dimiliki tadi tentunya sangat memudahkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan para pemuda melakukan aksi diskriminasi dan radikalisme.

Sangat disayangkan pula bahwa anomali yang berkembang dimasyarakat, khususnya di SMANegeri 1 Plumbon saat itu, masih banyak yang berpandangan bahwa pendidikan anak sampai tingkat SMA sudah sangat cukup. Untuk apa berlama-lama sekolah? Yang penting adalah si anak bisa segera bekerja menjadi buruh pabrik, penganyam rotan, pegawai indomaret dan alfamart, SPG, pabrik headset dan lainnya, yang penting berpenghasilan. Tentu saja bukan hal yang mudah untuk mengubah pandangan sempit tersebut. Namun perombakan dan pembongkaran pola pikir ini menghasilkan berbagai respon yang cukup positif. Bahkan respon positif ini juga ditunjukkan dikalangan sekolah sendiri.

Rohis di SMAN 1 Plumbon, tidak jelas kapan didirikan pertama kali karena tidak ada data valid yang bisa dijadikan sebagai rujukan atas munculnya ekstrakurikuler keagamaan ini. Pada tahun 2010, Kepala Sekolah pada saat itu, Drs. H. Rahman menunjuk penulis sebagai guru agama, dan memberikan Surat Tugas kepada penulis sebagai Pembina Rohis, yang bertugas sebagai perpanjangan tangan Kepala Sekolah untuk menemani siswa-siswa anggota Rohis. Sejak tahun 2010 inilah baru dirasa keberadaan dari Rohis SMA Negeri 1 Plumbon.

Pada awal ajaran tahun baru, tahun pelajaran 2010/2011, penulis pernah didatangi oleh seorang muslimah dari lembaga X dengan membawa setumpuk

kurikulum kajian tentang keislaman; kurikulum tersebut berisi tentang kajian Khilafah, Khilafiyah, Negara Islam dan cara bergaul dalam Islam. Beberapa kali ia memaksa ingin membantu program sekolah melalui program dan kegiatan ekstrakurikuler Rohis, dengan mengirim hadits-hadits *dhoif* ke email pribadi penulis, memaksa bahwa jika tidak mau menerima tawaran maka akan dilaporkan ke Kepala Sekolah karena tidak mau membantu menegakkan nilai-nilai dan panji Islam, apalagi penulis adalah Guru Mata Pelajaran Agama Islam dan Pembina Rohis. Alasan pemaksaan lain yang diluncurkannya adalah dengan meyakinkan bahwa pada tahun 2009 pernah dilakukan kajian keislaman serupa di SMAN 1 Plumbon, dan katanya berhasil melalui alm. Bapak Drs. H. Mustahdi.

Ekstrakurikuler roh is adalah organisasi pelajar yang ada di sekolah setingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Tidak jelas kapan ada dan berdiri di Indonesia. Pengetahuan penulis terkait eksistensi roh is terbatas pada 'kumpulan siswa yang ingin mengembangkan pengetahuan keagamaan sebagai rasa ketidakpuasan pembelajaran agama di sekolah tersebut'. Namun, roh is dalam perkembangannya sering dijadikan sebagai alat dan wadah penanaman nilai-nilai intoleransi di Cirebon.

Mendapat mandat dari kepala sekolah untuk mengawal siswa di ekstrakurikuler Rohis bukanlah persoalan yang mudah dilakukan. Apalagi dengan kondisi lingkungan di sekolah tersebut yang cenderung pasif, seperti tidak adanya kegiatan yang bisa dilakukan di luar sekolah, dan para siswa sengaja tidak diperbolehkan aktif dengan dunia luar. Situasi tersebut pada akhirnya mendorong penulis sebagai Pembina Rohis agar prestasi yang ada di dalam masing-masing siswa, minimalnya anak-anak roh is, bisa dikembangkan di luar sekolah dengan prestasi yang maksimal. Apalagi jika melihat kembali pada fakta bahwa tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, serta sumber daya manusia yang rendah dalam memandang pentingnya lembaga pendidikan hanya sebagai sarana yang mumpuni untuk persiapan mencari nafkah. Sebagaimana data yang didapat dari angka bimbingan konseling (BK), dimana alumni SMAN 1 Plumbon masuk dalam kategori pemasok terbesar

pekerja di pabrik-pabrik tekstil di sekitar sekolah, dan pabrik rotan di sekitar sekolah sebagai buruh pabrik dan penganyam rotan.

Faktor-faktor itulah diantaranya yang memengaruhi dorongan penulis terhadap proses pendobrakan di sekolah tersebut. Adapun strategi advokasi yang dilakukan penulis untuk menekan angka putus sekolah setelah lulus SMA salah satunya adalah dengan melobi IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk bisa memasukkan lulusan SMAN 1 Plumbon pada program beasiswa yang tersedia.

Selain faktor yang disebutkan di atas, kondisi ekonomi keluarga siswa pada saat itu juga sangat memengaruhi kondisi dan lingkungan sekolah, termasuk kebijakan yang berlaku di sekolah. Penulis, dalam perjalanannya, mencari strategi advokasi yang bisa digunakan sebagai alat intervensi terhadap Rohis untuk memotong mata rantai pergerakan doktrin nilai-nilai intoleransi; yang dengan sengaja dikembangkan di kelompok-kelompok kecil rentan yaitu remaja yang terwadahi dalam Rohis.

Realitas gejala intoleransi lebih banyak terlihat saat itu, sehingga penulis mengambil inisiatif untuk menggunakan strategi advokasi dengan menggunakan jejaring lembaga-lembaga di luar sekolah, demi memotong jaring-jaring dan embrio intoleransi dalam pendidikan.

Masalahnya, intoleransi dalam pendidikan terus berkembang dengan suburnya, karena pemangku kebijakan tidak memberikan pengawasan dan penekanan secara maksimal. Berangkat dari fakta tersebut, penulis meyakinkan diri jika impian kita adalah ingin memotong rantai intoleransi dalam pendidikan, maka diperlukan wadah sebagai alat untuk mengintervensi siswa secara massif dan terstruktur. Karenanya dipilihlah Rohis sebagai alat memberikan intervensi terhadap siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Plumbon. Strategi inilah yang dianggap oleh penulis sebagai cara yang paling mudah, karena siswa seumur kelas X-XII masih sangat rentan terdoktrin nilai-nilai intoleransi. Ditambah dengan kondisi keluarga anggota Rohis yang berlatar belakang ekonomi sangat rendah, kondisi sumber daya manusianya pun sangat rendah, latar belakang pendidikan yang rendah, *broken home*, buruh tani dan pabrik, satpam, yatim, piatu, pemulung,

penganyam rotan, supir dan pekerjaan yang tidak bisa menguatkan anak-anaknya dalam pendidikan.

Penulis akhirnya berpikir dan mencari solusi, setelah melihat beberapa masalah yang terjadi di sekolah, dengan sudut pandang ekstrakurikuler Rohis sebagai wadah yang akan diintervensi untuk menekan nilai-nilai intoleransi yang berkembang. Penulis memilih beberapa strategi, dengan melibatkan lembaga-lembaga lain di luar SMA Negeri 1 Plumbon; seperti Fahmina Institute dengan programnya SETAMAN dan Ready dan organisasi masyarakat seperti IPNU, IPPNU, PMII, PELITA (Pemuda Lintas Iman dan Agama), Departemen Agama Kabupaten Cirebon dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) IAIN Syekh Nurjati.

Beberapa pilihan berjejaring inilah yang digunakan sebagai strategi advokasi, dengan melibatkan anak-anak Rohis dalam kegiatan di dalam dan di luar sekolah, dengan tujuan untuk menggali pemikiran pelajar yang kritis, reflektif dan solutif dalam penanganan konflik sosial, juga Mmelibatkan, mengarahkan dan mendorong mereka dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga di luar SMAN 1 Plumbon, dengan tujuan agar kreatifitas dan potensi dalam diri siswa mampu dieksplor ke luar.

Lembaga pendidikan selama ini adalah tempat yang strategis sebagai media dalam menyebarkan nilai toleransi dan keberagaman. Karena sekolah merupakan tempat bagi remaja untuk menempa ilmu pengetahuan dan wawasan. Namun, lembaga pendidikan formal, informal dan non-formal juga sangat sarat dengan penyebaran intoleransi. Paling tidak, melalui lembaga pendidikan tersebut, nilai toleransi dan keragaman dalam menghargai kebinekaan dapat dirajut dengan kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan ekstrakurikuler.

Dalam menghadapi tuntutan kondisi zaman serta pembangunan yang semakin pesat ini, pendidikan dituntut untuk dapat menciptakan manusia-manusia yang berkualitas. Dalam hal ini, hasil yang diharapkan tercipta bukan hanya kualitas dari segi intelektual saja, melainkan juga dari segi religiusnya. Hal demikian dikarenakan pendidikan sekolah formal berlangsung hanya secara formal. Artinya baik kegiatan, tujuan pendidikan, materi, dan bahan ajar, serta metode penyampaiannya telah diprogram secara jelas dan

diterangkan dalam seperangkat aturan atau pegangan yang disahkan. Semua itu bertujuan agar kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dapat berjalan dengan lancar dan teratur, serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Karenanya, untuk melenturkan pembentukan diri yang telah dilakukan melalui serangkaian pembelajaran yang sudah sangat sistematis tersebut, maka perlulah mengikuti kegiatan intra yang mendukung konsep berfikir remaja yang kritis dan reflektif.

Dalam rangka mengintervensi rohis, penulis menggunakan cara dengan membangun sebuah komitmen melalui hutang ilmu ke lima generasi ke bawahnya, yang pertanggung jawabannya lebih pada tanggungjawab pribadi. Kegiatan Rohis pada saat itu tidak jauh dari kajian kitab kuning *Safinatunnajat*, yang diajarkan oleh para kakak kelas XII ke kelas XI dan kelas X. Selain itu juga ada pengembangan kreatifitas seni melalui musik hadroh dengan nama Group *Hadroh Babbul Jannah*.

Kegiatan lain yang dilakukan juga berkaitan dengan kajian kontekstual tentang ayat-ayat toleransi, keberagaman, kebebasan berkeaktifitas, dan melakukan bedah buku yang ditulis oleh bapak Mujahiddin Nur berjudul "Bocah yang mengislamkan ribuan orang". Dalam kegiatan ini pula, Rohis SMA Negeri 1 Plumbon mengundang delegasi dari setiap anggota Rohis dan OSIS untuk mengikuti acara tersebut, juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan seluruh anggota rohis dan OSISSMA di Kota dan Kabupaten Cirebon. Semua kegiatan Rohis berupa kajian kitab kajiannya dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jum'at. Sementara Sabtu dan Minggu khusus untuk kegiatan kreatifitas seni. Strategi yang dilakukan saat itu agar intoleransi bisa ditekan adalah dengan mengikutsertakan siswa ke perlombaan-perlombaan yang ada di Cirebon. Misalnya Sapta Lomba yang dilaksanakan oleh Departemen Agama Kabupaten Cirebon sebagai Hari Bakti Departemen Agama. Lomba-lomba yang dilaksanakan di sana adalah lomba Sholat, lomba Kaligrafi, lomba Qori, lomba Hadroh, Cerdas Cermat PAI, Pidato, dan lain-lain. Keikutsertaan pada lomba ini membuahkan prestasi siswa yang diraih pada tahun 2011 oleh Rohis SMAN 1 Plumbon yang berhasil meraih Juara 3 di bidang Qori (Siti Nurjanah).

Seperti yang sudah dilakukan di SMAN 1 Plumbonsejak 2010, Rohis dijadikan wadah untuk penanaman nilai-nilai toleransi yang diterapkan baik melalui kegiatan maupun buku-buku bacaan. Kemudian pada tahun 2012, Rohis mengadakan pembentukan Pengurus Komisariat (PK) IPNU-IPPNU sebagai terobosan untuk lebih memperdalam nilai-nilai toleransi, khususnya dikalangan remaja, juga menyebarkan nilai toleransi dan keragaman dalam mengokohkan kebinekaan yang dimasukkan kedalam organisasi ekstrakurikuler Pramuka, PMR, OSIS dan lain-lain.

Pembentukan PK IPNU-IPPNU di SMAN 1 Plumbon juga merupakan terobosan awal agar masyarakat sipil dapat masuk ke wilayah sekolah negeri. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti seminar yang berisikan pemahaman mengenai kepemimpinan, kebinekaan, radikalisme, serta nilai-nilai kebangsaan. Diadakan pula *youth camp* yang didalamnya berisikan materi-materi tentang toleransi terhadap perbedaan, diantaranya pemahaman tentang konsep-konsep pluralisme, dengan mendatangkan pemateri dari berbagai *background* aliran maupun agama yang berbeda, seperti Ahmadiyah, Kristen dan Yahudi. Selain itu juga berisikan materi ke-ASWAJA-an dan ke-Nu-an serta pemahaman sebagai pemimpin dan pemilih pemula itu seperti apa.

Salah satu cara ini dilakukan dengan harapan agar kita bisa memetakan isu dan kekuatan toleransi dan intoleransi pada remaja yang bersekolah di level sekolah menengah pertama dan atas di Kabupaten Cirebon. Dengan cara ini pula penulis berharap bisa mendapatkan sejauh mana tingkat pemahaman remaja usia sekolah di Kabupaten Cirebon tentang toleransi dan intoleransi, sikap menghargai perbedaan dan nilai kebinekaan yang dimiliki remaja tingkat sekolah, serta seberapa besar mereka mencintai Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tentu saja, kegiatan ini tidak hanya menasar remaja tingkat sekolah, melainkan juga melibatkan guru-guru yang selama ini mendampingi remaja tingkat sekolah tersebut. Target minimal dari kegiatan ini adalah keterlibatan Pembina dan Pelatih Ekstrakurikuler, Wali Kelas, Guru Mata Pelajaran PKn, Pelajaran Agama dan Budi Pekerti, Pelajaran Sejarah dan Pelajaran Bahasa

Indonesia. Utamanya, kegiatan ini menysasar siswa di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan mahasiswa semester 1-3.

Sekitar September 2012, penulis memutuskan untuk membentuk Pengurus Komisariat (PK) IPNU dan IPPNU di SMAN 1 Plumbon, dengan tujuan memberikan intervensi kepada siswa sebagai anggota Rohis dan memberikan nilai-nilai keterbukaan bagi anggota Rohis agar lebih inklusif dan terbuka dalam menjalin dan berjejaring dengan lembaga luar sekolah. Alasan lain mengapa harus memilih IPNU dan IPPNU adalah karena penulis merasa memiliki visi dan misi yang sama dalam upaya menekan intoleransi dalam pendidikan. Bentuk struktural dan kaderisasi yang dilakukan pun jelas, yang dimulai dari pembentukan komisariat yang disahkan oleh Pengurus Cabang (PC), kemudian mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (Makesta) yang waktu itu diadakan di Gedung NU Sumber, dilanjutkan dengan Latihan Kader Muda (Lakmud) yang dilakukan di Pesantren Gedongan dan Pelatihan Kader Utama (Lakut) dari Kabupaten Cirebon sendiri. Namun yang dijadikan delegasi hanya tiga orang pada tahun 2016, yang dilakukan oleh Pengurus Propinsi (PP) di Bandung. Akhirnya, Komisariat IPNU dan IPPNU di SMAN 1 Plumbon adalah Komisariat pertama di Sekolah Negeri di Cirebon. Dan hal tersebut merupakan sebuah gebrakan besar dalam organisasi.

Ketika penulis membentuk IPNU-IPPNU, sebenarnya sempat terjadi konflik dengan beberapa guru. Salah satu guru yang tidak mendukung adanya pembentukan IPNU-IPPNU bahkan sempat menggebrak meja karena tidak sepaham dengan apa yang dilakukan oleh penulis sebagai upaya penekanan upaya merebaknya nilai-nilai intoleransi yang berkembang di Cirebon. Beruntung penulis dapat dukungan secara penuh dari Kepala Sekolah saat itu, dimana Kepala Sekolah memanggil guru-guru untuk rapat dan mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan penulis adalah bagus dan bernilai positif. *"Tolong jangan ganggu kegiatan yang dilakukan Ibu Koidah, karena itu bernilai baik untuk mengembangkan potensi siswa-siswi"* Ungkap H.B pada saat itu. Dengan adanya dukungan dari Kepala Sekolah, penulis semakin semangat dan membawa siswa-siswi untuk selalu maju, berfikir terbuka, dan menghasilkan karya. Meskipun sebagai efeknya, cap guru sekuler sudah

melekat pada diri penulis sejak tahun 2010, karena dianggap mengembangkan nilai-nilai sekuler dan radikal terhadap anak-anak rohis.

Sebagai salah satu tindak lanjut kaderisasi, anak-anak sebagai generasi damai pada tahun 2013 merupakan generasi pertama. Penulis dan orang tua bisa membantu memasukan enam orang siswa untuk masuk jurusan Akidah dan Filsafat Islam (AFI). Lima orang masuk Bidikmisi/BM dan satu orang masuk dalam Uang Kuliah Tunggal 1 (UKT 1) dengan membayar biaya kuliah sebesar Rp. 400.000 saja setiap semesternya. Dari angkatan Tahun 2013 sudah ada dua orang yang sudah mendapatkan gelar Sarjana yakni Nunung Nursa'adah dan Intan Fitriyah yang baru di wisuda bulan Oktober 2017 kemarin. Tahun 2014, kami berhasil memasukan 10 orang siswa. Kesemuanya masuk bidikmisi dengan jurusan AFI. Tahun 2015 berhasil memasukkan 11 orang dari tiga Almamater; delapan orang masuk Bidikmisi dan tiga Orang masuk UKT 1. Kesebelas siswa tersebut adalah Miranda A. F dari MAN 2 Kota Cirebon yang masuk jurusan PGRA (UKT 1), Eka dari SMAN 1 Palimanan masuk jurusan PGRA (BM), yang lainnya berasal dari SMAN 1 Plumbon. Tahun 2016, kami berhasil lagi memasukkan 10 siswa dan semuanya masuk beasiswa bidikmisi (BM), yaitu Ikha F dari SMK Salafiyah Bode yang masuk Jurusan KPI, Maharani S dari SMAN 1 Palimanan yang masuk Jurusan AFI, dan sisanya dari SMAN 1 Plumbon.

Pada tahun 2013, kegiatan dengan Fahmina Institute lebih intens dengan program SETAMAN (Sekolah Cinta Perdamaian) Angkatan I Kabupaten Cirebon, yang bertempat di SMAN 1 Plumbon, dengan tema dan isu keberagaman, yang melakukan pelatihan selama tiga hari dengan melibatkan anak Rohis SMAN 1 Plumbon dan beberapa sekolah dari SMA se-Kabupaten Cirebon. Kegiatan SETAMAN diselenggarakan di wilayah tiga Cirebon (Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Majalengka, Kuningan dan Indramayu).

SETAMAN kemudian meminta anak Rohis dan Alumni, untuk membantu pelaksanaan SETAMAN ditempat yang lain. Alumni Rohis yang dilibatkan sebagai fasilitator di kegiatan SETAMAN bernama Harry, dan lebih dari 30 orang peserta lainnya yang merupakan alumni dan anggota rohis. Selain itu, Alumni Rohis SMAN 1 Plumbon juga terlibat aktif di Ready (*Respect and*

*Dialogue*) sebagai pemuda pelopor perdamaian di wilayah tiga Cirebon, dengan dua orang perwakilan dari Alumni Rohis (Nunung Nursa'adah dan Ikfal Al-Fazri). PELITA (Pemuda Lintas Iman dan Agama), juga merupakan organisasi pemuda hasil embrio dari Fahmina Institute dan Forum Sabtuan yang digawangi oleh KH. Husein Muhammad, Pendeta Supriyanto, Pendeta Yohanes Muryadi, Pendeta Sugeng Daryadi, Marzuki Wahid, Marzuki Rais, Setyo Hajar Dewantoro, dan banyak teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu sehingga lembaga tersebut sekarang menjadi lembaga yang mandiri dan diisi oleh pemuda-pemuda kreatif, inovatif dan *smart*.

Singkat kata, IPNU dan IPPNU adalah lembaga embrio NU sebagai salah satu wadah yang dipakai untuk mengembangkan kreatifitas remaja serta dijadikan sebagai salah satu strategi ekspansi embrio kesadaran akan keberagaman bagi anak-anak alumni Rohis SMAN 1 Plumbon. Hal ini sangat efektif dilakukan karena dengan berjejaring, untuk mencapai tujuan "kampanye damai" bisa dilakukan dan terasa ringan jika dijalani bersama-sama.

Harapan penulis kedepannya, lembaga pendidikan formal dapat mendukung kegiatan positif seperti advokasi yang akan penulis lakukan, sehingga remaja akan lebih semangat lagi. Selain itu, sekolah, guru, orang tua, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta pemerintah juga diharapkan untuk mendorong agar mengikuti kegiatan yang mendukung nilai kebangsaan ini, sehingga pada akhirnya generasi penerus akan menularkan pengalaman dan ilmunya untuk menjadi generasi yang menyebarkan perdamaian yang mengarahkan paradigma 'kesalehan ritual' dan 'kesalehan individual' menjadi 'kesalehan sosial'.

## STUDI KASUS 3

### **Toleransi di SMAN 1 Sumber Cirebon**

*Jajuli*

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia dituntut untuk mampu berinteraksi dengan individu lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam menjalani kehidupan sosial disekolah misalnya, seorang individu akan dihadapkan dengan individu-individu dan kelompok-kelompok yang berbeda dari sisi watak, karakter, adat istiadat, agama maupun kepercayaan .

Dalam rangka menjaga keutuhan dan persatuan dalam lingkungan sekolah, maka diperlukan sikap saling menghormati dan saling menghargai, sehingga gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian dapat dihindari. Dalam lingkungan sekolah juga dituntut untuk saling menjaga hak dan kewajiban diantara mereka antara yang satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang mendasari penulis untuk selalu mensosialisasikan makna dan arti toleransi di SMA Negeri 1 Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

SMA Negeri 1 Sumber yang berlokasi di pusat Ibu Kota Kabupaten Cirebon, tepatnya di Jl. Sunan Maulana Malik Ibrahim 4, Kabupaten Cirebon, di tahun 2017 memiliki jumlah siswa sebanyak 1.252 orang yang berasal dari berbagai latar belakang bahasa, suku, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang beragam. Dalam hal agama dan kepercayaan, dari jumlah siswa tersebut, tercatat 95 persen didominasi oleh siswa muslim. Sementara sisanya adalah siswa dariagama lainnya, diantaranya ada Hindu, Buddha dan Kristen.

Sebagai muslim sudah sepatutnya menjunjung tinggi sikap saling toleransi antarumat beragama yang ada di lingkungan sekolah,dan saling menghormati antar hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam tata tertib siswa sebagai pagar dan batasan serta kekuatan dalam menegakkan ketertiban dan kedisiplinan di lingkungan sekolah.

Kebebasan beraktifitas, berekspresi, beribadah, dan beragama di SMA Negeri 1 Sumber pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan

antar siswa. Tanpa kebebasan beraktifitas, berekspresi, beribadah dan beragama, tidak mungkin akan terwujud suatu kerukunan di lingkungan sekolah. Hal yang juga perlu dicamkan adalah bahwa kebebasan-kebebasan tersebut merupakan hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan yang diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang melarang dan menghalanginya.

Demikian juga halnya dengan toleransi antar umat beragama yang dibangun di SMA Negeri 1 Sumber. Membangun lingkungan yang toleran adalah satu-satunya cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Karena kebebasan dan toleransi adalah hal utama yang tidak dapat diabaikan. Sayangnya, pada realitanya yang seringkali terjadi adalah penekanan hanya dari salah satu aspek saja. Misalnya aspek yang paling ditekankan hanya pada sisi kebebasan, namun di sisi lain mengabaikan aspek toleransi dan usaha untuk membangun kerukunan. Ada juga yang hanya memaksakan aspek toleransi, sehingga akhirnya malah membelenggu kebebasan. Karena itu, untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi antarumat beragama merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

Secara etimologis, toleransi berasal dari bahasa latin dari akar kata “tolerare” yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Adapun secara terminologis, pengertian toleransi secara luas adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan.

Toleransi adalah suatu istilah dalam konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi beragama, dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Manfaat Sikap Toleransi dalam Kehidupan Sehari-hari.

Sesuai dengan karakter manusia yang identik sebagai makhluk sosial, hanya ada satu sikap baik yang menjadi satu modal agar terciptanya kerukunan, yakni sikap toleransi. Indonesia sendiri terkenal sebagai negara dengan

berbagai agama dan suku bangsa di dalamnya. Maka dari itu, mengajarkan dan mempraktikkan sikap toleransi di sekolah sangatlah penting. Kerukunan antar umat di Indonesia diantaranya dapat dilihat dengan mengamati beberapa tempat menarik, seperti tempat bersejarah dan cagar budaya yang menjadi jejak tersendiri bahwa sudah ada kehidupan toleransejak zaman dahulu. Lalu, apa saja manfaat sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat?

### **1. Menghindari Perkelahian dan Tawuran Pelajar**

Upaya SMA Negeri 1 Sumber dalam mencegah terjadinya perkelahian dan tawuran pelajar, yaitu dengan mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler olahraga, seni, budaya maupun bahasa. Dengan aktif dan lancarnya kegiatan tersebut, siswa dapat belajar menghargai setiap pendapat antar individu, dan mampu menilai kelebihan dan kekurangan teman sebayanya, yang dalam hal ini bisa menjadi modal penting untuk menghindarkan perpecahan di dalam lingkungan sekolah. Di samping itu, yang juga menjadi ciri khas religius di SMA Negeri 1 Sumber adalah adanya pelaksanaan pengajian setiap pagi dan menghafal Al-Qur'an Juz ke 30 khusus bagi siswa muslim, yang kemudian dilanjutkan dengan dialog bahasa Inggris dan diakhiri dengan menyayikan lagu Indonesi Raya. Hal ini merupakan cermin dari toleransi beragama yang merupakan satu wujud nyata dari sikap menghargai dan toleransi di lingkungan sekolah. Mengapa demikian?. Karena ternyata siswa non-muslim pun ikut serta dalam kegiatan ini dengan suka rela, tanpa unsur paksaan dari siapapun. Oleh karena itu, hal tersebut menunjukkan bahwa unsur agama memang menjadi satu hal yang krusial di mata pelajar dan tanpa bekal pengetahuan agama yang memadai di kalangan siswa, tak menutup kemungkinan menjadi salah satu faktor seringnya terjadi perkelahian dan tawuran di kalangan pelajar.

### **2. Mempererat Hubungan Antar Manusia**

Di berbagai kegiatan perayaan keagamaan, SMA Negeri 1 Sumber selalu melibatkan setiap organisasi siswa yang ada di sekolah tanpa mengenal latar belakang agama, ras dan budaya, serta tidak pernah membedakan latar belakang organisasi Islam yang mereka ikuti. Hal ini tidak hanya menghindarkan siswa

dari gejala perpecahan. Bentuk dari ikap toleransi yang dipupuk oleh SMAN Sumber ini juga bisa membuat hubungan antar pelajar menjadi lebih erat. Adanya kegiatan bertukar pikiran dan bertukar pendapat antar siswa untuk menghasilkan suatu keputusan adalah tanda bahwa sekolah sudah bisa menjalankan hidup bertoleransi.

### **3. Memperkuat Iman**

Setiap sekolah selalu mengajarkan sikap toleransi antar umat beragama. Dalam hal ini, iman adalah salah satu tonggak dalam menciptakan sekolah bertoleransi. Menerapkan iman dalam setiap tindakan juga menjadi satu tanda bahwa sikap toleransi berhasil diaplikasikan. Tak terkecuali di SMA Negeri 1 Sumber, keseharian kegiatan keagamaan selalu dikoordinasikan dengan guru Pendidikan Agama Islam (PAI), seperti kegiatan harian yang diantaranya anjuran kepada para siswa untuk melakukan sholat sunnah dhuha, berpuasa sunnah tiap hari Senin dan hari Kamis, serta selalu melaksanakan sholat dzuhur dan ashar berjamaah di masjid sekolah yang dimotori oleh para siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler ROHIS. Adapun kegiatan unggulan yang mungkin tidak lazim dilakukan SMA lainnya dari ekstrakurikuler ini yaitu kajian dan bedah isi kandungan al-Qur'an melalui kitab kuning, yang dilakukan di setiap hari Sabtu di masjid sekolah dengan mendatangkan ustadz dari pesantren salaf.

### **4. Menimbulkan Rasa Cinta Tanah Air**

Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara, berbagai kegiatan dilakukan para siswa di SMA Negeri 1 Sumber; mulai dari upacara bendera setiap hari Senin, selalu memperingati hari-hari besar Nasional dengan berbagai kegiatan kreatifitas siswa, dan melakukan kegiatan penguatan karakter dari berbagai ekstrakurikuler yang selalu bekerjasama dengan TNI, POLRI dimana melibatkan seluruh siswa tanpa mengenal latar belakang adat istiadat, ras, agama dan kepercayaan mereka. Semua kegiatan tersebut selalu menyesuaikan penyelenggaraannya dengan hari-hari besar keagamaan yang memberikan manfaat dari sisi sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat lainnya dari pelaksanaan rangkaian kegiatan ini adalah bisa

meningkatkan rasa cinta tanah air. Sebagaimana yang kita ketahui, landasan utama negara yang besar dan kuat adalah adanya sikap rasa toleransi antar suku, adat istiadat, ras, agama dan kepercayaan. Begitupula yang kami lakukan di sekolah, yang pada gilirannya nanti, sikap nasionalisme akan ikut muncul setelah sikap toleransi berhasil diterapkan dalam kehidupan ini.

#### **5. Dapat Menyelesaikan Masalah dengan Cara Musyawarah**

SMA Negeri 1 Sumber sudah terbiasa dan tidak asing lagi dengan kata musyawarah. Namun dalam kenyataannya, masih ada beberapa masalah yang tetap sulit diselesaikan meskipun sudah dilaksanakan dengan musyawarah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sikap saling menghargai dan toleransi yang terkadang menjadi pemicu terjadinya perbedaan pendapat. Maka dari itu, dibutuhkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari supaya pemutusan suatu masalah bisa melalui langkah musyawarah yang mufakat.

#### **6. Mengendalikan Sikap Egois**

Kurangnya sikap toleransi antar manusia bisa disebabkan oleh adanya rasa egois yang terlalu tinggi. Dibutuhkan pengendalian rasa egois disetiap insan manusia agar nantinya tidak terjadinya konflik atas nama persoalan pribadi.

Itulah beberapa *Manfaat Dari Sikap Toleransi Dalam Kehidupan Sehari-Hari* yang bisa kita terapkan di sekolah. Untuk menciptakan rasa nyaman dan tenteram, dibutuhkan rasa saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain, serta tidak mengedepankan sifat egois dalam memutuskan sesuatu. Itulah beberapa informasi yang penulis bisa berikan, dengan harapan dapat memberikan inspirasi kepada kita semua dalam kehidupan sehari-hari.

## STUDI KASUS 4

# Sekolah, Agama dan Toleransi

*Armi Tubagus*

(Guru PAI di SMA Negeri 1 Tomohon)

*“Semakin tinggi kadar pemahaman agama seseorang, maka makin besar pula rasa toleransinya. Agama sejatinya hadir sebagai jawaban, pencerahan, dan pembebasan atas setiap keragu-raguan.”*

Puncak toleransi adalah ketenangan, kedamaian, dan kebebasan yang bertanggung jawab untuk menjalankan peran sebagai manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai insan yang tunduk kepada Tuhan. Di Indonesia yang bermasyarakat majemuk, keberagaman merupakan sebuah ketetapan, dan bukan sekedar keniscayaan. Dalam konteks itulah, agama dipahami dan dijalani sebagai jalan menuju Tuhan dengan memanusiakan manusia lainnya yang lahir dari berbagai latar belakang, suku, agama dan ras, demi kemaslahatan bersama untuk setiap golongan. Peranan agama amat krusial dalam mewujudkan nilai-nilai yang telah disepakati bersama ketika mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu kemajemukan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, eksistensi agama juga tak bisa dilepaskan dari peranan pemuka-pemuka agama sebagai pelindung dan pengayom yang menjaditiang-tiang penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada satu kesempatan dalam sebuah kuliah singkat, Prof. Quraish Shihab memaparkan dengan jernih contoh toleransi di dalam agama Islam ketika terjadi Perjanjian Hudaibiyah. Saat itu Nabi menuliskan kalimat *Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim*. Namun, kaum Musyrik tidak menyetujui penulisan konsep tersebut. Mereka meminta agar kalimat *Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim* diganti menjadi kalimat *Bismikallahumma*. Nabi kemudian berkata kepada Ali bin Abi Thalib “Hapus *basmalah* dan tuliskan kalimat

*bismikallahumma* sesuai usul mereka.” Setelah itu, Nabi menyusun perjanjian dan menyatakan: “Inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan wakil dari kaum musyrik Mekkah.” Pemimpin delegasi kaum musyrik kemudian berkata “Seandainya kami mengakui engkau sebagai rasul Allah, maka kami tidak akan memerangimu. Makatulislah ‘Perjanjian ini antara Muhammad putra Abdullah!’ Akhirnya Rasul pun berkata “Hapus kata Rasulullah dan ganti dengan Muhammad putra Abdullah.” Mendengar itu, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabatnya tidak ingin bertoleransi dalam hal ini. Mereka bersikukuh enggan menghapusnya. Akan tetapi, Nabi yang penuh dengan toleransi tetap menghapus kata ‘Rasulullah’ tersebut demi kemaslahatan dan perdamaian bersama. Bercermin dari kisah tersebut, hal demikian pula yang kiranya terjadi ketika para pendiri bangsa merumuskan konsep Negara, sampai disepakatinya suatu titik temu antara ideologi kebangsaan dengan ideologi agama.

### **Peran Guru dan Pendidikan Agama**

Alex R. Rodger, penulis buku *Education and Faith in an Open Society*, menyatakan bahwa “Pendidikan agama merupakan bagian integral dari pendidikan pada umumnya, dan berfungsi untuk membantu perkembangan pemahaman yang dibutuhkan bagi orang-orang yang berbeda iman, sekaligus juga untuk memperkuat ortodoksi keimanan bagi mereka”. Penulis sependapat dengan pandangan tersebut, yang pada praktiknya seirama dengan penerapan kurikulum 2013 di hampir seluruh sekolah di Indonesia. Penerapan kurikulum ini telah mengakomodir dengan cukup baik berbagai isu-isu toleransi dan kerukunan, meskipun dalam beberapa hal masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.

Namun demikian, mempraktikkan kehidupan yang toleran di tengah masyarakat bukan tanpa hambatan. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan media sosial dan teknologi yang begitu pesat yang belum diiringi dengan kemampuan masyarakat pada umumnya untuk mencerna dan memahami persoalan secara utuh. Sehingga tidak jarang informasi yang tidak benar dan hanya dipublikasikan sepotong-sepotong acapkali mengganggu toleransi dalam kehidupan itu sendiri.

Kesadaran akan kebinekaan yang telah menjadi ketetapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia idealnya paling tepat ditanamkan sejak dini di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan “kecil” dimana daya kritis dapat ditonjolkan, berbanding lurus dengan kesempatan untuk mencari pengetahuan dan kebijaksanaan yang terbuka lebar. Sekolah juga merupakan tempat untuk mempraktikkan nilai-nilai toleransi yang tidak hanya melalui teks, melainkan juga melalui bagaimana ketika benar dan salah mendapat tempat setara di hadapan ilmu pengetahuan dengan pengawasan dan bimbingan dari guru sebagai orang tua di sekolah.

Penulis yang saat ini mengajar di SMU Negeri 1 Tomohon merasakan bahwa tiada masalah jika kita hidup sebagai minoritas atau mayoritas, selama kita selalu menanamkan rasa bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, dengan tetap menumbuhkan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling memiliki satu sama lain. Selain itu, kita juga harus hidup dengan kepercayaan diri bahwa setiap keyakinan yang dianut adalah benar menurut keyakinan pemeluknya masing-masing. Sikap itulah yang coba penulis tularkan sebagai guru, agar nilai-nilai toleransi dan keberagaman tetap terpelihara dan terawat dengan baik. Di tempat ini, masyarakat dari kelompok agama yang berbeda memiliki rasa saling mencintai satu sama lain di atas bumi yang dipijak dan udara yang dihirup bersama-sama. Semua mendapatkan kesempatan yang sama, karena penulis dan lembaga sekolah meyakini bahwa menanam, merawat dan memelihara toleransi adalah cita-cita bersama untuk meraih kemajuan sebuah bangsa. Penulis percaya bahwa keterbukaan dan percaya diri adalah kunci besar untuk menghadapi dunia yang semakin hari semakin global. Agama Islam dan tafsirnya bisa saja bermacam-macam, tapi satu hal yang jelas dan pasti adalah Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta.

Akhir kata, sudah menjadi tugas kita bersama sebagai manusia untuk memuliakan manusia lainnya sebagai wujud rasa syukur kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Bersama-sama kita melaksanakan tugas masing-masing dalam setiap kesempatan. Bila penulis diberi keleluasaan untuk memmanifestasikannya dalam posisi penulis sebagai guru, maka sudah menjadi tugas penulis untuk

menggapai bersama-bersama cita-cita para pendiri bangsa dimulai dari lingkungan sekolah.

Laksana peneguhan untuk merekatkan silaturahmi dalam keragaman asal-usul, penulis mengutip sebuah kalimat dari Sayyidina Ali bin Abu Thalib: *“Dia Yang Bukan Saudaramu Dalam Iman, Adalah Saudara Dalam Kemanusiaan”*.

# DAFTAR PUSTAKA

## ***Buku dan Artikel***

- Abou el-Fadl, Khaled M., *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan* (Jakarta: Serambi Semesta, 2006).
- Ahyar, Muzayyi, “Membaca Gerakan Islam Radikal dan Deradikalisasi Gerakan Islam”, *Walisongo*. Vol. 23. Nomor 1 Tahun 2015.
- Astara, I Wayan Wesna, “AJEG BALI: Mitos atau Ideologi Pembangunan, Mengabdikan Pada Sang Penindas” dalam *Singhadwala*, Edisi 44, Februari 2011.
- Azra, Azyumardi. *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999).
- Baradat, Leon P., *Political Ideologies: Their Origins and Impact* (Fifth Edition), (New Jersey: Prentice Hall, 1994).
- Damanik, Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2002).
- Damayana, I Wayan, *Menyama Braya: Studi Perubahan Masyarakat Bali, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana*, 2011.
- Danim, S.. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan* (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2005).
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren *Proyek Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah pada Pondok Pesantren, Pola Pengembangan Pondok Pesantren* (Jakarta : 2003).
- Dunn, W.N. *Analisa Kebijakan Publik*. (peny.: Muhadjir Darwin). (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003).
- Efendi, Bahtiar. “Nilai Kaum Santri”, dalam M.Dawam Raharjo (ed), *Pergulatan Dunia Pesantren* (Jakarta: P3M, 1985).
- Erniwati, Cina Padang dalam *Dinamika Masyarakat Minangkabau; Dari Revolusi sampai Reformasi, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia*, 2012.
- Fananie, Zainudin. *Atiqa Sabardila dan Dwi Pumanto, Radikalisme Keagamaan* (Asia Foundation, 2002).

- Hadiz, Vedi R., Menuju Suatu Pemahaman Sosiologis Terhadap Radikalisme Islam di Indonesia. *Harian Indoprogess*, 7 Mei 2008.
- Hadiz, Vedi R., *Populisme Islam in Indonesia and Middle East* (Singapore: ISEAS, 2015).
- Hasan, Noorhaidi, *Laskar Jihad: Islam, Militansi dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 2008).
- Hasani, Ismail, et all. *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat; Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, (Jakarta; Pustaka Setara Institute, 2011).
- Hasani, Ismail dan Bonar Tigor Naipospos, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012).
- Humaedi, M. Alie, “Budaya Hibrida Masyarakat Cirebon” dalam *Jurnal Humaniora*, Vol. 25, No. 3 Oktober 2013.
- Jones, Pip, Liz Bardbury, dan Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-teori Sosial dari Teori Fungsionalise hingga Post-Modernisme*, Edisi Revisi (Terj), (Jakarta; Yayasan Obor, 2016).
- Kato, Tsuyoshi, *Adat Minangkabau dan Merantau* (Jakarta, Balai Pustaka, 2005).
- Kementerian Agama, *Keputusan Direktorat Kementerian Agama Nomor 1293 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Keagamaan di Madrasah Aliyah* (Kementerian Agama, Jakarta, 2016).
- Madjid, Nurcholish, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997).
- Al-Makassary, Ridwan dan Ahmad Gaus AF., (ed). *Benih-benih Islam Radikal di Masjid: Studi Kasus Jakarta dan Solo* (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2010).
- Menteri Pendidikan Nasional, *Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003, tentang SISDIKNAS* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003).
- Rahmat, Ioanes, *Radikalisme Kristen di Indonesia, Adakah?.* Makalah didiskusikan di Minahasa Raya Network Community 2011.
- Sahasrad, Herdi. dan Al-Chaidar, *Fundamentalisme, Terorisme dan Radikalisme; Perspektis Atas Agama, Masyarakat dan Negara*, (Create Space Independent Publishing Platform, 2016).

Solahuddin, NII Sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia (Depok: Komunitas Bambu, 2011).

Sujai, Ahmad, Pengaruh Paham Wahabi di Indonesia: Studi atas Pengaruh Paham Keagamaan Wahabi terhadap Praktek Keagamaan Mahasiswa Lembaga Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA). Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.

Suyono, Seno Joko, Tubuh Yang Rasis (Yogyakarta: Pustaka Relajar, 2002).

Supelli, Karlina, dkk., “Dari Kosmologi ke Dialog: Mengenal Batas Pengetahuan, Menentang Fanatisme”, dalam Fanatisme, Ekstremisme, dan Penyingkiran Ciri Antropologis Pengetahuan, Jurnal KAWISTARA Vol. 3 No. 2, Agustus 2013.

Turmudzi, Endang. dan Riza Sihbudi (ed), Islam dan Radikalisme di Indonesia (Jakarta: LIPI Press, 2005).

Wildan, Muhammad, “Mapping Radical Islamism in Solo: a Study of the Proliferation of Radical Islamism in a Town in Central Java”, dalam Martin van Bruinessen (ed.), Contemporary Developments In Indonesian Islam, Explaining The Conservative Turn, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013).

### ***Buku Online***

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2017. <https://sukabumikab.bps.go.id/publication/2017/08/11/1a2410e17b16e8209db31c1b/kabupaten-sukabumi-dalam-angka-2017.html>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2015. <https://sukabumikab.bps.go.id/publication/2016/03/14/d9df43241becd7b86c1edc96/kecamatan-waluran-dalam-angka-2015-.html>.

Badan Pusat Statistik Kota Padang. Kota Padang Dalam Angka 2017. <https://padangkota.bps.go.id/publication/2017/08/10/40ffc917a4dc6a6383c24b76/kota-padang-dalam-angka-2017.html>.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Provinsi Bali Dalam Angka 2010. <https://bali.bps.go.id/publication/2011/02/21/b4683026c39256af4dd08cf8/provinsi-bali-dalam-angka-2010.html>.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Provinsi Bali Dalam Angka 2015. <https://bali.bps.go.id/publication/2015/10/31/e8d7a8fc79d7ed5e0d1f8ce0/bali-dalam-angka-2015.html>.

Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. Kota Denpasar Dalam Angka 2014. <https://denpasarkota.bps.go.id/publication/2014/11/12/312809d857732006643fcff6/kota-denpasar-dalam-angka-2014.html>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2016. <http://westjavainc.org/wp-content/uploads/2016/04/Kabupaten-Cirebon-Dalam-Angka-DDA-2015.pdf>.

### ***Artikel Online***

“Mewaspadai Radikalisme Islam Di Media Sosial”. Geotimes.co.id. Nafi’ Muthohirin, 1 April 2016. <https://geotimes.co.id/kolom/mewaspadai-radikalisme-islam-di-media-sosial/>.

Pamela Allen & Carmencita Palermo, Ajeg Bali: multiple meanings, diverse agendas, <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13639810500449115?scroll=top&needAccess=true>.

### ***Data Online***

“78,9% Publik Kecewa Dengan Kinerja Jokowi-JK”. Kabarpergerakan.com. 14 Januari 2017. <http://www.kabarpergerakan.com/pergerakan/survei-789-persen-publik-kecewa-dengan-kinerja-jokowi-jk/>.

“Daftar SMA Terbaik di Indonesia Versi Kemendikbud”. Id.theasianparent.com. 2 November 2017. <https://id.theasianparent.com/daftar-sma-terbaik-di-indonesia-versi-kemendikbud-2015/>.

“Ini Daftar 172 Cagar Budaya di Solo”. Solopos.com. 2 November 2017. <http://www.solopos.com/2015/01/17/info-solo-ini-daftar-172-cagar-budaya-di-solo-567591>.

“Mengkristenkan Jawa”. Hidayatullah.com. 25 Oktober 2017. <https://www.hidayatullah.com/kolom/catatan-akhir-pekan/read/2013/04/04/3865/mengkristenkan-jawa.html>.

“Nyentriknya Radikalisme di Surakarta”. Lkis.or.id. <http://www.lkis.or.id/v2/berita-183-nyentriknya-radikalisme-islam-di-Surakarta.html>.

“Profil Wilayah Kota Solo”. Studiofiveforlighting.wordpress.com. <https://studiofiveforfighting.wordpress.com/profil-wilayah/>.

“Pengamat, Surakarta Jadi Tempat Nyaman Bagi Kelompok Radikal”. Surakartapos.com. <http://www.Surakartapos.com/2012/12/13/pengamat-Surakarta-jadi-tempat-nyaman-bagi-kelompok-radikal-357564>.

“Rumah Ibadah”. Kementerian Agama Jawa Barat, 26 Agustus 2015 <http://jabar.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=27382&t=474>.

- “Sejarah Singkat”. Sman1sukarajasmis.ch.id. 4 November 2017. <http://sman1sukarajasmis.ch.id/html/index.php>.
- “Sejarah Alkitab Indonesia: Gereja Pasundan”. Sejarah.co. 4 November 2017. [http://sejarah.co/artikel/geredja\\_pasundan.htm](http://sejarah.co/artikel/geredja_pasundan.htm).
- “Perda Syariah di Sumatera Barat”. Heru2273.blogspot.co.id. <http://heru2273.blogspot.co.id/2014/04/perda-syariah-di-sumatera-barat.html>.
- “Siswa Penghafal Quran di Kota Padang Peroleh Keistimewahan”. Hidayatullah.com. <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/04/16/93188/siswa-penghafal-quran-di-kota-padang-peroleh-keistimewahan.html>.
- “Menyambangi Kampung-Kampung Muslim di Bali”. Bimasislam.kemenag.go.id. <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/menyambangi-kampung-kampung-muslim-di-bali>.
- “Daftar Anggota KPUD Bali”. Kpud-Baliprov.go.id. <http://kpud-Baliprov.go.id/index.php?pg=lelangdetail&id=50>.
- “Puja Trisandya Dan Terjemahannya”. Mediahindu.com. <https://www.mediahindu.com/doa-sehari-hari/puja-trisandya-dan-terjemahannya.html>.
- “Makna dan Cara Pelaksanaan Siwaratri dalam Hindu-Bali”. inputBali.com. <http://inputBali.com/budaya-Bali/makna-dan-cara-pelaksanaan-siwaratri-dalam-hindu-Bali>.
- “Makna dan Cara Pelaksanaan Siwaratri dalam Hindu-Bali”. inputBali.com. <http://inputBali.com/budaya-Bali/makna-dan-cara-pelaksanaan-siwaratri-dalam-hindu-Bali>.
- <http://www.manciwaringin.sch.id/>.
- <http://www.man1cirebon.sch.id/45154/#>.
- <https://sman1sumber.sch.id/>.
- <https://sman1jamblang.sch.id/>
- <http://sman1plumbon-crb.sch.id>.
- <http://smalokontomohon.blogspot.co.id>.
- [www.lentera.sch.id](http://www.lentera.sch.id).
- “Kota Tomohon Jadi Yang Pertama Di Sulut, Terima “Harmony Award””. Tomohon.info. 4 November 2017. <https://www.tomohon.info/featured/kota-tomohon-jadi-yang-pertama-di-sulut-terima-harmony-award>.
- “Indeks Kota Toleran Tahun 2017”. Setara-institute.org. 4 November 2017. <http://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-tahun-2017>.

“Eman Minta Guru Buktikan Tomohon Kota Pendidikan”. Manado.tribunnews.com. 4 November 2017. <http://manado.tribunnews.com/2015/09/16/eman-minta-guru-buktikan-tomohon-kota-pendidikan>.

### ***Koran***

Radar Cirebon, Dua SMA Terindikasi Disusupi Paham Radikal, 5 Juli 2015.

### ***Laporan Lembaga***

LBH Jakarta, Potret Hak Kewarganegaraan dan Kehidupan Keagamaan: Sebuah Baseline Study di 6 (enam) Wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Kab. Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, dan Kab. Majalengka), (Jakarta: LBH Jakarta: 2015).

International Crisis Group (ICG), Indonesia: From Vigilantism to Terrorism in Cirebon, 26 January 2012.

International Crisis Group (ICG), Indonesia: Noordin Top's Support Base, Asia Briefing

No. 95, 27 Aug 2009.

Madrasah Aliyah Negeri 1 Cirebon. Laporan Program OSIS MAN 1 Cirebon 2016/2017.

The Wahid Institute, Preliminary Reserach; Intolerance, Radicalism and Teorisme in Indonesia, 2014.

# DAFTAR SEKOLAH SAMPEL PENELITIAN

No	Kota	Sekolah
1	Kota Padang (Sumatera Barat)	SMA Negeri 1 Padang SMA Negeri 2 Padang SMA Negeri 9 Padang SMA Negeri 16 Padang MA Negeri 1 Padang MA Negeri 2 Padang
2	Kab. Cirebon (Jawa Barat)	SMA Negeri 1 Sumber SMA Negeri 1 Plumbon SMA Negeri 1 Arjawinangun SMA Negeri 1 Jamblang MA Negeri 1 Cirebon MA Negeri 2 Cirebon SMA Negeri 1 Cirebon (atas inisiatif peneliti) SMA Negeri 2 Cirebon (atas inisiatif peneliti)
3	Kab. Sukabumi (Jawa Barat)	SMA Negeri 1 Sukaraja SMA Negeri 1 Cisaat SMA Negeri 1 Cikembar SMA Negeri 1 Jampang Kulon MA Negeri 1 Sukabumi (Cibadak) MA Negeri 3 Sukabumi (Surade)
4	Kota Surakarta (Jawa Tengah)	SMA Negeri 1 Surakarta SMA Negeri 3 Surakarta SMA Negeri 5 Surakarta SMA Negeri 6 Surakarta MA Negeri 1 Surakarta MA Negeri 2 Surakarta
5	Kota Denpasar (Bali)	SMA Negeri 2 Denpasar SMA Negeri 3 Denpasar SMA Negeri 4 Denpasar SMA Negeri 8 Denpasar MA Tawakkal MA Al-Ma'ruf SMA Negeri 7 Denpasar (atas inisiatif peneliti)
6	Kota Tomohon (Sulawesi Utara)	SMA Negeri 1 Tomohon SMA Negeri 2 Tomohon SMA Kosgoro SMA Kristen 1 SMA Lentera Harapan MA Mardhatillah SMA St. Lokon (atas inisiatif peneliti)

# WAWANCARA

## Daftar Informan di Tiap Area

### Kota Padang (Sumatera Barat)

Jabatan	Asal Lembaga	Tanggal	Jenis Kelamin (Jumlah)	
			Laki-laki	Perempuan
Waka Kesiswaan	MAN 2 Padang	02 Oktober 2017	1	
Waka Kesiswaan	SMAN 1 Padang	06 Oktober 2017	1	
Waka Kurikulum	MAN 1 Padang	13 Oktober 2017		1
Waka Kesiswaan				1
Mantan Ketua Rohis 2016-2017	SMAN 1 Padang	06 Oktober 2017	1	
Representasi Siswa Non Muslim	SMAN 1 Padang	06 Oktober 2017	2	
Representasi Siswi Non Muslim	SMAN 1 Padang	06 Oktober 2017		2
Pembina Tahfidz, guru non PNS	SMAN 1 Padang	06 Oktober 2017		
Wakasis	SMAN 9 Padang	10 Oktober 2017		1
Wakahumas				1
Ketua OSIS			1	
Guru PAI			1	
Aktivis Bela Negara	MAN 2 Padang	03 Oktober 2017	1	
Ketua OSIS			1	
Ketua Rohis			1	
Aktivis Bela Negara	MAN 2 Padang	03 Oktober 2017	1	
Waka Kesiswaan	SMAN 2 Padang	11 Oktober 2017	1	
Guru PAI			1	
Ketua Rohis			1	
Ketua OSIS	SMAN 2 Padang	11 Oktober 2017		1
Ketua MPK				1
Wakahumas	SMAN 16 Padang	12 Oktober 2017	1	
Kasek			1	
Rohis			1	
Waka kesiswaan	MAN 1 Padang	13 Oktober 2017		1
Alumni Rohis				1
OSIS dan Rohis			1	
Keuskupan Katetik Katolik Kota Padang	Perpustakaan Katektik	14 Oktober 2017	1	
Bimas Katolik Kanwil Kemenag Padang	Kanwil Kemenag	07 Oktober 2017	1	
Dosen Ilmu Politik	IAIN Imam Bonjol	18 Oktober 2017	1	
Sosiolog	IAIN Imam Bonjol	18 Oktober 2017	1	
Kepala Bimas Kristen	Kanwil Kemenag	19 Oktober 2017	1	
Dosen Antropologi Hukum IAIN Imam Bonjol	IAIN Imam Bonjol	21 Oktober 2017	1	

## Kabupaten Cirebon

Jabatan	Asal Lembaga	Tanggal	Jenis Kelamin (Jumlah)		
			Laki-laki	Perempuan	
Kepala Sekolah	MAN 2 Ciwaringin	03 Oktober 2017	1		
Wakakesiswaan			1		
Pembina OSIS			1		
Pembina Paskibra			1		
Pembina PKS			1		
Siswa MBD			1	4	
Siswa OSIS			1		
Komite Sekolah		04 Oktober 2017	1		
Dewan Pengawas		03 Oktober 2017	1		
Alumni (Iman)			2		
Kepala Sekolah	MAN Plered	05 Oktober 2017	1		
Wakakesiswaan			1		
Pembina OSIS			1		
Pembina Tahfidz			1		
Pembina Wahdaniyah (Rohis)			1		
Siswa OSIS			1		
Siswa Wahdaniyah		1			
Alumni/Instruktur Rohis		14 Oktober 2017	1		
Kepala Sekolah	SMAN 1 Sumber	04 Oktober 2017	1		
Wakakesiswaan			1		
Pembina Osis			1		
Instruktur Rohis		07 Oktober 2017	1		
Pembina Rohis			1		
Siswa Osis			1		
Siswa Rohis		14 Oktober 2017	1	3	
Komite Sekolah			1		
Kepala Sekolah		SMAN 1 Plumbon	13 Oktober 2017	1	
Wakakesiswaan			12 Oktober 2017	1	
Pembina Osis	1				
Mantan Pembina Rohis	09 Oktober 2017		1		
Pembina Rohis	12 Oktober 2017		1		
Siswa Osis	12 Oktober 2017		2	2	
Siswa Rohis			2		
Alumni ROhis	12 Oktober 2017			1	
Guru		1			
Kepala Sekolah	SMAN 1 Arjowinangun	09 Oktober 2017	1		
Wakakesiswaan		11 Oktober 2017	1		
Pembina Osis			1		
Pembina Rohis		13 Oktober 2017	1		
Siswa Osis			1		
Siswa Rohis			1		
Guru			1		
Wakakesiswaan	SMAN 1 Jamblang	11 Oktober 2017	1		
Pembina Osis			1		
Pembina Paskibra			1		
Pembina Rohis			1		
Siswa Rohis	06 Oktober 2017	1			
Siswa Osis		1			
Guru PPKN	11 Oktober 2017		1		
Komite Sekolah		1			

Jabatan	Asal Lembaga	Tanggal	Jenis Kelamin (Jumlah)	
			Laki-laki	Perempuan
Pembina Rohis Ikhwan	SMAN 1 Kota Cirebon	19 Oktober 2017	1	
Pembina Rohis Akhwat		19 Oktober 2017		1
Guru		18 Oktober 2017	1	
Kepala Sekolah	SMAN 2 Kota Cirebon		1	
Pembina Osis		18 Oktober 2017	1	
Guru				1
Kepala	Kemenag Kab. Cirebon	19 Oktober 2017	1	
Anggota	Dewan Pengawas Pendidikan Kota Cirebon	19 Oktober 2017	1	
Kepala Bagian Madrasah	Kemenag Kota Cirebon	19 Oktober 2017		1
Pengurus	NU Cirebon	19 Oktober 2017	1	
Mantan Ketua	GP Ansor-Densus 99	14 Oktober 2017	1	
ktivis dan Pengamat Radikalisme	PB NU-Fahmina	19 Oktober 2017	1	
Peneliti Pesantren Teroris	Fahmina/UGM	02 Oktober 2017	1	
Peneliti dan Mantan Anggota JAT	Fahmina/UIN Jakarta/JAT	02 Oktober 2017	1	
Peneliti Pesantren Teroris	UNU Jakarta	20 Oktober 2017	1	
Anggota	Pemuda Lintas Iman	02 Oktober 2017	1	
Kordinator	Staman-Fahmina	02 Oktober 2017	1	

### ***Kabupaten Sukabumi***

Jabatan	Asal Lembaga	Tanggal	Jenis Kelamin (Jumlah)	
			Laki-laki	Perempuan
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah	Kemenag	04 Oktober 2017	1	
Kasi Pelayanan BPPW III	Dinas Pendidikan	12 Oktober 2017	1	
Anggota/Pembina	FKUB & Lensa	22 Oktober 2017	1	
Ketua Umum	Fomaksi		1	
Ketua Regional 2	Foksi	10 Oktober 2017	1	
Anggota	Fopulis		1	1
Kepala Sekolah	SMAN 1 Sukaraja	04 Oktober 2017	1	
Wakasek Kurikulum & BK		02 Oktober 2017	1	
Wakasek Kesiswaan		03 Oktober 2017		1
Guru & Pembina RMA (remaja masjid sekolah)		02 Oktober 2017		1
Ketua OSIS			1	
Ketua RMA		04 Oktober 2017		1
MPK				1
Pengurus OSIS (KIR)				1
Ketua Komite		12 Oktober 2017	1	

Jabatan	Asal Lembaga	Tanggal	Jenis Kelamin (Jumlah)	
			Laki-laki	Perempuan
Kepala Sekolah	MAN 1 Sukabumi (Cibadak)	05 Oktober 2017	1	
Wakasek Kesiswaan			1	
Kepala Perpustakaan			1	
Ketua umum OSIS			1	
Ketua Kharisma			1	
Ketua I		06 Oktober 2017		1
Ketua II				1
MPK			1	
Siswi bercadar				1
Wakasek Kesiswaan				1
Staff kesiswaan/ pembina Osis	SMAN 1 Cisaat	09 Oktober 2017	1	
Kepala Sekolah		12 Oktober 2017		1
Ketua OSIS				1
Ketua RMAI (Rohis)		10 Oktober 2017	1	
Ketua I			1	
MPK		1		
Siswa non muslim		12 Oktober 2017	1	
Kepala Sekolah	SMAN 1 Cikembar	13 Oktober 2017	1	
Wakasek Kesiswaan			1	
Ketua OSIS			1	
Kordinator Sekbid			1	
Ketua MPK			1	
Wakil MPK				1
Ketua Forma (Rohis)		11 Oktober 2017	1	
Guru Fisika			1	
Siswi Kristen				1
Siswi Kristen				1
Siswi Kristen			1	
Siswi Muslim				1
Komite		13 Oktober 2017	1	
Wakasek Kesiswaan		16 Oktober 2017	1	
Pembina Osis			1	
Tim Bimbingan dan Konseling	17 Oktober 2017		1	
		1	1	
Kasubag TU	SMAN 1 Jampang Kulon		1	
Komite/Tomas Jampang Kulon		17 Oktober 2017	1	
Ketua OSIS			1	
Ketua MPK			1	
Ketua DPK		16 Oktober 2017	1	
Wakil Rohis				1
Ketua Rohis				1
Siswa Katolik		18 Oktober 2017	1	
Kepala Sekolah		20 Oktober 2019	1	
Wakasek Kesiswaan		19 Oktober 2017	1	
Wakasek Pesantren & Keagamaan	19 Oktober 2017	1		
Pengurus MPK & OSIS	19 Oktober 2017	12	28	
Ketua Komite/pendiri sekolah	20 Oktober 2019	1		
Komite Sekolah	MAN 3 Sukabumi (Surade)		1	
Siswi bercadar				1
Siswi bercadar				1
Siswa yang aktif OUC			1	
Siswa yang aktif OUC				1
Siswi bercadar		20 Oktober 2019		1
Penanggung jawab & pengurus Asrama pesantren			1	
			1	

## Kota Surakarta

Jabatan	Asal Lembaga	Tanggal	Jenis Kelamin (Jumlah)		
			Laki-laki	Perempuan	
Waka Kesiswaan	SMAN 3 Surakarta	17 Oktober 2017	1		
Rokris			1		
Guru Pembina Rohis			1		
Siswa Etnis Arab				1	
Kepala Sekolah			1	1	
Guru Pembina Rokris			1		
Rohis Putri		18 Oktober 2017		1	
OSIS			1	1	
			1	1	
Rokris				1	
MPK			1	1	
Rohis			1		
Siswa Etnis Tionghoa				1	
OSIS			SMAN 1 Surakarta	5 Oktober 2017	1
Pembina Rohis/Guru PAI	7 Oktober 2017	1			
Rokat				1	
Kepala Sekolah	5 Oktober 2017			1	
Rohis Putri	7 Oktober 2017			1	
MMPK	5 Oktober 2017	1			
Rokris	7 Oktober 2017			1	
Komite				1	
Waka Kesiswaan	4 Oktober 2017	1			
Rohis Putra	7 Oktober 2017	1			
Pembina Rokris/Guru PAKristen	7 Oktober 2017	1			
Kepala Sekolah	SMAN 6 Surakarta	20 Oktober 2017		1	
Waka Kesiswaan		11 Oktober 2017		1	
Guru PAI					1
Pembina Rokot/Guru PAKatolik		13 Oktober 2017		1	
MPK		14 Oktober 2017		1	
Pembina Rokris/Guru PAKristen		13 Oktober 2017		1	
OSIS		14 Oktober 2017	1		
Rohis Putra			1		
Rohis Putri		20 Oktober 2017		1	
Rokris				1	
Rokat		13 Oktober 2017		1	
Rokat				1	
Rokris		SMAN 5 Surakarta	3 Oktober 2017		1
Rohis				1	
Pembina Rohis/Guru PAI	21 Oktober 2017		1		
Waka Kesiswaan	3 Oktober 2017			1	
OSIS	3 Oktober 2017			1	
Kepala Sekolah			1		
Pembina Rokot	21 Oktober 2017			1	
Pembina Rokris			1		

Jabatan	Asal Lembaga	Tanggal	Jenis Kelamin (Jumlah)			
			Laki-laki	Perempuan		
Rohis Putra	MAN 1 Surakarta	19 Oktober 2017	1			
Organisasi Pelajar Program Keagamaan (OPPK)		18 Oktober 2017		1		
					1	
					1	
Organisasi Pelajar Boarding School (OPBS)			1			
Pembina OPPK dan OPBS			1			
Pembina OSIS		29 Oktober 2017			1	
Rohis Putri					1	
OSIS						1
						1
						1
						1
Waka Kesiswaan Kepala Sekolah, Pjs MAN 1 Solo	12 Oktober 2017	1				
Waka Kesiswaan Guru PPKn/Pembina Pramuka	6 Oktober 2017	1				
Guru Fiqih	12 Oktober 2017		1			
BK		1				
Rohis Putra	8 Oktober 2017	1				
Siswa Boarding School	MAN 2 Surakarta	6 Oktober 2017		1		
OSIS				1		
Rohis Putra (Periode 2016/2017)		9 Oktober 2017	1			
Siswa (Menggunakan Cadar)		8 Oktober 2017		1		
				1		
Siswa Reguler	9 Oktober 2017		1			
			1			

### ***Kota Denpasar***

Jabatan	Asal Lembaga	Tanggal	Jenis Kelamin (Jumlah)	
			Laki-laki	Perempuan
Pengawas PAI SD-SMA Kota Denpasar	Kemenag	20 Oktober 2017	1	
Pengawas Madrasah Kota Denpasar	Kemenag			1
Pengawas Sekolah Kota Denpasar	Dinas Pendidikan	20 Oktober 2017	1	
Ketua	PW Muhammadiyah Bali	17 Oktober 2017	1	
	PW Nahdatul Ulama Bali		1	
	MUI Kota Denpasar		1	
	Aktivis kebhinekaan, pemilik Fair Trade	18 Oktober 2017	1	

Jabatan	Asal Lembaga	Tanggal	Jenis Kelamin (Jumlah)	
			Laki-laki	Perempuan
Kepala Madrasah	Aktivis perempuan	20 Oktober 2017		1
Waka Kesiswaan	MA Tawakal	19 Oktober 2017	1	
Ketua Osis			1	
Bid. Kerohanian				1
Siswa non-osis				1
Orang Tua Siswa				1
Kepala madrasah al-Ma'ruf	MA Al-Ma'ruf	3 Oktober 2017	1	
Pembina Osis			1	
Ketua osis				1
Siswa non-osis				1
Orang Tua Siswa				1
Kepala Sekolah	SMAN 3 Denpasar	8 Oktober 2017	1	
Waka Kesiswaan			1	
Ketua osis			1	
Siswa non-osis			1	
Siswa muslim			1	
Ketua Komite			19 Oktober 2017	1
Waka kesiswaan	SMAN 4 Denpasar	11 Oktober 2017	1	
Ketua osis				1
Siswa non-osis				1
Krisma, Siswa muslim				1
Ketua Komite		19 Oktober 2017	1	
Kepala sekolah SMAN 8 Dps	SMAN 8 Denpasar	17 Oktober 2017	1	
Waka Kesiswaan			1	
Ketua osis			1	
Bid. Ketakwaan			1	
Ketua MPK, siswa muslim				1
Kepala sekolah	SMAN 2 Denpasar	12 Oktober 2017	1	
Waka Kesiswaan				1
Wakil Komite			1	
Ketua osis			1	
Wakil osis				1
Bid. Ketakwaan				1
Ketua MPK				1
Rismanda, siswa muslim				1
Guru Agama Islam		18 Oktober 2017	1	
Guru Agama Islam	SMAN 7 Denpasar	20 Oktober 2017	1	

### ***Kota Tomohon***

Jabatan	Asal Lembaga	Tanggal	Jenis Kelamin (Jumlah)	
			Laki-laki	Perempuan
Kepala Sekolah	SMAN 1 Tomohon	11 Oktober 2017		1
Waka Kesiswaan		11 Oktober 2017		1
OSIS		11 Oktober 2017	2	3
Non-OSIS		11 Oktober 2017		2
Guru Agama Katolik		11 Oktober 2017		1
Guru Agama Islam		7 Oktober 2017		1
Siswa Katolik		11 Oktober 2017	1	1
Siswa Muslim		11 Oktober 2017		2
Komite Sekolah		7 Oktober 2017	1	
Orang Tua Siswa		15 Oktober 2017	1	
		15 Oktober 2017	1	

Jabatan	Asal Lembaga	Tanggal	Jenis Kelamin (Jumlah)	
			Laki-laki	Perempuan
Kepala Sekolah	SMAN 2 Tomohon	16 Oktober 2017	1	
Waka Humas (Guru Katolik)		16 Oktober 2017		1
Waka Kesiswaan		16 Oktober 2017	1	
OSIS		18 Oktober 2017	2	1
Siswa Katolik non-OSIS		18 Oktober 2017		2
Guru/wali murid	SMA Kosgoro	18 Oktober 2017		1
Kepala Sekolah		6 Oktober 2017	1	
Waka Kesiswaan		5 Oktober 2017		1
Komite Sekolah		6 Oktober 2017	1	
OSIS		5 Oktober 2017	1	
No-OSIS		5 Oktober 2017		1
Siswa Muslim (Non-OSIS)		5 Oktober 2017		1
Guru agama Islam		6 Oktober 2017		1
Kepala sekolah	SMA Kristen 1	10 Oktober 2017	1	
Waka Kesiswaan		6 Oktober 2017	1	
OSIS		6 Oktober 2017		1
Non-OSIS (advent)		6 Oktober 2017	1	
Siswa Muslim		6 Oktober 2017	1	
Komite Sekolah	MA Mardhatillah	12 Oktober 2017	1	
Kepala Sekolah		3 Oktober 2017	1	
Pembina Asrama		13 Oktober 2017		1
Waka Kesiswaan		13 Oktober 2017	1	
Yayasan (Komite Sekolah)		10 Oktober 2017	1	
OSIS (Dewan Santri)		3 Oktober 2017		1
Non-OSIS		3 Oktober 2017		1
Kepala Sekolah	SMA Lentera Harapan	13 Oktober 2017		1
Waka Kesiswaan		12 Oktober 2017	1	
Komite Sekolah		13 Oktober 2017		1
OSIS		12 Oktober 2017	1	1
Siswa non-OSIS (Katolik)	SMA St. Lokon	12 Oktober 2017		1
Direktur Operasional		17 Oktober 2017	1	
Yayasan		17 Oktober 2017	1	
Direktur Finansial Yayasan		17 Oktober 2017	1	
Pembina Asrama		17 Oktober 2017	1	
Waka Kesiswaan		17 Oktober 2017	1	
OSIS		17 Oktober 2017	1	1
Non-OSIS (beragama Hindu, Budha, Konghucu, Kristen)	GMIM	17 Oktober 2017	2	2
Kepala Sekolah		17 Oktober 2017	1	
Pendeta/Ketua Umum	Mawale Movement	7 Oktober 2017		1
Peruti		8 Oktober 2017	1	
Aktivis	FKUB Tomohon	8 Oktober 2017	1	
Ketua		6 Oktober 2017	1	
Pengawas Madrasah	Kemenag	9 Oktober 2017	1	
Kepala		20 Oktober 2017		1
Sekretaris	Dinas Pendidikan	20 Oktober 2017	1	
Kabid PSMA		20 Oktober 2017	1	
Ketua	MUI	15 Oktober 2017	1	
Dosen	Univ. Kristen Indonesia Tomohon	7 Oktober 2017	1	
Ketua	Yayasan Mujahidin	14 Oktober 2017	1	

# Maarif Institute For Culture And Humanity

Statuta pendirian MAARIF Institute for Culture and Humanity (2002) menyatakan komitmen dasar lembaga ini sebagai gerakan kebudayaan dalam konteks keislaman, kemanusiaan dan keindonesiaan. Tiga area ini merupakan hal pokok dan terpenting dalam perjalanan intelektualisme dan aktivisme Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan mantan Presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP).

Keberadaan MAARIF Institute merupakan bagian tidak terpisahkan dari jaringan gerakan Pembaruan Pemikiran Islam (PPI) yang ada di Indonesia dewasa ini. Gerakan pembaruan merupakan sebuah keniscayaan sekaligus tuntutan sejarah. Kompleksitas masalah kemanusiaan modern berikut isu-isu kontemporer yang mengikutinya seperti demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, gender, dialog antar-agama dan peradaban serta sederet isu lainnya menuntut pemahaman dan penjelasan baru dari ajaran Islam.

Disadari pula bahwa program dan aktivitas MAARIF Institute tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan sosiologis persyarikatan Muhammadiyah, meskipun tidak ada hubungan struktural dengan organisasi ini dan tanpa mengurangi komitmen untuk terus memperluas radius pergaulan lembaga. Muhammadiyah, menurut banyak kalangan, sering dianggap sebagai representasi gerakan modernis-moderat di Indonesia yang aktif mempromosikan pemikiran-pemikiran Islam, berdakwah dan melakukan aksi-aksi sosial. Oleh karena itu, memperjuangkan arus pembaruan pemikiran Islam dalam konteks gerakan Muhammadiyah merupakan perhatian utama MAARIF Institute sebagai bagian dari upaya pencegahan sekaligus memperkuat elemen moderat (empowering moderates) di Indonesia.

# **Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta**

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) adalah lembaga penelitian otonom di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Awalnya, lembaga ini didirikan pada 1 April 1995 bertujuan untuk mengajak sejumlah sarjana dari berbagai macam disiplin ilmu dan latar belakang untuk mengadakan beberapa kegiatan penelitian, pengkajian, pelatihan, dan penyebaran informasi khususnya tentang Islam Indonesia dan Islam Asia Tenggara pada umumnya. Saat ini PPIM merupakan lembaga kajian strategis berbasis universitas di Indonesia yang berpengalaman di bidang kajian agama dan masalah sosial dengan publikasi dan jaringan yang luas, baik di dalam maupun luar negeri.

Kelahiran PPIM dan semangat yang dibawanya merupakan respon terhadap wacana akademis yang, hingga pada dasawarsa akhir 1980-an dan awal tahun 1990-an, masih menganggap Islam di Indonesia sebagai isu “pinggiran.” Islam Indonesia dan Asia Tenggara kurang dilirik karena dianggap bukan bagian penting atau bahkan terlepas dari mainstream Islam seperti yang berkembang di Arab, Afrika Utara, Iran bahkan negara-negara sub-continent. Islam Asia Tenggara yang sinkretik, seperti yang dikesankan oleh Clifford Geertz, dianggap sebagai “bukan Islam yang sebenarnya”. Hal itu juga diperburuk dengan ketidakfahaman sebagian masyarakat internasional kala itu tentang Islam di Indonesia dan Asia Tenggara akibat berbagai faktor. Misalnya, pertama, kurangnya penelitian-penelitian yang mendalam tentang keberagaman Islam di Indonesia oleh sarjana-sarjana Muslim Indonesia sendiri yang tentu lebih memahami tentang keislaman di wilayahnya. Kedua, mungkin saja sudah banyak studi-studi yang telah dilakukan, namun hasil studi tersebut tidak banyak dipublikasikan dan kurang dikomunikasikan dengan dunia internasional.

Padahal, sebagaimana diungkapkan Anthony Reid, dilihat dari sudut pandang apa pun, Islam di Indonesia dan Asia Tenggara sangat menarik untuk dikaji. Jumlah penduduk Muslim Asia Tenggara yang besar menjadi salah satu kekuatan Islam di wilayah ini. Secara geografis, Indonesia dan Asia Tenggara, yang berbasis kepulauan dengan tanah yang subur, telah turut mempengaruhi corak keberagaman masyarakatnya. Kecenderungan masyarakat agraris yang lebih mengutamakan solidaritas kelompok-kelompok sosial menyebabkan mereka lebih toleran atau terbuka dengan

perbedaan-perbedaan. Hal itu menyebabkan Islam Indonesia dan Asia Tenggara lebih siap untuk berhadapan dengan perbedaan budaya, etnis, agama, dan gagasan- gagasan baru yang disemaikan. Perkembangan Islam Indonesia dan Asia Tenggara dengan corak tersendiri dan fase perkembangan yang begitu mengesankan sesungguhnya telah menarik perhatian banyak sarjana. Kebangkitan Islam di wilayah ini yang ditandai dengan semaraknya praktek keagamaan serta menjamurnya tulisan-tulisan sarjana Islam pribumi tentang reaktualisasi maupun transformasi agama ke dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi, ditambah dengan penguatan demokrasi, gender, HAM, dan gagasan tentang Islam dan civil society, menggambarkan wacana Islam yang berkembang secara dinamis.

Belakangan, khususnya pasca tragedi 11 September, wacana Islam di Indonesia turut berubah drastis. Berbagai peristiwa teror, termasuk Bom Bali tahun 2002, turut membawa Islam di Indonesia ke dalam pusaran wacana Islam dan terorisme global. Ketika kecenderungan konservatisme dan radikalisme agama menguat, masyarakat Muslim di Indonesia dihadapkan dengan persoalan pelik agama dan perannya di ruang publik. Karena itu, adalah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan sebuah lembaga yang mampu melakukan penelitian serta studi intensif dan berkelanjutan tentang fenomena dan dinamika Islam di Indonesia dan Asia Tenggara. Untuk itulah Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hadir.

Kini, menginjak usianya yang keduapuluh, PPIM fokus melakukan kajian-kajian strategis tentang kehidupan dan pendidikan keagamaan untuk mempengaruhi kebijakan dan perubahan masyarakat di Indonesia. Di samping itu, PPIM tetap berkomitmen untuk mengembangkan dan menyebarkan kekayaan tradisi Islam Indonesia di berbagai tingkatan untuk memperkaya nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan dalam konteks yang lebih luas.

# Tentang UNDP

UNDP bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk membantu mewujudkan bangsa yang mampu bertahan di masa sulit, serta mendorong dan melanjutkan pertumbuhannya demi perbaikan kualitas hidup masyarakat. UNDP hadir di 177 negara dan wilayah di dunia, memberikan perspektif global dan lokal untuk memberdayakan manusia dan membangun bangsa yang tangguh.